UNIVERSITAS INDONESIA

ANTARA JEMAAH DAN PARTAI POLITIK:
DINAMIKA HABITUS KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM ARENA POLITIK INDONESIA PASCA PEMILU 2004

DISERTASI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Sosiologi

ARIEF MUNANDAR
0806 402 805

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA SOSIOLOGI

DEPOK
JULI 2011

Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu.
Teruslah berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu.
Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu.
Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu.
Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu lesu menyertaimu.

– Ustadz Rahmat Abdullah (alm.) –

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa disertasi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unversitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Depok, 5 Juli 2011

Arief Munandar
0806 402 805

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Depok, 5 Juli 2011

Arief Munandar
0806 402 805

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Arief Munandar**
Program Studi	: Pascasarjana Sosiologi
Departemen	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya	: Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif *(Non-exclusive Royalty Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"ANTARA JEMAAH DAN PARTAI POLITIK: DINAMIKA HABITUS KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI ARENA POLITIK INDONESIA PASCA PEMILU 2004"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Juli 2011

Yang menyatakan

Arief Munandar

KATA PENGANTAR

Disertasi ini dimulai dengan cinta, dijalani dengan cinta, dan kemudian juga diselesaikan dengan cinta. Utamanya adalah cinta kepada Jemaah Tarbiyah yang dikenal peneliti lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Momen-momen *halaqah* di sebuah pojok di lantai dua Mesjid ARH UI yang di awal tahun 1990 belum semegah sekarang tidak mungkin dilupakan. Ketika itu penulis berkenalan dengan materi-materi pembinaan, skema-skema bertuliskan huruf Arab, dengan kode nomor surat dan ayat al Qur-an di sisinya, yang ternyata namanya *rasmul bayan.* Penulis disadarkan bahwa beragama itu artinya mencintai kehidupan, yang mesti dimanifestasikan dengan bekerja yang memberikan manfaat bagi peradaban. Perjalanan bersama Jemaah Tarbiyah yang kemudian bersalin rupa menjadi PK dan PKS tidaklah sepi dari pasang-surut. Ada saat-saat di mana kejenuhan menyergap dan memberati langkah. Namun alhamdulillah, cinta kembali meneguhkan hati untuk tetap tegar bersamanya.

Lalu cinta pula yang mengiringi potongan-potongan gagasan awal yang berlompatan dari benak penulis ke *keyboard* komputer pada saat embrio yang paling awal dari proposal penelitian ini mulai dituliskan, lalu revisi demi revisi yang ketika itu rasanya tak kunjung selesai. Kemudian momen-momen krusial itu datang berturut-turut. Ujian kualifikasi yang berhasil penulis selesaikan pada tanggal 23 April 2010. Ujian Proposal Penelitian yang digelar para tanggal 24 Juni 2010. Selanjutnya Ujian Pra-Promosi pada tanggal 23 Juni 2011. Dan Ujian Promosi, 5 Juli 2011.

Tentu cinta yang termulia adalah dari dan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Terimakasih ya Rabbi atas limpahan cinta ini. Memang bukan yang kuinginkan yang Kau berikan. Ketika kuminta padaMu kekuatan, Kau berikan padaku jalan berliku dan sakit yang mendera begitu rupa, sehingga perjalanan disertasi ini juga dihiasi dengan beberapa waktu terbaring di rumah sakit, meninggalkan pekerjaan tetap untuk memastikan fokus yang terjaga, dan malam-malam yang panjang dengan hanya sedikit waktu memicingkan mata. Tapi kini kuyakin, Kau berikan padaku yang kubutuhkan: penguat jiwa agar aku menjadi hamba yang pandai bersyukur karena semua ternyata sungguh indah pada saatnya.

Kemudian ada cinta dari almarhumah Mama Tasmiyeti yang luar biasa. Darinya peneliti belajar tentang keteguhan dan kekuatan. Kenangan mendalam pada Mama yang selalu tersenyum dan optimis, bahkan ketika jaringan kanker serviks stadium lanjut menggerogoti tubuhnya, membuat peneliti malu untuk berkeluh kesah. Kalaulah kemudian disertasi ini membawa manfaat dan kebaikan, semoga ia dicatat Yang Maha Lembut sebagai untaian doa bagi Mama di alam baka. Dari Papa Dasril, sebagian cinta itu adalah untaian dzikir tak terputus, lantunan ayat-ayat Qur-an yang lirih, dan doa yang berlimpah. Semuanya menguatkan peneliti ketika harus bertarung melawan bosan dan kantuk di malam-malam yang sepertinya tak berujung, mengetikkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam disertasi ini. Terimakasih Ma, terimakasih Pa. Terimakasih pula untuk almarhum Apah Amarullah dan Amak Rahmaniah. Doa penulis untuk kalian semua.

Sulit bagi penulis membayangkan disertasi ini bisa diselesaikan tanpa cinta Dr. Fitriany, istri penulis yang setia mendampingi, bahkan pada saat-saat yang paling berat sekalipun. Ketika penulis terbaring sakit. Ketika penulis kehilangan kesabaran. Ketika rasa putus asa menyergap dan melumpuhkan. Dan maaf, ketika uang di rekening bank tak cukup untuk melunasi biaya kuliah. Terimakasih Umi. Semoga semua jadi catatan kebaikan yang berlimpah di sisiNya. Lalu Fathimah Shafiyyah, putri semata wayang penulis yang memberikan cinta dengan caranya sendiri. Nak, mengingat kamu yang membuat Abi kembali bangkit dan bersemangat, bahkan ketika melangkahpun rasanya tak lagi sanggup.

Dan akhirnya, Allahu Akbar! Dengan izinMu disertasi ini selesai. Alhamdulillah Allah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat, yang tanpa mereka disertasi ini tidak akan terwujud. Dua orang yang berjasa sangat besar adalah Promotor, Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, dan Ko-Promotor, Dr. Meuthia Gani Rochman. Ketika gagasan penulisan disertasi ini masih belum jelas wujudnya, Mas Iwan memberikan buku "From Mobilization to Revolution" (Tilly, 1978), dan Mbak Meta memberikan artikel "Symbolic Power and Organizational Culture" yang berbicara tentang budaya oganisasi sebagai *a negotated order* (Hallett, 2003). Dari kedua sumber itulah penulis mendapatkan *insight* tentang teori tindakan kolektif (Tilly) dan pertarungan simbolik (Boudieu) yang kemudian menjadi tulang punggung disertasi ini. Menjadi mahasiswa bimbingan mereka berdua adalah kehormatan dan berkah. Mas Iwan dengan cermat memberikan masukan tertulis di tiap tahap perkembangan penulisan disertasi ini. Sementara Mbak Meta "menghujani" penulis dengan berbagai artikel yang memperkaya bangunan kerangka teoretik yang penulis gunakan sebagai pijakan. Oh ya, yang juga tak mungkin penulis lupakan, Mas Iwan dan Mbak selalu mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan. Bahkan suatu hari Mbak Meta mengirim email berisi lantunan musik yang sungguh menenangkan. Ucapan terimakasih dan salam takzim saya untuk kedua guru saya yang luar biasa ini.

Kemudian ada Dr. Anies Rasyid Baswedan sebagai penguji ahli eksternal dan Francisia SSE Seda, Ph.D sebagai penguji ahli internal. Terimakasih Pak Anies. Sungguh sebuah kehormatan Pak Anies bersedia terlibat dalam perjalanan disertasi ini. Terimakasih pula telah mengingatkan bias yang bersumber dari *standpoint* peneliti sebagai bagian dari Jemaah Tarbiyah/PKS yang menjadi subjek penelitian. Momen-momen ujian bersama Pak Anies adalah peristiwa yang sangat membanggakan bagi penulis. Lalu harus penulis katakan bahwa Mbak Ery Seda adalah guru teori sosiologi yang tak tergantikan. Dari Mbak Ery penulis mendapatkan *insight* bagaimana membangun kerangka teori yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Mbak Ery pula penulis belajar bahwa setiap ilmu memiliki pakem masing-masing. Tidak lulus dalam kesempatan pertama Ujian Kualifikasi Teori Sosiologi menyadarkan penulis bahwa diperlukan ketangguhan yang tidak main-main untuk belajar menjadi seorang sosiolog. Yang juga tidak kecil artinya adalah momen-momen diskusi informal yang sungguh mencerahkan. Salah satu yang penulis ingat adalah diskusi tentang teori habitus-arena dan pertarungan simbolik Bourdieu, beberapa saat sebelum mengikuti Ujian Seminar Hasil Penelitian. Terimakasih Mbak Ery.

Ucapan terimakasih berikutnya harus penulis sampaikan kepada Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI, Dr. Linda Darmajanti, MT dan Ketua Program Pascasarjana Sosiologi, Lugina Setyawati, Ph.D. Kedua bukan hanya berperan sebagai penguji. Dari keduanya penulis belajar tentang seluk-beluk metodologi kualitatif yang ternyata sama sekali tidak semudah yang semula penulis bayangkan. Khusus untuk Mbak Lugina, penulis juga harus berterimakasih untuk dua hal. Pertama, kesediaan Mbak Lugina memeriksa dengan detil, kalimat demi kalimat, tabel demi tabel, dari draft disertasi penulis, lalu menandainya dengan kertas warna-warni yang sangat mengesankan. Kedua, kisah Mbak Lugina yang tetap mampu menyelesaikan Ph.D di negeri orang walaupun sempat diuji dengan penyakit kanker. Mbak, kisah itu yang membuat saya malu untuk menyerah. Juga ada kata-kata Mbak Linda pada kuliah-kuliah awal matrikulasi Metodologi Penelitian Kualitatif yang tidak mungkin saya lupakan, “Buat saya jatuh-bangunnya saya berproses menyelesaikan kuliah jauh lebih bermakna ketimbang disertasi yang kemudian saya selesaikan dan gelar yang saya raih”. Subhanallah!

Berdosa rasanya jika saya tidak secara khusus berterimakasih pada guru saya, Mas Ganda Upaya, MA. Jasa terbesar Mas Ganda adalah membantu saya “berdamai” dengan sosiologi, dan bahkan kemudian mencintai ilmu ini. Di awal kuliah di Program S3 Sosiologi, ketika ilmu ini terasa begitu kusut dan kisruh, dalam sebuah sesi kuliah Mas Ganda mengatakan, “sosiologi itu untuk dipahami, bukan diimani”. Sontak penulis sadar, persoalannya bukan bahwa kita harus setuju dengan berbagai teori yang dipelajari, namun bagaimana kita “menaklukkan” dan kemudian menggunakannya. Terimakasih Mas Ganda. Ucapan Mas Ganda waktu itu membuat sosiologi menjadi jauh lebih ramah dan menyenangkan. Oh ya, terimakasih pula untuk kesempatan mengopi koleksi ratusan artikel sosiologi yang ada di harddisk komputer Mas Ganda.

Guru-guru di Jemaah Tarbiyah, para ustadz dan ustadzah yang penulis muliakan, juga punya andil tak terkira dalam hadirnya karya ini. Salam takzim dan doa penulis untuk mereka. Ustadz Abu Ridho yang sikap lurusnya membuat penulis meneteskan air mata. Ustadz Musholli yang mengajarkan tentang sabar dalam berjemaah. Ustadz Muhsinin yang memberikan banyak *insight* tentang *siyasah syar’iyyah.* Juga untuk almarhumah Ustadzah Yoyoh Yusroh dan Mbak Sitaresmi Sukanto yang membuat penulis merasa begitu dekat dengan sosok Ustadz Hilmi Aminuddin, pendiri dan Ketua Majelis Syura PKS, walaupun belum berkesempatan mewawancari beliau secara langsung. Lalu Dr. Nursanita Nasution, yang biasa dipanggil Kak Butet, sosok *akhwat* yang sejak perkenalan pertama beberapa tahun yang lalu membuat penulis kagum pada kecerdasan, kekritisan dan keberaniannya. Dalam konteks penelitian ini Kak Butet membantu menghadirkan “gambar besar” tentang Jemaah Tarbiyah/PKS, dan membuka mata penulis untuk menemukan “potongan-potongan kecil” yang dapat melengkapinya. Ustadz Tifatul, terimakasih sudah bersedia diganggu, setidaknya dua kali, di kantor Kemeninfo dan di rumah Ustadz yang tenang dan sederhana di Komplek Timah. Ustadz Anis Matta, Ustadz Dr. Surachman Hidayat, Ustadz Untung Wahono, Dr. Mardani Ali Sera, para pejuang yang berjibaku menjaga kokohnya jemaah ini, *syukran jazakallah khair*, telah berkenan menggenapi sejumlah informasi teramat penting tentang PKS. Kemudian, Ustadz Mashadi yang bertutur tentang Jemaah Tarbiyah/PKS dari sisi yang berbeda. Terimakasih, Ustadz telah

sangat membantu penulis membangun gambaran yang lebih lengkap dan adil tentang subjek penelitian ini, walaupun dalam beberapa hal penulis berbeda pendapat dengan Ustadz. Lewat Anda semua mata dan hati penulis terbuka tentang dakwah yang mulia ini.

Harus ada tempat khusus dalam lembaran-lembaran ini yang penulis dedikasikan untuk guru dan sahabat, Bapak Taufik Bahaudin. Pak Taufik, terimakasih telah mengajarkan, dalam artian yang sedemikian dalam, tentang tanggungjawab, disiplin, kerja keras, dan berkontribusi. Terimakasih pula untuk Bunda Neno Warisman dan sahabat-sahabat di Talkshow Untukmu Indonesia TVRI. Jujur, setiap Bunda Neno berkata di episode demi episode dalam setahun terakhir ini, "kandidat Doktor Sosiologi dari UI", penulis terpacu untuk segera menghilangkan kata "kandidat" itu.

Penulis merasa berdosa karena masih banyak yang belum disebutkan, padahal jasa mereka luar biasa. Mas Andi Rahman yang membantu penulis memahami Bourdieu. Mas Andi, tesis Anda tentang kiprah para aktifis Jemaah Tarbiyah dalam demokrasi lokal di Banten sangat membantu penulis memahami bagaimana teori *habitus-field* Bourdieu yang tak sederhana ini diaplikasikan di arena politik. Juga tak lupa terimakasih yang tulus untuk sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, juga Mbak Lidya Triana, Pak Santoso, Mbak Rini, Mas Agus, dan sederet nama lainnya yang tak kalah luar biasanya. Juga sahabat-sahabat sejak pertama berkenalan dengan *tarbiyah* lebih dari dua puluh tahun yang lalu: Bang Andi, Dr. Zulkieflimansyah, dan Fahri Hamzah. Demikian pula sahabat-sahabat di PPSDMS Nurul Fikri: Bachtiar Firdaus, Muhammad Ihsan, Adi Wahyu Adji dan segenap pejuang peradaban Lentera 20. *Jazakallah khairan jaza*. Terimakasih. Dalam disertasi ini ada andil Anda semua.

Depok, Juli 2011

Penulis,

Arief Munandar

ABSTRAK

Nama : Arief Munandar

Program Studi : S3 Sosiologi, Departemen Sosiologi, FISIP Unversitas Indonesia

Judul : **Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004**

Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokkan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004. Pada "sisi keras" *(hard-side)*, dinamika tersebut digambarkan sebagai kompetisi antara kelompok-kelompok/faksi-faksi untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, yang berimplikasi pada terbentuknya struktur yang cenderung oligarkis. Sementara pada "sisi lunak" *(soft-side)*, dinamika tersebut ditampilkan sebagai pertarungan simbolik berupa dialektika antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy* dalam rangka membangun sebuah *doxa* yang baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia.

Kata kunci: **PKS, Jemaah Tarbiyah, habitus, arena *(field)*, tindakan kolektif, kekuasaan simbolik *(symbolic power)*, budaya organisasi, demokratisasi, deoligarkisasi, desakralisasi organisasi.**

ABSTRACT

Name : Arief Munandar

Program : S3 Sociology, Department of Sociology,
Faculty of Social and Political Sciences, Unversitas Indonesia

Title : **Between Jamaah and Political Party:
The Dinamics of Prosperous Justice Party (PKS) Cadres' Habitus in Indonesia Political Field After 2004 Election**

This dissertation is the result of a qualitative research in the form of case study which identified the pattern of grouping/factionalisation in PKS, and described how those groups/factions work within the internal dynamics of PKS, especially after 2004 election. On the "hard-side" the dynamics is described as a competition among groups/factions to build efficient relationship with the highest authority holder that implies the creation of oligarchic structure. While on the "soft -side" the dynamics is shown as a symbolic contestation, a continous dialectic between heterodoxy and orthodoxy, in order to build a new doxa. The result of this research recommends PKS to apply democratisation, de-oligarchy-sation, and organisational desacredisation to improve its objective position in Indonesian political field.

Key words: **PKS, Jamaah Tarbiyah, habitus, field, collective action, symbolic power, organisational culture, democratisation, de-oligarchy-sation, organisational desacredisation.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Istilah	xiii
Bab 1: Pendahuluan	**1**
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Penelitian	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Signifikansi Penelitian	10
Bab 2: Kerangka Konseptual	**13**
2.1. Kerangka Teoretik	13
2.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi	13
2.1.2. Tindakan Kolektif dan Kontestasi untuk Membentuk Negotiated Order	20
2.1.3. Identitas dan Tatanan Organisasi sebagai Hasil Dinamika Internal	36
2.2. Telaah Beberapa Studi Terdahulu	42
2.2.1. Partai Politik Islam di Arena Politik Indonesia: PKS dan PPP	42
2.2.2. Gerakan Islam di Arena Politik Internasional	50
2.2.3. Partai Politik di Negara-Negara Demokrasi Baru	53
2.3. Pemetaan Kebijakan	54
2.3.1. Undang-Undang Dasar 1945	54
2.3.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	54
2.3.3. Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera	55
2.3.4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera	56
2.4. Model Teoretik Disertasi	58
Bab 3: Metodologi Penelitian	**60**
3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian	60
3.2. Posisi dan Peran Peneliti	61
3.3. Pengumpulan Data	62
3.4. Analisis dan Penyajian Data	67
3.5. Strategi Validasi Data	68
3.6. Struktur Penulisan Disertasi	68
3.7. Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi	69
3.8. Pembatasan dan Keterbatasan Penelitian	70

Bab 4: Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS **73**
4.1. Eksistensi Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS 73
4.2. Anatomi dan Faktor Pembentuk Kelompok *(Grouping Factors)* 83
4.2.1. "Kelompok Idealis" dan "Kelompok Pragmatis" 84
4.2.2. "Faksi Sekjen" versus "Faksi Penantang" 100
4.2.3. Kelompok yang Apatis 103
4.2.4. Kelompok yang Meninggalkan Partai 107
4.2.5. "Kelompok Koservatif" versus "Kelompok Progresif" 119
4.2.6. Pengelompokkan Berdasarkan Sikap terhadap Sumber Daya Strategis 124
4.3. Implikasi Faksionalisasi dan Konflik 126
4.4. Diskusi 133
4.4.1. Posisi PKS dalam Tipologi Partai Politik 133
4.4.2. Pengelompokkan, Faksionalisasi, dan Konflik Internal di PKS 144

Bab 5: Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS **174**
5.1. Tarbiyah sebagai Proses Membangun Habitus Kolektif 174
5.1.1. Gambaran Umum Proses Tarbiyah 175
5.1.2. Motivasi Bergabung dan Dinamika Internal Individu dalam Jemaah Tarbiyah 185
5.1.3. Realita Kondisi Tarbiyah dalam Pandangan Para Aktor 194
5.2. Potret Budaya Organisasi PKS 205
5.2.1. Nuansa Tasawuf/Sufi dalam Budaya PKS 205
5.2.2. Kecenderungan Menghindari Perdebatan dan Diskusi 210
5.2.3. Penghormatan yang Tinggi terhadap *Murabbi* dan Ustadz 212
5.2.4. *Conformity* dan *Compliance* 212
5.2.5. *Ta'awun* (Saling Menolong) 222
5.2.6. Catatan tentang Budaya Organisasi PKS 226
5.3. Majelis Syura dalam Tradisi PKS 228
5.3.1. *Syura* dalam Islam 228
5.3.2. *Syura* dan Majelis Syura di PKS 230
5.3.3. Peran Sentral Ustadz Hilmi Aminuddin dan Dinamika Majelis Syura 233
5.4. Tiga Aktor di Kepemimpinan Puncak PKS 242
5.4.1. Ustadz Hilmi Aminuddin, *Murraqib 'Am* 242
5.4.2. HNW, Presiden PKS di Masa Kritis 258
5.4.3. AM, Sekjen PKS Empat Periode 263
5.4.4. Catatan tentang Regenerasi Kepemimpinan di PKS 272
5.5. Dari Jemaah Menjadi Partai Politik 276
5.5.1. Antara Memanfaatkan Momentum dan Membangun Kesempurnaan 276
5.5.2. Antara yang Tetap dan yang Berubah 280
5.5.3. Dinamika Internal Jemaah Tarbiyah setelah Menjadi Partai Politik 285
5.5.3.1. Perubahan Perilaku Individu 290
5.5.3.2. Perubahan Perilaku Politik 293

5.5.3.3. Deideologisasi/Ideologi yang Cair 294
5.5.3.4. Pragmatisme Finansial 295
5.5.3.5. Penyebab Perubahan Perilaku 303
5.5.4. Wacana PKS sebagai “Partai Terbuka” 308
5.5.5. Dakwah Kampus sebagai Cermin Dinamika Internal Partai 315
5.6. Diskusi 321
5.6.1. Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS 321
5.6.2. Gejala-Gejala Oligarki di PKS 331

Bab 6: Kualitas Organisasi dan Kinerja PKS 341
6.1. Kualitas Organisasi 341
6.1.1. Konsolidasi Politik, Organisasi, dan Basis Massa 342
6.1.2. Kinerja di Ranah Publik 343
6.1.3. Kualitas Eksekutif Partai di Pusat 350
6.1.4. Penerapan Manajemen Moderen 351
6.1.5. Kemampuan Menggerakkan Wilayah dan Daerah 353
6.1.6. Kemampuan Komunikasi Publik 353
6.1.7. Kecepatan Respon 355
6.1.8. *Staffing* Berbasis Kriteria Rasional 355
6.1.9. Kemandirian Ekonomi 359
6.1.10. Ketokohan Publik 360
6.2. Kiprah PKS dalam Pemilukada: Kasus Kabupaten X 363
6.3. Membaca 1999, 2004, 2009, dan Meneropong 2014 368
6.3.1. Membaca 1999, 2004, dan 2009 368
6.3.2. Proyeksi Wajah PKS di Pemilu 2014 384
6.4. Diskusi 393
6.4.1. Analisis Kapasitas Tindakan Kolektif PKS 2004 dan 2009 393
6.4.2. Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014 402

Bab 7: Refleksi, Kesimpulan, Rekomendasi 414
7.1. Refleksi dan Implikasi Teoretik 414
7.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi 414
7.1.2. Dinamika Internal dan Kapasitas Tindakan Kolektif 418
7.1.2.1. Dinamika Internal 409
7.1.2.2. Kapasitas Tindakan Kolektif 426
7.1.3. Dinamika Internal sebagai Pertarungan Simbolik 428
7.2. Kesimpulan 439
7.3. Rekomendasi Kebijakan 445
7.4. Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut 450

Daftar Pustaka 452
Lampiran 457

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Variasi Partai Kader dan Partai Massa	16
Tabel 2.2.	Partai Massa Birokratik dan Partai Pemilih Professional menurut Panebianco	17
Tabel 2.3.	Ukuran-Ukuran Operasional Tipologi Partai Menurut Orientasinya	18
Tabel 2.4.	Ikhtisar Model Lingkungan Politik	21
Tabel 2.5.	Ikhtisar Model Mobilisasi	23
Tabel 2.6.	Tipologi Kekuasaan: Formal-Informal, Terlegitimasi-Nirlegitimasi	29
Tabel 2.7.	Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup	31
Tabel 2.8.	Ikhtisar Proposisi-Proposisi Budaya Organisasi sebagai Negotiated Order	33
Tabel 2.9.	Tipologi Spiritualitas Organisasi	38
Tabel 2.10.	Tipologi Praksis Aktifisme Islam	39
Tabel 2.11.	Tipologi Perubahan Identitas Kolektif	40
Tabel 2.12.	Ikhtisar Hasil Penelitian tentang Jemaah Tarbiyah/PKS	48
Tabel 3.1	Ikhtisar Informan Penelitian	63
Tabel 4.1.	Ikhtisar Pendapat tentang Eksistensi Faksionalisasi di PKS	83
Tabel 4.2.	Ikhtisar “Kelompok Idealis” versus “Kelompok Pragmatis”	97
Tabel 4.3.	Pandangan tentang Kekuatan “Faksi Sekjen” dalam Konteks Faksionalisasi di PKS	103
Tabel 4.4.	Ikhtisar Sebab-Sebab Kader (Senior) Meninggalkan PKS	116
Tabel 4.5.	Ikhtisar Ciri “Kelompok Koservatif” dan “Kelompok Progresif”	123
Tabel 4.6.	Ikhtisar Ciri Pengelompokkan Berdasarkan Sikap terhadap Sumber Daya Strategis	126
Tabel 4.7.	Ikhtisar Implikasi Faksionalisasi dan Konflik Internal	132
Tabel 4.8.	Anggota dan Pemilih PKS tahun 1999, 2004, 2009	136
Tabel 4.9.	Ikhtisar Tipologi PKS sebagai Partai Politik	143
Tabel 4.10.	Irisan Pola-Pola Faksionalisasi Kader PKS	151
Tabel 4.11.	Kelompok *Religious Movement Oriented* versus Kelompok *Political Party Oriented*	156
Tabel 5.1.	Definisi dan Tujuan Tiap Jenjang Keanggotaan PKS	177
Tabel 5.2.	Pintu Masuk, Alasan, dan Motivasi Bergabung dengan Jemaah Tarbiyah/PKS	193
Tabel 5.3.	Perkiraan Proporsi Anggota PKS Tahun 2010	195
Tabel 5.4.	Ikhtisar Pandangan tentang Kondisi Tarbiyah	204
Tabel 5.5.	Ikhtisar Budaya Organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS	225
Tabel 5.6.	Mengapa Ustadz Hilmi menjadi Pimpinan Tertinggi PKS dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang?	258
Tabel 5.7.	Mengapa AM menjadi Sekjen PKS dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang?	265

Tabel 5.8.	Ikhtisar Pandangan Kader PKS tentang Ustadz Hilmi Aminuddin, HNW, dan AM	271
Tabel 5.9.	Ikhtisar Pandangan tentang Perubahan Perilaku Kader PKS	301
Tabel 5.10.	Ikhtisar Penyebab Perubahan Perilaku	307
Tabel 5.11.	Ikhtisar Pandangan tentang Wacana PKS sebagai “Partai Terbuka”	314
Tabel 6.1.	Ikhtisar Kualitas Organisasi PKS	361
Tabel 6.2.	Ikhtisar Pandangan tentang Lonjakan Suara PKS dalam Pemilu 2004	368
Tabel 6.3.	Ikhtisar Pandangan tentang Kinerja PKS dalam Pemilu 2009	371
Tabel 6.4.	Ikhtisar Pandangan tentang Latar Belakang Kinerja PKS dalam Pemilu 2009	383
Tabel 6.5.	Ikhtisar Pandangan tentang Prediksi Kinerja PKS dalam Pemilu 2014	390
Tabel 6.6.	Ikhtisar Perbandingan Sikap terhadap Kinerja PKS di Pemilu 2009 dan Prediksi Kinerja PKS di Pemilu 2014	392
Tabel 6.7.	Ikhtisar Aspek-Aspek Tindakan Kolektif PKS Sampai Dengan Pemilu 2004 dan Pasca Pemilu 2004	401
Tabel 7.1.	Ikhtisar Karakteristik PKS sebagai Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan *(The Religious Movement-Based Cadre Party)*	415
Tabel 7.2.	Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup dalam Kasus PKS	420
Tabel 7.3.	Faktor-Faktor Penyebab Pemimpin Tertinggi Terpilih Kembali dalam Kasus PKS	424
Tabel 7.4.	Ikhtisar Proposisi-Proposisi Hallett tentang Budaya PKS sebagai *Negotiated Order*	435
Tabel 7.5.	Ikhtisar Implikasi Teoretik	436

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perspektif Weberian tentang Tindakan Kolektif	20
Gambar 2.2.	Model Lingkungan Politik	21
Gambar 2.3.	Modifikasi Model Mobilisasi	22
Gambar 2.4.	Hubungan Perilaku Kewargaan, Modal Sosial, Tingkat Keorganisasian, Kapasitas Tindakan Kolektif, dan Kinerja	25
Gambar 2.5.	Ikhtisar Terbentuknya Oligarki dalam Organisasi	28
Gambar 2.6.	Doxa, Orthodoxy, Hererodoxy	35
Gambar 2.7.	Ikhtisar Proses Pembentukan dan Perubahan Identitas Kelompok	39
Gambar 2.8.	Kontinum Ideologi Partai Politik	42
Gambar 2.9.	Model Teoretik Disertasi	58
Gambar 4.1.	Dinamika PKS dalam Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Orientasi/Motvasi Utama	141
Gambar 4.2.	Pengelompokkan dan Faksionalisasi di Tubuh PKS	146
Gambar 5.1.	Alur Pembinaan dan *Taqwim* Kader PKS	181
Gambar 5.2.	Kedudukan Lembaga-Lembaga Tinggi dan Elit PKS di Pusat	332
Gambar 6.1.	Kedudukan “Objektifikasi” dalam Pemikiran Politik PKS	348
Gambar 6.2.	Ikhtisar Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014	412

Daftar Istilah

‘Amal jama’iy: Beraktiftas atau berjuang secara bersama-sama dalam kerangka jemaah.

‘Amil: Panitia pengelola zakat.

Ahlul halli wal ’aqdi: Majelis Permusyawaratan. Fungsi yang diemban oleh Majelis Syura PKS.

Amar ma’ruf nahi munkar: Aktifitas mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan.

Aqidah: Keyakinan dasar. Tercermin antara lain dalam kalimat syahadat.

Ashalah: Murni, sesuai dengan Al Qur-an dan Hadits sebagai rujukan asli. Sesuai dengan yang semestinya.

Daurah: Training keislaman dalam konteks kaderisasi.

Fikrah: Pemikiran, pola pikir, atau paradigma. Biasa digunakan untuk menyebut suatu kelompok dengan pemikiran Islam tertentu.

FKP : Forum Kader Peduli. Forum yang digagas oleh sejumlah kader PKS untuk mengkritisi partai di luar struktur formal sehingga kader yang bergabung ke dalam forum ini dikeluarkan dari partai.

Halaqah: Kelompok pengajian kaderisasi di jenjang Anggota Pendukung.

Halaqah: Kelompok pengajian kaderisasi untuk para Kader Pendukung, yaitu Kader Pemula *(Tamhidi)* dan Kader Muda *(Muayyid).* Biasanya beranggotakan 8-12 orang *mutarabbi* yang dikelola/dipimpin oleh seorang *murabbi*.

Harakah: Gerakan. Biasa digunakan untuk menyebut gerakan atau jemaah Islam.

Harakah: Gerakan. Biasanya secara spesifik digunakan untuk menyebut gerakan atau jemaah Islam.

Hujjah: Argumentasi.

Husnuzh Zhan: Prasangka baik.

‘Iqab: Hukuman atau sanksi.

Ijtihad: Berpendapat dengan metodologi tertentu tentang hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Al Qur-an dan Hadits.

Ikhwah atau *ikhwan:* Saudara laki-laki. Di komunitas Jemaah Tarbiyah/PKS biasa digunakan untuk menyebut sesama kader. Untuk kader perempuan digunakan sebutan *akhwat*. Dalam sapaan digunakan *Akhi* atau *Akhi* untuk laki-laki, dan *Ukhti* untuk perempuan.

Imamah: Kepemimpinan.

Iqab: Hukuman atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan.

Iqtishadi: Bidang ekonomi.

Islahul hukumah: Langkah-langkah memperbaiki pemerintahan.

Istisyarah: Konsultasi.

Kafalah: Bantuan finansial. Biasanya diberikan kepada kader yang mendapatkan tugas dakwah yang menyita waktu sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkahnya.

Kafarat: Penghapus dosa di dunia, agar tidak mendapatkan hukuman dari Allah di akhirat.

Khilaf atau masalah *khilafiyah:* Perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal yang tidak diatur dengan jelas dalam Al Qur-an maupun Hadits Nabu Muhammad.

Khusnuzh zhan: Berprasangka baik.

Lajnah: Komite.

Liqa: Pertemuan. Istilah yang digunakan untuk menyebut secara umum pertemuan kelompok pengajian kaderisasi PKS, yaitu *halaqah* dan *usrah*.

Ma'nawiyah: Berhubungan dengan kondisi ruhani seseorang.

Maisyah: Sumber nafkah/penghasilan.

Maisyah: Sumber penghasilan.

Makruh: Sesuatu yang menurut kaidah fikih Islam tidak dilarang, namun juga tidak disukai, sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan. Diyakini bahwa meninggalkan sesuatu yang *makruh* akan mendatangkan pahala.

Maktab Siyasi: Sekretariat jemaah untuk urusan-urusan politik.

Manhaj: Metodologi.

Marhalah: Tahapan dakwah atau jenjang *tarbiyah*.

Maslahah dakwah: Pertimbangan kebaikan atau kemanfaatan bagi dakwah.

Maslahat dakwah: Pertimbangan untuk mengambil sebuah pilihan tertentu karena mengandung manfaat atau kebaikan bagi dakwah dan jemaah.

Maslahat: Manfaat atau kebaikan.

Mihwar Mu'asasi: Tahapan dakwah kelembagaan politik negara.

Mihwar Sya'bi: Tahapan dakwah membina basis masyarakat.

Mihwar Tanzhimi: Tahapan dakwah kaderisasi

Mihwar: Orbit atau tahapan dakwah.

Milad: Peringatan hari lahir atau ulang tahun.

Muamalah: Hubungan sosial antar-manusia.

Mu'asasah: Institusi atau yayasan.

Mudawalah: Perdebatan.

Mumayyizah: Ciri khas.

Murabbi: Guru atau ustadz. Kader yang menjalankan peran mengelola *halaqah*

Murraqib 'Am: Pengawas umum. Sebutan untuk pimpinan tertinggi Jemaah Tarbiyah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau *Majlis Riqabah 'Ammah* (MRA).

Mursyid: Guru spiritual.

Mustahiq: Pihak yang berhak menerima zakat.

Mutaba'ah: Evaluasi amalan sehari-hari kader berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenjang.

Mutaba'ah: Monitoring dan evaluasi. Biasa digunakan antara lain dalam konteks monitoring dan evaluasi sejauh mana para kader melaksanakan ibadah

sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang.

Mutarrabbi: Binaan atau murid. Kader yang menjadi anggota *halaqah.*

Muwajih: Pengisi materi atau penceramah; orang yang menyampaikan *taujih*.

Muwashaffat: Kriteria kader. Disusun spesifik untuk tiap jenjang keanggotaan, masing-masing dengan indikator-indikator yang terinci.

Muzakki: Pihak yang wajib membayar zakat.

Nizham Asasi: Konstitusi. Anggaran Dasar.

PKS Watch: Blog pribadi seseorang dengan nama samaran DOS yang menjadi ajang curah gagasan dari mereka yang mengkritisi sepak-terjang PKS. Ditengarai DOS maupun orang-orang yang ikut bersuara di blog ini adalah para kader atau mantan kader PKS yang tidak puas terhadap PKS. Beberapa kali DOS menutup blog-nya dan kemudian mengaktifkannya kembali. Terakhir peneliti mendapatkan informasi bahwa DOS menutup kembali blog-nya setelah isu PKS sebagai Partai Terbuka mencuat ke permukaan. Ia mengatakan bahwa blog tersebut dibuat sebagai ekspresi kecintaannya kepada PKS sebagai Partai Dakwah, sehingga ketika PKS sudah menjadi Partai Terbuka, dan bukan lagi Partai Dakwah, tak ada lagi alasan eksistensi blog PKS Watch.

Qadhayya: Masalah, kesulitan.

Qarar: Keputusan.

Qath'i: Dalil syariat yang bersifat jelas dan tegas.

Qiyadah atau *Qa'id:* Pemimpin.

Rasmul bayan: Kumpulan materi *tarbiyah* dalam bentuk skema/bagan berbahasa Arab.

Ru'yatul hilal: Teknik menentukan penanggalan dalam Islam dengan melihat terbitnya bulan.

Sam'an wa tha'atan: Dengar dan taat. Sikap prajurit yang dianggap merupakan sikap ideal seorang kader Jemaah Tarbiyah.

Sirah: Sejarah kehidupan. Istilah ini biasa digunakan merujuk pada sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau.

Sunatullah: Hukum Allah. Pola keteraturan yang terdapat di alam semesta.

Syubhat: Sesuatu yang berdasarkan ketentuan syariat Islam hukumnya tidak jelas dibolehkan *(halal)* atau dilarang *(haram)*. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menghindari hal-hal yang *syubhat* akan menjauhkan dari yang *haram*.

Syura: Musyawarah.

Ta'addud: Poligini. Beristri lebih dari seorang.

Tabayyun: Proses klarifikasi tentang suatu masalah dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau terlibat.

Tadarruj: Bertahap, berjenjang. Merupakan salah satu karakteristik *tarbiyah*.

Ta'limat: Instruksi yang disampaikan melalui struktur partai secara *top down*.

Tabayyun: Proses klarifikasi atau meminta keterangan mengenai suatu kabar atau tuduhan kepada pihak-pihak yang terkait.

Tafahum: Saling memahami.

Tafaruq: Mengalokasi seluruh waktu untuk mengelola urusan-urusan jemaah atau partai.

Tahun *qamariyah:* Metoda penanggalan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi, yang menjadi dasar penanggalan Hijriyah.

Tanzhim: Struktur.

Tanzhim nukhbawi: Organisasi kader.

Tanzhim 'alami: Struktur di tingkat internasional.

Taqwim: Proses evaluasi pencapaian kriteria *tarbiyah* dan kenaikan jenjang kader. Melibatkan *murabbi* atau *naqib* sebagai *muqawwim*, yaitu pihak yang mengevaluasi, dan *mutarrabbi* atau anggota *usrah* sebagai *muqawwam*, yaitu pihak yang dievaluasi.

Tarbawi: Hal-hal yang terkait dengan pembinaan kader.

Tariqah: Jalan.

Tasamuh: Saling bertoleransi.

Tasyaddud: Sikap ekstrem, berlebih-lebihan.

Taujih: Arahan. Ceramah.

Tawadhu: Rendah hati, menjauhkan diri dari sifat sombong.

Tawazun: Sikap seimbang atau jalan tengah.

Tayamum: Ritual pengganti wudhu dengan menggunakan debu. Dilakukan manakala tidak menjumpai air untuk berwudhu.

Tsaqafah: Wawasan.

Tsiqah: Rasa percaya. *Trust.*

Ubudiyah: Hal-hal yang menyangkut peribadatan.

Ukhuwwah: Persaudaraan.

Ulil 'amri: Pemimpin.

Uslub: Strategi atau cara.

Usrah: Kelompok pengajian kaderisasi untuk para Kader Inti. Dikelola dan dipimin oleh seorang *naqib*.

Uzlah: Mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat ramai.

Wajihah: Institusi yang berada di luar struktur PKS, namun memiliki keterkaitan dengan partai.

Wara': Sikap berhati-hati dan menjaga diri terhadap sesuatu yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam dosa.

Wazhifah: Amalan rutin.

Zuhud: Menahan diri dari bersikap berlebih-lebihan terhadap dunia, yang dimanifestasikan antara lain dengan bergaya hidup sederhana.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapto Waluyo (2009), seorang kader senior PKS, pasca Pemilu 2009 yang lalu menulis sebagai berikut:

> Sesungguhnya, PKS telah "dihukum" publik dan pemilih yang kritis dengan "kekalahan" di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). **Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni** (Republika, 1 Mei 2009).

Publikasi tulisan seperti di atas di media cetak oleh seorang kader PKS adalah hal yang luar biasa dalam kultur partai ini.[1] Apalagi penulis menggunakan idiom–idiom yang keras dan tajam untuk mengungkapkan kegusarannya, seperti "jurus dewa mabuk" dan "iklan warna–warni". Tidak sulit menduga bagaimana kuatnya dinamika internal yang mendorong kader tersebut bertindak demikian, dan reaksi pihak–pihak di internal PKS, baik yang kontra maupun pro, terhadap tindakan tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam sampai saat ini merupakan fenomena unik dalam arena politik Indonesia, sehingga terus dipelajari oleh berbagai kalangan. Rosenblum (2003) menengarai, walaupun kaitan antara agama dengan politik telah banyak dikaji – misalnya tentang toleransi dan kebebasan serta pemisahan agama dan negara – namun diskursus tentang partai dan kepartaian berdasarkan agama belum mendapatkan tempat dalam teori politik. Ia juga mengatakan, *"For religious parties are missing elements in the discussion about 'identity politics' "* (hal. 24). Menurut hemat penulis, sosiologi, khususnya sosiologi politik, juga belum memberikan perhatian serius terhadap fenomena partai agama dan dinamikanya.

[1] Pembahasan tentang budaya organisasi PKS terdapat pada Bab 3.

Salah satu kajian yang cukup komprehensif tentang PKS dilakukan oleh salah seorang deklaratornya, Yon Machmudi (2008). Ia menyatakan bahwa Jemaah Tarbiyah dan PKS bukan saja melakukan eksperimen ideologis, namun juga berkontribusi bagi politik Indonesia kontemporer dengan menguji hakikat hubungan antara politik berlandaskan Islam dengan negara sekular, dengan menempatkan gagasan mereka dalam konteks keindonesiaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dakwah.

Sementara itu, Firman Noor (2007) menempatkan PKS dalam kategori baru, ”fundamentalisme moderat”, yang merujuk pada fundamentalisme dalam perspektif yang moderat, untuk menggambarkan karakteristik yang melekat pada PKS yang membedakannya dari kelompok atau partai lain, yaitu adanya dua ”kekuatan” yang saling tarik–menarik dalam diri PKS: ”fundamentalisme” dan ”moderatisme”.

Machmudi (2008) mencatat pengaruh kuat Ikhwan al–Muslimin atau Muslim Brotherhood yang didirikan tahun 1928 oleh Hasan al–Banna di Mesir terhadap prinsip dasar, gagasan pokok, dan struktur organisasi Jemaah Tarbiyah, walaupun kemudian terdapat adaptasi terhadap unsur-unsur lokal dan keragaman latar belakang keislaman para aktornya yang menghasilkan tiga tipologi aktifis Jemaah Tarbiyah, yaitu revivalis, modernis, dan tradisionalis. Ia menegaskan, realita politik Indonesia kontemporer serta pengalaman gerakan Islam politik di masa lalu dan di negara–negara lain, mendorong PKS mengambil pendekatan yang realistik dan pragmatis, dengan keyakinan bahwa sikap radikal atau sekular tidak akan membawa keberhasilan (hal. 76). Dalam konteks itu, dari awal Jemaah Tarbiyah diarahkan untuk menghindari konflik dengan penguasa dan persentuhan langsung dengan berbagai gerakan Islam lain yang dianggap “ekstrim” oleh Orde Baru (hal. 92–94).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak saat kelahirannya, Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS cenderung lentur dan adaptif ketika berhadapan dengan realita di luar dirinya, termasuk represi kekuasaan, namun tetap mengusung gagasan Islam sebagai solusi komprehensif bagi kehidupan manusia. Patut diduga, “tarik-menarik” antara dua kecenderungan tersebut –

idealisme dan pragmatisme – terus mewarnai dinamika internal PKS kontemporer saat ini, antara lain berupa fenomena ” faksi keadilan” dan ”faksi kesejahteraan” yang datang belakangan, walaupun sangat mungkin makna ”idealisme” dan ”pragmatisme” itu sendiri terus–menerus mengalami perubahan.

Pasca reformasi 1998, ketika Indonesia memasuki era demokratisasi, Jemaah Tarbiyah, melalui mekanisme referendum internal, memutuskan bertransformasi menjadi Partai Keadilan (PK) dengan doktrin *”al–jama’ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama’ah”* (”jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah”), dan mengikuti Pemilu 1999. Perubahan dari sebuah gerakan keagamaan bawah tanah menjadi partai politik menyisakan ”pekerjaan rumah” yang tidak ringan bagi Jemaah Tarbiyah. Dalam tradisi Jemaah Tarbiyah, para kader harus taat dan menerima keputusan organisasi, sehingga kelompok yang ”bersuara lain” relatif kecil. Namun demikian menurut Machmudi (2008), dinamika ranah politik Indonesia yang menuntut Jemaah Tarbiyah terus-menerus melakukan negosiasi, akomodasi, dan kompromi, sangat berpengaruh terhadap relasi antara kelompok–kelompok di dalamnya.

Sikap Jemaah Tarbiyah yang akomodatif dalam berhadapan dengan penguasa juga dapat dilihat sebagai responnya terhadap rute demokratisasi Indonesia. Charles Tilly (2000) mengidentifikasi dua tipe ideal ”rute” demokratisasi, yaitu rute *strong state* dan rute *weak state*. Demokratisasi Indonesia lebih mendekati rute *strong state,* di mana pada mulanya terdapat pemerintah yang sangat kuat dan otoriter. Perubahan pada *regime environment,* termasuk krisis moneter dan krisis ekonomi global – kemudian mendorong perubahan *public politics,* di mana peningkatan partisipasi rakyat menandai bergantinya otoritarianisme menjadi demokrasi.

Keputusan Jemaah Tarbiyah untuk terjun ke arena politik praktis di Indonesia memang problematik, apalagi demokrasi masih menyimpan kontroversi bagi sebagian pemikir Islam. Dr. Yusuf al-Qardhawy (1997), salah satu pemikir Ikhwan al–Muslimin paling berpengaruh, mengatakan bahwa di satu sisi ada kelompok muslim yang menolak apapun yang berhubungan dengan demokrasi.

Sedangkan di sisi lain ada kelompok muslim yang memisahkan agama dengan negara, dalam hal ini politik dan hukum, secara total.

"Ijtihad politik" para aktifis Jemaah Tarbiyah tersebut juga kerap dikritik oleh beberapa kalangan muslim di Indonesia. Sebagian menganggap PKS terlalu lunak dan cair. Sebaliknya, sebagian yang lain menilai PKS terlalu keras dan puritan. Nyatalah bahwa ketika sebuah kelompok identitas seperti Jemaah Tarbiyah terjun ke ranah politik praktis, mau tidak mau para aktifisnya harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah, berupa *stereotype* tertentu (Amy Gutmann, 2003). Senada dengan itu, Rosenblum (2003) menengarai, partai-partai agama sering dipandang sebelah mata sebagai partainya kaum agamawan (ulama) dalam demokrasi baru yang rapuh dan semu, di mana mobilisasi politik yang mereka lakukan adalah bentuk ekstrimisme atas nama keyakinan, dan keterlibatan mereka dalam pemilu lebih merupakan strategi untuk mendirikan pemerintahan teokratis ketimbang bentuk komitmen terhadap proses demokrasi. Padahal, keberadaan partai agama adalah persoalan ekspresi, bukan dominasi, karena ia tidak semata merupakan reaksi atas perasaan keterancaman, melainkan juga pernyataan keyakinan bahwa nilai dan doktrin agama tidak melulu berada di wilayah privat

Oleh sebagian kalangan Jemaah Tarbiyah/PKS diidentikkan dengan "muslim garis keras". Kategori "fundamentalis moderat" yang disematkan Noor (2007) secara implisit menyiratkan hal tersebut. Beberapa tuduhan, misalnya anti maulid Nabi, anti *tahlilan*, anti *yasinan*, anti *qunut*, dan lain-lain, membuat para aktifis PKS dalam beberapa kesempatan sulit menjalin hubungan dengan kalangan muslim lain. Para aktifis PKS juga sempat dituduh berupaya menyusup dan menyebarluaskan "ideologi Islam transnasional" ala Ikhwan al-Muslimin ke dalam Muhammadiyah (Wahid, ed., 2009).

Sejarah kemudian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2004 PKS memperoleh 8.325.020 atau 7,34% suara, naik sangat signifikan dibandingkan Pemilu 1999 ketika masih bernama PK dengan 1.436.565 atau 1,4% suara. Namun kemudian jumlah suara PKS menurun dalam Pemilu 2009 yang lalu, yaitu

8.206.955, walaupun prosentasenya sedikit meningkat menjadi 7,88% akibat penurunan jumlah suara sah.[2]

Sebagian kalangan, internal maupun eksternal, melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai ini, terutama pasca Pemilu 2004. Kiprah beberapa elit partai di lembaga-lembaga publik disorot media dan para kader hingga ke akar rumput, karena dinilai melenceng dari jatidiri PKS sebagai "Partai Dakwah" dan motto "bersih, peduli, dan profesional". Bahkan, sejumlah (mantan) kader senior sempat berhimpun dalam Forum Kader Peduli (FKP) untuk memberikan kritik terbuka, walaupun fenomena tersebut menyurut belakangan ini.

Ahmad-Norma Permata (2008a) juga menyimpulkan adanya konflik di internal PKS antara unsur idealis, yang diwakili oleh para aktifis partai (mungkin lebih tepat aktifis Jemaah Tarbiyah) dengan unsur realis, yang diwakili oleh para politisi PKS. Pemegang otoritas PKS di pusat yang berperan sebagai penyeimbang menunjukkan perubahan kecenderungan dari mendukung kelompok idealis menjadi mendukung kelompok realis (hal. 193). Ia juga mengatakan, di PKS setidaknya terdapat tiga kelompok aktor dengan logika perilaku masing-masing, yaitu *party on the ground* yang idealis, *party in public office* yang realis, dan *party central office* yang menjadi mediator bagi kedua kelompok tersebut (hal. 273).

Di atas kertas friksi internal tersebut mestinya tidak terjadi, karena dalam Falsafah Dasar Perjuangannya PKS dengan tegas menyatakan bahwa aktifitas politik adalah ibadah untuk kemaslahatan umat yang bernilai amal saleh dengan Islam sebagai akidah, asas, dan basis moralnya. (MPP PKS, 2007: 12–13). Namun sebagaimana dikatakan Machmudi (2008: 219), berbagai manuver yang dilakukan PKS sebagai konsekuensi doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"*, maupun *"yakhtalituna walakina yatamayyazun"* ("bercampur namun berbeda"), menyisakan dilema, bahkan problematika, bagi PKS dan para kadernya. Sebagian kalangan di PKS "menggunakan" kedua doktrin tersebut untuk melakukan langkah-langkah pragmatis dengan argumentasi akomodasi

[2] Diolah dari www.kpu.go.id.

politik demi kemaslahatan dakwah, walaupun kelompok lain menilainya absurd dan melenceng dari jatidiri partai.

Dinamika internal di era PKS pasca Pemilu 2004 berbeda dengan situasi di era PK, di mana partai ini tampil sangat ideologis. Reformasi moral berlandaskan nilai-nilai Islam agar bangsa dapat keluar dari krisis merupakan tema sentral kampanye PK di Pemilu 1999 (Permata, 2008b: 31). Di samping itu, pemilu dipandang semata-mata sebagai sarana dakwah, sehingga konsistensi mengkampanyekan nilai-nilai Islam dipandang lebih penting ketimbang jumlah suara pemilih (Permata, 2008a: 228). Perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi PK bisa diumpamakan sekedar ”berganti baju” tanpa banyak mengubah isi. Di samping itu, akses PK terhadap berbagai modal politik – uang, jaringan, kekuasaan – masih sangat terbatas, sehingga praktis belum ada ”perebutan kue” yang berpotensi menyulut konflik. Setelah menjadi PKS, manuver-manuver politik baru, yang sebagiannya merupakan hasil evaluasi atas ”kegagalan” PK, menyulut friksi internal yang relatif mudah terbaca oleh publik. Akumulasi modal politik yang mulai masif memperkuat hal tersebut. Seorang informan berpendapat, di masa PK konflik internal relatif kecil karena partai ini masih sangat kecil dan karenanya belum diperhitungkan oleh orang lain, sehingga secara internal tidak ada sumber daya yang bisa diperebutkan. Ia menegaskan, ”Nggak ada kue yang bisa direbut. Siapa yang mau memperhitungkan kita”. Ia juga mengatakan, “Belum ada kuenya. Ketika kita menang di 2004 baru kue itu mengalir”.

Perlu ditegaskan sejak awal, dalam penelitian dan penulisan disertasi ini peneliti berpijak pada asumsi bahwa pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal dalam sebuah organisasi, termasuk partai, bukanlah hal yang negatif, apalagi aib yang perlu ditabukan dan disembunyikan. Perbedaan dan persamaan habitus dari para aktor yang bekerja di sebuah arena adalah sebuah keniscayaan, sehingga afiliasi mereka ke dalam sejumlah kelompok yang merefleksikan kedekatan habitus mereka, kemudian membentuk identitas kolektif tertentu, dan selanjutnya terlibat dalam dialektika dan kontestasi, adalah juga kemestian. Dalam bahasa sosiologi, pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal bersifat fungsional. Sementara dalam bahasa agama, ketiganya adalah *sunatullah* yang berlaku dalam entitas yang bernama partai. Bahkan, dalam bingkai *socio-cultural*

values yang tepat dan kehadiran kader-kader yang berkualitas, ketiga hal tersebut bisa bermakna positif karena memberikan manfaat yang substansial dan signifikan bagi pertumbuhan dan kemajuan partai. Untuk mendulang manfaat tersebut partai perlu menyemai nilai-nilai kejujuran, kejelasan, keterbukaan, keadilan, dan rasionalitas, di samping fokus pada masa depan dan penyempurnaan berkelanjutan. Partai juga perlu mendewasakan para kadernya dengan membangun kematangan emosional dan spiritual, menguatkan *internal locus of control*, serta membekali mereka dengan kemampuan belajar *(learning)* yang prima, yang berpusat pada keterampilan merespon setiap persoalan dengan melontarkan pertanyaan "What is wrong with us?" Dalam sebuah iklim demokrasi internal yang sehat dan bertanggung jawab, dan eksistensi kader-kader yang matang dan dewasa, pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal justru menjadi sistem *check and balances* atau mekanisme *self-correction* yang sungguh efektif membuat partai selalu terjaga untuk selalu melakukan *observe* dan *assess* yang mendalam dan akurat, sebelum merancang kebijakan dan langkah, dan kemudian mengimplementasikannya. Dengan demikian, daripada menyia-nyiakan sumber daya untuk menghujat kepastian yang bernama pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal, lebih baik membangun kepantasan untuk memetik manfaat sebesar-besarnya dari ketiga hal tersebut.

1.2. Permasalahan Penelitian

Perubahan dari sebuah gerakan keagamaan "bawah tanah" menjadi partai politik adalah hal yang problematik bagi Jemaah Tarbiyah/PKS dan kader–kadernya karena beberapa alasan. Pertama, tidak semua kalangan muslim menerima demokrasi dan multi–partai untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam mengelola negara. Perbedaan pandangan tersebut, dengan berbagai variasi, juga terdapat di Jemaah Tarbiyah/PKS.

Kedua, perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi PKS menuntut perubahan paradigma dan perilaku yang sangat mendasar, baik secara individual, maupun organisasional. Doktrin "*sirriyah al–tanzim wa alamiyyah al–dakwah*", atau "struktur yang bersifat rahasia dan dakwah yang bersifat terbuka", kini perlu diuji kembali (Machmudi, 2008: 72).

Ketiga, di satu sisi, kelompok kader dengan pendidikan tinggi (sarjana atau lebih) cukup dominan di tengah keberagaman strata sosial-ekonomi, jenis dan tingkat pendidikan, maupun afiliasi keagamaan para kader PKS. Kelompok ini cenderung kritis dalam merespon berbagai hal. Di sisi lain, para kader dibesarkan dalam tradisi pengkaderan berjenjang yang ketat, di mana ketaatan kader terhadap keputusan jemaah adalah norma sosial yang sudah mapan. Dengan demikian, seolah terdapat kontradiksi antara daya kritis para kader di satu sisi, dengan sistem kaderisasi yang mengedepankan ketaatan di sisi lain.

Keempat, informasi awal yang dimiliki peneliti menunjukkan, para aktor kunci di PKS menyadari bahwa kemampuan mereka mewarnai PKS tergantung dari posisi objektif mereka dalam ranah yang ditentukan oleh seberapa banyak dan berbobot modal yang berhasil diakumulasikan. Dengan kesadaran itu, para aktor, baik secara individu maupun berkelompok, melakukan berbagai tindakan dan strategi yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan dinamika – friksi, konflik, faksionalisasi – di tubuh PKS.

Kelima, berbagai manuver politik yang oleh sebagian kalangan internal PKS dinilai sangat pragmatis pasca Pemilu 2004, serta mulai terakumulasinya "kue" sumberdaya politik secara masif, memperkuat dinamika internal tersebut.

Berbagai penelitian tentang Jemaah Tarbiyah/PKS yang telah dilakukan hingga saat ini lebih banyak mengungkapkan analisis historis transformasi Jemaah Tarbiyah menjadi PK dan PKS dan *positioning*-nya dalam ranah gerakan Islam dan politik Indonesia kontemporer. Penjelasan sosiologis mengenai dinamika internal sebuah partai politik yang berasal dari sebuah gerakan keagamaan belum banyak dibahas. Kajian tersebut tentu harus diletakkan dalam konteks kemunculan, perkembangan, dan dinamika kelompok-kelompok yang ada, serta kemampuan PKS untuk berkiprah di arena politik Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah: **Bagaimana dinamika internal PKS di tingkat pusat, khususnya pasca Pemilu 2004?** Pertanyaan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tiga sub-pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Faksi–faksi apa saja yang ada di PKS dan bagaimana mereka bekerja dalam dinamika internal PKS?
2. Bagaimana hubungan antara dinamika internal yang ada dengan budaya organisasi dan struktur PKS.
3. Bagaimana dinamika internal yang ada mempengaruhi kemampuan PKS bekerja di arena politik Indonesia?

Sub-pertanyaan penelitian yang pertama akan dijawab di Bab 4, Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS. Dalam hal ini, berbagai tipologi partai politik, antara lain dari Panebianco (1988), Koole (1994), dan Wolinetz (2002), tipologi faksionalisasi partai politik dari Roemer (2006), teori habitus-arena dari Bourdieu, dan *the polity model* dari Tilly (1978), akan digunakan sebagai alat analisis utama.

Sub-pertanyaan penelitian yang kedua akan dijawab di Bab 5, Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS. Kembali toeri habitus-arena dari Boudieu, yang diperdalam oleh pemikiran Hallett (2003) tentang budaya organisasi sebagai *negotiated order* digunakan sebagai alat analisis utama, yang dikaitkan dengan *the polity model* dari Tilly (1978), serta kecenderungan oligarki dalam partai politik dari Michels (1911).

Sedangkan sub-pertanyaan penelitian yang ketiga akan dijawab di Bab 6, Kualitas Organisasi dan Kinerja PKS. Dalam hal ini analisis dilakukan terutama dengan model mobilisasi dari Tilly (1978). Namun demikian, berbagai teori dan konsep utama tersebut dikaitkan dan dilengkapi pula dengan sejumlah teori dan konsep dari para pemikir lain untuk melengkapi dan mempetajam analisis.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berfokus pada pengembangan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika internal PKS dalam arena politik Indonesia, dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan kecenderungan pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal dalam partai politik berdasarkan agama, serta bagaimana hal tersebut dikelola sehingga tidak berakhir pada perpecahan yang serius.
2. Menjelaskan dinamika habitus para agen yang menyertai perubahan gerakan sosial keagamaan menjadi partai politik.
3. Menjelaskan implikasi dinamika internal di antara faksi-faksi yang dalam dalam suatu partai politik berdasarkan agama terhadap kapasitas tindakan kolektifnya sebagai pemain di arena politik praktis.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan, baik bagi ilmu pengetahuan, masyarakat secara umum, dan Jemaah Tarbiyah/PKS secara khusus. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperluas dan memperkaya bangun pengetahuan *(body of knowledge)* sosiologi politik dan sosiologi organisasi. Secara umum, dalam sosiologi politik, penelitian ini memperluas pengetahuan tentang kekhasan partai politik berdasarkan agama, antara lain dengan menghasilkan deskripsi dan pemahaman baru tentang kecenderungan faksionalisasi dan implikasinya terhadap kapasitas tindakan kolekif partai politik yang bersangkutan. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana *the iron law of oligarchy* dan konflik politik tertutup bekerja dalam konteks historis dan kultural tertentu yang tidak diperhitungkan dalam literatur klasik tentang itu. Sementara itu, dalam sosiologi organisasi, penelitian ini memperkaya dan mempertajam teori–teori yang berkaitan dengan identitas, spiritualitas, dan konflik internal dalam partai politik berdasarkan agama, khususnya untuk kasus Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana organisasi berbasis keyakinan menegosiasikan dan kemudian mengkompromikan tatanan *(order)* dan identitasnya sebagai respon terhadap tekanan ruang sosial di luar dirinya.

Secara spesifik penelitian ini menghasilkan beberapa keluaran yang orisinal. Pertama, tipologi baru partai politik yang merupakan varian dari *modern cadre party* (Koole, 1994), yaitu "**partai kader berbasis gerakan keagamaan'**

(the religious movement-based cadre party). Kedua, konsep **"faksionalisasi dinamis"** untuk menjelaskan fenomena faksionalisasi yang relatif cair, lentur, dan tidak bersifat *mutually exclusive*. Ketiga, konsep **"oligarki terbatas" *(limited oligarchy)***, di mana minimnya partisipasi mayoritas akibat dominasi minoritas tidak sepenuhnya berlaku, dan terdapat institusi yang memoderasi kecenderungan oligarki tersebut.

Di samping itu, penelitian ini menyempurnakan beberapa teori/konsep yang telah ada sebelumnya. Antara lain, pertama, melengkapi asumsi-asumsi teori tindakan kolektif Tilly (1978) dengan memasukkan pengaruh faktor budaya. Kedua, menambahkan faktor historis-kultural, dan faktor faksionaliasi/ pengelompokkan, sebagai pendorong elitisme pemimpin yang kemudian memunculkan oligarki. Ketiga, mengidentifikasi aspek-aspek kualitas organisasi sebagai penghubung antara kohesi sosial dengan tingkat keorganisasian. Keempat, menyempurnkan tesis Moody dan White (2003) dengan menambahkan faktor kualitas kepemimpinan sebagai penentu *group inclusivenes.* Kelima, menggarisbawahi sifat komplementer *the polity model* dari Tilly sebagai *hard side*, dengan teori pertarungan simbolik dari Bourdieu sebagai *soft side* untuk menjelaskan dinamika internal organisasi. Keenam, menyempurnakan dua dari sepuluh proposisi Hallett (2003) tentang budaya organisasi sebagai *negotiated order*.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini menjelaskan dinamika internal Jemaah Tarbiyah/PKS sebagai fenomena yang unik dalam arena politik Indonesia secara mendalam dan komprehensif, khususnya dalam merespon berbagai realita yang dihadapinya.

Bagi para elit dan kader PKS, penelitian ini memberikan "cermin" untuk memahami dinamika organisasinya dengan lebih tajam dan mendalam, yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi dan taktik yang lebih tepat untuk meningkatkan posisi objektif PKS dalam arena politik Indonesia. Mengingat sebagian besar informan penelitian ini adalah kader senior PKS, keragaman respon mereka terhadap berbagai isu yang digali dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana *shared-vision, shared-meaning*, dan

shared-value sudah terbentuk di PKS. Secara konkrit penelitian ini memberikan tujuh butir rekomendasi yang diikat dengan benang merah **demokratisasi, deoligarkisasi,** dan **desakralisasi organisasi**.

BAB 2
KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Kerangka Teoretik

2.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi

Katz dan Mair (dalam Gunther, Montero, dan Linz: 2002) mengemukakan empat tipe partai politik yang berkembang dalam demokrasi liberal di Eropa, yaitu partai elit *(the elite party)*, partai massa *(the mass party)*, partai yang menangkap semua *(the catch-all party)*, dan partai kartel *(the cartel party)*. Perubahan dari satu bentuk partai menjadi bentuk yang lain dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan demokrasi yang terjadi.

Partai elit *(the elite party)* atau **partai kader *(the cadre party)*** adalah partai yang memiliki sedikit anggota dengan kualifikasi yang sangat tinggi, misalnya merupakan tokoh di komunitas mereka, sehingga keberadaan kantor pusat hampir tidak relevan, karena para elit menguasai sebagian besar sumber daya yang mereka butuhkan. Sejalan dengan itu, Menurut Wolinetz (2002, mengutip Duverger 1954), partai kader memiliki struktur yang relatif longgar, berpusat pada elit, dengan organisasi yang minimal di luar legislatif.

Partai massa *(the mass party)* adalah partai yang beranggotakan massa, dikelola oleh struktur partai yang kuat dan permanen, dinaungi oleh kantor pusat yang mendukung ekspansi dan mengkoordinasikan aktifitas akar rumput, serta menempatkan orang-orangnya di institusi-institusi publik sebagai alat bagi kepentingan partai di bawah pengawasan kantor pusat, mewakili anggota partai.

Eksistensi demokrasi dalam partai massa diragukan, bahkan terbuka peluang munculnya oligarki, karena para elit partai di pusat – walaupun dipilih oleh akar rumput – memiliki otoritas yang sangat besar. Di samping itu, terdapat potensi konflik antara partai di institusi publik dengan kantor pusat/akar rumput, karena para anggota partai di institusi publik memiliki dua pertanggungjawaban, yaitu kepada partai dan kepada konstituen pemilih mereka, dua bentuk insentif, yaitu posisi dalam partai dan suara untuk memenangkan pemiliu, serta dua sumber legitimasi, yaitu sebagai agen partai dan pemegang mandat publik. Mana dari

ketiga wajah partai yang tampil dominan – *the party in public office, the party in the central office, the party on the ground* – mencerminkan proses evolusi yang dialami partai sebagai respon terhadap kondisi eksternal yang dihadapinya. Dalam regim yang cenderung otoriter, partai di pusat akan cenderung dominan. Sebaliknya, dalam regim yang cenderung liberal, partai di pusat tidak begitu kuat, sehingga partai di institusi publik relatif lebih independen.

Partai yang mengambil semua *(the catch-all party)* adalah partai yang membidik seluruh segmen masyarakat sebagai implikasi dari memudarnya dominasi kelas menyusul keberhasilan partai-partai massa memperjuangkan hak pilih bagi seluruh warga dan terwujudnya negara kesejahteraan, sehingga partai elit sebagai partai dari kelas dominan dan partai massa sebagai partai dari sub-kultur yang terpinggirkan, kehilangan dasar keberadaan mereka. Dalam *the catch-all party*, terdapat konflik dalam hubungan di antara ketiga unsur partai terkait dengan persoalan apakah kantor pusat adalah agen dari akar rumput dalam mengendalikan partai di institusi publik, atau sebaliknya, kantor pusat justru merupakan agen dari partai di institusi publik untuk mengorganisasikan dan mengarahkan dukungan dari akar rumput.

Katz dan Mair (2002) menyimpulkan, partai-partai di Eropa kemudian bergerak dari *the catch-all party* menuju fase baru, di mana sisi partai di institusi publik semakin dominan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan turunnya rasio jumlah anggota partai terhadap jumlah pemilih, dan berkurangnya jumlah anggota partai yang tercatat. Namun di sisi lain terjadi demokratisasi internal dalam partai, di mana akar rumput mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam seleksi para kandidat untuk ditempatkan di institusi publik maupun para calon pemimpin partai.

Partai kartel *(the cartel party)* adalah partai yang didominasi oleh partai di institusi publik yang semakin otonom dari kantor pusat dan akar rumput, partisipasinya tinggi dalam pemerintahan, banyak berkolaborasi dengan negara, bahkan terserap ke dalamnya (antara lain melalui ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi), di mana para anggota partai di institusi publik melihat politik sebagai karir. Dalam hal ini, hubungan antara para anggota partai-partai yang

berbeda namun sama-sama berada dalam *the party in public office* relatif lebih erat daripada hubungan antara para anggota *the party in public office* dan *the party on the ground* dari partai yang sama. Wolinetz (2002) menggarisbawahi bahwa ciri-ciri partai kartel adalah pemilih yang terdifusi, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang berbiaya tinggi, menekankan pada keterampilan manajerial dan efisiensi, diorganisasikan secara longgar, dan berjarak terhadap para anggotanya sehingga anggota nyaris tak berbeda dari non-anggota. Dalam pandangan Wolinetz, partai kartel adalah broker antara masyarakat sipil dan negara, bahkan agen dari negara dalam berhadapan dengan masyarkat sipil.

Menguatnya kartelisasi partai didorong oleh beberapa faktor, seperti perubahan sistem pemilihan yang memberikan perluasan hak pilih, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang semakin bervariasi (misalnya: media massa), melemahnya ikatan-ikatan tradisional dalam masyarakat, dan meningkatnya kompetensi warga negara dalam berpolitik yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap partai.

Katz dan Mair (2002) mengemukakan tiga catatan tentang kartelisasi partai. Pertama, kartelisasi partai terkait erat dengan keterasingan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik dan partai-partai. Kedua, ia memicu munculnya partai-partai ekstrimis baru, partai yang "anti-partai", sebagai bentuk penentangan terhadap kartelisasi, sistem kepartaian, bahkan nilai-nilai demokrasi. Ketiga, ia membuat partai-partai dipandang menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan mereka, serta membuat mereka bergantung kepada negara, dan pada saat yang sama kehilangan legitimasi dari masyarakat.

Wolinetz (2002) menggunakan dua variabel – jumlah anggota dan tingkat keterlibatan anggota dalam aktifitas partai – untuk menyusun kategoriasi baru, yaitu **partai kader klasik *(classic cadre party)***, **partai kader moderen *(modern cadre party)***, **partai tokoh *(leader-centered party)***, dan **partai massa *(mass party)***. Kategorisasi tersebut digambarkan oleh tabel 2.1. Wolinetz memberikan catatan bahwa kecenderungan menurunnya keanggotaan partai di berbagai negara, baik dalam jumlah absolut maupun dalam prosentase dari jumlah pemilih akan

membuat hampir semua partai merupakan partai kader, baik partai kader klasik maupun partai kader moderen.

Tabel 2.1
Variasi Partai Kader dan Partai Massa Menurut Wolinetz

		Tingkat Keterlibatan Anggota	
		Rendah	Tinggi
Jumlah Anggota	Rendah	**Partai Kader Klasik** ***(The Classic Cadre Party)***	**Partai Kader Moderen** ***(The Modern Cadre Party)***
	Tinggi	**Partai Tokoh** ***(The Leader-centered Party)***	**Partai Massa** ***(The Mass Party)***

Untuk mendeskripsikan partai kader moderen dengan lebih tajam, Wolinetz meminjam lima karakteristik yang dikemukakan oleh Koole (1994), yaitu: (1) peran yang dominan dari kelompok-kelompok pemimpin profesional, khususnya di parlemen, namun dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi terhadap para anggota partai di jenjang yang lebih rendah; (2) rasio anggota/pemilih yang rendah, walaupun jumlah anggota yang memadai tetap penting sebagai sumber pendanaan, media perekrutan kandidat untuk jabatan-jabatan politik, dan prasyarat untuk memastikan berjalannya kehidupan partai dengan baik; (3) upaya menarik pemilih dari berbagai kalangan yang bervariasi, namun tidak menggunakan pendekatan *catch-all* dan tidak pula hanya membidik kelas-kelas tertentu; (4) mempertahankan struktur vertikal yang ketat seperti partai massa untuk mempertahankan citra partai yang spesifik, sekaligus menjamin berlangsungnya demokrasi internal sampai tingkat tertentu; dan (5) mengkombinasikan sumber-sumber keuangan dari subsidi publik dan donasi anggota.

Selanjutnya, Wolinetz menggunakan tipologi yang dikemukakan oleh Panebianco (1988), yaitu ***the mass-bureaucratic party*** **(partai massa birokratik)** dan ***the electoral-professional party*** **(partai pemilih profesional)**, sebagai upaya mengatasi ambiguitas dalam pendefinisian *the catch-all party*. Kedua kategori tersebut dibedakan dalam empat aspek, yaitu pemegang peran utama *(central role)*, struktur, kepemimpinan, pendanaan, dan fokus, sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Partai Massa-Birokratik dan Partai Pemilih Profesional
Menurut Panebianco

	Partai Massa Birokratik	**Partai Pemilih Profesional**
Peran Utama	Birokrasi (administratif-politis)	Profesional (tugas-tugas spesifik)
Struktur	♦ Partai keanggotaan ♦ Struktur organisasi vertikal yang kuat ♦ Memelihara pemilih loyal, *"electorate of belonging"*	♦ Partai pemilih ♦ Struktur organisasi vertikal yang lemah ♦ Memenangkan opini pemilih, *"opinion electorate"*
Kepemimpinan	♦ Peran tokoh-tokoh internal ♦ Kepemimpinan kolegial	♦ Peran tokoh-tokoh publik ♦ Kepemimpinan yang *personalized*
Sumber Pendanaan	Anggota dan aktifitas "organisasi terafiliasi"	Kelompok-kelompok kepentingan dan dana-dana publik
Fokus	Ideologi yang digerakkan oleh para "penganut setia"	Isu-isu dan kepemimpinan yang digerakkan oleh "pejabat karir" dan kader partai yang menjadi pejabat publik

Kemudian Wolinetz (2002) juga mengemukakan skema kategorisasi berdasarkan orientasi partai, yaitu partai pejuang kebijakan *(the policy-seeking party)*, partai pengejar suara *(the vote-seeking party)*, dan partai pengejar jabatan publik *(the office-seeking party)*. Kategorisasi tersebut kerap digunakan dalam kajian tentang pembentukan koalisi dalam demokrasi moderen. Menurut Wolinetz, kategorisasi tersebut juga menggambarkan perilaku dan kecenderungan faksi-faksi yang ada dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai.

Namun perlu dicatat bahwa ketiga kategori berdasarkan orientasi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive* dan independen satu sama lain, sehingga tidak ada partai yang sepenuhnya *policy-seeking, vote-seeking,* atau *office-seeking,* walaupun biasanya ada satu orientasi yang lebih menonjol. Orientasi tersebut merupakan fitur yang melekat relatif kuat pada partai, sehingga hanya bisa diubah dengan serangkaian upaya yang konsisten dari individu atau kelompok dalam partai. Ukuran-ukuran operasional dari ketiga tipe partai tersebut terdapat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Ukuran-Ukuran Operasional Tipologi Partai Berdasarkan Orientasinya

Indikator yang Mungkin Digunakan	**Tipologi Partai**		
	Policy-Seeking	***Vote-Seeking***	***Office-Seeking***
Perdebatan Internal Tentang Kebijakan			
Alokasi waktu dalam pertemuan partai	Tinggi	Rendah	
Karakteristik perdebatan	Intens, berlarut, berfokus pada isu	Formalitas, kabur, tidak terfokus	
Tingkat keterlibatan	Luas, hampir semua jenjang terlibat	Terbatas pada pimpinan atau komite kebijakan, terbagi-bagi	
Konsistensi posisi kebijakan yang ditetapkan	Tinggi	Sedang-rendah, mudah berubah tergantung arahan pimpinan atau peluang meraih suara	Sedang-rendah
Kampanye Pemilu			
Peran kebijakan	Tinggi	Bervariasi	Rendah
Penetapan strategi dan hubungannya dengan kebijakan	Strategi disesuaikan dengan kebijakan	Kebijakan disesuaikan dengan strategi untuk memaksimumkan suara	Bervariasi, preferensi pada strategi berisiko rendah
Penggunakan teknik-teknik baru untuk meraih suara	Rendah-sedang	Tinggi	Rendah-sedang
Infrastruktur pendukung kebijakan (biro riset, *think tank*, organisasi terafiliasi)	Ada dan signifikan	Minimal, atau tergantung keputusan pimpinan atau pejabat partai.	

The policy-seeking party adalah partai yang berorientasi pada isu dan memprioritaskan artikulasi kebijakannya dibandingkan merebut suara pemilih atau menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, terdapat sejumlah anggota yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sebagian atau seluruh tujuan partai.

The vote-seeking party adalah partai yang berorientasi pada pemenangan pemilu, sehingga hal-hal lain, termasuk kebijakan dan jabatan publik yang dikejar disesuaikan dengan tujuan tersebut, Organisasi partai disusun minimalis, terdiri dari profesional partai, kandidat, dan calon kandidat, yang dapat dibantu oleh sejumlah relawan sesuai dengan kebutuhan.

The office-seeking party adalah partai yang berorientasi menduduki jabatan-jabatan publik, baik dengan kekuatan sendiri, maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain, baik dengan tujuan mempertahankan diri, menyeimbangkan

sistem politik yang bekerja, atau memperoleh akses terhadap patron. Dengan demikian, partai jenis ini akan tidak akan beromitmen terhadap kebijakan atau strategi yang akan membuat kekuatan-kekuatan politik lain enggan berkoalisi dengannya. Partai jenis ini tidak cocok bagi para kader ideologis, dan lebih mampu memprtahankan para pemburu jabatan. Dalam partai ini, kecenderungan faksionalisasi untuk memperebutkan sumber daya partai akan semakin kuat sejalan dengan bertambah besarnya ukuran partai.

Dalam setiap partai terdapat pengelompokkan atau faksionalisasi berdasarkan ketiga orientasi tersebut – *policy seekers, vote-seekers, office seekers* – sehingga "wajah" partai pada suatu saat tertentu akan ditentukan oleh faksi mana yang terkuat pada saat itu. Sejalan dengan itu, Roemer (2006) mengemukakan model faksionalisasi yang terdiri dari kelompok reformis, oportunis, dan militan. Secara ringkas Roemer menggambarkan, "the opportunists are interested in winning, the reformists are interested in policies, and the militants are interested in publicity" (hal. 148). **Faksi reformis** adalah mereka yang berorientasi pada upaya mencapai tujuan-tujuan pragmatis partai, *utility function,* secara maksimum. **Faksi oportunis** adalah mereka yang menggunakan partai sebagai kendaraan untuk mencapai karir politik yang lebih tinggi, sehingga sasaran mereka adalah memenangkan sebanyak mungkin suara pemilih. Sementara itu **faksi militan** adalah mereka yang berupaya untuk mengartikulasikan kebijakan partai sedekat mungkin dengan rumusan kebijakan yang ideal. Dengan demikian, faksi militan tidak melihat pemilu sebagai kompetisi yang harus dimenangkan, melainkan media untuk mempublikasikan pandangan-pandangan partai. Menurut Roemer, perbedaan antara faksi reformis dan faksi militan adalah sebagai berikut, "reformists want to do the best they can for their constituency today, while militants adopt the strategy of changing the preferences of voters, so that when they win at some future date, it can be with a better policy" (hal. 155).

2.1.2. Tindakan Kolektif dan Kontestasi untuk Membentuk *Negotiated Order*

Dari berbagai perspektif tindakan kolektif yang dikemukakan Charles Tilly (Durkhemian, Weberian, Marxian, Millian), perspektif Weberian (gambar 2.1) yang menempatkan keyakinan *(beliefs)* di posisi sentral lebih tepat untuk kasus PKS. Dalam perspektif ini dibedakan antara tindakan kolektif rutin (misalnya di luar pemilu) dan tindakan kolektif non rutin (misalnya di masa pemilu), di mana kepentingan berpengaruh signifikan terhadap keyakinan.

Gambar 2.1
Perspektif Weberian tentang Tindakan Kolektif

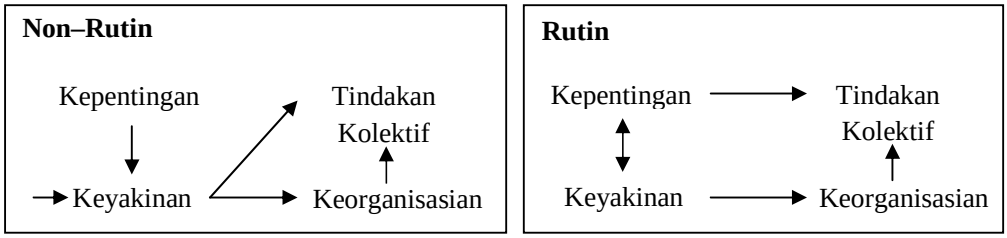

Gagasan Tilly berpijak pada tiga asumsi. Pertama, tindakan kolektif menimbulkan biaya tertentu yang diperhitungkan oleh semua *contenders* (kelompok). Kedua, tindakan kolektif menghasilkan sumberdaya kolektif. Ketiga, *contenders* terus-menerus memperkirakan biaya dan manfaat yang sifatnya tidak pasti karena informasi tentang konstelasi lingkungan politik tidak lengkap, dan pihak-pihak yang terlibat memainkan strategi masing-masing.

Tilly menggambarkan dinamika sebuah populasi dalam model lingkungan politik *(polity model)* yang modifikasinya disajikan dalam gambar 2.2. Dalam populasi terdapat *government, contenders, polity,* dan *coalition.* Para *contenders* aktif memperjuangkan kepentingan mereka, bermanuver, saling berebut kekuasaan, menyusun dan membubarkan koalisi, mengeksekusi strategi, dan akhirnya kalah atau menang, yang ditandai dengan keluarnya mereka dari, atau masuknya mereka ke dalam lingkungan politik, sehingga batasan suatu lingkungan politik menjadi kabur. Tabel 2.4 menyajikan ikhtisar model interaksi antar-kelompok atau model lingkungan politik yang telah dielaborasi di atas.

Gambar 2.2
Model Lingkungan Politik

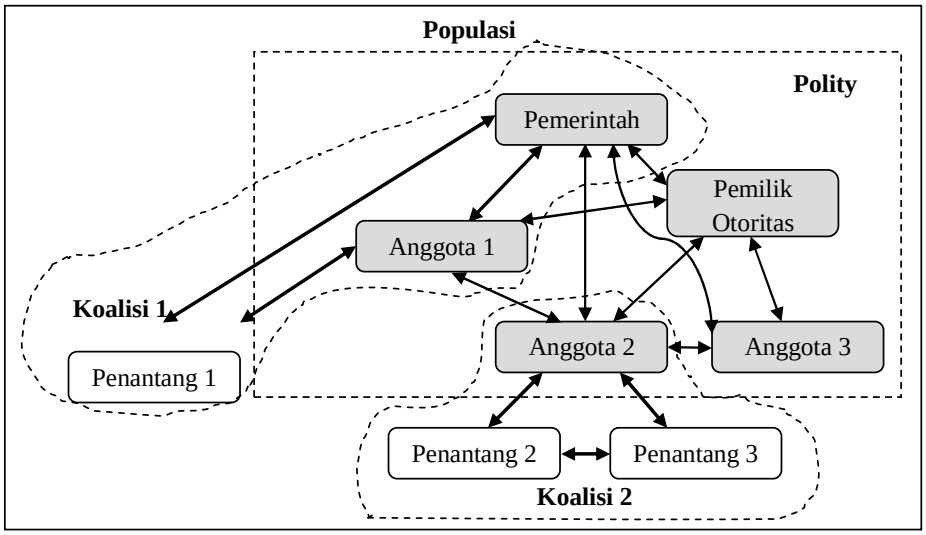

Tabel 2.4
Ikhtisar Model Lingkungan Politik

No	Unsur	Definisi
1	Populasi	Satuan masyarakat manapun yang kita tentukan sebagai "subjek" pembicaraan; bisa berupa sebuah negara, organisasi, dan lain-lain.
2	Pemegang Otoritas	Pihak (-pihak) yang memegang kendali terhadap perangkat paksaan *(coercion)* yang ada dalam populasi.
3	Pemerintah *(Government)*	Pihak yang memegang kendali terhadap perangkat paksaan utama atau yang terpenting dalam populasi.
4	Pesaing *(Contender)*	Pihak (-pihak) yang dalam kurun waktu tertentu menggunakan sumberdaya kolektif untuk mempengaruhi *government*.
5	Anggota *(Member)*	*Contender* yang memiliki akses yang rutin dan efisien terhadap sumberdaya yang dikuasai *government*.
6	Penantang *(Challenger)*	*Contender* yang bukan *member*.
7	Lingkungan Politik *(Polity)*	Tindakan kolektif yang dilakukan oleh *members* dan *government*.
8	Koalisi	Kecenderungan sejumlah *contenders* dengan atau tanpa *government* untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan kolektif mereka.

Dalam disertasi ini, populasi dilihat dalam dua tataran. Pada tataran pertama yang menjadi populasi adalah PKS/Jemaah Tarbiyah. Dalam hal ini, *polity model* Tilly digunakan untuk menganalisis kontestasi di antara faksi-faksi yang ada di dalam PKS sebagai *contenders* untuk mendapatkan dukungan

pimpinan tertinggi partai sebagai *government*, sehingga mereka dapat menjadi *members* di dalam lingkungan politik yang berkuasa. Dalam konteks ini teori *the iron law of oligarchy* menjadi relevan sebagai salah satu penjelasan terhadap dinamika internal PKS.

Pada tataran kedua, populasi yang dimaksud adalah arena politik Indonesia, di mana model lingkungan politik Tilly digunakan untuk menganalisis hubungan antara PKS sebagai salah satu *contender* dengan *government* dan *contenders* yang lain, baik sesama partai anggota koalisi, maupuan partai-partai oposisi. Dalam konteks ini, efektifitas tindakan kolektif yang dilakukan oleh PKS dijelaskan dengan oleh mobililisasi.

Gambar 2.3
Modifikasi Model Mobilisasi

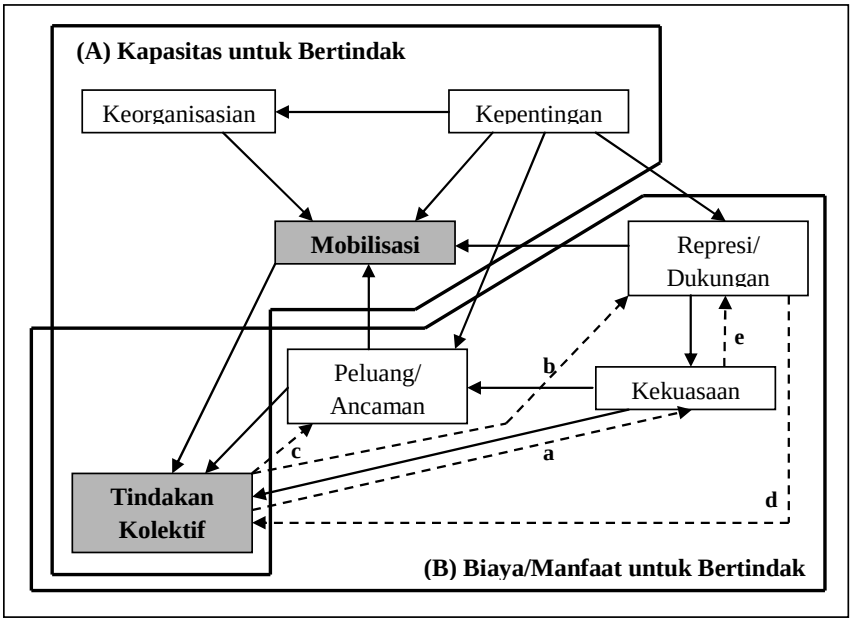

Dalam model mobilisasi, kemampuan PKS sebagai salah satu *contender* di ranah politik Indonesia untuk melakukan tindakan kolektif dipengaruhi oleh kapasitas (A), dan biaya/manfaat (B), sebagaimana terdapat pada gambar 2.3. Kapasitas berhubungan dengan tingkat mobilisasi, tingkat keorganisasian, dan kepentingan. Dalam jangka pendek, tindakan kolektif dipengaruhi oleh

biaya/manfaat yang dirasakan kelompok, berupa kekuasaan, represi/dukungan, dan peluang/ancaman. Namun dalam jangka panjang, tindakan kolektif juga mempengaruhi biaya/manfaat (garis panah putus–putus "a," "b," dan "c"). Untuk mempengaruhi biaya/manfaat tindakan kolektif, lawan dapat mengarahkan represi/dukungan secara tidak langsung melalui tingkat mobilisasi, atau secara langsung mempengaruhi tindakan kolektif (garis panah putus–putus "d"). Selanjutnya, dalam jangka panjang kekuasaan yang dimiliki kelompok mempengaruhi represi/dukungan yang diterimanya (garis panah putus–putus "e"). Tabel 2.5 menyajikan ikhtisar aspek-aspek model mobilisasi yang telah dielaborasi di atas tadi.

Tabel 2.5
Ikhtisar Model Mobilisasi

No	Aspek	Definisi	Catatan
1	Kepentingan	*Advantages/disadvantages* yang mungkin dialami sebagai konsekuensi dari interaksi.	Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik.
2	Tingkat Keorganisasian	Sejauh mana identitas bersama dan jejaring menyatukan para anggota kelompok.	Berfokus pada *group inclusiveness*.
3	Mobilisasi/ Demobilisasi	Penambahan/pengurangan secara signifikan pada jumlah sumberdaya yang berada di bawah kendali kelompok.	♦ Bentuk: defensif, ofensif, prepatoris ♦ Memperhitungkan biaya marjinal dan mobilisasi netto. ♦ Aliansi untuk mengatasi mobilisasi kontra. ♦ Komitmen sebagai sumberdaya yang penting.
4	Biaya/Manfaat	Hubungan antara kepentingan kelompok dengan lingkungan.	♦ Perubahan biaya/manfaat yang positif atau negatif. ♦ Tiga unsur: *power*, *repression/facilitation*, dan *opportunity/threat*.
7	Tindakan Kolektif	Tindakan bersama anggota-anggota kelompok untuk suatu kepentingan bersama.	Bentuk: kompetitif, reaktif, proaktif

Dalam gagasan Tilly, mobilisasi/demobilisasi menempati peran sentral. Amitai Etzioni (1968) menekankan, tingkat mobilisasi menunjukkan kapasitas untuk memanfaatkan sumberdaya, bukan kepemilikan terhadapnya, sehingga pertambahan kepemilikan hanya meningkatkan potensi mobilisasi. Di samping itu, mobilisasi yang dilakukan sebuah kelompok dapat mengundang mobilisasi kontra dari *contenders* lain yang biasanya diatasi dengan menjalin koalisi.

Tilly (1978) menegaskan bahwa tingkat keorganisasian, sebagai aspek yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat mobilisasi, ditentukan oleh *group inclusiveness*, atau kohesi/solidaritas sosial, yang menurut James Moody dan Douglas R. White (2003) memiliki dua komponen, yaitu komponen relasional dan komponen ideasional. Komponen relasional merujuk pada kohesi struktural, yaitu keterhubungan sosial di antara para anggota kelompok. Sebuah kelompok dianggap kohesif secara struktural jika terdapat relasi antar-anggota kelompok yang independen satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, informasi dan sumberdaya mengalir melalui banyak jalur independen, sehingga sulit dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok kecil anggota kelompok, dan eksistensi kelompok tidak rentan terhadap eksistensi seseorang atau sekelompok orang Jadi, struktur yang kohesif mengurangi kesenjangan kekuasaan dalam kelompok. Sebaliknya, sebuah kelompok di mana hubungan-hubungan sosial berlangsung melalui satu individu kunci (pemimpin yang karismatik), atau sekelompok kecil individu (kelompok elit yang oligarkis), kohesi struktrualnya cenderung rapuh.

Kohesi yang tinggi, di samping kesamaan tujuan antar-jejaring, merupakan hal yang penting dalam partai politik karena terdapat hubungan keagenan di mana massa (prinsipal) mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada elit partai (agen), sehingga agen berpeluang bekerja untuk kepentingannya, bukan kepentingan prinsipal. Mukherji et.al. (2007) berargumentasi bahwa kohesi dan kesamaan tujuan merupakan *necessary and sufficient conditions* untuk menekan problem keagenan ini.

Kohesi/solidaritas sosial juga memiliki komponen ideasional, yaitu identitas kolektif. Identitas kolektif adalah pemahaman kita mengenai siapakah kita dan siapakah orang lain, dan sebaliknya, pemahaman orang lain mengenai diri mereka dan orang-orang di luar mereka, termasuk kita (Jenkins, 2004). Sejalan dengan itu, Marilynn B. Brewer (2000) mengatakan, “group identity arises from categorical distinctions between those who share some attribute, experience or label and those who do not” (hal. 119). Identitas kolektif dan saling ketergantungan berhubungan secara multiplikatif, di mana keberadaan keduanya secara bersama–sama berimplikasi positif terhadap tingkat keorganisasian.

Sebaliknya, saling ketergantungan tanpa identitas kolektif tidak akan meningkatkan keorganisasian.

Mark C. Bolino et.al. (2002) menjelaskan kohesi sosial dengan menghubungkan aspek–aspek perilaku kewargaan *(citizenship behavior)* dengan modal sosial dan kinerja. Perilaku kewargaan adalah perilaku para anggota organisasi di luar tuntutan peran, serta tidak secara langsung atau formal diapresiasi oleh sistem imbalan yang berlaku, namun memfasilitasi berfungsinya organisasi (Organ, 1988). Bolino et.al. menggunakan lima aspek perilaku kewargaan dari Lynn van Dyne et.al (1994), yaitu loyalitas, ketaatan, partisipasi fungsional, partisipasi sosial, dan partisipasi advokatif, dan konsep modal sosial dari Nahapiet dan Ghoshal (1998), yaitu modal sosial struktural yang terkait dengan kohesi struktural, serta modal sosial relasional dan kognitif yang merujuk pada kohesi ideasional. Dalam konteks tindakan kolektif, agregasi dan komparasi modal sosial akan bermakna jika dikaitkan dengan tujuan tertentu (Finsveen dan van Oorschot, 2008), misalnya peningkatan posisi objektif sebuah partai di arena politik. Menurut Bolino et.al., terdapat hubungan timbal-balik antara perilaku kewargaan dan modal sosial melalui ketiga aspeknya. Untuk itu, peneliti mengaitkan modal sosial dengan tingkat keorganisasian, kemudian tindakan kolektif, dan kinerja organisasi, sebagaimana dirangkum pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
Hubungan Perilaku Kewargaan, Modal Sosial,
Tingkat Keorganisasian, Kapasitas Tindakan Kolektif, dan Kinerja

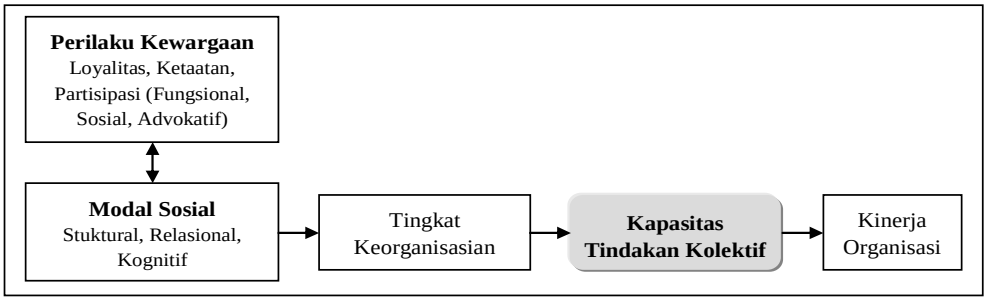

Kohesi/solidaritas sosial sebagai faktor penentu tingkat keorganisasian juga dapat dijelaskan oleh pendapat Tilly (2004) yang melihat kelompok-kelompok dalam organisasi sebagai *trust networks* yang terhubung dengan pusat

kekuasaan oleh paksaan, modal, atau komitmen, dalam bentuk segregasi, hubungan yang dinegosiasikan, atau integrasi. Kombinasi antara paksaan dengan integrasi menghasilkan otoritarianisme. Bertemunya komitmen dengan segregasi menghasilkan hubungan partikularistik. Sedangkan perkawinan antara komitmen dengan integrasi membuahkan teokrasi, yang didefinisikan oleh Tilly sebagai "extensive integration of trust networks around communities of beliefs" (hal. 14). Namun demikian, apa yang dipermukaan terlihat sebagai teokrasi mungkin sebenarnya adalah otoritarianisme, di mana mekanisme penghubung antara *trust networks* dengan pusat kekuasaan yang dilihat sebagai komitmen sesungguhnya adalah paksaan, karena menurut Etzioni (1968) bahwa komitmen sering dimobilisasi secara manipulatif sehingga memicu oligarki. Meminjam terminologi Bourdieu, aktor dominan kerap menggunakan *symbolic power*, bahkan *symbolic violence*, untuk melanggengkan posisi objektifnya sebagai pemegang otoritas.

Jika dikaitkan dengan pendapat Verter (2003), kemampuan suatu pihak memobilisasi komitmen terkait dengan modal spiritual yang diakumulasikannya. Modal spiritual yang diinvestasikan dengan tepat dapat memberikan keuntungan sosial-ekonomi, dan berfungsi sebagai media mobilitas sosial. Sebagai bagian dari modal kultural, modal spiritual memiliki bentuk yang *embodied* dalam habitus individu (pengetahuan, keahlian, selera, dan mandat di bidang keagamaan yang terakumulasi melalui proses yang eksplisit maupun implisit), bentuk yang terobjektifikasi (benda, teks, ritual, teologi, idelogi), dan bentuk yang terlembagakan (kekuasaan yang dimiliki oleh institusi keagamaan untuk melegitimasi tindakan-tindakannya).

Dalam konteks PKS, pimpinan tertinggi partai berposisi sebagai *government* yang menempati kedudukan istimewa dalam interaksinya dengan *contenders*. Dalam hal ini, Tilly (1978) mengidentifikasi dua tipe ideal regim yang ada, yaitu egaliter dan oligarkis. Regim yang egaliter memberikan represi/dukungan atas dasar substansi tindakan yang dilakukan dengan mengabaikan pelakunya. Sebaliknya, regim oligarkis mengarahkan represi/ dukungan kepada pelaku tertentu, tanpa melihat substansi tindakan. Regim–regim yang ada memiliki sebagian sifat egaliter dan sebagian sifat oligarkis. Kelompok yang sangat besar kekuasaannya akan menikmati dukungan pemerintah terhadap

hampir semua tindakan yang dilakukannya. Bahkan, pemerintah dan kelompok tersebut dapat bergabung membentuk oligarki.

Robert Michels (2001, pertama kali terbit 1911) mengidentifikasi beberapa faktor pendorong munculnya elitisme yang kemudian menjadi oligarki, yaitu: teknis–administratif, intelektual, psikologis, dan finansial. Secara teknis–administratif, demokrasi membutuhkan *expert leaders,* yang lambat–laun menjadi elit yang terpisah dari massa yang dulu memilihnya, dan kemudian mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Muncullah bonapartisme, di mana idealisme elit luntur dengan berjalannya waktu, dan persentuhan dengan realita, apalagi ketika mereka mulai berkuasa. Di samping itu, partai adalah alat perjuangan politik, di mana taktik dan strategi harus diputuskan dengan cepat dan akurat, sehingga mendorong sentralisasi dan hirarki. Sementara dari sisi intelektual, massa dipandang tidak kompeten untuk mengatur diri mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan eksistensi demokrasi internal dalam sebuah partai massa sering diragukan dan dianggap semu.

Secara psikologis para pejabat partai cenderung mempertahankan jabatannya dengan berbagai cara, lalu menutup kesenjangan dengan jajaran di bawahnya dengan membentuk kartel. Di sisi lain, massa membutuhkan arahan dari pemimpin yang dikultuskan sebagai pribadi yang hebat, di samping memiliki kemampuan komunikasi, kemauan, rasa percaya diri, dan pengetahuan yang luar biasa. Hal itu diperkuat oleh media informasi partai yang dikendalikan oleh kelompok elit untuk membangun efek sensasi guna menjaga simpati massa terhadap mereka. Sementara itu, kekuatan finansial partai yang berada di bawah kendali pimpinan partai, dimanfaatkan untuk memberikan represi/dukungan kepada pihak-pihak yang dianggap lawan/kawan.

Dengan demikian, pemimpin karismatik biasanya menjadi bagian dari oligarki. Philip Smith (2000) mengkritik perspektif yang melihat karisma semata-mata sebagai produk dari struktur sosial yang berlaku maupun hasil dari *personality traits* yang melekat pada diri pemimpin. Bagi Smith, karisma adalah ikatan moral yang menghubungkan para pengikut dengan pemimpin mereka. Ikatan moral tersebut tidak dipahami secara mikro, sebagai implikasi dari

kepribadian dan interaksi dalam kelompok, melainkan secara kultural, sebagai produk dari struktur-struktur simbolik, atau dengan kata lain, sebagai sentimen kolektif yang dibentuk oleh tindakan, kekuasaan, dan moralitas pemimpin. Dalam konteks kultural itu, simbolisasi dan mitologisasi berperan menyisipkan hal yang sakral ke dalam kehidupan sosial-politik yang profan, dalam bentuk narasi tentang baik-buruk dan perjuangan meraih keselamatan.

Gambar 2.5
Ikhtisar Proses Terbentuknya Oligarki dalam Organisasi

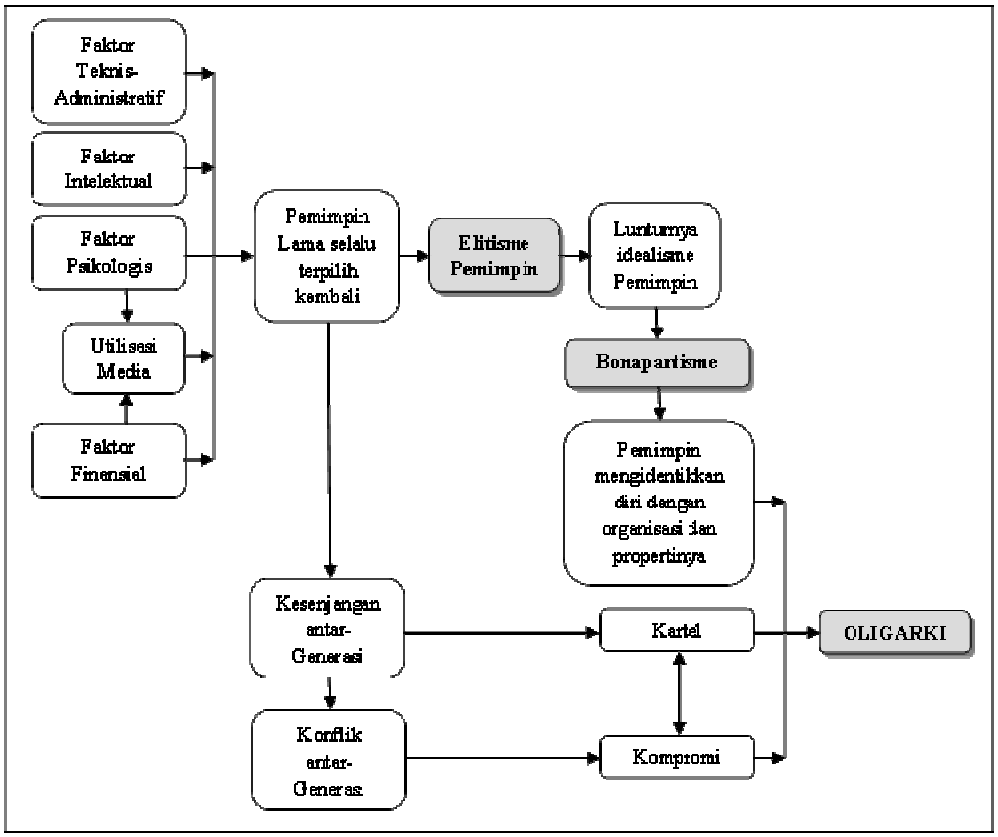

Darcy K. Leach (2005) memperbaharui pemikiran Michels dengan mendefinisikan oligarki sebagai:

> *"a concentration of entrenched illegitimate authority and/or influence in the hands of minority, such that de facto what that minority wants is generally what comes to pass, even when it goes against the wishes (whether actively of passively expressed) of the majority"* (hal. 329).

Dalam menjelaskan definisinya, Leach membedakan kekuasaan formal dan informal, serta yang terlegitimasi dan nirlegitimasi. Meminjam terminologi Weber, kekuasaan formal yang terlegitimasi disebut otoritas *(authority)*, dan yang nirlegitimasi disebut paksaan *(coercion)*. Sedangkan kekuasaan informal yang terlegitimasi disebut pengaruh *(influence)*, dan yang nirlegitimasi disebut manipulasi *(manipulation)*. Tabel 2.6 menunjukkan tipologi kekuasaan yang direkomendasikan Leach.

Tabel 2.6
Tipologi Kekuasaan: Formal–Informal, Terlegitimasi–Nirlegitimasi

	Kekuasaan Formal	**Kekuasaan Informal**
Terligitimasi	**Otoritas *(Authority)*** ♦ Dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara formal. ♦ Digunakan untuk membuat dan menegakkan keputusan yang sesuai dengan mandat formal. ♦ Massa menaati dengan sukarela, karena mereka menyepakatinya sebagai hal yang absah mewakili suara mereka.	**Pengaruh *(Influence)*** ♦ Dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuatan yang bersumber dari norma kelompok namun tidak memiliki kewenangan formal untuk memutuskan. ♦ Dilakukan dengan melakukan persuasi yang masuk akal dan mendayagunakan imbalan nonformal. ♦ Massa menyetujuinya secara pribadi, atau ingin diterima oleh aktor tersebut.
Nirlegitimasi	**Paksaan *(Coercion)*** ♦ Dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan prosedur yang tidak benar, atau pejabat yang tidak berwenang. ♦ Mendayagunakan imbalan/sanksi material di luar kewenangan formal. ♦ Massa menaati dengan enggan, semata–mata karena mereka ingin memperoleh imbalan atau menghindari sanksi.	**Manipulasi *(Manipulation)*** ♦ Dilakukan oleh aktor yang tidak dipercaya oleh kelompok berdasarkan nilai–nilai yang dianut bersama untuk menggunakan pengaruh tersebut. ♦ Mendayagunakan pengaturan agenda, penyembunyian informasi, dan sanksi nonmaterial. ♦ Massa mengikuti karena tidak tahu/tidak sadar, ataupun tahu namun ingin menghindari sanksi nonmaterial.

Dengan demikian, tiga indikator yang secara umum digunakan – kurangnya frekuensi pergantian kepemimpinan, kendali minoritas atas sumberdaya, dan rendahnya tingkat partisipasi mayoritas – tidak serta–merta menunjukkan adanya oligarki. Indikator pertama baru merujuk pada oligarki jika terdapat bukti bahwa minoritas memang menggunakan cara-cara yang tidak sah, atau terdapat resistensi mayoritas atas kepemimpinan minoritas. Kontrol minoritas atas sumberdaya organisasi baru menunjukkan adanya oligarki jika digunakan

untuk memaksakan keputusan yang ditentang mayoritas, atau akan ditentang jika mereka tahu bahwa cara–cara yang tidak sah telah digunakan.

Sementara itu, minimnya partisipasi mayoritas bisa jadi merupakan ekspresi persetujuan atas langkah–langkah minoritas, dan mereka memandang minoritas masih menunjukkan tanggungjawabnya. Namun kita perlu jeli karena minoritas mungkin melanggengkan posisinya dengan mendayagunakan *symbolic power* yang diperoleh melalui interaksi sebelumnya. Minoritas juga bisa memanipulasi mayoritas dengan menimbulkan rasa bersalah karena di awal mereka menyerahkan segalanya kepada minoritas, sehingga ketika tidak setuju atas keputusan minoritas, mayoritas memilih diam.

Pendapat Michels dan Leach yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa oligarki senantiasa eksis bersama-sama dengan ketaksetaraan antar-kelompok *(categorical inequality)* yang dihasilkan oleh mekanisme eksploitasi, monopoli kesempatan *(opportunity hoarding)*, pemanfaatan organisasi untuk kepentingan kelompok dominan *(emulation)*, dan perubahan rutinitas sosial untuk melanggengkan ketaksetaraan *(adaptation)*. Pemegang otoritas cenderung melanggengkan *categorical inequality* untuk kepentingan tertentu, antara lain dengan melakukan eksploitasi atau monopoli kesempatan yang menguntungkan kelompok dominan. Dalam kondisi ini, demokratisasi dimungkinkan jika mekanisme kendali yang koersif terdekonstruksi, berlangsung proses edukasi dan komunikasi yang mengubah *emulation* dan *adaptation*, serta penyebaran sumberdaya yang lebih merata (Tilly, 2000).

Menurut Michels, walaupun memiliki ideologi, partai tidak selalu menjadi organ dari ideologi tersebut. Bahkan mungkin saja orang-orang dengan ideologi yang berseberangan justru memimpin partai, sehingga partai menjadi kendaraan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Implikasinya, berbagai konflik, termasuk konflik politik tertutup, kerap terjadi. Morill, Zald, dan Rao (2003) mengidentifikasi empat aspek konflik politik tertutup, yaitu: bentuk, visibilitas sosial, kolektifitas, dan hasil.

Konflik politik tertutup bisa berbentuk material atau simbolik. Konflik politik tertutup simbolik bisa berupa manipulasi komunikasi untuk menutupi tujuan, penciptaan ceruk psikologis, sosial, temporal, atau fisik untuk melindungi dari kekuasaan yang ingin dihindari *(symbolic escape),* atau konfrontasi yang diikuti moderasi *(ritualized confrontation).* Biasanya konflik politik tertutup tampil dalam bentuk material dan simbolik sekaligus, walaupun pada satu saat tertentu ada satu bentuk yang dominan. Bentuk konflik politik tertutup terkait dengan visibilitas sosial, yaitu sejauh mana kepentingan dan tindakan pihak yang beroposisi diketahui oleh pemegang otoritas. Sabotase, misalnya, kepentingannya diketahui, namun tindakan dan identitas pelakunya, tersembunyi. Sebaliknya, *ritualized confrontation* kepentingannya tersembunyi, walaupun tindakan dan pelakunya terbuka.

Sementara itu, kolektifitas menempatkan empat kategori konflik politik tertutup dalam kontinum individualistik–kolektif, yaitu: tindakan bersama yang tidak terorganisir, tindakan bersama yang dipandu kesamaan implisit *(tacit complicity),* koordinasi informal, dan koordinasi formal. Hasil konflik politik tertutup bervariasi, bisa berupa keterbebasan psikologis individual, digugat atau dipertanyakannya praktik dan rutinitas organisasi yang dinilai tidak adil atau tidak patut, dan terbentuknya prakondisi bagi proses transformasi yang lebih mendasar. Tabel 2.7 menyajikan ikhtisar dari keempat aspek konflik politik tertutup yang sudah dibahas di atas.

Tabel 2.7
Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup

No	Aspek	Variasi
1	Bentuk	♦ Materil: sabotase langsung, sabotase tidak langsung ♦ Simbolik: manipulasi komunikasi, *symbolic escape, ritualized conflict*
2	Visibilitas Sosial	Sejauh mana kepentingan, tindakan dan identitas pelaku diketahui oleh pemilik otoritas.
3	Kolektifitas	♦ Tindakan bersama yang tidak terorganisir ♦ Tindakan bersama yang dipandu kesamaan *implicit/tacit* ♦ Koordinasi informal ♦ Koordinasi formal
4	Hasil	♦ Keterbebasan psikologis-individual ♦ Gugatan terhadap praktik dan rutinitas organisasi ♦ Prakondisi untuk transformasi yang lebih mendasar

Paul Osterman (2006), berdasarkan temuan penelitiannya terhadap *social movement organization* (SMO) bernuansa religius yang berskala cukup besar di AS, menolak pendapat yang mengatakan bahwa merosotnya komitmen dan semangat para anggota *(becalming)* dan pergeseran tujuan *(goals displacement)* adalah konsekuensi tak terhindarkan dari *the iron law of oligarchy*. Menurutnya, upaya-upaya yang terprogram untuk membangun keyakinan yang kuat dalam diri para anggota mengenai kapasitas pribadi dan peran strategis mereka dalam organisasi *(sense of capacity and agency)*, dan budaya kontestasi internal di mana para anggota skeptis terhadap kekuasaan dan melawan balik upaya para elit untuk mendominasi, terbukti mampu mengatasi potensi oligarki.

Kontestasi di antara kelompok-kelompok yang ada dalam PKS dengan segala dinamika internal yang terjadi menghasilkan budaya organisasi PKS. Tim Hallett (2003) melihat budaya organisasi sebagai *negotiated order* dengan berpijak pada teori *symbolic power* Bourdieu dan *impression management* Goffman. *Symbolic power* mengaitkan praksis individual (mikro) dengan ruang sosial (makro) melalui habitus. Lalu, praksis membangun *negotiated order* melalui interaksi di tingkat meso organisasi. Sementara itu, ruang sosial (makro) menyediakan konteks struktural bagi proses pembentukan *negotiated order* tersebut.

Hallett mengkritik perspektif yang melihat budaya organisasi sebagai keyakinan dan nilai–nilai subjektif aktor, dan sebagai konteks sosial (ideologi, keyakinan, mitos, ritual, artefak) yang mengartikulasikan makna bagi para aktor. Perspektif pertama memosisikan budaya organisasi dalam pikiran individu, sehingga tidak menjelaskan konflik dan sarat dengan penafsiran subjektif. Sedangkan perspektif kedua melihat budaya sebagai hal yang stabil, sehingga tidak menjelaskan perubahan dan kausalitas. Dalam perspektif Hallett, kausalitas dijelaskan di tingkat mikro, di mana habitus adalah *means*, disposisi yang membentuk praksis, dan di tingkat meso, di mana *symbolic power* adalah *ends* yang menentukan tindakan yang dianggap layak dalam organisasi.

Habitus, yaitu sistem dari skema persepsi, apresiasi, dan tindakan yang ada dalam diri aktor yang *durable* dan *transposable* berasal dari institusi sosial, suatu *socialized subjectivity* (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Ia memproduksi dan diproduksi oleh dunia sosial, *structuring structure*, sekaligus *structured structure*, sistem skema yang menghasilkan praksis, juga sistem persepsi dan apresiasi terhadap praksis, yang dengannya aktor melakukan klasifikasi (Bourdieu, 1989); di samping *"intention in action"*, seni mengantisipasi permainan yang akan datang dengan mengekstrapolasikannya dari kondisi saat ini (Bourdieu, 1991). Habitus membatasi pilihan–pilihan yang ada, namun tidak deterministik. Habitus selalu beradaptasi terhadap dinamika realitas sosial (Ritzer dan Goodman, 2003).

Dalam organisasi para aktor membentuk kelompok yang melakukan tindakan kolektif untuk mempengaruhi organisasi. Aktor–aktor dengan habitus yang relatif berdekatan, cenderung berkelompok dan melakukan tindakan kolektif (Ritzer dan Goodman, 2003). Dimensi kolektif dari habitus dalam berbagai tingkatan, mulai dari *"the menu of solutions"* yang dirujuk oleh para pengambil keputusan dalam organisasi, hingga *"national character"* yang menjadi kekhasan suatu bangsa, juga dikemukakan oleh Dobbin (2008).

Dalam berinteraksi, aktor melakukan *impression management* dalam batasan habitusnya, serta menegosiasikan tatanan yang ada dengan memanfaatkan kekuasaan, termasuk *symbolic power* yang samar dan tersembunyi. Audiens punya kekuatan mempengaruhi proses negosiasi dengan memutuskan memberikan atau tidak memberikan apresiasi, atau *difference* dalam istilah Goffman (1959), kepada aktor tertentu. Beberapa proposisi Hallett yang relevan dengan disertasi ini diikhtisarkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Ikhtisar Proposisi-Proposi Budaya Organisasi sebagai *Negotiated Order*

Proposisi ke-1	Ruang sosial mempengaruhi budaya organisasi melalui: (1) konteks di mana budaya organisasi tersebut berada, dan (2) habitus para aktor yang bermain.
Proposisi ke-2	Dalam melakukan *impression management* para aktor memilah *front stage* dan *back stage*. Apa yang tampil di *front stage* tidak selalu mencerminkan hakikat *back stage*.
Proposisi ke-3	Para aktor melakukan *impression management* dalam batasan habitusnya untuk memperoleh *difference* dari audiens guna memperkuat *symbolic power* mereka.

Proposisi ke-4	Pemberian *difference* oleh audiens kepada para aktor didasarkan pada praksis dan interaksi yang sudah dianggap valid dalam konteks budaya organisasi.
Proposisi ke-5	Seorang aktor sulit memonopoli *symbolic power* karena praksis yang dinilai valid dan audiens dalam organisasi sangat bervariasi.
Proposisi ke-6	Para aktor mendayagunakan modal yang dimiliki untuk membangun dan memperkuat *symbolic power* yang akan meningkatkan posisi tawar mereka dalam bernegosiasi.
Proposisi ke-7	Para aktor mengeksekusi *symbolic power* yang mereka miliki dalam bernegosiasi untuk membentuk *negotiated order* yang baru.
Proposisi ke-8	Audiens memiliki kekuatan untuk "mengendalikan" aktor dengan cara memberikan atau tidak memberikan *difference*.
Proposisi ke-9	Banyak/sedikitnya kelompok audiens internal mempengaruhi peluang terjadinya konflik/integrasi dalam organisasi.
Proposisi ke-10	Semakin stabil konteks struktural dari negosiasi yang ada, semakin besar kemungkinan budaya organisasi sebagai *negotiated order* diproduksi dan direproduksi.

Bourdieu (1989) mendefinisikan *symbolic power* sebagai *the power to make groups,* kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah prinsip–prinsip objektif dari penyatuan atau pemisahan, asosiasi atau disosiasi, kekuasaan untuk mempertahankan atau mengubah berbagai klasifikasi, kekuasan mendeskripsikan individu, kelompok, atau institusi melalui kata–kata, serta kekuasaan untuk mendefinisikan situasi di mana interaksi berlangsung Namun demikian, kemampuan konstitutif *symbolic power* ditentukan oleh modal simbolik *(symbolic capital)* yang diperoleh seorang aktor dalam pertarungan simbolik sebelumnya, dan kesesuaian apa yang dinyatakannya dengan realita.

Namun Hallett tidak mengeksplorasi pandangan Bourdieu tentang arena sebagai *field of struggle*, di mana para aktor berjuang meningkatkan posisi objektif mereka (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Arena adalah kelompok yang terorganisasi di seputar kepentingan yang sama, orang-orang yang bersaing untuk memperoleh suatu set sumberdaya material tertentu yang perilakunya terorganisasikan di sekitar kompetisi tersebut. Arena biasanya dikonstruksi secara subjektif oleh peneliti berdasarkan pemahamannya mengenai para aktor (Dobbin, 2008).

Karena berada di arena pertarungan, para aktor menerapkan berbagai strategi, yaitu *"the active deployment of objectively oriented 'lines of action' that obey regularities and form coherent and socially intelligible patterns"* (Wacquant, 1992: 25). Namun, pilihan–pilihan strategi yang tersedia bagi aktor

dibatasi oleh posisi objektif mereka dalam arena, yang ditentukan oleh distribusi modal tertentu dan cara pandang mereka terhadap arena tersebut (Bourdieu dan Wacquant, 1992).

Niilo Kauppi (2003) mengemukakan dua kekuatan kontradiktif yang selalu mewarnai arena politik, yaitu kelompok progresif dan kelompok konservatif, mereka yang menginginkan perubahan dan mereka yang menjaga tatanan, penantang *(challenger)* dan pemegang jabatan *(incumbent)*, *orthodoxy* dan *heterodoxy*, di mana kontradiksi tersebut berakar pada perbedaan habitus para aktor. Pemikiran Kauppi tersebut berakar dari konsepsi Bourdieu (1977) tentang semesta dari yang tak diperdebatkan *(universe of undiscussed/undisputed)*, atau *doxa,* dan semesta diskursus *(universe of discourse/ argument)*, yang terdiri dari *orthodoxy* dan *heterodoxy*, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.6. *Doxa* lebih dari sekedar wacana dominan. Ia adalah wacana yang bersifat *taken for granted*, dianggap mutlak kebenarannya, tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak dapat didiskusikan. Bagian dari semesta wacana di luar *doxa* adalah ranah opini, yang berisi pergulatan antara *orthodoxy*, yaitu opini yang bertujuan untuk memperkuat atau mengembalikan posisi prima dari kebenaran mutlak *doxa*, dengan *heterodoxy*, yaitu opini yang bertujuan menggugat keabsahan *doxa*. Dalam sebuah proses dialektis yang memunculkan ranah opini, terjadi krisis yang "merusak" kesesuaian yang sebelumnya ada antara struktur subjektif agen (habitus) dengan struktur objektif arena. Pertarungan simbolik ini mencapai klimaks ketika *heterodoxy* menjadi *doxa* yang baru, sehingga *orthodoxy* kini menjadi *heterodoxy*.

Gambar 2.6.
Doxa, Orthodoxy, Heterodoxy

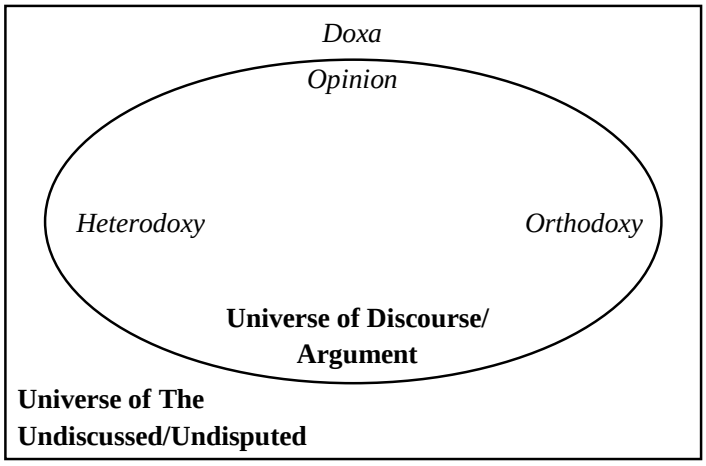

Hallett juga hanya menyinggung sekilas mengenai modalitas yang menjadi dasar eksistensi para aktor dalam arena, padahal berbagai modal (modal sosial, ekonomi, dan kultural) yang kemudian ditransformasikan menjadi modal simbolik merupakan bahan baku bagi *symbolic power* yang menentukan posisi tawar para aktor dalam menegosiasikan tatanan organisasi. Verter (2003) menegaskan, modal kultural merupakan modal yang paling kompleks, baru, dan memiliki manfaat analitis dalam menjelaskan akumulasi modal simbolik dan kekuasaan simbolik. Verter kemudian menempatkan modal spiritual – pengetahuan, kompetensi, dan preferensi spiritual – sebagai bagian dari modal kultural. Dengan kata lain, modal kultural merupakan aset yang bernilai tinggi dalam pasar *symbolic goods*.

Modal eksis dan berfungsi dalam arena, dan ia memiliki kekuatan terhadap arena. Ia menentukan produksi dan reproduksi instrumen yang terkandung dalam arena, yang distribusinya membentuk struktur arena tersebut, namun ia juga memiliki kekuatan terhadap pola dan keteraturan yang mengatur kerja arena, sehingga ia menentukan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh para aktor di dalam arena (Bourdieu dan Wacquant, 1992).

Di arena politik, Kauppi (2003) mengidentifikasi peran sentral dua jenis modal politik, yaitu modal politik personal yang melekat pada diri individu, misalnya karisma, dan modal politik institusional. Modal politik institusional merupakan hasil investasi sebuah institusi politik, yang kemudian sebagian dialihkan kepada para anggotanya dalam bentuk jabatan/posisi. Implikasinya, kekuasaan seorang aktor ditentukan oleh kekuasaan institusi politiknya dan posisinya di dalam institusi tersebut. Jelas bahwa modal politik yang diidentifikasi Kauppi adalah modal simbolik dalam terminologi Bourdieu.

2.1.3. Identitas dan Tatanan Organisasi sebagai Hasil Dinamika Internal

Dalam penelitian disertasi ini, *negotiated order*, yang merupakan hasil kontestasi kelompok-kelompok yang ada dalam PKS, tidak ditekankan pada berbagai bentuk *"formal order"* yang tertulis, seperti konstitusi, kebijakan, tata tertib, dan berbagai bentuk aturan tertulis lainnya, melainkan pada *"actual order"*, *socio-cultural values* yang berlaku dalam keseharian organisasi, baik yang

eksplisit terobservasi, maupun yang implisit terasa menjiwai perilaku anggota organisasi. Dolfsma dan Verburg (2008) mendefinisikan *socio-cultural values* sebagai keyakinan yang dipegang teguh, secara sadar maupun tak sadar, oleh sebagian besar anggota kelompok, yang bersifat etis, kultural, maupun filosofis, terkait dengan hal-hal mendasar, antara lain keadilan, keindahan, cinta, kebebasan, cara memerintah, tatanan dan perilaku sosial, dan identitas personal. *"Actual order"* itulah yang akan menjadi *"categorical distinction"*, atau identitas (Brewer, 2000), yang membedakan PKS dengan entitas selainnya.

Peek (2005) menegaskan, identitas keagamaan yang kuat – yang terbentuk melalui refleksi dan kesadaran pribadi, pilihan individu, dan pengakuan orang lain – dapat meningkatkan identitas kolektif. Dalam proses itu, batasan dan makna keagamaan dikonstruksi, sebagai respon terhadap konflik dan pilihan internal, serta tekanan dan imbalan eksternal yang mengarahkan pembentukan identitas.

Sejalan dengan Peek, Rosenblum (2003) menegaskan peran strategis partai agama dalam mengekspresikan, mengkonstruksi, dan memobilisasi identitas politik dengan ungkapan *"they transform group identity into identity group"*. Lebih jauh ia mengatakan:

> *"Political activity linked to parties is perhaps the principal way of bringing diffuse, politically unorganized groups, whose leaders are self-appointed and not regularly accountable for the way they represent co-religionists in political life, into the democratic mainstream. With political organization and especially partisanship, the 'fact of pluralism' is made concrete for democratic purposes"* (hal. 24).

Di sisi lain, Rosenblum berpendapat bahwa keberadaan organisasi politik berdasarkan agama – baik partai politik maupun kelompok partisan keagamaan yang berafiliasi pada partai sekular – akan memicu kompetisi antara otoritas agama dengan aktifis partai dalam hal klaim tentang siapa yang berhak mewakili komunitas agama yang bersangkutan, siapa yang layak mengarahkan aktifitas politik umat, serta persaingan untuk mengakses kontribusi waktu, energi, dan dana dari jemaah. Dalam konteks PKS, pendapat Rosenblum tersebut berpeluang menjelaskan menghangatnya dinamika internal yang terjadi setelah Jemaah Tarbiyah berubah menjadi PKS.

Tabel 2.9
Tipologi Spiritualitas Organisasi

		Asumsi tentang Anggota Organisasi	
		Dependen	**Independen**
Sifat Organisasi	**Tanpa Kesadaran Spiritual**	**Organisasi Asketis** ***(the Aescetic Organization)*** Positif: Rasionalitas dan kejelasan. Negatif: Pandangan yang dangkal tentang tujuan organisasi.	**Organisasi Profesional** ***(the Professional Organization)*** Positif: Tidak ada tuntutan spiritual terhadap anggota organisasi, sehingga tidak ada kekuatan spiritual yang menekan kebebasan. Negatif: Ikatan yang kalkulatif dengan organisasi, perilaku sepenuhnya ditentukan oleh individu, terjadi penyimpangan sosial.
	Berkesadaran Spiritual	**Organisasi yang Penuh Perasaan** ***(the Soulful Organization)*** Positif: Integrasi antara individu dengan organisasi. Negatif: Pemaksaan dan campur tangan organisasi terhadap individu, serta sinisme dalam organisasi jika anggota melihat adanya perbedaan antara "apa yang dikatakan" dengan "apa yang dilaksanakan."	**Organisasi Holistik** ***(the Holistic Organization)*** Positif: Perhatian yang integral terhadap kebutuhan manusia, pemaknaan yang mendalam tentang peran dan tugas. Negatif: Organisasi menjadi "agama."

Spiritualitas adalah bentuk identitas yang penting. Pina e Cunha et.al. (2006) mengajukan empat tipe ideal spiritualitas organisasi dengan menyilangkan aspek asumsi tentang anggota organisasi dengan tipe organisasi sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.9. Pina e Cunha et.al. mengasumsikan terdapat dua jenis anggota organisasi, yaitu aktor yang dependen dan aktor yang independen, yang dipandang sebagai warga organisasi *(citizen)*, bukan sekedar anggota yang pasif–reaktif. Tipe organisasi juga terdiri dari dua jenis, yaitu *spiritually informed management,* yang mengakui adanya aspek spiritual sebagai bagian integral dari praktik–praktik manajemen, dan *spiritually uninformed management*, yang melihat organisasi sebagai entitas nonspiritual.

Selanjutnya, Hashem (2006) membuat tipologi identitas aktifisme Islam berdasarkan warna praksisnya sebagaimana terdapat pada tabel 2.10. Ia menyilangkan tipe aktifisme (gerakan lokal, gerakan global, aktifisme individual) dengan pendekatan fikih (didaktik, literalis/salafis, eklektik). Gerakan lokal bisa berwujud upaya peningkatan pengetahuan agama dan peran ulama (didaktik), pendisiplinan kehidupan beragama secara ketat (literalis), atau penyesuaian dengan realita dan kebutuhan masyarakat (eklektik). Sementara itu, gerakan

global bisa berupa pembentukan otoritas global yang menyebarluaskan syariat (didaktik), otoritas yang memaksa penerapan syariat secara tekstual (literalis), atau pengintegrasian prinsip-prinsip Islam ke dalam tatanan nasional dan global. Sedangkan aktifisme individual bisa berupa kenangan atas kejayaan Islam masa lampau (didaktik), perdebatan teks-teks religius (literalis), atau penyelarasan teks-teks agama dan realita empirik (eklektik).

Tabel 2.10
Tipologi Praksis Aktifisme Islam

		Pendekatan Fikih		
		Didaktik (Warisan Abadi)	**Literalis/Salafis** (Mandat Tekstual)	**Eklektik** (Kontekstualisasi)
Tipe Aktiisme	**Gerakan Lokal** (Memotivasi)	Pengajaran dan Peribadatan	Tindakan Pendisiplinan	Penyesuaian
	Gerakan Global (Rekognisi Politik)	Otoritas Penyebar Syariat ("Imam")	Otoritas Pemberlaku Syariat ("Sultan")	Kontemporalisasi
	Aktifisme Individual (Peneguhan dan Pembentukan Kembali)	Kenangan atas Kejayaan Islam Masa Lampau	Obsesi Tekstual	Keselarasan Teks dan Realita

Gambar 2.7
Ikhtisar Proses Pembentukan dan Perubahan Identitas Kelompok

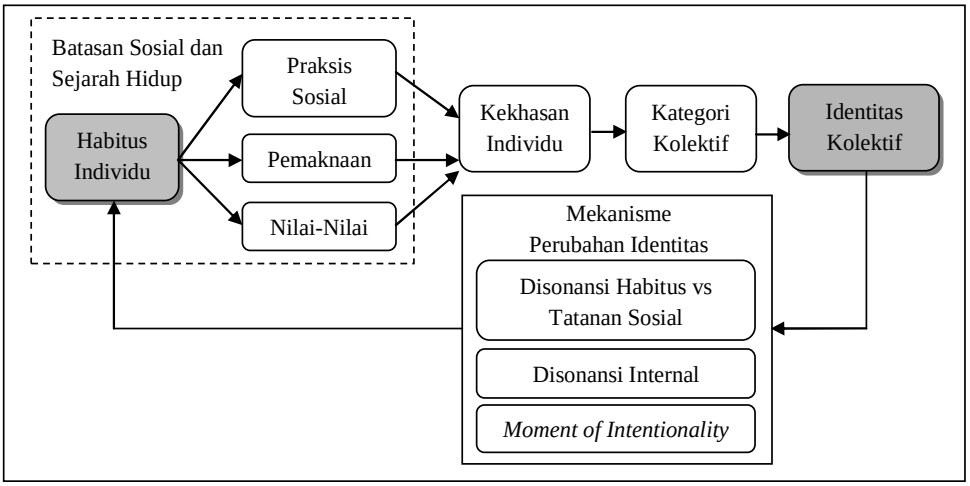

Todd (2005) menggambarkan pembentukan dan perubahan identitas sebagai proses yang terjadi dalam habitus individu sebagaimana terdapat pada gambar 2.7. Menurut Todd, identitas dibentuk dan diubah melalui serangkaian proses yang kontinyu untuk memilih secara sadar sejumlah praksis sosial,

pemaknaan, dan nilai–nilai, dalam batasan sosial dan sejarah hidup. Perubahan identitas bisa terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu disonansi antara habitus dengan tatanan sosial, disonansi internal dalam habitus, dan *moment of intentionality*, di mana identitas baru dibentuk dengan sengaja. Todd merekomendasikan tipologi transformasi identitas kolektif dalam merespon dinamika tatanan sosial yang terdiri dari reafirmasi, asimilasi, konversi, adaptasi, penyesuaian ritual, dan privatisasi, sebagaimana terdapat para tabel 2.11.

Tabel 2.11
Tipologi Perubahan Identitas Kolektif

		Tingkat Perubahan Identitas		
		Tidak Berubah	Berubah Sebagian	Berubah Total
Hubungan anara Identitas dengan Praktik	Transparan dan Selaras	**Reafirmasi *(Reaffirmation)*** Kelompok tetap pada identitas semula. Kelompok yang diuntungkan oleh perubahan tatanan sosial akan mendukung, yang dirugikan akan menentang.	**Asimilasi *(Assimilation)*** Kelompok mengubah unsur–unsur identitasnya secara sukarela, namun tetap memelihara keterkaitan dengan jati diri lama, karena identitas baru tersebut sebenarnya telah menjadi jatidiri sekunder mereka.	**Konversi *(Conversion)*** Perubahan identitas kelompok secara menyeluruh, di mana unsur–unsur dari pengelompokkan lama dianggap tidak berlaku lagi.
	Diwarnai Kebingungan dan Ketegangan	**Adaptasi *(Adaptation)*** Kelompok menerima realita adanya praktik–praktik baru yang dituntut oleh tatanan sosial baru, namun mereka mempraktikkan itu dengan tetap mempertahankan nilai–nilai dan identitas lama.	**Penyesuaian Ritual *(Ritual Appropriation)*** Praktik–praktik baru diterima dan berdampingan dengan narasi dan ritual lama, di mana keduanya saling mempengaruhi.	**Privatisasi *(Privatization)*** Kelompok yang termarjinalkan menarik diri dan mempraktikkan unsur–unsur identitas mereka di dalam area pribadi.

Sementara itu, Dolfsma dan Verburg (2008) berpendapat bahwa perubahan institusional, yang menurut peneliti juga berlaku untuk perubahan identitas, dipicu oleh adanya *tensions* antara institusi dengan *socio-cultural values,* baik berupa *value tensions, institution tensions,* maupun *value-institution tensions,* tanpa mengabaikan aspek-aspek kepentingan dan kekuasaan. Dalam *value tensions*, tata nilai lama yang mendasari tatanan institusional tertentu bertentangan dengan tata nilai baru yang menjadi preferensi sebagian anggota kelompok. Implikasinya, terbentuk konstelasi tata nilai baru dan tatanan institusi baru dengan atau tanpa

mengadopsi sebagian unsur-unsur lama. Sementara itu, *institution tensions* terjadi ketika beberapa tatanan institusi yang eksis berlandaskan suatu tata nilai tertentu kemudian saling bertentangan, dan akhirnya menghasilkan tatanan institusi baru berdampingan dengan tata nilai lama. Sedangkan *value-institution tensions* terjadi ketika suatu konstelasi tata nilai-tatanan institusi bertentangan dengan konstelasi tata nilai-tatanan institusi baru. Hasilnya, tatanan institusi baru akan berubah, menyesuaikan diri dengan tata nilai lama, atau tata nilai baru akan diadopsi sehingga selaras dengan tatanan institusi baru.

Rosenblum (2003) mendeskripsikan proses pembentukan yang khas dari partai agama sebagai kelompok identitas *(identity group)*, di mana agama, yang dalam politik demokratis cenderung dipandang netral atau bahkan merugikan, dipilih sebagai identitas kelompok *(group identity)*, lalu dibentuk sedemikian rupa sehingga mendukung partisipasi dalam demokrasi. Dalam hal ini, para pemimpin politik – ulama maupun politisi – berperan menafsirkan agama untuk keperluan politik, membangun identitas politik yang khas bagi komunitas mereka, serta meyakinkan umat bahwa berpolitik tidak melanggar doktrin agama, dan kegagalan membangun identitas dan organisasi politik agama akan sangat merugikan umat.

Menurut Rosenblum, proses pembentukan partai agama sebagai kelompok identitas lebih tepat digambarkan sebagai akulturasi demokratis ketimbang asimilasi sekularistis atau sekularisasi. Sekularisasi dipahami sebagai berubahnya politik berdasarkan agama menjadi agama politik atau politisasi agama, menyurutnya ketaatan terhadap agama, serta terserapnya spirit dan institusi agama oleh budaya umum sehingga kehilangan diferensiasinya. Sedangkan dalam akulturasi demokratis, para pemimpin politik secara aktif membentuk dan menginstitusionalisasikan identitas politik agama mereka berangkat dari pengakuan atas pluralitas, di mana agama mereka bukanlah satu-satunya keyakinan yang bersifat universal, sehingga partisipasi dalam pemilu merupakan bentuk argumentasi bahwa apa yang baik dalam pandangan kelompok mereka baik pula bagi publik.

2.2. Telaah Beberapa Studi Terdahulu

2.2.1. Partai Politik Islam di Arena Politik Indonesia: PKS dan PPP

Peta yang relatif lengkap tentang kiprah Islam politik di Indonesia dikemukakan oleh Baswedan (2004). Dari tujuh partai politik yang meraih suara signifikan dalam Pemilu 1999, Baswedan menempatkan PBB, PPP, PKS (sebelumnya PK), PKB, PAN dan Partai Golkar ke dalam kategori *Islam-friendly parties*, yang tidak hanya mencakup partai-partai berasas Islam, namun juga yang sensitif terhadap aspirasi umat Islam, serta didominasi oleh tokoh-tokoh yang berlatar-belakang santri. Sementara itu, PDIP dikategorikan sebagai *secular-exclusive party* yang menjaga jarak terhadap agenda-agenda Islam. Ketujuh partai tersebut ditempatkan oleh Baswedan dalam kontinum ideologi sebagaimana terdapat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8
Kontinum Ideologi Partai Politik

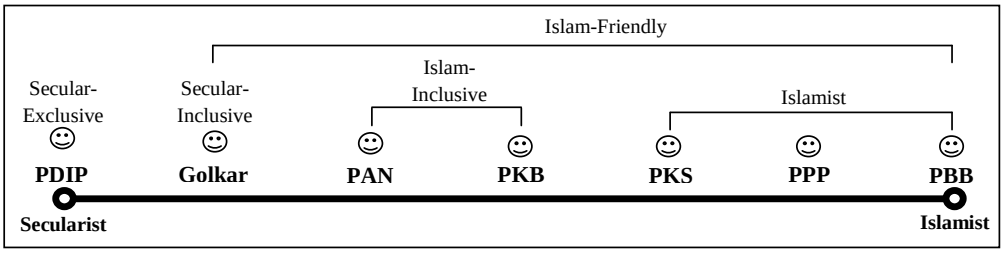

Baswedan juga mengidentifikasi sejumlah karakteristik PKS. Pertama, sejak awal kiprahnya di publik politik Indonesia PKS menghindari ketergantungan pada tokoh tertentu. Kedua, PKS relatif mampu mengelola perbedaan internalnya sehingga terhindar dari perpecahan. Ciri yang pertama dan kedua ini membedakan PKS dari keenam partai lainnya. Ketiga, PKS, dan juga PAN, tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik masa lalu, sehingga tidak memiliki beban sejarah. Keempat, PKS, sebagaimana Golkar, PPP, dan PBB, tidak merepresentasikan salah satu dari dua organisasi Islam mainstrem: NU dan Muhammadiyah. Kelima, PKS menyiasati jumlah kursinya yang masih relatif kecil di parlemen dengan mengintensifkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat yang kemudian diinstitusionalisasikan dalam bentuk organisasi sayap *(wajihah)*.

Keenam, berbeda dengan partai-partai lain, PKS mengakses para anggota sampai ke level terbawah sepanjang waktu, terutama melalui pertemuan pekanan *halaqah*. Pertemuan tersebut lebih dari sekedar forum untuk membahas isu-isu politik, karena ia juga merupakan sarana peningkatan pemahaman agama, pelibatan anggota, rekrutmen anggota baru, dan pembentukan disiplin berpartai. Ketujuh, berbeda dengan PBB dan PPP, PKS tidak berfokus pada upaya mengadopsi syariah secara formal dalam perundang-undangan, melainkan memusatkan perhatian pada dakwah untuk mengedukasi umat mengenai syariah.

Terkait dengan ciri-ciri yang telah diuraikan di atas, Baswedan mengatakan, *"Yet, the above comparative analysis indicates that the PKS has the potential to emerge as a major player as well, provided that it is able to connect with pious but pluralistic electorates"* (hal. 690). Lonjakan perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 (7,34%) dibandingkan PK tahun 1999 (1,4%) menunjukkan bahwa prediksi tersebut relatif tepat, walaupun kemudian pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS mengalami stagnasi.

Kajian yang relatif komprehensif tentang PKS dilakukan oleh Yon Machmudi (2008, disertasi ditulis 2006). Ia menunjukkan bahwa PKS memiliki sejarah yang panjang: *halaqah* yang berlanjut dengan lembaga–lembaga kajian keislaman intra–kampus, pemenangan tampuk kepemimpinan lembaga–lembaga kemahasiswaan, pendirian jejaring gerakan dakwah ekstra kampus melalui Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang kemudian membidani Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjelang Reformasi 1998, dan akhirnya mendirikan Partai Keadilan (PK) 28 Juli 1998 dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 20 April 2003.

Sebagai tulang punggung PKS, Jemaah Tarbiyah terinspirasi oleh Hasan al–Banna, pendiri Ikhwan al-Muslimin yang sufistik dan menekankan toleransi terhadap keragaman praktik keagamaan di antara umat Islam. Implikasinya, dalam banyak hal PKS memilih langkah akomodatif dan pragmatis, misalnya tidak mengedepankan formalisasi syariat Islam dan berkoalisi dengan beragam kekuatan politik, bahkan partai agama lain, dalam sejumlah Pemilukada. Sebelumnya, di masa represi regim Orde Baru, Jemaah Tarbiyah memilih

menghindari persentuhan langsung dengan gerakan–gerakan yang dipandang ekstrim oleh penguasa, serta keterlibatan dalam isu–isu domestik, khususnya politik.

Machmudi (2008) memosisikan Jemaah Tarbiyah dan PKS sebagai hasil konvergensi dan *melting pot* dari kelompok-kelompok tradisionalis dan modernis muslim Indonesia yang mengadopsi pengaruh internasional Ikhwan al-Muslimin, namun juga mengakomodasi unsur–unsur lokal, sehingga para kader Jemaah Tarbiyah/PKS menjadi sangat beragam dan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: revivalis, modernis, dan tradisionalis. Kelompok revivalis memiliki latar belakang afiliasi dengan gerakan-gerakan Islam yang berorientasi pada pemurnian Islam secara relatif ketat, seperti Persatuan Islam (Persis) dan "sayap radikal" dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Kelompok ini lebih cenderung membentuk kader-kader militan ketimbang memperluas pengaruh terhadap masyarakat yang lebih luas. Sedangkan kelompok modernis memiliki latar belakang afiliasi dengan organisasi-organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammadiyah, dan "sayap moderat" dari DDII. Sementara itu, kelompok tradisionalis memiliki latar belakang afilitasi dengan "sayap tradisionalis" dari Masyumi, namun tidak terhubung langsung dengan para pemuka organisasi muslim tradisionalis, Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun tokoh-tokoh berlatarbelakang Islam tradisionalis ini sebenarnya dominan di Jemaah Tarbiyah, namun secara organisatoris Jemaah Tarbiyah/PKS lebih dekat dengan kelompok-kelompok muslim modernis, karena secara umum para kader tidak melanjutkan hubungan mereka dengan para pemuka NU setelah bergabung dengan Jemaah Tarbiyah.

Machmudi (2008) menyimpulkan bahwa doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* (jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah), dan *"yakhtalituna walakinna yatamayyazun"* (bercampur namun berbeda) sering menimbulkan dilema bagi para kader ketika bergerak di arena politik. Sikap akomodatif, bahkan pragmatis, sebagai turunan dari doktrin tersebut, sering tidak memuaskan seluruh konstituen PKS. Walaupun hingga saat ini PKS masih yang paling solid di antara partai–partai Islam, tetap terdapat "riak–riak" friksi internal yang relatif kuat dan terbaca oleh publik eksternal.

Walaupun sudah menyinggung adanya sebagian kecil kader yang mengkritisi kinerja dan beberapa kebijakan partai, Machmudi (2008) belum banyak mengupas dinamika internal, khususnya kecenderungan faksionalisasi dalam PKS, tarik–menarik antara idealisme Partai Dakwah dan pragmatisme partai politik, dan implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, aturan main, serta pola relasi yang ada.

Di sisi lain, Firman Noor (2007) memasukkan PKS ke dalam kategori fundamentalisme moderat karena ia berbeda dari kelompok modernis yang diwakili oleh M. Natsir, M. Amien Rais, dan Yusril Ihza Mahendra terkait ciri–ciri fundamentalismenya (obsesi membangun sistem politik Islam universal), namun ia juga tidak sama dengan kelompok fundamentalis radikal seperti FPI, FKASWJ, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) disebabkan pendekatan moderatnya (menerima wacana *nation state* dan demokrasi, berkompromi dan bekerja sama dalam sistem, menghindari kekerasan, dan percaya pada perubahan gradual menuju masyarakat ideal).

Menurut Noor (2007), masa depan sikap moderat PKS akan ditentukan oleh siapa yang memimpin dan seberapa kondusif lingkungan politik nasional terhadap pluralisme. Naiknya elit yang moderat atau kader–kader muda yang pragmatis, di samping lingkungan politik yang mengapresiasi pluralisme, akan mendorong PKS tetap moderat, khususnya untuk mempertahankan posisi politiknya. Sebaliknya, menguatnya kelompok militan dan merebaknya gagasan Islamisasi dalam masyarakat, akan mendorong radikalisasi PKS. Faksionalisasi PKS tidak terkait dengan perbedaan latar belakang keislaman tokoh–tokohnya, karena proses tarbiyah telah menginternalisasikan paradigma baru, namun terkait dengan tingkat militansi dan keketatan penerapan paradigma baru tersebut.

Terdapat catatan atas pemikiran Noor (2007). Penempatan PKS sebagai varian dari fundamentalisme, terkesan tendensius. Jika “fundamentalis moderat” adalah sebuah kategori yang bersifat umum, mengapa hanya PKS yang terdapat dalam kategori ini? Noor tidak mengupas perdebatan tentang dasar negara yang menjadi *standpoint* Masyumi di Konstituante, atau keinginan PPP dan PBB mengembalikan tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945.

Artinya, boleh jadi gagasan politik Masyumi, PPP, dan PBB lebih "fundamentalis" ketimbang PKS. Noor juga memosisikan PKS sebagai organisasi yang monolitik dengan tidak menyajikan dinamika dan keragaman internal PKS, di samping tidak merekognisi pergeseran pandangan politik dari PK ke PKS. Pemetaan kontinum ideologi partai politik yang dikemukakan Baswedan (2004) menguatkan catatan ini, di mana PPP dan PBB lebih menampakkan ciri-ciri partai para *islamists* ketimbang PKS.

Sementara itu Permata (2008a) menganalisis PKS menggunakan teori institusionalisme kognitif Douglas North, dengan fokus pada dampak institusi, formal maupun informal, terhadap pemahaman dan perilaku manusia. Dalam hal ini ideologi merupakan varian institusi informal yang menjawab apa yang baik dan apa yang buruk (etika), bagaimana sumberdaya milik masyarakat didistribusikan (ekonomi), dan di mana kekuasaan layak ditempatkan (politik). Secara umum penelitian Permata mengkonfirmasi berlakunya substitusi internal antara institusi formal dan informal di PKS.

Permata (2008a) melihat periode PK dan peralihan PK menjadi PKS hingga 2004 sebagai periode pembelajaran berpolitik yang intensif bagi para kader Jemaah Tarbiyah, misalnya partisipasi PK dalam Poros Tengah untuk mendukung Gus Dur menjadi Presiden RI yang kemudian dijatuhkan dan mendukung Megawati sebagai penggantinya, tarik-menarik dalam menentukan dukungan terhadap kandidat Presiden menjelang pilpres 2004 antara "pilihan ideologis" Amien Rais dan "pilihan pragmatis" Wiranto, serta keputusan PKS untuk berkoalisi mendukung SBY di Pilpres putaran kedua dengan argumentasi untuk memperoleh pembelajaran berkiprah sebagai eksekutif.

Menurut Permata (2008a), peralihan PK menjadi PKS menunjukkan kecenderungan oligarkis secara struktural maupun praktis. Secara struktural kekuasaan tertinggi partai beralih dari Kongres Nasional Partai yang dimplementasikan oleh Majelis Syura di masa PK, kepada Majelis Syura yang pada praktiknya dikendalikan oleh segelintir tokoh kunci di masa PKS. Di tataran praktis, orientasi partai beralih dari dorongan ideologis semasa PK, menjadi

pertimbangan pragmatis untuk mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan ekspansi organisasi setelah menjadi PKS (hal. 122).

Terkait dengan dinamika internal organisasi, Permata (2008a) mencatat adanya konflik antara unsur idealis, yaitu para tokoh Jemaah Tarbiyah dengan unsur realis, yaitu para politisi PKS. Kesimpulan Permata tersebut selaras dengan pendapat Rosenblum (2003) bahwa munculnya partai agama berpeluang menimbulkan kompetisi antara pemegang otoritas agama dengan aktifis partai. Di samping itu, Permata juga melihat bahwa PKS menampilkan ciri-ciri beberapa tipe partai sekaligus, yaitu *mass party* dilihat dari keterlibatan para aktifisnya dalam aktifitas partai sepanjang waktu, *catch-all party* dalam hal keanggotaannya yang terbuka, dan *elites party* dalam hal peran pemimpin partai mengarahkan para anggota, serta bertindak untuk dan atas nama mereka. Sementara itu, dalam persaingan di pemilu, Permata menyatakan, "PKS's patterns of behavior have changed, from heavily ideological in its early years and during the 1999 elections to more rational in subsequent years, and especially during the 2004 elections" (hal. 229).

Dinamika relasi PKS dengan pemerintah juga menunjukkan pola yang menarik. Jika sebelum 2004 partai ini menjadikan ideologi sebagai rujukan utamanya, sesudah 2004 perilaku politik PKS menjadi lebih berwarna. Di satu sisi PKS mendukung kebijakan pemerintah yang tidak populis dalam menaikkan harga BBM, namun di sisi lain partai ini mendorong diundangkannya RUU Pornografi dan investigasi atas impor beras asal Vietnam, walaupun Menteri Pertanian saat itu adalah kader PKS.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada antara penelitian Machmudi (2008), Noor (2007), dan Permata (2008a, 2008b) yang dirangkum dalam tabel 2.12, ketiganya menunjukkan bahwa PKS telah menyediakan prasyarat penting bagi berlangsungnya transisi demokrasi di sebuah negara muslim, yaitu adanya gerakan keagamaan yang menerima dan melegitimasi pluralitas dan perbedaan dalam masyarakat, serta pemisahan kekuasaan dalam negara (Hefner, 2001).

Tabel 2.12
Ikhtisar Hasil Penelitian tentang Jemaah Tarbiyah/PKS

Machmudi (2006)	Noor (2007)	Permata (2008)
♦ Kategori: Santri Global, konvergensi antara tradisionalis dan modernis muslim, dan antara pengaruh internasional (IM) dengan unsur lokal. ♦ Terdapat tiga kelompok kader berdasarkan latar-belakang afiliasi keagamaannya: revivalis, modernis, tradisionalis. ♦ Memiliki akar gerakan yang panjang: *halaqah* di kampus, LDF/LDK, FSLDK, KAMMI, PK. ♦ Di awal menghindari isu politik dan isu domestik agar tidak berkonfrontasi dengan regim. ♦ Beberapa doktrin menimbulkan dilema ketika bergerak di arena politik; mendorong sikap akomodatif dan pragmatis yang tidak selalu bisa diterima oleh semua pihak di internal partai. ♦ Belum mengupas dinamika internal secara mendalam, termasuk faksionalisasi dan tarik-menarik antara idealisme Partai Dakwah dan pragmatisme partai politik. ♦ Belum mengupas pergeseran opini publik dan sikap kader sebelum, saat, dan setelah Pemilu 2009.	♦ Kategori: fundamentalisme moderat, terobsesi oleh sistem politik Islam universal namun bersedia menerima wacana *nation state* dan demokrasi, perubahan gradual, serta nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan keadilan. ♦ Substansi lebih penting dari bentuk luar; tidak melibatkan diri dalam perdebatan "negara Islam." ♦ Mengusung konsep negara organik Hegel yang mendukung intervensi negara sehingga bisa melemahkan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok minoritas. ♦ Peran sentral *syura'* sebagai jembatan antara suara mayoritas dengan kebenaran; menimbulkan oligarki. ♦ Masa depan PKS tergantung dari moderat/ tidaknya elit partai dan kondisi arena politik Indonesia. ♦ Perbedaan tingkat militansi dan cara memahami paradigma akan mendorong faksionalisasi. ♦ Jemaah Tarbiyah/PK/PKS dianggap monolitik dan tetap.	♦ Periode PK sebagai periode pembelajaran berpolitik yang intensif bagi para kader Jemaah Tarbiyah. ♦ Peralihan PK menjadi PKS menunjukkan tendensi oligarkis pada level organisasi (otoritas tertinggi pengambil keputusan) dan praktis (fokus partai). ♦ Secara internal terdapat konflik antara unsur idealis dengan realis. ♦ Tampil sebagai *mass party*, *catch-all party*, dan *elites party* sekaligus. ♦ Dua identitas yang seolah paradoksal: di satu sisi sebagai kelanjutan tradisi Islam politik Indonesia, di sisi lain sebagai generasi baru Islam politik yang mengambil inspirasi dari gerakan Islam internasional. ♦ Moderasi ideologis dalam propaganda publik dan pergeseran tujuan dalam pemilu. ♦ Perilaku politik yang lebih "berwarna" pasca 2004. ♦ Dinamika perilaku politik PKS adalah konsekuensi dari dinamika institusional yang dihadapi sebagai aktor yang rasional; terdapat substitusi internal antara institusi informal (ideologi) dengan institusi formal.

Walaupun indikasi pengelompokkan/faksionalisasi sudah terlihat dalam tulisan Machmudi (2008), Noor (2007), dan Permata (2008a), deskripsi yang lebih rinci dikemukakan oleh Hwang dan Mecham (2010), yang melihat pengelompokkan/faksionalisasi tersebut merupakan implikasi dari titik berangkat PKS sebagai jemaah. Dalam pandangan mereka terdapat kelompok pragmatis (Hilmi Aminuddin, Anis Matta, Fahri Hamzah), puritan (Mutammimul Ula dan

Abdi Sumaiti), dan kelompok mayoritas yang berada di tengah, mendukung gagasan pragmatis, namun juga membenarkan hal-hal yang menjadi perhatian dan keprihatian kelompok puritan. *Tensions* di antara kelompok pragmatis dan puritan terkait dengan visi dan strategi PKS sebagai organisasi, serta bagaimana para elit partai selayaknya menampilkan diri mereka, yang dapat dirinci menjadi tiga hal. Pertama, bagaimana gaya hidup yang layak sebagai kader PKS? Kedua, seterbuka apakah PKS seharusnya? Ketiga, sejauh mana PKS dapat memoderasi ideologi dan strateginya dalam upaya untuk menjadi partai pemenang? Tarik-menarik yang terjadi secara internal tersebut membuat PKS gamang dalam mendefinisikan identitasnya. Hwang dan Mecham mengatakan, *"Such shifting positions put the PKS in position of being at once too Islamist to appeal to moderate voters, and too moderate for many Islamists"*. Friksi tersebut bahkan juga terlihat cukup tajam dalam menyikapi hasil Pemilu 2009, yang digambarkan oleh Hwang dan Mecham, *"In the aftermath, pragmatists within the PKS lauded the open party strategy for enabling the party to more or less maintain its 2004 vote percentage, while purists blamed it for the party's failure to net more votes"*. Dengan menganalisis data penurunan suara di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, yang merupakan lumbung suara PKS di Pemilu 2004, kedua penulis tersebut menyimpulkan bahwa upaya PKS untuk bergerak ke tengah dan menjadi "partai kita semua" menimbulkan "biaya" yang signifikan, karena implikasi strategi tersebut terhadap segmen puritan tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Sementara itu, Arief Mudatsir Mandan (2008) menunjukkan keberlakuan tesis Althusser tentang peran sentral aparatus idelogi di PPP. Suara PPP di tingkat nasional anjlok sepeninggal KH. Bisri Syansuri, tokoh NU yang menjadi Ketua Majelis Syuro PPP. Sebaliknya, di Jepara sejumlah Kyai tetap berperan efektif sebagai aparatus ideologi yang mereproduksi nilai–nilai yang dibutuhkan untuk tetap bertahan di tengah persaingan politik yang ketat. Keberhasilan "ideologisasi" tersebut terlihat antara lain dari pernyataan sejumlah kader PPP yang menyetarakan kewajiban berpartai dengan kewajiban beragama.

Hasil penelitian Mandan memberikan gambaran bagaimana ideologi Islam bekerja dalam menghadapi realita arena politik Indonesia. Jemaah Tarbiyah/PKS memang tidak memiliki tradisi pesantren dengan hubungan khas kyai-santri

seperti NU, namun ia memiliki format hubungan *qiyadah-jundiyah* yang seringkali lebih ideologis. Patut diduga bahwa relatif solidnya tatanan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang sampai saat ini mampu mencegah terjadinya perpecahan yang serius di PKS, sebagaimana yang sudah terjadi di banyak partai Islam, termasuk PPP. Hal ini sejalan dengan argumentasi Rosenblum (2003) tentang tiga kekuatan partai agama. Pertama, dalam partai agama terdapat keterhubungan sosial yang kuat, disamping integrasi antara agama dengan politik, yang dikokohkan oleh doktrin agama dan moral yang diyakini. Kedua, partai agama memiliki konsepsi ideologi atau *worldview* yang lebih komprehensif ketimbang partai sekular. Ketiga, partai agama bekerja dalam perspektif waktu yang lebih panjang daripada sekedar berpartisipasi dalam pemilu atau merespon isu-isu kontemporer.

2.2.2. Gerakan Islam di Arena Politik Internasional

Sebagai organisasi aktifis Islam yang paling tua, besar dan berpengaruh di dunia (Leiken dan Brooke, 2007), mudah dipahami jika Ikhwan al-Muslimin (IM) merupakan inspirasi terpenting PKS.[1] Munson (2001) berargumentasi bahwa pesatnya pertumbuhan IM disebabkan oleh keselarasan antara gagasan dan ideologi IM dengan struktur dan aktifitas organisasi, serta keseharian masyarakat Mesir.

Namun IM tidak lepas dari dinamika internal dan faksionalisasi. Ide radikal Sayyid Quthb, seorang pemikir IM berpengaruh, yang menuntut pembentukan sistem Islam dari atas dengan membongkar sistem *jahiliyah* seperti termaktub dalam bukunya *Ma'alim fii ath-Thariq* (Petunjuk Jalan), jelas berseberangan dengan ide Islamisasi gradual dari bawah ala Hasan al-Banna, pendiri IM. Untuk memisahkan IM dari dimensi radikal pemikiran Quthb, penerus

[1] Pengaruh Ikhwan al-Muslimin terhadap Jemaah Tarbiyah/PKS, khususnya terhadap budaya organisasinya, diulas di Bab 3. Sejauh ini terdapat kontroversi tentang sejauh mana hubungan antara Jemaah Tarbiyah/PKS dengan Ikhwan al-Muslimin (IM). Menurut Machmudi (2008), IM adalah salah satu sumber inspirasi Jemaah Tarbiyah yang kemudian diadaptasi dengan unsur-unsur lokal. Sementara itu Qardhawi (2008) mengatakan bahwa PKS adalah representasi Ikhwan al-Muslimin di Indonesia.

al-Banna, Hasan al-Hudaibi, menerbitkan *Du'ah, la Qudhah* (Penyeru, Bukan Hakim) di tahun 1969 yang menegaskan fokus IM sebagai gerakan dakwah.

Di sisi lain terdapat kelompok generasi muda IM yang tidak sabar dengan aktifisme gradual IM dan frustrasi dengan struktur IM yang sentralistis. Mereka berhimpun dalam *Hizb al-Wasat* (Partai Pertengahan) yang menuntut keterlibatan dalam politik praktis dan perhatian pada isu-isu kontemporer seperti demokrasi, *civil society*, HAM, dan negara bangsa dalam konteks Islam. Pemikiran kelompok ini banyak dipengaruhi oleh Yusuf al-Qardhawi dan sejumlah intelektual muslim Mesir yang sering dijuluki kelompok *wasatiyah* (pertengahan) (Greg Fealy dan Anthony Bubalo, 2005).

Selain IM, kiprah politik para aktifis Islam Turki merupakan pembanding yang penting dalam mengkaji Jemaah Tarbiyah/PKS. Özbudun (2006) meneliti Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) Turki yang mengidentifikasi dirinya sebagai "partai demokrat yang moderat dan konservatif" dan "satu-satunya kekuatan kanan-tengah yang tidak bisa diragukan".[2] AKP meraih 34,3% suara pada pemilu parlemen 2002 dan 41,2% pada pemilu lokal 2004, sehingga menjadi satu–satunya partai – setelah terakhir ANAP tahun 1991 – yang mampu memerintah sendiri tanpa koalisi.

Penelitian Özbudun menyimpulkan beberapa hal. Pertama, untuk sukses mendulang suara pemilih, partai perlu melakukan perubahan mendasar dalam merespon tantangan eksternal. Kedua, konsistensi "pesan" yang disampaikan kepada pemilih melalui program, sistem nilai, organisasi partai, strategi bersaing, kampanye politik, dan citra pribadi tokoh-tokoh partai, sangat menentukan keberhasilan partai meraih dukungan. Ketiga, keberhasilan dalam pemilu juga sangat ditentukan oleh kemampuan partai menarik simpati pemilih dari kelompok–kelompok yang bervariasi. Keempat, untuk menang partai harus

[2] Sebagian elit dan kader PKS kerap menjadikan AKP Turki sebagai *benchmark* partai politik yang sukses mengusung Islam substantif, dan karenanya membandingkan AKP dengan PKS. Bahkan seorang elit PKS menjadikan perbandingan kedua partai ini sebagai fokus penelitiannya dalam penulisan disertasi di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Namun seorang informan mengkritik bahwa perbandingan tersebut kerap hanya merupakan upaya untuk melegitimasi langkah-langkah pragmatis PKS. Padahal menurutnya, terlepas dari kemasan AKP yang sekuler para elit partai tersebut tetap menjaga integritas, khususnya dalam bidang finansial, dengan membangun kekuatan ekonomi.

mengedepankan kinerja dan citra yang baik, karena kini pemilih cenderung pragmatis.

Temuan Özbudun tersebut sejalan dengan pendapat Kayhan Delibas (2009) yang menegaskan bahwa gerakan Islam Turki muncul dan berkembang sebagai gerakan akar rumput yang populer sehingga memiliki orientasi politik yang kuat dan merupakan manifestasi "agama publik," sebagaimana Hamas di Palestina, Hizbullah di Libanon, dan Jamaat al-Islami di Pakistan. Menurut Delibas, politik Islam di Turki merupakan bagian dari proses "*multiple modernities"* yang dipengaruhi oleh masifnya pendidikan, komunikasi, dan urbanisasi. Intinya, AKP meraih sukses karena kemampuannya mengambil langkah-langkah pragmatis tanpa melepaskan bingkai idealismenya.

Sementara itu, Hwang dan Mecham (2010) membuat perbandingan yang menarik antara AKP Turki dengan PKS. Dalam pandangan mereka, AKP dan PKS memiliki banyak kesamaan, antara lain berkirpah di dua negara mayoritas muslim yang paling demokratis di dunia, efektifitas dalam menjangkau pemilih di akar rumput, fokus yang kuat terhadap isu-isu populis, jejaring yang kuat di kalangan profesional dan pemuda, dan keinginan untuk menjadi pemain kunci dalam perpolitikan masing-masing. Namun mereka juga mengatakan:

> *"Much of the AKP's electoral success is due to its ability to transform previous incarnations of the Turkish Islamist party into* ***a party of the morally-conservative but pragmatic political center****, and thus expand substantially into the ranks of non-Islamist voters.* ***The PKS, by contrast, has struggled to define the extent to which the party should move to the center****, despite the apparent strategic incentives for doing so."* (hal. 5).

Dalam pandangan Hwang dan Mecham, AKP yang lahir sebagai partai politik memiliki ruang gerak yang lebih leluasa ketimbang PKS yang lahir sebagai jemaah. Mereka mengatakan,

> *"The strategic flexibility of the PKS is further constrained by the fact that* ***it is both a movement and a party*** *... By contrast,* ***the AKP was born as a political party, from a long line of political parties****, and thus is organized primarily for success in its political mission".*

Kunci keberhasilan AKP adalah kemampuannya menyeimbangkan tuntutan "idelogis" (Islam) dan sekular, sehingga mampu memenuhi harapan kelompok

pemilih mayoritas di Turki, sebagaimana dikatakan Hwang dan Mecham, *"In doing so, it has still maintained its preferences for supporting public morality, walking a fine line between capturing new constituents and avoiding the loss of its Islamist support base"*. Sementara itu, PKS terlihat masih gamang mendefinisikan identitasnya, yang antara lain terlihat dari iklan-iklan politiknya menjelang Pemilu 2009 yang lalu, serta beberapa isu yang menimbulkan keraguan publik atas komitmennya terhadap gerakan anti-korupsi.

Sebagai kesimupulan, AKP merupakan hasil interaksi yang berkesinambungan antara kepemimpinan partai yang Islami, pembatasan ruang gerak berpolitik oleh negara, dan tuntutan pemilih. Dalam hal ini, Hwang dan Mecham mencatat perbedaan *setting* yang dihadapi oleh AKP dan PKS. AKP menghadapi ancaman militer, sejarah penutupan partai-partai oleh Mahkamah Konstitusi, dan mobilisasi masyarakat sipil yang sekular, di samping peraturan *electoral treshold* yang sangat tinggi (10%). Hal-hal tersebut memaksa AKP menjadi "partai tengah". Sementara itu, kondisi arena politik Indonesia – kebebasan mengekspresikan ideologi, dan restriksi yang relatif longgar terhadap partai politik – tidak menyediakan insentif yang cukup kuat bagi PKS untuk menetapkan arah politik yang konsisten sebagaimana AKP.

2.2.3. Partai Politik di Negara–Negara Demokrasi Baru

Bierzen (2005) menyimpulkan bahwa konteks lingkungan pada saat partai didirikan akan sangat berpengaruh pada tipe partai tersebut, sedangkan perubahan lingkungan yang terjadi kemudian akan menentukan dinamika perkembangannya. Terkait dengan itu, Rokkan (1970) mengatakan bahwa partai-partai dalam demokrasi baru dituntut memasuki tahap perwakilan dan kekuasaan eksekutif segera setelah berdiri, tanpa melewati tahap-tahap legitimasi dan inkorporasi secara gradual seperti di Eropa Barat, sehingga partai didominasi oleh tokoh-tokoh partai yang memiliki jabatan publik.

Sementara itu menurut Machos (1999), berdirinya partai-partai di Eropa Barat, biasanya didahului oleh mobilisasi massa dalam kurun waktu yang relatif panjang, sedangkan dalam demokrasi baru pendirian partai bersifat *top-down*,

dilakukan oleh para elit di tingkat nasional. Implikasinya, organisasi terkonsentrasi di seputar elit partai yang sangat berkuasa dan cenderung oligarkis. Lemahnya keanggotaan yang terlembagakan dan masifnya media televisi turut memperkuat sifat sentralistik tersebut, sehingga terbentuk gaya kepimpinan yang sangat personal, yang disebut Machos sebagai *"presidential-authoritarian"* atau *"president-oriented oligarchies"*. Dalam konteks penelitian disertasi ini perlu dikaji apakah tesis Rokan dan Machos tentang karakteristik partai di negara demokrasi baru berlaku untuk PKS, mengingat seperti partai-partai di Eropa Barat, pendirian PKS didahului oleh mobilisasi massa dalam periode yang relatif lama.

2.3. Pemetaan Kebijakan

2.3.1. Undang–Undang Dasar 1945

Berhimpunnya warga negara ke dalam partai-partai politik selaras dengan pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh pasal 28C ayat 2 yang menjamin hak setiap orang untuk berjuang secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Partai politik memegang peran yang sangat penting dalam arena politik Indonesia pasca reformasi. Pasal 22E ayat 3 menegaskan bahwa partai politik merupakan satu–satunya "kendaraan" yang dapat mengantarkan seseorang untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, baik di pusat maupun daerah. Kedudukan partai politik yang relatif kuat tercermin dari pasal 24C ayat 1 yang memberikan kewenangan pembubaran partai politik hanya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

2.3.2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik bebas memilih asas dan ciri tertentu sejauh tidak bertentangan dengan dan merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945 (pasal 9). Secara khusus partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat serta memperjuangkan cita–cita partai politik tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 10, ayat 2, huruf a dan b). Dengan demikian, partai politik harus mengemban fungsi–fungsi pendidikan politik, penyerap, penghimpun dan penyalur partisipasi politik masyarakat, serta rekrutmen politik yang demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (pasal 11).

Organisasi partai politik secara hirarkis berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 17 ayat 1), namun dimungkinkan pula untuk membentuk organisasi hingga tingkat kelurahan/desa atau wilayah yang setara dengan itu (pasal 17 ayat 2). Di samping itu, partai politik dapat membentuk badan khusus yang bertugas menjaga kehormatan dan martabat partai beserta anggota–anggotanya (pasal 21), serta membentuk dan memiliki organisasi sayap (pasal 12 huruf j). Partai politik dinyatakan bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 41).

2.3.3. Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera

Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (hal. 483-497) merinci tujuh pilar politik Islam, yaitu: lebih mengedepankan pelayanan daripada kekuasaan, tanggungjawab bersama dalam mengelola negara, kebebasan yang bertanggungjawab, keadilan dan kesederajatan tanpa diskriminasi, keadilan yang merata, kemerdekaan yang terbimbing, serta hukum dan undang–undang yang menjadi panglima. Tujuan berpolitik adalah menciptakan kehidupan bersama yang teratur, aman, dan sejahtera, di mana keanekaragaman individu dan kelompok yang memperjuangkannya dapat diwadahi dalam sistem yang berbentuk organisasi, partai, masyarakat (umat), dan negara.

Sebagai konsekuensi dari hal yang telah diuraikan di atas, pembentukan negara yang kuat melalui pendidikan yang integral bagi seluruh warga negara, keadilan politik, serta pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan keniscayaan. Di sisi lain, mengingat kondisi objektif masyarakat yang plural, negara harus memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan ideologi atau agama, sejauh warga negara yang bersangkutan tidak memecah–belah keutuhan negara, merusak keamanan negara, serta menciderai keyakinan warga negara yang lain.

2.3.4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtara

Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (AD PKS) menegaskan bahwa partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). PKS berasas Islam (pasal 2), dengan tujuan mewujudkan cita–cita nasional bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan masyarakat madani yang diridhai oleh Allah SWT dalam wadah NKRI (pasal 5). Untuk itu, aktifitas di bidang–bidang politik, pendidikan dan pelatihan, dakwah, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sarana–sarana yang digunakan oleh PKS (pasal 7). Selanjutnya, tujuan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi sejumlah sasaran, kegiatan, dan sarana–sarana untuk mencapainya, yang dibahas dalam Bab II, pasal 2, 3, dan 4 ART PKS.

PKS memiliki tiga jenis keanggotaan, yaitu Anggota Pendukung, Anggota Inti dan Anggota Kehormatan (AD pasal 9). Anggota Pendukung terdiri dari Anggota Pemula dan Anggota Muda, sedangkan Anggota Inti terdiri dari Anggota Madya, Anggota Dewasa, Anggota Ahli, dan Anggota Purna (ART pasal 5). Masing–masing jenjang keanggotaan diangkat dan diberhentikan oleh struktur partai di tingkat yang berbeda–beda.

Menurut pasal 10 AD PKS, partai ini memiliki struktur di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan/wilayah yang setara dengan itu. Di tingkat pusat terdapat Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari’ah

Pusat (ayat 1). Di tingkat propinsi dan kabupaten/kota terdapat Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syari'ah Wilayah, serta Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syari'ah Daerah (ayat 2 dan 3). Sedangkan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan terdapat Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting.

Selanjutnya, fungsi, tugas, dan wewenang Majelis Syura yang berganti setiap lima tahun diuraikan dalam pasal 11 AD PKS. Sebagai lembaga permusyawaratan partai, Majelis Syura memiliki kewenangan yang sangat luas dan besar, seperti menetapkan pimpinan lembaga–lembaga tinggi partai, AD, ART, *platform*, visi, misi, kebijakan, dan rencana strategis partai, serta calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang diusung PKS.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat merupakan lembaga tinggi partai yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (AD pasal 12 ayat 1), dipimpin oleh Ketua Majelis Syura (ayat 2), beranggotakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat (ayat 3). Salah satu kewenangan strategis yang dimiliki lembaga ini adalah membuat kebijakan partai dan merekomendasikan nama–nama calon yang akan diajukan sebagai calon anggota DPR RI dan Gubernur/Wakil Gubernur dari PKS (ayat 4).

Bab VII pasal 13 AD PKS mengatur Majelis Pertimbangan yang berada di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) memiliki tugas dan wewenang sebagai *strategic think tank* yang merumuskan berbagai landasan dan kebijakan strategis partai, selain memutuskan berbagai ketentuan partai yang tumpang tindih.

Bab VIII pasal 14 AD PKS mengatur Dewan Pengurus yang berada di pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sebagai partai kader, salah satu tugas utama Dewan Pengurus Pusat dalah melaksanakan dan mengontrol *manhaj tarbiyah* (sistem pembinaan dan pengkaderan) partai (pasal 14 ayat 3 huruf b).

Sebagai sebuah partai politik yang berasas Islam, Dewan Syariah menempati posisi yang strategis dalam PKS, sebagaimana diatur dalam AD Bab IX pasal 15. Dewan Syariah juga terdapat di tingkat pusat, wilayah (propinsi), dan daerah (kabupaten/kota).

Di samping struktur Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan, PKS juga memiliki Dewan Pakar, sebagai lembaga otonom yang berada di bawah MPP (ART pasal 67), dan Dewan Penasihat, sebagai lembaga otonom di tingkat cabang (kecamatan) dan ranting (desa/kelurahan). Anggota kedua lembaga ini bisa kader maupun bukan kader PKS.

2.4. Model Teoretik Disertasi

Gambar 2.9
Model Teoretik Disertasi

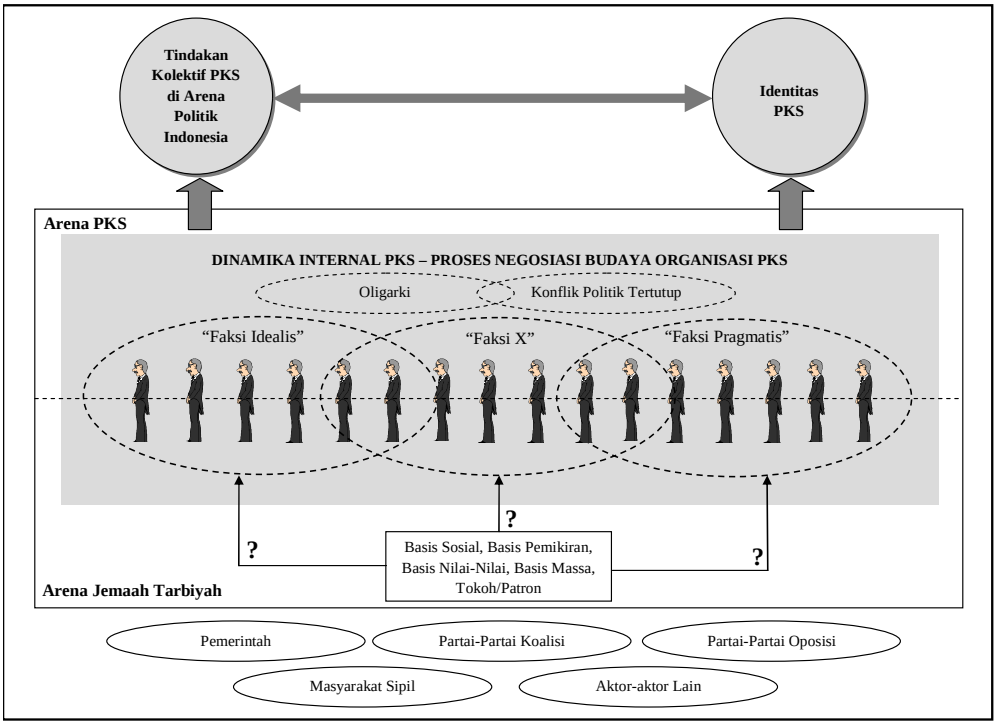

Penelitian disertasi ini didasarkan pada model teoretik yang disajikan pada gambar 2.9. Para aktor bekerja di arena Jemaah Tarbiyah/PKS yang menjadi bagian dari arena yang lebih besar, yaitu arena politik Indonesia. Arena Jemaah

Tarbiyah dan PKS berhimpit namun tidak persis sama, karena masih terdapat perbedaan habitus para kader dalam memosisikan keduanya.

Habitus para aktor mewujud dalam praksis dan strategi, termasuk *impression mangement*, yang mereka implementasikan di arena – baik secara individual maupun kolektif – untuk menegosiasikan budaya organisasi. Habitus juga menghubungkan tingkat mikro individual (para kader) dengan tingkat meso (Jemaah Tarbiyah/PKS), dan tingkat makro (arena politik Indonesia). Dengan demikian, faktor-faktor eksternal (makro) dilihat sebagai aspek yang mempengaruhi pembentukan/perubahan habitus individu (mikro), di samping menyediakan konteks sosial bagi berlangsung proses kontestasi antar-kelompok dalam menegosiasikan tatanan organisasi PKS (meso). Proses tersebut menimbulkan dinamika internal, konflik dan koalisi, khususnya konflik politik tertutup dan oligarki. Dalam hal ini, kolektifitas yang dibentuk para aktor berbasis pemikiran, nilai-nilai, kepentingan, sikap terhadap persoalan-persoalan tertentu, dan keterikatan pada tokoh/patron tertentu. Namun demikian, pengelompokkan tersebut tidak bersifat rigid dan *mutually exclusive*, melainkan dinamis dan saling beririsan satu sama lain.

Hasil dari dinamika internal tersebut adalah terbentuknya identitas PKS, termasuk orientasi/motivasi utamanya, apakah *policy seeking, vote seeking,* atau *office seeking,* di samping akan menentukan efektifitas tindakan kolektif PKS di arena politik Indonesia dalam mencapai target-target kinerja politiknya.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam/tipe studi kasus sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, yaitu mengembangkan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika internal PKS dalam ranah politik Indonesia, di samping prediksi tentang skenario Jemaah Tarbiyah/PKS pasca Pemilu 2009, dan preskripsi bagi para pengambil keputusan di organisasi ini. Dengan demikian peneliti berangkat dari asumsi ontologis bahwa realitas yang ada bersifat subjektif dan beragam sebagaimana yang dipahami oleh setiap informan, di mana kebenaran/pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial (Cresswell, 2003). Sebagai sebuah studi yang induktif, penelitian ini tidak meneliti sejumlah ciri atau opini untuk menguji hubungan antar sejumlah variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya, melainkan berusaha untuk menggambarkan subjek penelitian secara rinci dan akurat.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, peneliti melakukan empat perluasan. Pertama, perluasan keterlibatan peneliti dalam keseharian Jemaah Tarbiyah/PKS. Hal ini terutama peneliti lakukan dengan melibatkan diri dalam *halaqah* atau pengajian kaderisasi PKS, baik sebagai pengelola maupun peserta. Kedua, perluasan cakupan ruang dan waktu penelitian. Walaupun periode yang diteliti dibatasi pasca Pemilu 2004, namun peneliti mengaitkannya dengan periode waktu sebelum Pemilu 2004. Ketiga, perluasan dari proses–proses mikro kepada kekuatan–kekuatan makro. Misalnya, peneliti mengaitkan dinamika internal yang terjadi di antara para agen dengan aspek historis-kultural Jemaah Tarbiyah/PKS, maupun berbagai kekuatan yang dihadapinya di arena politik Indonesia. Keempat, perluasan teori. Di sepanjang proses, berbagai kesenjangan dalam teori disempurnakan oleh temuan–temuan penelitian ini. Untuk itu, peneliti melakukan tiga bentuk dialog, yaitu dialog antara peneliti dengan informan, dialog antara proses–proses mikro dengan kekuatan–kekuatan makro, dan dialog antara data lapangan dengan teori (Buroway, 2009). Oleh karena, Bab 2, 3, dan 4 yang

menyajikan data penelitian dilengkapi dengan sub bab diskusi yang mewadahi dialog antara data lapangan dengan teori-teori yang relevan. Di samping itu, refleksi dan implikasi teoretik yang lebih lengkap disajikan di bagian akhir disertasi ini.

3.2. Posisi dan Peran Peneliti

Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, peneliti sangat terbantu dan diuntungkan oleh status peneliti sebagai kader PKS/Jemaah Tarbiyah yang telah terlibat dalam aktifitasnya sejak awal tahun 1990. Kondisi itu membuat peneliti cukup memahami budaya, tradisi, dan norma-norma yang berlaku dalam Jemaah Tarbiyah, di samping mengenal beberapa tokoh yang kemudian sangat membantu pelaksanaan penelitian ini. Dalam *halaqah* (pengajian kader) dan beberapa aktifitas lainnya peneliti berperan sebagai *participant observer* yang bukan hanya mengamati, namun juga terlibat aktif berinteraksi dengan para kader yang menjadi peserta kegiatan tersebut.

Dalam menggali informasi dari para informan penelitian, peneliti memposisikan diri sebagai pewawancara *(interviewer).* Dalam hal ini identitas sebagai peneliti dan tujuan wawancara disampaikan secara terbuka kepada seluruh informan. Hampir seluruh sesi wawancara dilakukan secara terencana sesuai dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan oleh informan yang bersangkutan.

Di satu sisi status sebagai kader membuat peneliti relatif mudah membangun *rapport* dengan para informan, sehingga mereka bersikap kooperatif dan terbuka dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara, dan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan mendalam yang besar kemungkinan akan sulit diperoleh oleh peneliti lain yang bukan kader PKS. Namun di sisi lain, status sebagai kader PKS juga menyimpan potensi bias bagi peneliti dalam menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data penelitian ini. Perlu disampaikan di sini bahwa secara pribadi peneliti lebih cenderung sependapat dengan pemikiran dan sikap kelompok *religious movement oriented.* Posisi tersebut sangat mungkin tercermin dalam cara peneliti membaca dan memaknai pernyataan-pernyataan para informan penelitian.

3.3. Pengumpulan Data

Data penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam). Sementara sebagian kecil data lainnya diperoleh dari diskusi informal dengan informan pada berbagai kesempatan, dan dari materi kajian yang disampaikan di beberapa sesi *halaqah* yang dihadiri oleh peneliti.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman para informan dan pemaknaan subjektif mereka mengenai dinamika internal PKS, khususnya terkait dengan pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal yang terjadi. Wawancara didasarkan atas sebuah pedoman wawancara (terlampir). Namun demikian, peneliti selalu mengembangkan pertanyaan ke berbagai arah sesuai dengan perkembangan respon informan agar mendapatkan informasi yang lengkap, mendalam, dan akurat. Dalam hal ini setiap wawancara diarahkan kepada topik yang dalam pandangan peneliti merupakan "kompetensi" informan yang bersangkutan sesuai dengan status masing-masing, tanpa mengabaikan penggalian informasi-informasi yang bersifat umum. Peneliti merekam seluruh dialog yang berlangsung selama *in-depth interview*, dan membuat catatan tambahan yang diperlukan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan menjadi transkrip wawancara yang dikerjakan oleh dua orang asisten. Sementara itu, pembicaraan informal tidak direkam.

Secara keseluruhan peneliti mewawancarai langsung 19 orang informan, dengan durasi wawancara keseluruhan 23 jam, 15 menit, 12 detik, yang dituangkan ke dalam 380 halaman transkrip hasil wawancara. Sebagian besar informan, yaitu 17 orang, adalah kader PKS di berbagai jenjang keanggotaan dan posisi struktural. Dari aspek jenis kelamin, 16 orang informan adalah laki-laki. Jumlah informan dan volume data yang berhasil dikumpulkan tersebut melebihi perkiraan peneliti pada saat akan memulai penelitian. Ketika itu peneliti sempat mengkhawatirkan kesediaan para informan untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara rinci dan terbuka. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti di lapangan. Sebaliknya, secara umum seluruh informan memberikan informasi dengan antusias. Beberapa di antara

mereka bahkan mengusulkan tambahan informan baru, sehingga proses *snowballing* bergulir dengan baik. Ikhtisar data informan penelitian ini terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ikhtisar Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Deskripsi	Tanggal	Tempat	Kecende-rungan Afiliasi
1	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Salah seorang deklarator PK.	21 September 2010	Komplek Gedung MPR, DPR, DPD	Religious Movement
2	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Alumnus UI dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Malaysia. Bergelar Doktor. Saat ini anggota salah satu lembaga tinggi partai di tingkat pusat.	25 Oktober 2010	Gedung MD DPP PKS TB Siamtupang	Religious Movement
3	Perempuan	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Bergelar Doktor. Pernah menjadi anggota Majelis Syura dan anggota Dewan dari PKS. Saat ini menjadi anggota salah satu lembaga tinggi PKS di tingkat pusat.	1 September 2010	Ruang Dosen PE FEUI, Depok	Tidak jelas, namun cenderung Religious Movement
4	Laki-laki	Kader Inti PKS sejak 1993, saat ini di jenjang Anggota Muda *(Muntazhim)*. Alumnus UI dan Master of Science dari Amerika Serikat dan menjadi entrepreneur. Aktif merekrut dan membina kader-kader Jemaah Tarbiyah.	1 Januari 2010 10 Januari 2011	Kediaman informan dan kediaman Peneliti di Depok	Religious Movement
5	Laki-laki	Ahli Ilmu Hadist dari sebuah Universitas di Timur Tengah. Aktif membina *halaqah* para Kader PKS, di samping memimpin sebuah lembaga pengembangan SDM dan menjadi *khatib*, penceramah, dan pembicara dalam berbagai forum.	28 Okt 2010 27 Januari 2011	Kediaman informan di Depok	Religious Movement

No	Jenis Kelamin	Deskripsi	Tanggal	Tempat	Kecende-rungan Afiliasi
6	Laki-laki	Alumnus UI, kader PKS di jenjang Anggota Ahli, anggota Majelis Syura, salah satu Ketua Bidang di DPP PKS periode 2005-2010.	9 September 2010	Kediaman informan di Depok	Religious Movement
7	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*, salah satu deklarator PK, saat ini memimpin salah satu lembaga tinggi PKS di tingkat pusat.	20 Sept 2010	Gedung MD DPP PKS TB Simatupang	Religious Movement
8	Laki-laki	Bergabung dengan PKS tahun 2002 setelah sebelumnya menjadi professional selama lebih dari 30 tahun. Saat ini anggota DPR RI.	29 Sept. 2010	Gedung DPR RI	Netral
9	Perempuan	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Ia menyebut dirinya sebagai "murid langsung" Ustadz Hilmi Aminuddin (*Murraqib 'Am*, Pimpinan Tertinggi PKS) sejak 26-27 tahun yang lalu.	22 Des 2010 29 Des 2010	Gedung MD DPP PKS	Political Party
10	Laki-laki	Kader senior PKS, *Master of Science* dari sebuah Universitas ternama di negara jiran.	25 Juli 2010	Sebuah Warung di Depok	Religious Movement
11	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Saat ini memegang salah satu jabatan puncak di DPP PKS, anggota Majelis Syura, dan salah satu unsur Pimpinan DPR RI dari PKS.	28 Des 2010	Ruang Pimpinan DPR RI	Political Party
12	Laki-laki	Alumnus FEUI dan mantan aktifis mahasiswa. Menurut Informan-09 yang bersangkutan baru saja naik jenjang keanggotaannya di PKS menjadi Anggota Ahli *('Amil)*.	16 Des 2010	Gedung DPR RI	Political Party
13	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Saat ini menjadi anggota Dewan dari PKS dan merupakan salah satu Wakil Ketua Komisi di DPR RI, di samping menjadi anggota Majelis	16 Des 2010	Gedung DPR RI	Tidak jelas

No	Jenis Kelamin	Deskripsi	Tanggal	Tempat	Kecende-rungan Afiliasi
		Syura dan memimpin salah satu lembaga tinggi PKS di tingkat pusat.			
14	Perempuan	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Anggota Majelis Syura dan anggota Dewan dari PK dan PKS selama tiga periode berturut-turut.	21 Sept 2010	Gedung DPR RI	Political Party
15	Laki-laki	Kader PKS, mantan aktifis mahasiswa UI, saat ini berkiprah di DPR RI.	16 Des 2010	Gedung DPR RI	Netral
16	Laki-laki	Kader PKS di jenjang Anggota Ahli *('Amil)*. Salah seorang deklarator PK dan di kepengurusan perode 2005-2010 menempati jabatan puncak di eksekutif PKS.	11 Januari 2011 12 Januari 2011	Kantor dan kediaman informan di Depok	Religious Movement
17	Laki-laki	Alumnus IPB, peneliti di Balitbang Kementerian X, bukan kader PKS.	17 Januari 2011	Pasca Sarjana FISIP UI Depok	Bukan kader
18	Laki-laki	Kader Jemaah Tarbiyah. Alumnus UI yang sedang melanjutkan pendidikan S2 di Inggris.	25 Juli 2010	Sebuah warung di Depok	Tidak jelas
19	Laki-laki	Mantan kader senior PKS. Salah seorang deklarator PK. Memilih mengundurkan diri karena merasa tidak sepaham dengan Ustadz Hilmi Aminuddin dalam hal-hal yang mendasar.	31 Maret 2011	Kediaman informan di Depok	Religius Movement

Informan-03, Informan-04, dan Informan-05 memiliki peran khusus dalam penelitian ini. Peneliti sudah mewawancarai Informan-04 dalam konteks riset pendahuluan *(preliminary research)* pada bulan Januari 2010 yang lalu. Informan-05 merupakan *muwajih* (pengisi materi) dari forum *halaqah* yang beberapa kali dihadiri oleh peneliti dan menjadi objek observasi dalam penelitian ini. Dari Informan-05 peneliti banyak memperoleh pengetahuan tentang *siyasah syar'iyyah* (politik Islam), yang sangat membantu peneliti dalam memahami dinamika kiprah PKS di ranah politik Indonesia, selain gambaran yang lengkap tentang *tarbiyah* sebagai tulang punggung proses kaderisasi di PKS sekaligus elemen penting

dalam budaya partai ini. Informan-05 pula yang membantu peneliti memahami berbagai aspek yang menonjol dalam budaya PKS. Selain itu, Informan-04 dan Informan-05 juga berperan sebagai mitra diskusi informal yang banyak memberikan informasi tambahan yang sangat berharga di luar sesi wawancara, di samping menjadi *informal reader* yang membaca dan memberikan masukan terhadap draft disertasi ini dari sudut pandang kader PKS. Sedangkan Informan-03 berperan sebagai *gate keeper* yang membukakan akses bagi peneliti untuk mewawancarai sejumlah informan penting lainnya.

Beberapa informan perlu mendapatkan catatan khusus. Informan-09, seorang perempuan, kader senior PKS yang mengklaim sebagai salah satu murid pertama Ustadz Hilmi Aminuddin, selama wawancara berlangsung menunjukkan kedekatan pribadi yang luar biasa dengan Ustadz Hilmi. Dalam beberapa bagian wawancara yang membahas pihak-pihak yang berseberangan dengan Ustadz Hilmi, ia terkesan emosional. Dari informan ini peneliti memperoleh sejumlah informasi yang mendalam tentang dinamika internal PKS, termasuk beberapa *mudawalah* (dinamika, perdebatan) yang terjadi di Majelis Syura. Di samping itu, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sosok Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai tokoh sentral PKS. Informan-14, perempuan dan kader senior, juga memposisikan dirinya sebagai salah seorang murid pertama Ustadz Hilmi. Walaupun banyak menuturkan interaksi pribadinya dengan Ustadz Hilmi, dan kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, namun informan ini terkesan lebih tenang dan berupaya untuk lebih netral. Sementara itu, Informan-06 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam menyikapi dinamika internal PKS. Dalam interaksi informal dengan peneliti dalam kurun waktu 2008-2009 informan ini cenderung sangat terbuka dan tajam dalam mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap berbagai perilaku "kubu Sekjen" (AM cs.). Namun dalam wawancara untuk kepentingan penelitian ini sikapnya jauh lebih *soft* dan cenderung normatif. Menurut keterangan beberapa pihak yang banyak berinteraksi dengannya, perubahan sikap tersebut sudah terjadi kira-kira dalam satu tahun belakangan ini.

Sementara itu, data sekunder digali dari dokumen-dokumen resmi PKS, yaitu AD dan ART PKS, Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS, serta Manhaj Tarbiyah 1427 H yang berisi pedoman penyelenggaraan *tarbiyah* yang merupakan tulang punggung kaderisasi di PKS, di samping media cetak dan media on-line yang memuat berita-berita tentang PKS.

Di samping itu, peneliti juga mengkaji buku-buku yang berisi kumpulan *taujih* (arahan) Ustadz Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura PKS. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pemikiran beliau sebagai pimpinan tertinggi PKS/Jemaah Tarbiyah, karena sampai dengan akhir penelitian peneliti tidak mendapatkan kesempatan mewawancarai beliau secara langsung.

3.4. Analisis dan Penyajian Data

Menurut Creswell (2007), analisis dan penyajian data terdiri dari beberapa tahap, yaitu: *data managing*, *reading and memoing*, *describing*, *classifying*, *interpreting*, serta *representing and visualizing*. Peneliti mengorganisasikan data berupa rekaman dan transkrip wawancara ke dalam sejumlah file. Kemudian peneliti membaca seluruh data secara mendalam sambil membuat catatan-catatan yang diperlukan.

Selanjutnya, peneliti menyusun narasi rinci mengenai pengalaman dan pemaknaan pribadi para informan, lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis makna untuk memudahkan tahap penafsiran. Di tahap penafsiran dikembangkan deskripsi tekstural mengenai "apa yang terjadi" dalam dinamika internal PKS, dan deksripsi struktural yang berbicara mengenai "bagaimana dinamika internal tersebut dialami dan kemudian dimaknai secara subjektif oleh para aktor yang terlibat," serta benang merah yang menghubungkan pemaknaan subjektif masing-masing aktor tersebut sehingga terbangun suatu deskripsi yang utuh dan saling menguatkan. Di sepanjang proses analisis data, peneliti mendialogkan data temuan penelitian ini dengan kerangka teoretik yang diuraikan di bagian sebelumnya.

Akhirnya, pada tahap penyajian dan visualisasi, peneliti menyusun narasi yang menggambarkan esensi proses yang berlangsung sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Di samping uraian naratif, ikhtisar data dan analisis disajikan pula dalam bentuk tabel dan skema untuk mempermudah pembaca memahami data berikut analisisnya. Sementara itu, dialog antara temuan penelitian dengan kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam sub bab diskusi yang disajikan di

akhir Bab 4, Bab 5 dan Bab 6. Pada akhirnya, peneliti melakukan refleksi teoretik, menarik kesimpulan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan saran untuk penelitian lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian ini.

3.5. Strategi Validasi Data

Peneliti melakukan enam dari delapan alternatif strategi validasi yang lazim digunakan (Creswell, 2007), yaitu: (1) triangulasi sumber data, melibatkan kelompok informan yang posisinya "berseberangan" satu sama lain; (2) *peer review* melalui *peer debriefing sessions*, di mana terdapat *"devil's advocate"*; (3) klarifikasi sejak dini tentang posisi peneliti sebagai aktifis Jemaah Tarbiyah, sehingga kemungkinan-kemungkinan bias dapat lebih mudah dikendalikan dan diwaspadai oleh pihak-pihak yang mengikuti proses penelitian ini dan membaca hasilnya; (4) mengumpanbalikkan data, analisis, penafsiran, dan kesimpulan sementara kepada beberapa informan, dalam hal ini adalah Informan-04 dan Informan-05; (5) *thick description* yang menggambarkan berbagai proses dan *setting* yang terkait dengan subjek penelitian, sehingga memungkinkan pembaca mempertimbangkan sejauh mana temuan–temuan penelitian ini dapat digeneralisasikan; dan (6) audit eksternal oleh *external reader* sesuai dengan sistem yang berlaku di Program Pascasarjana Sosiologi FISIP UI.

3.6. Struktur Penulisan Disertasi

Disertasi yang merupakan hasil penelitian ini akan disajikan dalam 7 Bab dengan struktur sebagai berikut:

1. **Bab 1, Pendahuluan:** latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,
2. **Bab 2**, **Kerangka Konseptual:** kerangka teoretik, telaah beberapa studi terdahulu, pemetaan kebijakan, dan model teoretik disertasi,
3. **Bab 3, Metodologi Penelitian:** pendekatan dan tipe penelitian, posisi dan peran peneliti, pengumpulan data, analisis dan penyajian data, strategi

validasi data, pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi, serta pembatasan dan keterbatasan penelitian.

4. **Bab 4, Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS:** eksistensi faksionalisasi dan konflik internal di PKS, anatomi dan faktor pembentuk kelompok *(grouping factors)*, implikasi faksionalisasi dan konflik internal, dan diskusi.

5. **Bab 5: Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS:** *tarbiyah* sebagai proses membangun habitus kolektif, potret budaya organisasi PKS, Majelis Syura dalam tradisi PKS, tiga aktor di kepemimpinan puncak PKS, dari jemaah menjadi partai politik, dan diskusi.

6. **Bab 6: Kualitas Organissi dan Kinerja PKS:** kualitas organisasi, kiprah PKS dalam Pemilukada: kasus Kabupaten X, membaca 1999, 2004, dan 2009 dan meneropong 2014, dan diskusi.

7. **Bab 7, Refleksi, Kesimpulan, dan Rekomendasi**: refleksi dan implikasi teoretik, kesimpulan, rekomendasi kebijakan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

3.7. Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi

Penelitian dan penulisan disertasi ini dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	2010						2011					
		Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun/ Juli
1	Pengumpulan data												
2	Pengolahan, analisis, dan interpretasi data												
3	Penulisan Draft I Disertasi												
4	Ujian Seminar Hasil Penelitian												
5	Revisi Draft Disertasi												
6	Ujian Pra-Promosi												
7	Revisi Draft Disertasi												
8	Ujian Promosi												

3.8. Pembatasan dan Keterbatasan Penelitian

Periode yang diteliti dibatasi pada kurun waktu tahun 2004, khususnya pasca Pemilu 2004, sampai dengan 2010, namun tetap dikaitkan dengan momen-momen penting sebelum periode tersebut. Pembatasan tersebut dilakukan dengan dua alasan. Pertama, dari informasi awal yang ada, peneliti menyimpulkan, dinamika internal yang relatif kuat dan terbuka di PKS terjadi pasca Pemilu 2004. Kedua, belum banyak penelitian lain yang membahas PKS dalam kurun waktu tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Pertama, keterbatasan yang melekat pada diri peneliti sebagai instrumen utama penelitian ini. Dalam Jemaah Tarbiyah/PKS peneliti tidak berada dalam posisi yang dapat dengan mudah mengakses sejumlah informan kunci. Keterbatasan ini diatasi dengan mengoptimalkan hubungan pribadi dengan berbagai pihak yang dapat menjembatani akses kepada para informan kunci tersebut. Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, sebagai kader PKS peneliti memiliki preferensi terhadap kelompok atau pemikiran tertentu dalam dinamika internal yang terjadi dalam PKS. Hal tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam menganalisis dan menafsirkan data penelitian ini. Untuk mengurangi bias tersebut, untuk setiap isu yang digali dan diungkapkan peneliti mencoba menyajikan pendapat dari para informan yang mungkin mewakili kelompok/faksi yang berbeda-beda secara berdampingan. Di samping itu, saran, masukan, dan koreksi dari Tim Penguji, baik internal maupun eksternal, yang merupakan pihak yang netral, tidak terafiliasi dengan faksi/kelompok yang ada, dan berjarak terhadap subjek penelitian ini, sangat membantu mengurangi berbagai bias yang mungkin timbul terkait dengan posisi peneliti.

Keterbatasan yang kedua terkait dengan keterbatasan informan yang berhasil diwawancarai. Hampir seluruh informan adalah elit PKS yang berada di pusat. Sebagian dari mereka adalah anggota *the party in public office*, sebagian lagi merupakan bagian dari *the party in central office*, dan satu orang merupakan mantan kader senior yang memilih meninggalkan partai karena merasa tidak sepaham dengan Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai pimpinan tertinggi partai dala

hal-hal yang bersifat mendasar. Peneliti tidak mewawancarai elit Partai yang ada di daerah maupun kader-kader yang merupakan bagian dari *the party on the ground*.

Keterbatasan yang ketiga, sampai saat disertasi ini selesai ditulis peneliti tidak berhasil mewawancari empat tokoh penting yang sebenarnya ada dalam daftar calon informan penelitian ini, yaitu salah seorang mantan Presiden PKS, mantan Ketua PKS pada saat Partai ini dideklarasikan, Presiden PKS saat ini, dan Ustadz Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura PKS. Peneliti memandang tokoh yang merupakan mantan Presiden PKS tersebut penting untuk diwawancarai karena yang bersangkutan memimpin di masa transisi dari PK menjadi PKS. Di samping itu beberapa pihak menyebut yang bersangkutan sebagai icon dari "faksi keadilan", salah satu faksi dalam dinamika internal PKS. Namun sayangnya yang bersangkutan tidak bersedia diwawancarai karena alasan pribadi. Tokoh lain yang tidak bersedia diwawancarai adalah mantan Ketua PKS, yang memimpin deklarasi partai ini di tahun 2003 setelah PK tidak lulus *treshold*. Yang bersangkutan tidak bersedia dengan alasan dirinya sudah lama tidak berada di struktur Partai. Presiden PKS saat ini, Ustadz Lutfi Hasan Ishaq, sebenarnya telah menyatakan kesediaan untuk diwawancarai, namun terbentur persoalan ketidakcocokan jadwal. Sedangkan Ustadz Hilmi Aminuddin tidak dapat diwawancarai karena hingga saat ini peneliti tidak memperoleh akses untuk mengontak yang bersangkutan.

Dalam pandangan peneliti, adanya beberapa tokoh PKS yang tidak bersedia diwawancarai mencerminkan kuatnya nilai-nilai *conformity and compliance*, serta harmoni, dalam budaya organisasi PKS. Dari beberapa informan peneliti menyimpulkan bahwa kedua tokoh yang tidak bersedia dilibatkan dalam penelitian ini memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka berafiliasi dengan kelompok *religious movement oriented*. Bahkan peneliti mendapatkan informasi bahwa keduanya merupakan *icon* dari "faksi keadilan". Kedua, mereka saat ini sudah tidak menempati jabatan strategis apapun dalam struktur partai. Peneliti memiliki dugaan kuat bahwa mereka enggan diwawancarai karena khawatir semakin terlihat berseberangan dengan struktur partai yang saat ini didominasi oleh kelompok *political party oriented*, karena jika

demikian publik eksternal akan semakin mencium gejala konflik internal di PKS, dan para tokoh dari kelompok *religious movement oriented* akan terpojok dan semakin sulit bermanuver. Dengan demikian, dalam pandangan peneliti keengganan tersebut justru memperkuat kesimpulan tentang eksistensi pengelompokkan/faksionalisasi dan konflik internal di PKS.

Keterbatasan yang keempat, peneliti sangat mengandalkan hasil wawancara dengan para informan sebagai sumber data primer. Peneliti tidak berhasil mendapatkan cukup banyak data sekunder berupa *"hard evidences"* untuk menguatkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh informan. Misalnya, peneliti tidak bisa memperoleh daftar nama pengusaha/badan usaha yang menjadi donor PKS terkait dengan pembahasan mengenai pragmatisme finansial. Peneliti juga tidak dapat mengakses notulensi Musyawarah Majelis Syura ataupun rapat-rapat lainnya yang menggambarkan implikasi dari dinamika internal di antara faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang ada. Penjelasan verbal dari para informan tentang dinamika dalam forum-forum tersebut adalah sumber alternatif terbaik yang berhasil diperoleh peneliti. Di samping itu, peneliti melengkapi informasi dari beberapa berita tentang PKS yang dimuat di media massa, baik media cetak maupun media *on-line*, dengan tetap bersikap hati-hati untuk meminimalkan bias yang tidak mungkin dilepaskan dari pemberitaan media. Kesulitan untuk memperoleh dokumen-dokumen formal sebagai *"hard evidences"* dapat dilihat sebagai indikator ketertutupan PKS. Dengan kata lain, PKS belum memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi sebagai partai politik moderen. Namun demikian, peneliti memahami bahwa kondisi itu terkait dengan aspek historis sebagai jemaah dan gerakan "bawah tanah" yang sampai saat ini, dan mungkin sampai kapanpun, tidak dapat dilepaskan dari jatidiri PKS.

BAB 4
FAKSIONALISASI DAN KONFLIK INTERNAL DI PKS

4.1. Eksistensi Faksionalisasi dan Konflik Internal di PKS

Tidak mudah memperoleh gambaran yang konklusif tentang pengelompokkan, faksionalisasi, apalagi konflik internal di tubuh PKS. Sebagai jelmaan Jemaah Tarbiyah yang sebelumnya bergerak di bawah tanah dan sarat dengan nilai-nilai Islam, berbagai doktrin, antara lain *khusnuzh zhan* (prasangka baik), *ukhuwwah* (persaudaraan), *syura* (musyawarah), *ath thaa'ah* (ketaatan), dan *iltizam bil jama'ah* (komitmen terhadap jemaah), membuat sebagian besar kader PKS tidak mudah mengekspresikan perbedaan, ketidaksetujuan, ketidakpuasan, atau ketidaksukaan yang mereka rasakan secara terbuka, apalagi menajamkannya hingga mengerucut menjadi kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang saling berhadapan atau bertentangan. Terdapat kecenderungan yang relatif kuat untuk menelan perasaan-perasaan tersebut secara personal, mendiamkannya, sambil terus berjalan seperti semula.[1]

Namun demikian, berbagai ekspresi para informan penelitian dalam menyampaikan pikiran dan perasaan mereka yang tidak seluruhnya eksplisit, dan sebagian diungkapkan dengan sangat berhati-hati, menunjukkan indikasi kuat mengenai eksistensi pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal, walaupun cara mereka memahami fenomena tersebut tidak sama. Seorang kader PKS mengatakan bahwa tidak mudah memberikan jawaban ”ya” atau ”tidak” tentang ada tidaknya faksionalisasi dan konflik internal di tubuh PKS. Jika hendak dijawab ”ya”, kenyataannya hal tersebut tidak pernah secara terbuka, apalagi formal, diakui keberadaannya. Namun jawaban ”tidak” juga terlalu naif karena ”baunya tercium”. Seorang anggota Dewan dari Fraksi PKS bahkan menjawab lebih implisit lagi, ”Ya, *I must say, perception is reality. It was a perception and whether it's true or not it comes to reality*”. Senada dengan itu, ada pula anggota Majelis Syura dan MPP PKS yang mengatakan, ”Ada. Kalau dibilang enggak, kayaknya naïf banget deh”. Menurut peneliti, kondisi yang digambarkan di atas

[1] Pembahasan tentang budaya organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS terdapat di Bab 5.

bukan hanya mengindikasikan adanya faksionalisasi, melainkan juga apa yang oleh Morill, Zald, dan Rao (2003) disebut sebagai konflik politik tertutup *(covert political conflict).* Perkembangan kontemporer yang mengemuka sekitar bulan Maret-April 2011 sebagaimana diangkat oleh berbagai media, di mana seorang mantan deklarator PK melakukan "serangan terbuka" terhadap bekas partainya itu, bukan hanya memberikan indikasi yang lebih kuat mengenai eksistensi faksionalisasi dan konflik internal tersebut, melainkan juga menunjukkan bahwa konflik tersebut mulai berlangsung lebih terbuka.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menimbulkan pengelompokkan atau faksionalisasi. Pertama, perbedaan cara dalam mewujudkan visi untuk mentransformasi Indonesia sesuai dengan cita-cita PKS. Kedua, perbedaan cara kader-kader PKS menangkap arahan-arahan yang sebagian bersifat umum, dan mungkin juga implisit, atau bahkan berupa bahasa non verbal, dari *qiyadah* pemimpin jemaah ini. Ketiga, preferensi-preferensi yang dimiliki masing-masing kader yang sedang *on position* dalam memilih anggota-anggota timnya. Contohnya seorang Ketua Bidang di DPP memiliki preferensi untuk bekerja sama dengan orang-orang Sumatera yang mungkin komunikasinya lebih terbuka, tidak mudah tersinggung dan lebih cepat kerjanya. Ia memandang kecenderungan tersebut masih wajar dan manusiawi, sepanjang tetap dilakukan dalam koridor aturan organisasi.

Pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal tersebut juga eksis terkait dengan dengan pilihan strategi *fundrising* partai. Seorang mantan pengurus DPP periode yang lalu mengatakan, "Yaa khususnya terkait dengan pilihan-pilihan yang *syubhat* dan yang *makruh*. *Funding-funding* lah". Hal yang sama juga dibenarkan oleh seorang kader senior, walaupun ia kemudian memoderasinya dengan mengatakan bahwa konflik-konflik tersebut tidak berarti jika dibandingkan dengan *mainstream* para kader yang masih teguh dengan jati diri PKS sebagai Partai Dakwah. Pernyataan tersebut kembali menunjukkan kuatnya unsur-unsur *conformity and compliance,* atau harmoni, dalam budaya organisasi PKS. Terlihat adanya keengganan untuk mengakui dengan terbuka adanya faksionalisasi dan konflik internal, karena disadari ataupun tidak hal tersebut dianggap sesuatu yang tabu. Hal tersebut mungkin pula terkait dengan kuatnya

indoktrinasi nilai menjaga ”aurat” jemaah, sebagaimana termaktub dalam teks janji setia anggota PKS di seluruh jenjang keanggotaan.[2]

Secara lebih jelas dan eksplisit, walaupun terlalu menyederhanakan, faksionalisasi dan konflik internal yang terjadi di PKS sering dilukiskan terjadi antara ”faksi keadilan” dan ”faksi kesejahteraan”. Seorang informan misalnya mengatakan:

> “Jadi konflik itu antara kata **keadilan** dan **sejahtera**, faksi keadilan dan faksi sejahtera. Dan dia (maksudnya Presiden PKS yang baru) pengen, targetnya bagaimana menghilangkan ini. Akhirnya kemudian respon-respon dia itu memperkuat *tarbiyah* ... Dia kurang senang ada faksi, antara faksi keadilan dan sejahtera”.

Artinya faksionalisasi tersebut ada di tubuh PKS, dan diakui oleh kepemimpinan yang baru, walaupun Presiden PKS saat ini tidak senang jika hal itu terus-menerus diangkat ke permukaan, sehingga dia merespon dengan kembali memusatkan perhatian pada *tarbiyah* yang sejak awal merupakan ”bisnis inti” Jemaah Tarbiyah dan PKS. Pendapat itu diperkuat oleh seorang informan lain dengan mengatakan bahwa kepengurusan DPP PKS yang baru terbentuk tahun 2010 yang lalu memilih bersikap tegas terhadap kader-kader yang bersuara keras di luar jalur.

Sebagaimana dikutip di bagian pendahuluan disertasi ini, tulisan seorang kader senior PKS di Harian Republika beberapa saat sesudah pemilu legisltatif 2009 memberikan indikasi yang sangat jelas tentang friksi yang menghangat antara kelompok-kelompok dalam PKS, dan sekaligus mengindikasikan adanya faksi-faksi yang berseberangan. Inilah salah satu indikator dari apa yang oleh seroang informan dikatakan ”baunya tercium”. Kader senior PKS tersebut menulis:

> “Tiba-tiba tokoh PKS, AM, mengancam akan meninggalkan koalisi, karena duet SBY-JK dinilai telah gagal menjalankan pemerintahan selama lima tahun ini. JK dipandang sebagai matahari kedua dalam pemerintahan dan Golkar yang bergabung paling akhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu justru lebih dominan mengarahkan kebijakan pemerintah. Sering sekali PKS diabaikan dalam penentuan kebijakan yang krusial, seperti kenaikan harga BBM dan impor beras.

[2] Pembahasan tentang Janji Setia Anggota PKS terdapat di Bab 5.

Pernyataan AM serta-merta disanggah TS yang menyebut, hal itu hanya pandangan pribadi karena format koalisi masih diperbincangkan dengan semua mitra lain. Sanggahan yang terlambat karena citra publik telah terbentuk bahwa PKS berperilaku bak *debt collector* yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Padahal, sebelum pemilu, justru PKS yang mengundang JK berdiskusi di markas besarnya dan mendukung penuh keberanian JK untuk mencapreskan diri. Bila tokoh PKS tidak menyadari efek masif yang terjadi melalui media massa dan jaringan internet, hal itu sungguh naif. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu. Sehingga, tatkala Golkar (lebih tepatnya: JK) memutuskan hubungan sepihak dengan PD (lebih pas: SBY), lalu fungsionaris PD mengungkapkan keterkejutannya maka segenap telunjuk menuding PKS sebagai biang keladi dari kekisruhan tingkat tinggi itu. Padahal, yang terjadi bisa saja karena chemistry SBY-JK telah kehilangan daya rekatnya dan gejala keretakan tak bisa ditutupi lagi. Sama sekali tak ada hubungannya dengan PKS bila elitenya tidak bertingkah di luar kontrol.

Belum pupus isu penolakan PKS terhadap Golkar dari ingatan publik, muncul lagi pernyataan MS yang menegaskan PKS tidak akan mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai, sementara partai lain dengan posisi politik lebih rendah berani mengajukan proposal lebih tinggi. Lagi-lagi celoteh MS itu dibantah oleh kader PKS di berbagai daerah yang menyatakan dukungan terbuka kepada kader terbaik PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar bersiap diri mendampingi SBY sebagai cawapres. Dukungan publik lebih luas datang dari 200 ulama Madura, aktivis LSM di Medan, dan sejumlah tokoh nasional yang tidak meragukan kredibilitas HNW. Bahkan, exit poll yang dilakukan LP3ES pada 9 April 2009 menyimpulkan pasangan SBY-HNW didukung 20,8 persen responden, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen dan SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan.

Masih belum puas, ada lagi pernyataan FH yang membuat kening berkerut. Setelah Golkar memutuskan hubungan dengan PD dan JK diberi mandat sebagai capres, Fahri justru mengutarakan PKS akan membuka komunikasi dengan semua partai. Fahri meyakinkan bahwa ketua Majelis Syura PKS dalam waktu dekat akan bertemu dengan JK. Kali ini bantahan datang langsung dari ketua Majelis Syura sendiri yang menyatakan rencana pertemuan memang pernah diutarakan sejak lama, tapi tak ada kecocokan waktu. Dan, saat ini sudah sibuk semua sehingga tak mungkin dijadwalkan ulang. Kejadian ini untuk yang kesekian kalinya membingungkan publik, termasuk kader dan konstituen PKS yang memiliki akses komunikasi terbatas." (Republika, 1 Mei 2009. Nama sebagian tokoh-tokoh PKS yang disebutkan oleh penulis artikel disamarkan.)

Peneliti menyajikan kutipan yang cukup lengkap dari artikel tersebut untuk menunjukkan bahwa jika dibaca dengan cermat tidak sulit untuk meraba bahwa tokoh-tokoh PKS yang terdapat dalam artikel di atas berasal dari dua kelompok atau faksi yang berseberangan: AM, MS, dan FH di satu sisi, dan TS di sisi yang lain. Ada *tone* yang senada, seutas benang merah yang sama, dalam pernyataan tiga tokoh yang pertama. AM mengancam PKS batal berkoalisi dengan PD jika SBY kembali berduet dengan JK. MS menafikkan kemungkinan PKS akan mengajukan cawapres, yang seolah menurunkan posisi tawar PKS dalam negosiasinya dengan SBY dan PD, atau dalam konteks saat itu bisa juga dibaca sebagai mengecilkan kemungkinan PKS berkoalisasi dengan SBY dan PD. Sedangkan FH ”mengencerkan” dukungan PKS kepada SBY dan koalisi pendukungnya dengan mengatakan bahwa PKS membuka komunikasi yang sama dengan semua partai. Sebaliknya, TS (ketika itu Presiden PKS) menepis pernyataan-pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan sikap pribadi dan PKS tetap berkomitmen menjajaki koalisasi dengan SBY dan PD.

Namun menarik pula untuk dicatat, penulis artikel tersebut secara sadar berusaha menempatkan Ketua Majelis Syura yang merupakan orang nomor satu di PKS dan lembaga Majelis Syura yang dipimpinnya di atas kedua kubu yang berkonflik, agar yang bersangkutan tidak dipersepsikan cenderung atau terafiliasi pada satu faksi tertentu. Upaya tersebut kian jelas terlihat jika kita menyimak bagian lain dari artikel yang sama:

> “Yang unik dari PKS adalah hasil pembahasan 96 anggota Majelis Syura yang hadir tentang calon wakil presiden, dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan disampaikan secara langsung kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syura, KH. Hilmi Aminuddin, menyatakan cara itu ditempuh untuk menjaga 'kesantunan dalam berpolitik' dan demi menghindari kegaduhan politik yang sudah melanda sejumlah partai besar”.

Demikian pula petikan berikut ini:

> “Karena itu, sikap Majelis Syura untuk mengembalikan kesantunan berpolitik PKS patut didukung. PKS kini menjadi salah satu aset nasional yang amat bernilai. Dari sinilah akan diuji: Apakah cita-cita reformasi 11 tahun lalu masih mungkin diwujudkan? Dan, bisakah konsolidasi demokrasi demi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat

dimulai setelah tiga kali pemilu? Hanya elite politik yang matang bisa menjawab tantangan ini".

Bukan hanya isi artikel tersebut yang mengindikasikan diamika internal yang cukup tajam, bahkan konflik antar-faksi di tubuh PKS, melainkan juga dipublikasikannya tulisan yang begitu gamblang oleh seorang kader senior yang menjadi anggota organ sepenting Majelis Pertimbangan Pusat (MPP).[3] Dalam suatu "budaya komunikasi yang sangat hening" di PKS, apalagi dalam kultur yang mengedepankan *conformity and compliance*, serta menabukan tindakan membuka "aib" organisasi di publik eksternal sebagaimana yang digambarkan oleh Janji Setia Anggota PKS, bisa dibayangkan kegundahan seperti apa yang memotivasi kader tersebut melakukan hal ini.

Di sisi lain, ekssitensi basis yang permanen dari faksionalisasi di PKS dipertanyakan, bahkan cenderung ditolak. Menurut seorang pimpinan organ partai di pusat, kalaupun ada pengelompokkan di antara kader-kader PKS, basisnya adalah sikap yang berbeda terhadap isu-isu tertentu, seperti perbedaan pendapat yang cukup tajam ketika tahun 1998 para kader Jemaah Tarbiyah memutuskan berpartai, dan perdebatan di Dewan Syariah dalam menetapkan tanggal jatuhnya hari raya.

Pengelompokkan yang ada di tubuh PKS juga kerap digambarkan sebagai sesuatu yang relatif cair dalam konteks ruang dan waktu. Bahkan bisa lebih cair lagi dalam tingkatan isu per isu. Dengan demikian, keanggotaan tiap kelompok tidak rigid. Selalu ada aktor, yang sudah lama sekalipun, yang tiba-tiba masuk ke dalam suatu kelompok karena kesepahaman, atau keluar dari suatu kelompok karena ketidaksepahaman. Seorang kader muda menggambarkan bahwa "wadah"

[3] Seorang pengurus DPP menjelaskan bahwa publikasi tulisan tersebut di media umum sangat disayangkan oleh berbagai kalangan di dalam PKS. Menurutnya, kritik seperti itu, sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan), mestinya dilakukan secara internal. *Mudawalah* (dinamika) internal seperti itu mestinya tidak sampai ke luar. Ia mengatakan, "Makanya istilahnya jangan sampai kalaupun ada kelemahan, kekurangan istilahnya, bahkan boroknya internal, jangan sampai dipamer-pamerin keluar". Ia juga mengatakan, "daripada apa, di koran, nggak boleh. Kita tuh di dalem di dalem aja. Istilahnya saling kata-kataan juga di dalem". Walaupun demikian, ia juga mengakui bahwa konflik tersebut ada dan terbaca oleh publik dengan mengatakan, "emang keliatan karena TS itu gini-gini, dikoreksi di dalam". Namun demikian, seorang anggota MPP memberikan analisis yang agak berbeda dengan mengatakan, "Geger, tapi dia nggak akan pernah kena marah karena kulturnya kan Jawa. Dia nggak akan pernah ditegur secara langsung. Halus, halus banget. Itu dominan kultur-kultur politik Jawa, halus gitu".

berupa kelompok atau faksi itu eksis dan dapat "dilihat", walaupun "isi" masing-masing wadah dapat berubah secara dinamis karena tidak semua hal yang menjadi batasan yang membentuk tiap-tiap "wadah" bersifat permanen.

Di antara sekian banyak *grouping factors* yang ada, faktor suku, seperti "Jawa" dan "non-Jawa", dan golongan, yang bisa terkait dengan latar belakang pendidikan, maupun profesi, seperti "pengusaha" dan "bukan pengusaha", merupakan sebagian dari *grouping factors* yang relatif permanen. Sejauh ini faktor-faktor tersebut cukup efektif digunakan untuk mengikat orang-orang menjadi kelompok-kelompok yang berbeda di komunitas Jemaah Tarbiyah.

Grouping factors tersebut di atas menarik untuk dielaborasi lebih jauh. Pertama, faktor suku. Dalam hal ini seorang informan menyebut Jawa dan non-Jawa. Kemungkinan itu dikemukakan pula oleh informan lain yang menengarai bahwa faktor kesamaan suku mungkin ikut mempengaruhi kenyamanan interaksi antara para tokoh kunci di PKS. Ia mengidentifikasi bahwa sejumlah petinggi partai pada kepengurusan yang lalu maupun yang sekarang, antara lain Ketua Majelis Syura, Ketua Dewan Syariah Pusat, dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, berasal dari suku yang sama. Ia menduga, kenyaman dalam berkomunikasi yang merupakan implikasi kesamaan latar belakang suku tersebut merupakan faktor, yang diakui ataupun tidak, cukup signifikan pengaruhnya.

Kedua, faktor latar belakang pendidikan. Berdasarkan pengamatan peneliti selama berinteraksi dengan Jemaah Tarbiyah sejak awal tahun 1990, terdapat dua kelompok besar kader berdasarkan latar belakang pendidikannya, yaitu mereka yang berlatar belakang pendidikan agama, termasuk di dalamnya *ushuluddin* (akidah), *syariah*, tafsir Al Qur-an, ilmu hadits, dan lain-lain, serta mereka yang berlatar belakang pendidikan umum, atau sering disebut "pendidikan sekular". Kelompok yang kedua terbagi lagi menjadi mereka yang berasal dari ilmu-ilmu eksakta (MIPA, keteknikan, dan ilmu-ilmu kesehatan) dan ilmu-ilmu sosial.

Peneliti menangkap kesan bahwa di masa lalu perbedaan latar belakang pendidikan tersebut bukan sekedar menjadi dasar pengelompokkan yang bersifat horisontal, melainkan juga vertikal (stratifikasi sosial), di mana para kader yang berlatar belakang ilmu agama, apalagi bergelar Doktor, mendapatkan

penghormatan lebih di komunitas ini, antara lain dalam bentuk sebutan “ustadz” atau bahkan “syaikh”. Kefasihan bertutur dalam Bahasa Arab merupakan penanda kelompok atau strata ini. Namun di sisi lain, mereka yang berlatar belakang ilmu-ilmu umum cenderung memandang para “ustadz” ini, paling tidak sebagian di antara mereka, lugu dan kurang mampu berpikir secara empirik dalam merespon berbagai persoalan yang mengemuka.

Kesamaan latar belakang pendidikan ini juga mampu menjadi perekat kelompok, bahkan meredam potensi konflik. Sebagai contoh, beberapa informan menduga relatif mulusnya hubungan antara Sekjen (AM) dengan Presiden PKS saat ini (LHI) bila dibandingkan dengan Presiden sebelumnya antara lain karena keduanya berlatar belakang pendidikan keagamaan dan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab, padahal beberapa informan menyebut AM sangat progresif sementara LHI sangat konservatif.

Keragaman latar belakang pendidikan dari para kader PKS juga dipandang membawa *mudawalah,* dinamika internal tersendiri. Namun demikian, tidak terdapat pola yang baku yang mengaitkan latar belakang pendidikan tertentu dengan kelompok tertentu dalam pandangan serta pilihan sikap dan perilaku. Menurut seorang informan, beberapa kader yang memiliki pemikiran yang cenderung ekstrim, bahkan sampai memutuskan keluar dari partai, menjadi “pentolan” FKP dan sebagainya, justru memiliki latar belakang pendidikan sekular. Menurutnya, ekstremitas tersebut terkait dengan dasar pengetahuan dan pemahaman agama yang relatif terbatas. Senada dengan itu, informan lain berpendapat bahwa mereka yang berlatar-belakang pendidikan *syariah* juga ada yang berpikiran terbuka. Sebaliknya, yang berlatar-belakang pendidikan sekular pun ada yang cenderung tertutup.

Eksistensi faksionalisasi di PKS juga dibantah jika yang dimaksudkan adalah keterbelahan menjadi dua kelompok yang berkonflik, berhadap-hadapan. Namun seorang mantan petinggi partai tidak menafikkan bahwa pasca Pemilu 1999 ada sekelompok kader PKS yang tampil di publik dengan cara yang berbeda, misalnya gaya hidup yang cenderung mewah dan menonjolkan diri, komunikasi publik yang relatif keras dan bahkan kasar, serta melontarkan wacana-wacana

baru yang berbeda dari pakem yang ada (misalnya PKS sebagai "Partai Terbuka") tanpa kesepakatan di Majelis Syura sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi. Informan tersebut mengakui pula bahwa perbedaan-perbedaan tersebut cukup menimbulkan kebingungan tentang PKS, baik di publik eksternal, maupun di kalangan kader PKS sendiri. Ia merangkumnya dengan mengatakan, "bukan masalah faksi, tapi gaya aja, *style*-nya yang berbeda, **antara yang ingin tetap orisinal, sederhana, dan mengingatkan, dan sebagian yang terpengaruh gaya hidup moderen**".[4]

Penolakan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai eksistensi faksionalisasi dikemukakan oleh seorang elit PKS yang mengatakan:

> "Menurut saya *back mind* konstruksi berpikir yang salah itu yang membuat ada pengelompokan seperti itu. Karena menurut saya begini, **menjadi konservatif dan menjadi progresif itu adalah fungsi**, sama persis seperti menjadi tertutup atau terbuka. Pada waktu tertentu kita bersikap konservatif, pada waktu tertentu kita bersikap progresif".

Dengan demikian, konservatif-progresif, tertutup-terbuka, atau sikap-sikap yang lain merupakan pilihan-pilihan yang diambil oleh partai dan kader-kadernya secara dinamis, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Pernyataan tersebut menarik dan sekaligus tidak sulit untuk dipahami, karena dalam pandangan beberapa informan yang mengakui adanya faksionalisasi dan konflik internal di PKS, elit tersebut berada di tengah pusaran persoalan yang ada, bahkan menjadi *icon* dari salah satu faksi atau kelompok. Seorang informan lain, yang memiliki kedekatan hubungan dengan elit ini juga tidak sependapat jika dikatakan di PKS terdapat faksionalisasi, karena baginya pengelompokkan yang disebut faksi adalah pengelompokkan yang solid dengan dasar perbedaan pada *school of*

[4] Yang menarik, dengan mencermati penuturan informan ini secara keseluruhan selama wawancara berlangsung, peneliti menangkap kesan kuat bahwa pengelompokkan dan faksionalisasi, bahkan konflik internal itu ada. Peneliti juga menangkap sinyal yang jelas bahwa ia terlibat dalam konflik dengan mengambil posisi yang berseberangan dengan kelompok yang disebutnya "terpengaruh gaya hidup moderen". Namun demikian ia tetap menegaskan, "Jadi saya tidak melihat bahwa keputusan-keputuan strategis dipengaruhi oleh faksi-faksi ini, yang *antum* anggap faksi-faksi. Tapi tetap itu suatu keputusan Majelis Syura yang tidak dapat diganggu gugat siapapun". Pendapat bahwa hal-hal strategis yang sudah diputuskan oleh Majelis Syura bersifat mutlak, dilaksanakan bersama-sama, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga dikemukakan oleh informan lain. Namun sumber yang berbeda mengatakan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dalam beberapa kasus "memodifikasi" keputusan Majelis Syura di tingkat pelaksanaan, dan kultur *ewuh-pakewuh* yang kuat membuat para anggota Majelis Syura enggan mempertanyakan hal tersebut.

thoughts atau ideologi. Sementara itu, perbedaan-perbedaan pendapat yang mengemuka di antara para kader PKS, yang oleh sementara kalangan dibaca sebagai ”faksionalisasi”, atau perubahan PKS menjadi pragmatis, tidak betitik tolak dari ilmu pengetahuan atau metodologi yang berbeda, melainkan hanya perbedaan *feeling*. Ia memberikan contoh:

> “Seperti kritik terhadap saya kan, naik mobil Alphard. Apa pantas itu kader PKS naik mobil Alphard. Kira-kiranya begitu. Pengetahuan mengatakan secara objektif, kalo orang punya rezeki yang halal, apa salahnya itu? Ya kan?! **Jadi ini kita bicara pengetahuan, kita bicara perasaan gitu**”.

Ia juga mencontohkan AH, kader PKS yang menjadi Gubernur di propinsi terbesar di Indonesia, yang dikatakannya ”pertumbuhannya cepat sekali”. Menurutnya, tak ada yang salah dengan pertumbuhan tersebut, karena semua orang pun mengalami pertumbuhan. Ia mengatakan, ”Yang tidak boleh itu kan korupsi, mendapatkan sesuatu secara haram, itu aja kan?! *Abuse of power*, mengorbankan publik. Itu aja”. Menurutnya, pendebatan internal yang terjadi sebenarnya tidaklah pelik secara “ilmu pengetahuan”, namun pelik secara perasaan, karena perasaan bersifat subjektif, dan setiap orang memiliki selera masing-masing yang tak bisa disamakan standarnya.

Ikhtisar pendapat-pendapat sebagian informan mengenai eksistensi faksionalisasi dan konflik internal di PKS digambarkan pda Tabel 4.1. Secara umum terlihat bahwa para informan yang memilih keluar dari PKS, berafiliasi dengan kelompok *religious movement oriented*, netral, atau tidak jelas afiliasinya, memiliki pandangan yang bervariasi tentang eksistensi faksionalisasi dan konflik internal di PKS, walaupun tidak menolaknya sama sekali. Sebaliknya, mereka yang berafiliasi dengan kelompok *political party orientend* menolak dengan tegas keberadaan faksionalisasi dan konflik internal tersebut. Sikap tersebut dapat dipahami karena faksionalisasi dan konflik berseberangan dengan budaya organisasi PKS. Jika eksistensi faksionalisasi dan konflik internal diakui maka besar kemungkinan kelompok *political party oriented* akan dituding sebagai penyebabnya.

Tabel 4.1
Ikhtisar Pendapat tentang Eksistensi Faksionalisasi di PKS[*)]

Ada/Setuju					
Informan-19	**Informan-04**	**Informan-02**	**Informan-03**	**Informan-08**	**Informan-05**
Ada, antara mereka yang ingin tetap konsisten dengan prinsip-prinsip jemaah *ikhwan*, dan mereka yang berubah orientasinya menjadi uang dan kekuasaan.	Ada, antara kelompok "keadilan" dan "kesejahte-raan"	Ada, dalam hal yang terkait dengan *fundrising*.	Ada, sebagai konsekuensi dari perbedaan pandangan, preferensi, dan cara kader memahami arahan *qiyadah*.	Awalnya adalah pesepsi, namun kemudian menjadi realita.	Dikatakan ada, tidak pernah diakui secara eksplisit apalagi formal, namun dikatakan tidak ada, "baunya tercium".

				Tidak Ada/Tidak Setuju
Informan-15	**Informan-07**	**Informan-16**	**Informan-12**	**Informan-11**
Ada, tapi relatif cair, walaupun ada beberapa *grouping factors* yang relatif permanen, seperti latar belakang pendidikan, suku, profesi.	Ada pengelompok-kan, tapi berbeda-beda untuk setiap isu, sehingga tidak membentuk faksi.	Tidak ada faksionalisasi dalam arti PKS "terbelah" menjadi dua kelompok, tapi pasca 1999 memang ada sebagian kader yang gaya hidup dan perilaku politiknya berubah.	Tidak ada, karena perbedaan yang ada dasarnya hanya *feeling*, bukan suatu *school of thaughts* tertentu yang mestinya mendasari faksionalisasi.	Tidak ada, karena konservatif-progresif, atau tertutup-terbuka adalah pilihan-pilihan sikap yang dinamis yang diambil oleh partai sesuai dengan kondisi yang ada.

[*)]Disajikan secara gradual dari yang mengatakan "ada/setuju" hingga yang mengatakan "tidak ada/tidak setuju".

4.2. Anatomi dan Faktor Pembentuk Kelompok *(Grouping Factors)*

Dasar dari pengelompokkan atau faksionalisasi di PKS adalah persepsi, pandangan-pandangan (atau pola pikir), dan gaya hidup. Berdasarkan ketiga faktor tadi, seorang informan mengelompokkan kader-kader PKS menjadi dua kelompok, yaitu **mereka yang "masih berpegang pada pola-pola yang otentik"** sejak masa Jemaah Tarbiyah dan PK dahulu, dan **mereka yang cenderung "pragmatis"**. Di samping kedua kelompok itu, terdapat pula kelompok kecil yang keluar dari partai atau anti partai, yang menyalahkan pilihan berpartai sebagai akar penyebab "degradasi" kualitas para kader Jemaah Tarbiyah. Menarik untuk

dicatat bahwa setidaknya empat dari 52 orang deklarator Partai Keadilan (PK) tahun 1998, yaitu DRS, MH, IAT, dan TZ, dan satu dari 51 orang deklarator PKS tahun 2003, yaitu FN, termasuk dalam kelompok ketiga, ”kelompok yang keluar dari partai”, bahkan sebagian menjadi motor penggerak FKP.

4.2.1. ”Kelompok Idealis” versus ”Kelompok Pragmatis”

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, gaya hidup merupakan salah satu sumber utama dari friksi yang kemudian mengerucut menjadi pengelompokkan di PKS. Seorang mantan pengurus DPP periode lalu berujar, “Sebenernya ini kembali ke AM dan teman-temannya yang dipersepsi beberapa *ikhwah* sebagai pembawa gerbong kemewahan dalam partai ini”. Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa pengelompokkan di PKS merupakan konsekuensi dari persepsi tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam hal gaya hidup atau kehidupan materi yang ditunjukkan sebagian kecil kader PKS dalam konteks realita kehidupan sebagian besar kader PKS yang belum sejahtera secara finansial. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok yang memilih berseberangan dengan struktur partai untuk menyerang dan mendiskreditkan. Informan lain mengungkapkan hal yang serupa dengan mengatakan, “memang ada sebuah situasi kehidupan yang dipersepsikan berubah ... cukup mengusik perasaan, misalnya kemewahan”. Dengan demikian, data penelitian ini mendukung temuan Hwang dan Mecham (2010) bahwa *tensions* yang ada di PKS terkait antara lain dengan pandangan mengenai gaya hidup yang layak bagi kader PKS.

Kontestasi antara “kelompok idealis” dan “kelompok pragmatis” yang terjadi di tingkat pusat mengimbas juga ke struktur PKS di daerah-daerah, walaupun dengan gradasi yang bervariasi. Semakin dekat dengan pusat, semakin terasa pula imbas tersebut, misalnya Bandung dan Banten. Dalam hal ini, kelompok-kelompok di pusat juga mencoba mempengaruhi daerah-daerah. Bahkan seorang informan secara eksplisit mengatakan, kecenderungan untuk ”progresif”, khususnya dalam mencari dana, sudah dicontoh oleh daerah-daerah. Ia mengatakan, ”Saya lihat akhirnya daerah mulai seperti itu ... Ada yang

kemudian gaya-gaya orang tim progresif.[5] ... Selalu ada di daerah dan bisa diidentifikasi tokoh-tokohnya". Gerakan elit daerah ini merupakan kombinasi antara kepentingan mereka sendiri dengan "pesanan" dari beberapa oknum di pusat. Menurutnya, kedua pihak tersebut "saling memanfaatkan".

Kelompok yang memilih berpartai namun tetap "ideologis" sesungguhnya masih merupakan mayoritas, Mereka memutuskan tetap berada di partai karena merasa sejak dulu telah ikut mendirikan dan membesarkannya, sehingga merasa sayang jika sekarang meninggalkannya begitu saja. Namun demikian, seorang kader yang sangat senior mengakui bahwa "kelompok idealis" ini memiliki dua kelemahan. Pertama, soliditas ideologis kelompok ini sebenarnya masih lemah dan belum teruji. Kedua, dalam banyak kesempatan, argumentasi yang dikemukakan tokoh-tokoh kelompok ini dalam kontestasinya dengan "kelompok pragmatis" kurang memiliki dasar yang kuat, sehingga relatif mudah dipatahkan. Senada dengan itu, informan lain menuding kegamangan dari para elit[6] sebagai penyebab kegamangan para kader di akar rumput dalam merespon perubahan-perubahan yang berlangsung dalam partai.

Sementara itu, "kelompok pragmatis" sebenarnya relatif sedikit jumlahnya, namun mereka lantang bersuara dan menguasai sumberdaya, termasuk akses komunikasi. Seorang informan menengarai, berbagai *ijtihad*[7] yang dikeluarkan oleh para ustadz di PKS dalam konteks pemenangan pemilu juga menyediakan "ruang" yang lebih lapang bagi "kelompok pragmatis" untuk bermanuver. Mereka mampu menempati posisi-posisi strategis dalam struktur partai walaupun jumlahnya relatif sedikit karena dianggap telah berkontribusi banyak terhadap partai berdasarkan kriteria baru yang lebih pragmatis, yaitu kemampuan mendatangkan uang dan kekuasaan. Seorang pendiri PK mengatakan:

---

[5] Pada awalnya informan ini menggunakan istilah "kelompok pragmatis". Namun setelah peneliti menjelaskan bahwa ada informan lain yang menggunakan istilah "kelompok progresif", yang bersangkutan lebih sering menggunakan istilah tersebut dengan alasan "untuk menghormati mereka".

[6] Bahasa non-verbal dari informan ini ketika wawancara memperlihatkan bahwa yang dimaksdkannya sebagai "para elit" adalah "kelompok idealis".

[7] Menurut seorang informan, salah satu bentuk *ijtihad* yang relatif sering diambil adalah membolehkan sesuatu (misalnya sumber keuangan) yang dalam fikih bukan sesuatu yang baik atau dianjurkan, dengan argumentasi "maslahat dakwah".

> "Kalau dulu yang dikatakan satu orang kader yang memiliki kontributor bagus itu kan yang bagaimana ia bisa merekrut *halaqah* ... Dipuji-puji ini. Nah sekarang sudah terjadi perubahan dalam pada sebagian orientasi. **Maka yang disebut berkontribusi itu ya yang tadi, bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan kekuasaan** ... Nah ketika orang itu dianggap punya suatu kontribusi lalu ya ditempatkan pada suatu posisi yang baguslah".

Sejalan dengan itu, ada informan yang berpendapat bahwa kemampuan mencari uang untuk kepentingan partai telah menjadi kriteria penting dalam menilai kontribusi kader. Mereka yang "lincah" mengendus, mengakses dan mengakumulasikan sumber-sumber finansial akan memperoleh apresiasi, dan sebagai konsekuensinya mendapatkan legitimasi untuk melakukan mobilitas vertikal ke posisi-posisi yang lebih strategis, yang kembali akan kembali memperbesar peluang mengakses uang. Lebih dalam lagi, informan lain menegaskan bahwa "pragmatisme", khususnya "pragmatisme finansial", mungkin sedang menjadi arus utama di PKS, menggeser "idealisme" yang sebelumnya tampil di depan. Implikasinya, para kader yang kurang sejalan dengan arus utama tersebut akan terpinggirkan. Selanjutnya, "kelompok pragmatis" memanfaatkan sumber daya finansial yang telah mereka akumulasikan untuk membangun loyalitas kader kepada mereka. Seorang kader menuturkan, "AM ada uang. Dia membangun kekuatan ... **Dan mereka paham cara membangun kekuatan itu lewat kekuatan uang** ... Misalnya siapa disuruh umrah ... Kader. Hadiahnya umrah, naik haji. Kan berasa".

Kader tersebut mencontohkan pengalaman pribadinya yang menunjukkan bahwa kemampuan mencari uang menjadi kriteria penting dari kontribusi kader di PKS belakangan ini. Menurutnya, kontribusi yang sudah dilakukannya sejak lama sebagai kader dengan bekerja di struktur partai, dalam bentuk merekrut kader dan lain-lain, tidak menjadi pertimbangan yang signifikan ketika dirinya akan maju dalam suatu pemilukada, karena kriteria utama yang diperhitungkan adalah kemampuan calon Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyetorkan dana. Ia tidak keberatan jika uang menjadi salah satu kriteria yang penting, namun dengan catatan tidak selayaknya uang menjadi kriteria utama, apalagi satu-satunya. Ia menggugat, apakah uang harus menjadi dasar yang digunakan dalam mempertimbangkan semua keputusan, sehingga menafikkan hal-hal lain, seperti

kapasitas dan berbagai hal yang sifatnya asasi. Di samping itu, ia juga berpendapat, jika sekarang kader dituntut untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, secara internal di PKS iklim bisnis harus didorong, dan peluang-peluang bisnis harus dibuka. Seolah mengkonfirmasi pengalaman tersebut, dalam konteks pen-caleg-an di pemilu yang lalu, seorang informan lain memiliki catatan pribadi yang juga menggambarkan "pragmatisme finansial" tersebut:

> "**Kan DPP bilang, harus setor 300 juta**. Saya bilang gini, mau nyari dari mana pak?! Itung! Gaji anggota Dewan berapa? Kita setor ke partai berapa? Tapi si anu bisa. Lho, kalau dia bisa, saya nggak tau *income* di luar itu dia dapet malak dari mana? ... Dia kerja di mana, kita bisa itung gitu. *So b*isa nyetor 300 juta dapet duit dari mana? Ya kan? Dapet uang amplop dari mana? Halal nggak halal ya itung-itungan lah gitu kalau saya. **Saya nggak disukai kalau ngomong kayak gitu**".

Dalam pandangan informan tersebut, kesadaran terhadap kebutuhan sumberdaya finansial untuk mendanai perjuangan partai membuat PKS seolah-olah abai terhadap status sumber dana tersebut. Yang menarik, ia mengatakan bahwa sikapnya yang kritis dan lugas mempertanyakan kepantasan sumber-sumber dana cenderung tidak disukai di PKS. Pendapat beberapa informan tersebut menunjukkan menguatnya peran modal ekonomi yang kemudian diubah menjadi modal simbolik, dan pada gilirannya terakumulasi sebagai kekuasaan simbolik. Di satu sisi, hal tersebut mencerminkan perubahan atau pergeseran arena di internal PKS, dari arena dakwah dan *tarbiyah*, menjadi arena politik kekuasaan. Di sisi lain, ia juga dapat dilihat sebagai indikator perubahan habitus kolektif PKS, yang ditandai dengan perubahan wacana dominan, di mana politik kekuasaan yang sebelumnya merupakan *heterodoxy* sekarang menjadi *doxa* baru, dengan menggeser dakwah dan *tarbiyah* dari posisi sebagai *doxa*.

Di sisi lain, kemampuan dan kecenderungan memanipulasi dalil, baik dalil agama maupun dalil ilmiah, juga menjadi faktor yang membuat "kelompok pragmatis" unggul dalam kontestasi internal. Terlepas dari latar belakang kader-kadernya yang sebagian besar terpelajar, ketundukan kepada dalil masih menjadi bagian dari budaya organisasi PKS. Dalam konteks ini, seorang kader muda melihat strategisnya peran pemilihan teks-teks tertentu yang dijadikan sebagai landasan bergerak yang kemudian diekspresikan dalam *life style*, cara

berpenampilan, cara bekomunikasi di publik, dan lain-lain. Dalam wawancara terbaca dengan jelas beberapa informan secara sadar memilih teks-teks tertentu untuk memberikan landasan atau memperkuat pendapat mereka. Yang menarik, teks-teks tersebut diambil dari sumber yang sama, yaitu Al Qur-an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan *sirah* kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Namun setiap orang memilih teks berdasarkan kriteria tertentu yang berbeda, dan kemudian memaknai teks yang sudah dipilihnya dengan cara yang tidak sama pula. Ada informan yang menggunakan teks-teks yang dipilihnya untuk menegaskan bahwa perubahan gaya hidup sebagian kader PKS yang dikesankan mewah adalah sebuah persoalan serius. Sebaliknya beberapa informan lain menggunakan teks-teks yang lain dari sumber yang sama untuk menekankan bahwa tidak ada persoalan dengan perubahan tampilan fisik tersebut. Dalam konteks ini, "kelompok pragmatis" yang mengusung "tafsir baru" mampu memenangkan persaingan karena tokoh-tokohnya lebih mampu memanfaatkan berbagai media dan kesempatan untuk mensosialisasikan pikiran-pikiran mereka. Dengan kata lain, kelompok ini relatif lebih terorganisir dibandingkan kelompok yang lain. Uraian di atas menunjukkan, modal spiritual, yang merupakan varian dari modal kultural, sangat efektif didayagunakan dalam mengakumulasikan kekuasaan simbolik di PKS.

Penyebutan **"faksi keadilan"** untuk menggambarkan kelompok kader-kader PKS yang dipersepsikan lebih idealis, dan **"faksi kesejahteraan"** untuk mereka yang dipersepsikan sebaliknya, lebih pragmatis, ditengarai berawal dari kalangan eksternal partai. Menurut seorang anggota MPP, kedua istilah tersebut pertama kali muncul dalam komentar yang dikemukakan salah satu tokoh PAN, Drajad Wibowo. Sedangkan seorang anggota Majelis Syura mengatakan, Sri Mulyani Inderawati (mantan Menteri Keuangan) dalam sebuah seminar dalam rangka *milad* PKS, dalam kapasitasnya sebagai salah satu pembahas buku Platform Kebijakan Pembangunan PKS yang baru diluncurkan, pernah menggunakan kedua istilah tersebut, bahkan menunjuk langsung beberapa kader yang menurutnya terafiliasi dengan masing-masing kelompok. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani juga menyatakan rasa syukurnya bahwa staf-stafnya di

Kementerian Keuangan yang diduganya berafiliasi kepada PKS sebagian besar "masih baik-baik".[8]

Secara internal penyebutan nama-nama faksi tersebut diduga berawal dari sekedar gurauan yang dipicu oleh gaya hidup sebagian kecil kader PKS yang dianggap mewah, atau dikatakan oleh seorang informan, "kesejahteraannya kok keliatan banget", terutama jika dikontraskan dengan sebagian besar kader yang lain. Terdapat dua hal yang menarik dari penuturan informan tersebut. Di satu sisi, lagi-lagi gaya hidup merupakan faktor pembentuk identitas dari apa yang disebut "faksi keadilan" dan "faksi kesejahteraan". Dalam hal ini terdapat semacam persepsi kolektif yang mendikotomikan apa yang disebut "mewah" dengan apa yang disebut "wajar" berdasarkan kriteria yang oleh sebagian kader dianggap sebagai norma kelompok yang semestinya diacu, walaupun dipertanyakan dan dianggap subjektif oleh kelompok kader yang lain. Di sisi lain, pengelompokkan tersebut tidak serta-merta berhubungan dengan kesejahteraan finansial yang sesungguhnya. Bahkan, dalam interaksi sehari-hari dengan peneliti, informan tersebut beberapa kali mengatakan bahwa sejumlah kader yang dianggap "faksi keadilan", termasuk dirinya, sudah mapan secara finansial sejak sebelum berpartai melalui bisnis atau penghasilan sebagai profesional, sedangkan mereka yang dianggap "faksi kesejahteraan" rata-rata baru menikmati kesejahteraan ekonomi setelah aktif berpolitik praktis. Senada dengan itu, seorang perempuan kader mengatakan, "Sekarang jujur, lihat, **kader-kader PKS yang ekonominya bagus rata-rata kan pejabat publik. Artinya bukan dari usaha bisnis**".

Terdapat rasionalisasi mengenai perubahan gaya hidup sebagian kader PKS, khususnya mereka yang merupakan bagian dari *the party in public office* dengan menjadi anggota parlemen di pusat. Dengan *take home pay* sekitar Rp 60 juta per bulan, walaupun kemudian dipotong Rp 20 juta per bulan oleh partai, perubahan gaya hidup tersebut tidak sulit untuk dimengerti. Dengan tingkat penghasilan tersebut, mereka sebenarnya masih berada di kelompok *middle class urban*, belum masuk ke *elite urban*, walaupun memang sudah jauh lebih baik dari sebagian besar kader PKS yang menurut seorang informan "sangat *grass root*".

[8] Dialog informal dengan informan yang bersangkutan sekitar akhir tahun 2008.

Dengan kondisi itu “kue” yang bisa dibagi untuk kesejahteraan bersama masih sangat terbatas. Dengan kata lain, lokomotif ekonomi yang ada masih terlalu kecil untuk menarik gerbong yang terlanjur besar.

Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari uraian di atas. Pertama, perubahan gaya hidup sebagian kader PKS merupakan fenomena OKB (orang kaya baru) yang mencoba meningkatkan standar hidup sejalan dengan peningkatan penghasilan. Kedua, dan di sinilah letak persoalannya, hal itu menjadi terlihat kontras dengan taraf kesejahteraan ekonomi sebagian besar kader PKS yang masih tertinggal. Hal ini dibenarkan oleh seorang anggota MPP yang mengatakan:

> “**Kita ini masih numpuk di sektor ketiga ...** yang di sektor privat sangat sedkit, yang di pegawai negeri juga 10-20% paling banyak. Selebihnya kita terlibat dalam banyak interaksi internal di yayasan, sekolah. Dan itu ternyata pertumbuhan unit usaha kader tidak sebanding dengan inflasi. Jadi berat lah para *ikhwah* ini”.

Namun bukan bukan hanya gaya hidup yang menjadi sumber persoalan. Ketidaksepahaman tentang sumber-sumber keuangan yang layak diakses oleh PKS untuk mendanai kegiatannya juga menjadi sumber konflik. Dalam hal ini eksistensi faksionalisasi dan konflik internal terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang *syubhat* atau *makruh*. Seorang kader senior mengatakan, “Iya akarnya di situ, ***fundrising***”. Pendapat tersebut diperkuat oleh seorang mantan anggota Majelis Syura, “Itu bilang kita harus gandeng pengusaha dan kita harus terima duitnya. Yang lain bilang, kita nggak perlu itu ... kalau uangnya nggak jelas stop, kita nggak mau dapet uang yang nggak jelas”.

Dengan bahasa yang lebih tegas, penyebab friksi antara “faksi kesejahteraan” dan “faksi keadilan” adalah **menguatnya “ideologi uang”**, di mana “faksi kesejahteraan” mengeksploitasi aksesnya terhadap sumber-sumber dana, ditambah lagi dengan perilaku yang dianggap tidak transparan dalam pertanggungjawaban sumber dan penggunaan uang yang dikumpulkan atas nama partai, serta klaim mereka tentang kontribusi yang besar terhadap partai. Seorang informan mengatakan, “**Ada presentase-presentasenya, *fundraising* itu**. Berapa persen mereka dapat dan itu kemudian jadi simpang siur, ada yang dapat sekian,

ada yang dapat sekian".[9] "Ideologi uang" inilah yang ditengarai menjadi faktor primer pengelompokkan yang ada di PKS. Faktor primer tersebut bisa saja kemudian bercampur dengan faktor sekunder, seperti *peer group*. "Kelompok pragmatis" menjadikan ketersediaan sumber daya sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan gerakan, dan mengkritik "kelompok idealis" sebagai orang-orang yang tidak realistis, karena hanya berbicara konsistensi gerakan tanpa berupaya menguasai sumber dana.

Dalam praksis mencari uang, "kelompok pragmatis" ditengarai melanggar batas-batas yang menurut kelompok yang berseberangan semestinya dijadikan pegangan. Seorang informan mengatakan, "ada yang memilih berhati-hati, ada yang memilih progresif. **Batasan-batasan itu akhirnya ditabrak**". Hal tersebut memiliki implikasi politis yang luas, terutama bila dikaitkan dengan identitas PKS sebagai Partai Dakwah dengan motto "bersih, peduli, profesional". Salah satu kasus misalnya, dorongan kuat untuk mengakumulasikan uang membuat ada elit PKS yang menjalin kedekatan dengan kroni mantan Presiden Soeharto. Seorang kader senior menuturkan,"**AM deket dengan beberapa orang yang deket dengan Cendana**. Makanya saya juga bingung kenapa AM ngotot sekali Soeharto jadi pahlawan. Golkar aja nggak pernah usul-usul. Dan terakhir positif tetep ngangkat itu gitu. Padahal itu kan melukai." Persoalan ini menjadi tidak sederhana karena sebelum menjadi partai, Jemaah Tarbiyah sudah mencatat sejarah dengan turut berperan signifikan dalam melengserkan Soeharto. Namun catatan itu kemudian menjadi bias oleh manuver sebagian elit PKS. Seorang anggota MPP mengatakan, "Kita masih diklaim reformis karena menjatuhkan Soeharto, tapi ternyata bergaul dengan keluarga Soeharto dengan cara yang lain". Dalam konteks ini, implikasi positif manuver politik tersebut terhadap kinerja PKS dalam meraih simpati publik pemilih sangat diragukan.

[9] Dalam sebuah kesempatan informan ini mengatakan bahwa seorang rekannya, sesama kader, pernah mendorongnya melakukan *fundrising* untuk partai dengan memanfaatkan akses terhadap beberapa pengusaha yang dikenalnya agar ia memperoleh bagian dari dana tersebut, namun ia menolak melakukan hal itu. Sementara itu, menurut informan lain, PKS pernah membuat ketentuan bahwa mereka yang bisa mencari dana untuk partai berhak mendapatkan *fee* sebesar 10% dari dana yang berhasil dikumpulkan.

Hampir seluruh Presiden PK/PKS mengalami konflik dengan Sekjen, yang sejak masa masih PK dijabat oleh AM. Seorang informan mengatakan, "AM dan Pak NI agak konflik, dengan Pak HNW konflik, dengan Pak TS konflik. **Banyak yang bilang AM yang salah. Salah, AM yang bener. *Definitely* Ustadz Hilmi mengatakan demikian**".[10] Sebagai pimpinan puncak Ustadz Hilmi Aminuddin mengambil posisi yang menarik dalam konstelasi konflik yang terjadi. Di satu sisi, kedekatannya dengan AM sangat terlihat. Sementara di sisi lain, Ustadz Hilmi hampir selalu menunjuk sosok-sosok yang cenderung berseberangan dengan AM untuk menjadi Presiden Partai, kecuali LHI, Presiden PKS saat ini. Dalam posisinya, tidak mungkin Ustadz Hilmi tidak memahami perbedaan pola pikir, sikap, dan karakter dari NI, HNW, dan TS dengan AM. Tidak mungkin pula Ustadz Hilmi tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya konflik ketika AM ditempatkan sebagai Sekjen, berdampingan dengan Presiden Partai yang berseberangan dengannya. Oleh karena itu, besar kemungkinan penempatan dua figur yang bertentangan di jabatan eksekutif puncak PKS di masa yang lalu dilakukan oleh Ustadz Hilmi secara sadar, dan merupakan bagian dari strateginya untuk mengendalikan bahtera PKS. Di satu sisi Ustadz Hilmi sangat memahami bahwa mayoritas kader PKS, khususnya yang menjadi bagian dari *the party on the ground,* berafiliasi dengan kelompok *religious movement oriented,* sehingga untuk menjaga soliditas ia perlu menempatkan sosok yang merupakan representasi dari kelompok ini di jabatan eksekutif puncak. Ustadz Hilmi juga sangat menyadari bahwa mayoritas kader PKS, khususnya para kader seniornya, masih memiliki resistensi yang relatif kuat terhadap AM dan pemikiran-pemikirannya, sehingga belum memungkinkan menempatkan AM di posisi Presiden Partai. Sementara itu, dari sisi kepentingan pragmatis, AM memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Ustadz Hilmi, yaitu mengakses dan mengakumulasikan sumber-sumber dana. Karena dihadapkan pada dua kebutuhan tersebut – akumulasi sumber daya finansial dan menjaga soliditas barisan – Ustadz Hilmi mengambil jalan mengkombinasikan AM sebagai Sekjen dengan sosok yang lebih

[10] NI, HNW dan TS adalah para Presiden PK dan PKS sebelum Ustadz Lutfi Hasan Ishaq, Presiden PKS saat ini.

merepresentasikan kelompok *religious movement oriented* sebagai Presiden Partai.

Intensitas konflik internal tersebut dari masa ke masa berubah-ubah. Konflik yang relatif paling keras terjadi pada masa kepemimpinan Presiden PKS yang ketiga, TS.[11] Seorang mantan pengurus DPP periode lalu menuturkan:

> "Di 2004-2009 saya merasa memang, agak spesifik, **TS dan AM tidak kompak** ... Pada kasus-kasus seperti Munas di Bali, isu Partai Terbuka, Pak TS langsung bikin iklan pernyataan tidak ada Partai Terbuka, polemik muncul. Dan dalam perspektif Pak TS, kelompok AM dan teman-teman ini punya standar perilaku yang tidak tepat".

Konflik yang terjadi sedemikian tajam hingga berpengaruh pada kelancaran roda organisasi sehari-hari di tingkat DPP. Mekanisme kerja tidak berjalan normal karena kedua belah pihak yang berkonflik enggan duduk satu meja. Informan tersebut menggambarkan kondisi itu dengan mengatakan, "Kalo dulu tegang terus. Sampai ada pleno BPH diperluas segala macem, cuma karena AM dan TS nggak nyambung". Sementara itu, kader lain mengatakan, "Kalau dulu kan TS ya emang ngelawan, ngelawan dengan keras". Bahkan salah satu Wakil Sekjen yang ketika itu dipandang sebagai "orangnya AM" hampir selalu menggantikan Sekjen dalam rapat-rapat dengan Presiden dan Bendahara Partai karena Sekjen tidak bersedia hadir akibat konflik yang kerap terjadi. Di luar rapat-rapat Wakil Sekjen tersebut terus berkomunikasi intensif dan bekerjasama dengan Sekjen, walaupun juga tetap menjalin hubungan baik dengan Presiden Partai. Sedemikian uniknya hubungan Wasekjen tersebut dengan Sekjen dan Presiden Partai, sehingga digambarkan jika diajak umrah oleh AM yang bersangkutan ikut, namun jika diminta oleh Presiden Partai untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan juga dilakukan. Dalam konteks konflik tersebut, juga sempat terjadi "kudeta halus" ketika kubu Sekjen berupaya mengmbil alih kewenangan DPP dari tangan kubu Presiden Partai dengan membentuk institusi TPPN (Tim Pemenangan Pemilu Nasional). TPPN yang diketuai oleh Sekjen dengan para pengurus DPP sebagai anggotanya. Sementara itu, Presiden Partai ketika itu, TS, hanya ditempatkan sebagai penasihat. Namun manuver tersebut tidak berjalan mulus karena sejumlah

[11] Menurut seorang perempuan kader senior, Ustadz Hilmi pernah memarahi TS dan AM karena ketidakrukunan mereka berdua.

pengurus DPP melawan dengan tidak menghadiri rapat-rapat, sehingga tim ini praktis tidak efektif. Manuver para aktor dalam konflik internal yang digambarkan di atas menunjukkan keberlakukan asumsi rasionalitas dalam teori tindakan kolektif Tilly (1978). AM yang memilih menghindari TS, seorang Wasekjen yang tetap memelihara hubungan baik dengan AM dan TS, manuver AM dengan membentuk TPPN, dan respon balik dari sebagian pengurus DPP yang memboikot TPPN, menunjukkan bahwa para *contenders* yang bermain di arena PKS memperhitungkan betul biaya-biaya dari tindakan kolektif yang mereka ambil, di samping terus-menerus memperbaharuhi perhitungan tersebut, karena terdapat ketidaklengkapan informasi mengenai arena politik di mana mereka bermain, serta dinamika strategi dari para *contenders* lain.

AM membantah adanya konflik yang keras antara dirinya dengan Presiden Partai yang ketika itu dijabat oleh TS dengan memberikan pernyataan normatif, “Nggak juga. Kan kita selalu melaksanakan keputusan yang kita putuskan bersama”. Sementara itu, TS, walaupun mengaku tidak memiliki masalah yang bersifat pribadi dengan AM, tidak menafikkan adanya perbedaan-perbedaan antara dirinya dengan AM, termasuk yang terlanjur keluar dalam bentuk beberapa *statement* di publik. Ia mengatakan:

> “Saya dari segi komunikasi dengan AM, hubungan pribadi, nggak ada masalah. Cuman kalo kebijakan ataupun pendapat ya boleh saja dong berbeda. Itu kebebasan memang di PKS. Orang boleh berbeda pendapat, boleh menyampaikannya, keputusan di Majelis Syura”.

Bantahan AM dan TS tentang sengitnya konflik di antara mereka berdua dapat dibaca dengan berbagai cara. Pertama, lagi-lagi hal tersebut terkait dengan budaya Jemaah Tarbiyah yang mengedepankan harmoni, serta *conformity and compliance*. Dalam konteks ini, mengekspresikan konflik secara terbuka di publik eksternal dapat dimaknai sebagai tindakan yang merusak persatuan dan soliditas jemaah yang merupakan doktrin terpenting di PKS. Kedua, AM dan TS tidak ingin menjustifikasi kesan yang sudah ditangkap oleh beberapa kalangan bahwa PKS tidaklah sesolid yang diduga sebelumnya, dan partai inipun sebenarnya terbelit masalah perpecahan internal. Ketiga, dalam konteks tindakan kolektif, AM dan TS berhitung secara rasional bahwa mengakui adanya konflik di antara

mereka berarti membenarkan eksistensi faksionalisasi dan konflik internal di PKS, yang jelas akan merugikan posisi mereka. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, AM sangat menyadari bahwa dirinya dianggap sebagai lokomotif gerbong pragmatisme di PKS, sehingga jika perpecahan internal diakui eksistensinya, ia adalah pihak yang sangat mungkin dituding sebagai penyebab utamanya. Sementara itu, TS tentu juga sangat memahami hubungan istimewa antara AM dengan pimpinan *Murraqib 'AM*, sehingga oposisi yang terlalu terbuka dengan AM akan menyulitkan posisi objektif dirinya maupun kelompoknya di arena PKS.

Dari sudut mekanisme formal organisasi tidak sulit dipahami jika Presiden Partai dan Sekjen sering tidak sejalan, karena Sekjen (dan Bendahara Umum), walaupun tugasnya membantu Presiden Partai, tidak ditunjuk oleh Presiden Partai, melainkan ditetapkan oleh Majelis Syura atas usul Ketua Majelis Syura, satu paket bersama-sama dengan Ketua DSP dan Ketua MPP. Namun demikian, perbedaan latar belakang pribadi juga berkontribusi terhadap relatif tajamnya konflik antara AM dan TS. TS menggambarkan dirinya sebagai berikut, "Saya ini insinyur ya. Saya eksak. Saya bicara agak-agak *machinery*, susah tuh belok-belok. Saya maunya *on the track*, logis, kerja saya *trouble shooting*, radio, saya elektronik, ini sini, sini, sini. Logis". Ia mengontraskannya dengan AM, "Ustadz AM ini kan LIPIA *background*-nya, dan beliau menyukai apa, paradigma-paradigma besar, filosofi-filosofi". Yang menarik, sepanjang wawancara dengan TS, peneliti menangkap kesan kuat bahwa perbedaan antara dirinya dan AM bukan sekedar latar belakang atau gaya saja. Jelas terlihat bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang sangat tajam, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan berseberangan. Gaya hidup AM dan kelompoknya, gagasan tentang Partai Terbuka, serta kecenderungan AM untuk menyampaikan wacana yang belum disetujui Majelis Syura di publik, merupakan contoh beberapa kritik keras TS terhadap AM.

Sebaliknya, era kepemimpinan Ustadz LHI, Presiden PKS saat ini, tampaknya merupakan masa yang paling tenang dan damai, walaupun dalam beberapa kasus sebenarnya LHI memiliki pandangan yang berbeda, bahkan mungkin berseberangan dengan AM. Seorang kader senior mengatakan, "beliau sendiri (maksudnya LHI) sangat paham Ustadz (maksudnya Ustadz Hilmi

Aminuddin) suka dengan AM sehingga dia tidak mau secara diametral bertentangan. Dia milih ayo kita kerja sama, gitu". Di samping itu, relatif mesranya hubungan Ustadz LHI dan AM mungkin terkait pula dengan kesamaan latar belakang pendidikan, yaitu Agama Islam, selain AM yang sudah lebih mampu mengatur ritmenya, menyesuaikan diri dengan Presiden Partai. Seorang pengurus DPP menuturkan, "AM lebih dewasa. Nanti dia tengah malam suka datengin kamar Ustadz LHI di lantai 2 ... AM ngajak diskusi, masuk sedikit, dua dikit, **tapi selalu ada hal-hal yang dia nggak mau disentuh oleh AM**". Karakter LHI yang lebih *soft* dibandingkan pra Presiden sebelumnya juga berkontribusi bagi terbentuknya harmoni antara dirinya dengan AM. Terkait dengan itu seorang informan mengutarakan, "**Ustadz LHI kelebihannya sangat baik hati**. Muslim yang baik gitu. Dia itu menghormati semua orang, menolong semua orang".[12]

Salah satu langkah yang diambil oleh LHI untuk meredam potensi konflik yang ada adalah menegakkan aturan main organisasi, di samping mendorong para kader untuk kembali menekuni *tarbiyah,* "jantung" dari jatidiri partai. Tapi ternyata hal tersebut tidak mudah, karena kelompok Sekjen tidak mengendurkan manuvernya. Kiprah Fraksi PKS DPR RI dalam Pansus Century mungkin dapat dijadikan contoh. Menurut seorang informan, ada pelanggaraan prosedur yang serius dalam menetapkan FH, MS dan AR mewakili PKS dalam Pansus Century, karena tidak melibatkan Presiden Partai dan Ketua Fraksi PKS DPR-RI. Namun dalam konteks budaya PKS yang sangat paternalistik, sungguh tidak masuk akal jika kelompok Sekjen berani melakukan manuver yang demikian strategis tanpa arahan, atau setidaknya restu, dari pemegang otoritas tertinggi.

[12] Kemungkinan penjelasan lain mengapa LHI punya hubungan yang relatif dekat dengan AM adalah karena mereka memang berada di kubu yang sama. Harian The Jakarta Post edisi 29 Maret 2011 menyebut LHI dan AM, bersama-sama dengan tiga kader lainnya, merupakan kader-kader yang dibina oleh Ustadz Hilmi untuk mempertahankan pendekatan pragmatis yang dipilihnya dalam mengelola partai.

Tabel 4.2
Ikhtisar "Kelompok Idealis" versus "Kelompok Pragmatis"

No	Aspek	"Kelompok Idealis"	"Kelompok Pragmatis"
1	Penyebutan publik	Faksi Keadilan	Faksi Kesejahteraan
2	Proporsi	Relatif lebih banyak, tapi cenderung *"silent"* dan pasif.	Relatif lebih sedikit, tapi cenderung vokal dan aktif.
3	Icon/representasi	Para mantan Presiden Partai, khususnya HNW	Sekjen, AM
4	Beberapa Pandangan		
	Gaya Hidup	♦ Islam mengajarkan kesederhanaan, sehingga hal tersebut harus tetap menjadi ciri para kader PKS. ♦ Memandang "kelompok pragmatis" menunjukkan gaya hidup mewah.	♦ Islam tidak melarang untuk kaya. ♦ Kemewahan itu selera dan bersifat subjektif. Tidak ada standar baku. Sehingga lebih merupakan masalah perasaan ketimbang pengetahuan.
	Kontribusi kader	Merekrut dan mebina *halaqah*.	Mendatangkan uang dan kekuasaan.
	Sebab kemenangan	Citra "bersih" yang melekat pada kader-kader PKS di masa sebelumnya.	Peningkatan penguasaan terhadap sumber daya, khususnya uang.
5	Persepsi atau label dari kelompok yang berseberangan	Gamang, kekanak-kanakan, mensimplifikasi, dan tidak menggunakan metodologi yang tepat.	♦ Membangun kekuatan dengan memanfaatkan uang, termasuk untuk memanipulasi kader. ♦ Pembawa "ideologi uang". ♦ Tidak menjaga kehatian-hatian dalam mengakses sumber-sumber keuangan untuk Partai.
6	Kekuatan	Masih konsisten bertahan di partai, walaupun berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan.	♦ Kemampuan mengakses sumber-sumber dana. ♦ Kemampuan mendayagunakan media. ♦ Kemampuan membangun wacana dominan.
7	Kelemahan	♦ Soliditas ideologis belum teruji. ♦ Sering melakukan perlawanan tanpa argumentasi yang jelas.	Sangat mengandalkan hubungan *patron-client* dengan pimpinan tertinggi partai.
8	Faktor pendukung	HNW yang merupakan salah satu tokoh PKS yang paling *"marketable"* secara eksternal dikenal merupakan *icon* dari kelompok ini.	♦ Ijtihad dari para Ustadz di PKS menjelang Pemilu 2009 tentang "maslahat dakwah". ♦ Didukung oleh pimpinan tertinggi Partai.

Walaupun berpengaruh terhadap intensitas konflik yang terjadi, persamaan atau perbedaan latar belakang keilmuan antara Sekjen dengan para mantan Presiden PKS diyakini bukan faktor utama yang mewarnai konflik yang terjadi. Yang menjadi faktor utama adalah ada-tidaknya sumber daya yang dapat diakses

oleh partai. Di masa HNW, terlebih lagi NI, PKS (saat itu PK) belum memiliki akses tersebut. Dengan hanya 7 kursi di Dewan hasil Pemilu 1999 PK belum cukup "cantik" untuk dilirik oleh siapapun. Oleh karena itu kelompok Sekjen belum melakukan manuver-manuver yang signifikan, sehingga tidak banyak konflik yang muncul ke permukaan. Setelah PKS tampil cemerlang di Pemilu 2004, kemudian HNW menjadi Ketua MPR, saat itu TS menjadi Presiden PKS, sumber daya itu mulai mengalir. "Kue" yang dapat direbut PKS membesar secara signifikan. Sekjen dan timnya bergerak dengan masif sehinggi menimbulkan banyak gesekan dengan TS sebagai Presiden. Sangat masuk akal jika TS melakukan perlawanan dengan keras, karena kubu AM nyata-nyata melakukan penyingkiran, misalnya dengan membuat institusi TPPN, di mana Presiden Partai hanya ditempatkan sebagai penasihat. Seorang informan mengatakan, "**Manusiawilah ketika semua diambil, masa mau mengalah. Dia siapa?!"** Di samping itu, latar belakang kesukuan TS juga turut berpengaruh pada caranya mengekspresikan perlawanannya. Hal ini juga turut berkontribusi pada menghangatnya konflik antara dirinya dengan AM.

Terdapat beberapa pandangan yang menolak eksistensi "faksi keadilan" yang idealis dan "faksi kesejahteraan" yang pragmatis. Pola faksionalisasi yang dikotomis tersebut dipandang tidak tepat karena terlalu membesar-besarkan perbedaan yang ada di antara para kader PKS, dan ditengarai hanya merupakan gurauan yang tidak menggambarkan realita yang sesungguhnya. Seorang perempuan kader senior menuturkan:

> "Menurut saya nggak bisa dibuat dikotomi. Kan seolah-olah yang keadilan itu nggak sejahtera, yang sejahtera nggak adil. **Padahal selama ini yang sejahtera itu justru yang kontribusinya besar buat partai**. **Orang-orang yang gayanya *zuhud,* yang gayanya sok *tawadhu* itu justru orang yang pelit berkontribusi buat partai gitu**".

Bahkan kader tersebut mengulas secara khusus perilaku AM, yang oleh sementara kalangan sering dianggap sebagai *icon* "faksi kesejahteraan" dan mengkontraskannya dengan perilaku kader PKS yang lain:

> "AM itu kan gaya hidupnya borju ... Tapi dia itu kontribusi dari segi pendanaan, apa, nggak itung-itungan. Dia itu orangnya gak pelit gitu. Dia juga gak segen-segen bantu setiap orang yang datanglah ke dia gitu.

> Sementara saya taulah ada seorang Ustadz yang selalu mengkritik yang borju, tapi akhirnya belakangan eh naik mobil keren juga gitu. Padahal dia waktu dipotong ... itu rame, protes".

Jika kita cermati, terlihat bahwa walaupun secara verbal kader tersebut menolak dikotomi "faksi keadilan" dan "faksi kesejahteraan", ilustrasi yang dikemukakannya justru membenarkan eksistensinya. Misalnya, terungkap bahwa salah satu ciri orang-orang "faksi kesejahteraan" adalah lebih banyak memberikan kontribusi finansial bagi partai dibandingkan orang-orang di kelompok yang lain. Ia juga mensifati kelompok di luar "faksi kesejahteraan" sebagai orang-orang yang "gayanya *zuhud*" atau "sok *tawadhu*". Demikian pula halnya dengan perbandingan antara AM yang "borju" tapi pemurah dengan seorang ustadz yang selalu mengkritik para borjuasi tapi kikir. Pendapat tersebut sebenarnya juga memperkuat pendapat seorang kader senior dari kelompok yang berseberangan bahwa tokoh-tokoh "faksi kesejahteraan" atau "kelompok pragmatis" berhasil menempati posisi-posisi strategis dalam struktur partai karena pergeseran makna "berkontribusi bagi partai", dari merekrut dan membina kader, menjadi kemampuan menyetorkan dana ke kas Partai. Dalam kerangka berpikir Bourdieu yang terjadi sesungguhnya adalah "pragmatisme", khususnya "pragmatisme finansial" telah menjadi *doxa* baru, setelah sebagai *heterodoxy* ia berhasil mengalahkan "idealisme" yang merupakan *orthodoxy* melalui pertarungan simbolik di arena PKS.

Pendapat lain melihat pengelompokkan "faksi idealis" dan "faksi pragmatis" bersumber dari paradigma yang salah dalam mengimajinasikan idealita sebuah partai Islam. Seorang elit PKS menengarai bahwa kebanyakan orang mempunyai *mindset* bahwa partai agama itu harus "miskin", sehingga ketika partai itu mulai berkembang dan punya sumber daya, ia dinilai telah menyimpang. Elit tersebut memandang bahwa konstruksi berpikir tersebut mendorong partai-partai Islam tidak berorientasi pada sumber daya, serta tidak secara sungguh-sungguh dan sistematis mengakumulasikan sumber daya, sehingga mereka mengalami penurunan kinerja, dan akhirnya dikalahkan oleh partai-partai nasionalis sekular. Salah satu contoh adalah media, khususnya iklan, yang merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan partai untuk

memenangkan pemilu, sehingga mau tidak mau di tingkat operasional partai harus berhitung berapa dana yang dibutuhkannya untuk beriklan secara efektif. Oleh karena itu, jika cara berpikir yang menafikkan sumber daya, apalagi anti sumber daya, terus dipertahankan, akan menghambat pertumbuhan PKS. Sikap "anti sumber daya" itu, baik di kalangan kader PKS maupun masyarakat umum, muncul antara lain dalam bentuk penyebutan "pragmatis" bagi kader-kader partai yang memiliki *concern* dan bekerja mengurus sumber daya. Ia menegaskan, perhatian pada sumber daya tersebut tidak perlu dibenturkan dengan ideologi, karena orang tidak perlu meninggalkan ideologi untuk memperoleh sumber daya. Sebaliknya, orang harus bekerja untuk memperoleh sumber daya karena itu adalah perintah dari ideologinya.

Jika didalami, rangkaian argumentasi elit PKS tersebut justru semakin kuat mengindikasikan adanya kontestasi antara "faksi idealis" dengan "faksi pragmatis". Pernyataan-pernyataannya cukup jelas menggambarkan bahwa ia sedang bertahan dari serangan, atau bahkan dalam beberapa kesempatan menyerang balik pihak yang berseberangan. Tudingan bahwa faksionalisasi hanyalah "imajinasi" yang berakar dari konstruksi berpikir yang keliru, atau yang lebih tajam lagi, pelabelan "pragmatis" terhadap kader partai yang *concern* dan bekerja untuk mengumpulkan sumber daya seperti dirinya adalah ekspresi sikap "anti sumber daya" dari kelompok-kelompok tertentu, merupakan sebagian contoh yang sangat jelas terlihat.

4.2.2. "Faksi Sekjen" versus "Faksi Penantang"

Terdapat pandangan bahwa "faksi keadilan" dan "faksi kesejahteraan" memang sempat ada di masa lalu, namun sudah tidak eksis dalam realita kontemporer PKS, karena para mantan Presiden PKS, khususnya HNW dan TS, sudah tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan, di samping sudah tidak didukung oleh "panggung" untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran mereka di dalam partai. Dengan demikian, terdapat pola pengelompokkan lain yang saat ini mengemuka, yang motivasinya sama-sama untuk merebut kekuasaan, namun berbeda klik, yaitu "faksi Sekjen", tetap dengan AM sebagai *icon*-nya, dan sebut saja "faksi penantang" dengan MK sebagai tokoh utamanya.

Karena dasar pengelompokkan kedua "faksi" tersebut semata-mata kepentingan maka kalaupun terlihat ada perbedaan pada kumpulan gagasan yang diusung, hal itu semata-mata upaya masing-masing kelompok untuk membangun diferensiasi dari kelompok yang lain. Seorang informan dengan tegas menyatakan bahwa MK dan "faksi penantang" ini bukan bagian atau kelanjutan dari "faksi keadilan" yang eksis di masa lalu. Ia menggambarkan sikap faksi baru itu sebagai berikut, "Karena sadar belum begitu kuat jadi lebih pilih tetep menginduk, nggak terbuka. Kalau rapat tetep menghargai ... Koordinasi tetep jalan. Nggak ada perlawanan berarti". Senada dengan itu, seorang mantan pengurus DPP yang lalu juga melihat bahwa MK memang memilih bermain aman, bahkan menyebutnya sebagai *"safety player"* yang perilakunya "nakal-nakal dikit, nurut-nurut dikit". Namun sikap tersebut mungkin diperlukan agar faksionalisasi di tubuh PKS tidak semakin tajam tertangkap oleh publik.

Walaupun "faksi penantang" eksis sebagai pesaing "faksi Sekjen", kemampuan faksi yang lebih junior ini untuk tumbuh secara berkelanjutan dan kemudian menjadi lawan yang seimbang bagi "faksi Sekjen" masih diragukan, karena terdapat sejumlah faktor yang merupakan keunggulan "faksi Sekjen", dan sekaligus merupakan kelemahan "faksi penantang", sehingga pertarungan keduanya tidak seimbang. Pertama, kejelasan agenda yang diperjuangkan. Kedua, kekuatan dukungan struktural yang mengakar dari pusat hingga ke daerah. Ketiga, dukungan manajerial dan logistik. Keempat, soliditas dan militansi tim. Keunggulan-keunggulan tersebut ditengarai membuahkan dukungan internal yang kuat dari publik PKS terhadap langkah-langkah yang dilakukan "faksi Sekjen" dalam mengusung agenda-agendanya.

Namun terdapat pandangan yang berbeda yang melihat bahwa "kelompok idealis" yang kerap disebut "faksi keadilan" masih tetap eksis, di mana sejak awal hingga saat ini HNW menjadi *icon*-nya. Namun demikian, HNW sangat menahan diri dalam rangka menjaga keutuhan jemaah karena sangat menyadari bahwa jika dirinya mengambil posisi yang berseberangan dengan gagasan-gagasan pragmatisme yang sedang menjadi *doxa*, atau wacana dominan di PKS saat ini maka faksionalisasi tersebut akan semakin tajam dan mengkristal, dan bukan tidak mungkin dapat berujung pada konflik terbuka dan perpecahan yang lebih serius.

Di samping itu, HNW juga bukan sosok yang berambisi untuk berkuasa, setidaknya jika dibandingkan dengan AM dan kelompoknya, sehingga ia tidak melakukan manuver-manuver yang terencana untuk memperluas pengaruh.

Terkait dengan hal yang diuraikan di atas, terdapat catatan tentang superioritas Sekjen dan faksinya. Sekjen dan orang-orangnya terlihat menonjol semata-mata karena secara umum tokoh-tokoh PKS yang lain relatif lemah dalam kapasitas *leadership* dan manajerial. Seorang informan mengatakan, "Itulah rahasia kenapa AM melenggang. Karena AM kan punya *leadership* ... lainnya nggak bisa ngimbangi ... **meskipun saya kira tidak piawai, tidak hebat-hebat amat**". Di samping itu, orang-orang yang idealis ini cenderung kurang strategis dalam berpikir dan tidak taktis dalam melangkah, termasuk dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Beberapa dari mereka masih menyibukkan diri mengerjakan hal-hal kecil yang kurang strategis, sementara AM (dan orang-orangnya) sangat memperhitungkan langkah-langkah yang diambil.[13]

Dari sudut pandang lain, AM punya ruang yang relatif luas untuk bermanuver karena *Murraqib 'Am* sebagai "orangtua" cenderung melakukan pembiaran. Seorang kader senior mengatakan, "**Sebenarnya pembiaran** ... ya orangtua kayak kita juga lah. **Mau negur kan nggak enak, apalagi dijewer kan nggak enak**". Namun demikian, belum terbukti bahwa AM dan kelompoknya sungguh-sungguh *powerful*, karena belum teruji di lapangan apakah mereka memiliki SDM yang kualitasnya bagus. Terkait dengan itu, ditengarai bahwa AM terkesan *powerful* karena ia secara sengaja dan berkesinambungan membangun kedekatan dengan *Murraqib 'Am*, sementara tokoh seperti HNW adalah sosok yang cenderung independen dan secara mental tidak membangun hubungan yang bersifat sub-ordinasi dengan pimpinan tertinggi partai. Dengan demikian, posisi "faksi Sekjen" atau "faksi pragmatis" yang seperti "di atas angin" hanya bersifat sementara. Kelompok yang berseberangan, yang berupaya untuk terus menjaga

[13] Informasi ini diperoleh peneliti dari informan ini dalam pembicaraan informal yang berlangsung Kamis, 3 Maret 2011 di Mushalla FISIP UI, Depok. Dalam kesempatan tersebut ia memberi contoh, beberapa waktu yang lalu ia pernah menghubungi AM untuk memintanya mengisi sebuah ceramah. AM menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun meninggalkan forum-forum seperti itu. Sebaliknya, para tokoh "faksi idealis" masih sering disibukkan dengan forum-forum kecil seperti itu, sehingga tidak punya waktu untuk tampil di forum-forum besar yang memiliki *leverage* yang tinggi.

idealisme PKS, tetap ada, dan tetap berpeluang untuk mengambil alih kendali. Seorang anggota Majelis Syura mengatakan, "walaupun ada yang sebelah sini, kalah ni, tapi kita melihat tetap pada suatu koridor yang bersandar pada konstitusi, aturan main ... **Nanti pun pada suatu saat, oh terjadi pergeseran seperti di 2004 kembali**". Keyakinan tersebut dapat dipahami karena ia memandang bahwaidealisme PKS sebenarnya sudah "dikunci" oleh Platform Kebijakan Pembangunan yang telah disahkan oleh Majelis Syura, dan proses sosialisasinya sampai saat ini masih terus berlangsung. Lebih lanjut ia menegaskan, "Berjuang dong! Platform ada. Makanya disampaikan dalam *liqa*". Ia berkeyakinan, dengan berjalannya waktu orang-orang yang saat ini menempati berbagai posisi kunci dapat bergeser atau berubah, sedangkan platform tetap menjadi rujukan partai.

Tabel 4.3
Pandangan tentang Kekuatan "Faksi Sekjen" dalam konteks Faksionalisasi di PKS

Kuat	Tidak Kuat atau Belum Terbukti Kuat
1. Kejelasan agenda yang diperjuangkan. 2. Dukungan struktural yang mengakar dari pusat hingga ke wilayah dan daerah. 3. Dukungan manajerial dan logistik. 4. Militansi para anggota tim.	1. AM tidaklah hebat. Ia seolah menonjol karena *leadership* tokoh-tokoh yang lain lemah 2. Orang-orang yang idealis kurang strategis dan taktis dalam melangkah . 3. AM terkesan *powerful* karena kedekatan pribadi dengan Ketua Majelis Syura, sementara tokoh seperti HNW tidak melakukan hal tersebut. 4. AM bebas bermanuver karena terjadi "pembiaran" oleh pemimpin tertinggi Partai. 5. Keunggulan AM hanya fenomena sementara, karena idealisme PKS sudah "dikunci" oleh Platform Partai, sehingga cepat atau lambat PKS akan kembali kepada idealismenya.

4.2.3. Kelompok yang Apatis

Kelompok yang apatis merupakan sub-kelompok atau varian dari mereka yang "idealis" dan tetap berada di dalam, tetap memenuhi kewajiban-kewajiban dasar mereka sebagai kader, seperti menghadiri *liqa* pekanan dan membayar infak rutin, namun tidak terlibat aktif dalam struktur partai, maupun kegiatan-kegiatan

yang dalam pandangan mereka terlalu bernuansa politis atau bertentangan dengan hal-hal yang dianggap bersifat prinsip. Besar kemungkinan mereka dan anggota keluarga inti mereka tetap memilih PKS atau calon-calon yang diusung/didukung PKS dalam pemilu dan pemilukada, berpartisipasi dalam demonstrasi yang mengangkat tema-tema yang menyentuh kepentingan umat Islam, seperti Palestina, maupun membina *halaqah* yang tidak dikaitkan langsung dengan PKS. Namun sebaliknya, mungkin sekali mereka menolak ditempatkan dalam struktur partai di jenjang manapun, dicalonkan menjadi anggota legislatif, menghadiri pertemuan-pertemuan partai, melakukan *fundrising* untuk partai, atau mengajak orang lain untuk mendukung atau berafiliasi dengan PKS.

Karena tidak disibukkan oleh aktifitas kepartaian, sebagian besar yang apatis ini memilih kembali menekuni ”aktifitas tradisional” mereka, seperti mengelola pesantren, jemaah pengajian, lembaga swadaya masyarakat, atau kegiatan usaha. Pilihan tersebut mudah dipahami karena sejatinya PKS berawal dari sebuah ”paguyuban”, dan karakter itu masih melekat hingga saat ini. ”Paguyuban” adalah sebuah kumpulan orang yang cenderung informal dan karenanya relatif longgar, di mana masing-masing anggota ”paguyuban” tetap memiliki keterhubungan dengan komunitas darimana mereka berasal. Implikasinya, para anggota yang merasa kurang puas dengan apa yang terjadi di dalam ”paguyuban” dengan mudah kembali menekuni apa yang ada di komunitas asal mereka, tanpa merasa harus menarik diri secara formal, ataupun membubarkan ”paguyuban” tersebut. Seorang kader senior menggambarkannya sebagai berikut:

> “Kalau dulu paguyuban juga saya kira ... **Karena itulah kemudian kalau kasus seperti ini nggak perlu repot-repot gitu kan. Kerjain aja apa yang biasa dilakukan. Balik ke mesjid, balik ke pesantren** ... Iya. *Survive* ke warga. Itu jadi lebih penitng. Jadi kan dia tidak mengganggu keseluruhan kan”.

Faktor durasi, berapa lama kader-kader yang apatis tersebut dibiarkan, akan menentukan apakah mereka masih akan kembali berkiprah secara aktif di partai, atau sebaliknya, mereka memilih untuk terus berada di pinggir. Tentunya, semakin lama apatisme tersebut dibiarkan dan dianggap bukan masalah, semakin

besar kemungkinan para kader potensial tersebut akan hilang dari peredaran secara permanen.

Pada tingkat yang cukup serius, apatisme tersebut bisa menimbulkan *social cost* yang mahal, berupa hilangnya sejumlah dukungan politik terhadap kiprah politik PKS. Contohnya adalah kasus MAI, seorang Ustadz yang terkenal dengan aktifitas Majelis Dzikir. Dia adalah *mutarrabbi* Ustadz AS, seorang kader senior PKS yang saat ini menjadi salah satu anggota DPD. Seorang informan menggambarkan kasus ini sebagai berikut, "Berkembang majelis dzikir. Itu orang-orang PKS. Ini pelarian kan. Dia nggak lagi di parpol ... **Tapi ketika pada saat di titik puncak dia harus menyalurkan politiknya dia akhirnya memilih yang lain**. Kayak MAI. Bingung kan. Akhirnya milih JK kan". Ilustrasi tersebut menunjukkan mahalnya apatisme sebagai implikasi dari berbagai ketidakpuasan dan kegelisahan atas menguatnya pragmatisme dan pengabaian sejumlah potensi kader, di mana MAI yang memiliki jemaah demikian banyak dalam Pilpres yang lalu justru memilih JK, padahal ia berafiliasi dengan PKS yang sudah memutuskan berkoalisi dengan SBY.[14]

Apatisme di tubuh PKS muncul dan menguat karena kelompok mayoritas yang di permukaan memilih diam sesungguhnya menyimpan ketidaksepahaman, bahkan ketidaksukaan dan penolakan terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh "kelompok pragmatis", namun mereka enggan untuk keluar, setidaknya hingga saat ini, karena merasa telah ikut berkiprah mendirikan dan membesarkan partai. Di samping itu, menguatnya apatisme juga terjadi karena sejumlah tokoh potensial tidak mendapatkan peran yang memadai. Seorang informan mencontohkan AD, mantan Menpora dari PKS di kabinet yang lalu dengan menuturkan:

> "**Tapi partai yang sedang tumbuh ini, yang menghadapi tantangan berat, semuanya ditinggalkan gitu** ... Kalau nggak dipake kan macem-macem. Padahal itu sumber terpenting untuk pembesaran suara gitu. 140-an sampe 150 persen meningkatnya suara di Sulawesi kemarin ya gara-gara AD, bukan yang lain. Lha yang dapet hadiahnya itu si X. Nggak pernah belajar orang".

[14] Dalam pembicaraan informal hari Kamis 3 Maret 2011 di Mushalla FISIP UI Depok, seorang informan lain juga mengkonfirmasi bahwa Ustadz MAI sudah "lepas" dari PKS.

Contoh lainnya KAS, seorang profesional senior, bergabung dengan PKS, menjadi anggota parlemen, dan sempat ditunjuk menjadi ketua salah satu komisi DPR, walaupun kemudian pasca Munas 2010 diganti oleh tokoh PKS yang jenjang keanggotaannya lebih tinggi dan memiliki jabatan struktural di kepengurusan DPP PKS. Informan yang sama menuturkan, “Dia calon Menteri Komunikasi kok, tinggal satu level gitu. Dia calon pejabat eksekutif. Kalau dia tidak terikat dengan partai apapun, politik apapun, dia pasti diambil SBY jadi Menteri gitu. Tetapi orang-orang level satu nggak ngerti gitu kan”. Langkah PKS ini kontras dengan apa yang dilakukan SBY di Demokrat yang mendayagunakan dan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan, bahkan menarik sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di luar ke dalam struktur partai.

Setidaknya terdapat dua argumentasi yang secara formal lazim digunakan untuk membenarkan berbagai kebijakan penempatan SDM di jabatan publik maupun struktur partai yang oleh sebagian kalangan kerap dinilai diwarnai oleh bias kelompok. Pertama, dalil dari Hadits Rasulullah SAW yang melarang muslim meminta jabatan, dan melarang jabatan diserahkan kepada orang yang memintanya. Implikasinya, alasan penempatan seseorang di jabatan tertentu, dan sebaliknya, pencopotan seseorang dari jabatan tertentu, hampir tidak pernah dipertanyakan secara terbuka oleh para kader. Kedua, di PKS terdapat semacam ketentuan tertulis bahwa kader PKS tidak boleh merangkap jabatan publik dengan jabatan di struktur partai. Hal inilah yang membuat HNW mengundurkan diri sebagai Presiden PKS setelah terpilih menjadi Ketua MPR tahun 2004, dan LHI melepaskan posisi Ketua Komisi I DPR ketika menjadi Presiden PKS menggantikan TS. Namun dari pengamatan di lapangan, kuat dugaan bahwa kedua alasan formal tersebut kerap digunakan untuk menutupi alasan yang sesungguhnya, yaitu memperkuat posisi kelompok tertentu dan sekaligus melemahkan posisi kelompok yang berseberangan. Untuk para menteri dari PKS misalnya, ketentuan tersebut diberlakukan dengan tegas, sehingga dua dari mereka yang sebelumnya menempati jabatan puncak di PKS harus melepaskan jabatan internal mereka, sehingga akses mereka untuk mempengaruhi kehidupan internal partai menjadi sangat terbatas. Di samping itu mereka kehilangan ”panggung

formal" untuk berkonsolidasi dengan para kader partai. Sebaliknya, AM yang diangkat menjadi Sekjen untuk keempat kalinya tidak diharuskan melepaskan jabatan tersebut pada saat ia menjadi Wakil Ketua DPR mewakili PKS. Tidak sulit membayangkan betapa perangkapan jabatan tersebut memberikan *leverage* yang berlipat ganda kepada AM untuk memperkuat posisi objektifnya di arena PKS. Sebagai Wakil Ketua DPR ia memiliki akses yang lebih terbuka terhadap berbagai sumber daya di luar partai. Sementara itu, sebagai Sekjen yang dikenal memiliki hubungan khusus dengan *Murraqib 'Am*, AM memiliki otoritas yang sangat besar untuk memastikan bahwa segala konsesi yang dijanjikannya kepada pemilik sumber daya dapat dipenuhi.[15]

4.2.4. Kelompok yang Meninggalkan Partai

Tidak ada data resmi mengenai jumlah kader PKS yang meninggalkan partai, baik karena keluar maupun dikeluarkan. Memang tidak mudah memperoleh angka yang pasti karena para kader di jenjang Anggota Pendukung, yaitu Anggota Pemula *(Tamhidi)* dan Anggota Muda *(Muayyid),* kerap belum dikelola secara formal, karena tanggung jawab pengelolaan *tarbiyah* mereka berada pada *halaqah* atau *usrah* di mana *murabbi* mereka berada. Sebagian besar dari mereka belum diminta mengucapkan Janji Setia, walaupun sebenarnya ART PKS mengatur adanya Janji Setia untuk kedua jenjang terbawah tersebut. Bahkan besar kemungkinan kader yang berada di jenjang *Tamhidi* belum tahu, belum paham, belum menyadari, atau belum merasa terlibat dalam proses kaderisasi PKS. Di samping itu, perpindahan dari jenjang *Tamhidi* ke *Muayyid* juga kerap tidak berlangsung dengan jelas dan tegas. Mereka yang berada di kedua jenjang tersebut kadang-kadang berada dalam *halaqah* yang sama, walaupun hal tersebut sebenarnya tidak baik dan tidak dikehendaki dari sisi tertib pembinaan kader. Dengan demikian, mereka yang masih merupakan Anggota Pendukung ini dapat keluar begitu saja dengan tidak lagi menghadiri *halaqah* karena sesuatu hal.

[15] Terdapat spekulasi tentang mengapa AM terkesan bersikap biasa-biasa saja, *nothing to lose* dalam menyikapi kemungkinan tergusurnya beberapa menteri dari PKS jika SBY melakukan *reshuffle* kabinet. Ditengarai AM bersikap demikian karena para menteri dari PKS tersebut tidak terafiliasi dengan kelompoknya, sehingga jika mereka tergusur dari kabinet dan tidak lagi menjadi pejabat publik, kelompok yang berseberangan dengannya akan melemah.

Peneliti juga belum pernah mendengar ada Anggota Pendukung yang dikeluarkan dari partai. Yang terjadi, Anggota Pendukung yang melakukan sesuatu yang dianggap menyimpang dari norma dan ketentuan partai akan terhambat dalam proses *taqwim* untuk menjadi Anggota Madya *(Muntashib)*, yang merupakan jenjang paling awal dari Anggota Inti, dan merupakan titik tolak keterikatan formal dengan partai.

Dinamika internal PKS pasca pemilu 2004, termasuk perkembangan terbaru sekitar bulan Februari-April 2011 di mana kisruh internal PKS menjadi sorotan tajam sejumlah besar media, cukup besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan keterikatan para Anggota Pendukung dengan *tarbiyah* dan partai. Dapat dipahami bahwa belum adanya keterikatan formal dengan partai membuat kelompok ini sangat rentan terhadap dinamika yang dimaknai negatif dan tidak sesuai dengan harapan atau gambaran ideal mereka tentang PKS sebagai Partai Islam atau Partai Dakwah. Peneliti merasakan langsung reaksi dari para kader yang menjadi anggota *halaqah* yang dibina oleh peneliti, sebagai dampak dari dinamika internal PKS akhir-akhir ini. Beberapa dari mereka menyatakan mundur dari *tarbiyah*. Ada yang menyatakan penyesalannya karena telah memilih PKS dalam pemilu yang lalu, dan memastikan tidak akan memilih PKS pada Pemilu 2014 yang akan datang. Selebihnya kerap sekali mengekspresikan kekecewaan mereka dengan sangat tajam di forum-forum *halaqah*, sehingga cukup menganggu agenda-agenda *tarbiyah*. Secara umum mereka mengkontraskan berbagai konsep dan norma ideal yang diajarkan dalam *tarbiyah* dengan penyimpangan-penyimpangan yang dinisbatkan oleh media kepada sejumlah elit PKS. Para *murabbi* merespon kondisi ini dengan pendekatan yang beragam. Ada yang cenderung defensif dan mengatakan bahwa PKS saat ini sedang menjadi sasaran tembak dari konspirasi para musuh dakwah. Sebagian penjelasan tersebut disadur dari pernyataan beberapa elit PKS yang banyak dikutip media massa. Ada pula yang memilih bersikap lebih terbuka terhadap realita, mempersilakan para kader untuk mengkritisi apa yang mereka cerna dari media, sambil terus berupaya menguatkan mereka dengan mengingatkan bahwa sesungguhnya komitmen mereka adalah terhadap Islam, dakwah, dan *tarbiyah*, bukan terhadap para elit partai yang mungkin saja bermasalah. Bahkan ada

murabbi yang secara eksplisit mempersilakan *mutarrabbi*-nya untuk memutuskan akan tetap bersama Jemaah Tarbiyah atau mundur.[16] Adanya kader-kader pendukung yang kecewa dan kemudian hengkang ini dipandang tidak akan terjadi jika setiap kader mampu menempatkan diri dan membatasi tanggungjawabnya sesuai dengan posisi masing-masing, dan secara konsisten menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada mekanisme *syura*. Seorang informan mengatakan, "Harusnya sesuai dengan levelnya dia nggak usah kecewa. **Dia cukup pada level mana maka segitulah tugasnya itu**. Itu lah tanggung jawab dia gitu ... menurut saya sejauh itu masih *syura* harusnya kita kembali ke prinsip *syura*". Namun besarnya jumlah kader yang berpendidikan tinggi, di samping arus informasi yang sangat deras dan terbuka, khususnya di media *on line* yng begitu intensif dan ekspansif, memfilter informasi melalui mekanisme *bayanat* organisasi, atau memilah-milah informasi untuk masing-masing jenjang keanggotaan, menjadi mustahil untuk dilakukan. Secara formal para kader akan tetap memperhatikan *bayanat* yang disampaikan oleh struktur partai melalui *halaqah* mereka, namun mereka tetap terpapar oleh banjir informasi alternatif yang mau tidak mau sangat berpeluang ikut membentuk sikap mereka terhadap partai dan berbagai isu yang mengemuka.

Di antara mereka yang meninggalkan PKS juga terdapat sejumlah tokoh senior Jemaah Tarbiyah yang bergabung sejak awal, bahkan tercantum sebagai deklarator PK dan PKS, seperti IAT, DRS, TZ dan MH. Demikian pula YS yang belakangan ini meramaikan media dengan mengungkapkan persoalan-persoalan internal PKS, khususnya perilaku beberapa elit PKS dalam mengelola dana partai. Kelompok yang menyempal ini relatif tidak besar pengaruhnya terhadap partai, karena jumlahnya memang sedikit. Seorang perempuan kader senior menggambarkan, "Kalau dia bisa ngumpulin orang sebanyak-banyaknya, jumlahnya masih di bawah angka seribu". Sebagian dari mereka berhimpun ke dalam Forum Kader Peduli (FKP), sebagian yang lain memilih bergerak sendiri-

[16] Seorang informan cukup terbuka dalam menerima sikap kritis para *mutarrabbi*-nya tentang dinamika kontemporer PKS, namun ia selalu menasihati mereka untuk menjaga komitmen terhadap jemaah. Ia sering mengemukakan perumpamaan, "Kalau ada orang jahat di rumah kita, masak kita yang keluar. *Lha* kok enak dianya". Sementara itu, ketika kembali dari Amerika, informan lain mempersilakan dua orang *mutarrabbi*-nya untuk menentukan sikap, akan berkiprah di PKS atau tidak.

sendiri. Selain jumlahnya tidak banyak, kelompok yang meninggalkan partai ini tidak begitu kuat gaungnya karena PKS memiliki struktur yang relatif dominan, sehingga tidak mudah digoyang oleh manuver-manuver yang bersifat individual. Para kader yang hengkang tersebut juga tidak secara serius membangun kekuatan yang bersifat kolektif. Sejauh ini yang mereka lakukan hanya sebatas menyampaikan kritik di berbagai forum eksternal, atau belakangan berbicara kepada sejumlah media.

Di antara para kader senior yang hengkang, IAT memiliki posisi yang unik. Ia menyatakan tetap bersama jemaah, namun menolak partai. Sikap tersebut ganjil jika ditakar dengan doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* (jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah) yang diberlakukan sejak Jemaah Tarbiyah berubah menjadi partai. Namun senioritas IAT di Jemaah Tarbiyah, hingga pernah menjadi *naib* (wakil) *Murraqib 'Am*, di samping konsistensi sikapnya yang sejak awal menolak berpartai, tampaknya membuat dirinya cukup disegani, sehingga struktur partai memaklumi keunikan sikap tersebut.[17] Sikap IAT yang mengeras dalam menolak partai ditengarai terkait ketidaksukaannya terhadap menguatnya pragmatisme, khususnya "ideologi uang", di samping kekhawatirannya terhadap fitnah jabatan dan kekuasaan, dan pandangannya bahwa dalam beberapa kesempatan partai menyulitkan posisinya dalam berdakwah di tengah masyarakat.

Doktrin Jemaah Tarbiyah yang terinspirasi dari Ikhwan al-Muslimin mengajarkan bahwa jemaah ini merupakan *jama'ah min jama'atul muslimin*, salah satu jemaah dari keseluruhan kaum muslimin, dan bukannya *jama'atul muslimin*, satu-satunya jemaah yang meliputi seluruh kaum muslimin. Dengan demikian, perbedaan pendapat, termasuk *ijtihad* di bidang politik para kader, yang

[17] Menurut seorang informan sejak awal IAT tidak setuju Jemaah Tarbiyah berubah menjadi partai politik, walaupun karena sudah menjadi keputusan *syura* di awal pendirian yang bersangkutan ikut menjadi deklarator PK. Saat itu informan tersebut sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Amerika, dan mengundang IAT ke sana untuk berceramah. Ia sempat berdiskusi panjang lebar dengan IAT untuk meyakinkannya bahwa berpartai adalah keputusan yang tepat. Ia mengatakan, "Bagi Ustadz IAT barangkali masuk akal, karena dia tidak lagi mengampanyekan ide dia ... Dia saya pantau terus. Ini partai baru. Harus kelihatan solid dari luar. Kalo internal nggak solid bagaimana mengatur eksternal?" Ia mencoba menganalisis mengapa sikap IAT menolak partai semakin mengeras dengan mengatakan, "Mungkin karena waktu itu nggak ada teman diskusi. Terus ada fenomena-fenomena politik uang, dalam tanda kutip ya, yang tadi *fundrising.* Dia tidak sepakat. Makin mengeras dia. Jadi begitu".

menyebabkan sebagian dari mereka memutuskan keluar dari jemaah ini dan memilih jalan yang berbeda, merupakan sesuatu yang wajar dan sangat bisa diterima, tanpa harus memutuskan persaudaraan dan silaturahmi sebagai muslim, apalagi direspon dengan reaksi-reaksi ekstrim, keras, dan bernuansa permusuhan. Bahkan mungkin saja keputusan berada di luar partai itu bagi beberapa orang justru lebih baik, daripada memaksakan diri untuk tetap berada di dalam, namun tidak dapat berbuat banyak, karena merasa tidak nyaman. Di masa Rasulullah SAW sekalipun, perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara para sahabat beliau kerap terjadi. Dalam kondisi itu ada sahabat yang memilih untuk *uzlah*, memisahkan diri dari jemaah. Sebaliknya, mereka yang memutuskan untuk tetap menjadi kader partai tentu saja harus taat kepada garis partai, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang pejabat tinggi partai:

> "Sekarang **banyak di antara kader yang berfikir soal kayaknya tidak ada manfaat kita berpartai** ... Kalo hasil *syura* kita semua, yang punya perwakilan, menyatakan kita tidak berpartai lagi ya sudah selesai. Tapi tidak bisa ada satu dua orang punya pemikiran seperti itu, kemudian menyalah-nyalahkan ... **kalo dia mau di luar ya tidak masalah, tapi kalo dia di dalam ya kita punya ikatan *syura* itu sebagai kader**".

Dalam praktiknya para kader memiliki pandangan dan sikap pribadi yang beragam tentang mereka yang tidak lagi bersama partai. Ada yang bersikap netral dan melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dipahami. Misalnya, pertama, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan *ijtihad* dalam hal pilihan *tariqah* dakwah, seperti pro dan kontra terhadap pilihan berpartai. Kedua, persepsi yang salah mengenai kasus-kasus yang terjadi. Ketiga, benturan-benturan karena perbedaan karakter, misalnya karakter pribadi beberapa kader senior yang cenderung emosional. Keempat, adanya persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Kelima, adanya situasi-situasi yang dipersepsikan berubah dan mengusik perasaan, seperti gaya hidup yang dianggap bermewah-mewah, dan tidak lagi menampilkan kesederhanaan.[18] Dalam konteks ini, seorang informan misalnya mengatakan:

[18] Seorang informan sangat menyayangkan jika ada kader yang keluar dari partai karena perosalan gaya hidup sebagian kader lain, karena menurutnya hal itu bukanlah persoalan yang pokok, dan memungkinkan untuk diperbaiki. Ia menuturkan,"kalau gaya hidup itu kan tidak pokok ... daripada pada keluar kan mending diperbaiki saja kan gaya hidupnya, gitu".

> ”Ya sekarang masalahnya toleransi kan. Ada orang mengangap saya masih bisa toleran dengan perbedaan pendapat di kerangka partai. Tapi ada yang punya pemikiran pribadi, saya berbeda pendapat dan tidak bisa toleran sehingga perbedaan pendapat ini membuat saya harus berada di luar kerangka partai. Ya itu juga tidak masalah”.

Demikian pula penuturan informan lain:

> “Sama seperti keluarga. Rumah tangga kan juga begitu. Pada saat yang sama suami-istri itu masih bisa hidup rukun, tapi pada saat yang sama itu bisa jadi perceraian ... Karena bercerai itu juga halal walaupun dibenci Allah ... Daripada tidak bisa mengolah perbedaan itu, lebih baik bercerai jika tidak bisa ditoleransi lagi”.

Dengan kata lain, idealnya para kader dapat mengelola perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi sehingga tidak harus keluar dari partai. Namun demikian, jika hal yang ideal tersebut tidak bisa dicapai, memilih keluar pun merupakan keputusan subjektif yang dibenarkan dan dihormati.

Namun ada pula sejumlah pandangan yang menyayangkan keputusan para kader yang keluar dari partai, dan memadangnya sebagai sesuatu yang negatif. Pertama, terdapat gugatan terhadap keabsahan argumentasi dari kader-kader tersebut dengan mempertanyakan sejauh mana pendapat-pendapat pribadi mereka bisa lebih valid dan mengandung kebenaran dibandingkan dengan keputusan Majelis Syura yang diambil secara bersama-sama oleh 99 orang terpilih. Ditengarai pula bahwa sebagian dari mereka memang pernah memiliki masalah atau kesalahan, sehingga dikenai sanksi, atau bahkan dipecat oleh partai.

Kedua, ada yang melihat melihat bahwa mundur merupakan sikap yang lemah dan tindakan meninggalkan medan pertarungan. Seorang informan mengatakan:

> “teman-teman **yang keluar justru pengecut** buat saya ... Anda meninggalkan medan pertarungan dengan bikin FKP ... Saya punya banyak pikiran yang sama dengan FKP … Caranya saya nggak setuju. Jangan keluar. Ayo di dalam ... **pengecut yang keluar dan jadi FKP itu**”.

Sementara seorang anggota Majelis Syura mengatakan, “Harusnya cara menyikapinya nggak begitu ... **ayolah kita bermain, bertarung di dalam** ... bukan kemudian sumbunya pendek gitu ya ... itu menunjukkan ya **kekurangmatangan** menurut saya”. Senada dengan itu, seorang informan

mengatakan, “Kalau sekiranya ada orang tidak baik di sekitar kita ya masa kita yang pergi? Ya kita usir orang yang jahat. Atau kita taklukan orang jahat. Kalau di rumah ini ada orang baik ya kita dukung orang baik. *Wong* ini rumahmu”. Ada benang merah yang sama dari pernyataan ketiga informan tersebut. Ketiganya melihat keluar dari jemaah atau partai adalah indikasi dari kelemahan, ketidakmatangan, bahkan kepengecutan, yang di satu sisi tidak menguatkan orang-orang baik yang masih berjuang, dan di sisi lain memudahkan manuver orang-orang yang beritikad tidak baik. Perlu digarisbawahi, pernyataan ketiga informan tersebut menguatkan indikasi megnenai tajamnya konflik internal di PKS antara “faksi idealis” dengan “faksi pragmatis”, sehingga keluarnya sejumlah kader senior yang tidak menyukai menguatnya pragmatisme sangat disayangkan oleh “faksi idealis”. Di samping itu, sikap tersebut dinilai justru tidak sejalan dengan prinsip dakwah, sebagaimana dikatakan oleh seorang informan, “sebagaimana kita berdakwah untuk orang luar begitu pula untuk orang dalam”.

Ketiga, memandang kader-kader yang keluar sebagai sosok yang kekanak-kanakan dan tidak memiliki metodologi yang jelas dalam membedah persoalan-persoalan yang dihadapi. Seorang Wasekjen mengatakan, ”Umumnya mereka itu kekanak-kanakan. Tidak berani berdebat, tidak berani berhadap-hadapan”. Sikap demikian dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut PKS dalam hal pengembangan kader, karena kader harus berjiwa besar, bermental baja, tidak mudah kecewa, tidak cepat marah, berkepala dingin, dan tidak kehilangan objektifitas. Ia juga mengatakan, “orang yang nggak mau berdebat, ngomong belakang, sumpah serapah, ya sudah. *He’s not part of PKS,* apa namanya, *system* gitu lho”.

Keempat, tindakan mundur dari partai ditengarai merupakan implikasi dari *fikrah* yang tidak utuh dan tidak moderat, sehingga yang bersangkutan enggan atau tidak mampu beradaptasi dengan strategi dan cara berdakwah yang baru, yang disesuaikan dengan situasi dan tantangan kontemporer yang dihadapi tanpa mengubah esensinya. Ketua DSP PKS misalnya, melihat para kader yang keluar tersebut menginginkan Jemaah Tarbiyah tetap seperti dulu, fokus pada dakwah dalam pengertian yang terbatas, padahal jika tetap membatasi diri dengan pola-pola dakwah masa lalu, perluasan penyebaran nilai-nilai Islam akan sangat

lambat. Sebaliknya, dengan terjun ke politik dan menempatkan kader-kader PKS di jabatan-jabatan publik, masyarakat yang tersentuh oleh dakwah bisa bertambah dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat. Ia memberikan contoh, "Kalau Bupati yang nyuruh ngajinya kan eselon-eselon I, II, PNS itu kan pada ngaji, gitu. … Apa ngajinya itu hanya takut pada Bupati, *wallahu* '*alam*. Nah tapi yang penting kita sampaikan itu tentang pesan Islam".

Terkait dengan hal ini ada sebuah doktrin yang populer di kalangan para kader Jemaah Tarbiyah, *"likulli marhalatin rijaaluha"*, setiap tahapan dakwah memiliki tokohnya masing-masing. Seorang pengurus DPP mengatakan, "Itu orang yang pernah jadi tokoh, eksis gitu di *mihwar tandzimi*, boleh jadi dia *nobody* di *mihwar muasasi* ketika dia tidak mampu beradaptasi". Menurutnya, orang yang bergerak dengan ikhlas dan menikmati perannya, akan terus eksis dari satu masa ke masa berikutnya. Ia mencontohkan seorang ustadz, seorang tokoh senior yang mengajar materi *akhlaq* kepada para kader Jemaah Tarbiyah generasi awal dahulu. Sampai jauh malam dia mengajar dengan tekun, tanpa berpikir untuk bersegera pulang, padahal dirinya berdomisili jauh di luar Jakarta. Informan tersebut menuturkan:

> "Dia sampai sekarang seolah-olah *nobody* di politik, tapi dia anggota Majelis Syura ... Dari segi level keanggotaan dia juga tertinggi, dia juga tetep Ustadz. **Ada orang yang menikmati perannya gitu. Walaupun dia tidak menjadi politisi, tapi dia tetep *somebody* yang dibutuhkan dalam dinamika dakwah ini**".

Kelima, ada pula pandangan bahwa tindakan meninggalkan partai tersebut berawal dari persoalan hati dan perasaan, yaitu sifat *hasad*, kedengkian, terhadap kader-kader yang ditempatkan di jabatan-jabatan publik, dan karenanya menjadi lebih sejahtera secara ekonomi. Seorang perempuan kader senior memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip *ukhuwwah* dan *khusnuzh zhan*, sebagaimana penuturannya:

> "Padahal kalau mereka kembali misalnya ya, pada Al Qur-an, *innamal mu'minuna ikhwah*, mereka kan seharusnya tidak mencari kekurangan saudaranya gitu ya. Dia syukuri keberadaan saudaranya gitu. Bukan ketika saudaranya memiliki ini, punya ini, ada jabatan ini, dicari-cari kekurangan. Seharusnya dia syukuri dan *husnuzh zhan* ya".

Lebih keras lagi informan lain mengatakan, ”Jadi istilahnya **karena beda pendapatan jadi beda pendapat** ... Padahal temen-temen yang disebut itu tetep *on the right track*, tetep berbuat untuk ini, cuma barangkali sekarang punya mobil”. Ia juga menggugat, ”pertanyaannya adalah, **persoalan ideologi atau perosalan perut? Harus dipertanyakan ulang**”. Informan tersebut tampaknya sangat yakin bahwa friksi dan konflik yang ada di tubuh PKS erat kaitannya dengan persoalan materi, hingga ia mengatakan, “kalau alasannya karena *maisyah*, kemiskinan, atau apa, dibantu. Dan banyak yang kembali karena itu. Karena ada perhatian, *ukhuwwah* ... Beberapa yang didekati dengan pendekatan *tarbawiyah, ukhwuwah*, sama *support* materi, banyak yang kembali”.

Keenam, masih terkait dengan faktor perasaan, ada juga dugaan bahwa hengkangnya sejumlah kader senior merupakan dampak dari membesarnya ukuran jemaah, sehingga hubungan pribadi, khususnya antara kader-kader tersebut dengan Ustadz Hilmi sebagai pimpinan tertinggi, tidak lagi sedekat dulu. Seorang informan menggambarkan, “Mereka dulu dekat sama Ustadz Hilmi … Tapi kan Ustadz sudah mulai mengurangi perannya … Udah semakin *delegating*. Dan itu yang membuat mungkin lama-lama berpikir, ya tersingkir atau apa gitu”. Dengan kata lain, kekecewaan pribadi karena partai tidak memberikan apa yang diharapkan, baik berupa posisi maupun perhatian lebih, menjadi pemicu keluarnya beberapa kader senior tersebut. Seorang mantan anggota Majelis Syura menuturkan:

> ”**Kalau Anda tidak berbuat apa-apa, cuma komentar, terus Anda kepingin jadi ini gitu ya nggak bisa lah** ... cuma kadang-kadang yang lain itu kecewa, berharap, ya saya kan orang lama, masak saya nggak diperhatikan. Saya kira nggak bisa kita berharap seperti itu”.

Ketujuh, ditengarai pula bahwa munculnya fenomena kader-kader yang menyempal, bergabung dalam FKP dan sebagainya, terjadi karena para kader tersebut terpengaruh oleh pihak-pihak eksternal yang ingin memecah belah PKS. SB, mantan kader yang pernah menjabat Wakil Presiden Partai di awal berdirinya PK, disebut-sebut merupakan salah satu pihak yang kerap memprovokasi. Jika ditilik lebih jauh, sosok SB memang cenderung kontroversial. Dalam wawancara dengan salah satu media cetak SB mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri

sekitar sepuluh bulan sebelum masa jabatannya sebagai anggota DPR periode 1999-2004 berakhir karena tidak sepakat dengan praksis mencari dana yang seolah menghalalkan segala cara (Tempo, 2011: 31). Sementara itu, beberapa informan penelitian ini memberikan kesaksian bahwa SB terlibat persoalan asusila dengan seorang perempuan kader PK yang ketika itu juga menjadi anggota DPR, sehingga keduanya kemudian dipecat dari partai.

Tabel 4.4
Ikhtisar Pandangan terhadap Kader (Senior)
Yang Meninggalkan PKS

	Pandangan Netral	**Pandangan Negatif/Menyayangkan**
Perbedaan Habitus Individu	♦ Perbedaan *ijtihad* atau *thariaqah* dakwah. ♦ Perbedaan persepsi mengenai kasus-kasus yang terjadi ♦ Adanya siatuasi yang mengusik perasaan, seperti perubahan gaya hidup.	♦ Tidak didukung oleh argumentasi yang sah dan dapat diterima. ♦ Sikap yang lemah dan pengecut, karena meninggalkan medan pertarungan ♦ Kekanak-kanakan dan tidak memiliki metodologi yang jelas dalam membedah persoalan-persoalan yang ada. ♦ Implikasi dari *fikrah* yang tidak utuh dan moderat. ♦ Disebabkan oleh sifat *hasad* atau kedengkian.
Dinamika Interaksi Sosial	♦ Benturan-benturan yang terjadi karena perbedaan karakter. ♦ Persoalan-persoalan pribadi.	♦ Berkurangnya kedekatan pribadi dengan pimpinan tertinggi partai. ♦ Provokasi pihak-pihak eksternal.

Terdapat pola di mana para kader yang berafiliasi dengan kelompok *political party oriented* memiliki sikap dan pandangan yang relatif lebih tajam dan negatif terhadap para kader yang hengkang dari partai, dibandingkan kelompok *religious movement oriented.* Jika dicermati lebih dalam, reaksi negatif yang bernuansa ketidaksukaan pribadi tersebut dalam beberapa kesempatan dieskpresikan dalam bentuk-bentuk yang mengarah pada pembunuhan karakter atau kekerasan simbolik *(symbolic violance).* Misalnya saja, seorang kader yang mengatakan bahwa PKS tidak pernah mengajarkan para kader untuk memelihara kebencian dan dendam pribadi, dan menegaskan bahwa dirinya tetap menjalin hubungan pribadi yang baik dengan para kader yang sudah keluar dan keluarga mereka, justru sangat tajam mengungkapkan rasa tidak senang kepada DRS, MH

dan TZ, tiga orang mantan kader senior Jemaah Tarbiyah. DRS disebutnya dari awal sudah cenderung materialistis, karena mempertanyakan imbalan materi yang bisa diperolehnya pada saat diminta mencurahkan waktu untuk mengurus partai di masa-masa awal berdirinya PK. Sedangkan MH dinilainya sebagai sosok yang tidak mampu berterimakasih karena berkonflik dengan Ustadz Hilmi Aminuddin dan menjelek-jelekkan PKS, padahal dulu ia sangat banyak menerima *kafalah*, baik dari jemaah maupun dari Ustadz Hilmi secara pribadi, termasuk rumah yang ditempatinya saat ini. Sementara itu, TZ dipandang sebagai orang yang merongrong dan memusuhi jemaah karena berencana mendirikan jemaah baru setelah keluar dari PKS. Pernyataan kader tersebut dibantah keras oleh DRS dan MH.[19] DRS menyatakan keheranannya jika dikatakan bahwa di masa lalu dirinya berhitung-hitung masalah imbalan materi untuk berkiprah di partai, karena faktanya ia menerima amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Syura tanpa imbalan materi sama sekali. Sementara itu, MH membenarkan bahwa sebelum era partai ia memperoleh *kafalah* yang jumlahnya kecil dari jemaah, bukan dari uang pribadi Ustadz Hilmi, sebagai kompensasi *tafarruq*, mengalokasikan waktu sepenuhnya untuk mengelola *maktab siyasi*, sekretariat jemaah yang menangani urusan-urusan politik. Sedangkan rumah yang ditempati dirinya saat ini dibelinya dengan uang pribadinya, walaupun ada seorang kader senior yang membantu mencarikan rumah tersebut. Terkait dengan hal ini, MH mendapatkan informasi dari dua kader senior PKS, AR dan MY, bahwa seorang kader lainnya, NM, menyebarluaskan SMS yang menuduhnya menerima uang sebesar 1 miliar atau 1,5 miliar yang dipakainya membeli rumah mewah. Namun ketika ia mengajak kader tersebut untuk bersama-sama membuktikan tuduhan itu, yang bersangkutan tidak bersedia. Setelah keluar dari PKS, MH juga pernah diundang berceramah di luar kota. Ketika tiba di lokasi, jemaah yang hadir ternyata memegang kupon pembagian sembako yang seolah-olah dikeluarkan oleh institusi yang dipimpinnya. Hampir saja terjadi keributan saat itu karena institusinya tidak merencanakan pembagian sembako dan membagikan kupon-kupon tersebut. MH sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, jika dirinya harus diboikot setelah mundur dari partai,

[19] Kedua bantahan tersebut disampaikan melalui SMS tanggal 5 Mei 2011.

cukup ia tidak diundang lagi mengisi forum-forum ceramah, namun tidak perlu sampai merekayasa berbagai hal untuk memojokkan dirinya.

Berbagai reaksi yang cenderung keras tersebut mungkin terkait dengan kuatnya mekanisme pertahanan diri yang *embodied,* dan karenanya bersifat otomatis, terhadap hal-hal yang dipersepsikan sebagai serangan terhadap jemaah. Hal tersebut terlihat misalnya pada pandangan Ustadz Hilmi yang dikutip oleh seorang informan bahwa jika di suatu saat ada banyak orang yang menjelek-jelekkan Jemaah Tarbiyah/PKS sesungguhnya Allah sedang menyapu, Allah sedang membersihkan jemaah ini, sehingga pada akhirnya akan terkristlalisasi, terpisah antara kader-kader yang baik dengan yang buruk. Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan sejarah PKS yang bermula dari sebuah gerakan keagamaan yang muncul di jaman Orde Baru yang sangat otoriter. Namun saat ini kecenderungan tersebut kerap kontraproduktif, karena menghambat proses pembelajaran organisasi. Namun tidak semua kader PKS sependapat dengan sikap tersebut. Seorang kader misalnya mengatakan, “salah satu daya penghambat **kita agak susah mengakui kesalahan** … **kita lebih suka menjustifikasi kekurangan**”. Menurutnya di sinilah perbedaan antara ilmuwan yang lugas dalam mengevaluasi kekurangan diri, dengan politisi yang gemar mengedepankan kekuatan dan kehebatan.

Lalu bagaimana pandangan kelompok yang keluar dari partai terhadap ”faksi idealis” yang masih bertahan di partai? Ada yang melihat orang-orang yang masih tinggal ini sebagai ”biang keladi” yang menimbulkan ”dosa”, karena banyak terlibat dalam proses perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai, karena banyak dosa yang dilakukan oleh para kader setelah menjadi partai. Padahal jika ditelisik lebih dalam, ketika belum menjadi partai pun ”kejahatan” serius, seperti perzinahan yang berulang, atau salah urus dalam berbisnis yang menyebabkan hilangnya uang sesama kader dalam jumlah yang signifikan, juga terjadi. Hanya saja setelah menjadi partai, hal-hal tersebut terekspos lebih terbuka. Di samping itu, perubahan gaya hidup yang telah dikupas di atas memperbesar peluang terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut. Sebenarnya, kondisi yang relatif terbuka setelah menjadi partai ini lebih baik, karena akan menjadi jelas siapa kader yang berkualitas dan siapa yang tidak. Pimpinan sebuah organ PKS di

pusat menuturkan, “Kalau dulu informal, katakanlah gerakan bawah tanah, orang mana tau. Tapi pada dasarnya, karakteristiknya sih sama saja, cuma bedanya sedikit di aspek media, modus, dan sebagainya”.

4.2.5. “Kelompok Konservatif” versus “Kelompok Progresif”

Pandangan lain melihat bahwa pengelompokkan yang lebih tepat adalah **“kelompok konservatif”** dan **“kelompok progresif”**. Pengelompokkan tersebut diyakini tidak akan sampai membawa perpecahan, karena adanya tujuan yang sama bahwa berjemaah ini dilakukan untuk mencari ridha Allah dan surga, serta nilai-nilai *‘ubudiyah* yang sama yang sudah tertanam sangat kuat, baik pada mereka yang konservatif maupun progresif. Di samping itu, persaingan yang ada di antara kedua kelompok tersebut menyangkut bagaimana mengelola partai, bukan persaingan yang bersifat pribadi. Dengan kata lain, pengelompokkan ini tidak berada di tataran ideologis, melainkan di tataran praktis, berkenaan dengan sejauh mana masing-masing kelompok bersedia bersikap lentur terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi oleh partai, yang berimplikasi pada pilihan strategi dan taktik perjuangan, sehingga terminologi yang digunakan bukan “idealis” dan “pragmatis”, melainkan “konservatif” dan “progresif”. Dalam konteks ini, penuturan seorang pengurus DPP berikut ini menarik untuk disimak:

> “Sebenernya saya sedang mengkhawatirkan **kalau yang menang itu konservatif PKS ini akan tetap *middle size party***. Kalau dia mau istilahnya menjadi *large size party* dia akan menuju progresif. Tapi **kadang-kadang untuk progresif harus ada pragmatisnya**”.

Ia menggunakan kata “menang” dalam kalimat “kalau yang menang itu konservatif”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangannya ada kompetisi yang tajam di antara kedua kelompok tersebut, konservatif dan progresif. Di samping itu, ia juga menggarisbawahi bahwa pragmatisme kerap merupakan konsekuensi yang menyertai sikap progresif.

Terdapat beberapa faktor yang membedakan “kelompok konservatif” dan “kelompok progresif”. Pertama, perbedaan dalam memahami *“baina tsawabit wal mutaghayyirat”* (antara yang teguh atau tetap dan yang berubah). Kelompok konservatif cenderung memandang hampir semua hal termasuk kategori *ats*

tsawabit. Sebaliknya, bagi kelompok progresif banyak hal yang termasuk kategori *al mutaghayyirat*. Terkait dengan hal ini terdapat dua contoh konservatifisme, yaitu kekurangsetujuan terhadap gagasan "Partai Terbuka" serta penekanan pada perilaku atau tampilan fisik seseorang ketika akan merekrutnya menjadi kader, seperti berjilbab atau belum berjilbab, bahkan panjang-pendeknya jilbab seseorang untuk perempuan, dan merokok atau tidak merokok untuk laki-laki.

Faktor kedua, pandangan tentang peran perempuan. Kelompok konservatif cenderung kurang menyukai peran publik yang besar dari perempuan kader PKS, termasuk sebagai anggota parlemen, sehingga kelompok ini tidak begitu setuju dengan penerapan kuota minimum 30% caleg perempuan. Bahkan seorang perempuan kader senior PKS mengatakan, Presiden Partai terlihat tidak begitu memahami bahwa hal tersebut adalah tuntutan Undang-Undang, sehingga cenderung menganggap bahwa kader-kader perempuan terlalu banyak menuntut. Perempuan-perempuan kader PKS yang berpikiran maju dan menghendaki ruang yang lebih luas untuk berkiprah, kadang-kadang dinilai membawa pemikiran feminis. Kader senior tersebut menuturkan:

> "Saya juga lebih seneng nggak jadi anggota Dewan. Tapi saya juga nggak menentang kalau perempuan-perempuan PKS itu juga perlu jadi anggota Dewan ... Mungkin ini ada dua bias. Masalah ibu-ibu sok feminis. Yang kedua bapak-bapak terancam karena ibu-ibu lebih populer. Ibu-ibu itu lebih bagus dakwahnya, mengakar, di Pos WK[20], di mana gitu".

Terkait dengan dialektika mengenai peran perempuan ini, seorang kader perempuan, SR, tergeser dari posisi sebagai Sekretaris Bidang karena yang bersangkutan dinilai memiliki pikiran yang "terlampau maju".

Peran perempuan mestinya tidak menjadi masalah di PKS karena rumusan di Platform PKS tentang peran perempuan sangat ideal, yaitu sebagai mitra sejajar laki-laki dalam perjuangan dakwah.[21] Terkait dengan peran perempuan dalam

[20] Pos WK (Pos Wanita Keadilan) adalah *wajihah* PKS berupa LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

[21] Platform PKS mengatakan, "Dalam pandangan PK Sejahtera, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang terbingkai dalam pemikiran berikut: 1. Kaum perempuan merupakan mitra hidup kaum laki-laki yang harus bekerja sama secara harmonis dan saling mengokohkan. 2. Kerjasama antar jenis harus ditujukan dalam kerangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Kerjasama itu harus berada di atas landasan ketakwaan yang diindikasikan dengan penunaian hak ubudiyah kepada Allah SWT, maupun hak muamalah kepada

memimpin masyarakat, misalnya, PKS sudah berijtihad bahwa perempuan diperkenankan menempati jabatan *imamah shugra* (kepemimpinan kecil, bukan kepemimpinan di tingkat negara) hingga tingkat Gubernur.[22]

Sementara itu, tokoh perempuan PKS yang lain tidak merasakan adanya persoalan pembatasan peran perempuan di PKS. Justru sebaliknya, ia merasa sangat nyaman karena perempuan mendapatkan penghormatan yang tinggi di partai ini sehingga ia dapat menjalankan peran-peran publik tanpa harus mengorbankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Ia menceritakan keluhan seorang temannya, perempuan anggota Dewan dari partai lain yang merasa tidak nyaman, karena sering direndahkan, misalnya diolok-olok pada saat mengemukakan pendapat. Perlakuan yang diterimanya di PKS sangat berbeda. Ia mencontohkan, ketika menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Ketua MPP saat itu, Ustadz Rahmat Abdullah almarhum, selalu menawarkan kesempatan padanya untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu sehingga bisa meninggalkan rapat lebih awal jika memang diperlukan. Perempuan kader tersebut menuturkan jawabannya, "Saya bilang kalau saya memang sehat, fit, dan anak saya nggak rewel, saya sampai selesai, gitu. Tapi kalau anak saya rewel, saya menyampaikan pendapat duluan lalu saya pulang".

Faktor ketiga, paradigma yang "hitam-putih" dalam memandang berbagai elemen masyarakat, sehingga cenderung menempatkan elemen-elemen tersebut ke dalam dua kelompok yang bertentangan secara diametral: Islam dan kafir, *al haq* (kebenaran) dan *al bathil* (kebatilan), atau dengan kata lain, cenderung menggunakan bahasa-bahasa *aqidah* (keyakinan agama). Sikap konservatifis tersebut tidak tepat digunakan dalam tahapan dakwah yang sedang dijalani Jemaah Tarbiyah saat ini. Seorang pengurus DPP mengatakan, "Padahal kalau udah ke sini udah lebih *mu'amalah* ... bekerjasama dalam hal yang kita bersepakat, kemudian saling menghormati dalam hal yang kita berbeda pendapat.

---

manusia. Berangkat dari filosofi tersebut, maka tmenjadi sebuah konsekuensi logis bagi PK Sejahtera untuk memperjuangkan kaum perempuan Indonesia agar dapat memiliki semua kualifikasi untuk mengoptimalkan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota keluarga, maysarakat maupun warga negara. Kualifikasi yang dimaksudkan adalah: bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya" (MPP PKS, 2008: 377-378)

[22] Dituturkan oleh seorang informan dalam sebuah forum *halaqah* (pengajian pekanan kaderisasi) yang dihadiri oleh peneliti sekitar bulan September 2010.

Itu, titik temunya seharusnya. Bukannya mencari perbedaan gitu". Ia memberikan contoh sikap seorang Walikota dari PKS yang mempersoalkan pembangunan Gereja di daerahnya. Menurutnya seharusnya hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan sepanjang pihak yang membangun Gereja sudah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pemaksaan agama kepada orang-orang yang telah beragama.

Sementara itu, kelompok progresif dipandang lebih mengedepankan persamaan, titik temu, dengan berbagai kelompok lain. Dengan logika itu, sangat dimungkinkan bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi ideologis yang berbeda, sepanjang dipertemukan oleh kepentingan yang sama, termasuk untuk meraih kekuasaan dan sumberdaya finansial. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh seorang informan, **"kadang-kadang untuk progresif harus ada pragmatisnya"**. Hal ini pula yang senantiasa menjadi pangkal friksi dengan kelompok idealis atau konservatif yang lebih menyukai pertumbuhan partai yang natural, sebagai implikasi dari kerja-kerja dakwah dan *tarbiyah*.

AM sering dianggap sebagai sosok yang sangat progresif. Sebaliknya, para Presiden Partai, sebagian "orang-orang DSP" (Dewan Syariah Pusat) dan sebagian "orang-orang kaderisasi" cenderung dinilai konservatif. Informan lain punya pendapat yang sama tentang posisi Presiden PKS saat ini, Ustadz LHI. Ia mengatakan, "Kalau Ustadz LHI susah untuk dikatakan dia punya *style* sama kayak AM. **Dia mungkin kita katakan tradisional**". Sementara ada pula yang mengatakan, "**dia harus lebih progresif kalo mau menang**. Pengen ikut pemilu nggak sih?!"

Seorang informan berpendapat, konservatifisme sebenarnya sudah terlihat pada sebagian murid-murid Ustadz Hilmi sejak awal walaupun Ustadz Hilmi sebenarnya bersikap moderat dan progresif sejak dahulu, dan tetap konsisten dengan sikap tersebut hingga saat ini. Kondisi itu terjadi karena waktu itu para kader Jemaah Tarbiyah juga bersentuhan dengan berbagai *fikrah* yang dibawa oleh *harakah* lain, belajar dari guru-guru yang lain, dan berinteraksi dengan teman-teman yang berpaham lain. Informan tersebut mencontohkan dirinya, yang kala itu banyak membaca, dan kemudian terpengaruh, oleh buku-buku Salafi yang

berasal dari Malaysia. Saat itu Indonesia juga sedang dilanda demam Revolusi Islam Iran yang cukup kuat menginspirasi para aktifis muda muslim. Implikasinya, terdapat kecenderungan terhadap sesuatu yang terkesan lebih militan, lebih heroik, lebih tajam, dan lebih fundamental, yang dipandang lebih *ashalah*. Beberapa perilaku yang muncul ketika itu misalnya perempuan kader mengenakan pakaian berlapis-lapis, membatasi model dan warna pakaian yang digunakan, pergaulan yang sangat kaku dengan lawan jenis, dan pembatasan peran perempuan. Menurut informan tersebut berbagai bentuk *tasyaddud* tersebut bukanlah ajaran Ustadz Hilmi. Ia mengisahkan bagaimana ketika itu Ustadz Hilmi mengingatkannya bahwa semua warna adalah ciptaan Allah, bahwa Islam tidak memiliki *uniform* tertentu, dan menegur dirinya yang dipandang berlebihan dalam berpakaian. Ia juga menggambarkan bagaimana Ustadz Hilmi saat itu dengan santai berkumpul, duduk, dan makan bersama-sama dengan murid-muridnya yang perempuan, ditemani oleh istri beliau.

Tabel 4.5
Ikhtisar Ciri "Kelompok Koservatif" dan "Kelompok Progresif"

No	Aspek	Kelompok Konservatif	Kelompok Progresif
1	Pemahaman tentang hal-hal yang tetap dan yang berubah	Cenderung memandang hampir semua hal sebagai *at ta'sil* atau *ats tsawabit*, sesuatu yang tetap dan tidak boleh diubah. Contoh: ketidaksetujuan terhadap Partai Terbuka, dan keketatan kriteria dalam merekrut kader.	Cenderung memandang banyak hal sebagai *at tathwir* atau *al mutaghayyirat*, sesuatu yang berubah secara dinamis, disesuaikan dengan perkembangan kondisi.
2	Peran perempuan	Cenderung membatasi peran perampuan di ranah domestik (rumah tangga). Kaum perempuan yang menuntut peran publik yang lebih luas dinilai terlalu banyak menuntut dan terkontaminasi feminisme.	Memberi ruang yang lebih luas kepada perempuan untuk berkiprah di ranah publik.
3	Paradigma dalam melihat kelompok lain	Cenderung dikotomis dan berhadap-hadapan, menggunakan "bahasa akidah", seperti Islam vs kafir, *al haq* vs *al bathil*, dll.	Cenderung melihat hubungan dengan elemen-elemen masyarakat yang lain dalam konteks *muamalah*, mencoba mencari titik temu dan kemungkinan kerjasama.

4.2.6. Pengelompokkan Berdasarkan Sikap Terhadap Sumber Daya Strategis

Satu pandangan lain melihat bahwa faktor kunci yang menimbulkan pengelompokan adalah sikap terhadap sumber daya strategis, yang terdiri dari pilihan cara meraih kekuasaan, sikap terhadap uang, dan cara untuk merebut konstituen. Masing-masing *grouping factors* tersebut membentuk kontinum, di mana kelompok-kelompok yang terbesar dan terkuat berada di masing-masing kutub, lalu di antara masing-masing kutub itu terdapat berbagai varian yang terus berkembang secara dinamis.

Terkait dengan faktor yang pertama, **cara meraih kekuasaan**, kader-kader PKS dapat dikelompokkan menjadi tiga Pertama, yang alami, di mana distribusi kekuasaan diserahkan kepada sistem dan kolektifitas yang berlaku. Kedua, yang semi alami, di mana dilakukan "modifikasi personal" melalui serangkaian langkah-langkah strategis dan taktis, misalnya dengan membangun dan memanfaatkan relasi-relasi personal dengan berbagai pihak. Ketiga, yang terencana dan tersistem, atau dengan kata lain melalui rekayasa kolektif.

Kelompok yang pertama, yang memilih strategi merebut kekuasaan secara alami, akan mendefinisikan perolehan suara dalam pemilu sebagai buah dari kerja-kerja dakwah. Seorang anggota MPP menuturkan, "Ustadz LHI tidak setuju sekian persen, nggak ada. Dakwah dulu. Politik kita adalah akibat dari kekuatan *tarbiyah* kita, kemenangan struktur kita, kemenangan kader kita. Beliau nggak mau tuh ada persen-persen". Kontras dengan itu, kelompok ketiga secara sistematis melakukan simulasi dan manuver untuk menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi strategis, baik di internal maupun di jabatan-jabatan publik. Informan yang sama mengatakan, "Tapi ada juga yang mereka meng-*group*, men-sistematiskan langkah-langkahnya, memikirkan bagaimana akhir dari perjalanan ini, termasuk membayangkan secara imajiner meskipun tidak tertulis 'siapa, duduk dimana'. Itu sudah definitif dipikirkan melalui latihan dari satu posisi ke posisi yang lain".

Terkait dengan faktor yang kedua, **sikap terhadap uang**, terdapat dua kelompok besar, yaitu mereka yang memandang uang sebagai faktor penting dalam keberhasilan perjuangan politik PKS sehingga perlu mendapatkan perhatian

besar, dan mereka yang memandang uang hanya pelengkap dalam perjuangan ini. Lebih lanjut, kelompok yang pertama, yang menganggap uang adalah hal yang penting, terbagi lagi menjadi dua sub-kelompok, yaitu mereka yang membangun kesadaran pribadi-pribadi untuk membangun bisnis yang kemudian bisa berkontribusi besar bagi partai sebagai suatu kolektifitas, dan mereka yang mendorong berlangsungnya akumulasi sumberdaya finansial untuk kemaslahatan pribadi-pribadi. Dalam konteks ini, seorang anggota MPP menginginkan adanya upaya-upaya serius dalam pemberdayaan ekonomi para kader, agar mereka dan partai lebih mandiri secara ekonomi. Ia mengatakan:

> "Buka akses. Ini sudah ada. Sudah ada. Berapa banyak Kepala Daerah kita. Ayo bikin tindakan afirmatif, bisa kok. UKM dibuat, koperasi diperkuat, *ikhwah* suruh masuk ke situ. Dari bawah dirapihin, di atas disipain perangkatnya. Turunin, jalan pelan-pelan, *Ikhwah* secara ekonomi menguat. Nah dari situ kita punya sumber daya yang kuat. Sekarang tidak".

Dengan kata lain, para pejabat publik dari PKS seyogianya tidak melakukan akumulasi sumberdaya finansial secara *short cut*, misalnya dengan menjadi *broker* atau pemburu rente, mengutip *success fee* dari proyek-proyek, melainkan secara elegan membangun iklim yang lebih kondusif bagi para kader untuk mengembangkan berbagai institusi ekonomi yang dapat mensejahterakan mereka, dan membuat para kader bisa berkontribusi lebih banyak bagi partai. Strategi ini lebih sesuai dengan doktrin yang diajarkan kepada para kader sejak awal kiprah Jemaah Tarbiyah, yaitu *"sunduquna juyubuna"*, atau "sumber dana kami adalah saku kami sendiri". Senada dengan itu kader lain yang juga duduk di MPP mengatakan, "Jadi akses yang udah dibuka di pejabat-pejabat publik ini harusnya diberikan kepada bawah". Namun realitanya sejumlah pejabat publik dari PKS masih memiliki, atau setidaknya terlibat dalam sejumlah lembaga berbentuk yayasan, firma konsultansi, dan lain-lain, yang kemudian diberi peluang untuk mengekploitasi akses-akses finansial yang berada di bawah kendali mereka.

Sementara itu, secara sederhana ada dua kelompok kader PKS berdasarkan **pilihan cara untuk merebut konstituen**, termasuk para kader di *grass root*, yaitu mereka yang egaliter dan mereka yang *top-down*. Mereka yang egaliter membangun pola-pola relasi yang sejajar dengan konstituen, tidak mengandalkan

simbol-simbol tertentu untuk merangkul massa (misalnya simbol-simbol religius), merintis kepemimpinan dari bawah, dan kritis terhadap arahan-arahan atasan, walaupun tetap memegang etika berdasarkan *socio-cultural values* yang hidup di PKS. Sebaliknya, mereka yang *top-down* membangun pola-pola relasi yang hirarkis, mementingkan simbol-simbol, membangun kepemimpinan dari atas, dan menunjukkan kepatuhan penuh pada arahan-arahan atasan dengan harapan bawahan pun akan bersikap sama terhadap mereka.

Tabel 4.6
Ikhtisar Ciri Pengelompokkan Berdasarkan Sikap Terhadap Sumber Daya Strategis

No	Aspek	Cenderung Idealis/Konservatif		Cenderung Pragmatis/Progresif
1	Cara merebut kekuasaan	**Alami:** distribusi kekuasaan diserahkan kepada sistem dan kolektifitas yang berlaku.	**Semi alami:** "modifikasi personal" dengan langkah-langkah strategis dan taktis untuk memanfaatkan relasi-relasi pribadi dengan berbagai pihak.	**Rekayasa kolektif:** menyusun dan melakukan langkah-langkah sistematik dan kolektif, termasuk memetakan "siapa di mana", dan merencanakan *career path*.
2	Sikap terhadap uang	**Uang bukan sumber daya yang penting** dalam menentukan keberhasilan perjuangan.	**Uang adalah sumber daya yang penting,** sehingga para kader perlu dibangun kesadarannya dan difasilitasi untuk mengembangkan bisnis sehingga bisa berkontribusi besar untuk partai.	**Uang adalah sumber daya yang penting.** Pribadi-pribadi mengakumulasikan sumber daya ini untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing
3	Cara merangkul konstituen	**Egaliter:** membangun pola-pola relasi yang sejajar dengan konstituen, tidak mementingkan simbol-simbol tertentu, membangun kepemimpinan dari bawah, tetap kritis kepada pimpinan dengan tetap menjaga etika.		**Hirarkis:** pola relasi yang *top-down*, mementingkan simbol-simbol, membangun kepemimpinan dari atas, menunjukkan kepatuhan penuh pada atasan agar bawahan juga menunjukkan sikap yang sama.

4.3. Implikasi Faksionalisasi dan Konflik Internal

Dinamika internal PKS sesungguhnya adalah pertarungan simbolik, yaitu kontestasi antara beberapa tafsir yang kemudian menghasilkan suatu tafsir dominan yang berhasil menggeser tafsir lainnya. Seorang informan menuturkan,

"Itu menunjukkan adanya dominasi atau hegemoni. Satu tafsir yang berhasil menghegemoni kolektif ... itu menunjukkan tafsir baru yang diajukan oleh suatu pihak yang ada dalam ruang perdebatan itu dia menang dan berhasil dominan dan menghegemoni". Pergeseran makna kemenangan dan strategi untuk meraihnya merupakan contoh yang jelas terlihat. Dahulu kemenangan didefinsikan sebagai kemenangan kualitatif, kemenangan dakwah, yang diperoleh melalui rekrutmen *tarbiyah* dan menunjukkan kepada publik bahwa para kader adalah pribadi-pribadi yang baik. Namun sekarang kemenangan adalah kemenangan kuantitatif, perolehan suara dalam pemilu, yang didapat melalui akumulasi sumberdaya, khususnya uang. Seorang kader yang sangat senior, deklarator PK, memberikan gambaran:

> "Satu persepsi, atau pandangan, atau bahkan dalam keyakinan ya, bahwa **kalau ingin memperoleh, mendapatkan konstituen yang banyak itu kita itu harus kaya**. **Kita itu harus menguasai media iklan segala macam**. Mana katanya masyarakat begini kalau kita tongkrongannya tidak hebat itu bisa tertarik".

Yang terjadi kemudian adalah tafsir kelompok yang memenangkan kontestasi tersebut beralih menjadi tafsir yang berlaku umum, sebagaimana dikatakan oleh seorang kader muda, "kalau sudah jadi, pandangan tafsir kolektif resmi itu harus dilaksanakan ke semua struktur dan personal, baik langsung maupun tidak langsung pasti ada pengaruhnya. **Dan sekarang kan memang tafsir baru itu terasa semua**".

Sebagai implikasi dari pertarungan antar tafsir tersebut, orang-orang yang berbeda tafsir disingkirkan untuk memperkuat hegemoni. Bentuk penyingkiran yang paling lazim adalah diasingkan dalam satu struktur yang tidak strategis, atau diakomodir dalam lingkup yang parsial, seperti Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), yang oleh seorang informan disebut sebagai "penasihat/tenaga ahli akademik", atau Dewan Syariah Pusat (DSP), yang disebutnya sebagai "penasihat/tenaga ahli syariah". Keduanya tidak berperan banyak dalam mempengaruhi atau mengubah konstelasi yang berlaku, karena bagaimanapun kekuasaan dan kendali atas sumber daya berada di tangan eksekutif di bawah arahan *Murraqib 'Am.* Beberapa nama yang menjadi pengurus DPP peiode 2005-2010 dipindahkan ke MPP dalam kepengurusan baru ini, misalnya saja UW,

MAS, dan FA. Menurut seorang mantan pengurus DPP yang lalu, dirinya juga diisukan disingkirkan, walaupun ia sendiri tidak memaknai demikian, karena secara formal Sekjen mengatakan bahwa ia ditempatkan di pos yang sekarang karena Ustadz Himi ingin agar secara institusi bukan hanya DPP saja yang berkembang. Ia memang merasa memiliki beberapa perbedaan pandangan dengan AM, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan keabsahan sumber-sumber dana yang dimanfaatkan oleh partai, namun dirinya tetap respek pada beberapa kelebihan AM dan terus menjalin hubungan baik. Namun demikian, ia tidak menampik bahwa memang ada suara-suara yang mengatakan bahwa dirinya mulai dianggap memiliki pikiran yang berbeda dan tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan arus utama. Ia mengatakan, "Beberapa orang mendeteksi, saya dihubungi. *Antum* kalau bicara hati-hati. *Antum* sudah mulai dibicarakan di MRA. *Antum* kayaknya begini, begitu. Ya sudah. Saya pikir saya punya pikiran". Lebih lanjut kader tersebut menuturkan, "Bahwa kemudian saya dikenal tidak lagi pro Akh AM dan lain sebagainya, ya nggak saya pikirin lah". Di satu sisi terlihat betapa *powerful*-nya Ketua Majelis Syura dan Sekjen dalam menentukan "siapa ada di mana". Namun di sisi lain terlihat pula bahwa pemegang *doxa* senantiasa berupaya melegitimasi langkah-langkah yang diambilnya dengan memberikan pemaknaan yang terdengar positif, seperti "untuk membangun institusi" terhadap langkah-langkah pembersihan yang mereka lakukan. Menghadapi kondisi demikian kader tersebut mengambil sikap sebagai berikut:

> "Kalau sekarang saya prinsipnya *supportive* aja. Dukung AM, dukung Ustadz LHI, tapi saya juga bersuara lain. Tapi ketika saya bersuara lain, tidak berarti harus saya jadi FKP, jadi apa ... Tapi di rapat-rapat saya punya pendapat berbeda ya saya kemukakan berbeda".

Gambaran yang lebih tajam tentang implikasi dari pengelompokkan dan konflik antar-kelompok di tubuh PKS tampak pada perombakan besar-besaran personalia fraksi PKS di DPR pada bulan Juli 2010 yang lalu, tepat sesudah Munas. Berita yang dilansir oleh detikcom 27 Juli 2010 mengatakan:

> "Menjelang penentuan pos-pos penting oleh DPR, FPKS melakukan perombakan besar-besaran di fraksinya. Di tingkat komisi, FPKS mengganti Ketua Komisi I DPR Kemal Stamboel dan mengalihkan ke Mahfudz Siddik.

> ‘Kita ada perombakan besar-besaran di fraksi, mungkin lebih dari 50 persen. Kita ingin fraksi PKS mencerminkan sesuai dengan jabatannya di partai,’ kata Ketua FPKS Mustafa Kamal kepada detikcom, Selasa (20/7/2010).
>
> Menurut dia, perombakan ini disesuaikan dengan jabatan yang bersangkutan di partai. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan kerja partai yang efektif. Proses perombakan total ini dilakukan karena PKS sudah terbiasa melakukan *rolling*. Semua kader harus bersedia ditempatkan di mana pun sesuai perintah partai”.

Yang menarik, apa yang tersurat dari penjelasan Ketua Fraksi PKS ditengarai tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang tersirat. Media yang sama mengatakan:

> “Sumber detikcom menjelaskan, jika dilihat dari beberapa orang yang diganti, diduga kuat perombakan FPKS DPR ini karena **untuk menyesuaikan dengan kepentingan PKS yang saat ini dikendalikan penuh oleh geng AM**.
>
> ‘**Perombakan ini sepertinya upaya AM-nisasi,** Semua diganti orang-orangnya AM. Buktinya, orang-orangnya TS dan Pak HNW, atau yang tidak bersama AM, diganti semua,’ ujarnya singkat”.

Seorang informan, mantan Asisten Pribadi anggota Dewan dari PKS yang ikut tergeser dari posisinya, mengutip kata-kata atasannya beberapa saat kemudian:

> *“Guys, you have to know more about politics*. Politik itu adalah arena kepentingan. Dan kalau ditanya kepentingan siapa? Ya sudah gak usah ditanya. Intinya kepentingan sekelompok orang. Amanah bisa di mana saja ya kita harus menerima. **Kepentingan apa di belakang seseorang ditaruh di mana, pastinya ada kepentingan, tapi gak usah ditanya kepentingan apa**. Yang jelas, **orang kita sudah habis semua**”.[23]

Ia mencoba bertanya kepada atasannya mengapa tidak melakukan lobi-lobi agar tidak tergeser. Atasannya menjawab, “saya bukan tipikal orang yang suka lobi sana lobi sini”. Dan ketika sang atasan ditanya mengapa AM tidak diundang ke pernikahan putrinya, ia menjawab, **“Gak lah, saya gak mau nanti dipersepsikan deket sama dia”**. Informan tersebut sangat menyesalkan tergesernya atasannya karena ia sangat kompeten, sebagai buah dari pengalaman berkiprah sebagai eksekutif puncak di *private sector* dan mengelola berbagai LSM internasional. Di samping itu, atasannya telah mendapatkan *trust and respect* dan berhasil

[23] Pernyataan ini diposting oleh Informan-18 di sebuah milis pada hari Selasa 20 Juli 2010.

membangun atmosfir kerja yang kondusif di komisinya. Bahkan ia mampu "menundukkan" beberapa anggota komisinya yang dikenal liar dan kerap menimbulkan masalah. Sebagai reaksi atas keputusan Fraksi PKS menggeser kader tersebut dari jabatan Ketua Komisi dan menggantinya dengan kader PKS yang lain, sejumlah anggota komisi yang bersangkutan membuat petisi pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi PKS, namun hal tersebut tidak ditanggapi. Dengan mencermati kutipan pernyataan dan dialog di atas, eksistensi faksionalisasi dan sengitnya konflik internal yang terjadi tidak terbantahkan. Terlihat bagaimana hal yang bersifat pribadi sekalipun, seperti mengundang seseorang ke acara pernikahan, memicu kekhawatiran munculnya label berafiliasi kepada kelompok tertentu.

Walaupun AM menegaskan bahwa dirinya, sebagaimana seluruh kader lain, tunduk sepenuhnya kepada keputusan *syura*, ada pandangan yang meragukan bahwa berbagai manuver AM dan "kelompok pragmatis" benar-benar merupakan sesuatu yang mendapatkan legitimasi *syura* di forum pengambilan keputusan formal sepeti Munas atau Majelis Syura. Ditengarai bahwa langkah-langkah tersebut adalah manuver pada *"injury time"* yang tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait. Seorang informan menuturkan:

> "Saya belum denger apakah pembicaraan itu ada, kemudian dikaitkan dengan pemegang saham utama ... Apakah pemegang sahamnya juga bertanya pada publiknya karena dalam organisasi kan begitu, bagaimanapun caranya ... Ya **mungkin dianggap kayak demam berdarah, kan nggak perlu nunggu lama-lama kan**, langsung gitu. Diminumin apa gitu kan".

Dengan kata lain, terjadi *agency problem* yang serius, di mana apa dilakukan AM dan kelompoknya sebagai agen tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh prinsipal, yaitu partai dan para kadernya secara keseluruhan, yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Syura. Metafora "seperti mengobati penyakit demam berdarah" menunjukkan bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh AM dan faksinya: lugas, cepat, dan dengan determinasi yang tinggi.

Sementara itu, ada pula pandangan bahwa dinamika yang terjadi adalah kontestasi yang wajar terjadi antara dua kelompok yang juga sangat tipikal, yaitu kelompok AM yang "lebih terbuka", dan kelompok lainnya yang "lebih

tradisional". Jika sejauh ini di permukaan kelompok AM terlihat lebih menonjol, hal itu normal karena kelompok ini mengusung gagasan yang berbeda dari kelompok mayoritas. Di samping itu, tokoh-tokoh "kelompok tradisional" tidak melihat posisi di partai, termasuk kalah-menang dalam kontestasi internal, sebagai hal yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh sehingga mengambil sikap "diam dan mengamati". Sikap tersebut patut disayangkan, karena membuat kontestasi berlangsung tidak seimbang dan kelompok AM seperti bermain sendiri tanpa lawan. Seorang informan menuturkan, "Makanya saya bilang, ***pasivis is not a solution. Being passive is not a solution*** ... ini semua adalah dinamika yang selama ini saya anggap masih sangat positif karena kita selalu berada dalam batasan atau arena yang masih bisa dikontrol".

Adanya kelompok yang cenderung pasif dalam kontestasi internal tersebut terkait pula dengan budaya yang masih berlaku di PKS, yaitu keengganan memunculkan perbedaan atau membahas fakta yang negatif, namun kemudian "kasak-kusuk" di luar forum. Informan yang sama menggugat:

> "***Why are you grumbling*** **di belakang?!** ... Seolah-olah sebuah kesalahan kalau kita mengangkat persoalan yang mereka bisa mengkategorikan 'itu aib itu'. Belum tentu. Bukan aib itu. *That's fact*, *fact* yang *negative. Fact negative* kan belum tentu aib ... Itulah landasan kita belajar untuk selalu *ewuh pakewuh*, selalu menutupi aib orang ... Bener, **tapi *in politics when you don't tell what you realy feel then they don't know***".

Di sisi lain, ditengarai pula bahwa ada persoalan *skills* di sini. Sebagian kader PKS belum mampu memberikan dan menerima kritik secara efektif, berfokus pada perilaku atau institusi, dan tidak terjebak menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat personal. Dampaknya, mereka memilih untuk diam daripada menghadapi risiko ketidaknyamanan dalam hubungan personal.

Dalam konteks ini, ada kader yang memilih mengambil posisi memberi masukan kepada kedua belah pihak agar proses kontestasi berlangsung lebih sehat dan seimbang. Di satu sisi kader tersebut mengkritisi gagasan-gagasan kelompok AM yang cenderung *transactional base*, padahal itu tidak selalu benar, walaupun merupakan salah satu cara dalam berpolitik. Namun di sisi lain ia juga mengkritisi pemikiran, atau gaya bermain "kelompok tradisional" yang kadang-kadang

"terlalu basi" sehingga "perlu dipecut" agar setidak-tidaknya berani mengemukakan pendapat yang berbeda dan berkontestasi secara terbuka.

Dengan demikian, salah satu yang perlu dilakukan PKS saat ini adalah *balancing*. Seorang anggota Fraksi PKS DPR RI memberikan contoh tentang komentar-komentar "panas" seorang anggota Dewan dari PKS, FH, yang belakangan jauh berkurang. Di satu sisi ada mekanisme internal yang bekerja, dan di sisi lain FH mencoba lebih menahan diri. Ia menggambarkan, "ada sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa, *you* nggak bisa terlalu menyimpang sendiri dalam proses penyampaian retorika poitik". Selanjutnya, proses *balancing* tersebut harus terus diperkuat, antara lain dengan terus memunculkan "FH-FH yang lain" yang mampu menyuarakan pendapat mereka di publik. Upaya-upaya ke arah itu sudah dan sedang dilakukan. Contohnya, bagaimana para anggota Dewan dari PKS mendapatkan masukan berupa alternatif isu berikut kontennya untuk masing-masing Komisi dalam *daily basis* atau *weekly basis* melalui *blackberry messages* (BBM). Masukan tersebut menjadi modal mereka untuk berbicara di publik, sehingga masyarakat melihat bahwa mereka melakukan sesuatu dan men-*deliver* sesuatu, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Tabel 4.7
Ikhtisar Implikasi Faksionalisasi dan Konflik Internal

No	Implikasi	Indikator
1	Tafsir baru yang diusung menjadi tafsir kolektif yang resmi; *heterodoxy* menjadi *doxa* baru.	Pandangan bahwa kekayaan, tampilan fisik, dan penguasaan media massa mutlak diperlukan untuk memenangkan dukungan pemilih.
2	Dominasi terhadap posisi-posisi strategis.	♦ Penempatan orang-orang yang tidak setuju dengan "tafsir baru" dalam posisi dan peran yang tidak strategis dan tidak memiliki kewenangan eksekusi, seperti MPP dan DSP. ♦ Pengisian pos-pos strategis pada *the party in public office* dan *the party in central office* oleh orang-orang yang sejalan dengan "tafsir baru".
3	*Agency problem*	Berbagai manuver dari kelompok yang mengusung "tafsir baru" sebenarnya tidak mencerminkan preferensi mayoritas dan tidak mendapatkan persetujuan dari forum-forum pengambilan keputusan formal.
4	Kontestasi yang tidak seimbang	Kelompok pengusung "tafsir baru" seperti bermain sendiri tanpa lawan yang seimbang karena kelompok yang berbeda cenderung bersikap pasif dan memandang bahwa memenangkan kontestasi internal tersebut bukanlah sesuatu yang serius dan penting.

4.4. Diskusi

4.4.1. Posisi PKS dalam Tipologi Partai Politik

Sebelum berdiskusi tentang dinamika internal PKS, partai ini perlu ditempatkan dalam tipologi partai politik, karena masing-masing tipe partai menyediakan arena kontestasi yang tidak sama bagi kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. PKS tidak dapat ditempatkan dalam tipologi klasik ala Katz dan Mair – *the elit party* atau *the cadre party*, *the mass party*, *the catch-all party*, dan *the cartel party* – karena kemunculan PKS tidak mengikuti logika evolutif dari keempat tipe partai tersebut. Ia lahir dari Jemaah Tarbiyah, sebuah gerakan sosial keagamaan yang memiliki akar historis yang relatif panjang dan akar ideologis yang relatif kokoh. Dengan demikian, walaupun berkiprah dalam sebuah negara demokrasi baru, PKS tidak sejalan dengan deskripsi Machos tentang *presidential-authoritarian* atau *presidential-oriented oligarchies* sebagai konsekuensi dari struktur partai yang dibentuk dalam waktu relatif singkat secara *top-down* tanpa melalui periode mobilisasi massa yang memadai. Dalam kasus PKS, organisasinya yang cenderung oligarkis justru merupakan implikasi yang khas dari perjalanan historis-kultural yang panjang sebagai gerakan keagamaan bawah tanah yang berpusat pada tokoh pendirinya yang hingga saat ini masih memimpin partai.

Di samping itu, PKS juga tidak lahir sebagai representasi dari kelas sosial tertentu, sebagaimana secara implisit mendasari kemunculan partai elit sebagai representasi dari kelas dominan, dan partai massa sebagai artikulasi dari sub-kultur yang terpinggirkan. PKS memang menunjukkan beberapa ciri dari *the catch-all party*, seperti membidik hampir seluruh segmen pemilih, dan *the cartel party*, partai bersimbiosis erat dengan pemerintah dan negara. Namun, kecenderungan tersebut tidaklah khas PKS, melainkan terlihat pada seluruh partai politik di Indonesia, sebagai implikasi dari upaya partai-partai tersebut untuk bertahan menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dalam hal ini, dorongan untuk menjadi *the cartel party*, setidaknya sebagai kecenderungan temporer dalam masa tertentu, sesungguhnya bersifat *embodied*, sesuatu yang hampir pasti akan muncul pada saat Jemaah Tarbiyah menjadi partai, karena sejak awal Jemaah Tarbiyah

dibangun dengan doktrin non-konfrontatif, menghindari benturan dengan negara dan pemerintah, juga dengan berbagai pihak lain yang memegang kekuasaan, khususnya pada masa-masa di mana jumlah dan kekuatan kader dipandang belum memadai. Dengan demikian penelitian ini menolak tesis Bierzen (2005) bahwa tipe partai sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan pada saat partai tersebut didirikan, dan selanjutnya perubahan lingkungan yang terjadi akan mempengaruhi dinamika perkembangan partai. Data menunjukkan, proses pembelajaran kolektif yang bersifat historis justru merupakan faktor yang paling mempengaruhi tipe partai yang dipilih PKS pada saat didirikan sebagai PK. Selanjutnya, tanpa menyampingkan perubahan lingkungan, kontestasi internal merupakan faktor yang paling signifikan mewarnai dinamika perkembangan partai, termasuk pergerakannya dari satu tipe partai ke tipe partai yang lain.

Walaupun sementara kalangan menganggap PKS adalah partai kader, namun ia tidak cocok dengan pengertian partai kader yang dikemukakan oleh Duverger (1954), karena ia mendefinisikan partai kader sebagai partai dengan struktur yang relatif longgar, berpusat pada elit, dengan organisasi yang minimal di luar legislatif. Sebaliknya, PKS memiliki organisasi vertikal yang sangat ketat, di samping struktur yang besar dan mengakar di luar parlemen. Dengan kata lain, pada awalnya *the party in public office* bukan merupakan segmen yang paling dominan di PKS. Pasca Munas 2010 memang terlihat dengan jelas manuver dari kelompok dominan untuk mengkonsolidasikan *the party in public office*, khususnya parlemen, dengan *party in central office,* melalui restrukturisasi jabatan-jabatan yang merupakan jatah PKS di alat-alat kelengkapan Dewan, dengan alasan untuk mensinergikannya dengan struktur DPP PKS. Artinya, dominasi tokoh-tokoh partai yang menduduki jabatan-jabatan publik tidak terjadi sejak awal berdirinya partai. Yang terjadi di PKS adalah sebaliknya, di mana elit partai yang menempati posisi-posisi strategis dalam struktur internal partai dan/atau berkontribusi besar secara historis berpeluang besar untuk ditempatkan di jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini menolak pendapat Rokkan (1970) tentang dominasi elit yang menempati jabatan-jabatan publik di partai-partai dalam demokrasi baru karena minimnya waktu untuk menjalani tahap-tahap legitimasi dan inkorporasi.

PKS dapat dikategorikan sebagai ***the modern cadre party***, di mana jumlah anggotanya relatif sedikit (baik dalam angka absolut, maupun prosentase terhadap jumlah pemilih), namun para anggota tersebut memiliki keterlibatan yang relatif tinggi dalam aktifitas-aktifitas politik PKS. Doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* (jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah), di samping sistem *tarbiyah* dan berkesinambungan, membuat para anggota PKS, setidaknya sebagian dari mereka, memaknai aktifitas sehari-hari, seperti aktifitas akademis, profesional, dan dakwah, sebagai bagian dari aktifitas politik PKS. Dalam konteks ini, PKS relatif sesuai dengan lima karakteristik partai kader moderen yang dipinjam Wolinetz dari Koole (1994). Pertama, peran para politisi profesional di PKS cukup dominan, khususnya di segmen *the party in public office* dan sebagian dari *the party in central office*.

Kedua, jumlah anggota relatif sedikit, baik dalam jumlah absolut, maupun dalam proporsi terhadap jumlah pemilih, sebagaimana terdapat pada tabel 4.8, namun tetap memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan partai. Walaupun tidak terdapat angka yang pasti, namun sejumlah sumber menegaskan bahwa anggota berperan penting dalam mendanai kegiatan-kegiatan partai. Anggota juga masih merupakan sumber utama dalam rekrutmen para kandidat partai untuk jabatan-jabatan publik. Selain itu, anggota pun berperan menggerakkan aktifitas partai sehari-hari. Dua contoh yang sangat jelas adalah, pertama, ketika PKS menjalankan perannya sebagai *pressure group* melalui kegiatan demonstrasi yang mengangkat berbagai isu, baik nasional maupun global. Dalam kegiatan demonstrasi, para anggota merupakan tulang punggung yang memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, diikuti oleh massa dalam jumlah yang meyakinkan, sekaligus efisien, karena para peserta demonstrasi mendanai diri mereka sendiri, sehingga partai tidak terbebani secara finansial. Contoh kedua, proses kaderisasi, di mana para kader PKS didorong untuk merekrut dan membina kader baru dan/atau kader yang jenjangnya lebih rendah dalam bentuk *halaqah* atau *usrah*. Dengan kata lain, rekrutmen dan pembinaan kader merupakan aktifitas yang *embodied* dalam keseharian para kader PKS. Dua contoh di atas menunjukkan kesesuaian PKS dengan karakteristik yang

kedua dari partai kader moderen, jumlah anggota yang relatif sedikit namun berperan signifikan.

Tabel 4.8
Anggota dan Pemilih PKS tahun 1999, 2004, 2009[24]

Pemilu	Jumlah Anggota	Jumlah Pemilih	Proporsi Anggota/Pemilih	Rasio Anggota:Pemilih
1999	33.000*)	1.436.565	2,30%	1 : 44,53
2004	263.000**)	8.325.020	3,16%	1 : 31,65
2009	800.000*)	8.206.955	9,75%	1 : 10,26

*) Informasi dari Informan-11 dan Informan-16
**) Informasi dari Informan-16

Terkait dengan signifikansi peran anggota sebagaimana dibahas di atas, terdapat catatan penting. Dengan semakin banyaknya kader PKS yang menempati jabatan-jabatan publik, terutama pasca Pemilu 2004, definisi ”sumber dana dari anggota” juga meluas, dari sebelumnya adalah infak atau iuran anggota, menjadi berbagai sumber lain yang dapat diakses oleh para kader yang berada di jabatan-jabatan publik. Di samping cukup marak diberitakan oleh media massa sehingga membuat sebagian kalangan memandang PKS tidaklah sebersih mottonya, dan karenanya tidak banyak berbeda dengan partai-partai lain, pragmatisme finansial[25] inilah yang ditengarai merupakan pemicu utama terjadi dan menguatnya konflik internal antara kelompok *religious movement oriented* dengan kelompok *political party oriented*. Indikasinya, sejumlah informan menegaskan bahwa pangkal tolak ketidaksesuaian mereka dengan kelompok AM adalah hal-hal yang terkait dengan *fundrising*. Bahkan seorang informan menegaskan bahwa pemicu utama faksionalisasi adalah menguatnya ”ideologi uang” yang diusung oleh AM dan

[24] Data pada tabel 4.8 menunjukkan, jumlah anggota PKS dari pemilu ke pemilu tumbuh jauh lebih cepat ketimbang jumlah pemilihnya. Akibatnya, proporsi anggota terhadap jumlah pemilih melonjak drastis, khususnya dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009, dan sebaliknya rasio pemilih terhadap anggota menurun tajam. Jika dalam Pemilu 2004 jumlah anggota PKS hanya 3,16% dari pemilih, di Pemilu 2009 angkanya menjadi 9,75%. Sebaliknya, rasio pemilih terhadap anggota menurun dari 1 berbanding 31,65 di Pemilu 2004 menjadi 1 berbanding 10,26 di Pemilu 2009. Mereka yang dikategorikan sebagai kelompok *religious movement oriented* cenderung percaya bahwa menguatnya dinamika internal pasca Pemilu 2004 memiliki andil yang cukup signifikan terhadap stagnasi suara PKS di Pemilu 2009. Dalam konteks ini, mereka cenderung membaca data rasio pemilih terhadap anggota sebagai ukuran yang menunjukkan menurunnya kemampuan para kader PKS untuk menarik pemilih.

[25] Pragmatisme finansial dibahas secara rinci di Bab 5.

kelompoknya. Catatan lainnya, dorongan untuk memenangkan sebanyak mungkin jabatan publik, yang oleh seorang petinggi partai dimaknai sebagai upaya ”merebut sumberdaya”, juga membuat PKS sangat lentur dalam mengusung atau mendukung tokoh-tokoh non-kader, sejauh mereka dinilai mampu memobilisasi sumber daya finansial dan/atau memiliki peluang yang besar untuk menang.

Ketiga, PKS semakin bersungguh-sungguh memperluas basis pemilihnya. Lepas dari berbagai kontroversi yang terjadi di internal PKS, yang oleh sementara kalangan dilihat sebagai pragmatisme atau perilaku politik yang menyimpang dari *”khittah”*, berbagai iklan politik warna-warni, iklan ”Soeharto” sebagai salah seorang guru bangsa, wacana mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dan wacana PKS sebagai ”Partai Terbuka”, dapat dipandang sebagai upaya perluasan basis pemilih. Di samping itu, perluasan struktur PKS ke daerah-daerah di luar kota-kota besar, dan di luar Jawa, yang dalam Pemilu 2009 berhasil memberikan tambahan suara yang cukup mampu mengimbangi penyusutan suara PKS di kota-kota besar, juga menunjukkan upaya-upaya tersebut.

Keempat, mirip dengan partai massa, PKS mempertahankan struktur vertikal yang sangat ketat. Bahkan, berbeda dengan partai-partai lain, eksistensi PKS ditopang oleh dua struktur vertikal yang kuat. Di satu sisi terdapat struktur partai di pusat (Dewan Pimpinan Pusat, DPP), propinsi (Dewan Pimpinan Wilayah, DPW), kabupaten/kota (Dewan Pimpinan Daerah, DPD), kecamatan (Dewan Pimpinan Cabang, DPC), hingga kelurahan/desa (Dewan Pimpinan Ranting, DPRa). Di sisi lain, terdapat struktur *tarbiyah*, di mana setiap anggota PKS, mulai dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi, terikat secara berjenjang dalam *halaqah* atau *usrah*, yang menjadi mekanisme yang efektif dalam menjaga garis kebijakan partai. Sebagaimana dikutip Wolinetz dari Koole (2002), struktur vertikal berjenjang tersebut memungkinkan berlangsungnya demokrasi internal sampai batas tertentu, misalnya dalam hal Pemilihan Raya untuk memilih sebagian anggota Majelis Syura, dan pemilihan para kandidat yang akan duduk sebagai pimpinan partai di masing-masing jenjang kepengurusan, walaupun keputusan final berada pada struktur partai di jenjang yang lebih

tinggi.[26] Eksistensi dua struktur vertikal tersebut – struktur partai dan struktur *tarbiyah* – memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kekokohan komitmen anggota terhadap partai, di mana para anggota yang tidak terakomodasi atau tidak terlibat aktif dalam struktur formal partai, tetap memiliki ikatan dengan partai melalui struktur *tarbiyah*. Baswedan (2004) juga telah mengidentifikasi hal ini dengan mengatakan bahwa berbeda dengan partai-partai lain, PKS mengakses anggota di seluruh tingkatan sepanjang waktu, terutama melalui pertemuan pekanan *halaqah* yang bukan sekedar forum untuk membahas isu-isu politik, melainkan juga sarana peningkatan pemahaman agama, menggalang partisipasi anggota, rekrutmen anggota baru, dan membangun disiplin berpartai. Signifikannya peran struktur *tarbiyah* di PKS menunjukkan keberlakuan tesis Rosenblum (2003) tentang tiga kekuatan partai agama, yaitu integrasi agama dengan politik yang dikokohkan oleh doktrin agama dan moral yang diyakini, adanya konsepsi ideologi atau *worldview* yang lebih komprehensif ketimbang partai sekular, dan dimensi waktu kerja-kerja politik yang jauh lebih panjang dan berkesinambungan dari sekedar menyongsong pemilu. Sebagaimana dibahas secara rinci di Bab 5, *tarbiyah*, sebagai mekanisme dasar pembentukan habitus para kader PKS, sampai batas tertentu berperan cukup efektif dalam internalisasi *socio-cultural values* yang dikehendaki. Di samping itu, aktifitas mengajak orang untuk belajar agama dalam konstruksi *halaqah* yang berlangsung sepanjang tahun sejatinya adalah juga aktifitas merekrut kader partai.

Kelima, PKS mengkombinasikan sumber-sumber dana dari anggota dan publik (non-anggota). Tidak terdapat data tentang proporsi masing-masing sumber ini. Namun demikian, informasi yang diberikan oleh beberapa informan menunjukkan bahwa keduanya berkontribusi signifikan.[27] Selain subsidi dari

[26] Mulai kepengurusan DPP periode 2010-2015 ini dilakukan perubahan yang mengurangi tingkat demokrasi internal di PKS, di mana pimpinan struktur partai di jenjang yang lebih rendah ditetapkan langsung oleh struktur partai di jenjang yang lebih tinggi tanpa melalui mekanisme pemilihan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kelompok dominan mengkonsolidasikan kekuatannya.

[27] Sebagai contoh, gaji setiap anggota DPR pusat dari PKS dipotong sebesar Rp 20 juta per bulan. Hal tersebut belum termasuk potongan-potongan non-rutin untuk mendanai kegiatan-kegiatan partai, misalnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tahun 2011, di mana anggota DPR dipungut Rp 20 juta per orang, DPRD Propinsi Rp 5 juta per orang, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp 2 juta per orang. Di samping itu, setiap anggota PKS juga dikenai kewajiban membayar infak wajib secara rutin.

negara sebagaimana juga diterima oleh partai-partai lain, sumber-sumber keuangan lain di luar partai juga terus dioptimalkan. Para elit PKS, termasuk Ustadz Hilmi Aminuddin, aktif melakukan pendekatan-pendekatan personal, baik bersifat religius maupun non-religius, kepada berbagai pihak yang dipandang bisa berkontribusi secara finansial kepada partai. Tidak dapat dinafikkan bahwa sebagian kalangan meragukan ”kepantasan” sebagian dari sumber-sumber dana eksternal tersebut, dan menilainya sebagai ”pragmatisme finansial”, walaupun beberapa elit partai memastikan bahwa sumber-sumber tersebut memenuhi kaidah ”tiga aman”, yaitu aman secara syariat, aman dari sisi hukum positif, dan aman secara politis. Dari seorang kader diperoleh informasi, peran *fundrising* yang sebelumnya terpusat dan digarap oleh Sekjen dan timnya, belakangan (tidak dijelaskan kapan tepatnya) disebarkan ke struktur partai di wilayah dan daerah. Salah satu sumber dana yang digali secara intensif adalah ”mahar” para kandidat peserta pemilukada yang akan diusung oleh PKS. Hal ini dikonfirmasi pula oleh seorang elit PKS yang menuturkan bahwa gagasan tentang ”merebut sumber daya” sudah tersosialisasikan dengan baik ke daerah-daerah. Bahkan sebagian daerah telah cukup intensif dalam mengakumulasikan sumber daya mereka.

Sementara itu, jika menggunakan tipologi partai politik dari Panebianco (1988, dikutip oleh Wolinetz, 2002), PKS menunjukkan **pergerakan dari partai massa birokratik *(the mass-bureaucratic party)* ke arah partai pemilih profesional *(the electoral-professional party)***. Organisasi PKS memang masih dominan dikendalikan oleh para birokrat partai yang menangani tugas-tugas politis-administratif yang bersifat umum dan *”multi-tasking”*. Namun demikian, sudah mulai lazim penggunaan para profesional dengan tugas-tugas yang spesifik. Hal ini terlihat jelas pada *the party in public office,* di mana para anggota Dewan dari PKS, baik secara individu maupun institusi, didukung oleh tim Tenaga Ahli yang berperan cukup signifikan. Pada *the party in central office* gejala tersebut juga sudah mulai muncul. Misalnya, Presiden Partai saat ini membentuk beberapa tim *ad hoc* yang langsung berada di bawah Sekretariat Presiden Partai. Salah satunya adalah Tim Manhaj, yang bertugas menyusun dan menyempurnakan *manhaj tarbiyah* (pedoman pembinaan kader). Menurut seorang informan, tim tersebut dibentuk sebagai *short-cut* karena Presiden Partai merasa tidak dapat

mengakses Bidang Kaderisasi yang menangani pembinaan kader, walaupun belakangan Tim Manhaj tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh Bidang Kaderisasi.

Selanjutnya, sebagaimana partai massa birokratik, PKS masih merupakan *membership party* dengan struktur vertikal yang kuat, serta mengandalkan dukungan segmen pemilih setia. Namun demikian, belakangan PKS juga bergerak ke arah *electoral party*, dengan berupaya membangun citra sebagai ”rumah yang nyaman” bagi kalangan pemilih yang lebih luas, misalnya dengan melontarkan wacana ”Partai Terbuka”, walaupun tetap mempertahankan struktur vertikalnya yang kuat. Sementara itu, dari sisi kepemimpinan, PKS masih menunjukkan relatif kuatnya peranan tokoh-tokoh internal, dan kepemimpinan yang bersifat kolegial. Hal ini berkorelasi dengan struktur vertikal PKS yang relatif kuat, di mana efektifitas kepemimpinan seseorang terbentuk lebih karena kedudukan formalnya dalam struktur partai. Belum kuatnya ketokohan para elit PKS di publik membuat ciri-ciri kepemimpinan dari suatu partai pemilih profesional, yaitu dominasi tokoh-tokoh publik dan kepemimpinan yang *personalized*, belum terlihat di PKS. Sebagaimana dibahas di Bab 6, belum hadirnya tokoh yang kuat merupakan salah satu kelemahan PKS yang paling signifikan, yang menjadi kendala bagi kiprahnya di arena politik Indonesia, walaupun Baswedan (2004) cenderung melihat hal ini sebagai pilihan yang secara sadar diambil oleh PKS untuk tidak membangun ketergantungan pada tokoh tertentu.

Pergerakan dari partai massa birokratik ke partai pemilih profesional kembali terlihat dalam hal sumber pendanaan. Sebagaimana telah dibahas di atas, selain sumber-sumber internal yang berasal dari anggota dan organisasi-organisasi terafiliasi, PKS juga sudah mengakses sumber dana publik (subsidi negara) dan kontribusi dari kelompok-kelompok kepentingan, khususnya para pengusaha. Di samping itu, dari sisi fokus, juga terjadi pergeseran dari ideologi yang dikawal oleh para kader Jemaah Tarbiyah yang militan, ke isu-isu yang bersifat umum yang digerakkan oleh para pejabat partai dan kader PKS yang berada di sejumlah jabatan publik.

Sementara itu, jika dianalisis dengan model klasifikasi partai politik berdasarkan orientasi utama yang direkomendasikan oleh Wolinetz (2002), PKS menunjukkan gerakan yang dinamis dari masa ke masa, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.1. Pada tahun 1998-1999, pada saat masih bernama PK, partai ini lebih menonjol cirinya sebagai *the policy-seeking party*, partai yang berfokus pada upaya-upaya untuk mengartikulasikan ideologinya. Tidak terdapat data tentang bagaimana proses perdebatan internal berlangsung dalam perumusan kebijakan pada periode ini, namun setidaknya ciri-ciri yang terkait dengan kampanye pemilu menunjukkan hal tersebut, misalnya idealisme yang merupakan *"selling point"* utama dalam kampanye, serta penggunaan teknik-teknik yang konvensional dengan lebih mengandalkan "serangan darat", seperti *direct selling* dan *charity*. Menurut Baswedan (2004), aktifitas *charity* tersebut, yang kemudian diinstitusionaliasikan dalam bentuk sejumlah *wajihah* merupakan upaya PK untuk menyiasati jumlah kursinya di Parlemen yang masih relatif sedikit.

Gambar 4.1
Dinamika PKS dalam Klasifikasi Partai Politik
Berdasarkan Orientasi/Motivasi Utama

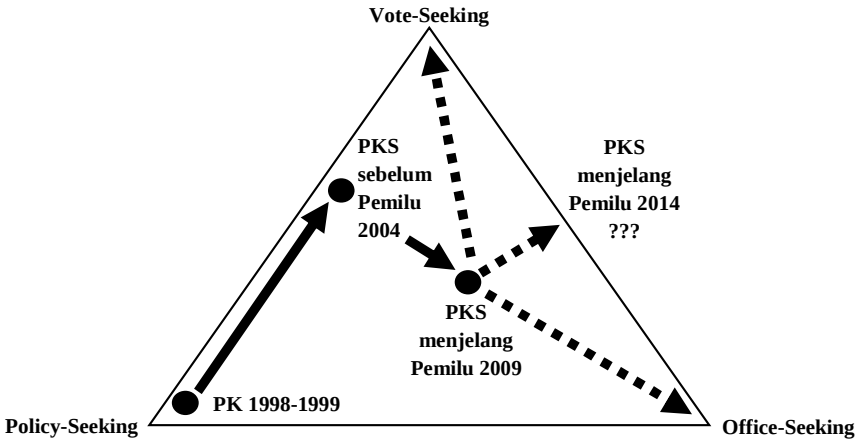

Setelah tidak lolos *electoral treshold* dalam Pemilu 1999 sehingga harus berganti nama menjadi PKS, menjelang Pemilu 2004 partai ini bergeser ke arah *the vote-seeking party* dengan motivasi utama menyelamatkan eksistensi partai Namun demikian, walaupun menjadikan pemenangan pemilu sebagai fokusnya, PKS di masa ini tidak meninggalkan karakteristik *the policy-seeking party*. PKS

tetap mempertahankan struktur vertikalnya, bahkan memperbesar dan memperkuatnya. Di samping itu, warna ideologis dalam kampanye PKS masih tetap kental, walaupun dikemas dengan lebih universal dalam motto ”bersih dan peduli”. Cukup banyak kalangan yang percaya, diferensiasi PKS tersebut berkontribusi signifikan terhadap lompatan suara PKS tahun 2004 dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Selanjutnya, menjelang Pemilu 2009, PKS menunjukkan kecenderungan bergerak ke arah *the office-seeking party*, pengejar kursi di jabatan-jabatan publik, tanpa melepaskan ciri-ciri sebagai *the vote-seeking party*. Kampanye pemilu yang tidak lagi ideologis, memanfaatkan media elektronik dengan berbagai jenis iklan ”warna-warni”, ”ngepop”, dan bahkan kontroversial, serta strategi koalisi dalam berbagai pemilukada yang menempatkan probabilitas kemenangan dan akumulasi sumber daya sebagai pertimbangan utama, merupakan beberapa indikasi kecenderungan tersebut. Kondisi yang digambarkan di atas menunjukkan keberlakuan pendapat Wolinetz (2002), *”the orientation and direction of some parties may very well be an area of dispute, changing whenever new leaders assume power or different factions gain control”*. Dengan demikian, patut diduga bahwa pegerakan PKS di Pemilu 2009 yang kian menjauhi *the policy-seeking party* dan semakin mengarah ke *the office-seeking party*, berhubungan erat dengan menguatnya posisi kelompok *political party oriented* yang cenderung pragmatis-progresif pada elemen *the party in central office* dan *the party in public office*. Dibaca dengan *the polity model* dari Tilly (1978), kelompok *political party oriented* telah berhasil memperkuat posisinya sebagai *member* yang memiliki hubungan yang konsisten dan efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, sekaligus mengeksklusi kelompok *religious movement oriented* keluar dari *the polity*, sehingga menjadi *challenger*. Sedangkan dalam kerangka berpikir Bourdieu, kelompok *political party oriented* telah memenangkan pertarungan simbolik di arena PKS, sehingga *heterodoxy* yang diusungnya telah berganti posisi menjadi *doxa* yang baru, sementara *orthodoxy* yang diusung oleh kelompok *religious movement oriented* menjadi *heterodoxy*.

Tabel 4.9
Ikhtisar Tipologi PKS sebagai Partai Politik

No	Tipologi	Kondisi PKS
1	Tipologi klasik ala Katz & Mair: *the elite party, the mass party, the catch-all party, the cartel party*	♦ PKS tidak dapat ditempatkan pada kerangka tipologi ini karena kemunculannya tidak mengikuti logika evolutif dari keempat tipe partai terseut. ♦ PKS bukan representasi kelas dominan *(the elite party)* maupun kelas yang terpinggirkan *(the mass party)*. ♦ Ciri-ciri yang ditampakkan PKS sebagai *the catch-all party* dan *the cartel party* tidak khas PKS, melainkan ditunjukkan oleh seluruh partai di Indonesia, sebagai respon terhadap tekanan eksternal. ♦ Dorongan menjadi *the cartel party* bersifat *embodied*, karena doktrin menghindari benturan dengan pemerintah yang dianut sejak awal.
2	*The cadre party* ala Duverger (struktur longgar, berpusat pada elit)	PKS tidak cocok dengan tipologi ini, karena memiliki organisasi vertikal yang sangat kuat dan mengakar. *The party in the public office* bukan elemen yang paling dominan.
3	*The modern cadre party* ala Koole	PKS cukup sesuai dengan ciri-ciri tipologi ini, yaitu: ♦ Peran politisi profesional yang semakin menonjol. ♦ Jumlah anggota yang relatif sedikit relatif terhadap pemilih. ♦ Terus berupaya memperluas basis pemilih. ♦ Mempertahankan struktur vertikal yang relatif ketat. ♦ Mengkombinasikan sumber-sumber dana dari anggota dan non-anggota (publik).
4	*The mass-bureaucratic party vs the professional electoral party* dari Panebianco	PKS menunjukkan pergeseran dari partai massa birokratik ke arah partai pemilih profesional: ♦ Penggunaan tenaga profesional untuk tugas yang spesifik semakin lazim. ♦ Masih mengandalkan struktur vertikal yang kuat dan dukungan segmen pemilih loyal *(membership party)*, namun mulai memperluas basis pemilih *(electoral party)*. ♦ Peran tokoh internal dan kepemimpinan kolegial masih kuat, sedangkan peran tokoh publik dan kepemimpinan yang *personalized* relatif belum tampak. ♦ Walaupun masih mengandalkan sumber dana internal, sumber dana publik juga sudah dimanfaatkan dengan intens. ♦ Terjadi pergeseran dari isu-isu ideologis ke isu-isu yang bersifat umum dan pragmatis.
5	Tipologi berdasarkan orientasi/motivasi utama dari Wolinetz	PKS menunjukkan pergeseran dari pemilu ke pemilu, yang juga mencerminkan faksi yang dominan pada saat tersebut: ♦ 1998-1998: *the policy-seeking party* ♦ Pemilu 2004: *the vote-seeking party* tanpa meninggalkan meninggalkan ciri-ciri *the policy-seeking party* ♦ Pemilu 2009: cenderung *the office-seeking party*, tanpa meninggalkan *the vote-seeking party*.

Wolinetz (2002) telah menengarai sejak awal bahwa menguatnya pragmatisme akan menyertai pergerakan sebuah partai menjadi *office seekers*. Karena orientasi utamanya adalah merebut jabatan-jabatan publik maka *the office-seeking party* akan menghindari formulasi kebijakan yang kental secara ideologis, karena berpotensi menghambat upayanya berkoalisi dengan partai-partai lain untuk merebut kekuasaan. Dalam hal ini, lontaran wacana ”Partai Terbuka” merupakan upaya untuk mengirim pesan bahwa PKS siap bekerjasama dengan siapapun, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat ideologis. Implikasinya, partai menjadi semakin kurang sesuai dengan harapan para ”kader ideologis”, dan sebaliknya, semakin nyaman bagi para pengejar karir politik. Dan akhirnya, sebagaimana yang dikatakan Wolinetz, manuver-manuver sebagian kader untuk merebut sumber daya, bersamaan dengan semakin membesarnya ukuran partai, secara otomatis mempertajam faksionalisasi dan konflik internal PKS. Dengan demikian PKS tidak sepenuhnya sejalan dengan perspektif Weberian mengenai tindakan kolektif yang dikemukakan Tilly (1978). Menurut Tilly, tindakan kolektif dapat dibedakan menjadi tindakan kolektif rutin, di mana keyakinan dan kepentingan berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, dan tindakan kolektif rutin, di mana kepentingan relatif lebih dominan, dan karenanya mempengaruhi keyakinan. Dalam kasus PKS yang terjadi adalah pergeseran dari kondisi di mana keyakinan dan kepentingan saling mempengaruhi ketika PKS masih berorientasi *policy seeking*, menjadi kondisi di mana kepentingan lebihh dominan daripada keyakinan ketika PKS bergerak ke arah *office seeking*.

4.4.2. Pengelompokkan, Faksionalisasi, dan Konflik Internal di PKS

Bahasa verbal dan non-verbal dari para informan penelitian dengan jelas menunjukkan adanya pengelompokkan, faksionalisasi, dan bahkan konflik internal di tubuh PKS. Walaupun ditengarai menguat pasca Pemilu 2004, sesungguhnya realita tersebut telah bermula jauh sebelumnya, sebelum Jemaah Tarbiyah menjadi partai politik, bahkan sejak awal berdirinya jemaah ini. Perbedaan latar belakang keislaman, cara memahami arahan-arahan dari *qiyadah*, dan preferensi para kader, merupakan sebagian penyebab faksionalisasi.

Selanjutnya, upaya-upaya aktif dari masing-masing kelompok untuk mewarnai PKS menyebabkan timbulnya friksi internal dan konflik antar-kelompok.

Sejumlah informan yang secara eksplisit menolak adanya eksistensi pengelompokkan yang relatif permanen, maupun memoderasi konflik antar-kelompok menjadi sekedar "perbedaan yang wajar dan manusiawi", secara implisit justru mempertegas adanya pengelompokkan dan konflik antar-kelompok tersebut. Pendapat seorang informan yang mengatakan, "kalau setiap perbedaan itu dianggap menghasilkan satu faksi maka tidak ada faksi yang tetap", maupun informan lain yang mengatakan, "menjadi konservatif dan menjadi progresif itu adalah fungsi", tidak didukung oleh para informan lain dan pengamatan peneliti di lapangan. Peneliti juga tidak sependapat dengan seorang informan yang mengatakan bahwa di PKS tidak terdapat faksionalisasi, karena perbedaan-perbedaan yang ada tidak berakar pada perbedaan *school of thoughts* tertentu. Tidak ada argumentasi teoretik maupun contoh empirik untuk membatasi dasar faksionalisasi semata-mata bersifat rasional, yaitu perbedaan dalam *school of thought* yang dianut oleh masing-masing kelompok. Hal-hal seperti afiliasi terhadap patron tertentu dan kesamaan basis sosial tertentu, sangat mungkin mengelompokkan para tokoh dan kader partai ke dalam kelompok atau faksi yang sama. Setelah berkelompok bisa saja kemudian mereka mengusung wacana yang khas dan berpola, yang membedakan satu kelompok dari kelompok yang lain.

Pendapat lain yang menampik adanya faksionalisasi dan konflik dengan argumentasi bahwa semua pihak tunduk dan melaksanakan keputusan *syura* juga tidak dapat diterima, karena *syura* justru merupakan mekanisme yang diterapkan oleh PKS untuk mengelola faksionalisasi dan konflik yang terjadi agar tidak berujung pada perpecahan. Atau seperti yang dikatakan seorang elit partai, "Di PKS ada mekanisme internal untuk menyerap gesekan itu menjadi faktor poduktif sehingga tidak berkembang menjadi faktor destruktif. Mekanisme itu namanya *syura*". Dengan kata lain, peran signifikan *syura* dalam keseharian PKS justru mengindikasikan kuatnya pengelompokkan, faksionalisasi, dan konflik internal di tubuh PKS.

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa secara umum kader-kader PKS/Jemaah Tarbiyah menunjukkan dua kecenderungan orientasi, yaitu mereka yang lebih berorientasi pada PKS sebagai manifestasi dari Jemaah Tarbiyah *(religious movement oriented)*, dan mereka yang lebih berorientasi pada PKS sebagai partai politik *(political party oriented)*, walaupun secara formal diberlakukan doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"*, "jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah". Kecenderungan pengelompokkan ini mendukung pendapat Rosenblum (2003) bahwa dalam partai agama cenderung terjadi kompetisi antara otoritas agama dengan aktifis partai dalam hal klaim tentang siapa yang berhak mewakili komunitas yang bersangkutan, siapa yang layak mengarahkan aktifitas politik umat, serta akses terhadap kontribusi waktu, energi, dan dana dari jemaah. Sejalan dengan hal yang telah diuraikan di atas, struktur pengelompokkan yang ditunjukkan oleh data penelitian ini juga mendukung pendapat Hwang dan Mecham (2010) yang mengatakan bahwa pengelompokkan yang ada di PKS merupakan konsekuensi dari titik berangkat partai ini sebagai jemaah.

Gambar 4.2
Pengelompokkan dan Faksionalisasi di Tubuh PKS

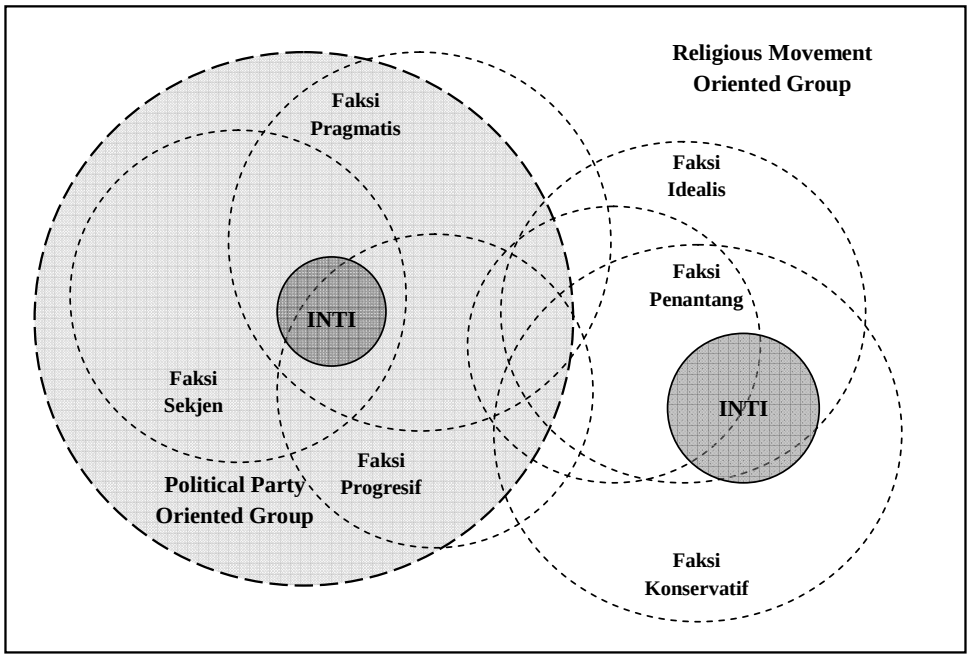

Pengelompokkan tersebut juga menunjukkan bahwa di kalangan para kader PKS terdapat dua kecenderungan yang berbeda dalam mendefinisikan hakikat arena di mana mereka bekerja, terlepas dari kesatuan definisi yang terangkum dalam doktrin formal organisasi, sebagaimana pendapat Dobbin (2008) bahwa arena adalah kelompok yang terorganisasi di seputar kepentingan yang sama, orang-orang yang bersaing untuk memperoleh suatu set sumber daya material tertentu yang perilakunya terorganisasikan di sekitar kompetisi tersebut. Kelompok *religious movement oriented* mempersepsikan arenanya sebagai arena dakwah dan *tarbiyah*, sehingga aktor-aktor di kelompok ini menggunakan habitus dakwah dan *tarbiyah* dalam memproduksi dan mengapresiasi praksis, yang dengan itu kemudian mereka kembali menstrukturkan arena di mana mereka berada. Hal yang sama berlaku untuk kelompok *political party oriented*, yang mendefinisikan arenanya sebagai arena politik kekuasaan. Dengan bahasa yang sederhana, friksi di antara kedua kelompok ini terjadi karena para aktor di masing-masing kelompok mengoperasikan praksis dan strategi yang bersumber dari dua habitus kolektif yang berbeda: habitus dakwah dan *tarbiyah*, dan habitus politik kekuasaan. Sementara itu, seperti ditegaskan Bourdieu (1989), habitus memproduksi dan diproduksi oleh dunia sosial, *structuring structure* sekaligus *structured structure*.

Dalam gambar 4.2 kelompok *political party oriented* digambarkan berada di tengah kelompok *religious movement oriented*. Penggambaran ini dilakukan demikian karena secara teoretik seluruh kader PKS seharusnya berorientasi jemaah, *religious movement oriented*. Kesimpulan itu diambil setelah menyimak proses *tarbiyah* yang membentuk habitus para kader PKS. Jika diikuti sebagaimana mestinya, proses *tarbiyah* akan membentuk habitus dakwah, bukan habitus politik kekuasaan. Dengan kata lain, habitus politik kekuasaan yang merupakan skema praksis yang menggerakkan kelompok *political party oriented* terbentuk melalui proses lain di luar proses alamiah yang berlangsung melalui *tarbiyah*.[28] Di sini terlihat eksistensi dari dimensi kolektif habitus (Ritzer dan Goodman, 2003, dan Dobbin, 2008), di mana para kader mengelompok berdasarkan kedekatan habitus mereka.

[28] Dinamika habitus kader PKS dan kaitannya dengan arena dibahas lebih rinci di Bab 5.

Dialektika antara kelompok *religious movement oriented* dan kelompok *political party oriented* di PKS menarik jika dikaji dalam konteks demokrasi moderen. Pemilihan konstruksi "Partai Dakwah", sebagai sintesis antara jemaah atau gerakan dakwah dengan partai politik moderen, sesungguhnya merupakan upaya kompromi untuk mempertahankan identitas sebagai gerakan keagamaan di satu sisi, dan keinginan mentransformasi diri menjadi entitas politik yang *eligible* untuk bertarung di arena demokrasi moderen di sisi yang lain. Meminjam kerangka berpikir Gutmann (2003), yang terjadi adalah sebuah eksperimen untuk mengintegrasikan kelompok identitas – yang dalam kasus PKS adalah kelompok identitas keagamaan – ke dalam demokrasi. Gutmann tidak memberikan sikap yang konklusif tentang hubungan antara keduanya. Di satu sisi ia melihat potensi positif kelompok identitas untuk memperkuat eksistensi dan meningkatkan posisi tawar invididu dalam arena demokrasi moderen, karena tanpa kolektifitas yang memadai suara individu sangat mungkin tenggelam dalam demokrasi moderen yang sangat hiruk-pikuk ini. Namun di sisi lain ia juga melihat bahwa kelompok identitas yang kuat dan berdaulat terhadap individu-individu yang terafiliasi dengannya bisa membuat mereka kehilangan kemerdekaan untuk mengekspresikan dirinya. Hal ini bertentangan dengan hakikat demokrasi sebagai kebebasan mengekspresikan diri. Secara sederhana Gutmann mengatakan, ketika kelompok identitas, termasuk kelompok keagamaan, terjun ke dalam demokrasi, terjadi tarik-menarik antara kedaulatan individu dengan kedaulatan kelompok. Sebagian pendapat Gutmann tersebut menemukan dukungan empirik dalam kasus PKS. Islam, dakwah, dan *tarbiyah* yang dirangkum menjadi "Partai Dakwah" telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi eksistensi Jemaah Tarbiyah di arena politik Indonesia, setidaknya dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Kekhasan identitas kelompok *(group identity)* yang kemudian menjadi kelompok identitas *(identity group)* tersebut membuatnya memiliki ceruk pemilih yang cukup memadai. Dengan kata lain, PKS telah memberdayakan para kader Jemaah Tarbiyah untuk eksis dan berkiprah di arena politik Indonesia. Namun secara internal, kebebasan individu untuk bersuara dan mengartikulasikan perbedaan, justru menjadi terbatasi oleh konstruksi PKS sebagai jemaah, di mana ketaatan

dan loyalitas, *confirmity* dan *compliance*, dan harmoni, adalah *socio-cultural values* yang senantiasa dikedepankan.

Gerakan Islam, khususnya Ikhwan al-Muslimin yang merupakan inspirasi utama Jemaah Tarbiyah/PKS, dan demokrasi moderen berbeda secara genealogis, sehingga memang tidak mungkin mengharapkan keduanya sepenuhnya cocok satu sama lain. Sebagai pendiri Ikhwan al-Muslimin, Hasan al-Banna (2007b) menolak sistem kepartaian sebagai salah satu pilar utama demokrasi moderen:

> "Tuan-tuan sekalian, kemudian saya yakin bahwa Islam, sebagai agama persatuan dalam segala hal, sebagai agama yang menjunjung ketulusan, kebersihan hati, persaudaraan sejati dan solidaritas yang tulus antara seluruh umat manusia, apalagi antara satu umat dan satu bangsa, **tidak membenarkan sistem kepartaian, tidak pula merestuinya"**.

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawy, tokoh ulama Ikhwan al-Muslimin yang terkemuka memiliki *ijtihad* yang berbeda. Ia mengatakan:

> "**Siapa yang memperhatikan substansi demokrasi, tentu akan melihat bahwa justru ia berasal dari Islam**. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai orang-orang yang menjadi makmum di belakangnya ... Jika dalam shalat saja urusannya seperti itu, lalu bagaimana dengan berbagai urusan kehidupan lain dan politik?" (1997: 184).

Sementara itu, khusus tentang partai politik, al-Qardhawy mengatakan, "**partai-partai bisa diibaratkan sebagai madzhab-madzhab dalam kancah politik**, sebagaimana madzhab-madzhab bisa diibaratkan dengan partai-partai dalam kancah fiqih" (1997: 214). Dari cuplikan dialektika pendapat tentang demokrasi moderen dan sistem kepartaian tersebut, tidak sulit untuk memahami bahwa ijtihad politik Jemaah Tarbiyah dengan menjadi partai memang masih menyimpan kontroversi yang berpeluang menyulut friksi. Sebagian friksi itu bersumber dari perdebatan sejauh mana alat yang digunakan, yaitu demokrasi dan kepartaian, masih *compatible* dengan tujuan menegakkan nilai-nilai Islam. Dalam formulasi yang lain, friksi itu terkait dengan sejauh mana esensi sebagai gerakan Islam yang mengusung nilai-nilai yang sakral dapat dikompromikan dengan partai dalam demokrasi moderen yang sejatinya mengejar kekuasaan yang profan.

Kembali pada kecenderungan pengelompokkan di PKS, para kader di akar rumput *(the party on the ground)* praktis seluruhnya berada di kelompok *religious movement oriented.* Sedangkan para anggota *the party in public office* dan *the party in central office* sebagian masuk kelompok ini, dan sebagiannya lagi masuk kelompok *political party oriented.* Dengan kata lain, secara nominal, kelompok yang berorientasi jemaah relatif lebih besar daripada kelompok yang berorientasi partai. Secara sederhana, walaupun tidak mutlak, dapat dikatakan bahwa kelompok *religious movement oriented,* berorientasi jemaah, memandang politik sebagai instrumen dakwah dan *tarbiyah*, sementara kelompok *political party oriented,* berorientasi partai, menempatkan dakwah dan *tarbiyah* sebagai instrumen politik kekuasaan. Jika dikaitkan dengan orientasi/motivasi berpolitik yang diidentifikasi oleh Wolinetz (2002), yaitu *policy-seekers, vote-seekers,* dan *office-seekers*, kelompok *religious movement oriented* lebih cenderung *policy-seekers*, sedangkan kelompok *political party oriented* lebih cenderung *vote-seekers* dan *office-seekers*.

Di samping kedua kelompok yang telah diuraikan di atas, terdapat sejumlah faksi yang dapat dibedakan satu sama lain, namun tidak sepenuhnya rigid dan anggota-anggotanya tidak pula *mutually exclusive*, sehingga terdapat irisan satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan seorang informan, ”keanggotaannya tergantung, tidak rigid, tapi juga tidak cair gitu, bisa keluar masuk. Ya, yang tetap pun bisa keluar masuk. Yang sudah lama pun bisa tiba-tiba keluar kan karena ketidaksepahaman”. Tiga faksi, yakni faksi pragmatis, faksi progresif, dan faksi Sekjen saling beririsan cukup besar dan secara umum berada di kelompok *political party oriented*. Sebaliknya, tiga faksi lainnya, yaitu faksi idealis, faksi konservatif, dan faksi penantang, yang juga saling beririsan relatif luas satu sama lain, berada di kelompok *religious movement oriented,* walaupun faksi penantang memiliki irisan yang cukup besar dengan kelompok *political party oriented*. Hal ini dapat dimengerti, karena informan yang sama mengatakan, “Sekarang itu, yang menonjol itu **faksi yang sama-sama punya *interest* untuk mengambil kekuasaan**, baik di internal maupun di eksternal”. Artinya, faksi penantang juga berorientasi pada politik kekuasaan.

Faksi idealis-konservatif dan faksi pragmatis-progresif dapat pula dikorelasikan dengan sikap terhadap tiga sumber daya strategis: uang, kekuasaan, dan konstituen, yang diuraikan pada bagian 4.2.6. Korelasi tersebut digambarkan pada tabel 4.10 yang secara sederhana menunjukkan bahwa faksi idealis-koservatif memiliki sikap yang cenderung menahan diri dan berhati-hati dalam hal-hal yang terkait dengan uang, kekuasaan, dan perebutan konstituen. Warna idealis kelompok ini ditunjukkan oleh pandangan bahwa uang bukan sumberdaya utama dalam memenangkan perjuangan politik. Sementara itu, warna konservatifnya diperlihatkan oleh pemilihan strategi merebut kekuasaan yang alami, dan pola pendekatan kepada konstituen yang *top-down*. Pada posisi yang berlawanan terdapat faksi pragmatis-progresif yang sikapnya cenderung oportunistik dan taktikal dalam mengakumulasikan dan kemudian mendayagunakan ketiga sumberdaya strategis. Pragmatisme kelompok ini terlihat dari pemosisian uang sebagai sumberdaya utama untuk memenangkan pertarungan politik. Sedangkan sisi progresifnya ditunjukkan oleh pilihan strategi rekayasa kolektif untuk merebut kekuasaan dan pola pendekatan konstituen yang fleksibel, tergantung kebutuhan lapangan. Di antara kedua kelompok yang ekstrim ini, terdapat kelompok-kelompok kombinasi idealis-progresif dan pragmatis-koservatif dengan pilihan-pilihan sikap yang lebih "abu-abu" terhadap ketiga sumberdaya strategis.

Tabel 4.10
Irisan Pola-Pola Faksionalisasi Kader PKS

Progresif	▪ Strategi merebut kekuasaan: semi alami. ▪ Uang penting, diraih melalui penguatan bisnis, hasil untuk kemanfaatan kolektif. ▪ Pola pendekatan konstituen: egaliter.	▪ Strategi merebut kekuasaan: rekayasa kolektif. ▪ Uang penting, diraih melalui dan dimanfaatkan untuk akselerasi individu. ▪ Pola pendekatan konstituen: egaliter atau *top-down*, tergantung kebutuhan.
Konser-vatif	▪ Strategi merebut kekuasaan: alami. ▪ Uang bukan sumber daya utama. ▪ Pola pendekatan konstituen: *top-down.*	▪ Strategi merebut kekuasaan: alami. ▪ Uang penting, diraih melalui dan dimanfaatkan untuk akselerasi individu. ▪ Pola pendekatan konstituen: *top-down.*
	Idealis	**Pragmatis**

Dinamika faksionalisasi di PKS sesungguhnya jauh lebih kompleks dari yang ditunjukkan oleh gambar 4.2, karena seperti dikatakan oleh Lipset (1963) beberapa aspek basis sosial yang tidak terlihat secara eksplisit pada gambar tersebut sesungguhnya juga berperan sebagai faktor pemoderasi atau faktor penguat dari kecenderungan faksionalisasi dan konflik internal yang ada dalam komunitas Jemaah Tarbiyah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, aspek suku (Jawa dan non-Jawa, Sunda dan non-Sunda), pendidikan (ilmu agama-ilmu sekular, ilmu eksakta-ilmu sosial), dan profesi (pengusaha, non-pengusaha) punya pengaruh terhadap dinamika internal yang ada.

Namun data menunjukkan bahwa basis sosial yang paling menonjol perannya sebagai faktor pemoderasi maupun faktor penguat adalah generasi *tarbiyah*[29]. Peneliti menangkap semacam kebanggaan dari para kader yang merupakan *assabiqunal 'awwalun*, generasi awal, kelompok mereka yang menjadi murid langsung dari Ustadz Hilmi Aminuddin. Mereka menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada guru mereka, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang tajam dalam pandangan mereka mengenai beberapa isu penting, yang membuat mereka terafiliasi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, bahkan mungkin berseberangan. Terdapat semacam *common feeling* yang kuat, "karena saya adalah kader senior, murid langsung Ustadz, mengikuti kiprah Jemaah Tarbiyah sejak awal, bahkan menyaksikan proses bergabungnya kader-kader yang lebih muda, saya memahami dinamika PKS lebih baik ketimbang

[29] Dalam pembicaraan informal pada hari Kamis 3 Maret 2011, seorang informan memberikan gambaran tentang tipologi kader PKS, di luar para pendiri (Ustadz Hilmi Aminuddin, Ustadz Salim Segaf al-Jufri, Ustadz Abdullah Baharmus, Ustadz Encep Abdusyukur). Pertama, mereka yang pada era 80an tidak berada di Indonesia karena sedang belajar di berbagai negara Timur Tengah lalu bersentuhan dengan pemikiran Ikhwan al-Muslimin di sana. Pada saat kembali ke Indonesia mereka dihubungkan dengan *tanzhim* struktur yang telah ada dan dipimpin oleh Ustadz Hilmi. HNW, AHH, Informan-01, dan Informan-13 adalah contoh kelompok ini. Kedua, mereka yang merupakan murid-murid langsung Ustadz Hilmi. Informan-06, Informan-07, Informan-09, Informan-14, dan Informan-16 termasuk kelompok ini. Ketiga, mereka yang merupakan produk dari struktur *tarbiyah* yang dibangun oleh Jemaah Tarbiyah di bawah pimpinan Ustadz Hilmi tapi bukan murid langsung beliau, seperti Informan-02, Informan-03, Informan-04, Informan-05, Informan-08, Informan-11, Informan-12, dan Informan-15. Keempat, mereka yang merupakan generasi awal dan "produk lokal" – sesuai dengan istilah yang digunakan oleh seorang informan – tapi bukan murid langsung maupun tidak langsung dari Ustadz Hilmi, seperti Ustadz RA (alm). Menurut informan tersebut, tidak begitu jelas melalui jalur mana mereka yang berada di kelompok keempat ini bersentuhan dengan pemikiran Ikhwan al-Muslimin.

kader-kader yang datang kemudian". Seorang kader generasi pertama misalnya, mengatakan:

> "Saya melihat orang-orang itu masuk bergabungnya. Menyaksikan dari dalam, bukan dari luar. Orang-orang luar kan nggak tau. Kapan masuknya orang sepeti FH, AM itu masuk. Itu saya melihat gitu ya ... **Iya itu generasi-generasi baru yang saya lihat proses masuknya ke dalam partai, ke dalam gerakan dakwah ini**".

Bagaimana basis sosial generasi *tarbiyah* ini bekerja, baik sebagai faktor pemoderasi maupun penguat, terlihat jelas pada sikap para informan. Mereka yang terafiliasi dengan kelompok *political party oriented* dan merupakan murid langsung Ustadz Hilmi sangat positif dalam menyikapi perkembangan kontemporer PKS, sekaligus menisbatkan, bahkan mempersonifikasikan, capaian-capaian tersebut kepada Ustadz Hilmi, bukan hanya sebagai pendiri dan *Murraqib 'Am*, namun juga sebagai "orangtua" atau "bapak" yang sangat tekun mengayomi "anak-anaknya". Dengan kata lain, hubungan yang terjalin antara mereka dengan Ustadz Hilmi lebih bernuansa emosional daripada fungsional. Implikasinya, apresiasi yang mereka berikan terhadap kiprah AM sebagai *icon* dari kelompok *political party oriented* terkesan merupakan refleksi dari penghormatan mereka terhadap Ustadz Hilmi yang dipahami memiliki hubungan istimewa dengan AM. Informan-09 dan Informan-14 merupakan contoh sub-kelompok ini. Sepanjang wawancara mereka banyak menuturkan pengalaman interaksi dengan Ustadz Hilmi yang bersifat pribadi dan mendalam. Namun peneliti juga menduga bahwa terdapat pengaruh aspek gender, di mana pendekatan Ustadz Hilmi dalam mendidik relatif lebih membekas pada murid-murid beliau yang perempuan daripada yang laki-laki. Sementara itu, mereka yang terafiliasi dengan kelompok *political party oriented* namun bukan murid langsung Ustadz Hilmi cenderung memposisikan beliau secara fungsional. Mereka berupaya membangun kesan bahwa Ustadz Hilmi berada di luar pusaran persoalan dan tidak terlibat dalam dinamika internal yang ada. Dengan kata lain, posisi PKS saat ini semata-mata merupakan hasil dialektika internal yang berlangsung sesuai dengan sistem yang berlaku, di antaranya Majelis Syura, tanpa campur tangan Ustadz Hilmi.

Status sebagai murid langsung Ustadz Hilmi atau bukan juga menghasilkan nuansa yang berbeda pada sikap para informan yang terafiliasi dengan kelompok *religious movement oriented.* Mereka yang merupakan murid langsung Ustadz Hilmi cenderung mengkritisi kecenderungan pragmatisme yang mengemuka belakangan ini dengan menisbatkannya semata-mata kepada AM dan kelompoknya. Penghormatan mereka terhadap Ustadz Hilmi sebagai guru membuat mereka menempatkan sang guru di luar dinamika kontestasi yang ada. Kalaupun ada langkah-langkah Ustadz Hilmi yang dinilai tidak tepat, mereka memilih menunjukkan sikap memahami, atau berprasangka baik bahwa beliau punya alasan yang tepat untuk itu. Sedangkan mereka yang bukan murid langsung Ustadz Hilmi cenderung menempatkan Ustadz Hilmi sebagai bagian, bahkan dalam konteks tertentu sebagai aktor utama, dalam dinamika internal yang berlangsung. Implikasinya, dengan relatif ringan mereka mengkritisi beberapa langkah Ustadz Hilmi yang dianggap keliru.

Dengan demikian, model faksionalisasi yang dikemukakan oleh Roemer (2006), yang secara *mutually exclusive* membagi para anggota partai ke dalam tiga faksi, yaitu faksi reformis, faksi oportunis, dan faksi militan, terlalu sederhana, dan karenanya tidak mampu menggambarkan fakta faksionalisasi di tubuh PKS dengan tepat. Karakteristik masing-masing faksi yang diungkapkan Roemer, yaitu faksi reformis berorientasi pada upaya memenuhi preferensi konstituen mereka hari ini, faksi oportunis menempatkan partai sebagai kendaraan politik, dan faksi militan berupaya mengubah preferensi pemlih agar dapat mendukung kebijakan partai di masa depan, tidak dapat mendeskripsikan situasi faksionalsiasi PKS yang sangat dinamis, tidak rigid, dan tidak pula *mutually exclusive*. Sejalan dengan itu, penggambaran konflik internal PKS sebagai konflik antara unsur idealis dan unsur realis (Permata, 2008a), mapun konflik antara kelompok pragmatis dan puritan (Hwang dan Mecham, 2010), juga tidak memadai untuk menggambarkan realitas faksionalisasi dan konflik internal yang terjadi. Di samping itu, pendapat Permata (2008a) yang mengaitkan faksionalisasi di PKS dengan ketiga segmen partai: *the party on the ground* bersikap idealis, *the party in public office* bersikap realis, dan *the party in central office* berperan sebagai mediator namun mengalami pergeseran sikap dari yang semula cenderung idealis menjadi realias, juga tidak

tepat. *The party on the ground* praktis memang masuk dalam kelompok *political party oriented* yang idealis-konservatif. Namun, dalam *the party in public office* bercampur antara kelompok *political party oriented* dan *religious movement oriented*. Sementara itu, *the party in central office* periode 2005-2010 didominasi oleh kelompok *religious movement oriented*, sedangkan periode 2010-2015 yang baru ini didominasi oleh kelompok *political party oriented*.[30]

Data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pembeda, *grouping factors*, antara *religious movement oriented group* dengan *political party oriented group* sebagaimana terdapat pada tabel 4.11. Faktor-faktor pembentuk kelompok tersebut terbagi menjadi indikator-indikator umum yang meliputi pandangan tentang eksistensi faksionalisasi, paradigma dalam melihat hubungan antara jemaah dengan partai, orientasi, gaya hidup, sikap terhadap uang, pengaruh faktor generasi *tarbiyah*, posisi dalam kontestasi internal, dan pengaruh di tiga segmen partai, serta sikap terhadap isu-isu khusus di masa lalu dan sekarang, yaitu dukungan PKS terhadap Capres 2004, kinerja PKS dalam Pemilu 2009, dan wacana PKS sebagai Partai Terbuka.

Dengan demikian, penelitian ini mendukung pendapat Noor (2007) bahwa faksionalisasi di PKS tidak bersumber dari perbedaan latar belakang keislaman para tokohnya, dan bahwa proses *tarbiyah* yang intensif membuat perbedaan latar belakang keislaman tersebut praktis tidak relevan sebagai *grouping factor*. Namun kelanjutan pandangan Noor yang mengatakan bahwa penyebab faksionalisasi tersebut adalah perbedaan tingkat militansi dan ketaatan terhadap paradigma yang telah diinternalisasikan oleh proses *tarbiyah* cenderung terlalu menyederhanakan. Yang sesungguhnya terjadi adalah pertarungan simbolik antara pengusung habitus kolektif dakwah dan *tarbiyah*, yang semula merupakan *orthodoxy* lalu menjadi *heterodoxy*, dengan habitus kolektif politik kekuasaan yang semula merupakan *heterodoxy* lalu berhasil menjadi *doxa* yang baru. Penelitian ini juga menolak tesis Permata (2008a) yang mengatakan bahwa kecenderungan pragmatisme PKS merupakan implikasi proses substitusi internal terhadap ideologi sebagai institusi

[30] Menurut seorang informan, kelompok *political party oriented* yang pragmatis-progresif mengisi kurang-lebih 60%-70% dari pengurus DPP periode 2010-2015. Namun pendapat tersebut dibantah oleh seorang informan lain.

informal oleh sistem dan mekanisme organisasi yang merupakan institusi formal. Dalam perspektif Tilly (1978), yang terjadi pada hakikatnya adalah pertarungan antara *contenders* untuk merebut dan/atau mempertahankan posisi mereka sebagai anggota *the polity* sehingga mereka memperoleh *privilege* dalam hubungan dengan pemegang otoritas tertinggi.

Tabel 4.11
Kelompok *Religious Movement Oriented* versus Kelompok Political Party Oriented

Indikator	Kelompok	
	Religous Movement Oriented	**Political Party Oriented**
Indikator-Indikator Umum		
Eksistensi faksionalisasi	Cenderung bersikap netral, ambigu, atau membenarkan adanya faksionalisasi di PKS.	Secara tegas dan eksplisit menolak adanya faksionalisasi di PKS.
Paradigma	♦ PKS bukan sekedar partai, tapi juga jemaah. ♦ Partai politik adalah instrumen dari dakwah dan *tarbiyah*. ♦ Kemenangan politik adalah buah dari kerja dakwah dan *tarbiyah*.	♦ PKS adalah partai politik. ♦ Partai politik dibentuk untuk mengikuti Pemilu dan meraih kemenangan. ♦ Dakwah dan *tarbiyah* adalah instrumen dari PKS sebagai partai.
Orientasi	♦ Cenderung ideologis dan konservatif. ♦ *Policy-seeking.*	♦ Cenderung pragmatis dan progresif. ♦ *Office seeking* dan *vote-seeking*.
Pandangan tentang Gaya hidup	♦ Kesederhanaan adalah ciri khas kader PKS. ♦ Memandang kelompok *political party oriented* cenderung "bermewah-mewah". ♦ Gaya hidup "mewah" sebagian kader PKS menimbulkan citra negatif di mata konstituen. ♦ "Kemewahan" tersebut semakin menjadi persoalan di tengah-tengah kondisi mayoritas kader PKS yang belum sejahtera secara ekonomi.	♦ Apa yang disebut "mewah" subjektif, tidak ada standar yang pasti. ♦ Tidak ada yang salah jika kader PKS hidup "mewah" sejauh tidak korupsi dan merugikan publik, serta berkontribusi besar secara finansial untul partai. ♦ "Kemewahan" tersebut sekedar bentuk adaptasi terhadap kondisi eksternal yang dihadapi.
Kecenderungan sikap dan perilaku	♦ Pasif. Tidak melihat menang-kalah dalam kontestasi internal sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kontestasi menjadi tidak seimbang. ♦ Terlalu banyak "diam dan mengamati".	♦ Sangat aktif untuk menjadikan tafsir baru yang diusung menjadi tafsir kolektif yang berlaku secara formal. ♦ Terlalu *"transactional base"*.
Cara merebut kekuasaan	Distribusi kekuasaan diserahkan kepada sistem dan kolektifitas yang berlaku.	♦ Menjalin hubungan-hubungan personal. ♦ Menyusun dan melakukan langkah-langkah kolektif yang sistematik.

Indikator	Kelompok	
	Religous Movement Oriented	**Political Party Oriented**
Sikap terhadap uang	♦ Uang bukan sumber daya utama yang menentukan keberhasilan perjuangan. ♦ Para kader perlu dibangun kesadarannya dan difasilitasi untuk mengembangkan bisnis sehingga bisa berkontribusi besar untuk partai. ♦ Sangat berhati-hati terhadap keabsahan sumber-sumber keuangan. ♦ Meragukan "kebersihan" sebagian sumber-sumber keuangan yang diakses oleh kelompok *political party oriented.* ♦ Menginginkan citra "bersih" tetap kental dan menjadi *selling point* utama PKS. ♦ Meragukan efektifitas uang sebagai syarat kemenangan politik, khususnya melihat stagnasi suara PKS di Pemilu 2009.	♦ Pribadi-pribadi mengakumulasi-kan uang untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing dan kelompok mereka. ♦ Melihat uang sebagai sumber daya utama yang dibutuhkan PKS untuk meraih kemenangan politik. Uang adalah bagian dari logika kemenangan. ♦ Mendorong upaya-upaya untuk meraih, menguasai, dan mengakumulasi sumber daya finansial secara progresif. ♦ Berargumentasi bahwa sumber-sumber keuangan PKS masih tetap memperhatikan asas "Tiga Aman": aman *'syar'i*, aman yuridis, aman politis.
Cara merangkul konstituen	Egaliter, membangun pola-pola relasi yang sejajar dengan konstituen, tidak mementing-kan simbol-simbol tertentu, membangun kepemimpinan dari bawah, tetap kritis pada pimpinan dengan tetap menjaga etika.	Hirarkis, pola relasi yang *top-down*, mementingkan simbol-simbol, membangun kepemimpinan dari atas, menunjukkan kepatuhan penuh pada atasan agar bawahan juga menunjukkan sikap yang sama.
Pengaruh faktor generasi *tarbiyah*	Murid langsung Ustadz Hilmi	
	♦ Sangat hormat pada Ustadz Hilmi. ♦ Menempatkan Ustadz Hilmi di luar kontestasi yang ada. ♦ Menisbatkan pragmatisme kepada AM dan kelompoknya. ♦ Memahami dan berprasangka baik terhadap langkah-langkah Ustadz Hilmi yang dinilai kurang tepat.	♦ Sangat hormat pada Ustadz Hilmi. ♦ Nuansa hubungan lebih cenderung emosional. ♦ Menisbatkan keberhasilan PKS kepada kontribusi Ustadz Hilmi. ♦ Mendukung kiprah AM lebih karena kedekatannya dengan Ustadz Hilmi.
	Bukang murid langsung Ustadz Hilmi	
	♦ Memandang Ustadz Hilmi merupakan aktor utama dalam kontestasi yang ada. ♦ Lebih lugas dalam mengkritisi kiprah Ustadz Hilmi dalam memimpin PKS.	♦ Menempatkan Ustadz Hilmi di luar kontestasi yang ada. ♦ Melihat kontestasi yang ada semata-mata sebagai implikasi dari sistem yang berlaku. ♦ Menjalin hubungan fungsional dengan Ustadz Hilmi sebagai patron.
Posisi dalam kontestasi internal	♦ Semula *orthodoxy*, namun saat ini menjadi *heterodoxy*. ♦ Posisi sebagai *member* dalam *the polity* melemah, bahkan sebagian terlempar keluar dari *the polity* dan menjadi *challenger*.	♦ Semula *heterdoxy*, namun saat ini menjadi *doxa* baru. ♦ Mampu mengokohkan posisi dalam *the polity*, sehingga memiliki hubungan dan konsisten dan efisien dengan pemegang kekuasaan tertinggi.

Indikator	Kelompok	
	Religous Movement Oriented	**Political Party Oriented**
Pengaruh di ketiga segmen partai	♦ Dominan di *the party on the ground*. ♦ Lemah di *the party in central office* dan *the party in public office*.	Mendominasi *the party in central office* dan *the party in public office*, sehingga mampu mengendalikan *the party on the ground*.
Sikap terhadap Isu-Isu Khusus di Masa Lalu dan Masa Sekarang		
Capres 2004	Mendukung Amien Rais yang dinilai lebih religius dan merupakan tokoh reformasi.	Mendukung Wiranto yang dipandang lebih punya kans untuk maju ke Pilpres putaran kedua dan mengimbangi SBY.
Kinerja Pemilu 2009	♦ Stagnasi, bahkan kemunduran, karena ukuran keberhasilan Partai Dakwah adalah jumlah yang bersimpati, bukan prosentase suara atau jumlah kursi. ♦ Merupakan akibat dari lunturnya citra "bersih" dari PKS sehingga diferensiasi PKS berkurang dibandingkan partai lain. ♦ Terdapat kontribusi dari menurunnya soliditas internal dan meningkatnya apatisme kader.	♦ Kinerja Pemilu 2009 meningkat dibandingkan 2004 walaupun tidak melompat. ♦ Faktor eksternal, seperti "tsunami Demokrat/SBY" merupakan penyebab utama tidak terjadinya lompatan. ♦ Tidak ada persoalan serius dalam kinerja dan soliditas internal.
Wacana Partai Terbuka	♦ Menolak, karena berpotensi menggerus diferensiasi sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah. ♦ Ilegal, karena tidak ada keputusan Majelis Syura tentang hal tersebut. ♦ Menimbulkan kebingungan di kalangan kader di akar rumput dan publik. ♦ Tidak ada urgensinya, karena menurut UU semua parpol di Indonesia harus terbuka.	♦ Tepat, karena era "politik aliran" sudah berakhir. ♦ Tidak ada masalah, karena dakwah sifatnya terbuka. ♦ Mestinya tidak menimbulkan persoalan serius di internal PKS jika para elit dan kader menyikapinya dengan dewasa dan tidak terprovokasi oleh media.

Realita adanya dinamika internal, di antara kelompok-kelompok di tubuh PKS tidak sulit dipahami jika PKS diteropong melalui lensa spiritualitas organisasi (Pina e Cunha et.al., 2006). Dalam kerangka ini, PKS/Jemaah Tarbiyah adalah organisasi dengan tipe *spiritually informed management*, yang menempatkan spiritualitas sebagai bagian integral dari aspek-aspek manajemen, karena secara historis PKS berawal dari gerakan keagamaan yang kemudian mengorganisasikan diri menjadi partai politik, atau dalam logika Rosenblum (2003), "transform group identity into identity group". Hal ini dipertegas oleh pendapat beberapa informan tentang kuatnya pengaruh spiritualisme, khususnya tasawuf, terhadap nilai-nilai yang dianut oleh Jemaah Tarbiyah, di samping

tergambar dengan jelas pada sistem dan materi *tarbiyah* yang diulas dengan rinci di Bab 5. Di sisi lain, belum semua kader PKS merupakan aktor yang independen, atau *organization citizen*. Sebagian dari mereka, ditengarai proporsinya cukup besar, masih merupakan aktor yang dependen, atau anggota-anggota yang pasif-reaktif. Keguncangan yang dialami oleh sebagian kader dalam merespon dinamika internal PKS pasca Pemilu 2004 mengindikasikan masih kuatnya dependensi mereka terhadap partai. Budaya paternalistik yang ditunjukkan antara lain oleh kuatnya nilai-nilai *confirmity* dan *compliance*, berkontribusi terhadap hal itu. Persilangan antara tipe organisasi yang berkesadaran spiritual dengan tipe anggota yang dependen tersebut menghasilkan **"organisasi yang penuh perasaan"** ***(the soulful organization)*****.** Implikasinya, di satu sisi, sangat jelas terlihat integrasi yang cukup kuat antara para kader sebagai individu dengan PKS sebagai organisasi, walaupun integrasi tersebut dibangun secara bertahap, sebagaimana tercermin dalam janji setia anggota PKS untuk setiap jenjang keanggotaan. Namun di sisi lain, terdapat sinisme dari para kader ketika melihat praktik-praktik yang mereka persepsikan tidak sesuai, apalagi bertentangan nilai-nilai dasar organisasi, seperti perilaku sekelompok kader yang oleh kader-kader yang lain dipersepsikan sebagai pragmatisme yang bertolak-belakang dengan motto "bersih, peduli, profesional". Dalam beberapa kasus, mereka yang sinis dan mengkritik ini tampak tak berdaya melakukan perlawanan yang berarti, sehingga keluar dari partai, atau tetap ada di dalam namun melakukan *symbolic escape*, menjadi pilihan yang rasional. Dalam hal ini, kembali menekuni aktifitas-aktifitas tradisional yang tidak berhubungan langsung dan formal dengan struktur partai merupakan ekspresi *symbolic escape* yang paling lazim. Ada pula kader yang memproteksi atau mensterilkan *halaqah* yang dibinanya dari kaitan langsung dengan partai, padahal *halaqah* adalah instrumen pengkaderan partai.

Sementara itu, jika dibaca dengan kerangka tipologi praksis aktifisme Islam dari Hashem (2006), dinamika internal PKS bisa dilihat sebagai implikasi dari tipe pendekatan fikih yang dipilih, yaitu **eklektik**. Dengan tipe pendekatan fikih ini, Jemaah Tarbiyah berupaya mengkontekstualisasikan teks-teks keislaman yang dipahaminya dan selama ini menjadi rujukan dasar dari kiprahnya dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi di ranah politik Indonesia dengan

pertimbangan kemaslahatan dakwah.[31] Proses kontekstualisasi tersebut menjadi sangat dinamis, bahkan bergejolak, karena Jemaah Tarbiyah merupakan gerakan Islam yang multi dimensi, meliputi aktifisme individual, gerakan lokal, dan gerakan global.[32] Di tataran kehidupan keagamaan sebagai pribadi, secara terus-menerus berlangsung upaya menyelaraskan teks dengan realita. Di tataran gerakan lokal (Indonesia) diupayakan penyesuaian teks-teks Islam yang universal dengan realita kekinian domestik. Sedangkan di tataran gerakan global, Jemaah Tarbiyah, sebagaimana sumber inspirasi utamanya, Ikhwan al-Muslimin, berupaya melakukan kontemporalisasi, menafsirkan kembali teks-teks Islam dalam konteks kontemporer yang bersifat global. Di samping itu, kontekstualisasi tersebut dilakukan baik secara kolektif oleh institusi-institusi formal yang ada dalam struktur PKS, misalnya melalui keputusan Majelis Syura, fatwa Dewan Syariah Pusat, dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dirumuskan oleh Majelis

[31] Dalam pandangan beberapa informan, argumentasi "kemaslahatan dakwah" dalam beberapa kasus menjadi pembenaran dari kebijakan atau perilaku elit yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Dalam pembicaraan informal melalui telepon pada hari Jumat 18 Maret 2011, seorang informan mengatakan bahwa hal tersebut membuat fikih PKS menjadi seperti Nahdlatul Ulama (NU), di mana apapun bisa menjadi boleh karena pertimbangan maslahat. Menurutnya hal tersebut tidak semestinya demikian, karena dalam beragama walau bagaimanapun ada hal-hal standar yang harus dijadikan rujukan.

[32] Ikhwan al-Muslimin sebagai inspirasi utama Jemaah Tarbiyah mendefinisikan gerakan mereka sebagai: "***1. Dakwah Salafiyah*** (Dakwah yang Murni), karena mereka mengajak kembali bersama Islam kepada sumbernya yang jernih dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. ***2. Thariqah Sunniyah*** (Jalan Sunnah), karena mereka membawa jiwanya untuk mengamalkan sunnah yang suci dalam segala hal, khususnya dalam masalah akidah dan ibadah, selama ada kemampuan. ***3. Haqiqah Shufiyah*** (Hakikat Kesufian), karena mereka memahami bahwa asas kebaikan adalah kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, berpaling dari ketergantungan kepada mkhluk, cinta karena Allah, dan keterikatan kepada kebaikan. ***4. Hai'ah Siyasiyah*** (Gerakan Politik), karena secara internal mereka menuntut perbaikan pemerintahan, meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan umat Islam terhadap bangsa-bangsa lain di luar negeri, men-*tarbiyah* bangsa agar memiliki kebanggan dan kemuliaan, serta menjaga nasionalisme sebisa mungkin. ***5. Jama'ah Riyadhiyah*** (Klub Olahraga), karena mereka sangat memperhatikan fisik dan memahami benar bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah ... ***6. Rabithah 'Ilmiyah Tsaqafiyyah*** (Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Wawasan), karena Islam menjadikan *thalabul 'ilmi* (mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan, karena majelis-majelis Ikhwan pada dasarnya adalah tempat pengajaran dan peningkatan wawasan. Sedangkan lembanga-lembaganya adalah tempat untuk men-*tarbiyah* fisik, akal, dan ruh. ***7. Syirkah Iqtishadiyah*** (Korporasi), karena Islam sangat memperhatikan pengelolaan dan pendapatan kekayaan sebagaimana mestinya ... ***8. Fikrah Ijtima'iyah*** (Gerakan Sosial Kemasyarakatan), karena mereka sangat menaruh perhatian pada segala 'penyakit' yang ada dalam masyarakat Islam, berusaha menemukan cara pengobatan, dan mengupayakan penyempuhan umat darinya" (Al Banna, 2007a: 192-195). Kedelapan dimensi gerakan tersebut juga disampaikan sebagai materi dalam forum-forum *halaqah* Jemaah Tarbiyah/PKS.

Pertimbangan Pusat, maupun secara individual dalam keseharian para kader PKS di berbagai posisi. [33]

Terkait dengan apa yang dikemukakan Hashem, seorang kader yang mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hadits menjelaskan bahwa kontekstualisasi teks-teks Islam di bidang politik, atau biasa disebut *siyasah syar'iyyah* (politik Islam), memang menyimpan potensi dinamika yang tinggi, karena hampir tidak ada dalil dari *nash* (Al Qur-an dan Hadits) yang *qath'i*, mengaturnya dengan rinci. Dalil-dalil yang ada hanya mengatur prinsip-prinsip umum, misalnya tujuan politik Islam adalah *'amar ma'ruf nahi munkar*. Implikasinya, terbuka ruang yang sangat luas untuk melakukan *ijtihad*, terutama ketika memasuki arena politik praktis. Pada intinya dalam *siyasah syar'iyyah* entitas politik Islam harus mencari strategi yang bisa menghasilkan kemenangan dengan tetap menaati ketentuan-ketentuan syariat. Pada titik inilah sangat besar kemungkinan akan terjadi dinamika yang tinggi. Di satu sisi, kemenangan bisa didefinsikan sebagai kemenangan kualitatif atau kuantitatif. Nabi Nuh as dan Nabi Isa as misalnya, meraih kemenangan kualitatif, yaitu kemampuan tetap teguh dalam kebenaran, walaupun dengan jumlah pengikut yang sangat sedikit. Sedangkan Nabi Sulaiman as dan Nabi Muhammad saw, selain memperoleh kemenangan kualitatif, juga meraih kemenangan kuantitatif, berupa jumlah pengikut yang banyak dan kekuasaan politik. Di sisi lain, perbuatan yang sejalan dengan syariat juga bertingkat-tingkat, yaitu perbuatan yang paling utama *(aula)*, utama *(afdhal)*, boleh *(mubah)*, dibutuhkan *(hajat)*, dan darurat *(dharuriyyat)*. Di dalam entitas politik Islam akan terjadi dialektika yang bisa menjelma menjadi friksi yang tajam pada saat para anggotanya mempertimbangkan kombinasi-kombinasi dari apa yang dimaksud dengan kemenangan, dan apa yang dijadikan batasan menaati syariat. Faksi yang mendefinisikan kemenangan sebagai kemenangan kualitatif, dan membatasi menaati syariat pada perbuatan-perbuatan yang paling utama, akan berada dalam posisi yang berlawanan dengan faksi yang

[33] Contohnya seperti yang diakui dalam Platform PKS, "Disadari bahwa dalam perjalanan 3,5 tahun sejak 2004 penerjemahan ini belum membuahkan satu kejelasan dan standardisasi makna 'Bersih dan Peduli' versi PK Sejahtera. **Yang terlihat adalah ijtihad-ijtihad pribadi para kader dalam menerjemahkan 'Bersih dan Peduli' ketika berhadapan dengan tantangan dan peluang**".

mendefinisikan kemenangan sebagai kemenangan kuantitatif, dan gemar memilih fikih *dharuriyyat*. Perbedaan pandangan antara kelompok *religious movement oriented* dan kelompok *political party oriented* dalam memandang keikutsertaan dan koalisi PKS dalam berbagai pemilukada, kepantasan sumber-sumber keuangan, dan capaian dalam Pemilu 2009 yang lalu, merupakan contoh-contoh dialektika yang bersumber dari perbedaan dalam mendefinisikan kemenangan dan batas kesesuaian dengan syariat.

Untuk mengantisipasi dinamika yang tajam tersebut para kader perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, dinamika yang ada akan semakin tajam manakala para kader menggunakan pola pikir "membenturkan". Misalnya, faksi idealis mengatakan, "tidak masalah tidak menang dalam pemilu selama partai tetap konsisten pada ideologinya". Sementara faksi pragmatis mengatakan, "tidak ada gunanya bicara ideologi jika jumlah suara yang diperoleh sedikit". Dengan kata lain, apakah tidak memungkinkan meraih dukungan yang signifikan dari pemilih dalam pemilu dengan tetap mempertahankan ideologi partai? Kedua, dalam jemaah muslim tidak ada keharusan bahwa semua orang berpandangan sama. Sejak masa Nabi Muhammad saw perbedaan-perbedaan yang cukup tajam sudah terjadi, misalnya dalam menyikapi Perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ketiga, yang harus diupayakan bukan menyeragamkan pandangan, karena hal itu akan sia-sia, melainkan menyediakan ruang berkiprah yang seluas mungkin, sehingga para kader dengan spektrum pemikiran yang sangat beragam sekalipun dapat mengaktualisasikan dirinya dengan nyaman, tanpa harus keluar dari partai. Keempat, *siyasah syar'iyyah* membutuhkan etika yang tinggi. Etika tidak berbicara apa yang benar dan salah secara hukum, melainkan apa yang pantas atau tidak pantas. Sebagai contoh, seorang kader yang bergaya hidup mewah tidak melanggar hukum, sepanjang kemewahan itu dibelinya dari penghasilan yang halal. Namun menampilkan kemewahan di tengah suatu komunitas yang sebagian besar dari para anggotanya masih belum sejahtera secara ekonomi adalah perbuatan yang tidak beretika.[34]

[34] Disampaikan oleh informan yang bersangkutan ketika ia menjadi *muwajih* (pengisi materi) dalam forum *halaqah* yang dihadiri peneliti pada hari Sabtu 12 Februari 2011 dan Senin 14 Februari 2011 di Depok.

Dalam pandangan Bourdieu, sesungguhnya yang terjadi adalah pertarungan simbolik, kontestasi antara *orthodoxy* dan *heterodoxy* berlatar *doxa* yang sebelumnya dianggap final. PKS bukan sekedar Partai Islam, tetapi Partai Dakwah, atau PKS bukan hanya partai, namun juga jemaah, adalah contoh ekspresi dari *doxa* tersebut. Semula, diskursus antara *orthodoxy* dan *heterodoxy* berlangsung pada tataran yang lebih praktis, misalnya tentang gaya hidup, perilaku politik, dan sikap terhadap sumber daya. Hal ini mengkonfirmasi pendapat Hwang dan Mecham (2010) bahwa *tensions* di antara kelompok-kelompok yang ada di PKS – yang disebutnya puritan dan pragmatis – dipicu oleh tiga hal, yaitu bagaimana gaya hidup yang dipandang layak bagi kader PKS, seterbuka apa PKS seharusnya, serta sejauh apa PKS dapat memoderasi ideologi dan strateginya dalam rangka meraih kemenangan.

Namun belakangan terdapat indikasi yang cukup kuat adanya upaya-upaya dari suatu kelompok untuk menarik hal-hal yang tadinya merupakan *doxa*, bagian dari *universe of undisputed*, menjadi *field of opinion*, atau *universe of discourse*, dan mengartikulasikannya dalam bentuk *heterodoxy*. Wacana PKS sebagai "Partai Terbuka" adalah contohnya. Dengan kata lain, *universe of undiscussed* cenderung menyempit, sedangkan *universe of argument* cenderung meluas. Dalam logika Bourdieu, tentu saja hal ini mengundang reaksi perlawanan, berupa lontaran *orthodoxy* dari kelompok yang berbeda. Tabel 4.11 sesungguhnya juga memberikan sekelumit gambaran tentang dinamika pertarungan simbolik yang terjadi. Hal-hal yang menggambarkan sikap kelompok *religious movement oriented* semula merupakan *orthodoxy*, sementara *heterodoxy* yang tadinya merupakan lawannya dapat dilihat pada kolom yang menggambarkan sikap kelompok *political party oriented*. Namun demikian, pasca Pemilu 2004, dan lebih jelas lagi pasca Pemilu 2009 dan Munas PKS 2010, wacana yang semula merupakan *heterodoxy* praktis telah berhasil menjadi *doxa* yang baru, sehingga wacana yang semula adalah *orthodoxy* kini menjadi *heterodoxy*.

Di sisi lain, wacana yang diusung oleh masing-masing kelompok tersebut dapat pula dipandang sebagai indikator dari habitus kolektif mereka. Suatu habitus kolektif bukan hanya menjadi perekat tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang (Ritzer dan Goodman, 2003), namun juga *"menu of solutions"*

yang dirujuk oleh para pengambil keputusan dalam kelompok atau organisasi (Dobbin, 2008). Sebagai habitus, ia merupakan skema yang digunakan agen untuk menghasilkan praksis, sekaligus mempersepsi dan mengapresiasi praksis dalam konteks interaksi timbal-baliknya dengan arena. Sebagai contoh, habitus kelompok *religious movement oriented* tentang gaya hidup membuat mereka memberikan apresiasi yang rendah, yang diekspresikan dalam bentuk kritik, terhadap kecenderungan "gaya hidup mewah" yang ditampilkan oleh beberapa kader, atau gaya komunikasi politik yang dinilai cenderung keras, kasar, dan arogan, karena praksis-praksis tersebut bertentangan dengan habitus mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang kader yang sangat senior:

> "Bahwa kesederhanaan itulah justru yang menarik simpati, karena Rasulullah saw sendiri sudah menyatakan, 'Berzuhudlah *fii maa aidinnas, yuhibbukannas*'. Kalau kamu mau berzuhud terhadap apa saja yang sudah dimiliki orang lain, apa itu kekuasaan, ekonomi, harta dan lain sebagainya maka kamu akan banyak disimpati oleh manusia",

Atau penuturan seorang anggota Majelis Syura, "Kalau saya berpendapat sampai sekarang, itu di luar platform PKS sebagai Partai Dakwah, cara-cara kasar gitu". Demikian pula seorang mantan eksekutif puncak partai yang mengatakan, "Kan ada seorang kader, sampe keriting lah wajahnya itu ya, kalo boleh dibilang keriting wajahnya berdebat sampai uratnya keluar". Sebaliknya, kelompok *political party oriented* bergerak sangat progresif dalam mengakses, menguasai, dan mengakumulasi sumber daya finansial, karena habitus mereka memberikan skema berpikir yang mengatakan bahwa uang adalah bagian dari logika kemenangan, sebagaimana penuturan seorang informan, "Anda tidak mungkin bertumbuh tanpa sumber daya. Tetapi bagaimana kita mau bertumbuh kalo kita bukan hanya tidak memasukkan sumber daya dalam struktur berpikir kita, tapi juga anti sumber daya? Ya kan?" Dengan demikian, tindakan seorang agen dalam arena untuk mengusung *orthodoxy* atau *heterodoxy* tertentu juga merupakan bentuk dari praksis yang dihasilkan oleh skema yang terdapat dalam habitusnya ketika berjumpa dengan realita yang dihadapinya di arena.

Situasi di atas membenarkan tesis Bourdieu, bahwa seluruh arena, termasuk arena Jemaah Tarbiyah/PKS, hakikatnya adalah arena pertarungan. Dalam kasus PKS, arena pertarungan tersebut bersifat multisegmen, di dalam dan

di luar Majelis Syura, dalam *the party in central office, the party in public office,* maupun *the party on the ground*, walaupun ekspresi dan intensitas pertarungan di tiap segmen berbeda-beda, karena para agen menyesuaikan praksis dan strategi yang mereka mainkan dengan kondisi arena, dan pilihan-pilihan yang terbuka juga sangat ditentukan oleh posisi objektif mereka di masing-masing arena. Secara umum, sebagaimana dituturkan oleh beberapa informan, pergulatan di segmen *the party on the ground* relatif tidak begitu sengit, jika dibandingkan dengan dua segmen yang lain. Hal ini terjadi karena para agen di segmen ini relatif lebih homogen, atau dengan kata lain, memiliki habitus yang berdekatan, yang menghimpun mereka ke dalam kelompok *religious movement oriented*. Hal ini tergambar dari penuturan seorang kader senior, "Saya keliling Indonesia itu luar biasa kader-kader itu. Ya, betul-betul hasil pembinaan itu telah membangun suatu loyalitas yang bagus". Demikian pula apa yang dikatakan seorang mantan pengurus DPP yang lalu, "Jadi gini, PKS ini kan kalau kita mau umpamakan seperti hutan, tetap sehat, tetap hijau. Saya kemarin dengan izin Allah, Musda kemarin sempat keliling. Luar biasa. Komitmen *ikhwah*, kader".

Relatif tajamnya pertarungan simbolik yang terjadi di PKS jelas terlihat jika kita menyimak artikel surat kabar yang peneliti kutip di awal Bab 1 dan di awal bab ini. Mari kita simak bagian lain dari artikel yang sama:

> "Sebenarnya, selain membahas alternatif kepemimpinan nasional, PKS juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi, dan power sharing ... Bisa dikatakan, PKS memelopori suatu tradisi penting dalam kancah politik nasional. **Sayang sekali, inisiatif genuin itu tak dicerna publik luas karena tenggelam oleh manuver dan pernyataan elite PKS yang memancing kontroversi. Masyarakat jadi menangkap kesan keliru dari penampilan partai yang lahir di era reformasi itu**" (Waluyo, 2009).

Dengan mencermati bagian yang ditebalkan pada kutipan di atas, dengan jelas kita melihat posisi yang diambil penulis dalam konstelasi pertarungan yang terjadi, sekaligus praksis yang yang dipilihnya sebagai agen, yaitu mengkritik dengan tajam praksis yang diambil oleh agen-agen lain yang posisinya berbeda. Sebenarnya, jauh sebelum terbitnya artikel tersebut, jejak-jejak pertarungan

simbolik itu juga terdapat pada dokumen resmi partai, yaitu Platform Kebijakan Pembangunan PKS, seperti dikutip di bawah ini:

> "**Sejak PK Sejahtera menjadi bagian dari koalisi SBY-JK tahun 2004, citra 'Bersih dan Peduli' kurang kuat menggema**. Kisah-kisah heroik sebelum 2004 yang merupakan pembuktian 'Bersih dan Peduli' di ruang publik seakan tenggelam oleh langkah-langkah politik yang mencerminkan kegamangan antara sebagai partai oposisi atau bagian dari pemerintahan".

Dilanjutkan dengan kutipan berikut ini:

> "Tarik-menarik antara tantangan dan peluang ini tentu saja harus disikapi dengan arif dan hati-hati **agar tidak terjebak dalam pragmatisme dan perilaku politik primitif**. Pada titik ini penerjemahan dan elaborasi makna 'Bersih dan Peduli' perlu semakin diperjelas. Disadari bahwa dalam perjalanan 3,5 tahun sejak 2004 penerjemahan ini belum membuahkan satu kejelasan dan standardisasi makna 'Bersih dan Peduli' versi PK Sejahtera. **Yang terlihat adalah ijtihad-ijtihad pribadi para kader dalam menerjemahkan 'Bersih dan Peduli' ketika berhadapan dengan tantangan dan peluang.** Karenanya pemaknaan 'Bersih dan Peduli' PK Sejahtera menjadi terasa beragam. Tentu ini tidak menguntungkan bagi penciptaan *brand image* PK Sejahtera, bahkan dapat mengaburkan orisinalitasnya".

Bagian-bagian yang ditebalkan dari dua kutipan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa penerbitan Platform merupakan bentuk praksis perlawanan dalam sebuah pertarungan simbolik yang berlangsung dalam arena PKS. Kedua kutipan di atas, merupakan ekspresi dari *orthodoxy* yang tentunya dilontarkan oleh agen, dalam hal ini adalah Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) yang merupakan agen kolektif, sebagai respon terhadap *heterodoxy* dari agen-agen lain, yang secara implisit disebutkan dalam kutipan tersebut sebagai mereka yang ditengarai terjebak dalam "pragmatisme dan perilaku politik primitif", atau "melakukan ijtihad-ijtihad pribadi dalam menerjemahkan 'Bersih dan Peduli' ketika berhadapan dengan tantangan dan peluang". Namun bisa juga dibaca sebaliknya: Platform PKS adalah *heterodoxy* terhadap kecenderungan pragmatisme yang terlanjur sudah menjadi *doxa* baru di PKS. Hakikat Platform PKS sebagai praksis perlawanan juga ditegaskan oleh seorang kader senior yang mengatakan bahwa penerbitan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Syura tersebut merupakan upaya yang bersifat substantif untuk mengatasi langkah-langkah politik yang pragmatis dan transaksional.

Hasil pertarungan simbolik antara agen yang mengusung *orthodoxy* dan *heterodoxy* sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing agen memobilisasi berbagai jenis modal dan kemudian mengkonversinya menjadi modal simbolik *(symbolic capital)*, berupa pengakuan sosial yang terlembagakan secara formal-eksplisit, seperti status, jabatan, properti tertentu, maupun yang diterima oleh kelompok secara informal-implisit, berupa penghormatan dan penghargaan. Seorang kader menyoroti kemampuan kelompok *political party oriented* dengan AM sebagai *icon* dalam mengkonversi modal ekonomi menjadi modal simbolik dengan menuturkan, "Karena dengan posisi itu AM ada uang. Dia membangun kekuatan. FH itu. Dan mereka paham cara membangun kekuatan itu lewat kekuatan uang ... Misalnya siapa disuruh umrah ... Kader. Hadiahnya umroh, naik haji. Kan berasa". Kelompok ini juga mampu memobilisasi modal sosial yang kemudian dikonversi menjadi modal simbolik, misalnya dengan membangun jaringan di berbagai lini strategis baik di pusat maupun daerah. Modal kultural pun tak luput menjadi kekuatan kelompok ini, khususnya dalam bentuknya yang lebih spesifik, yaitu modal spiritual, baik yang sifatnya *embodied* dalam habitus, seperti pengetahuan syariah dan kemampuan berbahasa Arab, maupun manifestasi yang terobjektifikasi, seperti berbagai buku yang banyak ditulis oleh AM, dan gagasannya tentang kaitan antara Islam dan sumber daya yang secara masif disosialisasikan kepada para kader PKS. Menurut Verter (2003), penguasaan modal kultural ini sangat penting, karena ia merupakan modal yang paling kompleks, baru, dan memiliki manfaat analitis dalam menjelaskan akumulasi modal simbolik dan kekuasaan simbolik. Di samping itu, jika diinvestasikan dengan tepat modal spiritual akan memberikan keuntungan sosial-ekonomi, mobilitas sosial, dan kemampuan memobilisasi komitmen yang akan meningkatkan kapasitas tindakan kolektif. Kiprah AM dan kelompok *political party oriented* menggambarkan dengan jelas keberlakuan argumentasi Verter tersebut.

Keunggulan dalam mengakumulasikan modal ekonomi, modal sosial, dan modal kultural, lalu mengkonversinya menjadi modal simbolik, khususnya modal politik, baik yang bersifat individual (karisma, pengaruh), maupun institusional (jabatan, posisi), membuat kelompok *political party oriented* memiliki kekuasaan

simbolik *(symbolic power)* yang besar, yang membuat kelompok ini mampu mendeskripsikan individu, kelompok, dan organisasi melalui kekuatan verbal, mendefinisikan situasi yang melatari suatu interaksi yang sedang berlangsung, menetapkan asosiasi dan disosiasi, serta merumuskan dan melontarkan *heterodoxy* yang dengan kuat menggugat *doxa*, bahkan kemudian berhasil menjadi *doxa* baru. Contohnya, seorang informan mengungkapkan adanya perubahan makna kontribusi sebagai berikut:

> "Kalau dulu yang dikatakan satu orang kader yang memiliki kontributor bagus itu kan yang bagaimana ia bisa merekrut *halaqah* segala macem dan sebagainya. Dipuji-puji ini. Nah sekarang sudah terjadi perubahan dalam pada sebagian orientasi. **Maka yang disebut berkontribusi itu ya yang tadi. Bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan kekuasaan.** Nah sementara yang begitu-begitu sudah nggak dianggap. **Nah ketika orang itu dianggap punya suatu kontribusi lalu ya ditempatkan pada suatu posisi yang bagus lah**".

Kekuasaan simbolik membuat kelompok *political party oriented* dapat melontarkan *heterodoxy* (kontribusi yang berharga dari kader adalah mendatangkan uang dan kekuasaan) yang mengalahkan *orthodoxy* (kontribusi yang berharga dari kader adalah merekrut *halaqah*) dan menjadi *doxa* baru, sehingga mereka dapat mendefinisikan individu dan kelompok dengan cara yang berbeda, termasuk menentukan siapa yang dianggap pantas menduduki posisi-posisi strategis. Atau contoh lain, berbagai situasi yang oleh kelompok *religious movement oriented* disoroti dengan prihatin, dan didefinisikan sebagai menguatnya pragmatisme, oleh kelompok *political party oriented* didefinisikan secara berbeda, sebagaimana yang dituturkan seorang informan, "Menjadi konservatif dan menjadi progresif itu adalah fungsi, sama persis seperti menjadi tertutup atau terbuka. Pada waktu tertentu kita bersikap konservatif, pada waktu tertentu kita bersikap progresif", atau juga pernyataan informan lain dalam menggambarkan dinamika PKS:

> "Semakin sesuai dengan *demand*. Sebuah partai yang dinamis, *concern* terhadap penanganan masalah ekonomi, bisa memberi makan rakyatnya. Bisa mengelola apa, negaranya, sukses menjalankan amanah-amanah yang diberikan kepadanya, terutama hal ekonomi. Itu yang dilihat oleh publik, dan PKS mengarah ke sana".

Kemenangan dalam pertarungan simbolik meningkatkan posisi objektif kelompok *political party oriented* sebagai agen kolektif dalam arena PKS. Hal tersebut bukan hanya mendatangkan sejumlah modal simbolik baru, khususnya modal politik, yang dapat didayagunakan dalam pertarungan berikutnya, namun juga memberi ruang kepada agen ini untuk memodifikasi strategi, atau bahkan merancang strategi baru yang lebih canggih, untuk melipatgandakan keunggulannya. Contohnya, akumulasi modal politik institusional, berupa penguasaan posisi-posisi strategis, baik di DPP, maupun di Fraksi.

Uraian di atas menunjukkan keberlakuan pendapat Bourdieu (1989) bahwa kemampuan konstitutif *symbolic power* ditentukan oleh akumulasi *symbolic capital* yang diperoleh aktor dari pertarungan simbolik sebelumnya. AM sebagai *icon* kelompok *political party oriented,* mampu meyakinkan *Murraqib 'Am,* atau *goverment* dalam model *the polity* dari Tilly, bahwa ia mampu mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi visi dan gagasan pimpinan. Di samping itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa distribusi modal membentuk struktur arena, sekaligus mengatur pola kerja arena, dan menentukan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh aktor dalam arena, sebagaimana ditegaskan oleh Bourdieu dan Wacquant (1992). Akumulasi modal simbolik secara masif membuat kelompok *political party oriented* mampu mengokohkan gagasan tentang pentingnya merebut sumber daya sebagai arus berpikir utama dalam PKS, bahkan menjadi *doxa* baru. Implikasinya, uang dan kekuasaan menjadi pemaknaan yang dominan dari apa yang disebut "berkontribusi kepada partai". Dari sudut pandang Tilly (1978) dapat dijelaskan bahwa keberhasilan kelompok *political party oriented* dalam mengorganisasikan tindakan kolektif yang efektif kemudian membuatnya menerima respon eksternal yang semakin positif, berupa tambahan manfaat dan/atau pengurangan biaya, atau peningkatan kekuasan dan/atau penurunan represi yang diterimanya dalam melakukan tindakan kolektif berikutnya.

Jika dikaji dengan model lingkungan politik dari Tilly (1978), hasil sementara dari pertarungan simbolik yang terjadi adalah semakin kokohnya posisi kelompok *poltical party oriented* sebagai anggota *the polity*, sehingga mereka semakin mudah mengakses sumber daya yang dimiliki oleh *"government"*, dalam

hal ini adalah *Murraqib 'Am* sebagai pimpinan tertinggi PKS, setidaknya berupa dukungan dan legitimasi dari yang bersangkutan atas berbagai wacana yang dilontarkan dan praksis yang ditunjukkan. Sebaliknya, posisi kelompok *religious movement oriented* dalam *the polity* cenderung melemah, bahkan sebagian tergelincir ke luar dari *the polity* dan kembali bertarung sebagai *challengers*. Berbagai bentuk penyingkiran atau pengasingan ke dalam struktur yang kurang strategis, ataupun menguatnya apatisme sebagian kader PKS walaupun tidak keluar dari partai, menunjukkan melemahnya posisi mereka dalam *the polity*.

Tidak boleh dilupakan bahwa dalam Jemaah Tarbiyah/PKS, harmoni merupakan salah satu nilai yang dianggap penting. Implikasinya, pertarungan simbolik untuk bertahan dalam *the polity* jarang berlangsung secara terbuka, sehingga konflik politik tertutup *(covert political conflict)* sebagamana dikemukakan oleh Morill, Zald, dan Rao (2003) adalah fenomena yang lebih lazim. Tidak banyak bentuk ekspresi material dari konflik politik tertutup yang terjadi. Yang sedikit itupun berupa sabotase tidak langsung. Seorang informan mengemukakan dua contoh yang dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda. Di satu sisi, para pengurus DPP di masa TS menjadi Presiden Partai menolak hadir dalam rapat-rapat TPPN yang dipimpin AM, sehingga tim ini menjadi tidak efektif, dan praktis bubar dengan sendirinya. Di sisi lain, AM dan kawan-kawan menempatkan ketiga orang mereka, MS, FH, dan AR, di Pansus Century tanpa melalui pembicaraan dengan Ketua Fraksi dan Presiden Partai.

Konflik politik tertutup yang terjadi di PKS lebih banyak diekspresikan dalam bentuk simbolik, baik berupa manipulasi komunikasi untuk menyembunyikan maksud yang sesungguhnya, pelarian simbolik *(symbolic escape)*, maupun konfrontasi yang diikuti moderasi *(ritualized conflict)*. Penghalusan berbagai ekspresi verbal oleh sebagian besar informan untuk menyamarkan faksionalisasi dan konflik internal yang terjadi merupakan contoh manipulasi komunikasi. Adanya sejumlah tokoh PKS yang memilih untuk kembali menekuni berbagai aktifitas asal mereka ketimbang terlibat dalam struktur partai, adalah contoh *symbolic escape*. Sedangkan *syura* yang merupakan salah satu komponen inti dalam budaya PKS, maupun berbagai *taujih* yang

diberikan oleh Ustadz Hilmi Aminuddin kepada para kader adalah contoh *ritualized conflict*.

Tingkat kolektifitas dari kedua kelompok yang terlibat dalam konflik politik tertutup ini bergerak di antara tindakan bersama yang tidak terorganisir, tindakan bersama yang dipandu oleh kesamaan yang bersifat implisit, koordinasi informal, hingga koordinasi formal. Respon-respon sporadis dari tokoh-tokoh di kelompok *religious movement oriented* terhadap gaya hidup dan perilaku politik kelompok *political party oriented* merupakan contoh dari tindakan bersama yang tidak terorganisir atau dipandu oleh kesamaan implisit. Suara faksi idealis-konservatif untuk mendukung PKS mengusung Amien Rais sebagai Capres 2004 adalah contoh koordinasi informal. Sementara itu, penyusunan, penerbitan, dan sosialisasi Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan contoh kolektifitas di tingkat koordinasi formal.

Peneliti menyayangkan bahwa sejauh yang dapat diamati, konflik tertutup yang berlangsung di PKS baru menghasilkan keterbebasan psikologis atau individual, dan gugatan terhadap praktik-praktik yang berlangsung dalam kehidupan organisasi. Belum terlihat adanya prakondisi untuk transformasi yang lebih mendasar. Hal ini terjadi karena sangat kuatnya nilai *confirmity and compliance*[35] dalam budaya PKS, sehingga berbagai persoalan, friksi, dan gejolak yang muncul lebih banyak diredam, atau teredam dengan sendirinya, melalui mekanisme *tafahum* atau *tasamuh*, yang didorong oleh keinginan untuk menjaga keutuhan jemaah. Dengan kata lain, belum tumbuh sebuah tradisi untuk "meletakkan persoalan di atas meja", membedahnya dengan kritis, untuk kemudian mencari solusi optimum yang dijadikan rujukan bersama. Misalnya, seorang petinggi PKS menyatakan keyakinannya bahwa proses *shifting* dalam *mindset* para kader untuk menerima ide-ide keterbukaan, sumber daya, dan lain-lain, sudah selesai, sehingga PKS akan mampu bergerak dengan energi penuh dalam menyongsong Pemilu 2014 yang akan datang. Optimisme yang sama juga dikemukakan oleh elit PKS dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

[35] Tentang hal ini dibahas lebih rinci di Bab 3, khususnya sub bab 3.2, Potret Budaya Organisasi PKS.

2011 yang lalu.[36] Menurut hemat peneliti, pendapat tersebut tidak menggambarkan realita dengan tepat. Tingkat keragaman yang tinggi dalam pendapat-pendapat para informan penelitian ini, yang sebagian besar adalah kader senior PKS, mencerminkan bahwa pertarungan simbolik yang serius masih jauh dari selesai.[37]

Dalam konteks pertarungan simbolik tersebut, kelompok *political party oriented* berupaya untuk memperkuat kekuasaan simbolik mereka dengan mengoptimalkan *impression management* di hadapan publik PKS. Dalam hal ini AM memegang lakon utama dengan mendayagunakan modal kultural yang dimilikinya, yaitu latar belakang ilmu syariah dan kemampuan berbahasa Arab. Bersama-sama dengan modal lainnya, khususnya modal ekonomi, modal kultural tersebut dengan cukup efektif ditransfer menjadi modal simbolik yang meningkatkan kekuasaan simbolik dirinya dan kelompoknya.

Namun tidak semua *impression management*, tampilan di *front stage* sebagai ekspresi dari apa yang ada dalam habitus, yang ditunjukkan oleh para *icon* kelompok *political party oriented*, mendapatkan apresiasi (atau *difference* dalam terminologi yang digunakan Goffman) dari publik PKS sebagai audiens. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini. Misalnya, penuturan seseorang tentang AM:

> "Sebenarnya nggak kuat-kuat banget, cuma mereka menguasai komunikasi publik, sehingga bisa jadi mungkin jadi Sekjen lagi, karena nggak mungkin dia jadi Presiden. Terlalu banyak yang menolak ... Dia sendiri sangat ingin malah, dari dulu. Tapi resistensi masih sangat tinggi. Dan ia tidak punya kekuatan sampai ke situ saya kira".

Informan lainnya mengatakan, "Itulah rahasia kenapa AM melenggang. Karena AM kan punya *leadership* ... lainnya nggak bisa ngimbangi ... meskipun saya kira tidak piawai, tidak hebat-hebat amat". Dalam padangannya, AM adalah seorang *mutsaqqaf*, orang yang memungut potongan-potongan gagasan dari berbagai

[36] Informasi ini diperoleh peneliti dari seorang informan dalam pembicaraan informal pada hari Kamis 3 Maret 2011 di Mushalla FISIP UI Depok.

[37] Seorang informan dalam diskusi informal dengan peneliti pada hari Senin 20 Juni 2011 di Depok menegaskan bahwa demotivasi yang cukup serius di kalangan sebagian kader PKS masih terus berlangsung hingga saat ini. Dinamika PKS di tingkat elit yang disorot dengan sangat intens oleh media massa berkontribusi signifikan bagi berlanjutnya kondisi tersebut. Sementara itu, langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Partai untuk kembali mengintensifkan *tarbiyah* belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengangkat kembali motivasi kader.

sumber, lalu menjahit semuanya menjadi satu, sehingga yang keluar adalah pemikiran yang melompat-lompat, yang tidak dipertimbangkan dengan matang dan tidak memiliki dasar pijakan yang kuat. Demikian pula pernyataan seorang mantan eksekutif puncak PKS, “Iya tapi penampilan publik yang ini kan tidak disukai dengan publik juga. Publik itu senang dengan pemimpinnya yang sederhana, rendah diri, *under* apa istilahnya, di bawah ini lah merendahkan diri. Publik suka begitu”. Atau pernyataannya yang lain tentang kapasitas AM di bidang syariah, “Tapi diperkirakan dia kuat, tapi ternyata nggak juga”.

BAB 5
PEMBENTUKAN DAN DINAMIKA HABITUS KADER PKS

5.1. *Tarbiyah* sebagai Proses Membangun Habitus Kolektif

Dalam bab ini peneliti mengalokasikan ruang yang cukup luas untuk mengelaborasi proses *tarbiyah* karena ia bukan hanya tulang punggung proses kaderisasi di PKS, namun lebih dari itu, ia adalah proses inti dalam pembentukan habitus dakwah yang dimulai sejak awal Jemaah Tarbiyah berkiprah sebagai gerakan keagamaan *(religious movement)*. Walaupun kemudian Jemaah Tarbiyah memilih mentransformasi dirinya menjadi PKS, konstruksi ”Partai Dakwah” yang sampai saat ini belum dilepaskan menunjukkan bahwa habitus dakwah tersebut tetap penting dan tidak dapat dikesampingkan, walaupun habitus politik kekuasaan pun semakin menguat.

Bagaimana Jemaah Tarbiyah/PKS memahami dakwah dalam konteks sebuah gerakan keagamaan? Platform PKS memberikan rumusan sebagai berikut:

> ”Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktifitas terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati *(shakhsiyyah islamiyah)* **dilakukan dalam kerangka transformasi sosial** ... Oleh karena itu pribadi-pribadi itu mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah *(syakhsiyyah da’iyyah*), sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial” (MPP PKS, 2007: 36).

Uraian di atas menunjukkan bahwa Jemaah Tarbiyah/PKS memahami dakwah dalam dimensi perubahan mendasar, bukan saja di tataran individu, namun juga di tingkat masyarakat, bahkan negara, walaupun sebagaimana dikatakan oleh Baswedan (2004), pembentukan negara Islam, maupun pemberlakukan syariat Islam secara formal di Indonesia, tidak menjadi agenda utama PKS, setidaknya dalam waktu dekat ini. Pemahaman dakwah yang komprehensif tersebut dipertegas lagi oleh pernyataan, ”Dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah **suatu gerakan dakwah yang menyeluruh *(dakwah syamilah)***, dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit” (MPP PKS, 2007: 36).

Sebagai ”Partai Dakwah”, kekuatan kader adalah kekuatan utama, sehingga dapat dipahami jika kaderisasi dengan *tarbiyah* sebagai tulang-punggungnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Platform PKS menegaskan sebagai berikut:

> ”Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri ... **Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan**, kesamaan *fikrah*, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah” (MPP PKS, 2007: 36).

5.1.1. Gambaran Umum Proses *Tarbiyah*

Tarbiyah nukhbawiyah (pendidikan dan pembinaan kader, selanjutnya disebut *tarbiyah*) merupakan tulang punggung proses kaderisasi di Jemaah Tarbiyah/PKS, di mana ia dipahami sebagai upaya untuk membangun sosok *syakhshiyyah islamiyyah* (pribadi muslim yang memahami dan menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, menyeluruh, integral), *syakhshiyyah da’iyah* (pribadi yang bekerja mendakwahkan Islam), *syakhshiyyah ijtima’iyyah* (pribadi yang memiliki kiprah nyata dalam bermasyarakat), dan *syakshiyyah dauliyah* (pribadi yang mampu turut berperan dalam mengelola negara). Secara lebih spesifik, dalam konteks persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah setelah menjadi partai, seorang informan memandang *tarbiyah* sebagai sebuah mekanisme pendewasaan, di mana para kader diajak untuk membangun cita-cita besar yang terkait dengan bangsa dan umat Islam secara keseluruhan, sekaligus berlatih mengelola perasaan mereka ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak disukai, perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, dan ketidakpuasan, sehingga berbagai gejolak yang timbul relatif lebih mudah untuk diatasi. Demikian penting dan sentralnya peran *tarbiyah* dalam kehidupan para kader PKS dapat dicermati dari penuturan seorang pengurus DPP berikut ini:

> “Orang seperti Ustadz Hilmi, orang seperti Ustadz Salim, masih *liqa*. Bahkan kalo kata Ustadz Salim, ini aja **nggak datang *liqa* itu maksiat**, gitu. Ustadz Hilmi sakit bengkak, asam urat. Beliau satu grup sama Ustadz Lutfi, sampe Ustadz Lutfi itu, udah kita aja yang datang ke Ustadz Hilmi. ‘Setengah jam aja *liqa*-nya Ustadz, kami ada keperluan lain-lain’. Udah Ustadz baru tenang. Jadi ada proses *tarbiyah* yang *mustamirah*, berkesinambungan”.

Penuturan tersebut menunjukkan, dalam tradisi PKS *tarbiyah* merupakan kewajiban yang berlaku hingga pada kader di jenjang yang tertinggi. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, selalu diupayakan agar *tarbiyah* dapat berjalan, walaupun mungkin tidak dengan sempurna sebagaimana ketika kondisi normal. Bahkan dibangun keyakinan bahwa melalaikan *tarbiyah*, atau tidak bersungguh-sungguh melakukannya, adalah bentuk kemaksiatan.

Tarbiyah terdiri dari *tarbiyah dzatiyah* dan *tarbiyah jama'iyyah*. *Tarbiyah dzatiyyah* adalah proses pembinaan diri yang dilakukan oleh masing-masing pribadi kader, misalnya dengan melakukan ibadah-ibadah ritual yang *sunnah* (dianjurkan), seperti *qiyamu lail* (shalat malam), puasa sunnah, zikir, membaca Al Qur-an, dan lain-lain. *Tarbiyah jama'iyyah* adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh jemaah. *Tarbiyah jama'iyyah* dilakukan bertingkat-tingkat berdasarkan jenjang keanggotaan masing-masing kader. Menurut Bab III Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PKS, partai ini memiliki enam jenjang keanggotaan, yang terbagi ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu Anggota Pendukung dan Anggota Inti. Anggota Pendukung terdiri dari Anggota Pemula *(Tamhidi)* dan Anggota Muda *(Muayyid)*. Sedangkan Anggota Inti terdiri dari Anggota Madya *(Muntasib)*, Anggota Dewasa *(Muntazhim)*, Anggota Ahli *('Amil)*, dan Anggota Purna *(Mutakhasis)*. Pertemuan pekanan dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan maksimum 12 orang adalah sarana *tarbiyah* yang utama. Untuk Anggota Pendukung kelompok tersebut dinamakan *halaqah* yang dikelola oleh *murabbi*, dan untuk Anggota Inti dinamakan *usrah* yang dipimpin oleh *naqib*. Pengelola *tarbiyah (murabbi, naqib)* setidaknya berada satu tingkat di atas para peserta *tarbiyah* yang dikelolanya. Definisi tiap jenjang keanggotaan, serta karakter dan tujuan *tarbiyah* pada masing-masing jenjang terdapat pada tabel 5.1.

Jika dicermati, terlihat salah satu karakter utama *tarbiyah*, yaitu *tadarruj*, di mana pembebanan kepada para kader PKS dan pembangunan komitmen dilakukan secara bertahap, mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang lebih penting ke yang penting, dan dari hal-hal yang sudah disepakati ke hal-hal yang masih diperselisihkan di kalangan kaum muslimin. Di jenjang-jenjang yang lebih awal para peserta diajak dan diminta berkomitmen kepada ajaran Islam secara umum. Semakin tinggi

marhalah anggota yang bersangkutan komitmen tersebut dibuat semakin spesifik kepada Jemaah Tarbiyah/PKS. Di samping itu, semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin terintegrasi pula kehidupan kader ke dalam jemaah/partai. Hal tersebut terlihat dari bagian-bagian yang ditebalkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Definisi dan Tujuan Pembinaan Tiap Jenjang Keanggotaan PKS[1]

Definisi	Tujuan
Pemula *(Tamhidi)*	
Seseorang yang memiliki sifat-sifat terpuji, perangai Islam asasi, tidak terkotori oleh syirik dan tidak memiliki hubungan dengan institusi yang memusuhi Islam.	**1. Memperkenalkan prinsip-prinsip umum Islam, baik *aqidah, syariah,* maupun *akhlaq*.** 2. Memunculkan lingkungan yang sesuai untuk berkomitmen kepada prinsip-prinsip Islam. 3. Memperkokoh kecenderungan peserta untuk berkomitmen kepada prinsip-prinsip Islam. 4. Mengembangkan sifat-sifat terpuji dan perangai Islam asasi yang ada pada peserta melalui kajian terhadap ilmu-ilmu *marhalah* (bidang studi). 5. Membentuk berbagai kecenderungan dan orientasi-orientasi positif menuju penyebarluasan *fikrah* (pola pikir) Islam, dan memberikan perhatian kepada berbagai problematika dunia Islam 6. Meneliti tingkat kredibilitas berbagai kecenderungan dan orientasi-orientasi positif yang dimiliki oleh peserta tersebut.
Muda *(Muayyid)*	
Seorang *tamhidi* yang mendukung *fikrah*, memiliki perhatian untuk menyebarluaskan-nya, memiliki perhatian terhadap problematika kaum muslimin secara umum, dan mempelajari sebagian daripada konsep-konsep asasi dakwah.	1. Menguasai ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang diambil dari Qur-an, sunnah, dan *sirah salafush shalih* sesuai dengan *marhalah*-nya. 2. Mengenal sejumlah besar tokoh-tokoh Islam, ulama, dan *mujahid* yang berkhidmat untuk Islam. **3. Mengetahui urgensi dan keharusan beramal *jama'i* untuk berkhidmat demi Islam dan kaum muslimin.** **4. Memiliki kemampuan untuk memilih jemaah yang dapat mewujudkan pemahaman Islam yang benar.** 5. Menghiasi diri dengan *akhlaq* Islam dan bertata krama dengan adab-adabnya, baik lahir maupun batin. 6. Menanamkan perhatian untuk menyebarluaskan *fikrah* Islam dan perhatian kepada berbagai problematika kaum muslimin. 7. Menanamkan kebiasaan untuk *indibath* (disiplin) dan tidak menyia-nyiakan waktu.

[1] Diolah dari buku Manhaj Tarbiyah 1427 H, halaman 63-70.

Definisi	Tujuan
Madya *(Muntashib)*	
Seseorang yang memenuhi segala persyaratan *muayyid* dan **berada di dalam barisan pada tangga pertama keterikatan** di mana ia melaksanakan berbagai tugas dakwah yang dibebankan kepadanya dan membela dakwah.	1. Memperkokoh pengetahuan peserta mengenai urgensi dan kemestian komitmen ilmiah dan manajerial. 2. Memperhatikan berbagai hakikat dan nilai-nilai yang ada dalam *manhaj* pada aspek pemahaman dan penguasaan. 3. Membekali peserta dengan berbagai kemahiran yang menjadi sasaran pada ilmu-ilmu *marhalah*, kegiatan-kegiatannya, serta pelatihan-pelatihannya. 4. Mengembangkan berbagai orientasi dan kecenderungan positif berupa perhatian, obsesi, semangat, dan pengorbanan untuk dakwah. **5. Memikul tanggung jawab dan tugas kerja-kerja dakwah yang dibebankan kepada peserta dengan memperhatikan aspek ketelitian dan *itqan* (profesionalisme).** 6. Berperan serta aktif dalam membentuk rumah tangga dan masyarakat yang Islami. **7. Merealisasikan rukun-rukun dan adab-adab *usrah*.**
Dewasa *(Muntazhim)*	
Muntashib yang melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta disertai pengenalan terhadap berbagai keadaan gerakan dakwah dan sejarahnya, **dan ia merupakan batu bata asasi di dalamnya.**	1. Memperkokoh berbagai kemahiran yang diperoleh pada *marhalah muntasib* dan meningkatkan profesionalismenya. 2. Memberikan perhatian terhadap berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran yang menjadi target pada ilmu-ilmu *marhalah* serta pelatihan-pelatihannya. 3. Memberikan berbagai kemahiran yang ditargetkan pada marhalah ini dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan, dan ikut serta secara aktif dalam berbagai pelatihan. **4. Berkorban secara maksimal dalam melaksanakan berbagai tugas dan beban yang diminta darinya.** **5. *Istifadah* (mengambil manfaat) berdasarkan pemahaman, *isti'ab* (penguasaan), analisis, dan penggalian dari sejarah gerakan dakwah dan berbagai kondisi yang dilaluinya.** **6. Berkomitmen terhadap berbagai pedoman dan keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai institusi gerakan dakwah.** 7. Bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan berbagai unsur keteladanan pada diri dan rumah tangganya.
Ahli *('Amil)*	
Seorang *muntazhimin* yang telah memiliki keahlian dan **berjanji setia untuk bekerja sesuai dengan *nizham asasi* (pedoman pokok) gerakan dakwah, serta mengerahkan secara efektif diri dan hartanya.**	1. Memperkokoh segala hal yang telah dipelajari pada *marhalah muntazim*. 2. Memberikan perhatian terhadap berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran, berikut dalil-dalil *syar'i*-nya. 3. Memberikan berbagai kemahiran yang ditargetkan pada ilmu-ilmu dan kegiatan-kegiatan *marhalah* ini dengan berbagai pelatihannya. 4. Berkomitmen dengan sempurna kepada sasaran nilai-nilai *marhalah* yang berupa *mazahir sulukiyah* (tampilan perilaku). 5. Mengembangkan berbagai kecenderungan dan orientasi positif untuk hal-hal yang menjadi konsekuensi *marhalah*, baik berupa beban, tanggung jawab, maupun pengorbanan. **6. Menyiapkan dan memberikan keahlian untuk menjadi *da'i* yang teladan yang mencerminkan dakwah, baik pada aspek pemikiran maupun pengamalan, baik pada dirinya sendiri, maupun dalam rumah tangganya, dengan cara merealisasikan rukun-rukun baiat dan segala hal yang terkandung di dalamnya, yang berupa pokok-pokok, maupun kewajiban-kewajiban.** **7. Membantu peserta dengan segala hal yang memberinya ruang penuh untuk berkontribusi, efektifitas pelaksanaan, dan produktifitas.**

Definisi	Tujuan
	8. Melatih dan memberikan keahlian kepada peserta, serta membekalinya dengan berbagai kemahiran *leadership* dan manajemen *rabbani* (yang berorientasi ketuhanan).
Purna *(Mutakhasis/Mas'ulin)*	
Seorang *'amil* yang memiliki keahlian ilmiah dan *syar'iyah* (syariat Islam), dan **kesiapan untuk memimpin serta melaksanakan beban-beban kepemimpinan itu.**	1. Menghiasi peserta dengan sifat-sifat pemimpin yang menjadi teladan, dan berbagai seni kepemimpinan yang termaktub dalam risalah-risalah yang khusus untuk itu. **2. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi dan berpengaruh besar untuk berkhidmat kepada gerakan dakwah dengan penuh keikhlasan dan totalitas.** **3. Membekali diri dengan berbagai ilmu yang bermanfaat dalam rangka menunaikan amal-amal yang dituntut oleh syarikat untuk merealisasikan tujuan-tujuan gerakan dakwah.** 4. Membekali diri dengan berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran yang termaktub dalam *manhaj marhalah mutakhasis*. **5. Mewakafkan kehidupan umum dan khususnya untuk dakwah, dan menyiapkan rumah tangganya untuk itu secara kontinyu dan berkesinambungan.**

Halaqah merupakan sarana *tarbiyah* yang sangat penting, karena melalui sarana inilah pembinaan para Anggota Pendukung dilakukan secara intensif untuk mempersiapkan mereka menjadi Anggota Inti. Pertemuan *halaqah* biasanya dilakukan satu pekan sekali, selama 2-4 jam, bertempat di rumah *murabbi* atau anggota *halaqah*, atau tempat-tempat lain, seperti mesjid/mushalla. Setiap pertemuan *halaqah* dibuka oleh seorang anggota yang berperan sebagai *mas'ul jalsah* (pembawa acara) dengan menyebut nama Allah, *bismillahirahmanirrahiim*, dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatNya, khususnya nikmat iman, Islam, dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Setelah itu, para anggota *halaqah* akan membaca Al Qur-an secara bergiliran, biasanya masing-masing satu halaman, dilanjutkan dengan *tadabbur* (pembahasan) beberapa ayat Al Qur-an yang sebelumnya dibaca, oleh *murabbi* atau salah satu anggota *halaqah* yang ditunjuk. Kemudian *murabbi* akan menyampaikan kalimat-kalimat pembukaan yang berisi motivasi, menggarisbawahi hal-hal penting dari pertemuan sebelumnya, atau memberikan apresiasi atas prestasi kolektif maupun individual.

Murabbi lalu melanjutkan dengan *talaqqi madah* (penyampaian materi). Untuk jenjang *tamhidi* dan *muayyid*, salah satu materi pokok *halaqah* adalah *rasmul bayan* (panah penjelasan), materi dasar-dasar keislaman yang disajikan dalam bentuk bagan/skema. *Rasmul bayan* disusun oleh Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai *ijtihad* untuk mempermudah proses penyampaian materi, sekaligus

mempercepat perluasan dakwah. Materi-materi *rasmul bayan* terdiri dari 99 bagan/skema yang dikelompokkan menjadi beberapa judul, yaitu *ma'na asy syahadatain* (makna dua kalimat syahadat), *ma'rifatullah* (mengenal Allah), *ma'rifaturrasul* (mengenal rasul), *ma'rifatul Islam* (mengenal Islam), *ma'rifatul insan* (mengenal manusia), *mariatul Qur-an* (mengenal Al Qur-an), *al ghazwul fikr* (perang pemikiran), golongan syaitan *(hizb asy syaithan), qadhiyyatud da'wah* (problematika dakwah), *al haqqu wal bathil* (kebenaran dan kebatilan), *takwinul ummah* (pembentukan umat), *at tarbiyyatul Islamiyyah* (pendidikan/pembinaan Islam), dan *fiqh ad da'wah* (pemahaman dakwah). Materi-materi *tarbiyah* tersebut sebenarnya dapat disampaikan dengan berbagai cara dan sarana yang sesuai, namun skema/bagan materi dalam Bahasa Arab yang dituliskan di *whiteboard* merupakan sarana yang lazim digunakan di banyak *halaqah.* Berdasarkan skema/bagan tersebut *murabbi* akan menyampaikan materi dengan merujuk kepada ayat-ayat Al Qur-an, hadits Nabi, dan bahan-bahan lain yang relevan, dan kemudian *mutarrabbi* akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Selanjutnya, jika ada, *murabbi* akan menyampaikan *ta'limat* dari struktur partai kepada para anggota *halaqah. Murabbi* tidak dibenarkan menyampaikan komentar-komentar bernada negatif, apalagi mempertanyakan, atau menyatakan ketidaksetujuan tentang suatu *ta'limat* di depan *mutarabbi*-nya. Pertanyaan atau ketidaksetujuan seperti itu harus disampaikannya kepada struktur yang ada di atasnya. *Ta'limat* yang berasal dari struktur yang paling tinggi, DPP, dapat sampai ke kader di jenjang terbawah, para *mu'ayyid* dan *tamhidi*, melalui dua jalur, yaitu jalur struktur partai, dan jalur *tarbiyah*. Jika menempuh jalur struktur partai, *ta'limat* tersebut akan disampaikan dari Sekretariat DPP ke DPW (Provinsi), lalu ke DPD (Kabupaten/Kota), lalu ke DPC (Kecamatan), lalu ke DPRa (Kelurahan/Desa), dan kemudian para *naqib,* para *murabbi*, dan akhirnya para kader sesuai dengan batasan yang ditentukan. Sedangkan jika menempuh jalur *tarbiyah, ta'limat* bermula dari Bidang Kaderisasi di pusat, ke Kaderisasi di bawahnya (Wilayah, Daerah, Cabang), lalu selanjutnya ke para *naqib,* dari *naqib* ke para *murabbi,* dan akhirnya para kader.

Dalam *halaqah* juga dialokasikan waktu untuk *mutaba'ah* (evaluasi) terhadap realisasi berbagai program dan tugas para anggota *halaqah*, termasuk pelaksanaan ibadah harian mereka. Dengan demikian, *mutaba'ah* ini merupakan penghubung antara *tarbiyah dzatiyah* dengan *tarbiyah jama'iyyah.* Di bagian akhir, kadang-kadang ada peserta yang menyampaikan *qadhayya* yang kemudian didiskusikan bersama. Sejauh mana kedekatan yang sudah terbangun dalam sebuah *halaqah* akan menentukan sejauh mana para anggotanya terbuka untuk menyampaikan persoalan-persoalan mereka dalam kelompok. *Halaqah* ditutup dengan membaca *hamdalah* (pujian pada Allah, *alhamdulillahi rabbil 'alamin), istighfar* (permohonan ampun pada Allah), dan doa penutup majelis.

Gambar 5.1
Alur Pembinaan dan *Taqwim* Kader PKS[2]

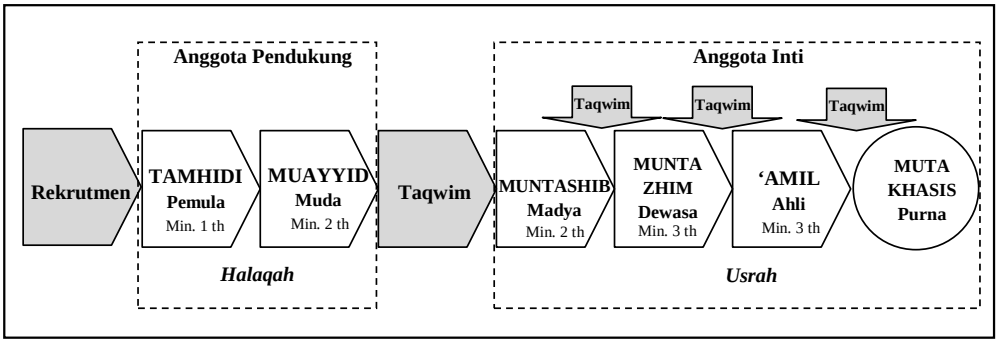

Pola pembinaan dan kaderisasi yang ketat di PKS terlihat dari adanya *taqwim*, yaitu evaluasi terhadap proses *tarbiyah* dan seleksi kenaikan jenjang peserta tarbiyah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 5.1. Dasar evaluasi tersebut adalah *muwashafat*, yang terdiri dari 10 *muwashafat* pribadi, 6 *muwashafat* keluarga, 7 *irsyad al mutjtama'* (perbaikan masyarakat), *hukumah islamiyah* (mendorong pemerintahan yang islami), dan *ustadziatul alam* (menjadi guru bagi alam semesta). Kesepuluh *muwashafat* pribadi meliputi: (1) *salimul 'aqidah* (berakidah lurus), (2) *shahihul 'ibadah* (beribadah dengan benar), (3) *matinul khuluq* (berakhlak kokoh), (4) *qadirin 'alal kasbi* (berpenghasilan yang memadai), (5) *mutsaqqaful fikri* (memiliki wawasan yang luas), (6) *qawiyyul jismi*

[2] Diolah dari buku Manhaj Tarbiyah 1427 H, halaman 95.

(memiliki tubuh yang sehat dan kuat), (7) *mujahidun linafsihi* (mampu memerangi hawa nafsu), (8) *munazhamun fi syu'nihi* (mampu mengatur urusan-urusannya dengan rapi), (9) *harishun 'ala waqtihi* (mampu mengatur waktu), dan (10) *nafi'un lighairihi* (bermanfaat untuk orang lain). Keenam *muwashafat* keluarga terdiri dari: (1) membimbing keluarga agar menghormati *fikrah* Islamnya, (2) memelihara tatakrama Islam dalam kehidupan keluarganya, (3) bijak dalam memilih pasangan hidup, (4) mendidik anak-anak dengan baik, (5) mendidik pembantu dengan baik, dan (6) membimbing seluruh anggota keluarga dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan *'irsyadul mujtama'* meliputi: (1) menyebarkan dakwah, (2) memerangi perilaku kotor dan munkar, (3) mendukung perilaku terpuji, (4) *'amar ma'ruf* (mengajak kepada kebaikan), (5) bersegera mengerjakan kebaikan, (6) menggiring opini umum untuk mendukung *fikrah* Islam, dan (7) mengislamkan seluruh praktik kehidupannya secara terus-menerus.

Seluruh *muwashafat* tersebut memiliki rincian indikator tersendiri untuk masing-masing jenjang *tarbiyah* yang menunjukkan keketatan dan intensitas proses *tarbiyah.* Misalnya, untuk *Tamhidi* (Anggota Pemula), beberapa indikator untuk kriteria *salimul 'aqidah* (akidah yang bersih) adalah tidak berhubungan dengan jin, tidak menghadiri majelis dukun dan peramal, serta tidak bersumpah dengan selain Allah. Kriteria *qadirun 'alal kasbi* (berpenghasilan) pada jenjang *Muayyid* (Anggota Muda) dinyatakan dalam indikator antara lain tidak berambisi menjadi pegawai negeri,[3] mengutamakan spesialisasi jangka panjang yang penting dan dinamis, serta berusaha untuk memperbaiki kualitas produk dengan harga yang sesuai. Bahkan untuk soal penghasilan ini, di jenjang *Muntashib* (Anggota Madya), seorang kader diminta untuk berpenghasilan selain dari pekerjaan pokoknya, menanam saham dengan *nisbat* (proporsi) tertentu dari pemasukannya, dan mengembangkan hartanya pada proyek-proyek yang bermanfaat. Sedangkan di jenjang *'Amil* (Anggota Ahli) seorang kader harus menekuni bidang yang khusus yang tidak banyak digarap orang lain, serta mengelola lembaga

[3] Hal ini mungkin terkait dengan nasihat Hasan al-Banna yang terangkum di bawah judul "Kewajiban Aktifis" nomor 16 yang berbunyi, "Janganlah engkau berambisi menjadi pegawai negeri. Anggaplah itu sebagai pintu rezeki yang paling sempit. Akan tetapi janganlah menolak bila diberi peluang untuk itu, dan jangan meninggalkannya, kecuali bila benar-benar bertentangan dengan tugas-tugas dakwah (2007: 324).

independen seperti yayasan. Kriteria *harisun 'ala waqtihi* (bijak dalam menata waktu) juga sangat memperoleh perhatian. Misalnya, untuk jenjang *Muntazhim* (Anggota Dewasa), indikator-indikatornya antara lain mengalokasikan waktu untuk anak-anak dan keluarga, serta dakwah *fardiyah* (mendakwahi orang per orang secara pribadi). Sementara itu, menghafal Al Qur-an merupakan indikator penting dari kriteria *shahihul 'ibadah* (beribadah yang benar) maupun *mutsaqqaful fikr* (berwawasan luas), sehingga standarnya meningkat terus, mulai dari 1 juz, kurang-lebih 20 halaman (Anggota Pemula), 3 juz (Anggota Muda), 5 Juz (Anggota Madya), 6 Juz (Anggota Dewasa), dan 7 Juz (Anggota Ahli), masing-masing termasuk membaca dan mempelajari tafsirnya.[4] Hal inilah yang dikatakan oleh seorang anggota MPP:

> "Harusnya makin tinggi levelnya dia makin *kaffah* dalam memahami Al Qur-an, karena ketika di level PKS, Qur-an itu menjadi rujukan utama. Bahkan secara teknisnya menjadi hafalan-hafalan yang nambah terus gitu ya. Ini hafalan ini, ini hafalan itu. Itu sistem di PKS pengkaderannya".

Secara umum proses *taqwim* dimulai ketika seorang *murabbi* atau *naqib* mensosialisasikan rencana kenaikan tingkat dari binaannya (disebut *muqawwam*, kader yang akan di-*taqwim*) di *usrah*-nya (disebut *muqawwim*, *usrah* yang bertanggung jawab melaksanakan proses *taqwim*), yang dilanjutkan dengan melengkapi syarat-syarat administratif yang terdiri dari biodata kader yang akan di-*taqwim*, *muwashafat* (rapor kader), surat pengantar sosialisasi, dan KTA (kartu tanda anggota) bila sudah ada. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi di kalangan kader di wilayah tersebut selama tiga pekan. Jika tidak ada masukan selama jangka waktu tersebut maka rapat pimpinan DPD/DPW akan memutuskan kenaikan jenjang tersebut, dan data kader yang bersangkutan akan masuk ke *database*. Sedangkan jika ada masukan, masukan itu akan dibahas di Bidang Kaderisasi. Jika ada masalah, kader tersebut akan dikembalikan ke *murabbi* atau *naqib* yang mengusulkannya. Sedangkan jika Bidang Kaderisasi menilai tidak ada masalah, kenaikan jenjang kader yang bersangkutan akan diputuskan dalam rapim DPD/DPW, dan data kader yang bersangkutan dimasukkan ke *database*. Bab III Pasal 5 ART PKS mengatur bahwa Anggota Pemula dan Anggota Muda diangkat

[4] Contoh indikator-indikator tersebut diambil dari buku Manhaj Tarbiyah 1427 H (2007), hal. 100-143.

dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah/DPD (Kabupaten/Kota), Anggota Madya dan Anggota Dewasa oleh Dewan Pengurus Wilayah/DPW (Propinsi), sedangkan Anggota Ahli dan Anggota Purna oleh Dewan Pengurus Pusat/DPP.

Peran *murabbi* dalam mengelola *halaqah* memiliki tekanan yang berbeda dengan peran *naqib* dalam mengelola *usrah.* Peran *murabbi* memiliki bobot keilmuan yang tinggi, karena tugas *murabbi* adalah membina para kader (*Tamhidi* dan *Mu'ayyid*) untuk memenuhi sejumlah kriteria tertentu agar dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, posisi seorang *naqib* dalam *usrah* lebih sebagai ayah yang berperan mengurus dan merawat "keluarga"-nya. Dengan demikian, agenda sebuah *usrah* dimulai dengan pembahasan dan penyelesaian *qadhayya* yang dihadapi oleh para anggotanya. Setelah itu evaluasi aktifitas-aktifitas dakwah yang sudah dilakukan oleh para anggota, karena diasumsikan para anggota *usrah* adalah para kader inti yang telah memiliki modal dan kerja-kerja dakwah. Agenda penyampaian materi diletakkan di akhir. Materi tidak selalu disampaikan oleh *naqib*, bisa juga disampaikan oleh orang lain yang dianggap paling memiliki pengetahuan tentang materi tersebut. Sebenarnya Manhaj Tarbiyah mengatur pula materi-materi yang harus disampaikan dalam *usrah* untuk masing-masing jenjang, namun sering persoalannya ada pada kapasitas para *naqib* untuk membaca, memahami, dan kemudian membawakan materi-materi tersebut di *usrah*-nya.

Ketatnya sistem kaderisasi di PKS dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Di satu sisi, standar *tanzhim nukhbawi* yang diterapkan PKS memang mungkin sekali dilihat oleh orang luar sebagai sesuatu yang terlalu rumit dan berbelit. Tahapan *tarbiyah* yang harus dilalui bertahun-tahun cukup efektif dalam menekan kemungkinan terjadinya *ikhtiraqat* (infiltrasi) personal ke dalam Partai. Ustadz Hilmi Aminuddin mengatakan, "**Infiltrasi personal itu sangat sulit. Karena secara formal orang harus melampaui tahap-tahap *tarbiyah***. Dari sejak *tamhidiyah* sampai *muayyid* dan seterusnya. Yang dilampaui bertahun-tahun. Kadang-kadang kalau kekuatan ikhlas tidak kuat, banyak program yang

membosankan".[5] Namun seorang kader senior berpendapat bahwa ketatnya kaderisasi justru menghambat pertambahan jumlah kader yang sangat diperlukan di era partai saat ini.

5.1.2. Motivasi Bergabung dan Dinamika Internal Individu dalam Jemaah Tarbiyah

Walaupun Jemaah Tarbiyah dan PKS adalah satu *tanzhim*, namun dalam sebagian besar kasus, keterlibatan seseorang dalam entitas ini dimulai dengan interaksinya dengan jemaah, bukan dengan partai.[6] Tabel 5.1 menunjukkan, ketika seorang *murabbi* merekrut para *mutarabbi*-nya, ia mengajak mereka untuk bersama-sama belajar Islam, bukan menjadi anggota partai. Dengan berjalannya proses para anggota *halaqah* akan berkenalan dengan konsep *'amal jama'iy* dan kewajiban melaksanakannya dalam berdakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Salah satu doktrin yang sering dijadikan landasan adalah ucapan seorang sahabat Nabi Muhammad saw, Umar bib Khattab ra, yang berbunyi, "Tidak ada Islam melainkan dengan jemaah, dan tidak ada jemaah kecuali dengan *imamah*, dan tidak ada *imamah* dengan ketaatan". Atau ucapan sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalis ra yang berbunyi, "Sesungguhnya kondisi keruh dalam berjemaah adalah lebih aku sukai daripada jernih namun sendirian". Selanjutnya dajarkan bahwa karena saat ini tidak ada sebuah *jama'atul muslimin*, sebuah *tanzhim* yang menaungi seluruh umat Islam di dunia maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk memilih salah satu jemaah yang ada yang dinilai memiliki *manhaj* yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan berkomitmen kepadanya. Ketika doktrin tentang jemaah telah berhasil ditanamkan, terbukalah pintu untuk mengajak peserta *tarbiyah* berkomitmen kepada Jemaah Tarbiyah dan kemudian kepada PKS.

[5] Dikutip dari *taujih* berjudul *"Khutuwat Tanfidziyah"* (Langkah-Langkah Operasional), yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah Banten-DKI-Jawa Barat, Depok 13-14 Januari 2007 (Aminuddin, 2007: 150).

[6] Di era PKS, terutama pasca Pemilu 2004, struktur PKS di berbagai jenjang melakukan rekrutmen dengan membuka pendaftaran anggota secara terbuka.

Ada berbagai pintu masuk seseorang ke dalam *halaqah* Jemaah Tarbiyah. Salah satu yang lazim adalah melalui *daurah*. *Daurah* adalah suatu training keislaman yang biasanya diselenggarakan di luar kota, bertempat di vila atau lokasi lain, di mana peserta menginap selama 2-3 hari. Penyelenggara *daurah* biasanya adalah unit kerohanian Islam yang ada di sekolah, kampus, atau kantor setempat. Untuk menutup biaya penyelenggaraan ada *daurah* yang mengutip iuran dari pesertanya, namun ada pula yang ditutup dari sumber lain, seperti infak donatur atau kas organisasi penyelenggara.

Daurah diisi dengan beberapa materi dasar yang disampaikan oleh sejumlah narasumber atau ustadz, seperti *aqidah* (keyakinan dasar Islam), *ma'rifatullah* (mengenal Allah), *ma'rifaturrasul* (mengenal Rasul), *ma'rifatul Islam* (mengenal Islam), *ahamaiyatu at tarbiyah* (urgensi tarbiyah), dan *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan Islam). Di sampng itu, *daurah* biasanya diisi dengan beberapa aktifitas lain, seperti shalat malam berjemaah dan *muhasabah* (renungan), *riyadhah* (olahraga), *tafakkur alam* (mengamati alam sekitar untuk merenungkan kebesaran Allah) menonton film-film islami, dan permainan sebagai variasi. Setelah mengikuti *daurah*, para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok yang kemudian berproses menjadi *halaqah*.

Faktor kepercayaan dan hubungan pribadi yang terjalin sebelumnya dengan orang yang merekrut merupakan faktor penting dalam proses rekrutmen Jemaah Tarbiyah, apalagi di masa-masa awal dulu pada saat ia belum menjadi sebuah oganisasi yang terbuka.[7] Namun demikian, latar belakang keislaman seseorang juga ikut mempengaruhi keikutsertaannya dalam *halaqah*. Latar belakang pendidikan atau pemahaman Islam yang relatif kuat pada sebagian kasus bisa membuat seseorang lebih terbuka untuk berinteraksi dengan *fikrah* Jemaah Tarbiyah, karena ia yakin memiliki filter untuk menyaring jika terdapat penyimpangan dalam paham keagamaan yang ditawarkan. Sebagai contoh, seorang kader menuturkan, "Saya secara pribadi. karena mungkin punya latar

[7] Peneliti memiliki pengalaman pribadi tentang hal ini. Saat ini peneliti membina sekitar 50 *mutarabbi* yang terdiri dari empat kelompok *halaqah*. Sebagian dari para anggota *halaqah* tersebut direkrut langsung oleh peneliti. Mereka sebelumnya telah mengenal dan berinteraksi dengan peneliti melalui seminar, pelatihan, atau forum-forum lain yang diisi oleh peneliti. Sebagian anggota lainnya direkrut oleh anggota-anggota yang sudah lebih awal bergabung.

belakang agama yang cukup, mondok dari umur 4 tahun kan, jadi tau ini pahamnya ini ya, nggak terlalu takut digituin. Kalau ada yang aneh-aneh kan". Namun pada sebagian kasus lain, mereka yang merasa sudah cukup memahami Islam justru cenderung resisten untuk bergabung dengan *halaqah*. Salah satu indikasinya, kiprah dakwah kampus para kader Jemaah Tarbiyah di perguruan tinggi agama relatif lebih sulit berkembang dibandingkan perguruan tinggi umum.

Setelah terekrut ke dalam *halaqah*, seorang kader Jemaah Tarbiyah biasanya akan melibatkan diri dalam berbagai aktifitas yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan dakwah. Seiring dengan berjalannya waktu, para kader terus berproses dalam sistem *tarbiyah*, sehingga pemahaman mereka terbentuk, dan motivasi mereka terbangun. Bahkan, secara bertahap, sesuai dengan jenjang keanggotaan mereka, para kader mengintegrasikan kehidupan pribadi mereka ke dalam jemaah. Di sini terlihat bahwa keunikan proses *tarbiyah* adalah adanya kombinasi antara kekuatan doktrin perjuangan dan pemahaman. Oleh karena itu dapat dipahami jika Jemaah Tarbiyah cukup berhasil menarik kelompok terdidik yang berasal dari kampus untuk bergabung dengannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Munson (2001) tentang Ikhwan al-Muslimin (IM) di Mesir yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan IM yang membuatnya mampu merekrut banyak anggota adalah keselarasan program-programnya dengan kehidupan masyarakat muslim di mana ia bergerak, dan tingkat keterikatan yang dibangun secara gradual, sehingga kedua belah pihak – organisasi dan anggota yang bersangkutan – memiliki kesempatan yang cukup untuk saling mengevaluasi dan membangun keterikatan secara bertahap.

Sebagai ilustrasi, mari kita simak bagaimana perjalanan hidup seorang kader senior setelah terlibat dalam Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS:

> "Pernah di Sabili,[8] kemudian menikah, kemudian kuliah di negara X, terus balik ... Jadi nggak ikutan pembentukan partai di Jakarta tapi terlibat di negara X. Balik ke sini lanjut ngajar di kampus, terus 2 tahun. Tahun 2007 diminta bantuin DPP *full* sampai sekarang".

Selanjutnya, ia menggambarkan apa yang memotivasinya untuk tetap berada dalam Jemaah Tarbiyah hingga saat ini, "**Kesadaran bahwa saya bisa**

[8] Majalah Islam yang dikelola oleh para aktifis Jemaah Tarbiyah.

memberikan kontribusi yang optimal melalui Jamaah ini, **dalam hal ini melalui partai**, agar proses terbentuknya masyarakat madani ... dengan parameter kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan". Setelah bergabung di Jemaah Tarbiyah pun kader tersebut tetap berupaya untuk berkiprah di berbagai sektor kehidupan dengan tujuan berkontribusi, sekaligus meningkatkan kapasitas pribadi. Ia menuturkan:

> "Saya tetap ngajar. Mengajar itu bagi saya profesi yang membuat saya tetap mencintai ilmu ... Jamaah kita banyak pilihan, gabung ini kan. *Private sector* kita kerjakan, sektor publik kita berperan ... **ada pilihan rasional bahwa saya bisa maksimal, pada saat yang sama saya bisa mengembangkan kapasitas diri**".

Dari penuturan informan tersebut terlihat bahwa keterlibatannya dengan Jemaah Tarbiyah/PKS berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, paralel dengan tahap-tahap pengembangan pribadinya.

Hal senada diungkapkan oleh seorang kader senior yang kini memimpin sebuah organ PKS di pusat yang menuturkan, "Ya sebelum partai ini berdiri kan berupa kelompok-kelompok pengajian dari kampus-kampus. Saat itulah saya berinteraksi dengan cikal bakal PKS ini". Kemudian berlangsung proses refleksi pribadi, di mana kader tersebut mempertimbangkan sejauh mana gagasan perjuangan Islam yang ditawarkan Jemaah Tarbiyah bersesuaian dengan pandangan-pandangan pribadinya. Ia menggambarkan proses tersebut sebagai berikut:

> "Yang membuat kita bertahan itu merasa bahwa ini masih bisa kita jadikan tempat untuk berkiprah ya bagi idealisme kita ... ketika kelompok ini memperkenalkan pemikiran-pemikirannya, ya kita merasa ini formulasi yang cocok ya ... saya anggap bisa dijadikan sebagai satu wadahlah untuk berkiprah. ... **kita melakukan perbaikan masyarakat melalui politik, melalui sosial, dan lain-lainnya, budaya, yang berbasiskan pada pemikiran Islam**".

Dari penuturan di atas terlihat bahwa keluasan dan keutuhan *manhaj* dakwah yang diformulasikan Jemaah Tarbiyah dengan misi untuk melakukan perbaikan masyarakat melalui berbagai aspek secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor penting yang menarik bagi sebagian kader untuk bergabung dengannya.

Sementara itu, keterlibatan dalam Jemaah Tarbiyah juga kerap berawal dari interaksi seseorang dengan organisasi keislaman yang mengispirasinya dengan gagasan tentang pergerakan, di samping interaksinya dengan berbagai pemikiran, Islam maupun nasionalis, sehingga yang bersangkutan bersentuhan dengan spektrum pemikiran yang relatif luas. Sebagai contoh, seorang elit PKS menggambarkan proses tersebut sebagai berikut:

> "Saya membaca misalnya Kapita Selekta-nya Pak Natsir ... Maududi ... An Nadhwi ... Sayyid Qutb, Hasan Al Banna, Qardhawi ... sedikit dari kaum nasionalis seperti Soekarno, saya juga membaca mereka ... Saya juga membaca buku-bukunya Cak Nur ... Hampir semuanya saya baca ... Saya pernah membuat penelitian juga tentang dia".

Proses yang relatif panjang tersebut membuatnya sampai pada keseimpulan bahwa keunggulan *manhaj* yang ditawarkan Jemaah Tarbiyah dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran atau gerakan-gerakan lain, selain karena metodologi gerakannya yang relatif paling komprehensif, juga karena ia memiliki *tools* atau *roadmap* yang konkrit untuk mewujudkan kebangkitan Islam yang oleh banyak pemikir sebelumnya sudah digagas sebagai idealita yang harus dicapai.

Rute yang kurang lebih sama dilalui oleh seorang perempuan kader senior yang merupakan seorang aktifis Islam di sebuah organisasi ekstra kampus yang sudah berkiprah hingga ke tingkat nasional, dan terlibat dalam berbagai gejolak politik di masa-masa Orde Baru. Semangatnya sebagai aktifis turut dipengaruhi oleh dinamika umat Islam secara global, di samping faktor latar belakang keluarga yang memiliki kecenderungan aktif berpolitik. Sebagaimana lazimnya, persentuhan informan tersebut dengan Jemaah Tarbiyah dimulai dengan mengikuti pengajian-pengajian kampus yang menjamur waktu itu. Aktifitas keislaman yang bersifat kultural itu lahir sebagai respon terhadap kebijakan Orde Baru yang represif terhadap Islam politik dan gerakan mahasiswa. Melalui pengajian-pengajian itulah ia bertemu dengan orang-orang yang di kemudian hari dikenalnya sebagai tokoh-tokoh Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PK/PKS. Ia menuturkan:

> "Karena saya aktif jadinya saya ditunjuk jadi Ketua Keputrian ARH UI ... sering ada pengajian-pengajian Jum'at, terus kuliah Jum'at ... ketemu lah saya akhirnya dengan teman-teman yang akhirnya ikutan saya ngaji rutin,

> *tarbiyah* gitu lah ... Termasuk sama Kang Harna. Ketemu di mesjid kan. Beliau juga aktif".

Sebagai istri dan ibu, langkah-langkahnya menjadi lebih ringan untuk berkiprah di Jemaah Tarbiyah/PKS karena suaminya yang juga kader memberikan dukungan penuh kepadanya. Di samping itu, PKS memberikan ruang yang relatif luas bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri, khususnya dengan adanya Bidang Kewanitaan yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Ketua DPP. Selanjutnya, keragaman latar belakang para kader yang sebagian besar merupakan orang-orang muda kian memperkuat motivasinya. Ia menuturkan, "Semuanya tokoh muda ... Nurmahmudi ... dia lulusan Amerika. Ada Hidayat yang lulusan dari Mesir. Saya bilang, wah ini lebih beragam gitu ya. Jadi saya sangat seneng".

Namun belakangan ada rute masuk yang relatif berbeda, semacam "pinangan" yang dilakukan oleh para kader PKS terhadap tokoh-tokoh senior yang sudah lama berkiprah di berbagai bidang profesi. Seorang kader yang memiliki pengalaman sebagai profesional lebih dari 30 tahun, baik di dunia industri maupun lembaga nirlaba berskala internasional, merupakan salah satu contoh. Ia dan beberapa rekannya yang berkumpul di sebuah lembaga yang didirikan oleh Nurcholis Madjid (alm.) menyimpulkan bahwa untuk mengubah Indonesia mereka harus menyebar ke berbagai partai yang ada. Ia menuturkan, "Pokoknya idenya adalah kita mencoba mengeluarkan pemahaman-pemahaman nasionalis dan Islam". Bagi kader ini, masuk ke PKS adalah sebuah pilihan yang menarik dan dilakukannya secara sadar dan penuh pertimbangan. Ketika itu berbagai "partai sekuler" mengajaknya bergabung, namun dari partai-partai yang berbasis massa umat Islam hanya PAN dan PKS yang mendekatinya. Ia menggambarkan proses "pinangan" PKS dengan menuturkan, "Ya temen-temen pada dateng ke saya nanyain. Ada MY, AM, datang ke rumah ngobrol segala macem". Pilihannya jatuh kepada PKS karena ia berkeinginan untuk bergabung dengan sebuah organisasi di mana pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangannya bisa memberikan manfaat yang terbanyak. Ia mengatakan, *"I want to contribute to appraise where they need me more. They need me more, to my assumption"*. Ia tidak menafikkan bahwa mungkin saja asumsinya salah. Mungkin saja PKS tidak membutuhkan dirinya seperti yang ia kira. Pada titik itu mungkin

sekali dia akan mengevaluasi keterlibatannya dalam PKS. Bagi kader ini, perannya di PKS adalah *"to influence"*, karena ia melihat bahwa *sharing* merupakan fase kehidupannya saat ini. Ia menegaskan, *"in my phase of life for me is to share"*, dan "*sharing* means, *I'm expressing my idea and when my idea is accepted it means that I'm influencing the person to do something"*.

Ia juga ingin menjaga keseimbangan distribusi sumber daya karena beberapa partai besar sudah *"got more than enough"*, karena hampir semua orang ingin bergabung dengan partai-partai tersebut. Di samping itu, pemikiran Islam yang diusung PK/PKS di awal tahun 2000an, yang masih sangat ekslusif dan jauh lebih ekstrem dari apa yang diketahuinya, justru menyediakan tantangan yang menarik untuk dipahami dan dicarikan titik temunya. Ia menuturkan:

> "Ini ada suatu organisasi, anak muda, punya idealisme, dan mempunyai semangat untuk mengeluarkan yang baru. Bersih peduli, ya kan. Terus keadilan kesejahteraan. Saya pikir, *maybe this is the choice*. Saya itung-itung. *Benefit analysis*-nya apa. Akhirnya saya anggep bahwa, kekurangan saya adalah ***I have to adjust to understand where they come from***. Gitu kan. Nah, **oleh sebab itu saya mulai dengan *liqa***. Ikut ndengerin".

Proses yang relatif panjang, tidak instan, dan tidak transaksional tersebut justru sangat menarik baginya. Akan sangat berbeda jika ia memilih bergabung dengan partai lain yang digambarkannya, "*Transactional ... you come here you get this, this is what we want from you* ... Ente jual apa, ane beli. Ane jual, ente beli". Ia melihat proses *tarbiyah* di PKS sebagai sebuah perjalanan pribadi. "Ini adalah sebuah penyesuaian pribadi. Saya pada tingkat di mana pendalaman Islam adalah bagian dari pendalaman saya", kata kader tersebut lebih lanjut. Di samping itu, terlihat bahwa bagi kader tersebut *halaqah* adalah upaya untuk memahami *fikrah* keislaman yang ditawarkan PKS secara intelektual.

Relatif kuatnya sistem *tarbiyah* sebagai perekat komitmen para kader dengan Jemaah Tarbiyah/PKS sama sekali tidak berarti bahwa komitmen tersebut tidak mengalami pasang-surut. Justru dalamnya keterlibatan para kader dengan jemaah ini, bukan hanya secara rasional, namun juga emosional, dan bahkan spiritual, atau dengan kata lain kuatnya *sense of ownership*, membuat para kader sangat sensitif terhadap dinamika organisasi. Seorang kader senior merasakan

perubahan *"chemistry"* dalam interaksinya yang panjang (sejak 1987) dengan Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PK dan PKS. Ia menuturkan:

> "Pasca 2007 sampai sekarang ini saya merasakan ada ketidaksesuaian dalam kerangka berfikir saya dengan Jamaah secara *limited* ... Khususnya terkait dengan **kebijakan kita, proyeksi, promosi, nominasi, teman-teman ke pejabat publik**, serta **perilaku beberapa *ikhwah* atau teman-teman kita yang di jabatan publik** yang menurut saya *not up to standard* lah".

Hal serupa berlaku pula untuk mantan profesional senior yang dicontohkan di atas. Ia menuturkan, "Ya kekecewaannya ketika baru mulai tahun 2004 ... ketika akan dipilih Wiranto ... Trus akhirnya diambil keputusan tidak, jadi positif lagi gitu. Tapi ketika Wiranto, Fuad dan lain-lain itu saya sempet *down*".[9] Namun yang menarik, bagi informan tersebut, ternyata *liqa* merupakan mekanisme yang cukup efektif untuk mengatasi berbagai kekecewaaan yang timbul sebagai implikasi dinamika organisasi yang tidak selalu selaras dengan preferensi pribadi

Ada pula seorang kader senior yang menjadi anggota Majelis Syura yang mencoba menempatkan dinamika internal Jemaah Tarbiyah/PKS dalam konteks realita kontemporer di mana umat Islam terpuruk dalam perpecahan yang memprihatinkan. Ia membandingkan umat Islam dengan negara-negara Eropa yang berhasil mempersatukan diri, bukan hanya dengan membangun Uni Eropa, tapi juga menyelenggarakan pemilu yang menghasilkan Parlemen Eropa serta menyusun Konstitusi Eropa yang mengikat negara-negara yang menjadi anggotanya. Dalam konteks ini, tantangannya adalah bagaimana para pemimpin *harakah* Islam yang mengklaim bahwa mereka memperjuangkan umat Islam dapat bersatu dan kemudian membentuk "Uni Harakah". Tantangan itu tidak mungkin bisa dijawab kalau dalam satu jemaah atau partai Islam saja persatuan itu tidak bisa diwujudkan.

[9] Kader ini pernah berada di Dewan Pakar PKS, yang merupakan institusi di bawah MPP. Menurut sebuah sumber, sempat ada rencana bahwa Wiranto akan bergabung ke dalam Dewan Pakar. Hal ini memicu penolakan yang cukup keras, sehingga Dewan Pakar kemudian vakum. Peneliti menduga kekecewaan yang dikemukan kader tersebut terkait dengan hal ini.

Tabel 5.2
Pintu Masuk, Alasan, dan Motivasi Bergabung dengan Jemaah Tarbiyah/PKS

Pintu Masuk	Alasan Bergabung	Motivasi/Harapan
♦ Diajak mengikuti *daurah* kemudian berlanjut mengikuti *halaqah/usrah.* ♦ Terlibat dalam dalam organisasi/aktifitas keislaman sehingga berinteraksi dengan kader yang lebih senior. ♦ Didekati secara pribadi dan diajak bergabung.	♦ Melihat ini sebagai peluang untuk berkontribusi bagi terbentuknya masyarakat madani. ♦ Kecocokan dengan formulasi pemikiran Islam yang ditawarkan, yaitu mengubah masyarakat secara komprehensif. ♦ Jemaah Tarbiyah menawarkan *roadmap* kebangkitan Islam yang komprehensif dan membumi. ♦ Setuju dengan gagasan mereformasi politik Indonesia. ♦ Spektrum aktifisnya sangat beragam, didominasi generasi muda, dan memberi tempat bagi aktifis perempuan. ♦ Menawarkan pemikiran Islam yang unik, proses yang panjang, dan tidak transaksional.	♦ *Sharing* dan *influencing*. ♦ Membangun kader-kader yang mampu menjalin titik temu dan kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat yang beragam.

Pengalaman berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang bervariasi akan melatih kader untuk membangun titik temu dan kebersamaan. Kader senior tersebut mencontohkan bagaimana dirinya harus menjalin interaksi dengan orang-orang yang berbeda agama dan ideologi di sebuah Kementerian di mana ia menjadi Staf Khusus. Demikian pula interaksinya dengan para petinggi militer, di mana ia berupaya menampilkan nilai-nilai PKS yang moderat dan terbuka. Hal tersebut menimbulkan keheranan para Jenderal yang berinteraksi dengannya, karena sebelumnya mereka berpersepsi bahwa orang-orang PKS menganut paham Wahabi yang ketat dan kaku. Keberagaman interaksi tersebut mendorongnya senantiasa berusaha mencari titik temu, misalnya dalam mengusung *good governance* dan *clean government*, untuk mewujudkan kepentingan bersama yang lebih luas. Ia mengakui bahwa kemampuan mengelola

perbedaan dan konflik tersebut tidak serta-merta dimilikinya, melainkan melalui proses internal yang panjang dan menguras emosi. Bahkan ia menuturkan, “Dulu saya sempet juga kan dirawat rumah sakit kena ini kan. Tapi lama-lama itu bagian dari ... yang kita perjuangkan gitu, tapi kita bisa gitu kerjasama dengan orang yang berbeda”.

Membangun kader-kader yang mampu membangun titik temu dan kebersamaan sebagaimana digambarkan di atas bukan sesuatu yang mudah, karena di satu sisi para kader datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dan di sisi lain terdapat keterbatasan dalam *tarbiyah,* terutama karena minimnya waktu yang tersedia. Namun diyakini bahwa *manhaj* yang dimiliki PKS menawarkan suatu spektrum alternatif berpikir yang luas, sehingga memungkinkan bergabungnya orang-orang yang sangat beragam. Hanya saja para kader perlu belajar untuk berpikir lebih terbuka dan berani mengkontestasikan pemikiran agar dapat menikmati dan berbahagia dalam dinamika internal yang ada.

5.1.3. Realita Kondisi Tarbiyah dalam Pandangan Para Aktor

Pada tahun 2010 kader PKS di jenjang Anggota Pendukung sekitar 92% dan Anggota Inti sekitar 8%. Sementara itu, pada tiga jenjang terbawah terdapat perbedaan proporsi yang sangat mencolok antara jenjang Anggota Pemula *(Tamhidi)* sekitar 74%, Anggota Muda *(Muayyid)* sekitar 18%, dan Anggota Madya *(Muntashib)* sekitar 3%. Di satu sisi, data tersebut mungkin merupakan indikator dari ketatnya proses kaderisasi yang ada, namun di sisi lain mungkin juga menunjukkan adanya persoalan pada proses kaderisasi, khususnya proses evaluasi kenaikan jenjang *tarbiyah*, atau *taqwim*, yang tidak berlangsung dengan baik. Kemungkinan kedua ini didukung oleh data perbandingan proporsi Anggota Madya *(Muntashib)* yang sekitar 3% dengan Anggota Dewasa *(Muntazhim)* yang sekitar 4%. Artinya, terdapat gejala stagnasi proses kaderisasi di jenjang Anggota Pendukung, khususnya *Muayyid*, yang menghambat pasokan ke jenjang Anggota Inti, yaitu *Muntashib*. Ditengarai salah satu kemungkinan penyebab hal tersebut adalah kesibukan yang terkait dengan kepartaian, sehingga frekuensi kegiatan-kegiatan *tarbiyah* yang spesifik, termasuk *taqwim* yang reguler, menjadi berkurang.

Tabel 5.3
Perkiraan Proporsi Anggota PKS Tahun 2010[10]

No	Jenjang	%	L	P
1	Pemula *(Tamhidi)*	74%	25%	75%
2	Muda *(Muayyid)*	18%	50%	50%
	Anggota Pendukung	**92%**	**30%**	**70%**
3	Madya *(Muntashib)*	3%		
4	Dewasa *(Muntazhim)*	4%		
5	Ahli & Purna *(Amil & Mutakhasis)*	1%	75%	25%
	Anggota Inti	**8%**		
	Jumlah Kader	**100.00%**		

Di sisi lain, ketika menyimak data pada tabel 5.3 di atas menarik pula untuk mencatat bahwa proporsi kader perempuan di jenjang terbawah, *Tamhidi*, sangat besar, yaitu sekitar 75%, lalu menurun menjadi sekitar 50% di jenjang *Muayyid*, dan akhirnya hanya sekitar 25% di jenjang *'Amil*. Menurut seorang mantan pengurus DPP yang lalu, tingginya proporsi kader perempuan di jenjang awal merupakan implikasi dari efektifas rekrutmen yang dilakukan di kalangan muslimah. Pos Wanita Keadilan dan berbagai *wajihah* lain yang dikelola oleh para kader perempuan sangat efektif merekrut muslimah dari berbagai kalangan untuk menjadi kader PKS. Namun kemudian kaderisasi yang sangat ketat mungkin menjadi penyebab proporsi kader perempuan tersebut berkurang di jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya berpengaruh terhadap peluang mobilitas vertikal para kader perempuan dalam struktur PKS, karena jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur partai mensyaratkan jenjang keanggotaan tertentu.

Sejumlah kader menilai bahwa kualitas *tarbiyah* pasca 2004 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, walaupun komitmen dan militansi kader masih tetap terasa. Sebelum 2004 seluruh elemen dan perangkat *tarbiyah*, termasuk di dalamnya *mutaba'ah* dan *ta'limat*, berjalan dengan baik. Optimalnya kondisi *tarbiyah* tersebut diyakini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja PKS di Pemilu 2004. Sebaliknya, penurunan kondisi *tarbiyah* berimplikasi pada stagnasi kinerja PKS sebagai partai di pemilu

[10] Diolah dari informasi yang diperoleh dari Informan-02 dalam diskusi informal pada hari Rabu 30 Maret 2011 bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Gedung DPP PKS TB Simatupang.

berikutnya. Seorang informan menyayangkan menurunnya kualitas kaderisasi yang sebelumnya merupakan kekuatan PKS, karena beberapa partai lain justru bergerak memperkuat sistem kaderisasi mereka. Ia mencontohkan suatu partai yang secara serius menggalakkan kaderisasi dengan menetapkan target rekrutmen kader baru yang sangat ambisius. Sementara sebuah partai lain membuat Majelis Ideologi untuk mengawal proses kaderisasinya.

Terdapat pandangan bahwa penurunan kualitas *tarbiyah* disebabkan oleh merebaknya kejenuhan pada sebagian kader karena *liqa* pekanan didominasi oleh pembicaraan tentang politik praktis. Implikasi, sebagian kader tidak lagi hadir secara teratur di *liqa* mereka. Adapula kader yang mencoba mengatasi rasa jenuh itu dengan memaknai *liqa* sebagai forum silaturahmi dengan sesama kader. *Political content* yang terlalu kental di *liqa* diyakini mendistorsi jatidiri PKS sebagai Partai Dakwah, dan politik yang profan diragukan kemampuannya untuk menjadi sumber motivasi yang langgeng bagi para kader PKS. Seorang kader menggugat:

> "Untuk semua *halaqah* bicara politik. Kapan bicara dakwahnya? Kalau kita mau jadi Partai Dakwah. Kecuali sudah lepas tinggalkan Partai Dakwah. **Apa iya berani gak? Saya tantang kalau mereka berani.** Apa bisa dimotivasi kita ini dengan politik terus? Kita harus begini, harus begini, yang semua duniawi. Apa bisa? Coba deh. Bubar... "

Kader tersebut mengingatkan bahwa membangun dan mempertahankan motivasi bukan hal yang mudah. Ia mengatakan, "Kita misalnya di tengah kondisi tidak enak apa semua itu, kita masih bertahan karena dakwah. Bukan karena kita mau bekerja. Kalau mau bekerja, ya cari duit aja".[11] Jika dianalisis dengan kerangka berpikir Hallett (2003), berbagai ekspresi kejenuhan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kader tidak memberikan apresiasi, atau *difference*, atas apa yang mereka saksikan di *front stage* yang bernama *liqa*, karena praksis yang ditampilkan oleh para aktor, dalam hal ini adalah sebagian *murabbi* atau *naqib*, tidak sesuai dengan skema apresiasi atas praksis yang mereka miliki, berupa habitus dakwah dan *tarbiyah* yang telah terbangun sebelumnya.

[11] Presiden PKS saat ini, LHI, memang menunjukkan upaya-upaya untuk membenahi kondisi *tarbiyah*, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan karena baru berjalan sekitar satu tahun.

Dari pengamatan terhadap kiprah para kader PKS di ranah politik belakangan ini, seorang kader yang menekuni dunia pelatihan dan pengembangan SDM memberikan catatan tentang proses *tarbiyah* dari sisi kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas ia mengatakan, "**Umat Islam sekian lama ini itu baru menghasilkan orang saleh, tapi belum menghasilkan orang kuat".** *Tarbiyah* baru membuat para kadernya menjadi orang-orang yang saleh secara pribadi, namun belum menjadikan mereka kokoh dalam berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan peran-peran dakwah di era politik saat ini. Kegamangan dalam menyikapi dinamika internal, termasuk manuver para elit partai, dan kondisi arena politik Indonesia kontemporer merupakan indikator belum kokohnya para kader yang dihasilkan oleh proses *tarbiyah* yang telah berjalan sekian lama. Ia menggugat:

> "***Tarbiyah* yang telah puluhan tahun, dua puluh tahun lebih, masih menghasilkan sosok yang guncang menghadapi ini**. Kalau kita bicara *effort* yang sudah kita lakukan, mestinya tidak guncang. Kalau sama–sama guncang ngapain kita *liqa*. Kalau ujungnya menghasilkan sosok yang tidak solid, tidak produktif, tidak *smart*, untuk apa capek-capek *liqa*?!".

Dengan kata lain, kualitas proses *tarbiyah* yang telah berlangsung sekian lama dan mengerahkan sumberdaya yang tidak sedikit, masih jauh dari harapan. Pemahaman tentang *fikrah* yang belum mendalam membuat langkah-langkah yang diambil oleh elit partai terkadang direspon secara berlebihan.

Sementara itu, dari sisi capaian kuantitatif kader tersebut mengatakan, "**Kalo ujungnya sama-sama 7% ya mending cara SBY** ... Artinya *effort* yang kita miliki ini dengan yang sekian ini nggak cocok". Selanjutnya, ia memberikan ilustrasi tentang belum efektif dan efisiennya proses *tarbiyah* sebagai berikut:

> "Saya nungguin *halaqah* 7 orang. Kalau itung-itungan ngaji itu gak *sumbut*. Nggak seimbang. Baru seimbang kalo yang kita tungguin ini anak singa, kan gitu ... Tapi kalo kita tungguin 7 orang dan ujungnya juga jadi tikus, ya mending kita tungguin 1000 orang yang nantinya jadi tikus. Kita dapet jumlah".

Dalam konteks ini, Ustadz Hilmi Aminuddin sudah mengingatkan para kader PKS untuk benar-benar menjaga kualitas *tarbiyah* agar maknanya tidak bergeser dan terdegradasi. Dalam salah satu *taujih* beliau menegaskan:

> "Untuk menjaga kapasitas *tarbiyah*, daya tampung *tarbiyah*, dan bobot *tarbiyah* kita, **jangan sampai *tarbiyah* kita berkembang nuansanya menjadi *ta'lim*, apalagi *tabligh*.** Karena kalau *ta'lim* itu *tazwidul 'ilm* (pembekalan ilmu). Kalau *tabligh* itu *tazwidul ma'lumat* (pembekalan informasi). Tapi kalau *tarbiyah*, dia merupakan *tashhihul aqidah, tashhihul fikrah, tashhihul akhlaq*, dan *tashhihul 'ibadah*, sehingga bobot *taujih*-nya harus sangat menyentuh *mafatihul 'uqul, mafatihul qulub wa mafatihun nufus.* Harus membuka kunci-kunci jiwa manusia, kunci-kunci hati manusia, kunci-kunci akal manusia. ***Tarbiyah* harus lebih menggugah, lebih berkesan, dan lebih membangkitkan**. Sebab *tarbiyah* bukan *talqinul 'ulum*".[12]

Peringatan Ustadz Hilmi tersebut adalah ekspresi kekhawatiran seorang pendiri Jemaah Tarbiyah, bahwa lompatan jumlah kader dan simpatisan yang luar biasa sebagaimana yang dialami oleh jemaah ini setelah menjadi partai bisa saja diikuti oleh penurunan kualitas, jika para kader lalai.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya hasil dari proses *tarbiyah* yang dijalani oleh para kader PKS. Faktor pertama adalah belum terbakukannya standar pengelolaan *tarbiyah* dan *halaqah* dalam bentuk bukan hanya *manhaj*, tapi juga materi-materi *tarbiyah* yang dituliskan dengan rinci. Karena relatif longgarnya standar pengelolaan *tarbiyah* yang ada maka para *murabbi* sering mengedepankan kreatifitas masing-masing dalam mengelola *halaqah*, sehingga kualitas yang standar tidak tercapai. Misalnya saja, batas antara dua jenjang Anggota Pendukung, yaitu *Tamhidi* dan *Mu'ayyid* dalam kenyataannya sangat tipis. Kedua jenjang ini bisa saja berada di satu *halaqah* yang sama, walaupun hal tersebut tidak baik ditinjau dari kerapian proses kaderisasi. *Murabbi* sering secara subjektif menentukan sendiri mana materi-materi dari *Rasmul Bayan* yang diberikan untuk jenjang *Tamhidi* dan mana untuk jenjang *Mu'ayyid*. Di samping itu, Jemaah Tarbiyah yang sudah memutuskan terjun ke dunia politik ternyata belum mengajari para kadernya bagaimana berpolitik dengan benar dalam materi-materi *tarbiyah*-nya, sehingga mereka cenderung "bermain dengan cara orang lain". Hal ini sejalan dengan pendapat seorang deklarator PK bahwa proses *tarbiyah* belum memberikan pemahaman yang

[12] Dikutip dari Taujih Awal Tahun Baru Islam 1428 H, Hotel Santika, 28 Januari 2007. Jika disimak, terlihat jelas bagaimana kemampuan Ustadz Hilmi menggunakan ungkapan-ungkapan berbahasa Arab, di samping pilihan kata yang kuat dan tajam dalam menyentuh rasa dan menggerakkan emosi pendengarnya.

lengkap kepada para kader tentang realita tantangan yang akan dihadapi manakala mereka terjun ke dunia politik yang hingar-bingar ini. Dengan kata lain, materi *tarbiyah* tidak *up to date* dan tertinggal jauh oleh tantangan zaman.

Faktor kedua, sebagian *murabbi* belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bidang Kaderisasi. Hal tersebut terjadi karena *liqa* bukanlah lembaga yang diformalkan. Di samping itu, seseorang menjadi *murabbi* seringkali lebih karena dorongan semangat untuk berdakwah, semangat melakukan kaderisasi. Hal ini di satu sisi baik, karena menunjukkan militansi dan motivasi yang kuat dalam diri kader untuk berkontribusi, namun di sisi lain berdampak pada standar kualitas, baik proses maupun *output*, yang tidak terjaga. Seorang kader yang aktif membina *halaqah* menggambarkan kondisi tersebut, "**Ngisi *liqa* itu materinya bisa dari mana-mana, bisa dari koran dari apa**. Padahal nggak boleh begitu. Harus standar ya standar". Ada sebagian *murabbi* yang mencoba merujuk pada standar yang berlaku, namun hal tersebut sering terkendala oleh terbatasnya kapasitas mereka. Kelemahan tersebut terkait dengan belum terbangunnya tradisi keilmuan yang kuat dalam budaya *ikhwan* di Indonesia, yang berhubungan pula dengan tidak menonjolnya budaya membaca dan berdiskusi, sehingga para kader tidak terpancing untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang *manhaj* dakwah yang mereka jalani. Yang lebih berkembang justru adalah budaya mendengarkan, taat dan kemudian menjalankan, yang merupakan budaya prajurit. Jika tidak segera diubah, proses *tarbiyah* akan sulit untuk menghasilkan sosok-sosok yang cemerlang di berbagai bidang. Kalaupun ada satu-dua figur yang cemerlang, mereka memperoleh kualitas itu dari luar komunitas *tarbiyah*. Bahkan bisa jadi orang yang tadinya cemerlang, lalu masuk ke dalam mekanisme *tarbiyah*, justru menjadi tidak cemerlang. Keadaan ini tidak semestinya dipertahankan karena *asholah*-nya tidak demikian. Kader tersebut menegaskan, "***Ikhwah* itu memiliki standar keilmuan yang tinggi**. *Mutsaqqaful fikri*, luas cakrawala. Luas cakrawala itu berarti harus dibangun tradisi keilmuan yang tinggi. Dan itu belum terjadi". Perubahan itu harus dimulai dari atas. Sosok-sosok yang sudah memegang jabatan penting itu harus menuangkan pemikiran dan menulis buku, karena dari situlah *fikrah* ini dibangun dan terus diperbaharui. Sebagai contoh, Dewan Syariah Pusat (DSP) mestinya

sudah mengeluarkan buku standar fikih, sehingga Jemaah Tarbiyah tidak perlu terus-menerus mengimpor buku-buku fikih *ikhwan* dari luar yang notabene ditulis oleh para ulama yang tidak memahami kondisi Indonesia.

Belum terbangunnya tradisi keilmuan yang kuat juga terkait dengan mekanisme penyampaian ilmu secara berjenjang yang terdapat dalam sistem *tarbiyah*. Seorang kader menganalisis:

> "**Penyampaian ilmu berjenjang, itu dari sudut komando ada efektifitasnya, tapi dari sudut keilmuan itu justru cara paling buruk.** Kan kalau dalam keilmuan itu siapa yang ketemu sumber paling deket, itulah yang paling *shahih* kan? ... Tapi kalau sumber dari yang paling jauh itu yang paling tidak sah ... Dan *liqa'at* itu selalu ketemu sumber yang paling jauh ... Karena kan kalau dari sana kurang 10%, kurang 10%, sampe sana 30%. Ini yang terjadi ... menghasilkan apa dalam *liqa* kayak gitu?".

Proses penyampaian materi secara berjenjang tersebut juga menyebabkan kelemahan-kelemahan pada suatu jenjang terbawa terus ketika seorang kader naik ke jenjang yang lebih tinggi dan mengemban amanah yang lebih besar. Solusinya adalah memangkas jalur penyampaian ilmu yang berantai sedemikian panjang itu, di mana para ustadz yang kompeten menyampaikan ilmu-ilmu mereka secara langsung kepada para kader, sehingga para kader memiliki cakrawala keilmuan yang lebih luas daripada yang mereka peroleh dari *murabbi* masing-masing.

Selain persoalan standar pengelolaan *tarbiyah* yang belum cukup detil dan kapasitas para *murabbi* yang belum sesuai dengan standar, terdapat catatan tersendiri tentang mekanisme *taqwim*, evaluasi kenaikan jenjang *tarbiyah* kader. Dalam proses *taqwim*, kesepuluh *muwashafat* kader, yang dirinci menjadi sejumlah indikator, dicocokkan dengan capaian kader yang dievalusi. Namun standar-standar yang ada bersifat kualitatif atau bersifat tekstual, sehingga subjektifitas *murabbi* atau *naqib* sebagai pihak yang menilai menjadi sangat dominan. Seorang kader menggambarkan persoalan ini sebagai berikut:

> "Ini ada ribuan kelas dengan guru masing-masing. Keputusan ini nggak bisa di *cross* dengan keputusan yang sana karena ada otonomi kan setiap *liqoat* itu. Sehingga misalnya ada anak yang hebat di sini ini nggak bisa ... Standar gurunya tinggi banget".

Subjektifitas para *murabbi* dalam menilai *mutarabbi*-nya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, pemahaman *murabbi* yang bersangkutan terhadap standar nilai yang diinginkan. Kedua, hubungan pribadi antara *murabbi* sebagai *muqawwim* dengan *mutarabbi* sebagai *muqawwam*. Dalam beberapa kasus, rasa suka atau tidak suka sangat mempengaruhi. Ketiga, pemahaman *murabbi* yang bersangkutan terhadap doktrin-doktrin tertentu, misalnya loyalitas dan ketaatan. *Mutarabbi* yang kritis dan cerdas jika dibina oleh *murabbi* yang mengedepankan loyalitas dan ketaatan yang diterjemahkan sebagai sikap menerima atau diam, bisa dinilai ”bermasalah”, sehingga menghadapi kendala dalam proses *taqwim* yang dijalaninya, bahkan terbawa terus sepanjang proses *tarbiyah* yang bersangkutan sehingga menghambat, atau mematikan ”karir”nya di struktur jemaah. Dalam perspektif Bourdieu, pemberian label ”bermasalah” kepada seorang kader adalah bentuk kekerasan simbolik *(symbolic violence)* yang berakibat melemahnya posisi objektif kader tersebut di arena Jemaah Tarbiyah.

Selain itu, dalam proses *taqwim* para *murabbi* sering terjebak pada formalitas, di mana yang dikejar adalah pemenuhan rumusan-rumusan yang tertulis, semacam *check list.* Pendekatan seperti itu tidak tepat untuk mengelola manusia. Di sisi lain, sering juga terjadi permakluman-permakluman terhadap berbagai kekurangan para *muqawwam*, sehingga walaupun kader tersebut dinaikkan jenjangnya, terdapat sejumlah indikator penting, primer, yang belum terpenuhi.[13]

Sebenarnya kelemahan-kelemahan yang menyangkut pengelolaan *tarbiyah* tersebut sudah disadari oleh struktur PKS di pusat. Tampaknya Presiden Partai merasa bahwa Bidang Kaderisasi tidak bergerak cukup cepat, sehingga ia membentuk Tim Manhaj yang langsung berada di bawah kendali Presiden Partai. Tugas ini antara lain menuangkan *manhaj tarbiyah* yang terinci dan terstandarisasi ke dalam suatu dokumen tertulis. Namun dalam prakteknya Tim Manhaj cenderung stagnan, hampir tidak bergerak, karena berhadapan dengan resistensi Bidang Kaderisasi yang menganggap bahwa standar-standar yang ada selama ini sudah cukup untuk menjadi rujukan pengelolaan *tarbiyah*. Seorang

[13] Menurut keterangan seorang kader senior, *qadirin ‘alal kasbi*, berpenghasilan yang memadai, adalah kriteria yang sering terabaikan dalam proses *taqwim*.

kader mengatakan, "**Kita punya tradisi lemah.** Harus diakui. **Jadi kalau kita mengajak cepet gerak, nggak bisa**. Ketika kita tantang menulis buku *manhaj*, udahlah yang ada aja". Stagnasi Tim Manhaj ini patut disayangkan karena sebenarnya keberadaan tim ini merupakan terobosan yang luar biasa. Bidang Kaderisasi semestinya bersikap lebih bijak dan fleksibel, serta berfokus pada kualitas pembinaan, bukan pada ego sektoral, maupun formalitas struktural. Kader yang sama menuturkan, "**Mestinya kita nggak *saklek*. Lha ini kaderisasi ini kurang *wise***. Kalau aku sih maunya oke kita terbuka aja, moderen saja. Misalnya dalam jumlah *halaqoh* ini kan nggak ada *nash*-nya, nggak ada hadistnya, harus 12. Ini nggak penting kayak gitu-gitu".

Dalam sistem di PKS, *liqa* pekanan juga merupakan mekanisme pokok untuk menjaga soliditas jemaah. Dalam konteks itu, peran *liqa* adalah memastikan kelancaran arus informasi dan komunikasi dari bawah ke atas *(bottom up)*, berupa pertanyaan, keberatan, *qadhaya* (masalah), maupun dari atas ke bawah *(top down)*, dalam bentuk *ta'limat* (pengumuman), *bayanat* (penjelasan), instruksi, dan lain-lain. Seorang anggota MPP menuturkan, "**Jadi sistemnya kita itu sebetulnya, kalau ada masalah apa-apa diselesaikan di bawah. Kalau ada masukan segala macem disampaikan ke atas**".

Bahkan, *liqa* punya peran yang kian strategis, karena institusi ini dilibatkan dalam pendistribusian tugas-tugas di jabatan struktural untuk para kader, di mana setiap *murabbi* atau *naqib* harus memiliki informasi lengkap tentang tugas-tugas struktural yang dibebankan kepada para anggotanya. Sebaliknya, mereka juga selalu diminta memberikan masukan dan rekomendasi tentang anggota-anggota mereka yang akan atau sedang memperoleh tugas-tugas struktural.

Di samping itu, *liqa* pekanan juga berperan memastikan bahwa para kader PKS, khususnya yang berkiprah di ranah publik, tetap terjaga integritasnya dalam soal-soal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan. Untuk itu, para kader harus bersikap transparan mengenai berbagai hal, termasuk sumber-sumber keuangan yang mereka peroleh. Semetara para *murabbi* dan *naqib* perlu melakukan fungsi pengawasan dengan efektif. Ketika hal-hal tersebut tidak

terjaga, tidak menutup kemungkinan kader-kader PKS akan tergoda untuk melakukan penyimpangan.

Namun demikian, di lapangan sistem yang di atas kertas sudah cukup baik itu tidak sepenuhnya terimplementasikan. Proses *syura* musyawarah di tingkat terendah yang mestinya ada di masing-masing *liqa* kadang-kadang tidak berjalan. Demikian pula nilai-nilai *ukhuwwah* dan silaturahmi yang mestinya dipraktikkan di antara anggota sebuah *liqa*, belum sepenuhnya dilaksanakan. Kelemahan sebagian *mas'ul* (ketua, penanggungjawab) kelompok *liqa* dalam mengemban amanah merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian kelompok *liqa* yang ada belum berfungsi dengan optimal dalam melaksanakan peran-peran strategisnya. Seorang kader senior menuturkan:

> "**Sekarang ada beberapa ketua yang kurang amanah kali ya** ... dia punya anggota, anggotanya nggak puas, anggotanya nggak dateng, 2-3 kali, dia bahkan harus dateng nyamperin, silaturrahim. Kenapa nggak dateng? Mungkin sakit, atau nggak ada duit buat jalan. Kasi dong uangnya, dateng gitu. Jadi nilai-nilai yang kita pelajari di mana *ukhuwwah* segala macem seharusnya diterapkan di sini".

Melemahnya kondisi *tarbiyah* yang digambarkan di atas mungkin juga berkaitan dengan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh para kader PKS saat ini. Seorang kader senior yang lain mengatakan:

> "Saya melihatnya ini karena **kita banyak beban ... karakter kita ini masih numpuk di sektor ketiga**. Kami punya sedikit data bahwa yang di sektor privat sangat sedkit, yang di pegawai negeri juga 10-20% paling banyak, selebihnya kita terlibat dalam banyak interaksi internal. Di yayasan, sekolah ... **Di saat yang sama anak sudah bertambah besar bertambah jumlah juga**".

Memang menjadi lebih sulit bagi para kader PKS untuk menjaga idealisme dan militansi pada saat harus berhadapan dengan realita tantangan kehidupan ekonomi yang semakin berat. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar kader PKS mengawali keterlibatan mereka dengan Jemaah Tarbiyah pada saat di bangku kuliah, atau bahkan sekolah. Para kader muda yang rata-rata belum memiliki tanggungan keluarga tersebut terekrut dan terbina pada masa di mana jemaah ini berfokus pada *tarbiyah,* pembinaan kader. Hasilnya, terbentuklah kader-kader yang memiliki militansi yang sangat tinggi. Sementara saat ini, di satu sisi jemaah

ini telah melibatkan diri dalam ”hiruk-pikuk” politik negara, sehingga konsentrasi pada *tarbiyah* mungkin sekali terbelah, sedangkan di sisi lain para kadernya juga berhadapan dengan realita kehidupan pribadi dan keluarga, khususnya dari sisi tuntutan kebutuhan ekonomi, yang semakin rumit. Dengan kata lain, perubahan kondisi internal para kader PKS juga berpengaruh terhadap ”makanan” yang dibutuhkan untuk memotivasi mereka bergerak. Seorang informan menuturkan:

> “Kalau dulu permulaan PKS makannya cukup spiritual dan semangat ... Tapi **setelah kita besar dan setelah para pendiri dan para pemainnya ini juga sudah masuk dalam ranah pribadi yang sudah membutuhkan ‘kehidupan yang wajar’ maka porsi spiritual dan itunya tidak sebesar dulu**. Jadi itu lebih ke *balance* ya. *More* 50:50”.

Kondisi PKS yang digambarkan di atas dipandang masih lebih baik dibandingkan dengan partai-partai lain, karena porsi spiritual dan semangat masih cukup besar, walaupun saat ini memang suara-suara yang menuntut ”pasokan logistik” sebagai prasyarat untuk dapat bergerak lebih kerap terdengar dibandingkan dulu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika soliditas dan gerakan massa merupakan tututan utama, porsi tersebut bisa kembali berubah, di mana aspek spritual dan semangat kembali dominan.

Tabel 5.4
Ikhtisar Pandangan tentang Kondisi *Tarbiyah*

No	Kondisi *Tarbiyah*
A	**Intensitas *Tarbiyah***
1	Terdapat penurunan intensitas dan militansi *tarbiyah* karena tekanan kebutuhan ekonomi.
2	*Liqa* sering didominasi oleh pembicaraan tentang politik praktis yang menimbulkan kejenuhan.
3	Pasca 2004 terjadi penurunan intensitas dan efektifitas perangkat-perangkat *tarbiyah*.
4	Menurunnya intensitas kaderisasi di kampus-kampus yang sebelumnya menjadi basis gerakan Jemaah Tarbiyah.
B	**Kualitas Materi *Tarbiyah***
1	Standar materi *tarbiyah* belum dituliskan dengan rinci, sehingga para *murabbi* banyak melakukan kreasi masing-masing.
2	Materi-materi *tarbiyah* tidak *up to date*, sehingga tidak memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan kontemporer yang ada dan bagaimana menyikapinya.
C	**Kualitas Pengelola *Tarbiyah***
1	Sebagian *murabbi* belum memenuhi standar kualifikasi, sehingga tidak mampu mengimplementasikan Manhaj Tarbiyah dengan baik.
2	Sebagian penanggung jawab *halaqah* belum cukup bertanggung jawab dalam memonitor keberlangsungan *tarbiyah* dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi para anggota kelompoknya.

No	Kondisi *Tarbiyah*
D	**Kualitas Proses**
1	*Liqa* belum berperan optimal sebagai ”jembatan” komunikasi *top-down* dan *bottom-up*.
2	Tradisi keilmuan yang kuat belum terbangun, sehingga materi-materi yang disampikan di *halaqah* menjadi sempit dan kering.
3	Mekanisme penyampaian materi yang berjenjang menimbulkan masalah dari sisi orisinalitas dan kedalaman substansi yang disampaikan.
4	Proses *taqwim* sering terjebak pada formalitas, permakluman terhadap kriteria atau indikator yang belum terpenuhi, dan subjektifitas pihak yang mengevaluasi.
E	**Kualitas dan Kuantitas Output**
1	Baru menghasilkan kader-kader yang saleh secara pribadi tapi belum kokoh, khsusnya dari segi pemikiran, sehingga mudah terguncang ketika berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan idealita.
2	Belum membuahkan kemenangan politik yang diharapkan.

Melemahnya perhatian terhadap *tarbiyah* sebagai ”jantung” kaderisasi juga terjadi di kampus-kampus. Hal ini patut disayangkan karena sejak awal gerakan dakwah di kampus-kampus merupakan tulang punggung Jemaah Tarbiyah. Belakangan ini seolah-olah terdapat *tradeoff* antara politik praktis dan dakwah. Perhatian dan alokasi sumberdaya untuk kegiatan-kegiatan dakwah, khususnya kaderisasi, berkurang, karena banyak ustadz yang terserap ke dalam aktifitas politik praktis, bahkan menempati jabatan-jabatan publik. Dampaknya, kampus sebagai ”dapur” kaderisasi seperti ”anak ayam kehilangan induk”. Seorang kader senior yang duduk di MPP mengatakan, “**Jadi, rekrutmen bisa gagal ... mungkin besar tapi dia nggak berkembang**”. Persoalannya ada pada kualitas manajemen pembinaan yang belum memadai. Jika hal ini tidak segera ditangani, PKS bisa menghadapi masalah yang serius kesinambungan kaderisasi.

5.2. Potret Budaya Organisasi PKS

5.2.1. Nuansa Tasawuf/Sufi dalam Budaya PKS

Tidak mungkin menangkap gambaran budaya organisasi manapun secara utuh hanya melalui kata-kata. Orang perlu tinggal dan hidup cukup lama di dalam sebuah organisasi untuk mampu memahami budayanya, karena budaya organisasi lebih banyak berkaitan dengan “apa yang dirasakan” ketimbang “apa yang dipahami”. Namun demikian, dari wawancara dengan para informan, tertangkap sejumlah elemen penting dalam budaya PKS. Pergulatan internal yang dirasakan

seorang kader sejak mulai *tarbiyah* hingga menjadi Anggota Inti dapat memberikan gambaran tentang budaya yang berkembang di entitas ini. Ia menuturkan:

> "Cukup rumit dinamikanya karena saya memiliki karakter sangat kritis, kritis sekali. Kemudian saya punya *background syariah* yang cukup ya, sehingga tidak semua budaya yang ada di sini bisa saya terima ... tidak semua *murabbi* itu mau meyakinkan saya bahwa dia pantas jadi *murabbi* saya".

Kader tersebut juga membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk mengubah orientasinya dari mencari ilmu menjadi membangun kedewasaan bersikap dalam bentuk kerendahan hati, kemampuan menjalin hubungan yang konstruktif dengan orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Dari proses yang berliku itu akhirnya ia belajar untuk mengatur ritme dan mengubah gaya, karena ia menyadari bahwa budaya Jemaah Tarbiyah tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter pribadinya. Perubahan tersebut ia gambarkan sebagai berikut:

> "Misalnya kayak independensi, terus memperjuangkan keyakinan atau pemikiran, terus kritis, itu tetep ada, cuman **tensi dan *style*-nya yang mungkin agak berbeda sehingga penempatannya akhirnya berbeda dan hasilnya juga sangat berbeda**. Kalau saya punya pesan, saya akan yakinkan terus-terusan. Saya akan yakinkan sampai mengikuti pemikiran saya, dan selama ini berjalan baik".

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sikap **kritis**, **terbuka**, **mengemukakan pandangan yang berbeda**, dan **banyak berargumen**, bukanlah hal-hal yang menjadi budaya Jemaah Tarbiyah. Sebaliknya, **taat**, **rendah hati**, **menahan diri**, **mudah menerima**, dan **mengutamakan kesesuaian dan kebersamaan dengan orang banyak**, adalah sikap-sikap yang dihargai.

Latar belakang tasawuf Hasan al-Banna, pendirin Ikhwan al-Muslimin, cukup berpengaruh terhadap budaya yang berkembang di jemaah ini. Walaupun demikian tidak berarti al-Banna secara sengaja membangun budaya seperti itu. Dengan kata lain, tafsir individu terhadap berbagai rujukan yang ada, yang kemudian mewujud dalam berbagai praksis individu yang diwariskan turun-temurun, sangat berperan dalam membangun budaya Jemaah Tarbiyah yang terobservasi saat ini. Di samping itu, sebagai orang pertama, gaya kepemimpinan Ustadz Hilmi Aminuddin pasti memiliki pengaruh yang signifikan di Jemaah

Tarbiyah. Selain tasawuf, warna militer juga terlihat dalam *fikrah* Ikhwan al-Muslimin yang diadopsi oleh Jemaah Tarbiyah. Seorang kader lain menegaskan, "***Fikrah* ini juga memang ada karakter tasawuf-nya, karakter militernya. Itu sudah menjadi dokumen-dokumen khusus sejarah kepartaian ini**".

Hasan al-Banna memang menempatkan tasawuf sebagai hal yang penting dalam dakwah. Bahkan ia menyebutnya sebagai *'ulum at-tarbiyah wa as-suluk*, ilmu pembinaan dan perilaku. Dalam pandangannya tasawuf muncul sebagai reaksi para ulama yang saleh terhadap merebaknya kemewahan yang dipandang berlebihan setelah pemerintahan Islam pasca Nabi Muhammad saw mencapai kemakmuran. Ia mengatakan:

> "Tidak dapat diragukan lagi bahwa ia (maksudnya tasawuf) merupakan bagian dari intisari Islam. Tidak dapat disangsikan pula bahwa dengan ilmu itu, kaum sufi dapat meraih suatu jenjang yang tidak dapat diraih oleh orang-orang selain mereka, yakni jenjang terapi dan pengobatan jiwa. Dengan cara itu pula mereka telah membawa umat manusia agar melakukan amal nyata, yaitu melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta benar-benar menghadapkan diri kepada-Nya, sekalipun seringkali terjebak dalam tindakan yang berlebihan. Ini karena pengaruh semangat perlawanan terhadap kondisi zaman ketika itu. Misalnya berlebihan dalam berdiam diri, menahan lapar, tidak tidur malam, dan *uzlah* ... **Kalau saja pengamalannya proporsional, tepat pada garis-garis yang telah ditetapkan oleh *syara'*, tentu hal itu merupakan gudang segala kebaikan**" (al-Banna, 2006: 44-45).

Jejak-jejak tasawuf memang terlihat cukup jelas dalam *fikrah* Ikhwan al-Muslimin yang diadopsi oleh Jemaah Tarbiyah. Salah satunya adalah tradisi *dzikir al-matsurat* yang berisi doa-doa yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad saw, yang kemudian dirangkai oleh Hasan al-Banna. *Dzikir al-matsurat* ini dijadikan *wazhifah* yang dianjurkan dilakukan dua kali sehari, pagi dan petang, oleh para kader. Dalam tradisi Ikhwan al-Muslimin dan Jemaah Tarbiyah, *wazhifah* tersebut sering dibaca secara berjemaah (bersama-sama), misalnya ketika sedang mengikuti *daurah*, di dalam *halaqah*, atau pertemuan-pertemuan lainnya. Dalam kondisi waktu yang sempit, atau hal-hal lain yang membuat tidak memungkinkan bagi para kader untuk membaca *wazhifah* yang cukup panjang tersebut secara lengkap, mereka tetap dianjurkan untuk membaca *wazhifah sughra*

(amalan kecil) yang lebih singkat. Terkait dengan hal tersebut al-Banna mengatakan:

> ”Apabila seorang aktivis mendapatkan waktunya sempit, atau mengetahui kelesuan pada diri maupun saudara-saudaranya, jika membaca amalan di atas bersama mereka, maka hendaklah ia meringkas seperti berikut ini. Bacalah *ta’awudz* (permohonan berlindung kepada Allah dari godaan setan), al-Fatihah (surat pertama dalam Al Qur-an), ayat kursi (Qur-an surat al-Baqarah ayat 255-256), tiga ayat terakhir al-Baqarah, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas (tiga surat pendek di akhir Qur-an) masing-masing tiga kali. Kemudian bacalah dzikir dan doa yang telah disebutkan di atas sampai *istighfar* (permohonan ampun pada Allah) yang terakhir ... (al-Banna, 2007: 381).

Di bagian akhir pengamalan *wazhifah* biasanya dibacakan *wirid rabithah* yang dimaksudkan untuk memperkuat ikatan hati di antara para kader dan *ukhuwwah islamiyyah* di antara seluruh kaum muslimin (2007: 432-434). *Wirid rabithah* diawali dengan Al Qur-an surat Ali Imran ayat 26-27 yang menggambarkan pengakuan atas ke-Maha Kuasa-an Allah SWT dalam segala hal. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ”Ya, Allah, sesungguhnya ini adalah malam-Mu yang menjelang, dan siang-Mu yang tengah berlalu serta suara-suara doa untuk-Mu, maka ampunilah aku”. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya dari *wirid rabithah* al-Banna menganjurkan, ”hendaklah berusaha mengingat saudara-saudaranya yang dikenal dan merasakan adanya hubungan batin antara dia dengan saudara-saudaranya yang belum dikenal, kemudian berdoa untuk mereka semua”. Terjemahan dari doa yang terdapat dalam *wirid rabithah* adalah sebagai berikut:

> ”Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul atas dasar kecintaan pada-Mu, bertemu atas dasar ketaatan pada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru (di jalan)-Mu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu, maka kuatkan ikatan pertaliannya ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalan-jalannya, dan penuhilah ia dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu, hidupkanlah ia dengan pengenalan pada-Mu, dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kami, Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya”.

Jika kita simak, nuansa tasawuf tergambar jelas dalam kalimat-kalimat *wirid rabithah* di atas, seperti kecintaan yang mendalam kepada Allah, iman dan tawakal kepada-Nya, *marifatullah* (mengenal Allah), dan harapan untuk berjumpa dengan Allah, di samping kecintaan kepada Nabi serta ikatan *ukhuwwah* dengan sesama muslim, khususnya mereka yang sama-sama berkiprah di jalan dakwah.

Ustadz Hilmi Aminuddin kerap mendorong dan mengingatkan para kader Jemaah Tarbiyah untuk mengamalkan *dzikir matsurat* tersebut dengan tekun dan rutin, karena tantangan dakwah yang demikian berat membutuhkan dukungan kekuatan rohani yang kokoh. Seorang murid Ustadz Hilmi menuturkan salah satu nasihat sang guru:

> "Dzikir ikhwan itu nggak boleh ditinggalkan. *Laa ilaaha illallah* 100 kali, *istighfar, astaghfirullah* 100 kali, *laa ilaa ha illallah* 100 kali, *shalawat* Nabi 100 kali. Itu dzikir ikhwan yang nggak boleh kalian tinggalkan ... Karena apa? Beban dakwahnya berat. **Karena kalian adalah pemegang beban yang berat jadi, harus kekuatan *ma'nawiyah*-nya kepada Allah harus lebih kuat**".

Informan tersebut sangat bersyukur dan merasakan manfaat dari kuatnya doktrin berdzikir yang selalu ditekankan di Jemaah Tarbiyah. Bahkan ia yakin bahwa capaian yang sudah diraih oleh PKS saat ini merupakan buah dari kedekatan dengan Allah SWT.

Selain pada amalan dzikir dan doa yang merupakan bagian penting dari amalan harian para kader, jejak tasawuf al-Banna juga terlihat pada **"10 Wasiat Hasan al-Banna"**[14] yang sangat populer di kalangan para kader Jemaah Tarbiyah, bahkan sebagian dari mereka menghafalkannya. Kesepuluh wasiat tersebut adalah:

1. Bangunlah segera untuk melaksanakan shalat apabila mendengar adzan walau bagaimanapun keadaanmu.
2. Baca, telaah, dan dengarlah Al Qur-an, berdzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan janganlah engkau senang menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada faedahnya.
3. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa dan berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.

[14] Diolah dari buku "Sepuluh Wasiat Hasan al-Banna" (1991).

4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang percakapan karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan.
5. Jangan banyak tertawa, sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (berdzikir) adalah tenang dan tenteram.
6. Jangan suka bergurau, karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh- sungguh terus-menerus.
7. Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal itu akan mengganggu dan menyakiti.
8. Jauhilah *ghibah* (menggunjing) atau menyakiti hati orang lain dalam bentuk apa pun dan janganlah berbicara kecuali yang baik.
9. Berkenalanlah dengan saudaramu yang engkau temui walaupun dia tidak meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan *ta'awwun* (saling menolong).
10. Pekerjaan rumah kita sebenarnya lebih bertumpuk daripada waktu yang tersedia, maka tolonglah saudaramu untuk memanfaatkan waktunya, dan apabila kalian mempunyai keperluan maka sederhanakan dan cepatlah diselesaikan.

Kesepuluh wasiat al-Banna di atas, khususnya wasiat pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, menunjukkan warna tasawuf yang sangat menonjol. Sementara wasiat ketiga mungkin merupakan salah satu hal yang membuat Bahasa Arab menjadi kompetensi yang bernilai sangat tinggi dalam komunitas Jemaah Tarbiyah.

5.2.2. Kecenderungan Menghindari Perdebatan dan Diskusi

Secara tidak langsung budaya yang bernuansa tasawuf tersebut berimplikasi pada kurang berkembangnya diskusi dan tradisi keilmuan dalam komunitas Jemaah Tarbiyah, karena yang memancing budaya keilmuan yang tinggi adalah diskusi, riset, dan apresiasi terhadap pendapat-pendapat yang bervariasi. Seorang kader mengatakan:

> "**Kalau orang keilmuan kan suka debat**. Orang *fiqih*, orang '*ushul*, itu kan suka diskusi. Orang hadist itu hasil diskusi. **Kalau tidak, nggak keluar ilmu**. **Tasawuf nggak, dia nggak pake diskusi ... Pake rasa**. Dan Itu dominan di sini. Diskusi kan tidak terlalu berkembang di sini ... Terus **kita akan tidak cukup mudah mendapatkan ahli-ahli di pengembangan keilmuan**".

Budaya yang lebih banyak menggunakan rasa itulah yang oleh kader tersebut diistilahkan sebagai "budaya komunikasi yang hening". Ia mengatakan, "**Hening maksudnya kita sering diem, pokoknya mengharap orang sana tau** … Kalo kader nggak tau ya salah kalian". Senada dengan itu, seorang kader senior mengatakan, "Jadi memang di PKS itu kulturnya tadi, sesuai dengan kita ya, mirip kultur Jawa. **Yang namanya kritik secara langsung nggak akan pernah ada**". Ada pula pengurus DPP yang mengatakan, "Jadi nggak bagusnya, **ikhwah itu sok *jaim-jaim*, nggak mau munculin perbedaan, tapi di belakang, ngomongin**".

Budaya yang minim diskusi dan *top down* tersebut juga berimplikasi pada bentuk hubungan yang terjalin antara seorang *murabbi* dengan para *mutarabbi*-nya. Ada beberapa ustadz atau *murabbi* yang tidak mugah menerima masukan dari binaanya. Mereka menuntut para *mutarabbi* taat pada mereka. Ditengarai bahwa budaya tidak banyak bicara itu bersumber dari wasiat al-Banna yang keempat yang disalah-artikan. Seorang informan menggambarkannya sebagai berikut:

> "Doktrinnya itu kita akan lebih fokus ke amal ... Kita ini akan lebih banyak berbuat daripada berbicara. Itu makanya **ikhwah itu kapasitas bicaranya lebih rendah daripada kapasitas kerjanya**. Makanya kalau disuruh demo lebih pinter daripada disuruh orasi. **Padahal bicara itu kerja untuk posisi tertentu**, kayak orator, motivator. Itu bicara ... Iya *wong* kita kerjaannya ngomong. Jadi kerja itu tidak harus selalu pakai tangan. Sebagian kerja pakai mulut. Rapat itu kan pakai mulut".

Karena sudah merupakan budaya maka kondisi-kondisi yang digambarkan di atas diterima oleh para kader sebagai sesuatu yang wajar dan sudah semestinya. Budaya merupakan sebuah pilihan, dan tidak terkait dengan salah atau benar. Namun demikian, sejauh mana budaya yang ada tersebut berpengaruh sangat tergantung pada karakter dasar dari masing-masing pribadi. Seorang kader yang aktif mengelola *halaqah* menggambarkan, "Saya tidak punya budaya itu. **Kalau saya membina itu saya membawa budaya intelektual, keulamaan, terus profesional**". Budaya yang berkembang tersebut tidak memiliki doktrin tertentu sebagai dasarnya. Bahkan rumusan aslinya *(das sollen)* justru sangat berbeda dengan budaya yang terobservasi secara empirik *(das sein)*, karena *Murabbi* seyogianya mengambil peran sebagai orangtua, sekaligus *mursyid* (guru spiritual),

qa'id (pimpinan, komandan), dan sahabat. Dengan demikian, jika *murabbi* menjadi "penguasa" yang tak bisa dibantah, artinya doktrin dasar tersebut telah disalahpahami.

5.2.3. Penghormatan yang Tinggi Terhadap *Murabbi* dan Ustadz

Dalam budaya Jemaah Tarbiyah terdapat penghormatan yang luar biasa terhadap ustadz, *murabbi* atau guru. Hal ini mirip dengan penghormatan para murid kepada *mursyid*-nya dalam tarekat atau tasawuf. Dalam konteks inilah mengapa para kader yang dibina langsung oleh Ustadz Hilmi Aminuddin, sangat sungkan kepada beliau. Hal itu pula salah satu faktor yang membuat Ustadz Hilmi menjadi *Murraqib 'Am* dalam kurun waktu yang panjang. Beliau sangat dihormati karena menjadi *murabbi* dari para kader. Sebaliknya, para kader tidak memberikan penghormatan yang tinggi kepada para kader senior yang selama ini tidak menunjukkan kiprahnya sebagai *murabbi* atau hanya menjadi pejabat partai. Bahkan, *ewuh-pakewuh* para kader terhadap *murabbi* mereka juga ikut mewarnai hubungan kerja mereka dalam kerangka struktur partai. Seorang anggota MPP menggambarkan kondisi tersebut, "Di dalam dia menghormati gurunya ... **kalau gurunya itu berada di DPP dan dia ada di DPP, nggak mungkin dia menentang gurunya**. Itu jelas".

Namun ternyata peran ustadz di komunitas Jemaah Tarbiyah juga punya catatan. Para ustadz yang berlatar belakang pendidikan keagamaan cenderung menjadi generalis, seolah-olah mampu menjawab semua persoalan. Padahal, mesti terdapat penghargaan terhadap otoritas keilmuan yang beragam, di mana masing-masing orang punya kapasitas untuk memberikan analisis atau solusi atas persoalan yang terkait dengan bidang ilmu yang dikuasainya.

5.2.4. *Confirmity* dan *Compliance*

Selain penuturan para informan, kuatnya nilai-nilai *confirmity* dan *compliance* dalam budaya organisasi PKS juga tergambar pada teks janji setia untuk masing-masing jenjang keanggotaan PKS sebagaimana tercantum pada Bab III Pasal 6 ayat 1 huruf a. Janji setia Anggota Pemula *(Tamhidi)* berbunyi sebagai berikut:

> "Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, komitmen kepada visi, misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan".

Janji setia Anggota Muda *(Mu'ayyid)* adalah sebagai berikut:

> "Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, menjalankan syariat-Nya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan sesama Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan kaum muslimin lainnya, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan".

Terlihat dalam teks janji setia Anggota Muda, janji yang lebih spesifik untuk menjalankan syariat-Nya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta menjalin *ukhuwah* (persaudaraan) dengan sesama anggota PKS dan kaum muslim lainnya, menggantikan kalimat yang lebih umum, komitmen kepada visi, misi, dan tujuan PKS, yang terdapat dalam teks janji setia Anggota Pemula.

Selanjutnya, janji setia Anggota Madya *(Muntashib)* adalah sebagai berikut:

> "Saya berjanji kepada Allah Yang Maha Agung untuk beramal bersama Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka membela syariat-Nya dan berdakwah kepada-Nya, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, dan tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan".

Dibandingkan dengan janji setia Anggota Muda, janji setia Anggota Madya memiliki beberapa penekanan khusus. Pertama, secara eksplisit disebutkan bahwa anggota berjanji kepada Allah Yang Maha Agung. Artinya, bobot janjinya menjadi lebih berat dibandingkan dua jenjang sebelumnya yang hanya mengatakan "saya berjanji". Kemudian komitmen untuk melakukan *'amal*

jama'iy dalam kerangka berpartai di PKS untuk membela syariat Islam dan mendakwahkan Islam juga dinyatakan secara tegas. Di samping itu, komitmen untuk menjalankan kewajiban anggota juga tidak lagi hanya sampai tingkat "semaksimal kemampuan".

Sementara itu, janji setia Anggota Dewasa *(Muntazhim)* adalah sebagai berikut:

> "Saya berjanji setia kepada Allah Yang Maha Agung untuk mendengar dan ta'at dalam menta'ati Allah, Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya dalam kondisi giat maupun malas dalam keadaan mudah maupun sulit dengan bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, dan tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan".

Jika dalam janji setia Anggota Madya yang ditekankan adalah nilai *'amal jama'iy* dan berdakwah maka dalam janji setia Anggota Dewasa yang ditekankan adalah nilai *sam'an wa tha'atan* dalam segala keadaan dan ber-*jihad* (berjuang dengan sungguh-sungguh) di jalan Allah.

Sedangkan janji setia Anggota Ahli *('Amil)* dan Anggota Purna *(Mutakhasis)* adalah sebagai berikut:

> "Saya berjanji kepada Allah Yang Maha Agung untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam dan berjihad di jalan-Nya, untuk memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dan kewajiban-kewajibannya, dan untuk mendengar dan taat kepada pimpinannya dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam hal tidak maksiat, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Untuk itulah saya berjanji setia, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan".

Dalam janji setia Anggota Ahli dan Anggota Purna terlihat bahwa di samping nilai jihad dan nilai kesempurnaan dalam memenuhi segala ketentuan sebagai anggota PKS, ditekankan pula nilai ketaatan kepada pimpinan Partai dalam segala kondisi sejauh dianggap tidak termasuk ke dalam maksiat.

Kalau dicermati setidaknya terdapat tiga benang merah yang menghubungkan isi janji setia Anggota PKS pada keenam jenjang keanggotaannya. Pertama, semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin spesifik dan ketat komitmen anggota yang bersangkutan terhadap struktur partai. Pada jenjang Anggota Pemula dan Anggota Muda yang merupakan Anggota Pendukung, para anggota baru diminta berkomitmen terhadap Islam secara umum. Kalaupun anggota di jenjang ini diminta komitmennya kepada partai, baru dalam bentuk yang sangat umum, yaitu visi, misi, tujuan, serta AD/ART Partai. Sementara itu, Kader Inti, yang dimulai di jenjang Anggota Madya, diminta untuk berkomitmen kepada *'amal jama'iy* dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera, mulai dari membela syariat-Nya dan berdakwah kepada-Nya (Anggota Madya), berjihad di jalan-Nya dalam segala keadaan (Anggota Dewasa), serta berjihad di jalan-Nya dan menaati pemimpin partai dalam segala keadaan selama bukan maksiat (Anggota Ahli dan Anggota Purna). Kedua, semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin kuat pula nilai-nilai ketaatan diinternalisasikan. Ketiga, kepada para anggota di jenjang manapun dikehendaki untuk tidak membuka urusan internal partai kepada pihak eksternal. Dalam konteks ini, ungkapan "jangan membuka aib jemaah" sangat lazim di kalangan para kader PKS. Namun demikian, sangat disadari bahwa kemampuan anggota dalam menjaga rahasia partai bervariasi, dan secara umum tergantung pada jenjang keanggotaan masing-masing. Karena itu, informasi, terutama yang dipandang bernilai strategis, diberikan dalam bentuk *taklimat* yang disampaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat keanggotaan. Secara umum tentunya semakin rendah jenjang keanggotaan seseorang, semakin terbatas pula informasi yang dapat dia peroleh secara struktural-formal, walaupun tidak menutup kemungkinan ia dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap melaui jalur-jalur informal.

Nilai komitmen dan ketaatan kepada jemaah dilembagakan antara lain dalam bentuk lembaga tripartit Dewan Syariah Pusat (DSP), Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), dan Bidang Kaderisasi (dahulu disebut BPK, Badan Pembinaan Kader). Secara umum ketiga lembaga ini bertugas memastikan *comfirmity* dan *compliance* dari para kader PKS, khususnya mereka yang sudah berada di jenjang Anggota Inti, terhadap norma-norma organisasi. Diyakini bahwa

dengan adanya ketiga lembaga tersebut PKS memiliki sistem yang terlembagakan untuk memastikan bahwa secara institusi ada upaya-upaya untuk menjaga partai ini tetap bersih, walaupun tidak ada jaminan bahwa seluruh individu kader PKS bersih dari kesalahan.

DSP bertugas mengklarifikasi dan menilai kasus-kasus yang ditengarai terkait dengan syariat. Menurut Bab VIII Pasal 23 ayat 3, peran tersebut dilakukan terutama oleh *Lajnah Tahqiq* yang bertugas melakukan kajian terhadap setiap permasalahan pelanggaran syariat yang diajukan ke DSP, dan *Lajnah Qadha* yang melakukan pemrosesan suatu masalah atas suatu pihak yang diajukan ke DSP. Dengan kata lain, DSP merupakan lembaga yang bertugas menjaga *syariah compliance*, baik terkait kebijakan partai maupun perilaku kader-kadernya. Ketua DSP PKS menegaskan, "Dewan Syariah ini kan untuk memastikan bahwa partai kebijakan-kebijakannya ini sesuai syariat, begitu. Lalu perilaku kadernya juga tidak menyimpang dari syariat. Kan itu dua pekerjaan. **Mengawal komitmen dan kepatuhan pada syariat atau *syari'ah compliance*-nya** lah gitu".

Sebelum menjatuhkan sanksi, seperti skorsing, pemberhentian antar-waktu atau PAW (bagi anggota Dewan), atau pemecatan, DSP sebagai lembaga peradilan internal terlebih dahulu akan memberikan rambu-rambu di awal dan *warning* ketika melihat gejala-gejala pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut. *Warning* adalah hal yang normal, karena dalam situasi yang perpolitikan yang sangat dinamis saat ini para kader PKS harus bermanuver dengan cepat. Sejauh ini, *warning* dipandang sudah cukup untuk membuat kader-kader PKS kembali menaati rambu yang telah ditetapkan. Kasus-kasus yang dilaporkan ke DSP tidak langsung diperiksa atau dikenakan sanksi, karena DSP terlebih dahulu akan memanggil kader yang terlibat untuk melakukan proses *tabayyun*. Jika laporan tersebut tidak valid, atau bukti awalnya tidak cukup, kasus tersebut tidak dilanjutkan. Namun jika DSP berkeyakinan bahwa memang terdapat kasus yang nyata, prosesnya diteruskan. Ketua DSP menengarai bahwa kesan yang ditangkap di eksternal PKS sering berbeda dengan realitanya. Kasus-kasus yang belum jelas, atau kasus yang menyangkut kader yang bukan Anggota Inti, sehingga berada di luar kontrol partai, atau bahkan kasus yang sebenarnya tidak ada, kerap di-*blow*

up oleh pihak-pihak yang tidak memahami realita yang sebenarnya atau oleh pesaing PKS.

Sebagai ilustrasi terdapat dua contoh kasus di mana DSP menjalankan perannya. Contoh pertama terkait dengan *khatta 'amali*, kesalahan yang menyangkut perbuatan yang dilakukan seorang kader, tidak menyangkut hal yang lebih mendasar seperti *aqidah*. Seorang Anggota Ahli, anggota Majelis Syura, menikahi seorang gadis tanpa wali orangtua dan menggunakan wali hakim. DSP memutuskan bahwa kader yang bersangkutan melanggar syariat, sehingga pernikahannya batal, dan ia harus menceraikan isterinya. Kader tersebut dipecat dari Majelis Syura dan diskors selama enam bulan tidak boleh berkiprah di struktur partai. Karena kader tersebut dengan taat menjalankan *'iqab* yang dijatuhkan, kesalahannya kemudian dimaafkan dan karirnya di partai kembali dipulihkan, di mana ia kembali menjadi anggota Majelis Syura, menjadi anggota MPP, dan menjadi anggota Dewan dari PKS. Contoh yang kedua terkait dengan *khatta 'asasi*, persoalan yang sangat fundamental, yaitu *aqidah*. Seorang kader lain memutuskan menjadi *Syiah*. Bagi PKS yang menganut Islam Sunni, hal ini adalah persoalan mendasar yang menyangkut *aqidah*, sehingga kader tersebut dikeluarkan dari partai. Ketika diberi pilihan, istri kader tersebut memilih untuk bercerai dari suaminya. Setelah bercerai, karena tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai, mantan istri kader tersebut mendapatkan *kafalah* dari jemaah dan dari individu kader senior partai. Dari dua contoh tersebut terlihat bahwa kasus yang terkait dengan *khatta 'amali,* kesalahan di tataran perbuatan lebih mudah *ma'fu,* termaafkan, ketimbang kasus yang terkait dengan *khatta' asasi,* kesalahan di tataran asas atau *aqidah*, sejauh kader yang melakukannya mengakui kesalahan tersebut dan taat menjalankan hukuman yang diberikan kepadanya.

BPDO, sesuai dengan namanya, Badan Penegak Disiplin Organisasi, bertugas menilai dan kemudian memutuskan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan disiplin organisasi. Sebagai contoh, seorang kader PKS di Kalimantan bersikeras untuk maju sebagai calon gubernur dalam pemilukada setempat, padahal partai melarangnya karena telah mengambil

keputusan yang lain. Sebagai konsekuensinya, kader tersebut dikeluarkan dari partai karena tindakannya dinilai menyimpang dari kebijakan partai.

Sementara itu, Bidang Kaderisasi akan mengevaluasi jenjang keanggotaan setiap kader dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi menyangkut dirinya. Jika terjadi kasus yang serius, baik terkait dengan pelanggaran syariat maupun pelanggaran disiplin organisasi, bukan tidak mungkin jenjang keanggotaan kader yang bersangkutan diturunkan. Sebagai contoh, ada seorang kader PKS di jenjang Anggota Ahli yang melakukan sebuah kesalahan, sehingga oleh Bidang Kaderisasi jenjangnya diturunkan tiga tingkat menjadi Anggota Muda. Namun kader ini menerima sanksi yang diberikan tersebut dengan taat, dan kembali mengikuti *halaqah* bersama-sama para *Mu'ayyid* lainnya. Saat ini kader yang bersangkutan jenjangnya sudah naik kembali ke Anggota Dewasa. Di satu sisi, bagi kader-kader yang serius "berkarir" di partai, adanya sanksi berupa penurunan jenjang keanggotaan ini tentu saja merupakan peringatan yang serius, karena setiap jabatan struktural di partai mempunyai prasyarat jenjang keanggotaan minimum. Misalnya, para Ketua Bidang di DPP harus Anggota Ahli, sementara para Ketua Departemen minimum Anggota Dewasa. Di sisi lain, terdapat keyakinan bahwa adanya mekanisme sanksi tersebut merupakan hikmah berjemaah, di mana hukuman tersebut merupakan *kafarat* di dunia, sebelum dihukum oleh Allah SWT di akhirat. Jika seorang muslim tidak berjemaah, tidak ada orang yang tahu dan peduli, apalagi memberikan sanksi ketika dia salah, sehingga mungkin saja dia tidak menyadari dan kemudian larut dalam kesalahan tersebut. Seorang pengurus DPP menuturkan:

> "Jamaah ini baik banget menurut saya. **Sepanjang ia tidak merongrong jamaah, kewibawaan jamaah** ... kesalahan besar yang dilakukan siapapun, mau dari segi apapun, misalnya dia melakukan apapun, penipuan, pidana, atau apapun, kalo udah dihukum, dia bisa kembali lagi, merintis karir lagi".

Kuatnya nilai-nilai *conformity* dan *compliance* juga terlihat dari mulusnya proses pergantian para pimpinan di berbagai jenjang di PKS, termasuk Presiden Partai. PKS yang memiliki struktur yang relatif kuat tidak banyak dipengaruhi oleh individu. Seorang kader menggambarkan proses pemilihan Presiden PKS, "**Memang mulus, karena ada pengaruh Majelis Syura**. **Dari awal nggak ada**

dinamika yang terlalu bagaimana. Biasa aja. Dari NI ke HNW, dari HNW ke TS, dari TS ke LHI. Mulus-mulus saja. Nggak tinggi dinamikanya. Nggak ada perang di *syura"*.

Mulusnya proses pergantian pimpinan partai tersebut juga terjadi di tingkat-tingkat yang lebih rendah. Dengan bangga seorang pimpinan organ PKS di pusat membandingkan momen pemilihan pimpinan yang di partai-partai lain sering diwarnai dengan ketegangan dan friksi, bahkan "adu jotos" dan *money politics*, di PKS dapat berjalan tanpa gejolak melalui mekanisme pemilu internal yang mengakomodasi suara para kader dan kewenangan pimpinan di jenjang yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk pemilihan pimpinan DPD (Kabupaten/Kota), para kader akan memberikan suara sesuai dengan kuota masing-masing jenjang, misalnya Kader Pendukung mempunyai kuota satu suara. Hasil pemilihan tersebut akan diranking untuk mendapatkan sepuluh besar. Selanjutnya, DPW akan menentukan pengurus DPD yang bersangkutan dari nama-nama yang masuk dalam sepuluh besar tersebut. Sementara itu, kewenangan untuk menentukan pengurus DPW ada pada DPP. Mekanisme ini diyakini memiliki dua keunggulan. Pertama, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) pimpinan yang terpilih tinggal diumumkan, sehingga Muswil dan Musda bisa fokus pada pembahasan program kerja, tidak lagi disibukkan dengan pemilihan orang, yang di partai-partai lain justru menyedot perhatian para peserta musyawarah. Kedua, pemilihan pimpinan di tiap jenjang dilakukan dalam situasi tenang, tidak terburu-buru, dan tidak emosional, oleh pimpinan di jenjang yang lebih tinggi.[15]

Kuatnya nilai-nilai *conformity* dan *compliance* bahkan bisa berdampak serius terhadap karir seorang kader PKS dalam struktur partai. Contohnya, proses kenaikan jenjang keanggotaan seorang pengurus DPP menjadi Anggota Ahli yang menghadapi banyak penentangan dan kontroversi, karena yang bersangkutan dinilai sebagai sosok yang arogan, terutama dalam berkomunikasi di ranah publik. Kenaikan jenjang tersebut baru bisa dilakukan setelah ada sejumlah pembelaan mengenai sikap-sikap kader tersebut.

[15] Mulai kepengurusan DPP 2010 mekanisme pemilu internal dihapuskan, sehingga pimpinan di suatu jenjang kepengurusan ditentapkan oleh jenjang kepengurusan di atasnya.

Contoh lainnya menyangkut seorang kader muda PKS, Doktor Ekonomi lulusan Inggris yang cukup dikenal di komunitas ilmuwan internasional. Sebagian kalangan memandang kader tersebut sebenarnya sudah layak untuk menjadi Anggota Ahli, namun hingga saat ini jenjang keanggotannya terhambat di Anggota Dewasa. Ditengarai hubungan kader tersebut dengan *naqib* di *usrah*-nya kurang harmonis karena yang bersangkutan melakukan *ta'addud* tanpa berkonsultasi dengan *naqib*-nya. Seorang perempuan kader senior menuturkan, "Seperti si Fulan dapet profesor orang Singapur, ya kenapa gitu? Yang penting kan dia nikah sah. Yang nggak boleh kan zina. Yang nggak boleh kan maksiat, gini, gini. Terus nggak membahayakan jamaah. Dia nggak memusuhi jamaah".[16] Kader tersebut juga dinilai terlalu dekat dengan Barat, khususnya Amerika, mungkin karena kader yang menjadi dosen terbang di beberapa Unviersitas di luar negeri tersebut memiliki *priviledge* dari pemerintah Amerika, seperti dapat masuk tanpa visa dan lain-lain. Di samping itu, di mata sementara pihak ia dilihat sebagai sosok yang terlalu berambisi, yang terlihat antara lain dari *career plan*-nya di partai, di mana ia ingin suatu saat nanti menjadi Presiden Partai. Dalam budaya dengan nilai-nilai *confirmity* dan *compliance* yang kuat, kader yang berambisi yang besar, apalagi untuk menjadi pimpinan puncak partai, bukanlah sosok yang disukai, walaupun ada yang memandang bahwa ia sebenarnya kader yang baik. Kader yang bersangkutan menyatakan keinginan untuk mendapatkan peran dalam kepengurusan DPP 2005-2010 agar bisa membantu dan berkontribusi, namun ternyata ia tidak mendapatkan posisi apa-apa. Di sisi lain, reaksi kader tersebut seperti *mutung* dan tertutup. Hal tersebut disayangkan oleh seorang informan, karena dengan berbagai kapasitas yang dimilikinya mestinya ia tetap menunjukkan eksistensinya sebagai kader PKS, walaupun saat ini tidak menduduki jabatan di struktur partai, dan bersamaan dengan itu memperbaiki hubungan dengan *naqib*-nya, sehingga jenjang keanggotaannya bisa naik dengan lebih mudah.

[16] Kasus yang mirip terjadi pada saat seorang pejabat partai menikah lagi dengan perempuan berkebangsaan asing. Kader yang sama menggambarkan reaksi internal PKS tentang hal tersebut, "Wah ini, si Anu dapet orang ... *So what??* Boneka Barbie, segala macem. Ibu-ibu itu suka yang rada reseh gitu ya".

Seorang informan lain juga menyayangkan kader tersebut tidak terakomodasi dalam kepengurusan baru DPP PKS, karena ia adalah sosok yang mewakili globalisasi PKS, yang mencoba menerjemahkan konsep-konsep yang tadinya asing menjadi lebih Indonesia. Bahkan, sejak awal ia sudah secara sadar memasarkan PKS sebagai "Partai Terbuka". Dalam konteks ini, informan tersebut mempertanyakan, jika benar PKS ingin lebih terbuka mengapa orang seperti itu justru tidak mendapatkan tempat.

Dalam konteks ini terdapat kritik terhadap peran DSP dan BPDO. Di era baru ini mestinya Dewan Syariah mengambil peran-peran besar, misalnya melakukan riset tentang kecenderungan-kecenderungan di masa depan dan bagaimana syariat Islam merespon kecenderungan-kecenderungan tersebut. Sementara itu, pengawasan terhadap sejauh mana perilaku para kader sesuai dengan syariat, menjadi pengadilan internal, dan sejenisnya, seyogianya diserahkan kepada mekanisme manajerial yang dilakukan oleh BPDO, karena pada hakikatnya yang ingin ditegakkan adalah disiplin berorganisasi. Seorang anggota Dewan dari PKS yang duduk di Komisi Hukum menegaskan, "**Mengontrol apakah orang ini sesuai dengan syariah dan lain sebagianya itu serahkan kepada mekanisme *managerial.* Selama itu tertulis baik secara etik maupun secara peraturan ya tegakkan. Itu adalah konsekuensi berorganisasi. Tapi tidak perlu ada polisi *syariah*"**.Dengan demikian, Dewan Syariah tidak disibukkan dengan perkara-perkara kecil, seperti kontrol terhadap kader yang menikah, fikih tentang bersalaman dengan lawan jenis, dan lain-lain. Apalagi ulama tingkat dunia seperti Dr. Yusuf Qardhawi telah mengeluarkan fatwa yang luas dan lapang tentang kasus-kasus tersebut, sehingga tidak ada urgensinya PKS membuat fatwa baru.

Kuatnya nilai ketaatan ini juga meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh kader yang "nakal". Sebagai contoh, seorang informan membantah klaim seorang anggota Dewan dari PKS bahwa berbagai pernyataan publiknya yang kerap dinilai kasar atau arogan, serta tidak mencerminkan kesantunan kader Partai Dakwah, dilakukannya atas instruksi partai. Informan tersebut mengatakan:

> "Emang dia maunya begitu. Itu anak kan politisi banget dari dulu. **Dan yang paling aman di PKS inikan kalau buat alasan kita katakan ini atas arahan struktur**. Udah aman ... Dari dulu itu, dari dulu, dari belum ada partai ini. Improvisasi sendiri. Suruh tanya ustadz siapa. Apa bener itu arahan struktur".

Bagian yang ditebalkan dalam kutipan di atas menunjukkan celah tersebut. Dalam struktur yang berjenjang, sentralistis, dan mengedepankan *confirmity* dan *compliance*, klaim bahwa sesuatu adalah "arahan dari atas" memang sangat *powerful* dan sulit digugat, karena pada kader yang berada di bawah praktis tidak memiliki akses untuk melakukan konfirmasi. Hal yang sama dikemukakan oleh seorang informan lain dalam konteks kiprah dakwah pada kader Jemaah Tarbiyah di kampus-kampus. Ia menyoroti perilaku elit dari para aktifis ini yang sering mengklaim bahwa sebuah keputusan atau langkah (yang biasanya tidak populer) adalah "arahan dari atas". Ia menuturkan:

> "**Itu sangat menjadi jumawa gitu ya gerakan itu kalau kesadaran akan celah otoritas ini dimanfaatkan untuk melembagakan keinginan-keinginan yang sempit. Atau melembagakan karakter dia yang sempit.** Misalkan tadi, karakter dia yang kurang bisa bergaul, tidak bisa menerima perbedaan. Nggak bisa me-*manage* dengan baik, nggak kompeten, terus dia lembagakan dengan alasan, ini amanah dari atas".

Padahal, arahan dari struktur Jemaah Tarbiyah tersebut biasanya bersifat global, hanya menyangkut target-target, dan tidak menyentuh hal-hal yang teknis dan taktis, *how to.*

5.2.5. *Ta'awwun* (Saling Menolong)

Secara umum diyakini bahwa PKS memiliki budaya *ta'awwun* (saling menolong) yang kuat, khususnya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan finansial yang dihadapi oleh sesama kader atau keluarga mereka, sehingga persaingan atau friksi yang disebabkan oleh "kecemburuan finansial" sebenarnya tidak perlu terjadi. Diyakini pula jika ada kader PKS yang punya perasaan-perasaan seperti itu, dengan sendirinya ia akan keluar dari partai. Sebagai contoh, seorang informan menggambarkan bagaimana Presiden PKS saat ini ingin memastikan bahwa anak-anak kader PKS, khususnya yang orangtuanya sudah Anggota Inti, dapat bersekolah dengan baik, sehingga mereka yang mengalami kesulitan

keuangan dapat mengajukan permohonan bantuan. Di samping itu, para janda dari kader-kader senior, para perintis dakwah yang sudah wafat, juga mendapatkan *kafalah* yang relatif besar, baik dari jemaah, maupun dari individu-individu kader senior atau pejabat partai yang memiliki keluangan rizki. Informan tersebut menuturkan, "Ada seperti orang ngeluh, gini, gini, mulutnya tajam, kritis, itu oh ternyata dia nggak punya rumah. Itu ada dikontrakin, ada yang dibeliin rumah".

Informan tersebut juga menggambarkan bahwa secara pribadi Ustadz Hilmi sangat penuh perhatian terhadap para kader yang mengalami kesulitan keuangan. Banyak janda aktifis dakwah yang datang langsung kepada Ustadz Hilmi untuk meminta bantuan keuangan. Adapula rekannya yang juga murid Ustadz Hilmi, dan sekarang berdakwah di daerah kumuh, sering meminta bantuan kepada beliau. Di kesempatan lain ia menelpon langsung Ustadz Hilmi pada saat anak seorang kader harus dioperasi. Ketika itu beliau mengontak Bendahara Partai yang kemudian mengucurkan bantuan yang mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan menurutnya, salah satu mantan kader senior PKS yang sudah keluar dan memusuhi partai, serta sering berkata-kata kasar tentang Ustadz Hilmi, adalah orang yang paling sering memperoleh bantuan keuangan dari beliau.[17]

Selain dengan memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada kader atau keluarganya yang membutuhkan, nilai *ta'awwun* juga diekspresikan dengan cara memberikan posisi yang memungkinkan seorang kader memperoleh *maisyah* yang dibutuhkannya. Seorang informan mengisahkan, dalam sebuah pemilu, perolehan suara PKS di Jawa Timur yang tertinggi adalah SS (Surabaya), disusul oleh seorang kader yang sekarang sudah keluar dari partai (Magetan), dan kemudian LHI (Malang), namun masing-masing suaranya tidak mencukupi untuk satu kursi, sehingga harus digabung. Dengan pertimbangan kader yang menjadi caleg dari dapil Magetan membutuhkan sumber *maisyah*, sedangkan SS adalah perempuan yang nafkahnya ditanggung oleh suaminya, *syura* memutuskan kursi tersebut diberikan kepada kader tersebut.

[17] Keterangan ini dibantah oleh mantan kader senior yang bersangkutan. Ia mengatakan bahwa dirinya memang sempat menerima *kafalah* yang jumlahnya tidak seberapa dari jemaah, bukan dari Ustadz Hilmi secara pribadi, sebelum menjadi partai, sebagai konsekuensi dari tugas jemaah yang menuntutnya bekerja *full-time* mengelola suatu aktifitas tertentu.

Ustadz Hilmi juga selalu memotivasi para kader untuk ber-*ta'awwun*. Menurut informan tersebut, dalam *taujih* yang disampaikannya Ustadz Hilmi sering menegur para kader karena para janda yang mengalami kesulitan keuangan sampai-sampai harus datang langsung kepada beliau. Beliau meminta agar persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan di *halaqah* atau *usrah* masing-masing. Namun jika tidak mampu diselesaikan di bawah, Ustadz Hilmi tidak berkeberatan jika masalah itu sampai kepada beliau.

Seorang kader lain tidak setuju dengan pengekpresian nilai *ta'awwun* dalam bentuk pemberian *kafalah*. Ia berujar, "Saya termasuk nggak setuju pake uang dibantu-bantu. Tapi itu sistem PKS yang eksis ... Ya menurut saya **secara ekonomi itu bener-bener tidak sehat**. ... Tidak sehat gitu. Sinterklas gitu ya. Nggak sehat". Dalam pandangan kader tersebut, berlakunya sistem *kafalah* secara tidak langsung menghambat terciptanya iklim yang kondusif untuk membangun kemandirian ekonomi para kader PKS.

Lebih lanjut, nilai *ta'awwun* juga diekspresikan dalam bentuk memberikan kontribusi finansial yang cukup signifikan untuk partai yang dipotong dari penghasilan para kader sebagai pejabat publik. Keberhasilan para kader PKS mengalami mobilitas vertikal hingga menempati jabatan-jabatan publik tidak bisa dilepaskan dari dukungan konstituen, yang jika ditelisik lebih jauh merupakan buah dari mobilitas horisontal, kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh struktur partai, serta dukungan infrastruktur, seperti Kantor DPP dengan segala kelengkapannya, hingga ke petugas *security*, *office boy*¸ dan lain-lain. Oleh karena itu sangat wajar dan masuk akal jika penghasilan para pejabat publik dari PKS tersebut dipotong dalam jumlah yang cukup signifikan, misalnya Rp 20 juta per bulan untuk anggota Dewan di pusat, guna memutar kembali aktifitas-aktifitas dakwah, mendorong mobilitas horisontal, yang pada gilirannya akan meningkatkan dukungan konstituen kepada partai, dan kemudian akan memperbesar peluang kader-kader PKS untuk terpilih kembali. Seorang perempuan kader senior yang sudah tiga periode menjadi anggota Dewan menggambarkan keheranan rekan-rekannya sesama anggota dewan dari partai-partai lain tentang besarnya potongan gaji anggota Dewan di PKS. Ia bersyukur dan senang karena bisa turut membesarkan partai, bukan sekedar memperbanyak

kekayaan pribadi. Apalagi dana-dana dari potongan gaji anggota Dewan tersebut dibelikan fasilitas yang bisa membantu meningkatkan mobilitas para kader PKS yang ditempatkan di struktur partai di daerah-daerah. Ia menuturkan:

> "Alhamdulillah, kita semua senang-senang saja karena kita bisa membesarkan partai, bukan membesarkan diri. Kita bisa membelikan mobil untuk partai ... Misalnya gini, saya selama lima tahun di DPR ya, misalnya kita bisa memberikan Innova untuk wilayah mana dengan nama saya terus nama yang lain ... sehingga struktur partai itu kan semua punya mobil ya. Ketuanya, terus sekretarisnya, dan nanti DPD semua punya mobil".

Informan tersebut memberikan makna kontribusi finansial yang diberikannya kepada partai tersebut sebagai bentuk *jihad maliyah,* perjuangan dengan harta, yang melengkapi bentuk-bentuk perjuangan lainnya.

Tabel 5.5
Ikhisar Budaya Organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS

No	Elemen Budaya	Ekspresi/Impilkasi
1	Pengaruh kuat dari tasawuf	♦ Pengamalan dzikir *matsurat* dan berbagai ritual ibadah yang lain untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. ♦ Anjuran untuk bersikap tenang, tidak mengeraskan suara, tidak banyak bergurau dan tertawa, dan menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan orang lain.
2	Cenderung menghindari debat dan diskusi	♦ Budaya komunikasi yang "hening". ♦ Kader diminta tahu dan mengerti dengan sendirinya tentang sebuah pesan yang tidak dikemukakan secara eksplisit. ♦ Tidak mengungkapkan perbedaan atau ketidaksetujuan secara terbuka, namun kadang-kadang "kasak-kusuk" di belakang. ♦ Sebagian ustadz atau *murabbi* tidak mudah menerima masukan dari murid-muridnya.
3	Penghormatan yang tinggi terhadap *murabbi* atau ustadz	♦ Pimpinan partai yang meiliki *track* sebagai *murabbi* mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi daripada mereka yang sekedar "pejabat partai". ♦ Rasa sungkan, *ewuh pakewuh*, yang terbawa ke dalam interaksi formal dalam organisasi.
4	*Conformity* dan *compliance*	♦ Janji setia anggota PKS yang mencerminkan semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin spesifik dan ketat pula komitmen dan ketaatan kepada struktur partai, di samping tuntutan agar para kader tidak membawa persoalan organisasi ke luar. ♦ Tripartit, terdiri dari Dewan Syariah Pusat (DSP), Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), dan Bidang Kaderisasi, yang secara bersama-sama menjaga *compliance* para kader terhadap syariat Islam maupun aturan dan norma organisasi. ♦ *Iqab*, antara lain berupa penurunan jenjang keanggotaan, terhadap pelanggaran syariat yang terkait dengan *khatta 'amali* (amal/perbuatan).

No	Elemen Budaya	Ekspresi/Impilkasi
		♦ Sanksi pemecatan untuk pelanggaran yang terkait dengan akidah, maupun pembangkangan terhadap keputusan partai. ♦ Kader yang melakukan kesalahan besar sekalipun jika telah menjalani *iqab* yang dijatuhkan, akan diterima kembali. ♦ Mulusnya proses pergantian pejabat-pejabat partai di tingkat pusat maupun wilayah/daerah. ♦ Kader-kader yang dinilai bermasalah oleh *murabbi*, *naqib*, atau lingkungan pergaulannya di komunitas Jemaah Tarbiyah cenderung terhambat kenaikan jenjang keanggotaan maupun "karir"-nya di struktur Partai.
5	*Ta'awwun* (saling menolong)	♦ Kader senior atau keluarganya yang mengalami kesulitan keuangan mendapatkan *kafalah*, baik dari jemaah maupun dari perorangan. ♦ Kesempatan/peluang untuk memperoleh *maisyah* diprioritaskan untuk kader yang lebih membutuhkan secara ekonomi. ♦ Ustadz Hilmi sering memotivasi para kader untuk saling ber-*ta'awwun* dengan mengupayakan agar kesulitan keuangan para kader dicoba diselesaikan di *usrah* masing-masing. ♦ Kewajiban infak yang relatif besar bagi pada kader yang menjadi pejabat publik untuk mengisi kas Partai, yang dipandang sebagai *jihad maliyah* (jihad dengan harta).

5.2.6. Catatan tentang Budaya Organisasi PKS

Berbagai ekspresi dari budaya Jemaah Tarbiyah/PKS yang telah diulas di atas membuat pihak-pihak eksternal punya penilaian tersendiri tentang entitas ini, misalnya kurang demokratis. Namun budaya organisasi adalah pilihan. Tidak terkait dengan benar atau salah. Pada akhirnya ukuran yang paling valid adalah apakah masyarakat menyukai pilihan budaya atau pilihan gaya yang diambil PKS, yang diekspresikan dengan memberikan dukungan atau tidak pada saat pemilu.

Namun demikian, ada sebuah catatan kecil yang menarik dari seorang anggota Dewan dari PKS tentang perkembangan internal yang terjadi pasca Pemilu 2004, dan semakin menguat akhir-akhir ini. Menurutnya, di dalam PKS mulai terbangun budaya terbuka terhadap perbedaan pendapat, perdebatan, masukan, dan kritik. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah mekanisme yang mampu secara efektif mengelola perbedaan pendapat, masukan, dan kritik yang berkembang tersebut agar *cohesiveness* dalam organisasi dapat terpelihara. Menurut seorang informan, *cohesiveness* tersebut akan terjadi jika, "*each member understands on what the organization is doing*".

Upaya untuk membangun budaya yang lebih menghargai diskusi dan keilmuan sebenarnya juga sudah dilakukan. Seorang informan menuturkan bahwa pernah dilakukan suatu *muttaqa fikri,* forum curah gagasan, di mana terjadi perdebatan yang sangat menarik antara AM, Sekjen, yang sering dipersepsikan sebagai icon "kelompok pragmatis" dengan Dr. Ahzami Samiun Jazuli, anggota DSP yang menurutnya sering menjadi tempat mengadu orang-orang FKP tentang "liarnya" pemikiran dan sepak terjang AM. Informan tersebut menggambarkan perdebatan yang terjadi sebagai berikut:

> "Di situ dia berdiri dan menanyakan apa alasan kamu begini, begini, begini. AM langsung menjawab dengan baik, dengan lugas, ada sumber-sumbernya, ada dalil-dalilnya, ada kitabnya, sampai Dr. Azhani, istilahnya oke, *khalas*. Dia puas sekali. Dan bahkan AM dengan posisi bisa bilang, tolong Ustadz buku ini *antum* bahas, bedah di DSP".

Menurut informan tersebut, pedebatan yang terjadi berlangsung *fair*, di mana proses tukar pikiran dan beradu *hujjah* berlangsung dengan sangat terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Dalam konteks interaksi dengan pihak-pihak eksternal, para kader PKS perlu bersikap *open minded* dan tenang dalam menerima kritik, bahkan yang bernada penghinaan atau cacian sekalipun. Seorang informan mencontohkan bagaimana seorang dosennya sangat sering memberikan kritik yang pedas tentang kiprah kader PKS. Salah satunya tentang kegiatan pemberian sembako murah untuk masyarkat di suatu wilayah, namun warga dibuat menunggu lama karena didahului dengan rangkaian pidato yang panjang. Dosen itu melontarkan kecaman, "Belum jadi penguasa udah *dzalim.* Orang disuruh nunggu empat jam, pidato, cuma mau kasih sembako murah. Nyebelin!" Ia menampung kritik itu dan berjanji menyampaikannya kepada kader PKS yang bersangkutan. Bahkan dosen yang sama pernah memelesetkan singkatan PKS menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) sebagai ekspresi ketidaksukaannya. Menurut informan tersebut ia hanya merespon, "Bukan PSK Bu, PKS". Pernah pula dosen yang lain, seorang profesor, mengeluarkan kritik-kritik tajam tentang PKS. Ia meresponnya dengan menghubungkan profesor tersebung langsung dengan Ustadz Hilmi Aminuddin, karena ia tahu profesor itu mengagumi Ustadz Hilmi. Ia melakukan itu untuk

menunjukkan bahwa PKS, termasuk pimpinan teringginya, bersikap terbuka terhadap kritik.

5.3. Majelis Syura dalam Tradisi PKS

5.3.1. *Syura* dalam Islam

Sebagai sebuah Partai Islam yang mengklaim dirinya sebagai Partai Dakwah, *syura* musyawarah, yang diformalkan dalam bentuk institusi Majelis Syura, menempati posisi sentral dalam kiprah PKS, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan strategis. Jabir mengatakan, "*Syura* ialah mengeluarkan berbagai pendapat tentang suatu masalah untuk dikaji dan diketahui berbagai aspeknya sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan" (2009: 69).

Di dalam tradisi Islam, *syura* adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang sangat penting. Bahkan surat yang ke-42 di dalam Al Qur-an di beri nama surat Asy Syuura. Tradisi *syura* merujuk antara lain pada firman Allah SWT dalam Al Qur-an, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka" (surat Asy Syuura, 41: 38). Demikian pula firman Allah SWT, "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (surat Ali 'Imran, 3: 159).

Sumber hukum Islam yang utama di samping Al Qur-an, yaitu hadits Nabi Muhammad saw juga memberikan beberapa isyarat tentang pentingnya *syura*, antara lain seperti yang dikutip oleh Jabir berikut ini:

> "Apabila pemimpin-pemimpin kamu orang-orang yang baik, apabila orang-orang kaya di antara kamu orang-orang yang murah hati, dan apabila perkara kamu dimusyawarahkan di antara kamu, permukaan bumi ini (hidup) lebih baik bagi kamu daripada perut bumi (mati)" (2009: 76-77)

Selain itu Jabir juga mengutip hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menggambarkan pentingnya *syura* untuk memperoleh kebaikan kolektif, "Demi Allah, tidaklah suatu kaum melaksanakan *syura* kecuali mereka diberi

petunjuk kepada hasil-hasil yang terbaik". Demikian pula hadits yang lain, "Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan kecewa orang yang minta dipilihkan" (2009: 77).

Setelah mengkaji berbagai sumber dari ulama-ulama terdahulu, Jabir menyimpulkan terdapat enam syarat bagi anggota Majelis Syura, yaitu: (1) *'adalah* (mampu bersikap adil), (2) bertakwa dan bersih dari dosa kepada Allah dan umat, (3) berilmu, antara lain mengetahui Al Qur-an dan As Sunnah, serta ilmu-ilmu bahasa, dan tafsir; (4) berpengalaman dalam masalah yang dimusyawarahkan, (5) berakal cerdas dan matang, (6) jujur dan amanah (2009: 96).

Mengingat anggota-anggota Majelis Syura adalah manusia-manusia yang sangat mungkin memiliki pandangan dan pendapat yang beragama, prinsip mayoritas menjadi sangat penting diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Terkait dengan hal ini, Jabir mengutip hadits Nabu Muhammad saw yang berbunyi, "Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka jika kamu melihat perselisihan, hendaklah kamu berpegang dengan kelompok yang terbanyak" (2009: 99). Jabir juga mengutip hadits yang lain yang terkait dengan prinsip mayoritas, "Dan dua orang lebih baik daripada satu orang, tiga orang lebih baik daripada dua orang, empat orang lebih baik daripada tiga orang. Maka hendaklah kamu berpegang dengan *jama'ah*, karena sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku kecuali di atas petunjuk" (2009: 100).

Terdapat sebuah ilustrasi mengenai proses *syura* antara Nabi Muhammad saw dengan para sahabatnya tentang perlakuan untuk para tawanan peran. Umar bin Khattab, salah sahabat Nabi, mengusulkan tindakan keras, yaitu membunuh mereka, mengingat sebelumnya mereka sering berperilaku kejam terhadap kaum muslim. Sementara Abu Bakar ash-Shiddiq mengusulkan agar para tawanan itu dipekerjakan mengajar baca-tulis untuk sebagian kaum muslim yang masih buta huruf. Ketika itu usul Abu Bakar yang diterima. Kemudian turun firman Allah SWT yang menegur Nabi atas perlakuan yang lemah terhadap orang kafir. Para sahabat Nabi menangis atas teguran itu. Walaupun firman Allah SWT tersebut membenarkan pendapat Umar bin Khattab, namun ia turut menangis bersama

yang lain, karena ia merasa begitu keputusan sudah diambil, dirinya harus ikut menanggung konsekuensi dari keputusan bersama tersebut.

5.3.2. *Syura* dan Majelis Syura di PKS

Syura menempati peran sentral dalam mekanisme pengambilan keputusan, khususnya keputusan-keputusan strategis, di PKS, karena PKS bukan hanya komunitas atau partai, melainkan juga jemaah. Karena PKS adalah jemaah manusia maka perbedaan pendapat menjadi sebuah keniscayaan, sehingga *syura* dibutuhkan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian. Ketua DSP PKS mengatakan, "Untuk sebuah komunitas, apalagi jama'ah, **menjadi tidak sah berjama'ahnya kalau perbedaan pendapat, perbedaan pilihan sikap itu terus tidak ada kerangka penyelesaian** kan?" Pelaksanaan prinsip *syura* tidak bisa dilepaskan dari prinsip penting lainnya, yaitu ketaatan kepada *'ulil amri*. Prinsip yang kedua ini menjamin efektifitas implementasi keputusan-keputusan *syura*. Ketua DSP PKS menegaskan:

> "Keputusan pimpinan itu kan untuk mengeksekusi keputusan-keputusan strategis dari keputusan *syura*, karena **tidak semua hal yang teknis dan detail itu harus di-*syura*-kan setiap waktu** kan. Jadi pimpinan juga ada domainnya untuk tentu eksekusi dan domain untuk membuat keputusan-keputusan yang sejalan dengan keputusan *syura*, begitu".

Syura tidak boleh dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, *syura* hanya diperuntukan untuk menguji pilihan-pilihan yang semuanya halal, untuk menentukan mana yang memberikan maslahat yang terbesar sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi. Karena *syura* dan taat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam maka ketika dilaksanakan dengan baik, keduanya bernilai ibadah.

Dalam organisasi PKS keberadaan Majelis Syura diatur oleh Bab V pasal 11 Anggaran Dasar (AD) dan kemudian dirinci dalam Bab IV pasal 7-13 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS. AD mengatur bahwa Majelis Syura berfungsi sebagai lembaga *"ahlul halli wal 'aqdi"*, atau Majelis Permusyawaratan Partai. Dengan kata lain Majelis Syura merupakan institusi pemutus tertinggi untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis dan hal-hal yang

tidak dapat diputuskan oleh institusi-insitusi lain dalam lingkup partai. Di samping itu, Majelis Syura merupakan forum evaluasi terhadap kebijakan dan program partai.

Ketentuan yang ada mengatur bahwa jumlah anggota Majelis Syura berkisar antara 51 sampai dengan 99 orang, terdiri dari anggota Majelis Syura yang dipilih oleh para Anggota Inti partai melalui mekanisme pemilihan raya, para pakar dan tokoh yang dipilih oleh para anggota Majelis Syura yang dipilih oleh anggota inti partai, dan anggota tetap, yaitu para mantan Ketua Majelis Syura. Persyaratan umum untuk menjadi anggota Majelis Syura adalah telah menjadi Anggota Ahli sekurang-kurangnya selama lima tahun. Dengan demikian dari sekitar 2000 kader PKS di jenjang Anggota Ahli, terdapat sekitar 800 orang yang berpeluang terpilih menjadi anggota Majelis Syura, karena telah berada di jenjang keanggotaan tersebut selama lima tahun atau lebih. Dari 99 orang anggota Majelis Syura PKS saat ini, terdapat sekitar 10%, atau sepuluh orang, anggota perempuan.[18]

Pengambilan keputusan di Majelis Syura dilakukan melalui mufakat atau aklamasi, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemungutan suara jika mufakat atau aklamasi tidak dimungkinkan (MPP PKS, 2008: 592, 608-613). Khusus untuk memilih orang keputusan biasanya diambil melalui *voting*. Dengan kata lain, dalam tradisi pengambilan keputusan di PKS, *voting* adalah hal yang sangat biasa. Bahkan keputusan mendirikan partai dicapai melalui *voting*, bukan mufakat. Keputusan PKS mendukung Amien Rais dalam Pilpren 2004 putaran pertama juga merupakan hasil *voting*. Bahkan pemilihan lebih dari 50% anggota Majelis Syura pun dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Raya yang pada dasarnya juga *one man one vote*. Namun demikian, dapat dipahami bahwa pihak-pihak eksternal sering memandang adanya dinamika dalam proses pengambilan keputusan di PKS yang berujung pada *voting* adalah hal yang luar biasa, karena publik menganggap bahwa para kader PKS mestilah memiliki cara berpikir yang sama, sebab mereka merupakan produk dari suatu proses pembinaan yang ketat

[18] Disampaikan oleh seorang kader senior dalam diskusi informal di ruang pertemuan lantai 2 Gedung DPP PKS TB Simatupang hari Rabu 30 Maret 2011.

dengan sumber-sumber rujukan yang sama. Terkait dengan hal tersebut, seorang informan menegaskan:

> "Walaupun dibina sama, dengan sumber yang sama, tetapi menghadapi hal yang sangat praktis itu sangat mungkin berbeda-beda. Apalagi masalah politik. Pasti sangat memunculkan banyak pemikiran ... **Kalo *syura* nggak ketemu ya *voting***. Mendirikan partai aja kita *voting* kok, tanda ada perbedaan. **Dan perbedaan diselesaikan dengan adu besar suara**".

Informan lain mengatakan:

> "Kita memahami dalam Islam ada prinsip musyawarah. Jadi **kalau itu keputusan syura ya *everybody must say yes,* nggak boleh mengatakan lain** ... Setiap perbedaan pendapat di PKS itu ujung-ujungnya harus diputuskan oleh *syura*, suka nggak suka, kalau Anda masih mengatakan *in group* kita, *so* Anda harus mengatakan iya."[19]

Dalam prinsip *syura* yang diterapkan di PKS, setelah keputusan bersama ditetapkan, sikap awal seseorang yang mungkin berbeda dari keputusan *syura* tidak boleh diungkit-ungkit lagi.

Pelaksanaan musyawarah Majelis Syura di PKS pada dasarnya tidak berbeda dengan rapat atau musyawarah di organisasi-organisasi lainnya: dijalankan berdasarkan agenda pertemuan yang sudah ditentukan sebelumnya, berisi diskusi dan perdebatan karena adanya beragam pendapat yang berbeda, dan proses *mudawalah* tersebut didokumentasikan secara tertulis. Yang menjadi ciri khas adalah adanya ritual pembukaan, berupa pembacaan ayat-ayat suci Al Qur-an dan doa bersama. Bagi komunitas Jemaah Tarbiyah, ritual pembukaan tersebut biasa dilakukan di berbagai kesempatan, termasuk di *liqa* pekanan.

Di samping sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi, Majelis Syura juga merupakan mekanisme yang menjamin seluruh keputusan strategis partai tersampaikan kepada para kader di segenap wilayah dan daerah secara utuh. Jika seluruh anggota Majelis Syura benar-benar menjalankan perannya mewakili para kader di daerahnya masng-masing maka pesoalan-persoalan yang terkait dengan kesenjangan informasi tidak akan terjadi. Terkait dengan hal tersebut,

[19] Informan tersebut mengatakan ini dalam konteks menjelaskan mengapa tokoh-tokoh yang semula secara pribadi tidak setuju Jemaah Tarbiyah menjadi partai politik di tahun 1998 kemudian tampil di garda terdepan dalam melaksanakan keputusan tersebut, bahkan ditunjuk menjadi pimpinan Partai.

seluruh alur pembicaraan dan diskusi yang berlangsung di Majelis Syura sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk notulensi yang dalam waktu relatif singkat dibagikan kepada seluruh anggota Majelis Syura. Dengan demikian, selanjutnya peran para anggota Majelis Syura untuk melakukan sosialisasi kepada kader-kader yang ada di bawah.

Setelah Jemaah Tarbiyah menjadi partai, di mana terjadi lompatan-lompatan besar yang mau tidak mau berimplikasi pada timbulnya friksi-friksi internal, *syura* memiliki peran yang semakin penting. Seorang elit PKS menuturkan:

> "*Shifting* dalam pertumbuhan partai yang mempunyai implikasi-implikasi, seperti kita harus terbuka, jumlah harus banyak, seperti itu kan. Nah, semua implikasi pasti itu pasti menimbulkan gesekan-gesekan internal. Di semua organisasi kan pasti seperti itu. Tetapi **di PKS ada mekanisme internal untuk menyerap gesekan itu menjadi faktor poduktif sehingga tidak berkembang menjadi faktor destruktif. Mekanisme itu namanya *syura***".

Dengan demikian, pada intinya *syura* merupakan mekanisme untuk mengendalikan kebebasan berpendapat, menyerap efek negatif atau destruktif dari perbedaan-perbedaan tersebut, dan kemudian mengubahnya menjadi dinamika yang positif.

5.3.3. Peran Sentral Ustadz Hilmi Aminuddin dan Dinamika Majelis Syura

Dalam ketentuan organisasi PKS yang berlaku saat ini, Ketua Majelis Syura memiliki kewenangan yang sangat besar.[20] Misalnya, Ketua Majelis Syura berwenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, Sekjen, Bendahara Umum, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syura. Bahkan, Ketua Majelis Syura juga berwenang mengajukan orang-orang tertentu untuk menjadi anggota MPP,

[20] Sampai dengan tahun 2005, jabatan *Murraqib 'Am* yang merupakan pimpinan tertinggi Jemaah Tarbiyah yang dipegang oleh Ustadz Hilmi Aminuddin, terpisah dari jabatan Ketua Majelis Syura yang dipegang oleh Ustadz Rahmat Abdullah (alm). Ketika itu, nama Ustadz Hilmi Aminuddin hampit tidak pernah ditampilkan di publik. Menurut seorang informan, kebijakan itu diambil karena situasi dianggap belum kondusif terkait dengan latar belakang orangtua Ustadz Hilmi yang merupakan salah satu tokoh DI/TII Kartosuwiryo. Namun setelah Ustadz Rahmat wafat, jabatan *Murraqib 'Am* dan Ketua Majelis Syura dipegang oleh Ustadz Hilmi Aminuddin.

DPP dan DSP. Di samping itu, Ketua Majelis Syura juga memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau *Majlis Riqabah 'Ammah* (MRA), yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (MPP PKS, 2008: 592). Ditengarai bahwa DPTP dilembagakan dan diperkuat sebagai respon atas kurang sejalannya Presiden dan Sekjen di DPP, atau antara DPP dan MPP, dalam beberapa kasus di masa lalu. Seorang informan mengatakan, "**Sebab dulu kan antara Presiden dengan Sekjen itu, antara DPP dengan MPP salah baca gitu kan. Yang satu belum baca, yang lain bacanya terlalu jauh**". Yang menarik DPTP ini kemudian diadopsi oleh SBY di Demokrat dalam Kongresnya tahun 2010 yang lalu dengan membentuk semacam lembaga tertinggi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina dengan Ketua DPP sebagai wakilnya.

Dominannya peran Ketua Majelis Syura di PKS merupakan pilihan gaya berorganisasi yang sah saja diambil karena mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, khususnya tingkat kematangan PKS sebagai organisasi dan kader-kadernya. Seorang anggota Majelis Syura menggambarkan, "Kalau masih bayi itukan masih butuh pengelolaan yang cukup ini, komplit. Trus juga masih butuh kecepatan. Figur juga sangat menentukan. Saya kira di setiap lembaga kan gitu ... Nah itu mempercepat ini. Tapi begitu melihat proses, ada pendelagasian-pendelegasian".

Sebagian informan melihat bahwa Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura cukup sering menyerahkan pengambilan keputusan kepada *floor*. Bahkan dalam hal-hal tertentu, misalnya penetapan calon Bupati atau Walikota yang akan diusung PKS dalam pemilukada, Ketua Majelis Syura biasanya tidak ikut campur. Seorang kader senior menggambarkan bahwa proses tukar-pikiran di Majelis Syura berlangsung secara dinamis, dan Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura selalu menyerahkan keputusan kepada proses musyawarah. Ia menuturkan:

> "Dan saya melihat di sini bijaknya ya Ustadz. Kadang-kadang kita yang sebagai anggota Majelis Syura itu udah capek dengerin *ikhwah*, kayaknya udah larut masih mau ngomong terus, tapi beliau terbuka sampai saya selalu mencatat ini 22 penanya. Saya selalu catat itu ya. Majelis Syura kesepuluh berapa penanya. Jadi tidak ada istilah otoriter gitu, karena pada prosesnya itu beliau selalu membuka diri".

Mekanisme pengambilan keputusan strategis yang ada di PKS dapat dilihat sebagai *"selective authority"*, atau *"authorized selective consensus"*, di mana ada lembaga-lembaga tinggi partai yang diciptakan sebagai saluran-saluran dalam proses *decision making*, walaupun keputusan terakhir dan tertinggi tetap berada di tangan *Murraqib 'Am* atau Ketua Majelis Syura. Seorang anggota Dewan dari PKS membandingkannya dengan Partai Demokrat dengan mengatakan, "Demokrat *is authoritarian.* Kalau Pak SBY bilang gini, *that's it! And* yang lebih sulit lagi SBY *is at the top and no body can touch him"*. Sementara di PKS sangat berbeda, karena semua orang dapat mengakses Ustadz Hilmi. *"If you knock Ustad Hilmi's door and I'm tell you Ustadz Hilmi* akan terima ... saya tidak pernah dengar beliau tidak mau terima. Orang luar diterima apalagi orang dalem. *At anytime*". Selanjutnya berlangsunglah proses yang alamiah di mana Ustadz Hilmi mempertimbangkan mana alternatif yang terbaik dari berbagai masukan yang diterimanya, dan akhirnya mengambil keputusan.

Namun beberapa informan lain justru menggambarkan bahwa Ketua Majelis Syura adalah sosok yang sangat *powerful*. Sebenarnya proses curah pendapat, diskusi, bahkan perdebatan di Majelis Syura berlangsung sangat dinamis. Dalam beberapa kasus, dinamika itu diakomodasi oleh Ketua Majelis Syura sedemikian rupa lalu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh DPTP, namun kemudian tidak berjalan sepenuhnya sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Syura. Seorang informan menggambarkannya, "**Bukan dipelintir, itu dilaksanakan tapi tidak dengan *passion*, sesuatu yang harus. Nggak ya sudah. Ini tidak berjalan dengan baik ya sudah kita jalan yang lain**". Di samping adanya *ewuh pakewuh* yang cukup kental yang menimbulkan keengganan untuk menggugat mengapa sebuah keputusan tidak dijalankan sepenuhnya, terdapat pula ketentuan di tingkat pelaksanaan yang semakin menguatkan kedudukan dan peran Ketua Majelis Syura tersebut. Informan yang sama mengatakan, "**DPTP itu tidak bisa rapat tanpa Ketua Majelis Syura, tapi Ketua Majelis Syura sendiri dapat melaksanakan DPTP**".

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan seolah-olah Ketua Majelis Syura lebih *powerful* daripada Majelis Syura itu sendiri. Pertama, kesungkanan para murid terhadap gurunya. Sebagian besar kader senior PKS yang

menjadi anggota Majelis Syura adalah *mutarabbi* Ustadz Hilmi selama puluhan tahun sejak Jemaah Tarbiyah berdiri. Kedua, keyakinan bahwa menekankan pendapat pribadi bukan sesuatu yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Hal ini terkait pula dengan keyakinan bahwa tanggungjawab seseorang di hadapan Allah sudah selesai manakala dia telah menyampaikan apa yang diyakininya benar dan baik. Dengan kata lain, tidak ada keharusan untuk meyakinkan orang lain untuk menerima pendapat tersebut, maupun memastikan bahwa pendapat tersebut direalisasikan sebagaimana mestinya. Ketiga, kecenderungan untuk membangun dan mempertahankan harmoni serta menghindari konflik.

Salah satu contoh *mudawalah* yang berlangsung di Majelis Syura menyangkut transparansi sumber keuangan. Seorang anggota Majelis Syura meminta agar nama-nama penyumbang dana dibuka dalam forum. Hal tersebut sempat memancing berbagai reaksi yang membuat suasana cukup menghangat. Ustadz Hilmi menyatakan kesediaannya untuk mengungkap nama penyumbang tersebut. Namun tokoh senior PKS yang lain, yang merupakan pakar syariah mengingatkan, jika penyumbang yang bersangkutan mengamanatkan agar namanya tidak diungkap, amanat tersebut harus dipenuhi. Menurut seorang informan Ustadz Hilmi mengatakan, "Ya amanahnya nggak boleh dibuka. Itu dari pengusaha, yang saya tahu usahanya halal. Kalau saya diminta untuk membuka sekarang, saya buka". Akhirnya nama penyumbang tersebut tidak dibuka di forum Majelis Syura.

Dalam sejarah *mudawalah* di Majelis Syura PKS, salah satu yang sangat tajam adalah ketika PKS akan memutuskan sikap menghadapi Pilpres 2004, antara mendukung Amien Rais atau Wiranto. Seorang informan menggambarkan dinamika tersebut:

> "Contoh yang ekstrem di pengalaman saya adalah ketika Majelis Syura (MS) memutuskan PKS akan mendukung Amien Rais atau Wiranto. Karena saat itu Wiranto dekat ke PKS ... Setau saya dia dekat ke Ustadz Hilmi waktu itu, dan Wiranto sampai sekarang juga dekat dengan PKS. Karena kita Partai Dakwah, siapa aja yang mau deket itu diterima ... Dakwah itu selalu *open*, terima semua. Tapi apakah selanjutnya akan dilanjutkan mendukung ke Wiranto atau dukung ke Amien Rais itu *alot* rapat di MS. Seingat saya itu empat kali atau lima kali Majelis Syura baru memutuskan dan akhirnya kita memutuskan ke Amien Rais".

Ustadz Hilmi Aminuddin, AM, dan beberapa anggota Majelis Syura cenderung mendukung Wiranto, dengan pertimbangan peluangnya lebih besar untuk mengimbangi SBY. Sebaliknya, beberapa kader senior, seperti HNW, IP, MY, AR cenderung mendukung Amien Rais dengan argumentasi bahwa yang bersangkutan adalah tokoh muslim dan tokoh reformasi. Adapula pendapat bahwa HNW mendukung Amien Rais karena ikatan kemuhammadiyahan dan ikatan kedaerahan, karena sama-sama berasal dari Yogya.

Terdapat dinamika yang menarik dalam interaksi antara Jemaah Tarbiyah/PKS dengan Amien Rais, tokoh yang tahun 1998 dimunculkan sebagai tokoh reformasi oleh para kader muda Jemaah Tarbiyah, khususnya yang diwadahi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menurut seorang pengurus DPP, ketika para kader Jemaah Tarbiyah akan mendirikan partai, Amien Rais sudah didekati dan diaulat untuk memimpin partai tersebut. Para kader Jemaah Tarbiyah meminta dibimbing dalam berpolitik, dan ditempatkan di departemen yang mengurus masalah kepemudaan. Namun Amien Rais menolak dengan metafora, “baju Islam terlalu sempit untuk saya”. Sebelum Pemilu 2004, Amien Rais kembali didekati untuk di-capres-kan oleh PKS, tapi dirinya belum menerima. Diduga keengganan tersebut karena ia masih mengharapkan pinangan dari salah satu partai besar yang berhaluan nasionalis-sekular, sehingga jika sudah lebih dahulu dideklarasikan sebagai capres dari PKS yang merupakan partai Islam dipastikan peluang tersebut akan hilang. Namun PKS tidak dapat menunggu terlalu lama, karena Pemilu 2004 semakin dekat, dan berbagai kalangan, termasuk para kader, semakin intens bertanya-tanya mengenai capres dari PKS. Dalam kondisi itu, Wiranto yang mengikuti pengajian dengan Ustadz Hilmi meminta dukungan PKS untuk maju sebagai capres.

Ditengarai bahwa tajamnya perdebatan di Majelis Syura dalam kasus ini bukan semata-mata karena dinamika internal di antara para kader, melainkan juga karena adanya intervensi dari pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Sebuah sumber mengatakan bahwa seorang pengusaha yang merupakan tokoh PAN sempat menawarkan uang agar PKS memberikan dukungannya kepada Amien Rais. Dengan geram seorang informan menuturkan:

> "Amien Rais ini memainkan baju Islam kapanpun dia mau ... ketika mau coba Wiranto, kenapa seolah-olah mau dengan tokoh pelanggar HAM ... sementara ini ada tokoh reformasi, ada tokoh muslim nasional. **Begitu dibuat tajam di Majelis Syura. Dibikin kubu itu sangat tajam. Jadi seringkali membuat kadang-kadang ada friksi itu adalah intervensi luar**".

Ditengarai pula terdapat pelanggaran atas etika *syura* yang semestinya. Ketika *syura* masih berlangsung, seorang anggota Majelis Syura menjalin komunikasi internsif dengan Amien Rais, termasuk mengabarkan bahwa suara kelompok yang mendukung dirinya memenangkan voting.

Walaupun secara umum Majelis Syura sudah sepakat untuk mendukung Amien Rais, terdapat beberapa daerah mengajukan keberatan karena kondisi spesifik daerah masing-masing. Oleh karena itu, dalam keputusan Majelis Syura dibuat klausul bahwa keputusan mendukung pencapresan Amien Rais tersebut tidak mengikut untuk beberapa daerah tertentu. Namun Amien Rais memandang bahwa PKS bersikap setengah hati dalam memberikan dukungannya, sehingga semakin merenggangkan hubungan PKS dengan Amien Rais. PKS dituduh sebagai pihak yang bermain-main dan tidak sungguh-sungguh. Seorang informan menggugat dengan keras, "Mereka lupa, siapa yang bermain-main?! Amien Rais! Kita sudah minta dia jadi capres, dia ulur-ulur. Karena apa? Nunggu pinangan dari partai gede ... Nggak dapet, akhirnya butuh PKS. Butuh PKS udah waktunya mepet, nyalahin pula PKS".

Betapapun tajamnya *mudawalah* di Majelis Syura, dan beberapa kader melakukan kesalahan, akhirnya PKS tetap kembali kepada *uniting values* memaafkan dan minta maaf. Tidak ada dendam, tidak ada pula kesalahan masa lalu yang diungkit-ungkit. Bahkan kader-kader yang dulu dinilai pernah bersalah tersebut peluang karirnya di partai tetap terbuka. Seorang informan mencontohkan HNW yang didukung menjadi Ketua MPR, IP yang didorong menjadi Gubernur, dan MY yang menjadi anggota Dewan beberapa periode berturut-turut.[21]

[21] Beberapa informan lain punya pendapat yang berbeda. Menurut mereka, pilihan HNW mendukung Amien sebagai capres ketika itu, ditambah lagi dengan manuvernya mendorong *voting* di Majelis Syura, merenggangkan hubungan yang bersangkutan dengan Ustadz Hilmi.

Ustadz Hilmi sendiri menyadari bahwa posisinya sebagai Ketua Majelis Syura memang rawan disalahpahami, dan bahkan tidak mungkin dimanfaatkan, setidaknya dalam bentuk penisbatan suatu hal sebagai *qarar* beliau, padahal hal tersebut baru sekedar *istisyarah*, belum dimusyawarahkan, apalagi menjadi keputusan. Dalam salah satu *taujih*, Ustadz Hilmi mengatakan:

> "Kadang-kadang saya mendengar sebuah program bergulir dan **dikatakan bahwa ini *given* dari Ustadz Hilmi**, atau **ini keputusan Ustadz Hilmi**, atau **ini perintah Ustadz Hilmi**. **Seringkali muncul tafsir seperti itu. Padahal sumbernya *istisyarah***. *Istisyarah* itu normatif dan tidak mengikat, keputusannya ada di *syura*. Bila hasil keputusannya berbeda dengan *istisyarah*, tidak ada masalah. Karena ada *mulabasah*, yaitu faktor-faktor lain yang tidak muncul dalam konsultasi ... Pengambilan keputusan itu diambil dalam *syura*, sedang *enrichment* di dalam *istisyarah*. **Secara umum saya sering diminta *istisyarah*, tetapi sering juga ada bias seperti yang disebut di atas. *Istisyarah* bukan keputusan**".[22]

Kutipan *taujih* di atas menunjukkan bahwa bias atau kesalahpahaman dalam menangkap sesuatu sebagai keputusan padahal baru sesuatu yang dikonsultasikan, sering terjadi. Tidak terdapat data apakah selain kesalahpahaman yang tidak disengaja terjadi pula penyalahgunaan atau manipulasi yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkan legitimasi atas langkah-langkah yang mereka ambil. Namun \yang pasti, kesan telah mendapat restu dari Ustadz Hilmi akan memberikan efek legitimasi yang sangat tinggi, mengingat secara struktural dan kultural peran dan kedudukan Ketua Majelis Syura atau *Murraqib 'Am* dan Ustadz Hilmi di PKS memang sangat istimewa.

Dinamika Majelis Syura PKS, dan peran sentral Ustadz Hilmi di dalamnya, menjadi semakin menarik dan kompleks karena seorang informan lain, mantan anggota Majelis Syura yang pernah sangat dekat dengan Ustadz Hilmmi menuturkan versi yang sangat berbeda dari yang telah diungkapkan di atas. Ia menggambarkan sosok Ustadz Hilmi dalam konteks Majelis Syura dengan mengatakan, "**Beliau tidak jujur, kemudian tidak terbuka. Terus beliau bikin *deal-deal* politik dengan pihak luar dan kemudian dia mem-*by-pass* keputusan majelis syuro sendiri**". Di satu sisi, Ustadz Hilmi menyatakan tidak

[22] Dikutip dari *taujih* berjudul *"Khutuwat Tanfidziyah"* (Langkah-Langkah Operasional), yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah Banten-DKI-Jawa Barat, Depok 13-14 Januari 2007.

memiliki preferensi tentang capres yang akan didukung PKS dalam Pemilu 2004. Sebagai *Murraqib 'Am* dia akan mensahkan apapun yang diputuskan oleh Majelis Syura. Di sisi lain ditengarai Ustadz Hilmi memiliki agenda tersendiri, karena ia berkali-kali menganulir keputusan Majelis Syura yang berkaitan dengan pencapresan tersebut.

Di awal proses terdapat Tim Tujuh yang merekomendasikan agar PKS berkonsentrasi di Parlemen, menjadi kekuatan penyeimbang atau oposisi, karena tidak mampu meraih 20% suara dalam pemilu legislatif. Ketika hal tersebut akan dijadikan keputusan Majelis Syura, Ustadz Hilmi campur tangan dengan menegaskan bahwa *Tanzhim 'Alami* Ikhwan al-Muslimin menghendaki agar PKS berkoalisi dengan pemerintah, apapun kondisinya. Yang menjadi persoalan, pernyataan tersebut tidak dapat diklarifikasi oleh kader-kader yang lain, karena hanya Ustadz Hilmi yang memiliki akses kepada *Tanzim 'Alami* yang bermarkas di London. Upaya seorang kader senior partai untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada Ustadz Hilmi juga ditanggapi dengan emosional oleh beliau.

Selanjutnya, tiga lembaga tinggi partai, yaitu DPP, MPP dan DSP, diminta untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi mengenai capres yang akan didukung oleh PKS. Ketiga lembaga tersebut memilih Amien Rais. Namun Ustadz Hilmi mementahkan keputusan tersebut, dan meminta agar kembali dilakukan proses *syura*. Beberapa kali pertemuan Majelis Syura digelar, dan *voting* dilakukan. Hasilnya tetap menunjukkan dukungan kepada Amien Rais. Kemudian terjadi insiden, di mana ditengarai ada kader PKS yang membocorkan hal tersebut, sehingga Amien Rais telah mengetahuinya sebelum keputusan diumumkan. Kejadian tersebut membuat Ustadz Hilmi sangat marah, dan pembicaraan mengenai capres dihentikan.

Syura untuk membahas capres baru kembali digelar beberapa saat kemudian, setelah ada desakan dari *Tanzhim* Ikhwan al-Muslimin Maktab Asia yang membawahi Indonesia agar PKS segera menentukan sikap. Di samping itu tenggat waktu menjelang pemilu presiden juga sudah sangat dekat. Informan yang sama mendapatkan informasi dari seorang wartawan sebuah media cetak bahwa Ustadz Hilmi dan beberapa kader PKS justru bertemu Wiranto di kantor tim

pemenangannya pada saat pertemuan *syura* yang terakhir digelar. Hasil *syura* menunjukkan 31 suara mendukung Amien Rais, 9 suara Wiranto, 1 orang Hamzah Haz, dan 3 orang abstain. Namun pasca musyawarah Majelis Syura kembali Ustadz Hilmi melakukan intervensi dengan menugaskan AM dan LHI meminta Ustadz Rahmat Abdullah (alm.) sebagai Ketua Majelis Syura untuk mengeluarkan *bayan* yang menyatakan bahwa keputusan Majelis Syura untuk mendukung Amien Rais sebagai capres dari PKS tidak bersifat mengikat.

Ustadz Hilmi memang tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada Wiranto. Namun manuvernya yang menganulir keputusan *syura* yang mendukung Amien Rais sampai beberapa kali memancing spekulasi tentang ada-tidaknya *deal* tertentu antara dirinya dengan Wiranto. Dalam sebuah *syura*, seorang perempuan kader senior pernah bertanya secara eksplisit kepada Ustadz Hilmi tentang apakah PKS menerima uang dari Wiranto. Ketika itu Ustadz Hilmi membantah dengan ekspresi menahan kemarahan. Belakangan terdapat informasi dari AD, seorang tokoh yang pernah diusung PKS menjadi menteri di kabinet SBY yang lalu, bahwa memang terdapat aliran dana yang cukup besar dari Wiranto ke PKS. Dalam wawancara dengan sebuah media cetak, Sekjen PKS, AM, membantah adanya uang Wiranto untuk PKS.[23] Ia mengatakan bahwa dirinya dan beberapa kader PKS ketika itu mendukung Wiranto semata-mata karena alasan praktis. Wiranto yang dicalonkan Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislatif punya kans yang besar untuk memenangkan kursi presiden. Di samping itu PKS punya kepentingan untuk mengganjal Megawati.

Persoalan dukung-mendukung capres tidak otomatis selesai ketika Wiranto dan Amien Rais gagal maju ke putaran kedua dalam Pilpres 2004. PKS dihadapkan pada pilihan apakah akan mendukung SBY-JK atau Megawati-Hasyim Muzadi. Hampir saja PKS memberikan dukungan kepada Megawati, karena capres ini memberikan tawaran portofolio menteri yang lebih banyak dibandingkan SBY. Namun akhirnya dukungan PKS diberikan kepada SBY-JK, karena ketika itu Dewan Syariah mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan menjadi Presiden.

[23] Majalah Tempo, edisi 28 Maret-3 April 2011.

5.4. Tiga Aktor di Kepemimpinan Puncak PKS

5.4.1. Ustadz Hilmi Aminuddin, *Murraqib 'Am*

Adalah tidak mungkin memahami dinamika internal PKS, termasuk pergulatan pemikiran yang terjadi di dalamnya, tanpa mengenal dan memahami sosok *Murraqib 'Am* atau Ketua Majelis Syura partai ini, Ustadz Hilmi Aminuddin. Namun tidak mudah memperoleh deskripsi yang lengkap tentang profil Ustadz Hilmi yang lebih banyak menjalankan peran di balik layar. Ustadz Hilmi yang lahir di Cirebon pada tahun 1946 adalah putra dari Danu Muhammad Hasan, salah satu tokoh penting DI/TII pimpinan Kartosuwiryo, di samping Ateng Djaelani dan Hispran. Ustadz Hilmi belajar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sejak berusia enam tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Syariah, Universitas Madinah pada akhir tahun 1970an. Beberapa kalangan menegarai Ustadz Hilmi memiliki kedekatan dengan intelijen. Keberangkatannya ke Madinah untuk bersekolah diantar oleh Pitut Soeharto, mantan Direktur Opsus badan intelijen yang dibentuk Ali Moertopo di masa Orde Baru. Kedekatan tersebut juga dikonfirmasi oleh Pitut. Bahkan Pitut mengaku pernah membina Danu, ayah Ustadz Hilmi, yang juga mendapatkan gaji dari Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Sepulang dari Madinah, Ustadz Hilmi bergaul erat dengan Suripto, mantan petinggi Bakin, yang kemudian menjadi Kader PKS dan sekarang duduk di Majelis Pertimbangan Pusat (MPP).[24]

Para pendiri Jemaah Tarbiyah pada tahun 1978, yaitu Ustadz Hilmi Aminuddin, Ustadz Salim Segaf al-Jufri,[25] Ustadz Abdullah Baharmus,[26] dan Ustadz Encep Abdusyukur (alm.)[27] pertama kali mendaulat Ustadz Salim sebagai *Murraqib 'Am*. Namun jabatan tersebut hanya dipegang oleh Ustadz Salim selama satu tahun, karena ia berangkat ke Timur Tengah untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S3, sehingga posisi *Murraqib 'Am* kemudian beralih kepada Ustadz Hilmi hingga saat ini. Jika dihitung dari akhir tahun 1970an

[24] Diolah dari Majalah Tempo edisi 28 Maret-3 April 2011 dan Harian The Jakarta Post 29 Maret 2011.

[25] Saat ini Menteri Sosial RI.

[26] Saat ini anggota Majelis Syura PKS.

[27] Pada saat itu memimpin Pondok Pesantren Asy-Syukriah, Cipondoh Tangerang.

atau awal 1980an, sudah sekitar tigapuluh tahun Ustadz Hilmi memimpin Jemaah Tarbiyah. Para informan memberikan penuturan yang menarik ketika ditanya mengapa Jemaah Tarbiyah bisa sekian lama dipimpin oleh orang yang sama. Seorang kader menuturkan:

> "Kenapa Ustadz Hilmi tidak diganti? Karena yang pertama beliau memang pendiri. **Di kalangan kita, kedudukannya hampir sama seperti Gus Dur**. Dan kemampuan Ustadz Hilmi dalam memberi *taujih* luar biasa. Kalau beliau hadir dan beliau memberi *taujih*, kagum kita. **Jadi *in term of history, public speech***".

Kemampuan Ustadz Hilmi yang luar biasa dalam berkomunikasi juga diakui oleh seorang kader senior yang merupakan salah satu murid pertama beliau, yang mengatakan, "**Beliau kalau memberikan suatu arahan itu filosofinya kuat. Jadi *followers* itu kan bertambah ketika filosofi kita kuat**. Kalo filosofi seorang lemah, *followers* kita tidak ada. *No follower"*.

Untuk memahami apa yang dikatakan oleh kedua informan tersebut, peneliti membaca transkrip dari beberapa *taujih* Ustadz Hilmi yang sudah dibukukan. Salah satunya adalah *taujih* yang beliau sampaikan pada Rapimnas PKS di Lembang, Bandung 28-30 Agustus 2007.[28] Dalam menguraikan tentang hal-hal yang harus disiapkan dalam membangun kader-kader pemimpin, beliau menggarisbawahi pentingnya *tathahhur* (membersihkan diri), terutama membersihkan diri dari berbagai trauma persepsi masa lalu yang merupakan warisan dari masa penjajahan yang dilanjutkan oleh penguasa domestik yang diktator. **Pertama, *al 'uqdah al inhizamiyah*, persepsi selalu kalah dalam pertarungan**. Terkait dengan ini, Ustadz Hilmi mengatakan:

> "Jadi, *al 'uqdah al inhizamiyah* harus dicuci bersih dari diri kita, tidak boleh ada. Memang kita mulai dari tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, tidak punya tokoh. Waktu bikin partai kader kita 3000. Saya merasa waktu itu jumlah yang sedikit untuk mendirikan partai. Ternyata itu kebanyakan untuk mendirikan awal. Dan, ternyata kemudian kader kita ada yang jadi DPR, Ketua MPR, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur".

[28] Dikutip dari buku "Menghilangkan Trauma Persepsi", yang merupakan kumpulan transkrip *taujih* Ustadz Hilmi Aminuddin di berbagai kesempatan yang dicatat, disunting dan kemudian diterbitkan oleh Bidang Arsip dan Sejarah, Sekretariat Jenderal DPP PKS.

Kedua*, al 'uqdah al istihdafiyah*, persepsi selalu menjadi objek. Beliau mengatakan:

> "artinya kita merasa jadi sasaran terus, dikepung, bila orang datang merasa akan *ngerjain* Akhirnya tidak bisa ofensif dan kerjanya hanya defensif. Senjata kita cuma perisai, tidak bisa menyerang, membuat orang lain menembaki kita terus-menerus. Padahal, ibaratnya, bisa jadi kita tidak perlu perisai itu, kita lempar kepada mereka".

Ketiga*, al 'uqdah almuamaratiyah*, persepsi bahwa orang-orang lain sedang menyusun konspirasi terhadap kita. Beliau menyampaikan:

> "Perasaan dikepung, perasaan mereka bersekongkol, merasa ada konspirasi, apakah lokal, apakah nasional, apakah global, secara berlebihan. Akhirnya tidak mau mengembangkan pola komunikasi. Awas jangan ngobrol dengan dia, nanti terbawa, nanti hanyut. Awas kita dijegal secara politik. Kalau kader ditarbiyyah bertahun-tahun, gampang hanyut itu bukan kader, tapi orang *keder* ... Perasaan dikepung dan ada konspirasi, kalau sudah menjadi *'uqdah* membuat kita tidak akan mampu menghadapi konspirasi meski kecil, karena yang membesarkan dan memberi pengaruh kepada konspirasi itu kita sendiri".

Keempat*, al 'uqdah arraj'iyyah*, persepsi bahwa kita terbelakang. Beliau menegaskan:

> "Kalau semangatnya *raj'iyyah*, ketertinggalan, keterbelakangan, terseok-seok, ketertinggalan di ujung barisan, sudah barang tentu, *na'udzubillahi*, kita bukan hanya ditinggal oleh ummat tapi juga oleh Allah SWT. Sebab Allah menghendaki ber-*tanafus*, ber-*musara'ah*, ber-*musabaqah* (berkompetisi, berlomba)".

Kelima, *al 'uqdah salbiyah*, selalu berpikiran negatif terhadap segala sesuatu. Beliau menjelaskan :

> "Tidak mempunyai pandangan *ijabiyatu ru'yah*, pandangan positif, baik ke dalam maupun ke luar. Orang ini datang mau apa ya? Jangan-jangan mau mengawasi kita. Bisa-bisa mau ini, mau itu. Yang lebih mengerikan kalau ke dalam. Ada yang melihat *ikhwan* dan *akhwat* salah sedikit lalu berkata, wah jama'ah dakwah ini hancur, mau ambruk. Jama'ah dakwah ini sekarat".

Kemudian beliau memberikan nasihat, "Yang penting proses *tathahhur*, proses perbaikan terus berlangsung melalui *tawashaw bilhaq, tawashaw bish-shabr, tawashaw bil marhamah* (saling menasihati dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang)". **Keenam, *al 'uqdah alkamaliyah*, kecenderungan untuk**

perfeksionis. Terkait dengan ini Ustadz Hilmi mengingatkan agar para kader PKS tidak terjebak membuat publik menuntut kesempurnaan dari mereka yang merupakan kumpulan manusia yang tidak sempurna. Beliau menuturkan:

> "Kita memang menjaga citra, tapi citra sebagai manusia. Citra sebagai manusia muslim, bukan citra sebagai malaikat ... Jadi kita ini *mujtama basyari, jamaah basyarriyah* (masyarakat manusia, jemaah manusia). *'Uqbah kamaliyat* ke dalam, apalagi kalau terbentuk keluar, akan berbahaya. Beban akan bertambah, langkah akan terhambat. Apalagi kalau ada opini publik terhadap diri kita bahwa diri kita sempurna. Hal itu sama dengan mempersiapkan pedang untuk menyembelih kita sendiri".

Ketujuh, *al 'uqbah attaba'iyyah*, sikap tidak mau kreatif, hanya mau mengikuti. Ustadz Hilmi menegaskan:

> "Kader ikhwan dan akhwat ini adalah pemikul risalah muhammadiyah. Kalau ia sendiri mengalami *al 'uqbah attaba'iyyah*, maka akan jadi beban, artinya repot menggotong-gotong diri sendiri. Repot menggotong kader yang menjadi beban. Seluruh kita harus menjadi pemikul beban".

Mencermati cuplikan *taujih* di atas, nyata benar bahwa kemampuan memberikan *taujih* adalah salah satu kelebihan yang membuat Ustadz Hilmi sedemikian *powerful* dalam memimpin Jemaah Tarbiyah. *Taujih* Ustadz Hilmi menunjukkan kemampuan persuasif yang luar biasa, sebagai hasil dari penuturan yang rinci dan sistematis, serta kalimat-kalimat yang argumentatif, di samping kefasihan berbahasa Arab. Sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya, kefasihan berbahasa Arab masih dianggap merupakan *added value* yang tinggi di komunitas Jemaah Tarbiyah. Pembahasan ketujuh trauma persepsi tersebut memperlihatkan pula kemampuan beliau dalam mengkonseptualisasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah, baik secara internal maupun eksternal.

Seorang informan yang mendorong peneliti untuk membaca buku "Menghilangkan Trauma Persepsi" di mana di dalamnya terdapat transkrip *taujih* yang dikutip di atas menuturkan bahwa pada masa-masa awal *tarbiyah* dulu justru berbagai persepsi yang tertutup tersebut bersumber dari Ustadz Hilmi, di samping memang *fikrah* Ikhwan al-Muslimin yang diadopsi oleh Jemaah Tarbiyah lekat dengan unsur-unsur tasawuf dan militer yang cenderung tertutup. Informan tersebut mengatakan, "**Berat. Besar pengaruh Ustadz Hilmi. Besar. Dan karakter *fikrah* ini, juga memang ada karakter tasawuf-nya, karakter**

militernya. Itu sudah menjadi dokumen-dokumen khusus sejarah kepartaian ini". Beberapa contoh doktrin yang dulu mengemuka, misalnya "yang penting tetap bekerja, walaupun tidak bekerja tetap", "tidak perlu memiliki, yang penting bisa menggunakan", atau dikotomi bahwa mereka yang *tarbiyah* itu adalah kelompok *khashah* (khusus), sedangkan muslim yang lainnya adalah kelompok *'ammah* (umum, awam, muslim kebanyakan), atau juga kecenderungan untuk tidak bertetangga atau bersosialisasi. Informan tersebut menuturkan, sejak dahulu ia mempertanyakan berbagai doktrin tersebut karena tidak sejalan dengan pemahamannya tentang syariat. Misalnya, syariat menyuruh seorang muslim menjalin hubungan baik dengan tetangga, bahkan yang disebut tetangga itu adalah 40 rumah di keempat penjuru mata angin. Bisa dipahami jika doktrin-doktrin yang cenderung tertutup tadi dibutuhkan untuk membangun soliditas ketika Jemaah Tarbiyah menghadapi kondisi yang berat di masa berkuasanya rejim Soeharto yang sangat represif, namun menjadi persoalan karena terbawa hingga saat ini. Berbagai trauma persepsi tersebut mesti disembuhkan, dan memang Ustadz Hilmi yang harus dan dapat melakukannya. Jika PKS saat ini berubah boleh jadi itu merefleksikan perubahan Ustadz Hilmi sebagai respon terhadap perubahan jaman.

Seorang perempuan kader senior punya pandangan yang bertolak-belakang. Menurutnya, pemikiran dan pandangan Ustadz Hilmi sudah moderat dan progresif sejak awal. Justru dirinya dan beberapa murid Ustadz Hilmi yang dulu cenderung berpikiran konservatif sebagai imbas dari pemikiran berbagai *harakah* lain, seperti Jemaah Salafi, di samping kondisi saat itu, era awal 80an, dunia Islam, termasuk Indonesia, sedang dilanda demam Revolusi Iran. Berbagai polutan – memakai istilah yang digunakan oleh informan tersebut – membuat sebagian kader Jemaah Tarbiyah berpendapat bahwa semakin keras, rigid, tajam, dan ekstrim sebuah pemikiran, semakin sesuai dengan *ashalah*. Informan tersebut memberikan contoh tentang dirinya yang ketika itu, karena pengaruh berbagai *fikrah* lain, menganggap muslimah hanya boleh menggunakan pakaian dengan warna-warna tertentu, seperti hitam, putih atau abu-abu. Ustadz Hilmi menasihati, "semua warna itu ciptaan Allah." Demikian pula terhadap pandangan yang menganggap bahwa muslimah harus mengenakan busana yang berbentuk *gamis* (jubah), tidak boleh yang lain, seperti tunik, celana panjang, dan lain-lain, Ustadz

Hilmi menasihati, “Islam itu nggak punya uniform”. Di samping itu, Ustadz Hilmi menyukai pendapat atau argumentasi yang memiliki dasar ilmiah. Ia menuturkan,“Ustadz selalu bisa nerima kalo masuknya dari hal yang ilmiah memang. Ustadz selalu seneng dengan survei-survei ilmiah, naskah-naskah ilmiah, paper-paper ilmiah. Dia selalu antusias”. Di samping itu, Ustadz Hilmi juga digambarkan sebagai orang yang sangat menghormati keputusan *syura*, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Ia mencontohkan sikap Ustadz Hilmi terhadap keputusan *syura* untuk mendukung Amien Rais, bukan Wiranto, pada Pilpres 2004, “Walaupun Ustadz Hilmi maunya Wiranto, tapi ketika dia kalah dalam *voting* dia *legowo*, nggak marah-marah. Nggak maksain kehendak, walaupun pertimbangan dia itu lebih rasional. Walaupun Amien Rais terbukti tidak *commit* dengan janjinya dia”. Seorang kader lain membenarkan pendapat tersebut. Ia memberikan contoh, walaupun Ustadz Hilmi secara pribadi tidak dekat dengan HNW, namun karena *syura* sudah memutuskan HNW menjadi cawapres dari PKS maka beliau taat dengan keputusan itu dan ikut menawarkan nama HNW kepada berbagai pihak.

Seorang informan mengekspresikan keheranannya terhadap pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa Ustadz Hilmi adalah seorang diktator dengan menuturkan, “Nggak ada itu *dictatorship* saat ini ... kalau mau jujur, justru bakat-bakat *dictatorship* itu ada pada *middle managers*. Bukan pada Ustadz Hilmi. Saya khawatir itu ada pada Ustadz LHI”. Senada dengan itu, seorang mantan petinggi PKS menggambarkan bahwa Ustadz Hilmi hanya memberikan arahan-arahan yang bersifat umum, dan kemudian memberikan keleluasaan kepada para kader untuk berkiprah.

Ustadz Hilmi digambarkan memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan berbagai kalangan dan mendapatkan respek dari kelompok-kelompok yang beragam, seperti orang etnis Cina yang mengurut dan membawakan obat-obatan herbal, orang Kristen yang datang untuk berkonsultasi, para polisi di Bandung yang mengangkatnya menjadi Anggota Kehormatan, dan para preman yang mengundangnya untuk mengisi acara dzikir. Dalam konteks itu, seorang murid Ustadz Hilmi mengatakan, “Jadi lucu kan orang luar yang gak pernah dapet *tarbiyah* dia punya pandangan positif, tapi muridnya yang dapet ilmu ...” Dengan

geram informan tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang berseberangan dan berkata-kata buruk tersebut justru mereka yang dulu mendapatkan pemahaman Islam dari Ustadz Hilmi dari awal, dari nol, atau mereka yang banyak mendapatkan bantuan finansial dari beliau. Ia memberikan contoh tentang seorang yang saat ini kerap tampil memberikan *taujih* di berbagai tempat, bahkan tampil di televisi, dan berceramah di luar negeri, 'Fulan itu sekuler abis kan. Dia dapat ilmu agama dari nol dari Ustadz Hilmi. *Alif-ba-ta* dari Ustadz Hilmi. Dia bisa dakwah kemana-mana, bisa eksis ke Hongkong, ke Amerika dari siapa? Dari Ustadz Hilmi". Di samping itu, janda-janda dari para kader, dari para perintis dakwah, dengan mudah datang kepada Ustadz Hilmi untuk mengeluhkan masalah-masalah yang mereka hadapi, termasuk kesulitan keuangan. Bahkan hingga kini banyak orang yang menemui beliau untuk meminta nasihat tentang hal-hal yang sepele, seperti nama bagi anak mereka yang baru dilahirkan.

Seorang informan perempuan yang sangat menampakkan kedekatannya dengan Ustadz Hilmi menengarai bahwa para mantan kader yang kini membenci Ustadz Hilmi adalah orang-orang yang iri karena tidak bisa lagi dekat dengan beliau. Bahkan ia mengatakan dengan emosional:

> "Jadi aneh kok yang ngebenci itu orang yang banyak dapat bantuan. Makanya *husnuzh zhan* saya, dia sudah tidak bisa lagi dekat dengan Ustadz Hilmi. Anak ngambek gitu aja. *Someday* dia akan menyadari kebaikan orang tuanya. Mungkin suatu saat akan minta maaf pada orang tuanya. Kembali pada orang tuanya, anak durhaka itu".

Informan lain menyebut Ustadz Hilmi sebagai sosok yang visioner. Ia mencontohkan beberapa dialognya dengan Ustadz Hilmi di berbagai kesempatan. Misalnya, Ustadz Hilmi menyikapi beberapa kader Jemaah Tarbiyah generasi awal yang meninggalkan kampus, malas menyelesaikan kuliah mereka, karena memandang bahwa ilmu yang dipelajari adalah ilmu sekular yang bertentangan dengan Islam, dengan mengatakan, "Kalian akan mau jadi apa sebagai aktifis dakwah yang saat ini bahasa dunia masih diperlukan?" Atau juga menasihati, "*Khatibunnas 'alaa qadrii uquulihim*[29] ... Kalau saat ini mereka masih membutuhkan gelar ya, kalian harus punya gelar". Informan yang sama

[29] Maknanya: "berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kapasitas intelektual mereka".

memberikan contoh lain tentang sikap visioner Ustadz Hilmi yang sejak jauh sebelum Jemaah Tarbiyah menjadi partai telah memberikan nasihat:

> "Pernah saya naik mobil bersama beliau, 'Jangan sampai kalian merusak fasilitas umum, fasilitas negara'. Itu selalu diingatkan. 'Karena bisa saja suatu saat kalian akan menduduki gedung-gedung ini' ... Dan itu terbukti dan saya merasakan. Dulu saya ceramah di BPK ya, ceramah di TVRI ya, ceramah di sekitar ini, tapi tidak pernah berpikir saya akan menjadi anggota DPR gitu. Akhirnya kita sampai ke pusat kekuasaan. Ya artinya ke gedung-gedung tinggi itu untuk melakukan dakwah".

Ustadz Hilmi selalu menasihati para kader agar tidak terburu-buru mengambil posisi sebagai oposan sebelum jumlah mereka memadai. Para kader juga diminta untuk tidak bersikap terlalu berseberangan dengan kekuatan-kekuatan lain, termasuk militer, karena hal itu akan menyebabkan kader-kader dakwah dimusuhi, dan dakwah yang sedang dalam tahap persemaian akan dihancurkan. Di kesempatan lain para kader diingatkan bahwa pilihan berkoalisi bukanlah keputusan yang pragmatis, karena upaya melakukan reformasi pemerintahan, *islahul hukumah*, tidak selalu harus dilakukan dari luar. Ketika berada di dalam, para kader dapat melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dengan lebih efektif, walaupun perlu bertahap, karena memang mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah itu perlu perlahan-lahan, tidak bisa sekaligus. Ustadz Hilmi juga menekankan pentingnya para kader membangun kedekatan dengan semua pihak untuk memperbesar peluang diterimanya pesan-pesan dakwah oleh kalangan yang lebih luas, termasuk dengan tokoh-tokoh militer, para pengusaha, dan nonmuslim sekalipun.

Arahan-arahan Ustadz Hilmi sangat mengena bagi sebagian kader, karena substansinya diambil dari *sirah* Nabi Muhammad saw yang dikemas dalam konteks realita permasalahan kontemporer yang sedang dihadapi oleh para kader. Bahkan, pada saat menyampaikan *taujih*-nya sering Ustadz Hilmi tidak menyebutkan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah *sirah* Nabi. Di kemudian hari, pada saat membaca-baca buku *sirah* Nabi, para kader menemukan bahwa apa yang pernah disampaikan Ustadz Hilmi sebelumnya bersumber dari *sirah*, dan ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Ustadz Hilmi, beliau membenarkannya.

Ustadz Hilmi juga digambarkan sebagai sosok yang tenang dan terbuka dalam merespon perbedaan sikap dan pendapat. Seorang informan menuturkan tentang kondisi pada saat Jemaah Tarbiyah memutuskan berpartai. Ia dan mereka yang pro pada keputusan itu menyayangkan, bahkan kesal, terhadap para kader yang tidak setuju berpartai. Namun Ustadz Hilmi memiliki pandangan tersendiri, "Ibarat kita punya kendaran, nggak semuanya harus ngegas, ada juga yang harus ngerem ... Jadi yang ngegas 70%, yang ngerem 30% nggak masalah. Toh mereka saudara kita juga". Terhadap para kader, murid-muridnya, yang dalam beberapa kesempatan mengeluarkan kata-kata yang keras dalam mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap pemikirannya Ustadz Hilmi menyikapinya, "Kalau guru meladeni muridnya ya wibawanya hilang ... terus kalau murid membangkang kepada gurunya, berkahnya hilang. Jadi kenapa sih nggak ridha-ridha aja. Kalau memang masukannya baik ya alhamdulillah. Kalau nggak baik itu hubungan dia dengan Allah". Bahkan Ustadz Hilmi digambarkan tidak menghendaki orang-orang yang megkritik dirinya dengan tajam, bahkan dinilai menghina, harus sampai mendapatkan sanksi organisasi dari BPDO, karena ia tidak mau orang-orang kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik. Dari perjalanan panjang interaksinya dengan Ustadz Hilmi, seorang murid beliau menyimpulkan, "Ustadz itu selalu memberikan ruang yang banyak dan luas. Dan saya melihat Ustadz Hilmi itu selalu memberikan plafon yang tinggi kepada kita. Akhirnya kita nggak banyak mentok. Plafonnya itu tinggi terus".

Di samping hal-hal yang visioner dan strategis, Ustadz Hilmi juga sering memberikan nasihat tentang hal-hal yang sederhana namun mendasar dan memiliki makna yang mendalam. Misalnya, ketika melihat mobil seorang kader yang tak terurus, Ustadz Hilmi berkomentar, "Ini mobilnya berapa hari *tayamum*?! ... Mobil seorang *da'i* itu tampilan luar rumahnya. Jadi jangan ada mobil lecet nggak segera dibetulkan. Mobil pintunya rusak nggak segera dibetulkan". Nasihat-nasihat sederhana yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tersebut ternyata tidak lepas dari referensi hadits Nabi saw. Seorang informan menceritakan sebuah kejadian yang ia saksikan pada saat anak Ustadz Hilmi yang ketika itu masih kecil mengadu kepada ayahnya tentang buah jambu milik mereka yang diambil orang. Ketika itu Ustadz Hilmi merespon dengan nasihat, "Biar aja.

Kita kan nggak nanam, itu tumbuh dari Allah". Nasihat itu ternyata berhubungan pula dengan hadits Nabi yang intinya mengatakan buah yang ditanam oleh seseorang kemudian dicuri orang lain atau dimakan hewan sekalipun, nilainya adalah sedekah.

Ustadz Hilmi juga digambarkan sebagai sosok yang sedikit tidur dan menggunakan lebih banyak waktunya untuk beribadah, membaca, menghadiri pertemuan-pertemuan partai, memberi *taujih*, dan menemui orang-orang yang datang untuk berkonsultasi dengan beliau. Seorang informan menggambarkan:

> "Beliau itu jarang tidur. Saya pernah jam sebelas, saya sama Marissa Haque waktu itu ke rumah beliau. Kami di luar menunggu sampai jam dua malem. Setelah saya masih ada sampai jam empat pagi. Tapi jam delapan pagi beliau sudah ngasih *taujih"*.

Seorang mantan petinggi partai punya pendapat yang senada. Ia mengatakan:

> "Saya belum pernah melihat satu orang pun di partai ini yang mau rapat dengan kita sampai jam 5 pagi. Sampai subuh istilahnya. Terus nanti pagi bangun lagi, rapat lagi. Kecuali beliau yang mimpin itu. Yang lain udah ampun-ampun itu. Bisa bengek 2 hari, 3 hari nggak bangun ... itu kan merasa *mas'uliyah* ya, tanggung jawab beliau sampai seperti itu".

Selain kekuatan fisik dan rasa tanggung jawab yang besar, informan tersebut juga menyebut apa yang ditunjukkan oleh Ustadz Hilmi sebagai "hobi". Itulah yang membuat Ustadz Hilmi punya daya tahan yang luar biasa dalam mengelola Jemaah Tarbiyah, dengan tekun memelihara seluruh barisan, di tengah berbagai tekanan dan dinamika yang tinggi. Ia membandingkan dengan dirinya, "Saya nggak tahu kalau usia-usia segitu saya mungkin pengennya dakwah-dakwah yang ringan-ringan aja kali. Tabligh akbar apa itu".

Kombinasi pemikiran-pemikiran yang visioner dan strategis dengan hal-hal yang praktis namun mendasar tadi membuat seorang kader senior menyimpulkan, "Kalau saya melihat beliau itu konseptual sekaligus paham lapangan, paham medan gitu". Ia juga mengatakan, "Saya itu banyak sekali mendapatkan pelajaran luar biasa gitu ya. Sampai sekarang pun setiap bertemu dengan beliau saya mendapatkan ilmu baru". Senada dengan itu, kader lain menyebut Ustadz Hilmi sangat menguasai *strategic management*, berbicara tentang visi, *what to be achieved*, namun juga memahami *operational*

management, tahu betul *how to achieve.* Dengan kata lain, sejak awal Ustadz Hilmi telah menampakkan sosok seorang pemimpin gerakan dengan talenta yang lengkap.

Realita bahwa Ustadz Hilmi Aminuddin selama sekitar tiga puluh tahun memimpin Jemaah Tarbiyah dan tak tergantikan oleh tokoh lain terjadi karena di antara para pendiri Jemaah Tarbiyah dialah yang aktif membina para kader, dan kemudian kader-kadernya memiliki kapasitas yang relatif baik sehingga menempati posisi-posisi strategis dalam struktur partai. Di samping itu, mungkin terdapat pula faktor kedekatan kultur daerah antara Ustadz Hilmi dengan sejumlah petinggi PKS, sehingga memudahkan keselarasan komunikasi di antara mereka. Terpilihnya kembali Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura juga dilihat sebagai sesuatu yang alami dan dapat dipahami, mengingat sampai hari ini belum ada tokoh lain yang memahami seluk-beluk jalan perjuangan yang dilalui oleh jemaah ini sebagaimana beliau. Seorang kader menuturkan, "Hari ini yang paling menguasai medan adalah beliau. Karena beliau yang melahirkan, berjibaku paling banyak, tahu getir pahitnya, kebetulan Allah kasih karunia strategi. Beliau punya kelebihan di situ yang tidak dimiliki pemimpin yang lain yang selevel dengan beliau". Namun tidak dipungkiri pula adanya faktor kesungkanan para murid kepada gurunya, *mutarabbi* kepada *murabbi*-nya. Sehingga walaupun berulang kali dilakukan pemilihan, tetap saja Ustadz Hilmi kembali terpilih. Kader lain menggambarkan kondisi ini dengan menuturkan:

> "Dr. Salim pun tidak menjadi *murabbi* pembina kami secara langsung, yang meretas jalan dakwah dari nol. Abdullah Baharmus juga. Jadi beliau mengambil peran ketika kepemimpinan Ustadz Hilmi, Dr. Salim sekali-kali ngisi, Abdullah Baharmus sekali-kali ngisi. **Tapi yang memang *nelatenin* dari murid cuma 5 jadi 10, pagi, siang, sore dia berdakwah, memang dia**".

Persoalan kapasitas juga diakui sebagai penyebab mengapa peran Ustadz Hilmi belum tergantikan. Seorang kader mengatakan, "ana gak kebayang itu misalnya jamaah ini bisa berkembang tanpa Ustadz Hilmi. Nggak kebayang aja". Realita menunjukkan bahwa Jemaah Tarbiyah berkembang sejak dipimpin oleh Ustadz Hilmi. Di masa kepemimpinan *Murraqib 'Am* sebelumnya jemaah hampir tidak berkembang, karena yang bersangkutan lebih menonjol sosoknya sebagai

akademisi. Informan tersebut mengatakan, "**Kalau Ustadz Hilmi, semua data-data dia kuasai. Data-data lapangan, kekuatan lapangan ... Uang-uang yang ada**. Kan pasti dua kan, SDM sama uang karena untuk bisa eksekusi". Ustadz Hilmi juga digambarkan punya kelebihan dalam hal pengendalian, berkomunikasi dengan para kader, membentuk dan membina kader, serta memformulasikan gagasan. Dalam konteks kapasitas itulah seorang mantan petinggi partai tidak sependapat pada pihak-pihak yang secara membabi-buta ingin agar posisi Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura diganti oleh figur lain. Ia mengatakan, "Ada kan orang dipikir kayak Orde Baru. Pokoknya ganti Ustadz Hilmi, ganti Ustadz Hilmi. Saya tanya, gantinya siapa? Karena **kalau ada pilihan yang katakanlah tidak lebih baik, setara saja, atau kurang sedikit saja, nggak apa-apa**".

Di samping itu, lambatnya para kader dalam mengakselerasi peningkatan kapasitas kepemimpinan mereka juga menyebabkan sampai hari ini belum ada yang mampu mendekati kapasitas Ustadz Hilmi. Setidaknya ada tiga keistimewaan Ustadz Hilmi yang belum tergantikan oleh tokoh-tokoh lain di PKS. Pertama, perannya menjaga ideologi dan *manhaj* gerakan. Kedua, perannya sebagai jangkar koalisi PKS dengan kekuatan politik yang lain. Ustadz Hilmi masih merupakan satu-satunya tokoh PKS yang dipandang dan dihormati oleh SBY. Sebelumnya beliau juga dihormati oleh almarhum Gus Dur. Ketiga, perannya mengkonseptualisasikan perjalanan dakwah, sehingga menjadi rujukan bagi para kader dalam berkiprah. Namun terdapat catatan kecil tentang penghormatan tokoh-tokoh eksternal terhadap Ustadz Hilmi. Menurut seorang kader, tokoh eksternal seperti SBY menaruh hormat kepada Ustadz Hilmi semata-mata karena posisi beliau sebagai *Murraqib 'Am*, sebagai sosok yang punya otoritas untuk menggerakkan para kader Jemaah Tarbiyah. Dengan kata lain, siapapun yang berada dalam posisi tersebut akan memiliki *priviledge* yang sama.[30] Belum siapnya para kader PKS mengambil alih peran kepemimpinan dari tangan Ustadz Hilmi tergambar dalam suasana Majelis Syura ketika pemilihan Ketua tahun 2005 sebagaimana dituturkan seorang anggota Majelis Syura:

[30] Pendapat ini dikemukakan dalam pembicaraan informal pada hari Senin, 3 Maret 2011 di Mushalla FISIP UI, Depok.

> "Majelis Syura selalu memilih dia ... Dan kita tahu adegan Majelis Syura yang kemarin itu ... semua mengundurkan diri. Pak LHI, dapat 5 suara, mundur. AM cuma dapet 1 suara kan. Dia mundur. Dr. SSA, 'Saya lebih seneng jadi menteri". Becandanya gitu kan, ketawa, mundur ... Ada lagi Dr. HNW, suara dia 16, Ustadz Hilmi 38, ehm sekitar 50. Dr. HNW, saya tahu diri lah, lihat angkanya ini, mundur. Didaulat Ustadz Hilmi".

Seorang elit PKS menambahkan, Ketua Majelis Syura adalah satu-satunya jabatan dalam struktur PKS yang tidak diperkenankan merangkap jabatan publik, sehingga sosok orang tua lebih tepat ditempatkan di jabatan ini. Informan tersebut memberi contoh Dr. Salim Segaf al-Jufri yang juga merupakan pendiri Jemaah Tarbiyah, namun usianya masih relatif muda jika dibandingkan dengan Ustadz Hilmi, sehingga yang bersangkutan lebih tepat jika didorong untuk mengisi jabatan publik di eksekutif.

Seorang kader senior PKS yang juga murid langsung Ustadz Hilmi membantah keras tuduhan bahwa Ustadz Hilmi dengan sengaja mempertahankan posisinya di tampuk kepemimpinan Jemaah Tarbiyah. Bahkan menurutnya, Ustadz Hilmi dengan tegas menyatakan ingin melihat ada kader yang mampu menggantikannya sebelum dirinya wafat. Dalam pandangan kader tersebut, kepindahan Ustadz Hilmi dari Jakarta ke Lembang dalam lima tahun terakhir merupakan upaya beliau untuk mengurangi perannya. Namun ternyata para kader tetap saja menyambangi beliau untuk meminta saran-saran. Ustadz Hilmi pernah berujar bahwa di Turki ada orang seperti Erbakan yang di usia 84 tahun masih ingin terus tampil sebagai pimpinan partai karena di sekitarnya ada orang-orang yang selalu mengusung dan tidak bersedia melepaskan dia, dan dirinya tidak ingin seperti Erbakan. Dalam beberapa kesempatan Ustadz Hilmi sudah memberikan isyarat yang kian hari kian jelas tentang keinginan beliau untuk segera lengser. Misalnya beliau kerap berbicara tentang *up coming generation* dan *out going generation*, "kami sudah berbuat yang kami bisa", atau menggunakan bahasa simbolis "daun-daun yang berguguran untuk menyuburkan pohon". Oleh karena itu, tidak sepantasnya Ustadz Hilmi terus disalahkan, karena ia telah menyalahkan dirinya sendiri atas belum munculnya kader yang mampu menggantikan posisinya memimpin PKS. Dalam wawancara dengan sebuah media cetak,[31] Sekjen PKS,

[31] Tempo, edisi 28 Maret-3 April 2011.

AM, mengkonfirmasi kesedihan Ustadz Hilmi karena dirinya terpilih kembali menjadi Ketua Majelis Syura. Bahkan dalam momen tersebut Ustadz Hilmi menangis karena merasa gagal dalam melakukan kaderisasi, sehingga belum ada kader partai yang berani menggantikan dirinya.

Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang sempat dipersiapkan untuk menggantikan Ustadz Hilmi, namun dalam perjalanannya selalu saja ditemukan kelemahan atau masalah yang membuat mereka dinilai tidak tepat. Ada tokoh yang terlalu perasa dan mudah sedih. Ada tokoh lain yang secara fisik tidak kuat, karena mengidap beberapa penyakit yang cukup serius, dan sering kambuh jika berhadapan dengan masalah-masalah yang menekan. Ada pula kader senior yang sudah diproyeksikan menggantikan Ustadz Hilmi, bahkan sudah diposisikan sebagai wakilnya, namun tidak siap terjun ke politik, dan ingin tetap mempertahankan format dakwah Jemaah Tarbiyah sebelum menjadi partai.

Diperkirakan para kader Jemaah Tarbiyah baru rela posisi Ustadz Hilmi digantikan orang lain jika beliau meninggal. Namun, kondisi di mana pemimpin tertinggi PKS baru digantikan ketika wafat diyakini hanya akan terjadi sekali ini saja, pada Ustadz Hilmi, karena tidak terdapat tokoh selain beliau yang mendapatkan perhormatan yang sedemikian besar dari para kader. Namun di sisi lain tidak dapat dinafikkan kemungkinan di tahun 2014 nanti Ustadz Hilmi berada dalam kondisi yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan, misalnya karena persoalan kesehatan yang serius. Jika kondisi itu terjadi, sementara kalangan menilai HNW merupakan sosok yang paling mungkin menggantikan posisi Ustadz Hilmi.

Menarik untuk dicatat, seorang pejabat tinggi partai punya penjelasan yang selintas terkesan “biasa-biasa saja”, namun jika dicermati punya makna yang mendalam, tentang mengapa Ustadz Hilmi Aminuddin sampai saat ini selalu terpilih kembali menjadi Ketua Majelis Syura. Ia mengatakan:

> “Ya kembali ke *syura*-nya sendiri. **Kalau *syura*-nya masih begitu ya begitu**. Kita mungkin agak berbeda dengan istilahnya parpol pada umumnya ... Misalnya gini, dalam UUD Presiden dibatasi masa jabatannya. Kalau kita di partai tidak ada batasan itu. **Kalau dalam *syura* hasilnya seperti itu ya sudah seperti itu**”.

Jika dicermati, terdapat makna yang tersirat dalam pernyataan informan tersebut. Ia sepertinya ingin mengatakan bahwa realita terpilihnya orang yang sama sebagai Ketua Majelis Syura PKS terkait dengan budaya yang berlaku di partai ini. Namun demikian, tetap terdapat dinamika dalam proses pemilihan Ketua Majelis Syura tersebut, karena faktanya Ustadz Hilmi tidak terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Syura.

Di samping berbagai kekaguman dan penghormatan para kader terhadap Ustadz Hilmi karena kelebihan-kelebihannya, seorang kader senior mempunyai catatan tentang kekurangan beliau, "*In term of managing organization*, ya tadi, penunjukan orang-orang yang dekat dengan beliau, tanpa memikirkan ada orang-orang yang secara proyeksi, promosi, nominasi, sangat layak. Orang-orang lama terbuang begitu saja". Peran Ustadz Hilmi yang relatif dominan dalam *staffing* dipandang punya implikasi yang kurang positif, yaitu tersia-siakannya sejumlah potensi kader yang secara pribadi tidak dikenal atau kurang dekat dengan beliau.[32] Di samping itu, hal tersebut menghambat terbangunnya sistem kaderisasi yang optimal. Informan tersebut juga mengatakan, "Kita semua doa biar Ustadz Hilmi, Ketua Majelis Syura, menyadari pentingnya mengapresiasi kontestasi gagasan-gagasan". Harapan tersebut dapat dibaca sebagai penilaiannya bahwa Ustadz Hilmi belum cukup terbuka terhadap gagasan-gagasan yang berbeda, apalagi berseberangan.[33] Dalam konteks ini, seorang informan lain bahkan menggambarkan Ustadz Hilmi sebagai sosok yang feodal seperti "raja-raja Sunda". Hubungan yang semula sangat dekat dan akrab dengan Ustadz Hilmi kemudian merenggang dan akhirnya putus sama sekali setelah ia kerap berani mengkritik Ustadz Hilmi secara terbuka di forum-forum Majelis Syura, khususnya

[32] Harian The Jakarta Post edisi 29 Maret 2011 menyebutkan bahwa Ustadz Hilmi membina sejumlah kader untuk memelihara pendekatan pragmatis yang dipilihnya. Kader-kader tersebut adalah Luthfi Hasan Ishaq (kini Presiden PKS), M. Anis Matta (Sekjen PKS sejak 1998), Fahri Hamzah (Wasekjen PKS sejak 2003), Achmad Rilyadi alias Irel, dan Aboe Bakar al-Habsyi alias Habib Aboe. Achmad Riyaldi disebut sebagai salah satu "pencari uang" utama untuk partai, sedang Habib Aboe disebut punya peran kunci dalam merekomendasikan kenaikan jenjang para pimpinan partai di tingkat lokal.

[33] Seorang mantan pendiri PK yang kemudian menjadi PKS di sebuah media *on-line* menggambarkan Ustadz Hilmi Aminuddin kerap merekayasa anggota Majelis Syura, mengintervensi proses hukum di internal partai, mencampuri kewenangan DPP, dan sebuah tuduhan lain yang tidak pantas disebutkan di sini. Ustadz Hilmi membantah tuduhan tersebut di media yang sama (Detikcom, Kamis 11 Maret 2011 pukul 12:29 dan 14:01).

dalam hal-hal yang terkait dengan penentuan capres yang akan didukung oleh PKS pasca Pileg 2004.

Di samping itu, ditengarai Ustadz Hilmi sangat *powerful* di PKS karena beliau piawai menggalang dana dari berbagai sumber, termasuk donor-donor luar negeri, dan kemudian memanfaatkan sebagian dana tersebut untuk mengkooptasi para kader. Sejumlah kader senior, para Doktor bidang Agama Islam dari Timur Tengah, dicarikan *kafalah* oleh Ustadz Hilmi. Di samping itu, beberapa kader lain yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa saja, bahkan memprihatinkan, kemudian bisa mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan atas bantuan Ustadz Hilmi. Liputan investigatif sebuah media cetak berbahasa Inggris pasca kericuhan yang dipicu oleh YS, mantan kader senior PKS, setidaknya memberkan konfirmasi tentang keberlimpahan sumber dana tersebut.[34] Ustadz Hilmi digambarkan menempati sebuah vila mewah yang berdiri di atas tanah seluas 1,3 hektar di desa Pagerwangi, Lembang, walaupun dikatakan bahwa tidak semua properti tersebut merupakan milik pribadi Ustadz Hilmi, melainkan juga sebuah yayasan, Madani Foundation, yang mengoperasikan sebuah *boarding school* di mana Ustadz Hilmi menjadi Ketua Komite Pengarah. Dikabarkan bahwa dalam vila tersebut terdapat sebuah *safety deposit box* berukuran 2 meter yang menyimpan sejumlah dana dalam bentuk dolar Amerika untuk keperluan partai. Kepala Desa setempat memberikan informasi, segera setelah Ustadz Hilmi menempati vila tersebut, beliau membangun sejumlah mesjid dan membantu warga mengaspal jalan sepanjang 1,5 km. Maraknya pemberitaan media tentang hal tersebut ditanggapi dengan santai oleh seorang mantan pengurus DPP yang lalu:

> "Sederhana saja, barang siapa menanam, ya dia harus menuai. **Hari begini masih berani main-main dengan transparansi?!** Harus jelas kalau itu aset pribadi, darimana sumbernya, karena Ustadz tidak berbisnis. Tapi kalau itu milik yayasan, harus jelas juga yayasan yang mana, dan darimana sumbernya".

Demikian kuatnya Ustadz Hilmi dari sisi penguasaan sumber dana, sampai media cetak tersebut mengutip sebuah sumbernya yang mengatakan, *"Hilmi is actually*

[34] Harian The Jakarta Post, 29 Maret 2011.

acting as the real treasurer for the party". Sementara itu, persepsi tentang dominannya peran Ustadz Hilmi dalam mengendalikan partai tergambar dalam judul berita yang dilansir media tersebut, *"Deciphering the influence of PKS puppet-master Hilmi"*.

Tabel 5.6
Mengapa Ustadz Hilmi Menjadi Pimpinan Tertinggi PKS dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang?

No	Alasan
A	**Kapasitas dan Kompetensi**
1	Kemampuan mengkonseptualisasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah, dan memformulasikan gagasan secara tajam dan komprehensif.
2	Paling memahami medan, mengalami pahit-getirnya membesarkan jemaah ini, dikaruniai kemampuan berstrategi.
3	Memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman pergerakan, dan kharisma yang belum dapat diimbangi oleh tokoh-tokoh lain.
4	Dipandang dan dihormati oleh tokoh-tokoh politik di luar PKS.
5	Menguasai akses terhadap sumber daya, khususnya SDM, informasi, dan dana.
6	Kemampuan yang luar biasa dalam memberikan *taujih* kepada para kader, antara lain bahasa yang persuasif dan menyentuh, filosofi yang dalam, dan kefasihan Bahasa Arab.
7	Relatif lambatnya para kader mengakselerasi diri, sehingga belum bisa mengimbangi kapasitas Ustadz Hilmi.
8	Dikarunia fisik yang kuat.
B	**Kultur**
1	Di antara para pendiri, Ustadz Hilmi yang paling aktif membina dan menghasilkan kader yang saat ini memegang posisi-posisi penting di struktur PKS. Mampu membina, membentuk, mengendalikan, memelihara, dan berkomunikasi dengan para kader.
2	Kesungkanan para kader Jemaah Tarbiyah kepada beliau sebagai pendiri sekaligus *murabbi*.
3	Para anggota Majelis Syura tidak melihat ada alasan khusus yang membuat Ustadz Hilmi perlu digantikan, seperti persoalan kesehatan atau kesalahan yang serius.

5.4.2. HNW, Presiden PKS di Masa Kritis

HNW mendapat amanah menjadi eksekutif puncak di PK pada saat NI, Presiden PK saat itu, diangkat menjadi menteri dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Musyawarah Nasional (Munas) I PK, 21 Mei 2000. Dalam sambutannya setelah terpilih menjadi Presiden PK, HNW mengemukakan lima tantangan yang harus direspon dan diatasi oleh partai ini, yaitu: (1) pencitraan PK yang kadang-kadang menghambat upaya perluasan dakwah, (2) konsolidasi internal, (3) sosialisasi dan komunikasi massa, (4) kaderisasi yang lebih masal dan masif, dan (4) kemandirian finansial (Nasrullah, 2007: 23-24).

Setelah PK tidak mampu memenuhi *electoral treshold* dalam Pemilu 1999, para kader Jemaah Tarbiyah mendirikan PKS, lalu PK melebur ke dalam wahana politik yang baru terbentuk tersebut. Dalam Munasnya, kepemimpinan PKS diserahkan dari Ketuanya, MY, kepada HNW. Jadi, baik di PK maupun PKS HNW adalah pimpinan partai yang kedua.

Perjalanan sejarah PK dan PKS menempatkan HNW dalam situasi yang sangat kompleks dan menantang. Dia menjadi Presiden Partai di masa transisi yang berat, di mana partai sedang menghadapi persoalan eksistensi yang harus segera diatasi. Kegagalan menembus *treshold* dalam Pemilu 1999 telah menjatuhkan rasa percaya diri sebagian kader partai yang seolah mempertanyakan kemampuan mereka untuk berkiprah di ranah politik Indonesia, bahkan mempertanyakan ketepatan keputusan berpartai. Sejarah kemudian mencatat, di bawah pimpinan HNW PKS mampu mencatat prestasi yang gemilang dalam pemilu 2004, mendulang lebih dari 8,3 juta suara, atau setara dengan 7,34% dari keseluruhan suara sah, serta menempatkan 45 orang kadernya di DPR RI. Kinerja politik PKS tersebut, ditambah dengan pesona pribadi HNW, mengantarkan dirinya menempati posisi sebagai Ketua MPR RI 2004-2009.

HNW tentu saja sangat menyadari pentingnya perluasan basis massa PKS. Karena itu ia menegaskan empat pilar Islam sebagai paradigma yang inklusif. Pertama, *al islam,* penyerahan diri kepada Allah, Zat Yang Maha Pencipta. Kedua, *as silm,* kedamaian. Ketiga, *as salam*, kesejahteraan. Keempat, *as salamah*, keamanan atau keselamatan. Dalam konteks ini, HNW menekankan bahwa paradigma tersebut harus dibuktikan dengan kemampuan para kader untuk menjalin kerjasama konstruktif dengan berbagai pihak (Nasrullah, 2007: 29-30).

Menjelang Pemilu 2009, HNW menjadi salah satu nama yang santer disebut-sebut sebagai kandidat cawapres. Berbagai *pooling* lembaga-lembaga survei dan media massa menempatkan HNW sebagai sosok yang difavoritkan untuk mendampingi SBY. Secara internal, Majelis Syura PKS juga menempatkan dirinya sebagai salah satu dari tiga nama cawapres dari PKS yang diserahkan dalam amplop tertutup kepada SBY sebagai bagian dari negosiasi untuk bekoalisi. Namun kemudian fakta berkata lain. Jangankan menjadi Wapres, bahkan jabatan

menteri pun tak hinggap di pundak HNW pasca Pemillu 2009. Namanya seolah tenggelam, baik di publik, maupun di internal PKS. Saat ini beliau (hanya) menjadi anggota Komisi I DPR, sekaligus ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Dalam pandangan sejumlah informan HNW masih merupakan sosok pemimpin ideal di tengah realita politik Indonesia yang kisruh sejak awal demokratisasi digulirkan pasca Reformasi 1998 hingga hari ini. Kesederhanaan, kecerdasan, kepedulian, dan sikap *wara'* terhadap jabatan dan materi merupakan diferensiasi HNW sebagai pemimpin. Sosok HNW dengan sejumlah karakteristik pribadinya tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing PKS dalam kompetisi di arena politik Indonesia. Bahkan diyakini bahwa faktor HNW merupakan salah satu faktor penting di balik lonjakan suara PKS di Pemilu 2004. Sebaliknya, figur pengganti HNW yang menjadi Presiden PKS pasca Pemilu 2004 juga dinilai merupakan salah satu penyebab stagnasi suara PKS di Pemilu 2009. Seorang anggota MPP mengatakan, "**Sementara ketika itu Presidennya juga udah ganti PKS, ya kan. TS. Gayanya juga udah beda. Tidak dengan pribadi yang sama dengan HNW. Jadi berat**". Kegemaran dan ketekunan membaca membuat HNW tampil sebagai sosok yang cerdas dalam merespon berbagai persoalan, sehingga dalam kurun waktu 2004-2009 sosok HNW dan komentar-komentarnya yang oleh banyak kalangan dinilai bernas dan menyejukkan, mewarnai banyak media massa di tanah air.

Daya ungkit, *leverage*, HNW yang tinggi di internal PKS maupun di publik, di samping kecerdasan, lagi-lagi bersumber dari modal sosialnya, berupa kerendahan hati dan kesederhanaan. Kedua hal tersebut kemudian berperan merekatkan hubungan HNW dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, membuat orang-orang tersebut hormat dan loyal kepadanya. Secara internal, HNW adalah sosok yang mampu membangun soliditas dan motivasi kader. Secara eksternal, dia mampu menjadi magnet yang menarik cukup banyak orang di luar PKS untuk mendekat. HNW juga dipandang sebagai sosok pemimpin yang pas dengan kultur Indonesia. Seorang informan menggambarkan sosok HNW, **"Sangat Indonesia dan tahu Indonesia. Diterima banyak pihak"**.

Ketokohan HNW lebih merupakan sesuatu yang bersumber dari karakteristik pribadi, ketimbang citra yang dibangun secara sengaja dan terprogram oleh institusi, walaupun kemudian memang karakteristik pribadi tersebut terefleksikan dalam gaya kepemimpinan dan manajemen yang bersangkutan ketika memimpin PKS, sehingga mendulang rasa hormat dari berbagai pihak. Seorang kader senior mengatakan, **"Di luar partai sekalipun, semua orang ngasih *respect*. Gus Dur juga ngasih *respect*"**. Salah satu langkah HNW yang fenomenal dan masih diingat publik terkait dengan keteladanannya sebagai pejabat publik yang sederhana adalah inisiatifnya menolak mobil dinas Volvo dan fasilitas hotel mewah kelas *royal suite room*. Penolakan tersebut disampaikan HNW pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 13 Oktober 2004, dan kemudian diikuti oleh seluruh jajaran Pimpinan MPR (Nasrullah, 2007: 15-16).

Seorang anggota MPP membenarkan bahwa HNW didaulat berbagai pihak menjadi Ketua MPR lebih karena kapasitas pribadinya ketimbang dukungan Partai. Tidak solidnya dukungan Partai ditengarai membuat ketokohan HNW tidak terbangun secara optimal di pentas nasional. HNW dan SBY mempunyai titik berangkat yang kurang-lebih sama di 2004, namun posisi terakhir kedua tokoh ini sangat berbeda. SBY terus *on position*, sementara HNW redup dan menghilang. Dukungan partai yang tidak penuh tersebut ditengarai karena HNW mengambil posisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Ustadz Hilmi Aminuddin. Kader tersebut mengatakan, "Dr. HNW ini punya tipikal tidak mau menerima volvo, tidak ingin sesuatu yang bersifat tidak fungsional, kemewahan ditolak. **Agak bertentangan dengan AM dan teman-teman, dan nampaknya Ustadz Hilmi lebih cenderung ke Akh AM**".

Kurang mesranya hubungan HNW dengan Ustadz Hilmi ditengarai juga merupakan dampak dari sikap beliau yang mendukung pencapresan Amien Rais, sikap yang berseberangan dengan Ustadz Hilmi, dalam *mudawalah* di Majelis Syura menjelang Pilpres 2004. Seorang informan mengatakan bahwa dalam musyawarah Majelis Syura tersebut HNW mendorong terjadinya *voting*, bukan mufakat, yang kemudian dimenangkan oleh kelompok yang mendukung Amien

Rais.[35] Hal tersebut dikonfirmasi oleh informan lain yang menyampaikan informasi yang diperolehnya dari sebuah sumber bahwa manuver HNW yang bermuara pada keputusan *syura* untuk mengusung Amien Rais sebagai capres menyakiti Ustadz Hilmi secara pribadi. Beliau seolah dipermalukan di depan Wiranto karena tidak dapat memenuhi komitmennya untuk mendukung Wiranto maju sebagai Capres.[36] Sebagai implikasi dari gesekan tersebut, HNW seperti terpinggirkan dalam percaturan internal. Bahkan Ustadz Hilmi secara eksplisit mengatakan bahwa proyeksi untuk HNW di 2009 adalah hanya anggota Dewan. Dengan segenap kapasitas yang dimilikinya, termasuk *positioning*-nya di publik, posisi hanya sebagai anggota Dewan patut disayangkan untuk seorang HNW.

Pemikiran, ucapan dan tindakan setiap tokoh selalu mengundang pro dan kontra. Demikian pula halnya HNW. Beberapa kader memiliki catatan atau pandangan yang kurang positif terhadap tokoh ini. HNW diakui sempat menunjukkan potensi untuk berkiprah di tataran nasional. Namun dalam perkembangan selanjutnya HNW tidak menunjukkan determinasi yang tinggi untuk bermanuver secara aktif dalam mempertahankan posisi strukturalnya secara internal. Dalam kontestasi internal PKS, HNW yang pasif berhadapan dengan tokoh-tokoh lain, termasuk Ustadz Hilmi dan AM, yang sebaliknya, sangat aktif. Seorang anggota dewan dari PKS menegaskan:

> "Nggak bisa kita punya pimpinan nasional kalau dalam partainya sendiri dia tidak melakukan manuver, tidak melakukan *positioning*, tidak merebut pengaruh untuk mengatakan *I'm okay*. Saya nggak mengatakan bahwa dalam sebuah lingkungan itu ada dua matahari, bukan. Tetapi **orang harus melihat bahwa *at the end of the tunnel there is me* gitu**".

HNW memang memiliki sejumlah peran eksternal yang berskala internasional, namun dikhawatirkan harapan sejumlah kader terhadap HNW akan pudar jika ia terlalu lama "menghilang" dari percaturan internal, apalagi jika HNW tidak mampu menunjukkan hubungan antara peran-peran internasionalnya tersebut dengan masa depan posisi dan kontribusinya di PKS.

---

[35] Informasi ini diperoleh peneliti dalam sebuah pembicaraan informal yang berlangsung pada tahun 2009.

[36] Informasi ini diperoleh peneliti dalam sebuah pembicaraan informal, Kamis 3 Maret 2011, bertempat di Musholla FISIP UI Depok.

Pandangan lain melihat bahwa HNW memang pribadi yang menonjol sebagai ustadz atau ulama, namun dia tidak membangun tim yang solid dan struktur yang mengakar, sehingga pengaruhnya tidak berkesinambungan, dan cenderung redup ketika sudah tidak memegang jabatan di struktur partai. HNW bukan saja tidak menunjukkan ambisinya untuk memimpin, namun juga tidak mengatur langkah-langkah strategis untuk memperkuat *positioning*-nya, serta masih menyibukkan diri dengan hal-hal yang berskala "mikro", seperti menjadi *muwajih* pada kegiatan-kegiatan keagamaan di berbagai tempat.

Sementara itu, seorang perempuan kader senior yang sangat mengagumi Ustadz Hilmi menilai bahwa HNW adalah sosok yang cenderung konservatif, walaupun belakangan sudah lebih *open minded*, mudah menerima masukan, dan mau belajar hal-hal baru. Dengan kondisi yang ada saat ini HNW adalah sosok yang paling tepat menempati posisi Wakil Ketua Majelis Syura jika kelak Majelis Syura memutuskan adanya posisi tersebut. HNW, dengan integritas dan kematangannya, adalah figur yang paling mungkin menggantikan Ustadz Hilmi, walaupun saat ini kapasitasnya masih jauh di bawah beliau. Kader tersebut menilai, "Dia mungkin cuma seperempatnya Ustadz Hilmi. Integritasnya ya belum bisa dianggap menggantikan karena kualitas dia mungkin seperempatnya Ustadz Hilmi. Tapi diantara semuanya, dia yang terbaik diantara yang terburuk".

5.4.3. AM, Sekjen PKS Empat Periode

AM adalah tokoh PKS yang fenomenal. Setelah masuk sebagai Anggota Inti di Jemaah Tarbiyah tahun 1994[37], ia kemudian menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) sejak PK dideklarasikan tahun 1998 sampai dengan saat ini. Artinya, sudah lebih dari 12 tahun, atau empat periode kepemimpinan Presiden Partai ia menempati posisi tersebut. Mengomentari fenomena AM, seorang anggota MPP mengatakan, "**Pak AM ni kayak teh botol ya, apapun makanannya minumnya teh botol, jadi siapapun Presidennya, Sekjennya harus AM gitu ya**".

[37] Menurut informasi dari Informan-04 dalam wawancara tanggal 1 Januari 2010.

AM sendiri mengaku tidak tahu pasti mengapa Majelis Syura selalu menetapkan dirinya menjadi Sekjen PKS. Ia menduga hal itu karena karena jabatan Sekjen memiliki fungsi manajerial yang besar, walaupun juga memiliki bobot politik yang tinggi. Dalam dua belas tahun keberadaan partai ini, fungsi manajerial menjadi sangat penting dalam mengelola pertumbuhan partai yang fantastis, baik dari segi jumlah kader, jangkauan struktur, dan kinerja organisasi. Dalam kondisi tersebut, pembentukan *middle management* yang kuat dan mekanisme pengelolaan organisasi yang berstandar internasional menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di sinilah peran strategis Sekjen yang mungkin dipandang oleh Majelis Syura masih layak diemban oleh AM.

Seorang kader senior melihat pertanyaan mengapa AM terus-menerus menjadi Sekjen tidak tepat karena "***default*-nya adalah Ketua Majelis Syura kita**". Hal itu dapat dipahami karena Anggaran Dasar PKS pasal 11 ayat 2.b.2 mengatur bahwa Sekjen termasuk dalam paket usulan yang diajukan oleh Ketua Majelis Syura (bersama-sama dengan Presiden, Bendahara Umum, Ketua MPP dan Ketua DSP) untuk ditetapkan oleh Majelis Syura. Sehingga, pertanyaan yang mungkin lebih tepat adalah, **mengapa Ketua Majelis Syura selalu memilih AM sebagai Sekjen**. Ada beragam pandangan tentang hal itu. Pertama, kemampuan AM mengeksekusi berbagai gagasan Ustadz Hilmi secara efektif. Kader tersebut menggambarkan, "**AM itu disukai sama Ustadz Hilmi, karena apa yang Ustadz Hilmi inginkan untuk dieksekusi dia bisa mengeksekusi**". Kedua, keluasan berpikir AM, dan kemampuannya mengakses sumberdaya, sebagaimana yang dikatakan kader yang sama, "**AM juga luas pikirannya. Dia bisa mengakses banyak orang plus sumber dayanya**". Gambaran tersebut sejalan dengan penuturan informan lain, "Menurut saya yang berpikir agak konkret ke *how to*-nya cuma AM". Demikian pula sumber lain yang mengatakan, "Barangkali di antara orang-orang di DPP kita melihat bahwa kita masih butuh dia ... Sekjennya jago cari duit". Kelebihan-kelebihan tersebut membuat AM punya *leverage* yang tinggi di mata Ketua Majelis Syura, sehingga dalam konteks perbedaan pendapat, atau bahkan konflik, antara AM dengan kader-kader lain, termasuk para Presiden Partai, Ustadz Hilmi sering mengambil posisi membenarkan AM. Seorang anggota Dewan dari PKS mengkonfirmasi pendapat-

pendapat di atas dengan mengatakan, "Jadi sebetulnya ***influence*** **AM sebagai Sekjen ini *person*-nya, bukan posisinya. *Person*-nya itu sebetulnya sama kuatnya dengan penerimaan Ustadz**". Sementara itu, seorang mantan petinggi PKS mengakui, "Saya juga tidak, tidak apa ya, tidak tega untuk bertanya ini pada Ustadz. Kenapa beliau memilih AM. Saya hanya berpikir bahwa itu pilihan dia".

Tabel 5.7
Mengapa AM Menjadi Sekjen PKS
dalam Kurun Waktu yang Relatif Panjang?

No	Alasan
1	Preferensi pribadi Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura.
2	Dipandang mampu menjalankan peran manajerial untuk mengelola pertumbuhan partai dari segi jumlah kader, jangkauan struktur, dan kinerja organisasi.
3	Mampu mengeksekusi berbagai gagasan Ustadz Hilmi secara efektif.
4	Mampu mengakses sumber daya, khsusunya SDM dan dana.
5	Berpikiran luas dan konkrit, sampai ke *how to.*

Oleh sebagian kader AM digambarkan sebagai pribadi yang visioner dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang strategis dan tidak menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan pribadi. Seorang kader senior menuturkan, "Jadi kalo *personally* orang musuhin AM itu rugi, AM nggak pernah mikirin orang itu". Dalam konteks kerjasama tim, AM digambarkan sebagai pribadi yang profesional, fokus pada kerja. Kepercayaan AM kepada anggota tim merupakan faktor yang membuat orang-orang nyaman bekerjasama dengannya.[38] Walaupun secara personal dekat dengan Ustadz Hilmi, AM juga pernah dipersalahkan, namun ia tidak memandang hal tersebut sebagai persoalan personal. Kader yang sama menuturkan:

> "Pernah rapat sama MRA, habis dia. Ustadz Hilmi juga marah, kalah total. Besoknya saya ketemu, *nothing to lose*, jalan lagi, berjuang, menang lagi. Orang lain mungkin ngambek. Nggak AM. Dia nggak ambil personal. Udah itu dia jalan lagi akhirnya. Menang lagi akhirnya. Ustadz kagum dengan itu, saya juga kagum. Baja banget ininya".

[38] Seorang kader yang sangat mengenal AM di masa-masal awal bergabungnya yang bersangkutan dengan Jemaah Tarbiyah menolak jika dikatakan AM adalah sosok yang terbuka dan tidak larut dalam konflik pribadi. Menurutnya, AM cenderung meminggirkan para pengkritik dan orang-orang yang dinilai tidak loyal kepadanya.

Sementara itu, sebagai pemimpin, AM dinilainya sebagai sosok yang bertanggungjawab dan dapat diandalkan. Ia mengatakan, “Siapa pun yang salah kalau *on behalf of* AM, sedang dapat tugas, AM pasang badan”.

Di sisi lain, diakui bahwa AM memiliki kompetensi yang di dalam komunitas Jemaah Tarbiyah memiliki nilai yang tinggi, yaitu Bahasa Arab. Di samping itu AM mampu melihat *financial opportunity* dari berbagai hal. AM juga digambarkan sebagai pribadi yang mudah menerima kritik dan mau mendengar, karena ia banyak membaca berbagai jenis buku, sehingga wawasannya luas. Seorang Wakil Sekjen menuturkan:

> “Dia itu tidurnya sedikit, dan dia kalo baca buku bisa berapa jam sehari ... Orangnya mau belajar ... Prinsip-prinsip dia itu selalu *sharing*, *always learning and sharing* ... Orangnya mau terima masukan. Saya sering ngritik AM, segala macem”.

Wasekjen tersebut mencontohkan berbagai persoalan yang sering diperdebatkannya dengan AM, termasuk belum tuntasnya perumusan fikih perempuan di PKS yang menyebabkan seringnya terjadi tarik-ulur tentang persoalan tersebut, serta sikap dan pernyataan AM tentang Ahmadiyah yang menurutnya tidak tepat, karena kondisi Ahmadiyah di Indonesia tidak sama dengan di India dan Pakistan. Tentang AM yang sangat gemar membaca dan pekerja keras juga dikonfirmasi oleh seorang kader senior yang suatu ketika bertemu dengan AM yang mengaku bahwa dirinya sering tidak tidur selama 24 jam penuh karena larut dalam aktifitas membaca dan menulis. Bisa dipahami kalau kemudian ternyata AM adalah salah satu tokoh PKS yang paling produktif menulis buku dan artikel media.

Sebagian kalangan internal PKS mengakui kecerdasan AM. Bahkan dikisahkan bahwa dalam sebuah kesempatan diskusi AM mampu menjawab dengan tuntas dan memuaskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh seorang Ustadz, seorang Doktor, yang menjadi anggota DSP. Dalam kesempatan itu AM menganjurkan agar buku-buku yang dijadikannya rujukan dibahas pula di DSP. Sementara itu, gaya hidup AM yang tergolong “borju”, antara lain terlihat dari kebiasaannya berpakaian bagus, berkendaraan mewah, dan lain-lain tidak

dipandang sebagai masalah, karena AM adalah pribadi yang pemurah dan memberikan kontribusi finansial yang besar untuk partai.

Seorang kader yang sangat mengenal AM di masa awal yang bersangkutan bergabung dengan Jemaah Tarbiyah menyimpulkan beberapa nilai tambah yang dimiliki AM:

> "Kemampuan menulis dan orasinya bagus. Komunikasinya bagus ... Itulah kenapa dia punya pasar. Meskipun tulisanya nge-pop, tidak mendalam, tapi setidaknya memiliki pengaruh. Ya terus ketemu dengan semangat dia cari uang. Dia bisa cari uang lebih besar dari kader lain untuk membangun jamaah ... Plus dia punya *background* syariah yang punya nilai tambah".

Namun terdapat beberapa catatan tentang AM. Misalnya, tulisan-tulisan AM populer dan tidak mendalam. AM cenderung bicara hal-hal besar, dan di permukaan. Kecenderungannya menghindari berbicara hal-hal yang rinci, ditengarai karena ia lemah dalam membaca dan memahami data, khususnya data statistik. Sebagai contoh, kader tersebut mengkritik pernyataan-pernyataan AM di berbagai kesempatan tentang target PKS untuk mengulang sukses Masyumi di Pemilu 1955, "Mimpi-mimpinya mengalahkan Masyumi ... Tapi, Masyumi menang di semua pulau di wilayah Indonesia ... Persebaran wilayahnya menguasai 90% dari Indonesia ... Dia nggak baca itu. Dia baca presentasenya aja. Dan untuk capai itu dengan integritas, bukan dengan uang". Pemikiran-pemikiran AM juga dipandang hampir tidak pernah memiliki nilai sebagai kebijakan yang bersifat filosofis dan strategis. Kalaupun ada *policy* yang keluar gagasan AM, hal itu bersifat teknis-operasional, misalnya terkait dengan pemenangan pemilu. Bahkan seorang mantan petinggi partai menggambarkan kapasitas AM dalam bidang syariah dengan mengatakan, "Diperkirakan dia kuat, tapi ternyata nggak juga". Senada dengan itu, seorang kader menyebutnya sebagai *mutsaqqaf* bukan ulama, karena ia membaca banyak hal dengan spektrum yang luas namun tidak mendalam, menyatukan kepingan-kepingan beraneka pemikiran tersebut menjadi satu, kemudian mengartikulasikannya.

Oleh sebagian kader AM dan kelompoknya dipandang berperan besar membawa "ideologi uang" dan "gerbong kemewahan" ke dalam PKS. Sementara itu, kemampuannya dalam *fundrising* oleh sebagian kalangan internal PKS tidak

dilihat sebagai keistimewaan, sebab pemilik dana memberikan uang karena yakin bahwa orang yang berhubungan dengannya punya kemampuan mengeksekusi berbagai *deal* yang terkait dengan pemberian dana tersebut. Posisi struktural AM di partai, termasuk kedekatannya dengan *Murraqib 'Am*, yang membuat dia mampu menggalang dana secara masif. Dengan kata lain, siapapun yang berada dalam posisi AM, termasuk memiliki kedekatan dengan pimpinan tertinggi partai, dan bersedia "bermain" akan bisa mendulang uang untuk partai, sebagaimana yang dilakukan AM.

Gagasan AM tentang uang mudah dilacak pada beberapa transkrip *taujih* yang pernah disampaikannya dalam berbagai kesempatan. Salah satunya di bawah tajuk "Pandangan Islam terhadap Harta"[39] di mana AM mengatakan:

> "Perbaiki dahulu ide kita tentang uang, perbaiki *tsaqafah* tentang uang dan **mulailah mempunyai mimpi besar untuk menjadi orang kaya**, supaya kita Insya Allah naik derajatnya dari *'amil zakat* menjadi *muzakki*. Supaya kita datang kepada orang jangan lagi bawa proposal tapi lain kali orang datang bawa proposal, itu yang benar. **Sering-seringlah datang ke tempat-tempat mewah, jalan-jalan saja untuk memperbaiki selera**" (hal. 87).

Dalam taujih yang sama, AM juga memberikan beberapa nasihat lain, misalnya, "**Hiduplah dengan gaya hidup orang kaya**. Orang kaya itu optimis. Bagi orang kaya biasanya tidak ada yang susah. Bagi mereka semuanya mungkin, karena itu mereka selalu optimis". Atau, "Langkah pertama, perbaiki dulu sirkulasi darah kita, olahraga dulu, supaya wajah segar makan yang banyak. **Banyaklah makan yang enak, daging. Sering-sering makan yang enak**". Atau yang lain lagi, "**bergaullah dengan orang-orang kaya**, perbanyak teman-teman *antum* dari kalangan tersebut".

Pemikiran AM yang lain yang juga menarik menurut peneliti adalah gagasannya tentang kekhasan PKS dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Menurut AM, PKS menawarkan suatu narasi, atau konstruksi berpikir, yang lebih

[39] Terdapat dalam buku "Integrasi Politik dan Dakwah", yang merupakan kumpulan transkrip *taujih* AM di berbagai kesempatan yang dicatat, disunting dan kemudian diterbitkan oleh Bidang Arsip dan Sejarah, Sekretariat Jenderal DPP PKS.

komprehensif.[40] AM mengatakan, "Sebenernya kan kalo **kita bisa menyederhanakan ideologi PKS itu dalam tiga kata: Islam, demokrasi, dan pembangunan**. PKS menyatukan tiga unsur ini yang belum pernah menyatu dalam eksperimen bernegara kita di Indonesia. Kan itu intinya". Dalam pandangan AM, gagasan yang ditawarkan PKS tersebut merupakan antitesis dari apa yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Di masa Orde Lama, setidak-tidaknya di awalnya, Indonesia sangat demokratis, dan Islam dapat diekspresikan dengan luas di ranah politik, tapi minus pembangunan, sehingga negara ini terperangkap dalam kemiskinan. Sebaliknya, di masa Orde Baru, pembangunan berlangsung dengan masif, namun minus demokrasi, dan agama terpinggirkan. Ia mengatakan, "Nah sekarang kita ingin menyatukan tiga unsur itu seperti kita ingin menyatukan, negara, rakyat, dan pasar ... Agama, demokrasi, dan pembangunan". AM menegaskan urgensi peran agama dalam trilogi ideologi PKS tersebut, karena agama adalah pilihan jalan hidup masyarakat, landasan filosofi bagi pembangunan dan demokrasi. Ia mengatakan, "Tidak mungkin suatu masyarakat dapat membangun dengan baik, kalau kita tidak mendasari pembangunan itu pada filosofi hidup masyarakat". AM mencontohkan Cina yang maju dengan sangat pesat, karena mengadopsi kapitalisme sebagai *tools*, namun tetap mempertahankan komunisme sebagai ideologi. Hal tersebut menginspirasi PKS untuk menemukan model *blending* yang tepat untuk Indonesia.

Ada catatan menarik tentang AM yang dinilai kurang berani mengkontestasikan gagasan-gagasannya secara horisontal dengan kader-kader yang lain. Dalam beberapa kasus AM memilih *shortcut*, berbicara langsung dengan *Murraqib 'am* untuk memperoleh persetujuan beliau. Hal ini dibenarkan oleh seorang kader yang mengetahui bahwa AM pernah diundang untuk berdiskusi oleh sebuah DPD di wilayah Jadebotabek, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut dengan alasan sakit, walaupun ia menduga alasan sebenarnya adalah keengganan AM untuk terlibat dalam forum yang memperdebatkan pemikiran-pemikirannya. Seorang kader senior berpendapat bahwa AM punya kecenderungan menghindari perdebatan. Berbagai gagasannya

[40] Dikemukakan oleh AM kepada peneliti dalam wawancara di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Senin 28 Desember 2010.

yang kontroversial memang tidak tercatat di dokumen-dokumen formal partai dengan namanya, namun cukup banyak perumus dari dokumen-dokumen tersebut mengutip pemikiran-pemikiran AM, sehingga sebenarnya ia mendapatkan ruang yang luas untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya.

Sementara kalangan mempertanyakan mengapa dengan segala kapasitas yang dimiliki dan prestasinya AM tidak meningkat karirnya menjadi Presiden Partai. Seorang mantan pengurus DPP berpendapat bahwa AM tidak menginginkan hal itu, setidaknya saat ini, karena yang bersangkutan punya strategi dan perhitungan sendiri. Ia mengatakan:

> "AM itu pinter. Jadi Presiden sekarang ... antum akan *out* ... Matahari akan *sunset*. Dia belum mau … AM lagi nyusun, siapin dulu semua ... Dia nyusun itu. Artinya bukan cuma pengen menang. Pasca kemenangan itu, apa yang bisa saya perbuat".

Ditengarai bahwa AM secara sadar, perlahan tapi pasti, memang sedang menyiapkan kekuatan untuk mengambil peran yang lebih strategis di PKS. Namun manuver-manuver AM tersebut tidak dapat disalahkan. AM bisa tampil ke depan dengan relatif mulus karena tokoh-tokoh lain cenderung pasif dan tidak mengambil posisi.

Sementara itu, seorang kader lain punya analisis yang berbeda. Ia mengatakan, "Karena dia nggak mungkin dijadikan Presiden. Banyak resistensi. Dia sendiri sangat ingin malah, dari dulu. Tapi resistensi masih sangat tinggi. Dan ia tidak punya kekuatan sampai ke situ saya kira". Senada dengan itu, seorang anggota Dewan dari PKS berpendapat, "Oh kalau saya jadi AM *of course my aspiration I should be the President of the Party! But it seems* saya cuma dikasi, atau bukan cuma ya, saya diberi posisi Sekjen".

Ada catatan lain yang menarik tentang gagasan-gagasan AM yang sering "melompat-lompat", seperti wacana PKS sebagai "Partai Terbuka" dan sebagainya. Seorang kader senior menuturkan, "Kalau dari pendiriannya ya, ya anak muda lagi nyari jati dirilah. Mungkin dia lupa bahwa dia membawa identitas kolektif. Problemnya adalah problem individual. Dia sendiri belum selesai dengan itu." Kapasitas AM dipandang masih jauh di bawah para politisi muslim di masa lalu seperti Muhammad Natsir, sosok yang dinilai mampu membaca lingkungan

dan kemudian "menemukan dirinya", sehingga dapat menempatkan diri dengan tepat dalam konstelasi yang ada dan tidak lagi mencari-cari. Dipertanyakan pula apakah AM yang sering menjadikan AKP Turki sebagai rujukan benar-benar dapat dibandingkan dengan sosok Erdogan, karena sebenarnya paradigma yang dijadikan dasar berbeda. Kader yang sama mengatakan, "Dengan bangga mereka membandingkan dirinya dengan Erdogan ... Apa dia sempat mempelajari, gimana sebenarnya itu". Bahkan menurutnya capaian yang diraih oleh Anas Urbaningrum, tokoh muda yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, lebih jelas dan lebih layak diapresiasi.

Tabel 5.8
Ikhtisar Pandangan Sejumlah Kader PKS
Tentang Ustadz Hilmi Aminuddin, HNW dan AM

	Ustadz Hilmi	**HNW**	**AM**
Positif /Kekuatan	♦ Moderat, visioner, strategis, progresif, dan *open minded* sejak awal. ♦ Sangat menghormati keputusan *syura*. ♦ Mau menerima masukan dan kritik. ♦ Senang terhadap hasil-hasil kajian ilmiah. ♦ Hanya memberikan arahan-arahan yang bersifat umum, dan memberikan plafon yang tinggi serta ruang gerak yang luas untuk berkreasi. ♦ Menaruh perhatian terhadap hal-hal yang kecil namun mendasar. ♦ Memiliki hubungan pribadi yang baik dan mendapat respek dari berbagai kalangan. ♦ Selalu mendasarkan *taujih*-nya kepada *sirah* Nabi Muhammad yang dikontekstualisasikan. ♦ Pekerja keras yang selalu bersungguh-sungguh. ♦ Secara serius berupaya menyiapkan pengganti walau belum ada yang tepat hingga saat ini.	♦ Salah satu faktor penting di balik kinerja PKS yang cemerlang di Pemilu 2004. ♦ Sederhana, peduli, dan berhati-hati terhadap jabatan dan uang. ♦ Rendah hati sehingga mampu membangun loyalitas, soliditas, dan motivasi untuk bergerak. ♦ Secara eksternal merupakan magnet politik yang cukup kuat, karena sangat "Indonesia" sehingga diterima dan dihormati oleh semua pihak. ♦ Gemar membaca, cerdas, cepat belajar, mampu merespon berbagai persoalan. ♦ Figur yang paling tepat untuk menggantikan Ustadz Hilmi sebagai Ketua Majelis Syura jika saatnya tiba.	♦ Visioner dan progresif. ♦ Berpkiran terbuka, mau mendengar dan menerima kritik. ♦ Gemar membaca, sehingga berwawasan luas. ♦ Salah satu tokoh PKS yang paling produktif menulis buku. ♦ Berpikir besar dan strategis. Tidak terganggu oleh hal-hal kecil dan pribadi. ♦ Percaya dan loyal kepada anggota tim. ♦ Tidak pernah patah arang, termasuk ketika dipersalahkan oleh *Murraqib 'Am*. ♦ Berbahasa Arab dengan sangat baik. ♦ Berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik. ♦ Mampu melihat *financial opportunity*. ♦ Murah hati dan banyak berkontribusi finansial untuk partai. ♦ Pekerja keras. ♦ Layak jadi Presiden Partai.

	Ustadz Hilmi	HNW	AM
Kurang Positif /Kelemahan	♦ Dulu beliau berperan besar dalam menciptakan persepsi Jemaah Tarbiyah yang tertutup, sehingga sekarang beliau yang harus dan dapat menghilangkan persepsi tersebut. ♦ Cukup kerap menunjuk orang-orang yang dekat dengannya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, seolah dengan mengabaikan sistem. ♦ Kurang mengapresiasi proses kontestasi gagasan di antara para kader. ♦ Belum secara eksplisit melakukan proses regenerasi kepemimpinan. ♦ Cenderung bersikap feodal dan tidak bisa dikritik secara terbuka.	♦ Terlalu pasif dan tidak menunjukkan determinasi yang tinggi dalam kontestasi dengan tokoh-tokoh lain seperti Ustadz Hilmi dan AM. ♦ Tidak dapat menjadi pemimpin nasional karena dalam partai sendiri tidak dapat meraih posisi yang berpengaruh. ♦ Lebih menonjol sebagai sosok ulama atau ustadz daripada sebagai sosok pemimpin politik. ♦ Tidak membangun tim yang solid, struktur yang mengakar, dan langkah-langkah strategis, sehingga pengaruhnya tidak berkesinambungan. ♦ Cenderung konservatif, walaupun belakangan sudah mulai berubah.	♦ Tulisan “ngepop”, di permukaan, dan tidak mendalam. ♦ Lemah dalam membaca dan menafsirkan data. ♦ Pemikirannya lebih bersifat teknis-operasional, lemah dari sisi filosofis-strategis. ♦ Tidak terlalu kuat dari sisi kapasitas *syar’i*. ♦ Lokomotif ideologi uang dan gaya hidup mewah. ♦ Kemampuan *fundrising* bukan keistimewaan, karena hal itu terkait dengan posisi formal dalam struktur partai. ♦ Kurang berani berkontestasi secara horisontal. ♦ Cenderung meminggir-kan orang-orang yang mengkritik dan dinilai tidak loyal kepadanya. ♦ Menggunakan uang untuk membangun loyalitas kader. ♦ Tidak akan bisa menjadi Presiden Partai karena resistensi terlalu besar. ♦ Pikiran yang acak, menunjukkan sosok anak muda yang belum meneumkan jati diri.

5.4.4. Catatan tentang Regenerasi Kepemimpinan di PKS

PKS diyakini memiliki hampir seluruh potensi yang dibutuhkan untuk berlari kencang dan menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada yang berhasil dicapai saat ini. Namun berbagai potensi tersebut, termasuk kekuatan wilayah dan daerah, belum mampu diaktualisasikan dengan optimal, karena belum hadir sosok pemimpin baru yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membangun sinergi. Di akhir wawancara seorang mantan pengurus DPP yang lalu mengatakan, “**Saya suka doa mudah-mudahan dapet *Murraqib ‘Am*, Presiden yang pas** ... kita punya semua kapasitas sumber daya untuk melejit, tapi sekarang ini karena sempit gitu ya”. Keempat Presiden yang pernah memimpin PK/PKS

tidak memiliki kelebihan yang menonjol. Bahkan kapasitas keempatnya masih jauh di bawah Ustadz Hilmi Aminuddin, khususnya jika dilihat dari penguasaan lapangan dan kemampuan eksekusi. Seorang kader menuturkan, "Keempat-empatnya nggak terlalu menonjol semuanya. Biasa-biasa saja ... **jika dibandingkan dengan Ustadz Hilmi, yah jauhlah mereka berempat semua** ... Dalam hal lapangan, ketika kita berbicara partai itu sebagai *execution"*.

Sementara itu, belum ada kesadaran dan langkah nyata di PKS untuk merencanakan *track* regenerasi kepemimpinan yang lebih sistematik, terprogram, dan terukur. Jika selama ini *tarbiyah* dianggap sebagai tulang punggung sistem kaderiasasi PKS, perlu dikaji kembali sejauh mana sistem dan substansi materi-materi *tarbiyah* yang diberikan kepada para kader benar-benar berkontribusi bagi berlangsungnya kaderisasi kepemimpinan di jemaah ini.

Mungkin saja faktor-faktor seperti *ewuh pakewuh*-nya para kader dan lain-lain, punya pengaruh terhadap langgengnya Ustadz Hilmi di posisi *Murraqib 'Am* dan Ketua Majelis Syura dalam waktu yang cukup lama, namun kemandekan regeneasi tersebut berpangkal pada diri Ustadz Hilmi sendiri. Seorang kader senior menegaskan:

> "Di beberapa forum beliau selalu mengatakan, 'saya ini sudah aki, sudah kakek. Harusnya yang muda dong yang mimpin'. Kalau dia ngomong seperti itu *we must prepare who will be the next leader.* **So dia pun tidak lakukan itu**, menurut saya".

Dalam konteks ini terdapat pandangan yang menyesalkan tidak adanya keputusan dalam Sidang Majelis Syura tahun 2009 yang lalu untuk melembagakan jabatan baru, Wakil Ketua Majelis Syura, sebagai langkah nyata untuk melakukan regenerasi. Padahal perolehan suara HNW yang berada di peringkat kedua dan cukup signifikan dalam pemilihan Ketua Majelis Syura seharusnya dibaca sebagai sinyal bahwa secara *de facto* dia dikehendaki oleh para anggota Majelis Syura untuk memimpin partai, sekaligus mempersiapkan diri menggantikan Ustadz Hilmi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Kondisi yang digambarkan di atas dapat dipahami karena PKS didirikan oleh *founders* yang sangat terbatas, sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjadi pada saat *founders* mengatakan inilah waktunya mengalihkan tongkat

estafet kepemimpinan. Sementara itu, tidak ada faktor yang cukup signifikan untuk mendorong terjadinya perubahan saat ini, misalnya pimpinan puncak dinilai melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga sejumlah tokoh kunci bereaksi keras atau menarik diri. Kalaupun ada beberapa tokoh senior bersuara kritis, dan bahkan keluar dari partai, hal-hal tersebut lebih sebagai riak yang tidak terlalu terasa. Seorang anggota Dewan dari PKS menggambarkan realita yang ada:

> "Kalau dikatakan *failure* ya sehingga harus ada perubahan signifikan, tunjukkan apa. *Is there a strong move??* Nggak ada! Paling-paling cuma ngomong doang sekali dua kali. *That's it!* Setelah *dialogue* selesai. Berarti nggak punya dasar yang kuat. Masih *acceptable*. Masih bisa diterima".

Di samping masih memiliki akseptabilitas yang tinggi secara internal, Ustadz Hilmi juga masih diakui oleh pihak eksternal. Anggota Dewan tersebut menggambarkan, "SBY sama Ustadz Hilmi telpon-telponan gitu. *Can* si Fulan gitu, bisa gitu??" Dengan demikian jika Ustadz Hilmi akan diganti, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan masak-masak. Pertama, siapa figur yang layak dan siap menggantikannya. Kedua, seperti apa model kepemimpinan baru yang diusulkan tersebut. Ketiga, kapan *timing* yang tepat untuk pergantian tersebut. Sejauh ini tampaknya belum ada pemikiran yang serius, terstruktur, dan mendalam mengenai ketiga hal tersebut.

Terlepas dari beragam pandangan tentang kepemimpinan Ustadz Hilmi, jabatan *Murraqib 'Am* atau Ketua Majelis Syura atau jabatan apapun ditempati oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang sedemikian panjang bukan hal yang baik dipandang dari sisi manajemen organisasi. Untuk itu diperlukan aturan tentang pembatasan masa jabatan pejabat partai dan pejabat publik dari PKS di semua jejang, karena pada dasarnya semua kader PKS memiliki potensi yang baik, dengan segenap kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seorang perempuan kader senior menuturkan:

> "Awal oke, kita bisa memahami. Setelah 2004 itu partai udah eksis ... artinya dari tahun katakan 80, umurnya 24 tahun, sudah sarjana, sudah bisa dilepas gitu harusnya ... dalam hal kepemimpinan kadang-kadang saya melihat kita perlu salut dengan George Washington. Rakyat Amerika masih pilih dia, dia bilang, *no, just twice*, cukup dua kali jadi Presiden Amerika. Dan sekarang presiden manapun nggak berani melangkahi lebih dari dua kali. Malu gitu loh. **Peluang itu ada. Kalau pemimpin yang**

> **bagus itu akan dibilang jelek suruh turun nggak akan. Pasti didukung terus** ... Apalagi kultur kita. Kultur Amerika aja kayak gitu".

Masa-masa kritis di mana PKS menghadapi pesoalan eksistensi, sudah terlewati. Selanjutnya, inisiatif regenerasi kepemimpinan puncak di PKS harus datang dari Ustadz Hilmi sendiri sebagai *Murraqib 'Am.* Ustadz Hilmi perlu lebih tegas mendorong munculnya sosok-sosok yang menjadi penerusnya. Dengan kultur yang ada, apalagi kultur masyarakat Indonesia yang juga menjadi kultur organisasi PKS, hampir mustahil mengharapkan sosok penerus itu muncul dengan sendirinya dari bawah selama Ustadz Hilmi masih memegang tampuk kepemimpinan.

Lebih jauh, terdapat spekulasi bahwa Ustadz Hilmi bukan saja tidak sungguh-sungguh menyiapkan penggantinya, melainkan dengan sengaja melakukan berbagai manuver untuk melanggengkan posisinya. Seorang mantan anggota Majelis Syura mengemukakan beberapa indikasi dari hal itu. Pertama, telah terjadi perubahan pada *Nizham Asasi* yang diadopsi PKS dari Ikhwan al-Muslimin. Dalam rumusan awal jabatan *Murraqib 'Am* dibatasi hanya selama lima tahun, dan setelah masa jabatan tersebut habis pejabat lama hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Pasal tentang pembatasan masa jabatan ini diubah/dihilangkan, sehingga Ustadz Hilmi bisa menjabat dalam periode waktu yang panjang. Di samping itu, ada semacam upaya memanipulasi ketentuan, di mana Ustadz Hilmi dihitung baru menjabat sebagai pimpinan tertinggi PKS pasca wafatnya Ustadz Rahmat Abdullah tahun 2005, sehingga seolah-olah saat ini ia baru menginjak periode kedua di posisi tersebut. Kedua, terjadi rekayasa dan pengaturan sedemikian rupa pada *lajnah* yang bertanggung jawab mengenai pemilihan anggota-anggota Majelis Syura, sehingga institusi pemutus tertinggi tersebut kian didominasi oleh orang-orang yang pro dan dapat dikendalikan oleh Ustadz Hilmi. Ketiga, belakangan ini dilakukang perubahan terhadap mekanisme penentuan pejabat-pejabat partai di berbagai jenjang sehingga menjadi semakin tidak demokratis. Sebelumnya para kader di berbagai tingkatan terlibat dalam memilih sejumlah kandidat yang berpeluang menjadi pemimpin partai pada tingkatan tersebut. Namun sekarang para pejabat partai

tersebut ditentukan dari atas sebagai satu paket yang harus diterima oleh satuan organisasi yang lebih rendah.

5.5. Dari Jemaah Menjadi Partai Politik

5.5.1. Antara Memanfaatkan Momentum dan Membangun Kesempurnaan

Sejak awal berkiprah, Ustadz Hilmi telah menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Jemaah Tarbiyah harus berlangsung *by design*, tanpa mengabaikan perubahan-perubahan kondisi eksternal. Dengan kata lain, dakwah tidak boleh berlangsung sekedar sebagai respon terhadap stimulus-stimulus tertentu. Apapun yang terjadi, dakwah harus berjalan pada *track*-nya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan dakwah Jemaah Tarbiyah tersebut dirancang dapat ditelusuri dari pemikiran salah satu sumber inspirasinya yang utama, Hasan al-Banna:

> ”Pertama-tama, kita menginginkan **seorang yang muslim** dalam pola pikir dan akidahnya, dalam moralitas dan perasaannya, serta dalam amal dan perilakunya ... Setelah itu, kami menginginkan terbangunnya **rumah tangga yang Islami** ... Sesudah itu, kita menginginkan **bangsa yang muslim** dalam semua aspek di atas ... Setelah itu, kita menginginkan **sebuah pemerintahan Islam** yang bisa memimpin bangsa ini menuju masjid ... Setelah itu, kita menginginkan **bergabungnya bersama kita setiap jengkal dari negeri-negeri Islam** ... Setelah itu kita menginginkan agar **panji Allah SWT kembali berkibar tinggi di seluruh wilayah** ... Setelah itu dan bersamaan dengannya, kita bermaksud mendeklarasikan dakwah kita kepada seluruh alam, menyampaikannya kepada sekalian manusia, memenuhi seantero bumi dengan ajarannya” (2007: 79-84).

Jika kita cermati kutipan di atas, setidaknya terlihat dua prinsip penting dalam metodologi dakwah yang digagas al-Banna. Pertama, *bottom-up*, di mulai dari unit terkecil, dan berlanjut ke satuan-satuan yang lebih besar, dari individu, keluarga, bangsa/masyarakat, pemerintahan, pembebasan negeri-negeri muslim, dan seterusnya. Kedua, pendekatan yang bersifat kultural, berupa perubahan paradigma dan pola pikir, termasuk di dalamnya keyakinan, perasaan, dan moralitas, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk amal dan perilaku,

senantiasa mendahului pendekatan struktural, berupa upaya mengubah institusi-istitusi yang ada, termasuk pemerintahan.[41]

Jemaah Tarbiyah mengadopsi tahapan-tahapan dakwah Ikhwan al-Muslimin tersebut. Setelah Jemaah Tarbiyah didirikan tahun 70an akhir/80an awal dan memfokuskan diri pada *mihwar tanzhimi*, memusatkan perhatian pada islamisasi pribadi-pribadi dan pembentukan keluarga-keluarga muslim, pada tahun 1988 Ustadz Hilmi di hadapan para kader mendeklarasikan bahwa Jemaah Tarbiyah memasuki *mihwar sya'bi*, yaitu orbit/tahapan pembentukan masyarakat yang islami. Sebagai implementasinya, para kader didorong untuk menjalin interaksi seluas-luasnya, mulai dari berpartisipasi dalam rapat RT, arisan di lingkungan, dan lain-lain, hingga mendirikan berbagai *muasasah* untuk mewadahi berbagai kiprah kemasyarakatan para kader Jemaah Tarbiyah. Tercatat menjamurnya berbagai lembaga sosial-kemasyarakatan milik para kader di akhir 80an dan di era 90an, seperti Yayasan Ibu Harapan, Yayasan Ibu Bahagia, Taman Qur-an Rabbi Radhiyya (Taman Kanak-Kanak Al Qur-an pertama), Nurul Fikri (bimbingan belajar, kemudian mengembangkan pula kursus-kursus, sekolah formal, klinik kesehatan, beasiswa kepemimpinan untuk mahasiswa, dan lain-lain), Khairu Ummah (dakwah tabligh), dan masih banyak lagi.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh para kader Jemaah Tarbiyah adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan waktu sekolah yang lebih panjang, *full day school*. Sebelum ada konsep SDIT, para orangtua yang *concern* pada pendidikan keagamaan biasanya menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah umum pada pagi hingga siang hari, dan kemudian melengkapinya dengan madrasah di sore hari. Para penggagas SDIT memandang bahwa hal ini tidak efektif, karena murid dididik dengan kurikulum yang tidak utuh. Di samping itu, para aktifis dakwah memiliki kesibukan yang relatif tinggi, sehingga jika anak-anak mereka hanya bersekolah setengah hari seperti di sekolah-sekolah umum,

[41] Terkait dengan hal ini, dalam beberapa kesempatan mengisi forum *halaqah*, seorang ustadz menegaskan, Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bahwa kemenangan dakwah senantiasa harus mendahului kemenangan politik. Misalnya, keberhasilan Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya hijah ke Madinah dan kemudian mendirikan Negara Madinah didahului oleh keberhasilan misi dakwah yang dikirimkannya ke kota tersebut jauh sebelumnya, sehingga menghasilkan dukungan yang sangat kuat dari warga Madinah yang disebut kaum *Anshar* (penolong) pada saat kaum *Muhajirin* berhijrah ke sana.

sisa waktunya menjadi tidak produktif, karena sangat mungkin diisi dengan menonton TV atau aktifitas lainnya dengan ditemani oleh pembantu rumah tangga. Seorang anggota Dewan dari PKS mengatakan, "*Subhanallah* ya, SDIT di seluruh indonesia itu menolak murid ya sampai sekarang". Setelah jenjang SD, konsep sekolah Islam terpadu juga diterapkan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, sehingga lahirlah SMP Islam Terpadu (SMPIT) dan SMA Islam Terpadu (SMAIT). Selanjutnya sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang memiliki ratusan anggota di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rencana awal yang dicetuskan tahun 1997, para aktifis Jemaah Tarbiyah baru akan memasuki *mihwar mu'asasi*, terjun ke politik dengan fokus pada *islahul hukumah* (perbaikan pemerintahan) pada tahun 2010. Karena itu rencana tersebut dinamakan "Visi 2010". Namun kemudian terjadilah Reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dan rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan membuka peluang mendirikan partai politik dengan azas yang beragam, termasuk azas Islam.

Pada saat itu setidaknya terdapat tiga alternatif bentuk struktur yang dipertimbangkan, yaitu ormas, ormas yang memiliki wahana berupa partai politik, dan partai politik. Pertimbangan jumlah SDM yang terbatas membuat pilihan membuat ormas yang memiliki sayap politik menjadi tidak *feasible* untuk dilakukan. Sementara itu, pilihan menjadi ormas saja juga dipandang tidak memadai untuk memanfaatkan momentum yang menyediakan peluang untuk mereformasi kondisi politik Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, mendirikan partai politik menjadi pilihan yang paling masuk akal.[42]

Di kalangan para kader senior Jemaah Tarbiyah terjadi perbedaan pandangan tentang apakah saat itu *timing* yang tepat untuk mendirikan partai. Mereka yang pro berargumentasi bahwa momentum yang ada harus

[42] Dalam diskusi informal di akhir bulan April 2011, seorang informan menyampaikan bahwa beberapa waktu belakangan ini sudah mulai dipertimbangkan gagasan untuk memisahkan *tanzhim* Jemaah Tarbiyah dengan *tanzhim* partai politik, karena jumlah kader yang dirasakan sudah cukup memadai, dan adanya manvuer-manuver partai yang tidak menguntungkan bagi jemaah. Yang menarik, informan tersebut menuturkan bahwa jika keputusan tersebut diambil, besar kemungkinan AM akan memilih mundur dari partai dan berkonsentrasi di jemaah, karena ia menyadari bahwa posisinya di partai sudah tidak menguntungkan lagi.

dimanfaatkan. Sementara mereka yang kontra merasa belum saatnya Jemaah Tarbiyah terjun ke politik, karena sejumlah prasyarat yang dibutuhkan untuk itu belum dimiliki. Seorang elit PKS yang memegang jabatan yang sangat strategis sejak jaman PK hingga saat ini, termasuk kelompok yang tidak setuju mendirikan partai pada tahun 1998. Perdebatan yang terjadi saat itu bukan tentang pilihan berpartai atau tidak, karena hal itu sudah menjadi hal yang aksiomatik dalam doktrin dakwah Jemaah Tarbiyah, namun antara saat itu atau nanti. Lebih lanjut elit PKS tersebut menguraikan, alasannya tidak setuju partai didirikan saat itu karena Jemaah Tarbiyah belum memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk berpartai, yaitu pengalaman politik, ahli politik, sumber daya, dan tokoh politik yang dapat ditampilkan di publik. Sebaliknya, ada kader lain yang sangat setuju dengan gagasan berpartai, karena dipandang akan menyediakan ruang yang lebih luas bagi para kader Jemaah Tarbiyah untuk menyuarakan dakwahnya dan menggerakkan perubahan masyarakat dan bangsa.

Terdapat dinamika yang cukup hangat sebelum Jemaah Tarbiyah sampai pada keputusan berpartai. Perdebatan di *syura* berlangsung selama enam bulan dan tak kunjung membuahkan keputusan, sehingga kemudian dilakukan mekanisme “referendum internal” yang melibatkan para kader, dengan hasil 68% setuju Jemaah Tarbiyah menjadi partai, dan sisanya, 32% tidak setuju.

Keputusan mendirikan partai politik diambil dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu kesiapan masyarakat untuk menerima kehadiran partai Islam dan memanfaatkan momentum perubahan politik yang terjadi. Seorang pimpinan organ PKS di pusat menuturkan, “**Apakah kita mempersiapkan masyarakat tapi kehilangan momentum, atau kita ambil momentum sambil mempersiapkan masyarakat?** Akhirnya keputusanya mendirikan partai politik”. Walaupun demikian, setelah keputusan mendirikan partai politik diambil, kelompok yang semula tidak sependapat pun memberikan komitmennya terhadap keputusan tersebut. Dengan diambilnya keputusan mendirikan Partai Keadilan tahun 1998, artinya *mihwar muasasi* mengalami percepatan 12 tahun, dari semula dicanangkan akan dimasuki pada tahun 2010.

Setelah diputuskan menjadi partai dan berjalan hingga saat ini, bukan berarti sudah tidak ada perdebatan di internal PKS tentang sikap politik yang harus diambil. Ada sementara kalangan yang mendorong PKS untuk bersikap lebih militan dan heroik dengan keluar dari koalisi partai-partai Pemerintah dan menjadi oposisi. Padahal pilihan menjadi oposisi belum tentu lebih baik untuk dakwah, karena terdapat peluang berbagai cap negatif, seperti ekstrem, fundamentalis, dan sebagainya akan disematkan kepada PKS. Seorang anggota Majelis Syura menuturkan bahwa di Majelis Syura sempat ada arus pemikiran yang menghendaki PKS memutuskan hubungan koalisi karena sikap-sikap dan langkah-langkah SBY yang dipandang sering mengabaikan PKS. Ustadz Hilmi mengapresiasi pendapat tersebut, namun beliau memberikan beberapa pertimbangan. Pertama, memutuskan koalisi dengan SBY dan Partai Demokrat di tingkat nasional akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks, karena di berbagai daerah, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, PKS banyak terlibat dalam koalisi dengan PD dalam mengusung ataupun mendukung Kepala Daerah. Kedua, kemampuan para aktifis Jemaah Tarbiyah di Indonesia untuk menjalin dan memelihara koalisi dengan Pemerintah dalam situasi yang begitu kompleks menjadi inspirasi dan referensi bagi para aktifis Islam di berbagai negara yang sebelumnya cenderung beroposisi, bahkan berkonflik dengan pemerintah. Jika baru berjalan beberapa saat ternyata koalisi tersebut tidak langgeng, PKS tidak lagi dapat menjadi contoh yang baik bagi para aktifis Islam di negara-negara lain.

5.5.2. Antara yang Tetap dan yang Berubah

Kondisi internal PKS yang sangat dinamis terbentuk karena PKS mengadopsi khasanah pemikiran Islam yang spektrumnya sangat luas dan mengalami perkembangan yang masif selama berabad-abad. Latar belakang lahirnya Jemaah Tarbiyah/PKS sesungguhnya dimulai pada abad ke-20, di mana terjadi pembalikan arah sejarah yang ingin mengulang ekspansi dan kejayaan Islam selama sepuluh abad, abad ke-7 hingga abad ke-17. Seorang anggota Dewan dari PKS menggambarkan dinamika sejarah tersebut:

> "Nah di sinilah latar belakang lahirnya PKS dan latar belakang yang mewakilinya dari Al Afghani ya kan? Kemudian Rasyid Ridha, Abduh, Hasan al-Banna, dan para pembaharu lain yang ada, yang berkeping-keping masuk ke Indonesia menjadi Ahmad Dahlan, Hasyim Asyhari, dan sebagainya itu. Surkati, Persis itu. Dan terakhir kemudian PKS".

Kader tersebut memandang bahwa sebagian kader dan publik eksternal melihat PKS berubah, misalnya menjadi lebih pragmatis, karena mereka tidak paham bahwa PKS mengadopsi bagian-bagian yang berbeda dari keragaman khasanah Islam pada masa yang berbeda. Dalam hal ini umat Islam di Indonesia, termasuk PKS, telah menjadi korban alur pikir dan politik linguistik Barat, antara lain dalam kategorisasi *islamist, political Islam, islamic political parties*, maupun dalam tipologi ala Geertz, santri, priyayi, abangan. Dalam kategorisasi tersebut, PKS dipaksa masuk ke dalam kategori "santri" dengan segala cirinya, seperti *rural oriented*, tidak moderen, tampil bersarung, dan hanya saleh secara pribadi. Implikasinya, ketika PKS tampil dengan atribut-atribut "abangan", seperti berjas, menyelenggarakan acara-acara di hotel mewah dan sebagainya, muncul penilaian seolah PKS telah berubah dan meninggalkan jatidirinya. Kekagetan dan ketidanyamanan dari sebagian kader atas penyelenggaraan Munas 2009 di Bali dan Munas 2010 di Hotel Ritz Carlton The Pacific Place Jakarta merupakan contohnya. Ia menuturkan:

> "Ini sebagian ada di teman-teman itu gamang mengatakan, Bali kan banyak tempat maksiat. Maksiat apa? Ya kan? Dalam konsep Islam, setiap bumi milik Allah, dan setiap tempat kita harus ada amanah untuk tinggal dan memakmurkannya di situ. Dan kita mempunyai konsep yang positif terhadap *tourism"*.

Perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai mau tidak mau membawa konsekuensi perubahan paradigma dakwah yang dijadikan rujukan oleh para kadernya, karena dakwah memasuki *mihwar* baru, yaitu *mihwar muasasi*. Sangat disadari bahwa perubahan tersebut tidak mudah, karena terdapat rintangan yang jauh lebih kompleks ketimbang sebelumnya, ketika dakwah mungkin dibatasi oleh tembok-tembok mesjid. Dalam konteks ini, terdapat keharusan mengubah strategi gerakan. Tuntutan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah sebelum menjadi partai merupakan tantangan masa itu,

sebaliknya, kebebasan dan keterbukaan pasca reformasi, termasuk di dalamnya peluang-peluang para kader untuk tampil di publik, juga merupakan tantangan yang khas untuk masa sekarang.

Setelah menjadi partai maka para aktifis Jemaah Tarbiyah harus lebih toleran terhadap bebagai kelompok masyarakat yang beragam, dan berupaya mencari titik temu dengan mereka. Penetapan tanggal jatuhnya hari-hari besar Islam oleh Dewan Syariah adalah sebuah contoh menarik yang dituturkan seorang pejabat tinggi PKS:

> "Dulu awal-awal partai, penentuan awal tahun *qamariyah* terkait misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya melakukan *ru'yat* sendiri, kemudian melakukan kesimpulan sendiri ... Sering berbeda. Karena kita mengangap melihat *hilal* itu sifatnya '*alamiah* ... Institusi sama, orang yang sama. Ada beberapa pendapat, bahwa tidak ada salahnya menurut aspek-aspek pemikiran Islam, kita melakukan *mahaliyah* atau lokalitas dari aspek-aspek *ru'yatul hilal*, sehingga mungkin saja kita berembuk dengan Depag, berembuk dengan Muhamadiyah, atau NU dan lain sebagainya dalam diskusi-diskusi penentuan awal bulan Ramadhan atau akhir Ramadhan".

Bahkan perkembangan pemikiran terbaru di Dewan Syariah Pusat sudah memungkinkan berlakunya lokalitas yang tidak bersifat nasional, melainkan wilayah atau daerah. Dengan demikian para kader PKS di berbagai wilayah atau daerah dimungkinkan untuk mengikuti pendapat yang sudah diterima secara umum di wilayah atau daerah tersebut, walaupun hal tersebut berbeda dengan keputusan PKS di tingkat nasional.

Sebelum dan pada saat-saat awal berpartai, para kader cenderung berpikir sangat sempit ketika berinteraksi dengan orang lain, di mana konteksnya selalu mempertimbangkan sejauh mana kemungkinan orang tersebut bisa direkrut menjadi kader. Sehingga kriteria-kriteria yang sangat internal, yang menjadi kriteria kader, sering digunakan untuk menentukan apakah orang-orang tersebut layak untuk diajak berinteraksi. Kemudian disadari bahwa dalam konteks demokrasi dengan suara terbanyak cara berpikir tersebut tidak efektif, karena membuat basis pemilih PKS menjadi relatif terbatas. Seorang anggota Dewan dari PKS menuturkan perubahan paradigma tersebut sebagai berikut:

> "Pandangan yang sekarang ingin ditelurkan kepada semua adalah bukan tugas kita untuk selalu membesarkan kelompok masyarakat kita dengan pendekatan supaya mereka menjadi diri kita. **Bukan tugas kita untuk meminta orang yang bukan kader untuk seperti kayak kader**. Tapi ***you* sebagai kader tetep harus memegang**. Tapi bukan tugas *you* itu untuk mengkonversi seseorang menjadi seperti kita".

Perubahan tersebut tersimpul dalam sikap PKS yang mendorong para kadernya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Untuk itu, perubahan mendasar yang pertama kali harus dilakukan adalah dalam cara melihat siapa yang dipimpin. Para kader PKS tidak bisa lagi melihat bahwa yang harus mereka pimpin sebatas komunitas mereka sendiri, melainkan komunitas mereka ditambah sekian banyak komunitas lain yang beragam. Sebagai pemimpin masyarakat para kader PKS dituntut untuk memahami kebutuhan orang lain serta menghargai eksistensi, kebiasaan, dan keinginan mereka, karena pemimpin masyarakat dinilai berkinerja baik jika mampu membawa aspirasi, menaungi, memberikan rasa aman, dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, disadari perlunya perubahan yang sangat mendasar dalam pembinaan dan pengelolaan kader, di mana pendekatan yang direktif yang selama ini digunakan harus ditinggalkan, digantikan dengan pola hubungan yang lebih konsultatif, kemudian partisipatif, dan akhirnya delegatif. Dalam pola hubungan konsultatif kader datang kepada pemimpinnya untuk berkonsultasi sebelum dia bergerak. Dalam pola hubungan partisipatif kader bersama-sama dengan pemimpinnya bergerak langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam pola hubungan delegatif, *qiyadah* memberikan ruang kepada kadernya untuk bergerak langsung memimpin masyarakat. Secara umum kader-kader PKS di *grass root* masih terkungkung oleh pola-pola hubungan yang direktif, di mana mereka masih sangat mengharapkan instruksi dari *qiyadah*-nya, walaupun pola-pola partisipatif sudah mulai terlihat. Salah satu indikatornya, di milis atau media sosial lainnya, terlihat bahwa para kader sudah mulai kritis terhadap pemimpin mereka. Oleh karena itu, para *qiyadah* juga harus belajar dan berubah. Sedangkan kader-kader PKS yang memegang jabatan publik, khususnya mereka yang duduk di DPR, sudah relatif mampu menerapkan pola hubungan yang konsultatif, dan sebagiannya sudah mulai bergerak ke arah partisipatif, walaupun sebagian masih

terkesan harus dipaksa untuk itu. Namun kemampuan para kader untuk menerapkan pola hubungan yang delegatif masih relatif sangat kecil, bahkan di tingkat anggota Majelis Syura yang merupakan jenjang kader yang tertinggi.

Secara historis, di masa lalu Jemaah Tarbiyah memulai kiprahnya ketika rejim Orde Baru yang otoriter sedang berkuasa, di mana negara menginfiltrasi dan mengiternvensi seluruh partai politik, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi apapun secara sempurna. Dapat dipahami jika reaksi terhadap situasi itu adalah bertahan dan bersembunyi. Seorang kader menggambarkan situasi itu, "Dulu saya suka bercanda sama temen-temen, dalam *manhaj* kita seolah-olah ya, pada masa itu lebih sedikit kenal orang lebih baik. Kita hanya perlu berkenalan dengan orang yang direkrut, pada proses rekrutmen, serta pada proses kaderisasi gitu". Namun situasi otoritarianisme tersebut sudah berakhir. Saat ini bahkan seorang Presiden pun tak kuasa mencegah orang berdemo dengan membawa kerbau yang diasosiasikan dengan dirinya, atau menginjak-injak fotonya. Artinya, para kader Jemaah Tarbiyah tidak bisa lagi mempertahankan citra diri sebagai objek penguasa yang otoriter.

Dengan berubahnya Jemaah Tarbiyah dari sebuah "gerakan bawah tanah" menjadi partai, sebagian besar paradigma yang valid dijadikan rujukan ketika di *mihwar tanzhimi* sudah tidak relevan lagi, atau setidaknya perlu dikaji ulang, karena perubahan fase dakwah tersebut juga menuntut peningkatan kematangan dan kedewasaan kader. Satu hal yang disoroti adalah pandangan keagamaan yang cenderung rigid dan sikap konfrontatif terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki ideologi yang berbeda. Di tahap *tanzhimi*, hal-hal tersebut relevan karena konteks waktu itu adalah membangun identitas dan militansi kader. Di masa itu istilah *thagut* sangat lazim digunakan sebagai label untuk pemerintah atau kekuatan-kekuatan lain yang dipandang tidak berpihak kepada Islam dan dakwah. Sebagai contoh, sekitar tahun 1992 Nurcholis Madjid almarhum (Cak Nur) berhadap-hadapan dengan DRS, seorang Doktor Tafsir Hadits dan saat itu tokoh yang cukup senior di Jemaah Tarbiyah, dalam sebuah perdebatan yang sangat panas. Dalam forum itu gagasan-gagasan Cak Nur yang ketika itu dinilai liberal dan sekular, didebat habis-habisan, bahkan dihakimi dan dihujat. Seorang murid Ustadz Hilmi menegaskan bahwa sikap keras para kader Jemaah Tarbiyah

tersebut bukanlah ajaran Ustadz Hilmi, bukan ajaran dan *manhaj* dakwah ini, walaupun Ustadz Hilmi memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk berkiprah dan bereksperimen di lapangan, dan kemudian memetik pelajaran dari hasil eksperimen tersebut. Kader senior tersebut mengatakan bahwa pada saat itu dirinya termasuk orang yang terbawa oleh "heroisme" yang mengemuka, namun saat ini ia berpikir, "Kalau saya baca-baca bukunya dia ini mah PKS yang sekarang, pemikiran-pemikiran dia tentang Islam yang substansi, nilai-nilai Islam. Bukan terlalu mementingkan katakanlah judul-judul, mementingkan sesuatu yang sifatnya simbol-simbol".

Para kader Jemaah Tarbiyah lalu mendirikan PK yang kemudian menjadi PKS. Di samping itu para kader pun harus menerima realita, misalnya, kekuatan lobi Yahudi di Amerika dan di seluruh dunia yang belum bisa ditumbangkan oleh kaum muslimin, sehingga dibutuhkan srategi yang lebih cerdas daripada sekedar konfrontasi langsung. Di sisi lain Cak Nur pun mulai bergerak mendekat. Cak Nur yang sebelumnya terkenal dengan jargonnya "Islam yes, Partai Islam no" kemudin menjadi sangat mengapresiasi PKS. Ada sebuah kenangan yang melekat pada sebagian kader PKS bagaimana Cak Nur menghadiri *milad* PKS tahun 2004 di Stadion Utama Senayan, di mana ia duduk diapit oleh Ustadz Hilmi Aminuddin dan Dr. Hidayat Nur Wahid.

5.5.3. Dinamika Internal Jemaah Tarbiyah setelah Menjadi Partai

Seorang kader yang sangat senior dan deklarator PK menegaskan bahwa tidak satu pun hal yang sifatnya asasi – tujuan, falsafah, dan pandangan terhadap persoalan-persoalan sosial-politik – mengalami perubahan. Ia menggambarkan dialognya dengan Najwa Shihab, presenter *talkshaw* di suatu TV swasta sekitar bulan Juni 2010 yang lalu:

> "Prinsip umum bahwa sebuah partai politik bisa dikatakan berubah kalau, pertama asasnya itu berubah. Dua, tujuannya berubah. Yang ketiga, metodologi perjuangannya itu berubah. Yang keempat, filosofi dasar perjuangannya berubah. Nah PKS itu nggak ada perubahan secuilpun. Jadi apa yang kemudian dipersepsikan oleh orang umum terjadi perubahan? Kata dia, dari *statement-statement* itu. Lha, *statement* itu, kata saya *statement* namanya. Orang saya ada di dalam kok. Nggak ada perubahan.

> Dan Munas kemarin itu[43] tidak menghasilkan suatu yang signifkan untuk terjadinya suatu perubahan dalam pengertian suatu yang sifatnya asas tadi. Nggak ada".

Dengan demikian, timbulnya anggapan bahwa PKS telah berubah secara mendasar mungkin mencerminkan ketidakpahaman tentang dakwah itu sendiri, atau terkait dengan persepsi, tidak berdasarkan sebuah rujukan yang objektif. Seorang kader menuturkan:

> "Urusannya bukan salah atau benar, urusannya adalah pantas atau tidak pantas … Kalau dia tidak salah, kenapa mesti dipersalahkan. Yang menentukan Dewan Syariah kan, bukan ada *person to person*. Kalau *person to person* kan masuk kategori *khilaf*. Kalau *khilaf* ya berarti Anda nggak bisa ngotot. Anda ngotot yang lain juga boleh ngotot gitu kan".

Senada dengan itu, seorang anggota Dewan dari PKS menegaskan bahwa pro-kontra yang timbul di internal PKS lebih banyak menyakut *feeling* yang subjektif, bukan ilmu pengetahuan yang objektif dengan memberikan ilustrasi, "*Political party* mengejar kekuasaan kan. Peristiwa-peristiwa politik adalah peristiwa kekuasaan. *When you become a minister* ente mengendarai mobil mewah, difasilitasi negara. *What's wrong* dengan mobil mewah? Jadi itu kan *feeling"*.

Namun tidak bisa dinafikkan bahwa dalam beberapa kasus, hal-hal yang dipersepsikan berubah tersebut telah "mengusik perasaan" sebagian kader yang lain. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan riak-riak di tubuh PKS. Di samping itu, anggapan bahwa PKS telah berubah, melenceng dari jatidirinya, mungkin pula bersumber pada perbedaan pada *uslub* berdakwah yang oleh sebagian kalangan dilihat sebagai sesuatu yang mendasar.

Dalam pandangan seorang kader senior, simpul dari berbagai penilaian publik yang tak lagi sepenuhnya positif terhadap PKS, seperti dugaan tentang adanya faksionalisasi, serta persepsi bahwa PKS menjadi semakin pragmatis dan karenanya menjadi tidak berbeda dari partai-partai lain, adalah **perubahan perilaku**. Ia menuturkan:

[43] Maksudnya Munas PKS tahun 2010.

> "Kalau jamannya PK itu ya, mungkin ya, belum memasuki dunia nyata yang hingar bingar segala macem, banyak tantangan dan sebagainya, dan masih kecil. Lalu juga itu kekentalan ideologis misalnya, kekentalan religiusitas itu misalnya, masih cukup. Tapi ketika sudah melebar ya dan **di era PKS yang ada sejahteranya itu** lalu kemudian berbagai macam perubahan-perubahan perilaku."

Kader tersebut mengkontraskan era PK dan era PKS, baik secara eksternal maupun internal. Era PK digambarkan sebagai masa di mana terdapat harapan besar publik, di samping merupakan era yang tenang dan jauh dari berbagai kegaduhan, serta masih diwarnai oleh ideologi dan religiusitas yang kental khas Jemaah Tarbiyah. Di samping itu ukuran organisasi yang relatif masih kecil mungkin turut berperan. Sementara itu, era PKS adalah masa di mana ukuran partai ini membesar, ia masuk ke dalam pusaran hingar-bingar politik, dan mengalami degradasi ideologi dan religiusitas. Dengan sangat tajam, walaupun implisit, kader tersebut memberikan *clue* tentang perubahan perilaku itu dengan mengatakan, "**di era PKS yang ada sejahteranya itu**".

Perubahan perilaku tersebut merupakan konsekuensi logis dari dua hal, yaitu ekstensifikasi perekrutan kader pasca 1999, dan interaksi kader yang meluas dengan berbagai kalangan yang plural setelah Jemaah Tarbiyah berubah menjadi partai, bahkan kemudian berkoalisi dengan partai-partai lain. Kader-kader yang direkrut sebelum 1999 berada satu era perjuangan, di era Orde Baru, di mana belum ada harapan menjadi Menteri, anggota DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, dan lain-lain. Di era partai nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada para kader melalui *tarbiyah* sesungguhnya diuji. Di mana terlihat ada yang bertahan dan ada yang berubah. Seorang mantan petinggi PKS menggunakan perbandingan Perang Badar di mana jumlah pasukan muslim sangat sedikit namun militansinya tinggi, sehingga mendapatkan kemenangan, dengan Perang Hunain, di mana jumlah yang banyak membuat pasukan muslim menjadi lalai.

Seorang anggota MPP menengarai bahwa perubahan-perubahan pada penampilan tersebut terjadi dan kemudian tertangkap oleh publik karena memang kader-kader PKS yang ditempatkan di jabatan-jabatan publik berada pada jenjang pengkaderan yang beragam, berbeda dengan para kader yang menempati struktur partai yang memiliki persyaratan jenjang pengkaderan yang ketat. Ia menduga,

beberapa gelintir kader yang dinilai ”menyimpang” tersebut masih berada pada jenjang kader yang relatif rendah, atau bahkan ada yang sebenarnya belum menjadi Anggota Inti, sehingga nilai-nilai dasar PKS belum tertanam dengan kuat pada diri mereka. Namun sejumlah informan lain menegaskan, perubahan perilaku justru ditunjukkan oleh sejumlah kader yang berada di posisi-posisi struktural yang tinggi, elit partai, sehingga mereka menjadi *flagship*, dan perilaku mereka dianggap oleh publik sebagai representasi dari institusi PKS.

Sementara itu, seorang elit PKS berpandangan bahwa ketika Jemaah Tarbiyah menjadi partai, yang terjadi adalah pertumbuhan, bukan perubahan. Dalam delapan belas tahun pertama dari kiprah Jemaah Tarbiyah, perekrutan dan pembinaan kader dilakukan dengan sangat ketat, sehingga terkesan eksklusif, karena sedang berada di tahap pembentukan identitas dan pembangunan basis. Kondisi yang relatif tertutup itu juga merupakan respon terhadap deislamisasi atau marjinalisasi terhadap umat Islam yang secara masif dilakukan oleh rejim Orde Baru. Untuk bangkit dari keterpurukan tersebut umat Islam membutuhkan sebuah identitas baru yang kuat. Selanjutnya, setelah Jemaah Tarbiyah memiliki identitas yang cukup kuat sebagai hasil proses metamorfosis yang relatif panjang, tiba saatnya ia bertumbuh, sehingga terjadilah lompatan dalam kuantitasnya. Elit tersebut menggambarkan ketika pertama kali terjun ke politik tahun 1998 jumlah kader Jemaah Tarbiyah hanya sekitar 33 ribu, 3 ribu di antaranya adalah Anggota Inti. Lalu tahun 2004 jumlah kader menjadi sekitar 400 ribu. Dalam sensus terakhir tahun 2009 jumlah kader tersebut telah membengkak menjadi lebih dari 800 ribu orang. Dalam konteks pertumbuhan itu, hal-hal yang ditangkap publik eksternal sebagai dikotomi antara kecenderungan idealis-pragmatis, atau konservatif-progresif, merupakan respon organisasi ini terhadap proses pembelajaran yang menyertai pertumbuhan organisasi. Langkah-langkah PKS yang oleh sebagian kalangan dinilai pragmatis sebenarnya merupakan bagian dari realisme, konsekuensi logis dari pertumbuhan yang terjadi. Contohnya tentang pemilukada, di mana para kader PKS di seluruh daerah diinstruksikan untuk terjun mengikutinya, baik sendiri, mapun berkoalisi dengan partai lain. Ketika kader PKS maju sendiri, konsekuensinya adalah biaya. Sementara itu, ketika berkoalisi, konsekuensinya adalah membicarakan dan kemudian menyepakati kontrak politik

untuk pemenangan pemilukada yang diikuti, di mana pembiayaan merupakan salah satu komponen yang harus dibicarakan dan disepakati. Dengan demikian, kemampuan menyediakan sumber dana menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh PKS dalam menetapkan siapa calon Kepala Daerah yang diusung atau didukung, baik dari kalangan kader PKS, maupun dari kalangan eksternal. Informan yang sama mengatakan, "Ini kan bagian dari logika pemenangan. Dia bisa menjadi salah kalau uang itu untuk pribadi. Kalau ini kan tidak. Ini adalah bagian dari logika pemenagan, ada rencana, ada pelaku, ada *budget"*. Walaupun uang bukan satu-satunya kriteria, namun tidak bisa diabaikan, karena tidak mungkin PKS mendukung seorang calon, bekerja penuh untuk memenangkannya, namun juga harus mendukung seluruh biaya pemenangannya. Ia menggambarkan, "Mekanisme kerja kita adalah calonnya diseleksi, kemudian siapa yang memenuhi persyaratan? Salah satunya adalah persyaratan pembiayaan". Inilah yang sering membuat PKS dinilai pragmatis, padahal mengutip uang dari calon Kepala Daerah yang akan diusung atau didukung hanyalah konsekuensi manajerial dari sebuah kerja politik. Di sinilah proses pembelajaran baru itu terjadi, di mana sebagian kader "gagap" dan bertanya-tanya apakah hal tersebut merupakan cara kerja yang benar. Dalam merespon hal ini, ada kader yang sangat berhati-hati, sehingga tidak berani melangkah, namun ada juga berani mencoba untuk melangkah. Kegamangan tersebut adalah hal yang wajar, mengingat tidak ada pengalaman sebelumnya mengenai hal tersebut. Dengan kata lain, kegamangan tersebut adalah bentuk *learning process* ketika menghadapi masalah. Senada dengan itu, kader lain yang dikenal dekat dengan elit tersebut menggugat pihak-pihak yang menilai bahwa PKS telah berubah secara signifikan, sehingga ada persoalan mendasar yang terkait dengan pergeseran jatidiri PKS. Padahal, apa-apa yang sering dikemukakan oleh para pengkritik adalah hal-hal yang merupakan konsekuensi logis dari pilihan berpartai. Misalnya, karena Jemaah Tarbiyah berpartai ya terjun mengikuti pemilu, termasuk pemilukada. Karena ikut pemilukada, PKS dipilih konstituen sehingga mendapatkan kursi di DPRD.

Seorang kader senior mengidentifikasi tiga hal yang dimaksudkannya sebagai perubahan perilaku yang mengemuka di era PKS jika dibandingkan dengan masa Jemaah Tarbiyah dan PK, yaitu pertama, **perubahan perilaku individu**, kedua, **perubahan perilaku politik**, dan ketiga, **deideologisasi** yang memiliki hubungan timbal-balik dengan faktor pertama dan kedua. Hal ketiga, deideologisasi yang berujung pada ”ideologi yang cair” adalah hal yang sangat memprihatinkan karena sebuah partai politik yang tidak ideologis sejatinya bukan partai politik, melainkan kerumunan orang belaka.

5.5.3.1. Perubahan Perilaku Individu

Lunturnya kesederhanaan diyakini sebagian kalangan sebagai contoh perubahan perilaku individu. Hal ini bukan merupakan fenomena umum, namun segelintir orang yang seperti itu menempati posisi kepemimpinan dan pos-pos strategis dalam struktur partai, sehingga oleh publik dianggap merupakan personifikasi PKS sebagai lembaga. Seorang kader senior mengungkapkan kegundahannya dengan mengkontraskan situasi kontemporer yang dilihatnya itu dengan kondisi yang menurutnya ideal:

> “Kesederhanaan itulah justru yang menarik simpati, karena Rasulullah SAW sendiri sudah menyatakan, ‘Berzuhudlah *fii ma aidinnas, yuhibbukannas*”. Kalau kamu mau berzuhud terhadap apa saja yang sudah dimiliki orang lain, apa itu kekuasaan, ekonomi, harta dan lain sebagainya maka kamu akan banyak disimpati oleh manusia.”

Keprihatinnya atas perubahan perilaku individu dan gaya hidup sebagian kader PKS tersebut terutama ditujukan kepada mereka menjadi pejabat publik, karena berpotensi menyinggung perasaan kader-kader lain yang sudah berjuang mendudukkan mereka di berbagai posisi tersebut. Sebaliknya, masih bisa mengerti dan memaklumi jika perubahan tersebut ditunjukkan oleh para kader yang berbisnis atau menjadi pengusaha.

Namun sebagian kader yang lain tidak sependapat kalau dikatakan telah terjadi perubahan gaya hidup yang mendasar pada sebagian kader atau elit PKS. Menurut mereka, walaupun telah menempati berbagai jabatan publik, para kader PKS tetap menjaga jatidiri dalam hal-hal yang substantif, misalnya shalat tepat

pada waktunya, etika kepantasan, dan nilai-nilai lainnya. Contohnya, seorang caleg PKS di Sumatera memilih mengundurkan diri karena dirinya terkena operasi yustisi yang merazia KTP, dan kemudian diangkat di media massa seolah-olah dia berada di panti pijat yang tidak baik, padahal sebenarnya ia berada di tempat pijat sehat, semacam tempat pijat refleksi yang terbuka. Pihak-pihak eksternal yang berinteraksi dengan para kader PKS pun tetap memandang bahwa PKS dan kader-kadernya tetap memiliki *mumayyizah* dibandingkan yang lain. Seorang perempuan kader senior mencontohkan profesornya yang dalam beberapa kesempatan bimbingan bersama-sama dengan yang lain selalu menghentikan pertemuan ketika adzan berkumandang. Profesor tersebut mengatakan bahwa tidak enak kalau mereka tidak shalat, karena di tengah mereka ada orang PKS. Contoh lainnya, petugas keamanan di Gedung DPR selalu memberikan penghormatan lebih jika dirinya datang dan memperkenalkan diri sebagai pengurus DPP PKS dan akan bertemu dengan anggota Dewan dari PKS untuk suatu keperluan. Dengan kata lain, yang berubah hanyalah "kemasan", seperti gaya berpakaian, tampilan luar, dan penggunaan fasilitas, yang memang perlu disesuaikan dengan konteks interaksi yang sedang dilakukan. Contohnya, tidak mungkin kader-kader PKS yang menjadi Menteri atau anggota Dewan tampil di publik ketika menjalankan tugasnya berbaju koko. Tidak pantas pula para pejabat publik dari PKS itu diminta tetap menggunakan sepeda motor seperti di masa lalu. Kader tersebut menegaskan, *"don't judge a book by its cover"*. Dalam kondisi yang berbeda, ketika dalam acara-acara yang sifatnya internal, para pejabat publik dari PKS tersebut kembali tampil sederhana.

Senada dengan itu, anggota Dewan dari PKS melihat berbagai fasilitas hidup yang dimiliki oleh kader PKS saat ini bukan untuk "pamer diri", melainkan sebagai sarana pendukung mobilitas dakwah. Dalam konteks ini Ustadz Hilmi menyamakan para aktifis dakwah dengan prajurit-prajurit yang harus dilengkapi dengan fasilitas yang cukup agar dapat memenangkan pertempuran. Sebagai contoh, ada seorang kader yang menjadi anggota Dewan tahun 2004 yang tidak membeli kendaraan padahal mampu untuk itu, ditegur oleh partai, karena hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas. Atau contoh lain, ada seorang kader yang tidak memiliki mobil tapi kemana-mana yang bersangkutan meminjam

mobil milik kader lain, termasuk untuk urusan-urusan keluarga. Hal-hal tersebut membuat partai kemudian mewajibkan para kader yang mampu untuk memiliki kendaraan. Namun demikian, untuk kader-kader yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, partai membantu penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut. Ada kader yang dibelikan *laptop*, atau yang dibayari oleh partai untuk menjalani tes kesehatan ketika akan menjadi calon anggota Dewan.

Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan perubahan tampilan fisik beberapa kader PKS yang terkesan mewah, sekedar bagian dari upaya *anzilunnas manaazilahum*, memposisikan manusia sesuai dengan posisinya, memperlakukan manusia sesuai dengan status sosialnya, sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Informan yang sama mencontohkan, ketika ia akan membuat pesta pernikahan di rumah karena ingin sederhana, ia diingatkan untuk mempertimbangkan jika ada Menteri atau pejabat negara lainnya yang hadir, bagaimana protokolernya. Selain itu diingatkan tentang kemungkinan adanya tudingan miring seperti "PKS kere" atau kadernya dinilai sebagai orang yang pelit, padahal ia mampu secara ekonomi. Dengan demikian, perubahan tampilan fisik para kader PKS tersebut bukanlah perubahan jatidiri, karena dalam interaksi internal mereka tidak berubah, tetap menampilkan kesederhanaan dan menghindari kemubaziran.

Ketua Dewan Syariah PKS juga tidak sependapat jika perubahan perilaku atau gaya hidup sebagian kader PKS yang berkiprah di ranah publik dianggap sebagai perubahan yang signifikan dan mendasar. Ia mengatakan:

> "Nah **ini soal wawasan dan soal budaya** juga ya. Kader-kader ini berproses juga ya kehidupan ini, dan dulu kita belum masuk ke ranah publik kan ... Berkembang lah ini. Kita harus bertetangga, kita harus bergaul, kelembagaan, bahkan kenegaraan ... **Di situ kan ada kepatutan. Kepatutan tampil.** Ya sebagai pejabat publik. Bahkan ada protokolernya kan?"

Warna dan jenis baju, berdasi atau tidak berdasi, merek dan harga dasi, merek dan jenis mobil, semuanya adalah pilihan-pilihan di antara yang halal, sejauh hal-hal tersebut diperoleh dari sumber rizki yang halal dan sudah dikeluarkan infaknya. Ditegaskan pula bahwa perubahan tampilan fisik para kader PKS tersebut hanya ditampakkan dalam even-even di publik, sesuai dengan kepantasan dan kepatutan.

Para Anggota Inti diyakini telah memahami persoalan ini dengan baik, walaupun kader yang belum menjadi Anggota Inti atau publik umum mungkin saja mempersoalkannya karena menganggap PKS sekarang punya kecenderungan bermewah-mewah. Namun demikian hal-hal tersebut dipandang tidak akan secara signifikan berpengaruh terhadap citra PKS di mata publik, karena yang terpenting adalah kehadiran kader-kader PKS secara nyata di lapangan pada saat masyarakat membutuhkan, misalnya di saat terjadi bencana alam. Kepedulian pada kader PKS yang tetap tinggi terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat akan membuat masyarakat tidak terlalu mempersoalkan perubahan gaya hidup sebagian kader-kader PKS di publik.

5.5.3.2. Perubahan Perilaku Politik

Perubahan perilaku politik, yang juga dipandang sebagai penyimpangan dari asas dan falsafah yang dibangun sejak lama, antara lain berupa kecenderungan untuk berorientasi pada kekuasaan dibandingkan moralitas dan substansi nilai-nilai yang diperjuangkan. Salah satu indikatornya, di berbagai daerah PKS mudah saja berkoalisi dengan pihak manapun untuk maju dan memenangkan pemilukada. Hal inilah yang ditengarai membuat sementara kalangan menilai PKS sekarang sudah pragmatis. Namun hal ini dibantah oleh seorang petinggi partai yang melihat koalisi PKS dengan partai-partai lain di berbagai pemilukada dilakukan atas dasar kesamaan kepentingan, sebagai implikasi dari proses objektifikasi nilai-nilai ideal-subjektif yang dianut PKS ke dalam sejumlah penjabaran yang lebih objektif dan dapat dirasakan oleh orang banyak. Ia menuturkan:

> “Kalau mau ideologis, di tingkat asas, seharusnya Partai Islam dengan Partai Islam. Itu pun belum tentu sama pemikiran Islamnya ... ketika kita melakukan objektifikasi, soal perbaikan terhadap masyarakat yang tentu indikator-indikatornya menjadi jelas ... Sehingga pada dasarnya koalisi itu bisa dengan siapa saja. Bahkan pengalaman PKS di daerah Papua sendiri, berkoalisi dengan PDS pun jadi. Karena kita menganggap tadi, apa yang kita lakukan bisa dikerjakan bersama untuk memperbaiki orang Papua yang mayoritas non muslim itu”.

Satu contoh lagi dari perubahan perilaku politik adalah ketergesaan memasuki eksekutif yang berbeda dari *"khittah"* awal untuk memperkuat dan mengawal proses legislasi di parlemen. Hal ini ditegarai terkait dengan perubahan orientasi dari Partai Kader menjadi mengejar kekuasaan atas nama proses pembelajaran berpolitik dan kemaslahatan dakwah. Dengan kata lain, ini lebih merupakan "godaan kontemporer" yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Seorang kader senior menuturkan, "Ketika Nurmahmudi ditawari Menteri Kehutanan itu, wah ini lumayan nih, katanya. Diambil. Lalu ambrol sudah. Jadi kemudiannya ke sini, ya lebih jauh lagi". Perubahan perilaku politik juga ditunjukkan oleh perilaku seorang juru bicara partai yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan pernyataan publik yang terkesan keras dan kasar, dan dipandang menyimpang dari akhlak seorang kader Partai Dakwah.

5.5.3.3. Deidelogisasi/Ideologi yang Cair

Adanya kasus M, anggota DPR RI dari PKS yang kini ditahan karena tuduhan terlibat kasus korupsi dengan modus *letter of credit* (LC) fiktif Bank Century merupakan indikasi dari bentuk perubahan perilaku yang ketiga, deideologisasi.[44] Seorang kader senior mengatakan:

> "Bagaimana seorang koruptor, dalam tanda kutip ya, walaupun belum terbukti tapi nyatanya ditahan kan, itu bisa masuk sebagai anggota DPR dari elite PKS yang sekarang, kemudian mencoreng citra dan juga membuat opini orang bahwa PKS itu sama saja. Koruptor juga ada di situ, segala macem. Ustadz juga ada."

Deideologisasi atau ideologi yang cair itulah yang bermuara pada perubahan paradigma yang cukup siginifikan pada sebagian kader PKS, di mana merebak pemikiran bahwa **kemenangan hanya dapat diperoleh dengan tiga prasyarat, yaitu kekayaan, media iklan, dan tampilan fisik**. Padahal, bagaimanapun kekuatan uang ada batasnya. Betapapun banyaknya yang dapat dikumpulkan,

[44] Dari dua orang informan peneliti mendapatkan penjelasan bahwa M memang masih berada di jenjang yang sangat awal dalam sistem kaderisasi PKS. Namun karena di dapil tersebut tidak ada kader PKS yang lebih senior yang dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan maka dirinyalah yang dicalonkan. Di samping itu, kasus yang menimpa M terjadi pada tahun 2007, sebelum yang bersangkutan bergabung dengan PKS.

uang akan habis. Di samping itu, akan selalu ada pihak lain yang bisa memberi lebih banyak. Implikasi positif iklan di media elektronik terhadap peningkatan simpati pemilih kepada PKS juga dipertanyakan. Publik lebih percaya pada pesan-pesan non verbal, seperti perilaku kader-kader PKS yang menjadi anggota Dewan dan perilaku PKS sebagai organisasi, ketimbang tampilan luar yang disorot oleh media.

5.5.3.4. Pragmatisme Finansial

Selain perubahan perilaku individu, perubahan perilaku politik, dan deideologisasi yang telah diulas di atas, teridentifikasi adanya satu bentuk perubahan perilaku yang lain yang terkait dengan tiga yang awal tadi, yang bisa disebut sebagai **”pragmatisme finansial”.** Kader tersebut menuturkan:

> “Kita dengan KPK justru sekarang seperti agak alergi. Padahal KPK kita yang dorong, kita yang besarkan kalau mau dibilang. Dan masyarakat mendapat manfaat dari KPK itu ... kita malah mulai berbeda dengan teman-teman ... ada beberapa hal, **dana-dana taktis, dana-dana politik bisa kita manfaatkan** ... **kita main proyek di sini** ... **Kementerian X tidak lebih bersih dibandingkan yang lain**”.

Jadi, pragmatisme finansial adalah berubahnya, atau lebih tepat lagi turunnya, standar tentang sumber-sumber pendanaan yang dianggap ”bersih” dan dapat diakses untuk keperluan partai. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh seorang mantan pengurus DPP periode lalu yang mengatakan, ”**Departemen-departemen kan begitu, dikapling-kapling ... Ini departemen siapa, departemen siapa**”. Pragmatisme finansial ini ditengarai berdampak terhadap independensi PKS dalam menyikapi berbagai persoalan. Ia juga menyoroti manuver seorang kader PKS di media dalam kaitan dengan KPK dan Polri, “FH berbeda komentarnya. FH malah ngebelain Polri. Ada pembenaran memang. Polri kan lebih banyak, KPK kan cuma sedikit. **Yah, kita namanya melawan opini publik. Bener benerin, salah salahin. Tinggal salah-nyalahinnya dengan santun. Bisa**”.[45]

[45] Dalam sebuah pembicaraan informal dengan seorang kader PKS pada bulan Januari 2011, peneliti mendapat informasi yang menarik tentang sikap PKS terhadap ”perseteruan” antara Polri versus KPK. Menurutnya, PKS, atas arahan langsung dari *Murraqib ‘Am*, memang sengaja mengambil menunjukkan simpati kepada Polri, pada saat pihak-pihak lain menghujatnya, untuk menjalin hubungan baik dengan institusi ini. Sikap tersebut diambil agar para kader PKS di

Kondisi kisruh di Kementerian X, dibenarkan oleh seorang pegawai balitbang kementerian tersebut. Menurutnya, sudah dua periode kepemimpinan Menteri dari PKS, Kementerian tersebut menjadi ”sapi perah” bagi PKS dan/atau orang-orang PKS. Ada beberapa modus pengumpulan dana yang teridentifikasi. Pertama, alokasi dana-dana penelitian yang relatif besar, namun tidak jelas realisasinya. Dari buruknya kualitas keluaran yang dihasilkan diperkirakan hanya sebagian kecil dari anggaran yang betul-betul digunakan untuk meneliti, dan selebihnya mengalir ke partai. Kedua, barter berbagai posisi jabatan di Kementerian dengan setoran sejumlah uang dari kandidat yang bersedia. Bahkan, ada seorang pejabat yang diturunkan dari jabatannya kemudian ditawari untuk kembali mendapatkan jabatan dengan menyetorkan sejumlah uang, namun yang bersangkutan menolak sehingga tersingkir. Ketiga, mengutip dana dari kontraktor atau vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian, di mana kontraktor dan vendor tersebut sebagian besar terafiliasi dengan orang-orang PKS juga. Ditegnarai bahwa operator dari apa yang disebut ”modus koboi” tersebut adalah para Staf Khusus dan Staf Ahli yang dibawa oleh Menteri, yang kemudian ”mengacak-ngacak sampai ke bawah-bawah”, termasuk dalam penempatan, promosi, maupun demosi pegawai. Pada umumnya proses-proses mutasi SDM tersebut dilakukan dengan alasan yang tidak jelas, misalnya seseorang diangkat karena ”jenggotnya panjang dan sering menjadi khatib”, pegawai yang lain diturunkan dari jabatan struktural eselon II dan kembali menjadi peneliti karena yang bersangkutan diisukan dekat dengan kelompok-kelompok tani yang dibina oleh seorang tokoh partai lain, atau ada juga yang dilengserkan karena diisukan melakukan pelanggaran etika yang tidak pernah terbukti. Di samping itu, berbagai aturan kepegawaian, misalnya aturan kepangkatan dan umur, sering dilanggar dalam proses-proses tersebut. Dapat dipahami jika banyak pihak kecewa terhadap perilaku kader-kader PKS tersebut, karena mereka sempat berharap bahwa PKS bisa menjadi ”partai Islam yang benar”. Pegawai tersebut mengatakan, ”**Menyakitkan itu atas nama agamanya itu gitu, padahal kelakuannya jorok juga. Mereka juga nggak nolak kemewahan**”. Di sisi lain, kondisi yang ada di

---

berbagai daerah yang terkena kasus-kasus hukum, namun secara substansi sebenarnya tidak bersalah (misalnya karena kisruhnya aturan pengadaan barang dan jasa untuk instansi-instansi pemerintah), tidak dipersulit oleh pihak kepolisian setempat.

kalangan PNS membuat mereka tidak berani membantah, apalagi melawan atasannya. Dengan penghasilan rutin yang "alakadarnya", peluang untuk menempati jabatan-jabatan struktural, dengan berbagai fasilitasnya, adalah "berkah tambahan" yang benar-benar diharapkan oleh mereka. Hal tersebut membuat para pegawai di Kementerian X cenderung diam dan mengikuti apa pun tindakan yang dilakukan oleh "gerombolan" Menteri tersebut.

\ Seorang kader yang berkiprah di DPR menyoroti *money politics* sebagai salah satu bentuk pragmatisme finansial yang sering dinisbatkan kepada sebagian anggota Dewan, bahkan sampai-sampai beberapa pihak menyebut mereka sebagai *broker*. Ia mengatakan, "**dalam arena perpolitikan, yang namanya *money politics is daily activity***". Para anggota Dewan yang terlibat dapat dikelompokkan menjadi dua, mereka yang proaktif, dan mereka yang pasif. Proaktif artinya mereka secara aktif menciptakan "transaksi". *S*ebagian besar anggota Dewan dari PKS, khususnya mereka yang baru menjabat satu periode, tidak paham apa yang dimaksud *money politics*, sehingga tidak bisa membedakan apakah sebuah tindakan tertentu tergolong *money politics* atau tidak, juga tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kader tersebut mengatakan, "*Some of our colleagues are more proactive than the others. When they are proactive, they gain something. It's they own call.* **Tapi kebetulan yang *gain something* ini duduk dalam pimpinan**".

Yang menarik, sebagian kader tetap bersikukuh bahwa sumber-sumber keuangan partai tetap terjaga kejelasan dan kebersihannya, di mana sumber keuangan utama PKS tetap berasal dari para kadernya sendiri. Salah satunya adalah potongan dari penghasilan para kader yang menjadi pejabat-pejabat publik. Selain dari kader, PKS juga memperoleh sumber pendanaan dari para donatur yang tidak mengikat. Seorang kader senior memberikan contoh:

> "Zaman mau mendukung Amien Rais itu ... Sutrisno Bachir ngasih uang asalkan ini ... kita gak terima uangnya. Toh kita juga dukung Amien Rais kan. Prabowo itu mau ketemu Ustadz Hilmi sampe bawa uang sekoper. Kata Ustadz, jangan bicara uang kalo ketemu saya, dan akhirnya ketemu. Walaupun akhirnya Ustadz tidak mendukung Prabowo juga. Boleh-boleh aja kok bicara sama saya tapi jangan bicara uang".

Ustadz Hilmi berperan besar dalam menggalang dana untuk partai. Ada seorang pengusaha yang merupakan anggota sebuah parpol tertentu, namun ia terkesan dengan kegiatan-kegiatan dakwah dan *charity* yang dilakukan oleh PKS, sehingga menyalurkan infaknya untuk mendanai kegiatan-kegiatan PKS. Akhirnya ia keluar dari partai itu dan terus menjadi donatur untuk PKS karena dia sempat mengaji pada Ustadz Hilmi. Ada pula seorang penguasaha yang lain yang tergerak memberikan infak berupa gedung yang saat ini dijadikan Markaz Dakwah, Kantor Pusat PKS. Konon ada seorang kader PKS yang menjadi auditor yang mengaudit salah satu perusahaan milik pengusaha tersebut. Ketika itu auditor tersebut menolak "amplop ucapan terimakasih" yang diberikan kepadanya. Hal tersebut sampai ke telinga sang pengusaha dan membuatnya tertarik, sehingga ia kemudian minta dipertemukan dengan Ustadz dari si auditor. Singkat cerita, bertemulah pengusaha itu dengan Ustadz Hilmi, dan kemudian tersentuh dengan *taujih* yang diberikannya, sehingga terdorong untuk berinfak.[46]

Seorang mantan eksekutif puncak di PKS juga membantah ketidakjelasan sumber-sumber keuangan PKS. Dengan tegas ia mengatakan bahwa halal-haram, termasuk *syubhat*, tidak bisa ditawar-tawar, dan tidak akan berubah, walaupun zaman berubah dan berkembang. Ia menegaskan bahwa sumber keuangan partai yang utama adalah dari iuran anggota, baik mereka yang menjabat di legislatif dan eksekutif, maupun para kader yang lain. Namun tidak dapat dinafikkan adanya beberapa sumber dana dari pihak eksternal yang oleh sebagian kalangan mungkin dinilai tidak bersih, walaupun menurut ahli fikih dana-dana tersebut boleh digunakan. Misalnya saja dana yang diterima partai dari seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha, yang salah satunya adalah bank konvensional yang menggunakan sistem riba. Atau dana dari pengusaha properti yang memiliki pusat perbelanjaan, di mana ada *tenant*-nya yang menjual minuman keras atau barang-barang lain yang diharamkan syariat Islam. Ada pula pengusaha lain yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang, bukan uang, dan tidak mungkin bagi PKS untuk menanyakan sumber uang pengusaha tersebut.

[46] Versi lain mengatakan, MD Building (Gedung Kantor Pusat PKS) di Jl. TB Simatupang merupakan kompensasi yang diberikan pengusaha tersebut atas kesediaan PKS untuk mencabut usulan pembentukan Pansus BLBI, karena pengusaha tersebut terkait dengan BLBI.

Bantahan tentang adanya “pragmatisme finansial” juga dikemukakan oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS. Menurutnya, DSP sejak dini telah memberikan rambu-rambu tentang *fundrising*, dan sejauh ini rambu-rambu tersebut ditaati oleh para kader PKS. Rambu-rambu tersebut adalah “Tiga Aman”, yaitu aman *syar’i*, aman yuridis, dan aman politis. Aman *syar’i* artinya sumber dana tersebut harus halal berdasarkan syariat, tidak *syubhat*, apalagi haram. Aman yuridis artinya sumber dana tersebut tidak melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Aman politis artinya sumber dana tersebut tidak berpotensi menggerus citra partai, atau dengan kata lain *cost*-nya masih bisa dikontrol dan dipastikan memberikan benefit yang signifikan untuk Partai. Di lapangan, para kader PKS yang menempati jabatan-jabatan publik sering menemukan *grey area*, misalnya berkaitan dengan *success fee*, yang jika ditarik bisa saja dikategorikan sebagai gratifikasi yang ujungnya didefinisikan sebagai suap. Ia mengatakan, “*Grey area* itu umumnya yang dikategorikan ke dalam lingkup besar itu semacam gratifikasi gitu ya. Kan gratifikasi itu tingkatan kesekian dari suap ya”. Dalam kondisi ini, para kader diminta untuk menyerahkan kepada hati nurani masing-masing, karena Nabi Muhammad saw mengajarkan bahwa hati nurani adalah hakim yang paling adil. Namun jika kader yang bersangkutan tetap tidak dapat mengambil keputusan, DSP akan membantu.

Seorang kader senior tidak menafikkan kemungkinan adanya satu-dua kader yang terpeleset memperoleh dana dari sumber-sumber yang tidak memenuhi syarat yang disebutnya legal, formal, dan halal, sebagaimana senantiasa diingatkan oleh Ustadz Hilmi Aminuddin. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kuatnya desakan keinginan pribadi atau tuntutan kebutuhan keluarga, pada saat kader yang bersangkutan sedang tidak intens mengikuti *halaqah* atau *usrah* pekanannya. Namun di sisi lain, pihak-pihak yang selama ini bertanya-tanya tentang sumber keuangan para kader PKS seyogianya tidak hanya melihat tampilan para kader tersebut, namun juga melihat realita bahwa dengan berjalannya waktu mereka juga bertemu dengan sejumlah peluang bisnis yang sah dan halal. Ia mencontohkan, “**Ternyata dia punya kedekatan dengan pengusaha kertas misalnya. Dia dapat komisi sekian karena dia memberikan kemudahan-kemudahan ya kepada para pengusaha untuk bisa dapet akses**

ini akses ini, memberikan jalan keluar, sehingga dia dapet komisi. Itu kan halal ya kan". Jika dicermati, contoh yang diberikan oleh informan tersebut di atas justru sudah masuk ke dalam area abu-abu yang menjadi keberatan banyak pihak.

Sebagian kalangan meragukan efektifitas ketiga rambu tadi – aman *syar'i*, aman yuridis, dan aman politis, atau legal, formal, halal, dalam menjaga dan memastikan PKS tidak terjerumus ke dalam pragmatisme finansial, karena kriteria tersebut relatif longgar dan multitafsir. Terkait dengan kriteria pertama, aman secara syariat, ketika PKS mencari uang untuk mendanai keikutsertaannya dalam pemilu, atau ketika ada pihak eksternal yang mau memberikan dana untuk mendukung partai, di permukaan seolah tidak ada aturan syariat yang dilanggar. Letak persoalannya adalah pada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di balik pemberian dana tersebut. Seorang kader menggugat, "**Yang jadi masalah itu kan, kita nggak tau kesepakatannya** ... **Apa konsekuensi dari uang yang kita terima? Dukungan dana, apa lanjutannya**?" Seorang kader yang merupakan sarjana ilmu hadits juga meragukan terpenuhi kriteria aman *syar'i* tersebut, karena Dewan Syariah membuat *judgement* tentang kehalalan suatu transaksi penerimaan donasi sebatas informasi yang diungkapkan oleh kader yang bertanggungawab atas transaksi tersebut. Di samping itu, *maslahah dakwah* sering dijadikan pembenaran untuk mengakses sumber-sumber dana yang meragukan. Argumentasi *maslahah dakwah* sangat lentur dan tidak memiliki batasan yang jelas.[47]

Selanjutnya, kriteria aman yuridis juga bermasalah, karena kondisi hukum di Indonesia yang sangat rapuh, sehingga persoalan hukum tereduksi menjadi persoalan teknis bagaimana mengamankan sebuah transaksi kotor agar tidak terendus oleh aparat hukum. Dengan kata lain, kriteria aman politis ini lebih absurd lagi. Seorang kader menggugat, "Apa yang dimaksud aman secara politis itu?" Ia memberi contoh tentang PKS yang tidak bersikap tegas dalam pengungkapan kasus BLBI yang ditengarai telah merugikan negara lebih dari 700

[47] Pendapat ini disampaikan kepada peneliti dalam pembicaraan informal pada hari Kamis 3 Marei 2011 di Mushalla FISIP UI Depok. Menurut hemat peneliti, pendapat ini sangat kredibel, karena yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan ilmu hadits, di samping berkiprah di salah satu institusi di bawah Dewan Syariah Pusat.

trilyun rupiah.[48] Menurutnya, seorang kader PKS yang duduk di parlemen dan mengkritisi kasus ini sempat ditegur oleh Sekjen, diminta untuk tidak mempersoalkannya lagi.

Tabel 5.9
Ikhtisar Pandangan Tentang Perubahan Perilaku Kader PKS

Aspek	Merupakan Persoalan Serius	Bukan Persoalan Serius
Pandangan Umum	♦ Telah terjadi perubahan perilaku yang signifikan pada sebagian kader PKS, yang tidak lagi sesuai dengan jatidiri sebagai Partai Dakwah. ♦ Perubahan perilaku tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dari publik, karena yang terjadi pada sejumlah kader senior yang menempati posisi-posisi kunci, sehingga menjadi representasi organisasi secara keseluruhan.	♦ Yang terjadi bukan perubahan, melainkan pertumbuhan, sebagai konsekuensi dari tahapan gerakan dakwah yang berbeda. ♦ Publik dan sebagian kader menilai terjadi perubahan karena PKS mengadopsi spektrum yang berbeda-beda dari khasanah pemikiran Islam yang luas. ♦ Yang terjadi hanyalah perubahan tampilan fisik pada sebagian kecil kader yang mungkin berada di jenjang pengkaderan awal. ♦ Yang disebut perubahan tersebut hanya menyangkut persepsi, perasaan, dan selera. Tidak ada dasar yang objektif untuk menilai.

[48] Sebagaimana dilansir oleh berbagai media nasional, pada tanggal 10 Juni 2008 Fraksi PKS DPR RI, bersama-sama dengan Fraksi PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar, menolak hak angket untuk mengungkap KLBI dan BLBI. Sementara kalangan dapat memahami jika para anggota Dewan dari PDIP menolak hak angket tersebut, karena berpotensi menjerumuskan Ketua Umum mereka. Penolakan Golkar yang ditengarai memiliki hubungan historis dengan sejumlah pengemplang BLBI, maupun Demokrat yang merupakan partainya SBY, dapat dimengerti pula. Namun sikap penolakan PKS menyisakan tanda tanya besar. Apalagi SR, anggota Fraksi PKS, merupakan sosok yang sangat bersemangat memelopori hak angket BLBI. Bahkan beberapa saat sebelum Rapat Paripurna DPR yang mengambil keputusan perihal tersebut, berbagai pihak masih menyakini bahwa PKS akan memberikan dukungan secara bulat. Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh ARH mewakili Fraksi PKS, antara lain dinyatakan bahwa PKS menganggap tidak ditemukan adanya fakta baru yang berbeda dari jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah atas interpelasi Dewan dalam sidang paripurna sebelumnya. Pernyataan itu seperti bertentangan dengan dokumen hak angket yang disebar kepada para anggota Dewan yang mengatakan bahwa hak angket diajukan karena kalangan dewan menilai bahwa obligor dengan satu dan berbagai cara telah bekerja sama dengan pejabat pemerintah agar pengusutan kasus BLBI dihentikan atau sekurang-kurangnya berjalan di tempat (Disarikan dari beberapa media, antara lain www.Kompas.com 10 Juni 2008 dan www.berpolitik.com 13 Juni 2008). Seorang informan menuturkan bahwa Gedung Markaz Dakwah (MD Building) di Jl. TB. Simatupang yang saat ini menjadi Sekretariat DPP PKS, merupakan kompensasi yang diberikan oleh seorang pengusaha yang terkait kasus BLBI, sebagai balas jasa atas kesediaan PKS membatalkan usulan Hak Angket BLBI.

Aspek	Merupakan Persoalan Serius	Bukan Persoalan Serius
Perilaku Individu	♦ Lunturnya kesederhanaan pada sebagian kader PKS yang menjadi pejabat publik. ♦ Kemewahan yang ditunjukkan oleh sebagian kader tersebut menyinggung perasaan kader-kader yang ada di akar rumput. ♦ Gaya hidup mewah tersebut juga tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah saw bahwa mereka yang *zuhud* akan mendapatkan simpati dari manusia.	♦ Jatidiri para kader PKS tidak berubah. Mereka tetap menunjukkan kekhasan dalam ibadah dan akhlak. ♦ Yang berubah hanya kemasan: gaya berpakaian dan fasilitas yang digunakan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan yang baru. ♦ Peningkatan fasilitas bukan untuk pamer diri, melainkan sarana memperlancar mobilitas. ♦ Publik tidak akan terlalu mempersoalkan perubahan gaya hidup tersebut karena para kader PKS tetap menunjukkan kepedulian kepada persoalan masyarakat.
Perilaku Politik	♦ Sangat mudah berkoalisi dengan siapapun untuk maju memenagkan pemilukada. ♦ Terburu-buru mengambil jabatan-jabatan di eksekutif. Padahal dalam disain awal PKS akan berkonsentrasi terlebih dahulu di legislatif. ♦ Komunikasi politik di publik yang tidak santun dan arogan. Tidak sesuai dengan Platform PKS sebagai Partai Dakwah. Pimpinan partai tidak pernah menyuruh kadernya untuk tampil kasar dan arogan di media.	♦ Koalisi merupakan bagian dari proses objektifikasi nilai-nilai ideal-subjektif PKS. Dengan demikian tidak masalah berkoalisasi dengan siapapun sejauh untuk agenda kebaikan. ♦ Cara berkomunikasi di publik yang terkesan kasar tersebut dilakukan kader yang bersangkutan karena ditugaskan oleh partai untuk mengimbangi pihak-pihak tertentu.
Deideologisasi/ Ideologi Cair	♦ Adanya anggota dewan dari PKS yang tersangkut kasus korupsi, sehingga terkesan di PKS koruptor pun ada. ♦ Kekayaan, media iklan, dan tampilan fisik sekarang seolah menjadi prasyarat kemenangan.	♦ Kader yang terjerat kasus korupsi tersebut bukan Anggota Inti, dan kasusnya terjadi ketika yang bersangkutan belum bergabung dengan PKS.
Pragmatisme Finansial	♦ Hubungan dengan KPK yang tidak lagi mesra. ♦ PKS menjadi sulit bersikap independen karena terikat dengan sejumlah donor. ♦ Menjadikan Kementerian tertentu sebagai sumber pendanaan. ♦ Syarat aman *syar'i*, aman yuridis, aman politis sangat lentur dan tidak cukup untuk memastikan kebersihan dan kepantasan sumber-sumber dana yang diakses partai, karena persoalannya *deal* yang disepakati dengan pemberi dana tidak transparan.	♦ Sumber keuangan PKS yang utama tetap dari para kadernya. ♦ PKS hanya menerima sumbangan yang tidak mengikat. ♦ Sumber dana dari luar dijamin memenuhi syarat "Tiga Aman", yaitu aman *syar'i*, aman yuridis, aman politis, atau legal, formal, halal.

Dalam konteks ini pragmatisme finansial adalah persoalan pokok. Lompatan gagasan yang lain mungkin tidak terlalu menjadi masalah sejauh pragmatisme finansial tidak terjadi. Seorang kader mengatakan, "**Saya lihat bagus, berubah seperti sekarang. Minus uangnya harus benar, itu aja**. Perlompatan misalnya PKS jadi gerakan Islam subtantif apa semua saya setuju saja secara pribadi". Dalam penuturannya kader tersebut menyisakan sebuah gugatan yang menggambarkan kegundahan yang mendalam, "**Apa iya kita selalu loncat dari suatu pendulum yang satu ke pendulum yang lain?**"

5.5.3.5. Penyebab Perubahan Perilaku

Para kader PKS yang kemudian mengalami perubahan perilaku dan menjadi pragmatis tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu mereka yang menurut istilah seorang kader senior "dari awal punya bakat" dan mereka yang tergoda dalam proses perjalanan. Hal ini menarik jika dikaitkan dengan penuturan seorang kader lain tentang awal munculnya "arus pragmatisme" tersebut. Menurutnya, gejala ini bermula sekitar tahun 2002, pada saat AM mulai dekat dengan FH, mantan aktifis mahasiswa dan Ketua KAMMI. Kedekatan itu terbangun ketika FH yang sedang bermasalah dengan struktur partai akibat beberapa manuvernya yang oleh pihak-pihak tertentu dinilai berlebihan, membutuhkan tempat untuk *sharing*. Berjumpalah FH dengan AM. Kemudian mereka menemukan banyak kecocokan pemikiran. Kecenderungan tersebut semakin kuat pasca Pemilu 2004. Ia menuturkan, "**Setelah AM jadi angota DPR, mulai nyari duit mereka. Kemudian mereka mengembangkan teori bahwa politik itu butuh uang**". Senada dengan itu, seorang pengurus DPP mengidentifikasi adanya dua penyebab perubahan perilaku yang dikutipnya dari pendapat Ustadz Hilmi Aminuddin, yaitu *al 'afat as sabiqah* (polutan hulu) dan *al 'afat al lahiqah* (polutan hilir). Dalam beberapa kasus persoalan-persoalan tersebut timbul karena afiliasi seorang kader sebelum dia terbina dalam sistem *tarbiyah* sedemikian kuatnya sehingga tampak lebih mewarnai pribadinya ketimbang *fikrah* yang diperolehnya dari Jemaah Tarbiyah. Sementara pada sebagian kasus yang lain, pengaruh yang kuat itu berasal dari interaksi kader yang bersangkutan dengan komunitas-komunitas lain setelah dirinya bergabung dengan Jemaah Tarbiyah. Dengan kata lain, perubahan-

perubahan perilaku kader ke arah yang lebih pragmatis tadi disebabkan oleh tabiat orang yang bersangkutan dan pengaruh lingkungan. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang sebelumnya diperoleh para kader dari proses *tarbiyah* kemudian diuji pada saat mereka berinteraksi dengan dunia nyata setelah Jemaah Tarbiyah berpolitik. Di sinilah terlihat bahwa cara setiap individu untuk merespon lingkungan berbeda-beda, tergantung pada cara pandang masing-masing. Mereka yang memandang bahwa apa ada di lingkungan tersebut adalah hal yang wajar, apalagi melhatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, tentu saja akan mengalami perubahan gaya hidup dan pergaulan. Contohnya, perubahan selera yang terjadi akibat kerapnya kader yang bersangkutan terlibat lobi-lobi politik tingkat tinggi di restoran dan hotel mewah.[49] Perilaku-perilaku sekelompok kader yang oleh sebagian kalangan dinilai "nyeleneh" tersebut mungkin juga bersumber dari kelemahan pribadi sebagai manusia, dan merupakan respon terhadap kondisi perpolitikan Indonesia yang cenderung mengabaikan etika dan kepantasan, di samping kondisi berbagai institusi, termasuk birokrasi dan lembaga-lembaga penegak hukum, yang sangat memprihatinkan. Bisa juga hal tersebut terjadi karena adanya peluang yang begitu terbuka.

Namun diyakini bahwa masih banyak kader yang tetap tampil sederhana, walaupun telah menempati jabatan-jabatan publik yang cukup tinggi. Seorang kader senior PKS tetap kerap menggunakan kendaraan umum dan tampil apa adanya, walaupun saat ini ditempatkan sebagai Staf Khusus di suatu Kementerian dan mendapatkan fasilitas mobil dinas dan sopir serta terikat oleh aturan protokoler. Ia melakukan hal itu untuk tetap dapat merasakan realita yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Di samping itu, ada pula seorang Menteri dari PKS yang tetap tidak berubah dan tampil sederhana. Seorang kader senior PKS yang saat ini juga menjadi Menteri berpendapat senada dengan mengatakan, "Saya sendiri *antum* bisa bandingkan, saya kurang suka dengan begitu, glamor, apa". Walaupun telah menjadi pejabat publik, ia tetap mencukupi nafkah keluarganya dari bisnis yang dikerjakannya sejak dulu. Ia juga memiliki

[49] Seorang mantan anggota Majelis Syura memberikan kesaksian bahwa beberapa kader PKS yang sekarang disebut-sebut sebagai *icon* kelompok pragmatis sejak sebelum berpartai sudah punya kebiasaan "kongkow" sampai jauh malam di beberapa hotel mewah di Jakarta.

keinginan-keinginan yang manusiawi, seperti merenovasi rumahnya, namun hal tersebut tidak akan dilakukannya pada saat ia masih menjadi pejabat publik karena khawatir akan memicu timbulnya persepsi negatif publik.

Terkait dengan berbagai perubahan perilaku kader yang telah diuraikan di atas, seorang anggota Majelis Syura menyesalkan generalisasi yang kerap dilakukan oleh media, para pengamat, kaum profesional, akademisi, dan bahkan sebagian kader PKS sendiri. Ia menyoroti publik yang sering tidak adil dalam menilai sesuatu, di mana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh sudah cukup untuk membuat tokoh yang bersangkutan dianggap buruk secara keseluruhan. Ia memberi contoh tentang kehebohan di media massa saat Idul Fitri 1431 H yang lalu terkait dengan dana pengadaan Kartu Lebaran Gubenur Jabar, AH, yang merupakan kader PKS. Ia menuturkan, “Ini kayak umpamanya AH tentang kartu lebaran, wuiih geger langsung ... Tapi kalau kita lihat keadaan itu sebenarnya, kartu lebaran it dulu juga begitu, malah besar, sekarang dikecilin”. Ia melanjutkan penuturannya, “Di dalam PKS ini kan bukan semuanya FH gitu kan. ... kalau FH bisa seperti itu saya juga bisa berbicara yang tidak seperti itu”. Menurutnya, orang-orang yang memiliki pikiran kritis dan ingin memperbaiki keadaan mestinya tetap berada di dalam untuk mengimbangi kelompok yang cenderung pragmatis. Ada tiga kata kunci yang harus diperhatikan oleh para kader untuk membuat PKS menjadi lebih baik, yaitu soliditas, loyalitas, dan kontribusi.

Di titik ini persoalan perubahan perilaku ini menjadi menarik karena PKS dikenal sebagai Partai Kader dengan sistem *tarbiyah* berjenjang yang sangat ketat. Bahkan diyakini bahwa sistem *tarbiyah* tersebut akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pribadi para kader. Namun mengapa tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara para kader, yang sampai batas tertentu bisa memicu timbulnya konflik? Apakah tidak ada mekanisme koreksi, menegur, dan memperbaiki? Sebenarnya sistem, tata aturan, moralitas dan hal-hal lain yang bersifat formal sangat lengkap, namun terdapat kelemahan pada apa yang oleh seorang kader senior disebut sebagai **”internalisasi nilai”** dan **”ideologisasi nilai”**. Dengan kata lain, *tarbiyah* pada masa lalu yang ditekankan pada upaya membuat para kader menjadi ”orang baik” terbukti tidak memadai

ketika berhadapan dengan tantangan yang ada. Dengan lugas kader tersebut mengatakan:

> "Lapangan ternyata jauh lebih ganas. Perasaan kita sudah sholeh ini, kuat segala macem, ternyata karena di sini itu lebih ganas, lebih hebat, nggak cukup. **Ideologisasinya kita kurang ternyata** ... **Harus terjadi evaluasi kembali sistem dan model pendidikan kita, disesuaikan dengan tantangan yang nyata, yang riilnya itu**".

Ada sesuatu yang selama ini dilalaikan, yaitu pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai tantangan yang akan dihadapi setelah terjun menjadi partai, sehingga dalam proses pembinaan yang diikutinya para kader tidak mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata dari medan tempurnya. Oleh karena itu, realita tantangan dunia politik itu harus dibuka kepada para kader sejak jauh-jauh hari, sebab di sanalah ujian yang sesungguhnya dihadapi, bukan di *halaqah-halaqah.* Sebagai konsekuensi dari lemahnya proses internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai tersebut berbagai pola pikir dan gagasan yang cenderung pragmatis, yang awalnya hanya diusung oleh segelintir orang, akhirnya menjadi keputusan formal partai yang mendapatkan legitimasi dari proses *syura* yang berlangsung, baik di Majelis Syura, maupun di berbagai forum lain. Jika dikaji lebih dalam, kelemahan yang ada sesungguhnya lebih bersifat paradigmatis. Salah satunya Jemaah Tarbiyah belum memiliki rumusan yang jelas dan baku tentang hal-hal yang terkait dengan sumberdaya finansial. Dampaknya, masing-masing kader, khususnya mereka yang sedang *on position*, menentukan sendiri batasan-batasan yang mereka anggap tepat dan pantas. Persoalan paradigma ini sesungguhnya terkait peringatan dalam Al Qur-an tentang harta, sumberdaya finansial, sebagai kekuatan yang diberikan Allah SWT yang sebelumnya cenderung terabaikan di jemaah ini. Ada pula persepsi yang tidak pas dalam memahami institusi zakat, yang selama ini cenderung lebih ditekankan pada peran *'amil* dan *mustahiq*. Padahal, zakat mestinya dilihat sebagai simbol gerakan pemberdayaan ekonomi, di mana targetnya adalah mencetak para *muzakki*. Sikap tidak *tawazun* inilah yang merupakan pangkal persoalan. Fenomena pragmatisme yang merebak saat ini menunjukkan pergerakan bandul pemikiran dari titik ekstrem sebelumnya, tidak menaruh perhatian sama sekali pada uang, ke titik ekstrem yang lain, yaitu habis-habisan mengakumulasikan uang karena memandangnya sebagai sumberdaya

yang utama. Seorang kader menyimpulkan, ”**kesalahan kita dulu tidak memperhatikan uang, kemudian terlalu berlebihan melihat uang**. Artinya tidak ketahuan lagi apakah halal ataukah ilegal”. Beberapa kader PKS yang bermain di ranah politik menunjukkan perilaku politik yang terkesan serampangan karena memang mereka tidak diajarkan bagaimana bermain dengan ”benar”, sehingga ketika ada peluang untuk bermain, mereka bermain dengan ”cara orang lain”. Kader lain menegaskan, ”**Orang nggak pernah diberi kesempatan, nggak pernah main, akhirnya melebihi orang-orang yang dulu pernah main.** Ini kan anu ya, sok ya, biasa kan, orang dari *ndeso* lebih kota daripada orang kotanya”. Dengan kata lain, sebagian kader Jemaah Tarbiyah, belum siap mental untuk menempati posisi-posisi strategis di ranah publik. Kader tersebut membandingkannya dengan kondisi para kader partai lain yang secara umum benar-benar siap ketika memegang suatu posisi di jabatan publik.

Tabel 5.10
Ikhtisar Penyebab Perubahan Perilaku

No	Penyebab	Bentuk/Contoh
1	Kecenderungan pribadi	♦ Kelemahan pribadi sebagai manusia yang menyukai gaya hidup mewah. ♦ Memperoleh dana dari pihak lain dengan mengatas-namakan Partai.
2	Terpengaruh oleh kondisi eksternal, atau komunitas lain	♦ Menyesuaikan penampilan dengan lingkungan pergaulan politikyang baru. ♦ Perubahan selera karena keterlibatan yang intens dengan berbagai komunitas yang terbiasa hidup mewah. ♦ Perilaku politik tertentu sebagai respon terhadap kondisi perpolitikan dan birokrasi Indonesia yang tidak beretika.
3	*Tarbiyah* belum optimal sebagai proses internalisasi dan ideologisasi	♦ Belum memberikan gambaran yang lengkap tentang tantangan yang akan dihadapi oleh para kader ketika terjun ke dunia nyata, khususnya arena politik. ♦ Belum membekali para kader dengan cara berpolitik yang benar, sehingga sebagian kader bermain dengan caranya sendiri, atau mengambil inspirasi dari komunitas lain. ♦ Belum memberikan perhatian yang proporsional tentang sumber daya finansial, sehingga sebagian kader bergerak dari titik ekstrim mengabaikan uang ke titik estrim yang lain, yaitu berlebihan dalam memandang uang.

5.5.4. Wacana PKS sebagai ”Partai Terbuka”

Pasca Musyawarah Nasional (Munas) PKS 16-20 Juni 2010, isu PKS sebagai ”Partai Terbuka” (kembali) mengemuka dan menghangat.[50] Publik menangkap menguatnya dinamika internal PKS terkait hal tersebut. Di satu sisi, Sekjen PKSmengemukakan gagasan tersebut dengan penuh semangat dalam berbagai kesempatan. Sementara di sisi lain, tidak sedikit tokoh PKS yang menunjukkan penolakan terhadap wacana tersebut. Seorang kader senior menyayangkan manuver-manuver tersebut, karena kader PKS seyogianya tidak melontarkan wacana atau argumentasi yang tidak sejalan keputusan-keputusan partai yang ”terdokumentasikan” dalam memori kolektif publik. Terkait dengan ini, perubahan apapun mestinya diputuskan dalam forum yang berwenang dan kemudian disosialisasikan kepada publik secara layak. Jika tidak demikian, publik akan dibuat bingung dengan kesimpang-siuran informasi yang terjadi. Kader tersebut mencontohkan pernyataan dua tokoh PKS yang menjadi narasumber dalam acara di salah satu TV swasta sesaat sesudah Munas PKS.[51] Tokoh yang pertama menegaskan bahwa PKS menjadi Partai Terbuka adalah sebuah perubahan besar yang dilakukan secara sadar. Tokoh yang bersangkutan juga menepis kekhawatiran munculnya penolakan dari pada kader PKS atas wacana Partai Terbuka dengan menggambarkan bahwa pada kader PKS itu ibarat ”gerbong kereta api yang akan ikut kemanapun ”lokomotif bergerak membawa mereka”. Namun tokoh yang lain mengatakan bahwa tidak ada yang berubah di PKS. Kader tersebut menyimpulkan, ”Paling menarik karena akhirnya publik melihat nggak usah jauh-jauh. **Sebuah segmen satu jam itu kelihatan, dinamika tajam itu. Yang satu bilang iya, yang satu bilang enggak**. Dengan berbagai

[50] Sepengetahuan peneliti, wacana “Partai Terbuka” sudah bergulir setidaknya sejak tahun 2008 yang lalu. Seorang mantan pendiri PK memandang bahwa tarik-ulur wacana tersebut menggambarkan konflik antara “golongan tua” (HNW, TS) dengan “golongan muda” yang sekarang menguasai Partai (AM cs). Menjelang Mukernas PKS 2008 di Bali beredar *bayan* yang ditandatangani oleh tiga orang petinggi partai, yaitu Tifatul Sembiring (ketika itu Presiden Partai), Suharna Surapranata (ketika itu Ketua MPP), dan Surachman Hidayat (Ketua DSP). *Bayan* tersebut menegaskan bahwa istilah “Partai Terbuka” tidak pernah menjadi keputusan partai, baik melalui Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, maupun arahan pimpinan Partai. Dengan demikian, PKS tetap merupakan Partai Dakwah berasas Islam. Di samping itu diimbau pula agar seluruh jajaran struktur, pengurus, dan kader tidak lagi mewacanakan “Partai Terbuka” tersebut, agar tidak membawa *mudharat* yang lebih besar daripada *maslahat*-nya (Detikcom, Jumat 18 Maret 2011 pukul 14:42).

[51] *Talkshow* “Mata Najwa”, Metrotv 23 Juni 2010.

alasan gitu". Ditengarai bahwa gagasan "Partai Terbuka" dilontarkan dengan alasan yang cenderung pragmatis, yaitu keyakinan bahwa dengan bergerak ke tengah maka PKS akan mampu menyasar segmen pemilih yang lebih luas. Terkait dengan itu, "Partai Terbuka" diharapkan dapat mengatasi persoalan teknis yang menghambat bergabungnya anggota masyarakat non-Islam ke dalam partai ini.

Seorang kader senior yang tidak menyetujui gagasan PKS sebagai "Partai Terbuka" menuturkan:

> "PKS adalah Partai Islam. Tetapi Partai Islam dengan adonan *rahmatan lil 'alamin* yang moderat gitu. Kita kinerja basisnya. Berbuat untuk semua, kita tidak membeda-bedakan ... Kita siap bekerja sama dengan semua. Tapi kita Partai Islam gitu ... **Karena ketika kita Partai Terbuka itu ... mendistorsi Partai Islam kita. Dianggapnya kita kayak PKB, atau ini kayak PAN yang nggak jelas kelaminnya. Oo repot itu**".

Namun di sisi lain, kader tersebut juga memoderasi dampak wacana Partai Terbuka terhadap dukungan publik untuk PKS dengan mengatakan, "**Kalau ide-ide Partai Terbuka terus-menerus, kita akan kehilangan *market* di perkotaan yang berbasis Islam. Tapi jumlahnya memang sangat kecil, kecil sekali, nggak sampe 10%**". Sebagian dari mereka yang mengusung gagasan "Partai Terbuka" bukan anggota Majelis Syura, lembaga tertinggi dalam partai yang berwenang memutuskan hal-hal strategis di PKS. Dengan kata lain, gagasan "Partai Terbuka" sekedar merupakan wacana individu-individu tertentu, bukan kebijakan lembaga.

Sementara itu, seorang deklarator PK menggugat gagasan "Partai Terbuka" dengan lugas dan latang:

> "Pertama, kata saya nggak ada itu Partai Terbuka. Apa itu Partai Terbuka?! Rumusannya apa?! **Saya yakin kata saya, yang ngomong itu juga nggak paham apa yang dimaksudkan. Dan sampai sekarang kan nggak ada penjelasan, yang dimaksud Partai Terbuka itu apa**. Dan kalau pengertian terbuka secara Undang-Undang, semua partai harus terbuka. Nggak boleh ini khusus partai ini didirikan untuk orang Islam. Melanggar Undang-Undang. Jadi apa hebatnya..."

Dalam menanggapi berbagai pernyataan dari beberapa tokoh PKS tentang PKS sebagai "Partai Terbuka", ia dengan tegas mengatakan:

> "**Satu, kebohongan publik. Yang kedua, itu bagian dari cara mereka berkomunikasi politik** … Kalau saya sebagai seorang yang *background*-nya da'i ya kita harus *clear* kapada masyarakat itu. Jangan mengelabui. Dosa. Nggak bisa. Walaupun saya politisi atau apa".

Dengan demikian, walaupun *Murraqib 'Am* juga mengemukakan gagasan "Partai Terbuka" itu di beberapa kesempatan, hal tersebut tidak dapat serta-merta dianggap mewakili sikap institusi PKS.

Selanjutnya, kader tersebut mengelaborasi argumentasinya atas penolakan itu dengan konsep **"kontinum ideologi"**. Gagasan "Partai Terbuka" atau "Partai Tengah" yang diwacanakan PKS mengandung paradoks, karena gagasan itu justru mempersempit kontinum ideologi, sehingga mengancam eksistensi pluralitas yang ingin diusung oleh partai ini.[52] Persoalan ini adalah sesuatu yang sangat serius, sampai-sampai ia menyebutkan sebagai **"kejahatan ideologi"**, karena berpeluang membiakkan pragmatisme dan deideologisasi. Dengan kata lain, hal tersebut akan membuat partai-partai politik sejatinya hanya "kerumunan orang", karena tidak lagi mengedepankan ideologi sebagai landasan perjuangan mereka. Namun sejauh ini tidak ada tanggapan serius dari struktur partai terhadap pendapat tersebut.

Bantahan tentang keabsahan gagasan "Partai Terbuka" juga dikemukakan oleh seorang mantan eksekutif puncak PKS yang mengatakan, "Tidak ada keputusan Majelis Syura ... Istilah terbuka sendiri tidak ada. Tidak pernah ada kesepakatan di Majelis Syura, PKS itu Partai Terbuka. Tidak!" AM, sebagai pengusung utama, ketika diminta klarifikasinya tentang Partai Terbuka menjawab bahwa komunikasi politik PKS selama ini memang terbuka. Ia menyesalkan bahwa AM dan kelompoknya yang pro "Partai Terbuka" bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dengan gagasan itu dan berpegang pada makna denotatifnya. Padahal, terminologi "Partai Terbuka" di publik punya makna konotatif yang serius. Publik misalnya, bisa mempersepsikan jika PKS menjadi "Partai Terbuka" ia tak ada bedanya dengan PAN yang bukan Partai Islam dan menerima anggota

[52] Gagasan tentang kontinum ideologi partai politik sebelumnya pernah dikemukakan oleh Baswedan (2004). Tujuh partai yang meraih suara signifikan dalam Pemilu 1999 ditempatkannya dalam suatu kontinum mulai dari PDIP yang *secular exclusive*, lalu Partai Golkar yang *secular inclusive*, diikuti oleh PAN dan PKB yang *Islam inclusive*, dan akhirnya PKS, PPP dan PBB yang disebut *Islamist.* Dalam kontinum tersebut Baswedan menempatkan PBB sebagai partai yang paling *Islamist*.

dari kelompok masyarakat manapun juga. Mantan petinggi PKS tersebut menegaskan:

> "Ya monggo-monggo saja, silahkan saja. **Tapi itu harus kesepakatan dari Majelis Syura**. Bukan seorang punya ide dan mempunyai posisi jabatan dia tidak mengacu pada istilahnya apa ya, *mafahim jamaah* atau *mafahim* dari partai itu sendiri ... **Anda boleh berkembang-kembang tapi harus mengambil kebijakan prinsip partai**".

Ditengarai bahwa para penggiat gagasan "Partai Terbuka" tertipu dengan *mirror image*, seolah-olah gagasan tersebut diterima secara positif oleh publik, hanya karena adanya satu-dua pujian yang diperoleh. Padahal *current image* yang sesungguhnya terbalik, publik tidak menyukainya, namun tidak menyatakannya. Mereka menjadi *silent majority* yang diam, namun kemudian melakukan langkah-langkah yang berlawanan. Ia menegaskan, "Ketika kita mendalami hal ini dan ternnyata *current image* tidak bagus, ya sudah, mengapa kita lakukan?"

Ada sebuah pandangan yang menarik tentang wacana PKS sebagai "Partai Terbuka". Seorang kader menyebutnya "**sebuah strategi yang diambil meskipun tidak ada jaminan selamat**". Sebagai strategi persoalannya bukan salah atau benar. Strategi tersebut dapat diumpamakan seperti "berjalan di atas bambu kecil". Jika cepat dan pas, PKS akan meraih banyak keuntungan berupa lonjakan jumlah suara. Namun jika salah perhitungan, PKS akan jatuh. Satu hal yang seharusnya menjadi *concern* adalah sejauh mana pada kader dapat menerima dan memahami wacana tersebut, apalagi dalam situasi budaya komunikasi intenal PKS yang "sangat hening". Dalam situasi ini ada dua jenis kader yang akan menerima, yaitu "mereka yang ilmunya luas", dan "mereka yang taat tanpa berpikir". Memang para pimpinan PKS yakin bahwa kader-kader bisa menerima gagasan ini, karena para kader tersebut masih terbina dalam *liqa.* Di samping itu, ada keyakinan bahwa label baru sebagai "Partai Terbuka" akan membuat *image* politik PKS membaik, karena publik tidak lagi melihatnya sebagai kelompok yang eksklusif. Namun ia menegaskan, "**Kayak gini-gini yang nggak bisa klaim kan. Kita lihat saja nanti di 2014"**.

Dari sisi pandang lain, gagasan “Partai Terbuka” tidak menghapuskan jatidiri PKS sebagai Partai Dakwah. Dengan gagasan “Partai Terbuka” akan dibuat semacam “kotak baru” bagi mereka yang beragama selain Islam yang ingin bergabung dengan PKS. Sederhananya mereka akan menjadi anggota, tapi bukan kader, karena untuk menjadi kader PKS tetap terdapat *muwashafat* yang tidak bisa dikesampingkan. Seorang kader mengatakan, “**Seterbukanya Partai Kader, tetap aja Partai Kader**”. Dengan demikian jalan keluar yang diambil untuk mewadahi warga non-muslim yang ingin menjadi anggota PKS adalah dengan menambahkan dua jenjang keanggotaan di bawah enam jenjang yang selama ini sudah ada, yaitu Anggota Terdaftar dan Anggota Aktif. Walaupun formulasi dalam AD/ART yang terkait dengan penambahan jenjang tersebut masih dirumuskan, namun sudah tergambar bahwa formulasi janji setia pada partai untuk kedua jenjang tersebut tidak berisi *syahadat*, melainkan penyataan kesetiaan pada tujuan-tujuan partai yang bersifat lebih umum. Dengan demikian, pernyataan yang beredar di publik bahwa sekarang untuk menjadi anggota PKS tidak perlu bersyahadat lagi memang benar untuk dua jenjang keanggotaan yang terbawah, yaitu Anggota Terdaftar dan Anggota Aktif. Namun untuk dapat naik ke jenjang-jenjang selanjutnya, Anggota Pemula dan seterusnya, siapapun harus mengucapkan *syahadat*, sebagai bagian dari janji setia kepada partai.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) menegaskan, makna PKS sebagai Partai Terbuka itu harus dilihat dalam konteks AD/ART partai yang selama ini berlaku. Gagasan “Partai Terbuka” yang dilontarkan oleh beberapa elit PKS di sekitar Munas 2010 yang lalu menjadi cukup menghebohkan karena publik, terutama media, cenderung melihat hal tersebut sebagai antitesis dari ketertutupan yang sebelumnya dianggap merupakan ciri PKS. Padahal PKS tetap merupakan Partai Kader dengan segala ketentuan sebagaimana yang diatur oleh AD/ART. PKS memiliki ketentuan yang rinci tentang syarat-syarat pejabat struktural partai yang semuanya mengacu pada esensi PKS sebagai Partai Kader. Dalam hal ini, struktur di daerah bermacam-macam statusnya – struktur mandiri, struktur penanganan, struktur pembinaan, dan lain-lain – sesuai dengan ketersediaan SDM kader di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, selama terdapat kader-kader partai yang memenuhi syarat untuk mengisi sebuah jabatan

struktural tertentu, jabatan tersebut tidak dapat diisi oleh mereka yang tidak memenuhi syarat. Walaupun memang terdapat pengecualian untuk kondisi-kondisi khusus. Namun, keterbukaan itu tepat jika dimaknai PKS bisa menampung berbagai macam potensi untuk berbagai level jabatan publik. Sementara itu, seorang anggota Majelis Syura menilai bahwa gagasan tersebut menjadi ramai bukan karena substansinya, melainkan karena beberapa elit partai mengkomunikasikannya di publik dengan cara yang tidak tepat, sehingga menimbulkan gejolak. Ia mengatakan, "Dari dulu kok Partai Terbuka ... **Cuma kenapa pake diomong-omongin? Ya komunikasikan aja, dibuktiin aja dalam keseharian kita**".

Sementara itu, pandangan lain melihat kegaduhan yang terkait dengan isu PKS sebagai "Partai Terbuka" hanyalah dampak dari ketidakpahaman para pengamat dan media yang kemudian menimbulkan kegamangan di internal PKS. Hal itu ditengarai didorong oleh beberapa politisi partai lain yang khawatir suara mereka akan beralih ke PKS. Terkait dengan hal tersebut, seorang tokoh muda PKS mencontohkan perdebatan yang terjadi pasca Pemilu 2004 antara Amien Rais yang ketika itu Ketua Umum PAN dengan Hidayat Nur Wahid yang saat itu Presiden PKS. Hasil Pemilu 2004 menunjukkan jumlah suara PKS menungguli PAN, walaupun jumlah kursi PAN di DPR lebih banyak. Dalam forum itu Amien Rais marah dan menuding PKS tidak mau berkoordinasi karena masih mengambil juga "suara tengah" yang seharusnya untuk PAN. Dengan kata lain, PKS semestinya fokus menggarap kelompok "Islam radikal". Tokoh muda tersebut mengungkapkan keheranannya dengan mengatakan, "Coba ente bayangkan itu, persepsi professor aja kayak begitu. Mana ada itu pemilih ini bisa dibatasai? Orang masuk ke TPS dibatasi. Karena saya lahir di keluarga NU, maka saya harus PKB. *Wrong!* ***Politics is nothing to do about*** **aliran**". Kemudian ia menegaskan:

> "Kita tampil di Bali, Hotel Ritz Carlton, mengumumkan terbuka dan sebagainya itu ya daripada ***communication strategy*** **aja**. ***But basicly what's different?*** Nggak ada. Karena semua partai politik tunduk pada UU. Kita tidak boleh membuat partai di luar ketentuan UU. Ditutup kita. Nggak ada yang berubah!"

Ketua DSP PKS juga berpendapat bahwa ramainya wacana PKS sebagai "Partai Terbuka" terjadi karena adanya *asymetric information.* Ia memahami terbuka yang dimaksud dalam konteks ini tetap dalah kerangka PKS sebagai Partai Dakwah, karena dakwah itu sendiri bersifat terbuka. Ia tegas menolak jika keterbukaan PKS disamakan dengan partai-partai lain yang mengklaim sebagai Partai Terbuka dengan mengatakan, "Kenapa kita harus samakan dengn PAN? Ya PAN tidak pernah mendeklarasikan Partai Dakwah". Dalam konteks ini ia menegaskan bahwa hal-hal yang bersifat teknis berkembang secara dinamis, namun hal-hal yang mendasar, bahwa PKS adalah Partai Islam, PKS adalah Partai Dakwah, PKS bukan sekedar partai politik tapi juga jemaah, serta PKS dilandasi oleh *syura* dan ketaatan, tidak akan pernah berubah.

Adapula kader yang mencoba menganalisis wacana "Partai Terbuka" secara lebih substantif, tanpa terlalu terpaku pada pedebatan verbal yang terkait dengan itu. Dalam hal ini, sinyal-sinyal keterbukaan yang disampaikan oleh PKS ke luar cukup mengejutkan publik eksternal. Namun konsekuensinya PKS harus memastikan bahwa ada cukup banyak kader yang terbukti benar-benar mampu menjalin komunikasi, membangun kesepahaman dan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki beragam latar belakang. Perumpamaannya, jika kita membuat *customer service counter* untuk melayani ragam pelanggan yang tak dibatasi, harus dipastikan bahwa *customer service officers* yang berada di belakang *counter* tersebut bisa memahami dan merespon beragam bahasa yang digunakan oleh pelanggan yang datang. Sayangnya saat ini masih sedikit kader PKS yang mampu melakukan hal tersebut.

Tabel 5.11
Ihtisar Pandangan tentang Wacana PKS sebagai Partai Terbuka

No	Pandangan
A	**Pandangan yang Mendukung (Pro)**
1	PKS memang melakukan komunikasi politik yang terbuka dengan semua pihak.
2	Dengan label "Partai Terbuka" PKS akan memiliki pasar yang lebih luas.
3	Jangankan masuk partai, masuk agama saja sifatnya terbuka.
4	Hal tersebut ditangkap sebagai sinyal yang positif oleh publik eksternal bahwa PKS sekarang bersedia *deal* dengan siapa saja, terlepas latar belakang ideologinya.

No	Pandangan
B	**Pandangan yang Netral**
1	Merupakan strategi "lompatan tinggi" yang penuh risiko. Ada peluang membuat PKS diterima publik yang lebih luas. Namun juga ada peluang PKS ditinggalkan sebagian kadernya yang kecewa, apalagi dalam kultur PKS yang minim diskusi.
2	Sejak dahulu PKS bersikap terbuka. Namun seterbuka-terbukanya, PKS tetap saja Partai Kader, sehingga tidak ada urgensinya disampaikan secara bombastis di publik sehingga ditangkap publik sebagai anti tesis dari ketertutupan.
3	Makna terbuka tetap dalam kerangka sebagai Partai Dakwah.
C	**Pandangan yang Menolak (Kontra)**
1	Wacana tersebut bukan keputusan Majelis Syura yang kemudian disosialisasikan kepada publik dengan cara yang layak, sehingga membingungkan publik.
2	Wacana "Partai Terbuka" akan mendistrosi identtias PKS sebagai Partai Islam sehingga menjadi seperti beberapa partai lain yang tidak jelas "jenis kelaminnya".
3	Makna "Partai Terbuka" tidak jelas. Jika maknanya terbuka sesuai UU tidak ada yang istimewa, sehingga tidak urgensinya dinyatakan secara eksplisit.
4	Merupakan "kejahatan ideologi", karena akan menyempitkan kontinum ideologi sehingga menyuburkan pragmatisme.

5.5.5. Dakwah Kampus sebagai Cermin Dinamika Internal Partai

Secara historis kampus punya makna yang sangat penting bagi Jemaah Tarbiyah, karena sejak awal pemuda dan mahasiswa merupakan basis dan tulang punggung gerakan ini. Dalam salah satu *taujih*, Ustadz Hilmi Aminuddin mengingatkan para kader:

> "Ingat! **Di awal reformasi, pada tahun 1998, kita menguasai 40% dari organisasi kemahasiswaan di universitas-universitas**. Dan dengan 40% itu barisan mahasiswa kita berhasil – dengan di-*back-up* bersama dengan jama'ah, bersama komponen bangsa lainnya – melahirkan karya besar. Yaitu menghentikan sebuah rezim militer. Dan beralih pada orde reformasi. Itu adalah sebuah karya besar. Saya kira kita patut melihat, **apakah medan wilayah ilmiah itu masih kita kuasai dengna prosentase yang sama? Kalau dengan prosentase yang sama saja berarti kita rugi**".[53]

Kutipan *taujih* tersebut menunjukkan betapa strategisnya posisi kampus dalam gerakan dakwah Jemaah Tarbiyah. Bahkan Ustadz Hilmi menggunakan ukuran keberhasilan dakwah kampus yang sangat gamblang dan kuantitatif, yaitu sejauh mana para kader Jemaah Tarbiyah yang berkiprah di kampus mampu menguasai kepemimpinan di lembaga-lembaga kemahasiswaan.

[53] Dikutip dari Taujih Awal Tahun Baru Islam 1428 H, Hotel Santika, Ahad 28 Januari 2007.

Seorang mantan aktifis kampus melihat bahwa kecenderungan-kecenderungan yang ada di PKS juga terlihat dalam kiprah para mahasiswa aktifis Jemaah Tarbiyah di kampus-kampus, khususnya di kampus besar seperti Universitas Indonesia, walaupun tentu saja dinamika di partai jauh lebih kompleks daripada dinamika di kampus, karena variabel-variabel yang terlibat juga jauh lebih banyak. Terdapat dua kecenderungan yang diidentifikasinya mirip antara partai dengan Dakwah Kampus[54]. Pertama, **lemahnya sistem, sehingga elit sangat dominan memberikan warna**. Kedua, **kriteria keberhasilan dakwah yang semakin pragmatis, yaitu merebut kekuasan**. Ketika aktifitas Dakwah Kampus dan para aktifisnya mendapatkan penilaian negatif di publiknya, seperti *disorganized, mismanagement,* ekslusif, dan sebagainya maka pihak-pihak yang punya kepentingan politik akan berupaya mengaitkan Dakwah Kampus dengan PKS. Sebaliknya, ketika Dakwah Kampus memiliki citra yang bagus, misalnya plural, mengakar, dan partisipatif maka stigma keterkaitan dengan partai tersebut secara sengaja dihilangkan. Bahkan kader muda tersebut menuturkan:

[54] Dakwah Kampus, disingkat DK, adalah istilah yang lazim digunakan untuk menyebut kiprah para mahasiswa aktifis Jemaah Tarbiyah di kampus-kampus. Oleh karena itu, para aktifisnya disebut Aktifis Dakwah Kampus, atau ADK. Namun demikian, dalam struktur Jemaah Tarbiyah, Dakwah Kampus bisa dikatakan merupakan suatu satuan yang memiliki otoritas tersendiri, sehingga tidak semua kader Jemaah Tarbiyah yang berada di sebuah kampus tergabung sebagai ADK dari kampus tersebut. Secara formal para ADK mahasiswa di tingkat Universitas diorganisasikan ke dalam Lembaga Dakwah Kampus, LDK, yang berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kerohanian Islam, seperti Nuansa Islam Kampus (Salam) UI, Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB, Jemaah Shalahuddin (JS) UGM, dan sebagainya. Di tingkat fakultas terdapat Lembaga Dakwah Fakultas (LDF), seperti Forum Studi Islam (FSI) di FISIP UI dan FEUI, FUSI FTUI, FUKI Fasilkom UI, Formasi FIB UI, Nurani FKM UI, dan lain-lain. Selain di LDK dan LDF yang dalam kiprah Dakwah Kampus disebut sebagai *dakwah syi'ar*, para ADK juga berkiprah di bidang-bidang lain, seperti keilmuan *('ilmi)*, politik kampus *(siyasi)*, dan kaderisasi *(nukhbawi)*. Kiprah para ADK di seluruh bidang tersebut dikoordinasikan, atau mungkin lebih tepat dikendalikan, oleh institusi Majelis Syura kampus yang dipimpin oleh seorang Ketua Majelis Syura. Secara *de facto*, Ketua Majelis Syura memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengendalikan kiprah para ADK di kampus. Dalam bidang *siyasi*, para ADK terjun mengikuti pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, baik tingkat Fakultas maupun Universitas. Dalam hal ini, calon yang diusung secara resmi oleh ADK sering disebut "calon internal". Di sejumlah kampus, calon internal yang diusung ADK kerap memenangkan pemilihan Ketua BEM secara berturut-turut dalam kurun waktu yang cukup panjang. Di UI misalnya, dalam kurun waktu beberapa belas tahun terakhir, calon yang diusung ADK hanya kalah dalam Pemilihan Raya (Pemira) Ketua BEM UI tahun 2010 yang lalu. Ketika itu calon yang diusung oleh ADK, yaitu FS-TG (Kriminilogi-Matematika UI) dikalahkan oleh IA-CR (Hubungan Internasional-Hukum UI) dengan selisih sekitar 2000 suara. Namun dalam Pemira 2011, pasangan Ketua-Wakil Ketua BEM UI dari "internal" kembali menjadi pemenang, walupun sempat terjadi kekisruhan yang melibatkan DPM dan Mahkamah Mahasiswa, sehingga harus ditengahi oleh pihak Direktorat Kemahasiswaan UI.

> "**Makanya jebloknya PKS sangat mungkin diakibatkan oleh ADK yang tidak terorganisir dengan baik. Naiknya dia juga sangat mungkin ada dampak dari pengelolaan Dakwah Kampus yang baik**. Tapi tidak secara eksplisit. Bisa aja tiba-tiba nyoblos gitu. Tapi untuk mengungkapkan itu, tidak semua orang bisa".

Namun demikian tidak ada hubungan langsung, atau imbas langsung, dari dinamika yang terjadi di partai ke kampus, karena "jarak" antara partai dengan kampus terlalu jauh. Di samping itu tidak banyak tokoh-tokoh partai di tingkat pusat yang punya hubungan langsung dengan kampus. Sebagai orang yang berkiprah di *Thullaby* (Departemen Kepemudaan) DPP, kader tersebut menegaskan bahwa tidak ada campur tangan yang spesifik dari partai di kampus. Ia mengatakan, "Kita nggak ngapa-ngapain. Mahasiswa itu dikasih ruang besar sekali. Jadi kekacauan yang ada di mereka, apa segala macem, itu murni mereka". Ada tiga penilaian negatif yang sering dinisbatkan oleh publik kampus kepada kiprah para ADK, yaitu *disorganized,* kurangnya kedekatan dengan publik, dan kurangnya kompetensi.

Karena tidak ada kontrol yang kuat dari struktur Jemaah Tarbiyah terhadap elit Dakwah Kampus, elit tersebut, yang sering direpresentasikan oleh Ketua Majelis Syura kampus yang bersangkutan, sering terjebak dalam *megalomania*, perasaan besar dan berkuasa, karena hanya dirinya yang memiliki akses langsung ke struktur jemaah, sehingga apapun klaim yang dikeluarkannya tidak akan bisa diverifikasi oleh jajaran di bawahnya. Yang menarik, kecenderungan *megalomania* tersebut sangat kental di UI, jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Celah yang ada tersebut, sadar ataupun tidak, sering dimanfaatkan oleh elit tertentu di Dakwah Kampus untuk memberikan pembenaran atas kekurangan, keinginan, kecenderungan, atau karakter pribadinya. Misalnya, kelemahan dalam pengorganisasian intenal yang berdampak antara lain pada pembatalan narasumber tamu yang dinilai punya pemikiran yang tidak sejalan dengan kebijakan Dakwah Kampus. Atau, sikap-sikap yang otoriter, non-partisipatif, tidak mau menerima perbedaan, bahkan memecat ADK yang dinilai "bermasalah". Padahal, wewenang memecat kader tidak dimiliki oleh DK, karena itu adalah kewenangan partai, apalagi jika yang bersangkutan masih terikat dengan kewajiban-kewajibannya sebagai kader, seperti mengikuti *halaqah.*

Tindakan-tindakan yang tidak populer tersebut biasanya akan dikatakan sebagai "instruksi dari atas".[55] Padahal kalaupun instruksi semacam itu ada, hanya menyangkut hal-hal yang bersifat umum, seperti target rekrutmen, dan lain-lain. Dengan kata lain, Jemaah hanya menetapkan "apa yang harus dicapai", namun tidak mengatur seara rinci "bagaimana mencapainya". Informan tersebut menuturkan:

> "Kepicikan pimpinan akan membuat orang-orang di bawah itu terwarisi nilai bahwa ini nilai yang bener ... Kan tingkat ke-*tsiqah*-an kita tinggi ... **Itu yang tau bahwa batas instruksi cuma di target cuma pucuk tertinggi. Selebihnya dia bisa klaim. Ini caranya memang seperti ini. Ini sudah dari zaman dulu**".

Para elit Dakwah Kampus yang punya keterbatasan kemampuan dalam mengelola organisasi dan membangun soliditas cenderung untuk menggunakan metoda mendikotomikan atau mengkontraskan "kita" dan "bukan kita", "budaya kita" dan "budaya lain", *"nur"* (cahaya) dan *"zhulumat"* (kegelapan), *"hizbullah"* (golongan Allah) dan *"hizbusy syaithan"* (golongan setan). Di samping itu, elit yang bersangkutan akan cenderung bersikap defensif terhadap kritik dan pihak-pihak yang kritis, misalnya dengan mengeluarkan pernyataan, "dakwah ini tidak butuh orang yang cerdas, dakwah ini butuh orang yang loyal".[56] Yang menjadi persoalan serius adalah ketidakmampuan membangun loyalitas yang berjenjang. Jika semua aktifis di semua lapisan dibebani loyalitas yang sama, di tingkat tertentu akan ada yang tidak kuat sehingga terlepas. Sebaliknya, akan ada pula yang mengendur karena mendapatkan beban di bawah kapasitasnya.

Sejak dulu dalam berkiprah di kampus para ADK memang punya dorongan untuk mengambil kekuasaan, dengan posisi Ketua BEM sebagai target utamanya. Namun persoalannya sekarang, upaya merebut kekuasaan tersebut terlalu eksplisit, melalui penggunaan otoritas, sehingga menimbulkan friksi yang cukup serius, bahkan dalam beberapa kasus konflik terbuka, dengan segmen-

[55] Maksudnya instruksi dari struktur Jemaah Tarbiyah yang membawahi Dakwah Kampus.

[56] Pernyataan "dakwah ini tidak butuh orang yang cerdas, dakwah ini butuh orang yang loyal" ditengarai merupakan manipulasi dari pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh al-Banna, "Ada dua kelompok orang yang tidak dapat diajak bergabung dengan dakwah ini. Pertama, orang yang ateis. Kedua, orang pintar yang tidak mau diatur". Jika disimak jelas sekali bahwa kedua pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat berbeda satu sama lain.

segmen lain dari publik kampus. Sementara dulu kekuasaan itu diperoleh melalui pengaruh, *influence*, yang dibangun melalui jalinan hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat kampus yang heterogen. Dalam konteks ini, kekalahan pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM UI yang diusung ADK dalam Pemilihan Raya (Pemira) 2010 yang lalu merupakan cerminan dari kurangnya kapasitas ADK untuk memimpin publik yang lebih luas. Kader muda tersebut menegaskan:

> "Ya kalah karena pengelolaannya yang simplifikasi kan. **Dia harus mengelola UI tapi kapasitasnya hanya mengelola jamaah, hanya mengelola internal.** Kan amanah itu diberikan sesuai kemampuan. Kemarin itu kita kalah karena tidak mampu. Kelihatan dari cara pengelolaan internalnya banyak yang dipecat-pecatin".

Sebaliknya, kemenangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM UI yang diusung oleh ADK dalam Pemira 2011 sama sekali belum mencerminkan pulihnya kinerja Dakwah Kampus, karena masih menyisakan nuansa konfrontasi yang cukup kuat. Kader tersebut mengatakan, "Dia masih, apa ya, masih, *binner*-nya masih kuat gitu, oposisi *binner*-nya masih kuat. Belum *legowo* gitu orang-orang itu".

Pengaruh kondisi internal partai yang paling terasa di kampus adalah menurunnya kaderisasi dakwah. Terdapat beberapa persoalan yang sistemik terkait dengan hal ini. Pertama, pelaksanaan *tarbiyah* di kampus tidak banyak berubah, sementara lingkungan mengalami perubahan yang luar biasa, misalnya sumber-sumber informasi yang melimpah dan begitu mudah diakses. Modul-modul *tarbiyah* yang digunakan di era 80an-90an masih dipakai hingga sekarang. Kalaupun ada *murabbi* yang berinisiatif melakukan perubahan, hal tersebut tidak sistemik, sehingga tidak mampu mengejar tuntutan perubahan lingkungan.

Kedua, secara struktural kampus di bawah kontrol *Thullaby* (Kepemudaan) yang dipegang oleh tokoh dari unit Kepanduan Partai yang punya budaya militeristik dengan penekanan pada *sam'an wa tha'atan*. Dampaknya, ADK dibiasakan dengan pola komunikasi yang *top down*, dan dibangun norma bahwa ADK yang baik adalah yang penurut. Norma menjadi perilaku, dan akhirnya menjadi budaya, karena para ADK menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Seorang kader yang banyak berkiprah membina kader-kader dakwah kampus menuturkan:

> "Di *tarbiyah* ini, yang disebut anak baik, anak nurut. Dan orang pun membentuk *behavior* itu kan? Yang mau masuk struktur orang yang nurut aja. Manusia juga berstrategi. Anak-anak juga kalau kita memberi sinyal begitu jadi begitu kan ... **Jadi turun-temurun. Membentuk *culture*** kan jadinya ... Itu buruk. Berarti *culture* masa lalu. Lebih bagus kita membuat *culture* masa depan dari pada *culture* masa lalu. Mana ada cerita *culture* masa lalu lebih kompetitif. Dunia makin berubah begini".

Hal tersebut di atas membuat para ADK sulit menjadi tokoh yang dapat diterima publik kampus. Karena tidak terbiasa menjadi tokoh publik, tidak terbiasa berkomunikasi dengan publik dan memakai logika publik, serta menggunakan logika struktur, mereka dicerca dan ditolak oleh publik kampus.

Khusus untuk kasus UI, yang juga ditegarai menjadi persoalan adalah kuatnya pengaruh cara berpikir ilmu-ilmu eksakta terhadap pola pikir para ADK, karena di fakultas-fakultas eksakta itulah kader-kader Jemaah Tarbiyah lebih banyak dan mengakar. Implikasinya, sadar ataupun tidak, cara berpikir yang eksak, tanpa alternatif, digunakan di wilayah sosial, wilayah politik kampus, yang sejatinya penuh dengan alternatif. Inilah yang kemudian menyulut friksi dengan berbagai elemen lain di kampus. Sementara itu, di ITB dan UGM pola hubungan yang *top down* tersebut tidak sekental UI. Kemungkinan penyebabnya, para mahasiswa ITB punya kecenderungan yang kuat sebagai pemikir dan memiliki tradisi aktifisme yang kuat. Semenara itu, di UGM sikap yang egaliter cukup dominan.

Ketiga, Dakwah Kampus dan para ADK-nya tekooptasi oleh agenda-agenda politik praktis, yang oleh seorang informan disebut "politik praktis boncengan", seperti upaya pemenangan Pemilukada DKI yang lalu. Semestinya Dakwah Kampus dibebaskan dari intervensi politik, sehingga para ADK bisa belajar berpikir sebagai negarawan. Kalaupun berkiprah di kampus mestinya PKS memainkan agenda-agenda politik substantif, semisal melanjutkan reformasi yang belum selesai, atau mendorong pemerintahan yang bersih. Politisasi kampus tersebut turut berkontribusi pada merebaknya friksi dan konflik para ADK dengan publik kampus.

5.6. Diskusi

5.6.1. Pembentukan dan Dinamika Habitus Kader PKS

Tarbiyah sebagai jantung pembinaan kader PKS dapat dipahami sebagai proses pembentukan identitas kolektif yang berlangsung dalam habitus individu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Todd (2005). Terkait dengan habitus, Bourdieu (1989) menegaskan bahwa habitus memproduksi dan diproduksi oleh dunia sosial, *structuring structure* sekaligus *structured structure*. Begitu seseorang terekrut, Jemaah Tarbiyah sebagai dunia sosialnya yang baru melakukan "restrukturisasi" terhadap habitusnya melalui proses *tarbiyah*, sehingga terjadilah perubahan pada habitus sebagai *structured structure* yang berada pada diri orang tersebut. *Tarbiyah* adalah sebuah proses yang berjenjang, relatif ketat, dan intensif. Terdapat enam *marhalah* jenjang keanggotaan dengan kurikulum materi pembinaan tersendiri, di mana pembinaan di setiap jenjang diarahkan untuk membuat para anggota di jenjang tersebut mampu mencapai *muwashafat* kader. Di akhir masa pembinaan di tiap jenjang terdapat proses *taqwim*, di mana para kader dinilai kelayakannya untuk dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi, berdasarkan satu set indikator yang mengukur ketercapaian kriteria yang ditetapkan. Tidak mudah menemukan organisasi lain yang memiliki sistem pembinaan yang dapat disejajarkan dengan Jemaah Tarbiyah/PKS. Dalam hal ini proses *tarbiyah* membuat PKS dengan jelas menampakkan keunggulan partai agama, di mana terdapat kerja-kerja yang intensif dan berdimensi jauh lebih panjang dan luas daripada sekedar berpartisipasi dalam pemilu, berupa internalisasi doktrin agama dan moral secara intensif, dan upaya pembentukan ideologi dan *worldview* yang lebih komprehensif daripada partai sekular (Rosenblum, 2003).

Sebagaimana alur berpikir Todd, habitus kader, sebagai *structured structure* yang telah direstrukturisasi oleh proses *tarbiyah*, dimanifestasikan dalam bentuk praksis, pemaknaan, maupun nilai-nilai baru, yang bisa dilacak dari indikator-indikator kesepuluh *muwashafat* kader untuk masing-masing jenjang keanggotaan. Contoh indikator kriteria yang menyangkut praksis adalah standar-standar pelaksanaan ibadah ritual sehari-hari, hafalan Al Qur-an dan hadits Nabi

Muhammad saw, aktifitas menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, serta kegiatan profesi dan mencari nafkah. Sedangkan contoh indikator yang menyangkut pemaknaan, atau skema untuk mengapresiasi praksis, misalnya kader diharuskan melepaskan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan jin, ramal-meramal, dan perdukunan, riba dan segala bentuk sumber nafkah yang haram dan *syubhat*, serta menghindari keterlibatan dengan organisasi-organisasi yang memusuhi ajaran Islam dan umatnya. Sementara itu, contoh indikator yang menyangkut nilai-nilai, misalnya kejujuran, kelembutan dan kesantunan, kebersihan dan kesucian, persaudaraan, kedisiplinan, komitmen, dan ketaatan.

Namun demikian, sejauh mana *tarbiyah* berlangsung secara efektif untuk merestrukturisasi habitus para kader, sehingga memunculkan suatu kekhasan bersama yang cukup signifikan untuk menghimpun para kader ke dalam suatu kategori kolektif bernama Jemaah Tarbiyah dengan identitas kolektif tertentu memang menjadi pertanyaan yang menarik. Pasca Jemaah Tarbiyah menjadi partai tahun 1998, terlebih lagi pasca Pemilu 2004, terjadi lonjakan jumlah kader, di samping terbaginya perhatian terhadap *tarbiyah* di satu sisi, dan aktifitas-aktifitas politik praktis di sisi yang lain. Hal ini misalnya dikatakan oleh seorang informan, “Jadi ketika gerakan dakwah itu memutuskan diri untuk masuk ke bangku politik ya, dan merekrut lebih banyak lagi kader, tentunya terjadi suatu hasil-hasil *recruiting* yang tidak lagi seperti hasil-hasil *recruiting* sebelumnya”. Dengan kata lain, penyebab kurang solidnya identitas kolektif kader sebagai keluaran dari proses *tarbiyah* adalah kualitas input, atau dalam istilah Todd adalah keragaman batasan sosial dan sejarah hidup dari para aktor. Informan lain menyoroti tiga faktor berikutnya, yaitu kualitas aktor yang menjadi operator restrukturisasi habitus tersebut, yaitu para *murabbi* dan *naqib,* kualitas referensi, dan jarak aktor yang menjalani proses dengan referensi. Mengenai kualitas operator ia menuturkan:

> “Ada standarnya, standar seorang *murabbi* ... Cuma kan secara prakteknya kan institusinya tidak formal. *Liqa* kan bukan lembaga formal. Ditambah dengan semangat dakwah dan apa namanya, semangat untuk mengkaderkan orang. Itu satu sisi bagus banget karena semangat berdakwah, tapi satu sisi akhirnya kualitas kita tidak terjaga”.

Demikian pula penuturannya yang lain, “Ada, *manhaj* ada, *manhaj* materi *muntashib, manhaj* materi ini, cuma masalahnya kan para *naqib* itu mampu nggak membaca, mampu nggak membawakan?” Mengenai kualitas referensi ia mengatakan:

> “Sebenarnya sampai hari ini itu yang ada itu baru *manhaj* ... Manhaj Tarbiyah 1427 yang terakhir. Manhaj Tarbiyah 1427 itu hanya kumpulan panduan, metode-metode umum, kemudian ada tema-tema umum, udah titik ... **karena ini standarnya belum ditulis secara apik dan baku dari sana maka *murabbi* itu akhirnya berkreasi masing-masing. Akhirnya lahirlah kualitas yang memang tidak pernah sama**”.

Sedangkan mengenai jarak para kader sebagai peserta *tarbiyah* dari sumber referensinya, informan yang sama menyoroti implikasi dari sistem *tarbiyah* yang berjenjang di PKS dengan mengatakan:

> “Kalau dari sana ini kurang 10%, kurang 10%, sampe sana 30%. Ini yang terjadi. Ini menghasilkan apa, menghasilkan apa dalam *liqa* kayak gitu? Sebenernya ini dalam proses-proses membina ke jenjang ini itu bagus, tapi bab strategi keilmuan itu yang paling buruk”.

Dengan demikian, dalam model pembentukan dan perubahan identitas kelompok yang dikemukakan oleh Todd perlu ditambahkan bahwa kualitas proses restrukturisasi habitus individu dalam menghasilkan identitas kolektif melalui pembentukan praksis sosial, pemaknaan, dan nilai-nilai, yang kemudian membentuk kekhasan individu dan kategori kolektif, sangat ditentukan oleh empat faktor, yaitu (1) kualitas aktor peserta proses, (2) kualitas aktor operator proses, (3) kualitas referensi, dan (4) jarak aktor peserta proses dari referensi utama.

Sebagai *structuring structure* sekaligus *structured structure*, habitus para kader Jemaah Tarbiyah tentu saja bergerak sangat dinamis sebagaimana telah digambarkan di bagian-bagian sebelumnya. Dinamika tersebut sangat terasa setelah Jemaah Tarbiyah menjadi partai, dan lebih terasa lagi pasca Pemilu 2004. Beberapa informan menggambarkan dinamika tersebut dengan cara yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya menunjukkan kesamaan nuansa. Misalnya, seorang informan menggunakan kata “guncang” untuk mendeskripsikan situasi itu, sebagaimana penuturannya:

> "Justru kalau kita bicara letak hasilnya *tarbiyah* ya sekarang ini ... artinya bahwa *tarbiyah* yang telah sekian puluhan tahun, dua puluh tahun lebih, masih menghasilkan **sosok yang guncang menghadapi ini**. Mestinya kalo kita bicara *effort* yang sudah kita lakukan, **mestinya tidak guncang**. **Kalo sama–sama guncang ngapain kita *liqa***".

Kondisi tersebut membenarkan tesis Hwang dan Mecham (2010) yang menyatakan bahwa tarik-menarik antara kelompok-kelompok yang ada – yang disebutnya kelompok puritan dan pragmatis – membuat PKS menjadi gamang dalam mendefinisikan identitasnya. Jika dianalisis dengan kerangka berpikir Todd, kegamangan tersebut bisa dilihat sebagai proses perubahan identitas kolektif Jemaah Tarbiyah, dari sebuah gerakan keagamaan bawah tanah menjadi partai, yang belum sepenuhnya selesai.

Sebagaimana dikemukakan Todd, perubahan identitas kolektif disebabkan oleh tiga hal, yakni disonansi antara habitus dengan tatanan sosial, disonansi internal dalam habitus individu, dan *moment of intentionality*, di mana ada suatu kekuatan di luar diri individu yang memprogramkan perubahan tersebut dengan sengaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bekerjanya ketiga hal tersebut dalam dinamika internal Jemaah Tarbiyah. Ketidakpuasan sejumlah kader yang berimplikasi pada timbulnya rasa tidak nyaman, apatisme, bahkan keluarnya mereka dari PKS, merupakan indikasi adanya disonansi antara habitus individu dengan tatatan sosial. Beberapa data patut digarisbawahi, misalnya ungkapan seorang informan, "Pasca 2007 sampai sekarang ini saya merasakan ada ketidaksesuaian dalam kerangka berfikir saya dengan Jamaah secara *limited.*". Atau ungkapan informan lain, "Kekecewaannya ketika baru mulai tahun 2004, kita sudah melihat ketika akan dipilih Wiranto. Kelompoknya gitu. Trus akhirnya diambil keputusan tidak, jadi positif lagi gitu". Ekspresi disonansi yang lebih serius dari sekedar ketidaknyamanan adalah apatisme dan mengambil sikap yang berbeda, seperti penuturan seorang informan tentang sikap Ustadz AI, pemimpin sebuah majelis dzikir, yang memilih mendukung JK di saat PKS memutuskan berkoalisi dengan SBY, atau bahkan menarik diri karena merasa tidak cocok lagi dengan tatanan sosial yang ada, seperti analisis seorang informan tentang sikap IAT, salah satu deklarator PK, yang memilih tidak lagi di partai, "IAT itu murni nggak siap dengan politik, takut fitnah jabatan".

Sementara itu, *moment of intentionality*, sebagai pendorong proses perubahan yang masif, belum digarap dengan serius oleh institusi PKS, sebagaimana dapat disimak pada penuturan seorang informan:

> "Kalau kita sudah bermain politik kayak gini, ajarkan dia bermain. Nah makanya ketika ada yang bisa bermain dia kehilangan kontrol. Karena dia tidak diajarkan cara bermain yang benar. **Di sini dia diajarkan taat, tapi kan akhirnya dia ingin bermain, ada nafsu bermain, dia main. Tapi waktu main itu tidak diajarkan cara bermain itu. Akhirnya dia bermain dengan caranya orang**".

Dalam berbagai *taujih* Ustadz Hilmi memang terlihat adanya upaya untuk menciptakan *moment of intentionality* tersebut. Salah satu yang paling jelas adalah *taujih* beliau "Menghilangkan Trauma Persepsi" yang sebelumnya sudah dikutip dan diulas cukup lengkap. Atau juga kutipan *taujih* berikut ini, di mana beliau menegaskan perubahan mendasar dalam tuntutan terhadap aktifitas para kader Jemaah Tarbiyah pasca menjadi partai:

> "Kalau dulu dalam *marhalah* sebelum reformasi, betapa pun kita melakukan pembauran, dengan syiar bahwa kita dengan umat ini *'nahnu minhum wa nahnu ma'ahum wa nahnu lahum'*, bahwa kita adalah bagian integral dari umat ini, kita dari mereka, kita bekerja dengan mereka dan kita bekerja untuk mereka, tapi karena identitas struktural kita tidak tampil secara jelas maka evaluasi tuntutan tanggungjawab cenderung searah, bukan dua arah. *Nahnu muhasibuhum wala yuhasibuunana.* Kita mengevaluasi mereka, tapi mereka tidak pernah mengevaluasi kita. Sebab apa yang mau dievaluasi? **Kalau sekarang timbal balik, kita mengevaluasi mereka dan mereka mengevaluasi kita.** Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas, kita dituntut untuk lebih *itqan* atau lebih profesional, sehingga – insya Allah – mencapai kualitas *ihsan".*[57]

Di samping itu, jejak usaha menciptakan *moment of intentionality* tersebut juga terlihat pada penerbitan Platform Kebijakan Pembangunan PKS. Misalnya, di bab tentang paradigma diuraikan mengenai karakteristik *mihwar* dakwah *muasasi* di mana PKS/Jemaah Tarbiyah saat ini berada sebagai berikut:

> "Pada orbit ini **interaksi dengan publik mulai dilakukan secara institusional melalui organisasi politik** dengan doktrin *al hizb huwal jama'ah al jama'ah hiyal hizb*, **bukan secara individual atau parsial melalui wajah-wajah LSM**. Sampai di sini dapat dipahami kalau **kriteria**

[57] Dikutip dari *taujih* berjudul "Tuntutan Marhalah Dakwah" yang disampaikan pada Rakor Bidang Wilda, 17 Juni 2005 di Kantor DPP PKS.

> **utama dalam Orbit Lembaga adalah profesionalitas.** Dalam bingkai ini, maka yang perlu diusung adalah kader dakwah yang memahami nilai-nilai Islam dan memiliki komitmen yang tinggi bagi perwujudannya, yang memiliki kredibilitas moral, kredibilitas sosial, dan kredibilitas profesional" (MPP PKS, 2008: 54-55).

Namun demikian, belum terlihat upaya-upaya yang lebih serius dan sistematik untuk menciptakan *moment of intentionality* yang *embodied* dalam sistem *tarbiyah* yang merupakan jantung, sekaligus urat nadi PKS. Realita ini terlihat dari modul-modul *tarbiyah* yang digunakan di era partai saat ini masih sama dengan era 80an dan 90an, sehingga dengan risau seorang informan mengatakan, "Kelemahan sistem itu karena sistem nggak mau merubah diri". Menyimak sistem *tarbiyah* yang saat ini berlaku, sebagaimana telah diuraikan panjang-lebar di bagian-bagian awal bab ini, yang berlangsung secara intensif dan masif baru sebatas pembentukan habitus dakwah, atau dapat pula disebut habitus moral. Sedangkan dua habitus lainnya yang sangat penting di era kepartaian yang sudah dimasuki oleh Jemaah Tarbiyah ini, yaitu habitus politik dan habitus ekonomi, belum digarap secara serius dan terencana. Dampaknya, sebagian kader PKS menjadi gamang dalam berkiprah di arena politik. Atau dengan bahasa Bourdieu, habitus yang tidak lengkap dan utuh, membuat mereka tidak memiliki skema yang memadai untuk membentuk praksis dan strategi yang tepat, atau mengapresiasi berbagai praksis yang mereka jumpai di arena di mana mereka berkiprah. Ini yang dikatakan oleh seorang informan, para kader tersebut bermain "dengan cara orang lain", atau yang dikatakan oleh informan lain, "mau tidak mau mengadopsi banyak pengalaman dari komunitas lain".

Jika dipotret dengan kerangka perubahan identitas kolektif yang dikemukakan Todd (2005), terdapat kebingungan dan ketegangan ("guncangan" dalam penuturan seorang informan) antara identitas dan praktik-praktik yang ada setelah Jemaah Tarbiyah menjadi partai. Oleh karena itu, bagaimana para kader merespon situasi sangat tergantung pada persepsi mereka tentang sejauh mana identitas kolektif Jemaah Tarbiyah telah mengalami perubahan dengan menjadi partai. Mereka yang menganggap tidak ada perubahan yang substantif pada identitas Jemaah Tarbiyah akan merespon dengan melakukan *adaptation* (adaptasi), di mana mereka menerima realita adanya praksis-praksis baru yang

dituntut oleh tatanan sosial baru, namun mereka mempraktikkan itu dengan tetap mempertahankan nilai–nilai dan identitas, atau habitus lama. Sebagai contoh, seorang kader senior menegaskan sikapnya:

> "Saya aktif di sini itu tidak punya pretensi individu. Kecuali ya pretensi kita, apa yang dapat saya lakukan untuk kepentingan dakwah. Selama itu masih diakomodasi oleh temen-temen, saya masih diperbolehkan untuk bicara yang benar, mengemukakan prinsip-prinsip, menuangkan pemikiran dan lain sebagainya masih ditolerir, saya tidak akan mundur. **Sebab harus ada pandangan saya itu, orang yang walaupun berbeda ya, itu harus ada di dalam suatu organisasi itu, orang yang kritis ... Jadi saya tetep aja**".

Sedangkan kader-kader yang memandang menjadi partai sebagai perubahan pada sebagian identitas Jemaah Tarbiyah akan meresponnya dengan *ritual appropriation* (penyesuaian ritual), di mana praksis-praksis baru diterima dan berdampingan dengan narasi dan ritual, atau habitus lama, di mana keduanya saling mempengaruhi. Contohnya, seperti yang dikemukakan oleh seorang perempuan kader senior:

> "Kita kalau jatidiri makan di rumah dengan lauk dua macem kok. Artinya kita masih mempertahankan tidak mubadzir ini. Cuma masalahnya ketika kita bernegara bersama orang lain, kita nggak mungkin misalnya mengemukakan jatidiri kita dengan perspektif ini".

Sementara itu, kader-kader yang memandang Jemaah Tarbiyah telah berubah secara signifikan, atau bahkan total, sehingga merasa diri mereka termarjinalkan, akan menarik diri dan terus menerapkan unsur-unsur identitas mereka dalam area pribadi. Bisa saja "menarik diri" diekspresikan dengan keluar secara formal dari partai, ataupun tetap di dalam tapi bersikap pasif, tidak terlibat dalam struktur, dan kembali menekuni aktifitas-aktifitas tradisional mereka.

Dinamika internal PKS juga dapat dianalisis dengan kerangka berpikir yang dikemukakan oleh Dolfsma dan Verburg (2008) tentang *tensions* antara insitusi dengan *socio-cultural values* yang merupakan pemicu terjadinya perubahan institusional. Mereka mendefinisikan *socio-cultural values* sebagai keyakinan yang dipegang teguh, secara sadar maupun tak sadar, oleh sebagian besar anggota kelompok, yang bersifat etis, kultural, maupun filosofis, terkait dengan hal-hal mendasar. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, *socio-*

cultural values yang berkembang di komunitas Jemaah Tarbiyah adalah **taat**, **rendah hati**, **menahan diri**, **mudah menerima**, dan **mengutamakan kesesuaian dan kebersamaan dengan orang banyak**, yang dikontraskannya dengan **kritis**, **terbuka**, **mengemukakan pandangan yang berbeda**, dan **banyak berargumen**, yang menurutnya kurang bisa diterima di komunitas ini. Selaras dengan itu, para kader Jemaah Tarbiyah cenderung menghindari perdebatan dan diskusi, menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap orang-orang yang menjadi *murabbi* atau ustadz, mengedepankan *confirmity* dan *compliance* terhadap norma dan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta mengutamakan toleransi dan saling menolong sesama kader.

Ketiga bentuk *tensions* yang diidentifikasi oleh Dolfsma dan Verburg – *value tensions, institution tensions,* dan *value-institution tensions* – jelas terdapat dalam dinamika internal PKS. *Value tensions* terlihat antara lain pada pergeseran kriteria berkontribusi besar bagi partai, dari sebelumnya merekrut *halaqah*, menjadi mendatangkan uang dan kekuasaan, sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, atau mendatangkan sumber daya dalam ekspresi informan lain. Dalam hal ini, tata nilai lama yang mendasari tatanan institusional tertentu bertentangan dengan tata nilai baru yang menjadi preferensi sebagian anggota kelompok, sehingga terbentuk konstelasi tata nilai baru dan tatanan institusi baru. Contoh lainnya adalah tarik-menarik antara idealisme dengan penguasaan dan akumulasi sumber daya, sebagaimana penuturan seorang informan, "Menurut perspektif Pak UW atau saya gitu ya, ya kita masih pengen tetep bisa bersih. Ini terkait tadi itu ya, kita main proyek di sini, kita ngambil proyek di Kementerian X. Kementerian X tidak lebih bersih dibandingkan yang lain gitu ya".

Institution tensions terlihat dari kurang sinergisnya beberapa lembaga tinggi partai di tingkat pusat di masa lalu, yang berimplikasi pada diintensifkannya peran *Majlis Riqabah'Ammah* (MRA), atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan:

> "Dulu kan antara Presiden dengan Sekjen itu, antara DPP dengan MPP salah baca gitu kan. Yang satu belum baca, yang lain bacanya terlalu jauh ... dulu tidak dianggap penting betul gitu. Tidak jadi perhatian betul karena *size*-nya belum besar. **Itu menjadi penting ketika di dalam suatu lembaga eksekutif pun ada dua pandangan. Presiden dengan Sekjen**".

Sedangkan *value-institution tensions* justru terjadi dalam skala yang lebih menyeluruh, yaitu perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai. Di satu sisi terdapat institusi jemaah atau gerakan dakwah dengan suatu tata nilai tertentu, sementara di sisi lain terdapat institusi partai politik dengan tata nilai yang berbeda. Dalam konteks PKS, implikasinya adalah hadirnya institusi partai politik (institusi baru) yang secara formal mengadopsi tata nilai gerakan dakwah (tata nilai lama), yang disebut sebagai ”Partai Dakwah”. Hal tersebut terlihat jelas pada rumusan yang terdapat pada Platform Kebijakan Pembangunan PKS:

> ”Dengan keyakinan bahwa **aktivitas politik bukan sekedar kegiatan profan-duniawi, namun sarat dengan dimensi sakral-relijius-ukhrawi yang bernilai ibadah**, maka dipercaya, bahwa politik bukanlah alat untuk sekedar mengejar kemajuan material-kekuasaan, tetapi hampa dalam aspek emosional-spiritual ... Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, sarana untuk peningkatan kapasitas diri, dan juga **sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik, sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama** yang sarat dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan” (MPP PKS, 2008: 33).

Kutipan di atas, khususnya bagian-bagian yang ditebalkan, membenarkan pendapat Rosenblum (2003) tentang proses yang khas dalam pembentukan partai politik berdasarkan agama, yang dinilainya lebih merupakan suatu akulturasi demokratis ketimbang asimilasi sekularistis. Dalam hal ini, agama Islam dipilih sebagai identitas kelompok yang kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung partisipasi Jemaah Tarbiyah dalam demokrasi, di mana para *qiyadah* secara individual (misalnya melalui *taujih* yang disampaikan kepada para kader dalam berbagai kesempatan), maupun institusi-instiusi yang ada dalam partai secara kelembagaan, berperan menafsirkan agama untuk membangun identitas politik yang khas bagi Jemaah Tarbiyah, sekaligus meyakinkan para kader bahwa berpolitik sangat sejalan dengan dakwah, sehingga kegagalan berkiprah dalam politik akan sangat merugikan umat.

Setelah Jemaah Tarbiyah menjadi PKS yang mengklaim dirinya sebagai ”Partai Dakwah”, *value-institution tensions* berlanjut lagi dengan bergulirnya wacana PKS sebagai ”Partai Terbuka”. Ragam pendapat dari para informan yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan relatif tingginya intensitas *tensions*

tersebut. Di satu sisi terdapat seorang informan yang menyebutnya sebagai ”kejahatan ideologi” karena akan mempersempit kontinum ideologi dan sebagai implikasinya, menyuburkan pragmatisme dalam berpolitik. Pendapat lain mengkhawatirkan wacana ”Partai Terbuka” akan menggerus diferensiasi PKS sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah. Seorang mantan eksekutif puncak PKS menggugat keabsahan wacana tersebut, karena tidak pernah menjadi keputusan Majelis Syura. Sebaliknya, di sisi lain, ada seorang tokoh muda PKS yang menganggap tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan begitu serius tentang wacana tersebut, atau Ketua DSP yang menganggap ”terbuka” yang dimaksud tidaklah keluar dari konteks ”Partai Dakwah”. Di tataran empirik, *tensions* tersebut tergambar pada penuturan seorang informan, “Semua *halaqah* bicara politik. Kapan bicara dakwahnya? ... Kecuali sudah lepas tinggalkan Partai Dakwah. Apa iya berani nggak? Saya tantang kalau mereka berani”.

Dinamika kiprah para aktifis Jemaah Tarbiyah di kampus, atau dakwah kampus, khususnya setelah Jemaah Tarbiyah menjadi partai, juga menunjukkan *value-institution tensions* antara tata nilai dan tatanan institusi partai di satu sisi dengan tata nilai dan tatanan institusi kampus di sisi yang lain. Berbagai manifestasi dari *tensions* tersebut antara lain adanya beberapa penilaian negatif dari publik kampus kepada kiprah para aktifis dakwah kampus (ADK), yaitu *disorganized*, kurangnya kedekatan dengan publik, dan kurangnya kompetensi, di samping sikap-sikap yang otoriter, non-partisipatif, dan tidak mau menerima perbedaan, serta kecenderungan yang masif untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan otoritas ketimbang *influence*. Salah satu implikasi dari *tensions* tersebut adalah diadopsinya nilai *confirmity* dan *compliance* yang bernuansa militeristik dari Jemaah Tarbiyah/PKS ke dalam institusi dakwah kampus. Karena menyadari kuatnya nilai ketaatan, di mana terbangun norma bahwa kader yang baik adalah yang penurut, di satu sisi para mahasiswa aktifis Jemaah Tarbiyah yang ingin berkarir di struktur dakwah kampus memilih menyesuaikan diri dengan menunjukkan perilaku yang sesuai, sehingga terbentuklah kebiasaan, dan terbangunlah budaya yang mengedepankan *confirmity* dan *compliance* sebagaimana yang terdapat di Jemaah Tarbiyah/PKS. Inilah yang sangat disayangkan oleh seorang informan dengan mengatakan, “Itu

buruk. Berarti *culture* masa lalu. Lebih bagus kita membuat *culture* masa depan dari pada *culture* masa lalu. Mana ada cerita *culture* masa lalu lebih kompetitif, dunia makin berubah begini". Di sisi lain, pihak pemegang otoritas dalam dakwah kampus memiliki ruang yang luas untuk memanfaatkan *symbolic power* dan *symbolic violence* untuk melanggengkan otoritas mereka. Misalnya saja, dengan memberikan label "bermasalah" kepada kader-kader yang kritis dan tidak mau begitu saja tunduk pada arahan-arahan mereka. Atau bahkan, memberikan julukan "pemecah-belah jemaah", atau "pengkhianat" kepada kader Jemaah Tarbiyah yang memilih mengambil langkah yang berbeda dari kebijakan yang diambil oleh otoritas dakwah kampus, misalnya dalam konteks politik kampus. Kondisi ini menjadi serius jika dikaitkan dengan apa yang ditengarai oleh seorang informan, bahwa ketika para aktifis dakwah kampus menampilkan kinerja yang buruk, pihak-pihak yang punya agenda politik akan dengan sengaja menghubung-hubungkan kiprah Jemaah Tarbiyah di kampus dengan PKS. Informan tersebut mengatakan, "jebloknya PKS sangat mungkin diakibatkan oleh ADK yang tidak terorganisir dengan baik".

5.6.2. Gejala-Gejala Oligarki di PKS

Sebelum menganalisis dan menjawab pertanyaan sejauh mana terdapat kecenderungan oligarki di PKS, berikut disajikan terlebih dahulu skema hubungan di antara lembaga-lembaga tinggi dan elit PKS di tingkat pusat. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa Majelis Syura yang merupakan perwakilan para kader di seluruh Indonesia adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai *ahlul halli wal 'aqdi*. Kekuasaan eksekutif di pusat dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang sejajar dengan Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar PKS, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang merupakan unsur DPP diajukan dalam satu paket bersama-sama dengan Presiden Partai, Ketua MPP dan Ketua DSP oleh Ketua Majelis Syura untuk ditetapkan oleh Majelis Syura.

Ketua Majelis Syura, Presiden Partai, Ketua MPP, Ketua DSP, Sekjen dan Bendahara Umum merupakan unsur-unsur dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau disebut juga *Majlis Riqabah 'Ammah* (MRA), artinya Majelis Pengawasan/Pengendalian Umum, yang juga berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura dengan tugas dan wewenag antara lain: menyelenggarakan musyawarah Majelis Syura, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Majelis Syura, menetapkan kebijakan dan nama-nama calon untuk jabatan-jabatan strategis (anggota DPR RI, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, dan jabatan strategis lainnya), serta menunjuk utusan partai. Ketua Majelis Syura sekaligus menjadi Ketua DPTP, atau disebut juga *Murraqib 'Am*. Dalam konteks ini, yang bersangkutan memiliki kewenangan yang sangat besar, sebagaimana dituturkan oleh seorang mantan Wasekjen, "DPTP itu tidak bisa rapat tanpa Ketua Majelis Syura, tapi Ketua Majelis Syura sendiri dapat melaksanakan DPTP".

Gambar 5.2
Kedudukan Lembaga-Lembaga Tinggi dan Elit PKS di Pusat[58]

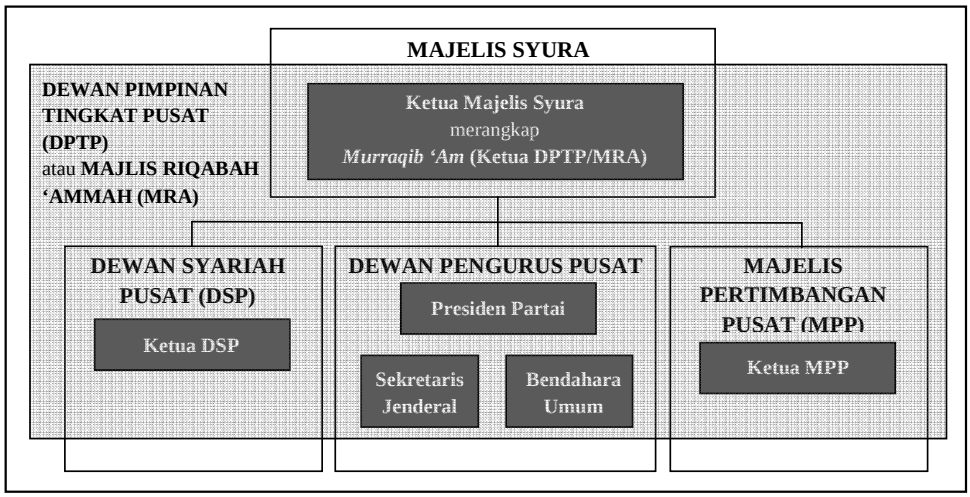

Indikator utama yang kerap digunakan dari kecenderungan oligarki adalah kurangnya frekuensi pergantian kepemimpinan, di mana pemimpin lama selalu terpilih kembali. Indikator ini terlihat di PKS, khususnya untuk dua jabatan, yaitu

[58] Diolah dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKS dan informasi dari sejumlah informan.

Murraqib 'Am yang kemudian merangkap pula Ketua Majelis Syura (sejak 2005) dan Sekjen. Dari penjelasan beberapa informan, sesungguhnya yang tidak berubah dalam sekitar tiga puluh tahun terakhir adalah *Murraqib 'Am*, karena jabatan-jabatan elit yang lain, termasuk Sekjen, diajukan oleh yang bersangkutan. Lalu apakah keempat faktor yang diidentifikasi oleh Michels (1911) sebagai penyebab pemimpin lama selalu terpilih kembali, yaitu faktor teknis-administratif, intelektual, psikologis, dan finansial, ditemukan dalam kasus selalu terpilih kembalinya Ustadz Hilmi Aminuddin menjadi *Murraqib 'Am*? Adanya faktor teknis-administratif, yaitu kebutuhan akan *expert leaders* dan perlunya pengambilan keputusan menyangkut taktik dan strategi dengan cepat, didukung oleh data penelitian. Para informan mengakui bahwa Ustadz Hilmi memiliki kapasitas yang luar biasa, antara lain dalam hal penguasaan medan, pemahaman data lapangan, kemampuan mengarahkan dan menjaga para kader, serta kemampuan membangun respek dari tokoh-tokoh strategis di luar partai. Ini yang ditegaskan oleh seorang informan, "Kalau Ustadz Hilmi, semua data-data dia kuasai. Data-data lapangan, kekuatan lapangan ... Uang-uang yang ada. Kan pasti dua kan, SDM sama uang karena untuk bisa eksekusi", dan digambarkan informan lain, "Hari ini yang paling menguasai medan adalah beliau. Karena beliau yang melahirkan, berjibaku paling banyak, tahu getir pahitnya".

Sementara itu, terkait dengan faktor intelektual, para kader memandang Ustadz Hilmi mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mengkonseptualisasikan perjalanan dakwah, dan kemudian mengartikulasikannya dengan sangat menyentuh dalam berbagai *taujih* yang disampaikan. Dengan demikian, Ustadz Hilmi dengan efektif menjalankan peran khas seorang pemimpin dari partai agama, yaitu menafsirkan agama untuk keperluan politik, membangun identitas politik yang khas bagi PKS, dan meyakinkan kader bahwa berpolitik selaras dengan tuntutan doktrin agama (Rosenblum, 2003).

Faktor psikologis juga sangat terlihat. Walaupun mungkin belum sampai ke tingkat kultus, namun sebagian publik PKS, sebagaimana tergambar dalam pernyataan sejumlah informan, menganggap hingga saat ini belum ada yang layak menggantikan Ustadz Hilmi. Seorang informan misalnya memandang bahwa tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden PKS kapasitasnya masih jauh di

bawah Ustadz Hilmi. Sedangkan informan lain menilai bahwa HNW, sosok yang menurutnya paling layak menjadi Ketua Majelis Syura menggantikan Ustadz Hilmi jika saatnya tiba, kapasitasnya baru seperempat beliau. Bahkan seorang perempuan kader senior berpendapat bahwa sebagian besar kader hanya bisa menerima kondisi Ustadz Hilmi tidak lagi memimpin PKS jika beliau meninggal dunia. Sensasi psikologis tentang sosok Ustadz Hilmi diperkuat oleh tiga media utama, yaitu forum-forum pertemuan langsung antara Ustadz Hilmi dengan para kader, di mana beliau menyampaikan *taujih*-nya, buku-buku berisi transkrip *taujih* beliau yang diterbitkan oleh partai dan disebarluaskan kepada para kader, dan penuturan tentang sosok beliau oleh para kader senior yang menjadi murid beliau dan sempat berinteraksi secara intensif dengan beliau kepada publik PKS yang lebih luas.

Selanjutnya, keberadaan faktor finansial juga didukung oleh data. Seorang informan mengatakan, "Kehebatan Ustadz itu adalah *fundraising.* Nyari dana dari dermawan luar negeri, dermawan mana aja lah ya. Timur Tengah". Hal yang senada juga dikemukakan oleh informan lain yang menuturkan bahwa Ustadz Hilmi memperoleh dana dari donatur yang tidak diungkapkan identitasnya atas permintaan yang bersangkutan, namun Ustadz Hilmi menjamin keabsahan sumber dana tersebut. Dapat dipahami jika partai memiliki ketergantungan finansial yang besar kepada Ustadz Hilmi, sehingga sebuah media cetak menyimpulkan, *"Hilmi is actually acting as the real treasurer for the party"* (The Jakarta Post, 29 Maret 2011, hal 3). Dan dapat dipahami juga jika kemudian Ustadz Hilmi menemukan kecocokan dengan AM yang memiliki akses yang luas terhadap sumber-sumber finansial, di samping kemampuan mengeksekusi gagasan, sehingga selalu menunjuknya menjadi Sekjen. Hal ini terlihat dari penuturan seorang informan, "AM itu disukai sama Ustadz Hilmi, karena apa yang Ustadz Hilmi inginkan untuk dieksekusi dia bisa mengeksekusi ... **dia bisa mengakses banyak orang plus sumber dayanya**". Data tidak menunjukkan adanya upaya formal-struktural dari elit untuk menyalahgunakan sumber dana yang dikuasainya secara manipulatif guna memperkuat legitimasi dari publik partai terhadap kedudukan mereka. Namun terlihat adanya manuver pribadi untuk membangun loyalitas dari para pengikut, sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, "Karena dengan

posisi itu, AM ada uang, dia membangun kekuatan. FH itu. **Dan mereka paham cara membangun kekuatan itu lewat kekuatan uang** ... Misalnya siapa disuruh umrah ... Kader. Hadiahnya umroh, naik haji. Kan berasa". Demikiran pula kesaksian informan lain tentang kekuatan uang, antara lain dalam bentuk *kafalah*, yang didayagunakan oleh Ustadz Hilmi untuk membina loyalitas kader, sekaligus membungkam suara-suara kritis terhadap kebijakan dan langkah yang diambilnya.

Data penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung hasil penelitian Permata (2008a) yang mengatakan bahwa kecenderungan oligarki muncul menyertai perubahan PK menjadi PKS sebelum Pemilu 2004. Pendapat tersebut benar dalam konteks praktis, di mana orientasi PKS relatif lebih pragmatis dibandingkan dengan PK yang sangat ideologis. Namun di tataran struktural, kecenderungan oligarki sudah muncul jauh sebelum PK berganti menjadi PKS, bahkan sejak masih berupa Jemaah Tarbiyah, karena *Murraqib 'Am* sebagai pimpinan tertinggi partai sejak awal memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengambil berbagai keputusan. *Murraqib 'Am* tidak selalu mengambil keputusan secara formal, namun juga bermanuver untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Dinamika pengambilan keputusan untuk menentukan capres yang akan didukung dalam Pilpres 2004 merupakan contoh yang cukup jelas dari kondisi ini. Secara verbal dan formal *Murraqib 'Am* menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki preferensi mengenai capres yang akan didukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme *syura*. Namun kemudian *Murraqib 'Am* beberapa kali menganulir keputusan *syura*, baik untuk tidak ikut serta dalam eksekutif, maupun untuk mendukung Amien Rais sebagai capres. Bahkan setelah keputusan final mendukung Amien Rais diambil sekalipun, *Murraqib 'Am* masih meminta agar dibuat klausul yang menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak mengikat. Terlihat bahwa aspek historis-kultural yang telah dibahas sebelumnya membuat hubungan *Murraqib 'Am* dengan jajaran di bawahnya tidak pernah bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan.

Peneliti sependapat dengan Michels bahwa tidak bergantinya pimpinan tertinggi Jemaah Tarbiyah dalam kurun waktu yang relatif panjang berimplikasi pada kesenjangan antar-generasi, di mana secara psikologis publik PKS melihat bahwa generasi berikutnya selalu berada di bawah kualifikasi Ustadz Hilmi. Dapat

dipahami jika persepsi tentang kesenjangan tersebut semakin lama semakin besar, karena para kader semakin terbiasa dengan peran-peran yang dijalankan Ustadz Hilmi dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, yang dipersepsikan belum dimiliki, atau merupakan kelemahan tokoh-tokoh lain. Dalam kondisi ini, berbagai upaya yang dilakukan Ustadz Hilmi untuk mengurangi perannya maupun melakukan regenerasi dengan memproyeksikan calon-calon tertentu tidak akan mengurangi dependensi para kader kepada beliau selama beliau berada di posisinya. Apalagi data menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan baru sebatas melontarkan wacana dalam berbagai *taujih* yang disampaikan.

Melebarnya kesenjangan antar-generasi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari faktor-faktor historis dan budaya yang tidak diperhitungkan secara khusus oleh Michels. Hampir seluruh kader senior Jemaah Tarbiyah yang saat ini menempati posisi-posisi strategis, termasuk menjadi anggota Majelis Syura, memiliki hubungan historis dengan Ustadz Hilmi sebagai *murabbi* mereka. Mengingat kuatnya nilai menghormati orang yang menjadi *murabbi* atau ustadz di jemaah ini, sulit dibayangkan bahwa regenerasi akan berlangsung *bottom-up*. Hubungan historis dan kultural tersebut yang membuat kesenjangan generasi tidak menimbulkan konflik antar-generasi sebagaimana logika pemikiran Michels. Hal ini sejalan dengan pendapat Smith (2000) yang menolak jika karisma dipahami semata-mata secara mikro, yaitu sebagai implikasi dari kepribadian sang tokoh dalam interaksinya dalam kelompok. Dalam kerangka berpikir Smith, karisma Ustadz Hilmi adalah ikatan moral antara dirinya dan pengikutnya yang bersifat kultural, hasil dari struktur-struktur simbolik atau sentimen kolektif yang tercipta dari tindakan, kekuasan, dan moralitas yang ditunjukkannya selama memimpin, yang diperkuat pula oleh berbagai narasi tentang nilai-nilai luhur dan perjuangan beliau dalam merintis dan membesarkan Jemaah Tarbiyah, yang disebarluaskan secara konsisten oleh murid-murid beliau. Smith menyebut proses itu sebagai **simbolisasi** dan **mitologisasi**, yang banyak terkandung dalam penuturan seorang perempuan kader senior. Bisa kita simak misalnya bagaimana kader tersebut menggambarkan perasaannya tentang posisi Ustadz Hilmi, yang menurutnya juga merupakan perasaan kader-kader lain yang merupakan murid beliau, “Jadi ada apa ya, unsur-unsur di kalangan kader itu, unsur spiritual yang berbeda, **karena dia**

itu ya *murabbi*, ya guru, *founding father*, ya ini dan segala macem ... **mungkin seperti orang Iran menganggap Khomeini gitu ya kira-kira"**. Demikian pula bagaimana informan tersebut di satu sisi menggambarkan dedikasi dan totalitas Ustadz Hilmi menjalani "takdirnya", dan di sisi lain betapa sebagian kader memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sosok beliau:

> "**Itulah yang membuat Ustadz Hilmi sedih dan menangis, kenapa muridnya nggak pinter-pinter, kenapa murid-muridnya masih mengalami ketergantungan sama dia**. Dia sebenernya udah capek ya, saya lihat. Jantungnya juga udah pake cincin atau apa itu. Beliau itu sebenernya tidak dalam kondisi yang prima gitu, **tapi sementara saya melihat kita nih sebagian besar kader mungkin bisa nerima dia tidak menjadi pimpinan kalau meninggal**".

Selain abai terhadap aspek historis dan kultur, terdapat kelemahan lain dalam teori Michels tentang oligarki. Ia hanya melihat kemungkinan berlangsungnya konflik yang bersifat vertikal, antar-generasi, sebagai implikasi dari pemimpin yang terus menjabat dalam kurun waktu yang panjang. Sementara dalam kasus PKS, konflik antar-generasi tidak terlihat, namun terdapat konflik yang besifat horisontal, antar-kelompok *religious movement oriented* yang idealis-konservatif dengan kelompok *political party oriented* yang pragmatis-progresif sebagaimana yang dibahas di bab sebelumnya. Diduga kuat bahwa Ustadz Hilmi memahami potensi konflik tersebut. Misalnya, seorang informan menuturkan bahwa Ustadz Hilmi pernah menegur keras TS (ketika itu Presiden Partai) dan AM karena keduanya tidak rukun. Oleh karena itu, beliau secara sadar mengambil langkah-langkah kompromi, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai "pembiaran". Di satu sisi beliau memilih AM sebagai Sekjen karena pertimbangan "kebutuhan lapangan", namun di sisi lain beliau selalu memilih Presiden Partai yang dipersepsikan idealis-konservatif untuk menjaga kesimbangan internal.

Tilly (1978) menegaskan bahwa regim-regim yang ada berada di antara sifat egaliter (memberikan represi/dukungan berdasarkan substansi tindakan dengan mengabaikan pelaku) dan oligarkis (memberikan represi/dukungan terhadap pelaku tertentu dengan mengabaikan substansi tindakan). Elit PKS menunjukkan kecenderungan regim yang oligarkis. Sebagai konsekuensinya, hubungan antara kelompok *religious movement oriented* dengan kelompok

political party oriented menunjukkan *categorical inequality* (Tilly, 2000). Hal ini terindikasi dari pernuturan seorang informan bahwa Ustadz Hilmi pernah mengatakan AM berada dalam posisi yang benar dalam konflik-konfliknya dengan para Presiden Partai. Data menunjukkan setidaknya tiga dari empat indikator yang biasa menyertai *categorical inequality* – eksploitasi, *opportunity hoarding, emulation,* dan *adaptation* – terdapat dalam kasus PKS. *Opportunity hoarding,* atau monopoli kesempatan, terlihat pada dominasi kelompok *political party oriented* dalam pengisian pos-pos strategis dalam struktur organisasi PKS maupun Fraksi PKS di DPR RI pasca Munas 2010. Seorang informan misalnya mengatakan, sekitar 70% pengurus DPP saat ini adalah orang-orang yang berafiliasi kepada AM. Sementara itu, *emulation*, pemanfaatan organisasi untuk kepentingan kelompok dominan, terlihat antara lain dalam *fundrising*, seperti penuturan informan yang sama:

> "Mereka tentu bisa *fundraising* dengan banyak itu karena posisinya di partai. Orang mendukung kita kan, kita jadi tim dana, itu *fundraising*. Kita siapa? **Kalo nggak ada akses ke Ketua Majelis Syura, nggak ada jabatan struktural di partai, ya nggak bisa lah.** Karena nanti ketika menggalang *fundraising* ini kan membangun *deal-deal*, kesepakatan-kesepakatan. Nah kesepakatan ini kita punya otoritas. Bisa dieksekusi? Bisa dipegang nggak?"

Sedangkan *adaptation,* perubahan rutinitas sosial yang dimaksudkan untuk melanggengkan ketaksetaraan, terlihat misalnya dalam pemfungsian TPPN (Tim Pemenangan Pemilu Nasional) di bawah pimpinan AM saat menghadapi Pemilu 2009 yang lalu, di mana struktur DPP "ditempatkan" di bawah tim ini. Seorang informan menggunakan istilah "kudeta halus" untuk menggambarkan manuver tersebut.

Namun demikian, PKS memperlihatkan indikasi oligarki secara relatif dan parsial, tidak secara penuh seperti konsep oligarki yang dikemukakan Michels. Di tingkat pemimpin tertinggi tidak cukup indikasi untuk menyimpulkan bahwa elitisme telah melunturkan idealisme, walaupun di lapis kedua terjadi dialektika antara kelompok idealis-konservatif dengan kelompok pragmatis-progresif seperti yang digambarkan sebelumnya. Di samping itu, kondisi di PKS tidak memenuhi unsur-unsur dalam definisi oligarki yang dikemukakan Leach (2005), yaitu

penggunaan kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi secara terus-menerus, baik formal (paksaan, *coercion*) maupun informal (manipulasi) oleh kelompok dominan kepada mayoritas. Dalam konteks kekuasaan formal misalnya, kewenangan Ketua Majelis Syura/*Murraqib 'Am* dan *Majlis Riqabah 'Ammah* (MRA, DPTP) memang sangat besar dan cenderung oligarkis. Namun, hal tersebut berlangsung berdasarkan ketentuan AD/ART, sehingga dipandang absah oleh publik PKS. Apalagi publik PKS memiliki porsi keterlibatan dalam dinamika yang terjadi di tingkat elit, yaitu melalui mekanisme pemilihan raya untuk memilih sebagian dari anggota-anggota Majelis Syura. Sementara itu, legitimasi Ustadz Hilmi yang tinggi bersumber dari karisma, sebagai manifestasi ikatan moralnya dengan para pengikutnya. Dengan kata lain, hal tersebut diterima sebagai sesuatu yang "semestinya" oleh publik PKS.

Hubungan antara pemimpin tertinggi partai sebagai pusat kekuasaan (*government* dalam model lingkungan politik Tilly) dengan kelompok *religious movement oriented* yang cenderung idealis-konservatif dan kelompok *political party oriented* yang cenderung pragmatif-progresif (*contenders* dalam model lingkungan politik Tilly), dapat pula dianalisis dengan kerangka berpikir dari Tilly (2004), di mana masing-masing kelompok dilihat sebagai sebuah *trust network* yang terhubung dengan pusat kekuasaan melalui sebuah moda penghubung tertentu, dengan bentuk hubungan yang spesifik pula. Dari tiga bentuk hubungan – segregasi, hubungan yang dinegosiasikan, integrasi – jelas sekali bahwa bentuk/sifat hubungan yang terlihat di PKS adalah integrasi. Doktrin *al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* (jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah) yang dikeluarkan pada saat Jemaah Tarbiyah menjadi partai di tahun 1998 menutup kemungkinan bentuk-bentuk hubungan yang lain, segregasi maupun hubungan yang dinegosiasikan. Sementara itu, dalam hal moda penghubung, dari tiga moda yang ada – paksaan, modal, komitmen – moda penghubung yang digunakan secara eksplisit adalah komitmen. Terlepas dari berbagai kelemahan dan dinamika yang ada, menurut pandangan peneliti, *tarbiyah* relatif mampu membangun komitmen sebagian besar kader terhadap suatu tata nilai bersama, *uniting values,* sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan

ketika menggambarkan kondisi kelompok konservatif dan kelompok progresif di PKS:

> "Memang membawa perpecahan tidak, karena kita punya nilai-nilai yang sama, *ubudiyah* yang sama, tujuan yang sama, ini kita berjamaah ini untuk mencari ridha Allah, untuk cari surga, itu kuat, kuat sekali, baik di progresif maupun di pragmatis, konservatif. Itu kuat mengikat".

Menurut Tilly, "perkawinan" antara komitmen dengan bentuk hubungan yang integratif akan menghasilkan pola hubungan yang teokratis, yang disebutnya sebagai *"extensive integration of trust networks around communities of beliefs"*. Manhaj Tarbiyah yang diuraikan di awal bab ini memberikan deskripsi yang gamblang tentang bagaimana komitmen pada kader tersebut dibangun dan dimobilisasi.

Namun demikian, dalam prakteknya selalu terbuka kemungkinan bahwa sampai batas terentu bentuk/sifat hubungan suatu kelompok di PKS dengan pusat kekuasaan bukanlah komitmen, melainkan paksaan. Apalagi jika kelompok tersebut bukanlah kelompok dominan. Dengan kata lain, jika meminjam cara berpikir Etzioni (1968), komitmen sebagai moda penghubung rentan dimobilisasi secara manipulatif oleh kelompok dominan, sehingga pola hubungan yang di permukaan terlihat teokratis, sesungguhnya adalah otoritarianisme yang oligarkis. Atau jika dengan kerangka berpikir Bourdieu, kelompok dominan medayagunakan modal simboliknya sedemikian rupa, sehingga mereka bukan saja dapat memainkan *symbolic power*, tapi juga *symbolic violence*, untuk melanggengkan dominasinya.

BAB 6
KUALITAS ORGANISASI DAN KINERJA PKS

Dinamika internal PKS yang telah diuraikan pada Bab 4 dan Bab 5 berdampak pada kualitas organisasi PKS, yang pada akhirnya bermuara pada kinerja PKS di arena politik Indonesia. Sebagai bagian dari koalisi Pemerintah, atau sebagai *member* dari *the polity* dalam arena politik Indonesia jika dianalisis menggunakan *the polity model* dari Tilly, PKS tentunya berkepentingan untuk senantiasa memastikan bahwa ia memiliki kapasitas tindakan kolektif yang memadai agar tidak menjadi korban dari manuver pada *contenders* lain dan terlempar dari *the polity*.

6.1. Kualitas Organisasi

Jika meminjam logika kuantitatif, kualitas organisasi yang dikupas di bab ini merupakan *intervening variable* yang menghubungkan tingkat kohesi sosial atau *group inclusiveness* dengan tingkat keorganisasian, yang kemudian menentukan kemampuan PKS melakukan mobilisasi untuk menggerakkan tindakan kolektif.

Kualitas organisasi PKS mengalami pasang-surut bersama-sama dengan dinamika internal yang melibatkan para aktor yang ada di dalamnya, khususnya mereka yang menjadi bagian dari *the party in central office* dan *the party in public office*, yang kemudian mengimbas pada *the party on the ground*. Terdapat kesan kuat bahwa publik PKS menilai kualitas organisasi pada periode 1999-2004 lebih baik daripada pasca Pemilu 2004. Soliditas internal yang kokoh, ditunjang oleh kiprah "heroik" para kader PKS yang menjadi pejabat publik, menjadikan periode 1999-2004 sebagai "periode keemasan". Sementara itu, lemahnya sinergi banyak dituding sebagai catatan dari masa setelah 2004. Seorang kader senior menggambarkan kondisi tersebut dengan menyitir Peter Senge, situasi di mana "IQ organisasi berada jauh dibawah IQ individu-individunya". Di kepengurusan DPP yang baru tahun 2010 harapan untuk mendapatkan kembali *chemistry* sebelum 2004 itu mengemuka, walaupun tetap terdapat sejumlah catatan yang akan diuraikan kemudian.

6.1.1. Konsolidasi Politik, Organisasi, dan Basis Massa

Dengan segala dinamika yang dialami oleh Jemaah Tarbiyah setelah menjadi partai politik, pekerjaan rumah terbesar PKS saat ini adalah melakukan dan menuntaskan konsolidasi. **Konsolidasi politik** telah dijabarkan secara formal dalam bentuk Platform Kebijakan Pembangunan PKS. Namun platform tersebut masih perlu diturunkan lebih rinci sampai menggambarkan bagaimana PKS hendak tampil di legislatif, di eksekutif, dan di struktur internal partai dari DPP sampai dengan DPRa. Setelah konsolidasi politik, diperlukan pula **konsolidasi organisasi** yang sifatnya lebih teknis. Menarik untuk menyimak penuturan seorang informan tentang hal ini:

> "Ada lagi konsolidasi organisasi. Kalau ini lebih teknis kan. Kesekjenan, keorganisasian, dipegang dia. Kaderisasi termasuk kan. Pencatatan, peningkatan kualitas, promosi, perubahan-perubahan posisi itu adanya di situ kan. **Jangan sampai *reshuffle* kabinet ditolak, ada komentar-komentar, tapi *reshuffle* politik tetep berjalan tanpa sebuah rasio yang jelas**".

Pernyataan di atas menarik karena seperti hendak menyindir beberapa elit PKS yang secara eksternal menolak isu *reshuffle* kabinet SBY, namun secara internal justru melakukan *"reshuffle"* politik pasca Munas 2010, antara lain penempatan *staffing* kepengurusan DPP dan perombakan besar-besaran kader-kader PKS yang ditempatkan di alat-alat kelengkapan Dewan, yang ditengarai dilakukan tanpa rasionalitas argumentasi yang memadai. Termasuk yang dikritisi adalah penempatan para anggota Dewan dari PKS di Komisi-Komisi yang tidak sepenuhnya memperhatikan kompetensi dan latar belakang keilmuan mereka. Ia mencontohkan seorang kader yang dengan latar belakang Fakultas Ekonomi ditempatkan di Komisi III yang membidangi masalah-masalah hukum. Lalu seroang perempuan kader senior yang berlatar belakang aktifis perempuan dan punya peran besar dalam menggolkan UU Pornografi sekarang justru ditempatkan di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Demikian pula kader yang ditempatkan di Komisi yang membidangi kesejahteraan sosial bukanlah orang memahami bidang tersebut, padahal saat ini Menteri Sosial dijabat oleh Kader PKS, sehingga dikhawatirkan sinergi yang optimal di bidang ini tidak terbangun.

Selain konsolidasi politik dan konsolidasi organisasi, **konsolidasi basis massa** juga perlu dilakukan. Hal ditengarai ini belum sempat banyak disentuh oleh PKS, baik formula dasarnya, maupun aspek-aspek operasionalnya. Jika PKS memang memilih menjadi Partai Dakwah tentu perlu didefinisikan dengan jelas, Partai Dakwah yang seperti apa. Lalu, jika PKS adalah Partai Dakwah, seberapa dekat ia dengan ormas-ormas Islam dan berbagai komunitas muslim? Persoalan ini dicoba diatasi oleh DPP periode 2010-2015 dengan membentuk bidang khusus yang menangani interaksi PKS dengan ormas-ormas Islam dan berbagai komunitas muslim.

6.1.2. Kinerja di Ranah Publik

Setelah mendirikan PKS, organisasi yang tampil di publik secara terbuka, kinerja di ranah publik, kinerja *the party on public office* mau tidak mau menjadi salah satu ukuran kualitas organisasi Jemaah Tarbiyah. Bisa dikatakan bahwa *the party on public office* merupakan etalase, atau *showroom,* yang mewakili keseluruhan partai. Ustadz Hilmi Aminuddin mendeskripsikan konsekuensi menjadi partai:

> "Mereka merasa tidak cukup dengan kebersihan dan kepedulian. Yang merupakan *basic* atau basis dari kredibilitas kita. Tapi mereka sudah menuntut *kafa'ah* kita. Menuntut kompetensi kita dalam segala bidang kehidupan. Menuntut kemampuan kita, *khibrah* kita, kepakaran kita dalam segala bidang kehidupan, untuk mengelola dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Maka **kader-kader kita pun dituntut semakin mempunyai kompetensi dalam segala bidang, di mana pos dakwah sedang dia jaga**".[1]

Dengan menjadi partai politik, Jemaah Tarbiyah perlu memformulasikan output proses *tarbiyah* dalam bentuk yang lebih konkrit, sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap kiprah para kadernya di ruang-ruang publik. Sosok kader PKS ideal, khususnya kader PKS yang mendapatkan tugas sebagai pejabat publik, digambarkan sebagai ***"da'i* dalam segala kondisi"**. Sosok *"da'i* dalam segala kondisi" yang dimaksud merupakan penjabaran dari motto PKS "bersih, peduli, profesional". Bersih dan peduli ditunjukkan oleh sosok pejabat publik yang tetap

[1] Dikutib dari "Khitab Qiyadi", *taujih* awal Tahun Baru Islam 1428 H di Hotel Santika, Ahad 28 Januari 2007.

tampil sederhana dan memiliki komitmen dakwah yang kuat. Sementara profesional diwujudkan dalam bentuk kemampuan menawarkan konsep perubahan yang mensejahterakan masyarakat, sekaligus kemampuan mengeksekusi konsep tersebut sehingga masyarakat di wilayah yang dipimpin oleh kader PKS merasakan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik. Seorang anggota MPP meringkas pendapatnya dengan mengatakan, ”**Profesional *means we can do better comparing to others, at the same time* kita kader PKS**”. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana menunjukkan identitas sebagai kader PKS dengan cara menampilkan kontribusi yang berkualitas.

Setidaknya terdapat tiga kriteria untuk menilai kinerja PKS di ranah publik yang sifatnya tidak *mutally exclusive*. Artinya, ketiganya saling beririsan satu sama lain, walaupun juga menunjukkan gradasi, dari ukuran yang cenderung pragmatis ke yang cenderung idealis. Ketiga kriteria tersebut adalah kemampuan mengeksekusi proyek-proyek yang prestisius, memberikan *deliverables*, dan mengobjektifikasi nilai-nilai ideal-subjektif. Dalam pandangan seorang pejabat teras PKS, para pejabat publik PKS di pusat dan daerah menunjukkan tingkat kinerja yang beragam jika dinilai dengan kriteria yang pertama, **kemampuan mengeksekusi proyek-proyek prestisius**.

Sementara itu, **kemampuan para pejabat publik dari PKS dalam memberikan *deliverables***, secara umum belum memuaskan. Dengan demikian, para elit partai perlu menggeser fokusnya, dari semula mengurusi para kader secara internal, menjadi memastikan dihasilkannya dan tersampaikannya *deliverbles* kepada publik. Untuk itu, elit harus percaya bahwa para kader mampu bergerak sendiri untuk mengembangkan kapasitas mereka. Seorang anggota Dewan dari PKS mempertanyakan:

> “**Menteri kita, *deliver* nggak? Anggota DPR kita, *deliver* nggak? Gubernur kita, *deliver* nggak? Walikota, *deliver* nggak?** Itu, pertanyaannya! **Kalau mereka bisa *deliver and acceptable by the rest to the people* ya dia oke.** Nggak usah terlalu mikirin kader. Kader akan jalan sendiri, dan akan berkembang dalam tingkat yang tadi saya bilang. Dia aktif, konsultatif, partisipatif, atau *full delegation* untuk memimpin”.

Keinginan memberikan *deliverables* untuk memenuhi janji-janji politik kepada konstituen semasa kampanye, masih sangat kuat pada diri sebagian besar anggota Dewan dari PKS. Namun demikian, pada saat kampanye banyak dari mereka, terutama yang maju untuk periode pertama, belum tahu betapa rumitnya mekanisme internal di DPR. Apalagi mereka tidak memiliki *"right to decide and allocate"*, sehingga mewujudkan janji-janji kampanye tersebut tidaklah mudah. Misalnya, ketika kampanye seorang anggota Dewan menjanjikan akan membangun dan memperbaiki jalan di sebuah daerah. Setelah terpilih, janji tersebut ternyata tidak bisa dia realisasikan, karena kewenangan untuk mengeksekusi pembangunan dan perbaikan jalan tersebut ada pada Bupati, bukan pada Pemerintah Pusat, apalagi anggota Dewan.

Dalam hal ini terdapat ketidakmerataan akses terhadap sumberdaya. Para anggota Dewan yang berada di komisi-komisi "basah" yang memiliki banyak proyek di daerah, yang mengurusi pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya, dengan relatif mudah dapat datang ke daerah ketika sebuah proyek diresmikan, dan mengklaim bahwa proyek tersebut dapat dieksekusi karena perjuangannya. Sementara itu, para anggota Dewan dari komisi-komisi yang "kering" menjadi sangat tergantung pada "belas kasihan" dari Menteri-Menteri terkait untuk bisa mengalokasi dana agar mereka bisa berbuat sesuatu di daerahnya.[2] Untuk mengatasi keterbatasan tersebut anggota Dewan perlu cerdik agar tetap dapat memberikan *deliverables* kepada konstituennya. Seorang anggota Dewan dari PKS memberikan contoh:

[2] Dalam konteks inilah menurut seorang anggota Dewan dari PKS sebagian anggota Dewan memunculkan gagasan Dana Aspirasi sebesar 15 milyar per orang. Dalam konsep awalnya, yang diminta adalah program yang sudah ada dalam perencanaan Pemerintah. Anggota Dewan hanya "membawa" program tersebut ke dapilnya masing-masing. Bahkan sudah ada semacam kesepakatan informal dari beberapa anggota Dewan bahwa *"accountabilty comes first"*, sehingga jika akuntabilitas dari sebuah proyek tidak jelas, mereka tidak akan mengambilnya. Dalam konteks ini kader tersebut mengatakan, "Satu, kita nggak boleh ada hubungan dengan proyek tersebut. Kedua, kita harus bisa mengontrol bahwa proyek itu jalan. Ketiga, *when we decide we don't give to anybody* kecuali dengan bupatinya itu". Kader tersebut menyayangkan bahwa isu ini sudah "digoreng" oleh media sehingga memicu kehebohan, seolah-olah anggota Dewan mencari-cari sumber keuangan baru untuk diri mereka dan partai mereka. Ia mengatakan, "Media udah menggoreng, wah anggota DPR nyari duit, minta duit. Ngapain?! kita maunya program. Nggak ada duitnya!"

> "Saya di komisi XI dateng ke Bank Mandiri yang ada di mana-mana. Saya bilang, eh Pak, *you* punya *project* CSR di Garut? Ada. Apa yang pengen dibikin? Kita bikin sekolah ... Nah, **urusan saya sebagai wakil mereka adalah menyampaikan kepada masyarakat melalui media, saya bersama dengan Bank Mandiri mengusahakan ini. Saya harap ini bisa dimanfaatkan.** Masuklah media, ini anggota DPR bersama Dirut. Datengnya di situ kita bayar sendiri, pulang kita bayar sendiri. Duit kita nggak terima, gunting, paling kita dapet makan siang ... Kotak pula. *That's it"*.

Terdapat beberapa persoalan yang menghambat kemampuan para anggota Dewan, termasuk dari PKS, untuk memberikan *deliverables*, baik dari sisi kualitas sistem di Dewan, maupun kualitas para anggota Dewan. Dari sisi sistem setidaknya terdapat dua persoalan. Pertama, sistem internal di DPR begitu rumit dan *time consuming*, sehingga hal-hal yang sebenarnya sederhana tersebut menjadi sulit untuk dieksekusi. Kedua, anggota Dewan tidak bisa berhubungan dengan konstituen mereka sebagaimana layaknya anggota parlemen di negara-negara maju, yang setiap saat bisa mengumpulkan aspirasi mengenai kebutuhan nyata dari masyarakat yang mereka wakili, lalu bergerak cepat untuk mencari sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi aspirasi tersebut.

Sementara itu, penghambat yang terkait dengan kualitas anggota dewan adalah, pertama, pemahaman yang mendasar tentang masalah yang dihadapi, seperti yang digambarkan seorang pengurus DPP, "Banyak kok ustadz kita yang masih gagap ketika legislasi karena dia hafalnya ayat dan dalil ... Itu kita harus introspeksi". Kedua, sebagian besar pejabat publik dari PKS belum memiliki *skills* yang relevan dengan tuntutan peran masing-masing. Setiap peran menuntut *skills* yang berbeda. Misalnya, seorang anggota Dewan punya tugas-tugas yang terkait dengan legislasi, anggaran, pengawasan, dan pelayanan konstituen, yang sebagian besar dilakukan dengan berbicara di depan publik, sehngga berbicara dengan meyakinkan merupakan kompetensi primer yang dibutuhkan. Lain halnya dengan seorang Kepala Daerah. Kemampuan berbicara di depan umum tidaklah sepenting kemampuan merumuskan dan mengeksekusi kebijakan, menata organisasi, membangun infrastruktur publik, dan mengaktifkan partisipasi masyarakat. Ketiga, tidak semua anggota Dewan memiliki integritas, sehingga sangat mungkin ada di antara mereka yang melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mengambil

keuntungan pribadi, misalnya dengan memilih sendiri kontraktor yang menjadi pelaksana sebuah proyek.

Dengan berfokus pada upaya memberikan *deliverables*, para kader PKS yang ada di jabatan-jabatan publik akan terhindar dari pusaran friksi internal yang menyangkut idealisme versus pragmatisme, faksionalisasi, perdebatan seputar *money politics*, dan sebagainya. Seorang kader menegaskan, "Makanya saya bilang, **untuk menyampingkan itu semua *focus on deliverables***. Itu aja. Kalau *you* itu masuk di Komisi Keuangan, *make sure deliverables you* di keuangan apa? Gitu dong! Ngomong sama media, ini yang saya *deliver! It's my deliverables"*.

Kriteria yang ketiga dari kinerja di ranah publik adalah **kemampuan mengobjektifikasi nilai-nilai ideal-subjektif** yang diusung PKS. Setelah proses internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai, objektifikasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam meraih dukungan publik. Karena sudah memasuki dunia politik, atau dalam terminologi yang lebih formal, telah memasuki *mihwar mu'asasi* maka kompetensi para kader untuk melakukan objektifikasi atas nilai-nilai ideal yang diusung PKS dengan menurunkan nilai-nilai ideal tersebut ke tataran empirik kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadi keniscayaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi.

Objektifikasi merupakan konsep yang sangat penting dalam pemikiran politik PKS. Objektifikasi tersebut diwadahi dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS. Platform tersebut membumikan idealita yang termaktub dalam asas partai, yaitu Islam, yang bersumber dari Al Qur-an dan As Sunnah, AD/ART, serta Falsafah Dasar PKS. Objektifikasi bukan hal baru dalam khasanah pemikiran Islam, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri. Ketua MPP PKS memberikan contoh, "beliau menyatakan iman itu ada 70 cabangnya, malu itu sebagian dari iman, ataupun bahkan menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari keimanan". Jadi melalui objektifikasi, nilai-nilai ideal yang bersifat subjektif dijabarkan menjadi sejumlah indikator perilaku yang terukur dan dapat dilihat atau dirasakan oleh publik. Selain itu, objektifikasi juga memungkinkan terjalinnya kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih beragam. Pejabat PKS tersebut memberikan ilustrasi:

> "Bisa kita bayangkan bahwa misalnya ada duri di tengah jalan. Ada orang sekuler, ada orang Islam, fundamentalis, Budha. **Bisa-bisa mereka juga ingin menyingkirkan duri itu dengan berbagai macam *background* dalam pemikiran mereka**. Kalau Islam mungkin teringat akan sebagian aspek keimanan, kalo orang sekuler mungkin ini membahayakan orang lain. **Jadi, itu titik-titik temu di alam realitas**".

Sebagai pimpinan tertinggi PKS, Ustadz Hilmi Aminuddin sudah sejak lama menekankan pentingnya kemampuan melakukan objektifikasi, atau menjabarkan ideologi PKS secara empirik, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang murid beliau, "Penjabaran ideologi kita itu adalah bagaimana kita *perform* secara baik dan mensejahterakan rakyat".

Secara umum kemampuan para kader PKS yang menduduki jabatan-jabatan publik dalam melakukan objektifikasi masih lemah. Seorang kader senior mengatakan, "**Ada PKS juga, pertaniannya juga begni-begini aja. Ada PKS juga nggak ada perubahan. Skeptis masyarakat itu**". Penyusunan Platform Kebijakan Pembangunan PKS memang merupakan sebuah capaian tersendiri, namun implementasinya masih merupakan tantangan yang harus dijawab.

Gambar 6.1
Kedudukan "Objektifikasi" dalam Pemikiran Politik PKS

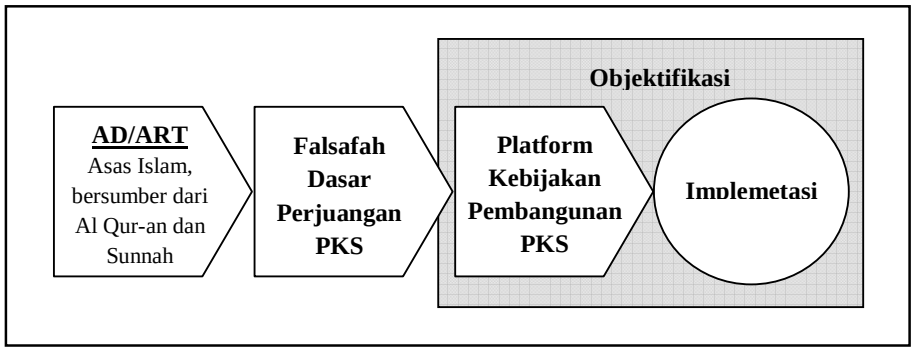

Masih lemahnya kemampuan pejabat publik dari PKS dalam mengobjektifikasi nilai ideal-subjektif yang diusung partai terlihat dari kondisi di Kementerian X. Seorang PNS di Kementerian tersebut menyatakan kekecewaannya atas kiprah dua orang kader PKS yang dua periode berturut-turut menjadi Menteri di instansinya. Kedua Menteri tersebut tidak memahami persoalan yang menjadi tanggung jawab mereka. Dampaknya, di periode kabinet

yang sekarang ini perlu diangkat seorang Wakil Menteri yang memahami masalah. Kemudian Menteri juga membawa rombongan Staf Khusus dan Staf Ahli yang terlalu jauh mencampuri urusan-urusan di Kementerian hingga hal-hal yang bersifat teknis dengan melanggar berbagai ketentuan yang berlaku. Area yang paling sering "diacak-acak" adalah penempatan SDM. di mana berbagai mutasi, promosi, demosi, dilakukan tanpa merujuk pada kriteria yang jelas. Ada pejabat yang dilengserkan karena disukan tersangkut persoalan moral, atau dikabarkan dekat dengan tokoh dari partai tertentu yang memang dikenal punya aktifitas di bidang yang merupakan garapan Kementerian tersebut. Sementara ada pegawai lain yang dipromosikan ke suatu jabatan struktural tanpa kompetensi yang jelas, sehingga berkembang isu bahwa yang bersangkutan dinaikkan karena dinilai saleh, berjanggut panjang, dan sering menjadi khatib Jumat. Juga ada Dr. A, seorang Staf Ahli Menteri terdahulu yang berkeliling ke kantor-kantor Kementerian X di berbagai daerah untuk berceramah kepada para pegawai tentang pentingnya bekerja dengan disiplin, jujur, dan tidak korupsi. Efektifitas langkah tersebut dipertanyakan, karena yang seharusnya dilakukan oleh kader PKS ketika menjadi eksekutif adalah turun ke lapangan, melihat persoalan yang sesungguhnya terjadi, dan melakukan langkah-langah konkrit yang relevan.

Ada satu peran strategis yang mestinya dilakukan oleh Menteri di Kementerian X, namun dalam dua masa jabatan Menteri dari PKS hal itu tidak dilakukan. Peran itu adalah membangun hubungan yang kuat ke luar, dengan Presiden, Menko, dan Menteri-Menteri lain yang terkait, sehingga Kementerian X mendapatkan dukungan yang memadai untuk bisa menjalankan misinya dengan optimal. Informan yang sama mencontohkan, dalam APBN, anggaran Kementerian X hanya sekitar 1% dari anggaran keseluruhan. Jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk menjalankan seluruh peran dan tugas yang harus diembannya. Ia menuturkan, "**Nah ini bawa gerombolannya, ngacak-ngacak, mikirin duit seperak, dua perak dari dalam ... itu yang menyedihkan, kata gue sih. Itulah korupsi**".

Kedua Menteri dari PKS tersebut ditengarai berasal dari kelompok yang berbeda, sehingga ketika terjadi pergantian Menteri seluruh tim juga berganti. Dampaknya, masuklah sejumlah orang baru yang tidak mengerti masalah dan

harus kembali belajar dari awal, menggantikan orang-orang sebelumnya yang sudah relatif memahami persoalan. Dengan kata lain, *learning process* tidak berlangsung secara berkesinambungan.

Kinerja di ranah publik dipengaruhi oleh independensi organisasi, yang menentukan ruang gerak yang dimiliki PKS untuk melakukan berbagai manuver dalam menarik simpati masyarakat. Seorang mantan pengurus DPP periode lalu menggambarkan kondisi sebelum Pemilu 2004, "Kinerja publik kita bagus karena kita tidak berkoalisi, tidak ber-*musyarakah*. Kita sangat ringan untuk memberikan komentar, memberikan masukan. *Ikhwah* juga di tingkat legislatif dengan uang yang ditolak, kebersihan kelihatan, bersih peduli sangat sukses lah". Pasca Pemilu 2004 ruang gerak PKS menjadi tidak leluasa karena berkoalisasi dengan partai Pemerintah. Ke depan kecil kemungkinan PKS akan bisa bersuara lantang di publik, karena orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjadi juru bicara partai sebagian besar berasal dari "kubu" yang sama. Informan tersebut menuturkan, "Sekarang kan sudah diputuskan juru bicara kita kan Presiden, Sekjen, kemudian Ketua Fraksi MK, Wakil Ketua Fraksi AP, MS, sama FH. **Ini orangnya AM semua kecuali MK**. Dan Akh MK nggak mau ngomong beda gitu. Jadi nggak ada yang bisa dijual ini". Di samping karena berkoalisi, kesulitan PKS bermanuver secara bebas juga terkait dengan "hutang budi finansial" kepada pihak-pihak tertentu yang sudah berkontribusi bagi partai.

6.1.3. Kualitas Eksekutif Partai di Pusat

Terdapat tiga hal yang menentukan kualitas eksekutif partai di pusat, yaitu **soliditas *teamwork***, **kualitas kepemimpinan**, dan **kemampuan manajerial**. Tidak sinergisnya Presiden Partai sebagai "panglima perang" dengan Sekjen sebagai pengelola sumberdaya internal organisasi merupakan indikasi lemahnya *teamwork*. Lemahnya kemampuan Presiden Partai dalam eksekusi keputusan, dan larutnya Sekjen dalam peran-peran publik sehingga tidak dapat turun tangan langsung menangani persoalan-persoalan rumah tangga organisasi, menunjukkan belum cukup baiknya kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Kelemahan kualitas eksekutif partai di pusat ini berdampak sangat signifikan pada

efektifitas pencapaian target-target kinerja organisasi. Seorang anggota MPP menuturkan:

> "**Di 2004-2009 saya merasa memang agak spesifik, TS dan AM tidak kompak**. **TS sendiri *in term of management* atau *leadership quality*-nya *not up to standard* lah** ... **AM dengan peran-peran publiknya, sebagai Sekjen banyak mendelegasikan**, sehingga yang terjadi kita banyak involutif, muter di dalem ... **Banyak program tidak berjalan dan banyak target tidak tercapai, banyak rencana tidak termonitor**. Ngalir aja, padahal mestinya bisa lebih dari itu".

Dari ketiga faktor yang telah diulas di atas, kepemimpinan menjadi catatan khusus. Informan tersebut menggarisbawahi, "*Leadership, Murraqib 'Am*, Presiden. **Saya suka doa mudah-mudahan dapet *Murraqib 'Am*, Presiden yang pas** gitu, enak itu… cepet itu… kita punya semua kapasitas sumber daya untuk melejit".

Seorang kader yang berkecimpung di bidang pengembangan SDM juga melihat bahwa para pejabat partai masih memiliki kelemahan yang mendasar dalam kompetensi manajemen. Ia menuturkan, "Kalau di manajemen kan ada 4 kan, POAC. *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controllling* ya. Kan orang harus punya salah satunya. Dan **terkadang di salah satunya nggak punya, terus megang pos di manajemen, di struktur, ya kan akhirnya kacau**". Kelemahan-kelemahan manajerial tersebut diperparah lagi dengan adanya budaya yang cenderung memaklumi dan membenarkan kelemahan, bukannya mengakui dan kemudian mengoreksinya.

6.1.4. Penerapan Manajemen Moderen

Salah satu kelemahan yang paling mendasar dari PKS saat ini adalah belum diterapkannya manajemen moderen yang berbasis data dan transparansi. PKS sudah memiliki Platform Kebijakan Pembangunan yang cukup komprehensif, namun belum diturunkan ke dalam program kerja lima tahunan, dan kemudian diturunkan lagi menjadi aktifitas-aktifitas yang terbagi habis di antara seluruh pengurus. Bahkan ditengarai struktur organisasi PKS yang sudah disusun belum menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan Platform Partai. Lebih lanjut, kelemahan pusat dalam menyediakan konsep-konsep membuat para kader

partai yang berkiprah sebagai pejabat publik, baik di daerah-daerah, maupun di berbagai Kementerian, seolah "terjun bebas" dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Seorang anggota MPP menggambarkan:

> "Kita harusnya sudah bicara soal pembangunan yang nggak bisa dilakukan orang lain ... Mestinya konsep ada di platform, tapi platform ini kan *how to*-nya harus di-*translate* ... **kita kan nggak punya ya konsep-konsep *how to* di lapangan yang profesional gitu ya** ... Ketika di Maluku Utara, ketika di Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu beda pasti di daerah yang baru. Belum lagi kita bicara Ristek, belum lagi bicara Departemen Pertanian. Ini masing-masing jadi terjun bebas dan membangun sendiri ... **Jadi partainya "kedodoran", "keteteran" gitu. Harusnya dia kan jadi dapur buat semua konsepnya**. Kita tu belum bisa gitu".

PKS harus membuktikan bahwa ia mampu mereformasi dirinya sehingga menjadi organisasi moderen sebelum berbicara keinginan mereformasi negara menjadi lebih baik. Hal ini sekaligus merupakan gugatan terhadap signifikansi kontribusi para profesional dan orang-orang muda yang ada di PKS dalam mendorong terjadinya reformasi tersebut.

Aspek transparansi sangat penting dalam penerapan manajemen moderen. Terkait dengan hal tersebut, penerapan pembuktian terbalik, bukan hanya untuk pejabar-pejabat publik eksternal, tapi juga para pejabat partai, perlu menjadi salah satu pertimbangan, karena bagaimanapun mereka memiliki akses terhadap sumber daya. Penerapan transparansi, khususnya terkait dengan keuangan, akan menghapuskan berbagai kecurigaan, sehingga akan mengurangi konflik-konflik yang ada selama ini, karena konflik-konflik tersebut sebagian besar berpusat pada akumulasi dan pengelolaan sumberdaya. Transparansi tersebut semakin mendesak mengingat PKS adalah Partai Kader. Sangat wajar jika kader bertanya dan menuntut penjelasan ketika melihat hal-hal yang menurut mereka tidak pada tempatnya. Bahkan dalam komunitas di mana seorang tokoh sangat menonjol sekalipun, publik tetap sangat mungkin bertanya tentang hal-hal yang ditampakkan oleh tokohnya. Seorang kader mencontohkan tentang Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad saw, yang pada saat menjadi Khalifah ditanya di forum terbuka tentang asal-muasal dari bahan pakaian yang dikenakannya, karena ditengarai ia menerima jatah yang lebih banyak dari rakyatnya. Ternyata anaknya menghibahka bagiannya kepada Umar karena

ayahnya bertubuh besar sehingga membutuhkan kain yang lebih banyak untuk membuat pakaian.

6.1.5. Kemampuan Menggerakkan Wilayah dan Daerah

Seorang mantan pengurus DPP periode lalu menyoroti kelemahan PKS yang cukup serius dalam menggerakkan wilayah dan daerah, "Secara umum DPW, DPC luar biasa, tetap *on the track* dan siap bekerja. Tapi kita tidak. ***We are not leading this troop***. **Kalau ada yang bisa *lead* potensi kita luar biasa sekali**, **tapi kita tidak mampu memanfaatkannya**". Kelemahan pusat dalam berperan membangun sinergi dengan wilayah dan daerah juga disebabkan oleh lambannya pusat menyelesaikan tugas yang strategis dan mendasar, yaitu menyiapkan konsep-konsep yang bisa menjadi rujukan bagi kiprah para kader yang bergerak di daerah. Seorang anggota MPP menuturkan, "**Harusnya ketika mereka terjun ke sana-sini, kita siapkan mereka dengan konsep** ... Ini kan udah menang Pilkada mana-mana nggak ada konsep gitu. Membangun daerah itu mau dikemanain". Berbagai potensi daerah, termasuk militansi dan loyalitas kader yang begitu kuat, akhirnya belum dapat didayagunakan dengan optimal, karena pusat belum siap menjadi fasilitator yang baik.

6.1.6. Kemampuan Komunikasi Publik

Seorang anggota Dewan dari PKS menggambarkan urgensi kemampuan komunikasi publik sebagai berikut, "Menurut saya **dalam politik itu yang namanya realisasi dari *delivery* kita itu lebih kecil artinya daripada sebuah upaya *perception building* melalui media**. *Whether you actually deliver or not, it's not important*". Secara umum, para kader PKS yang bertugas di ranah publik, terutama anggota Dewan, belum memiliki kemampuan komunikasi publik yang memadai. Dari sekitar 1500 anggota Dewan dari PKS di seluruh Indonesia, hanya sebagian kecil yang sudah baik dalam hal ini. Cukup banyak anggota Dewan dari PKS tersebut adalah ustadz yang sebelumnya mengajar mengaji atau men-*takwin* kader, sehingga tidak memiliki pengalaman komunikasi publik yang memadai. Di samping itu, sebagian besar anggota Dewan dari PKS belum mencapai *comfort*

level untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan Komisi mereka sendiri.

Bahkan ada di antara elit yang terkesan enggan tampil di publik. Seorang kader senior memberikan contoh, "Kalau Pak LHI tuh males banget tampil ke publik karena dia memang tidak terlalu piawai komunikasi publiknya". Secara umum kemampuan komunikasi publik para Presiden PKS masih kurang baik, berbeda dengan beberapa tokoh PKS yang lain, seperti AM, FH dan MS, yang mampu berbicara di muka umum dengan tangkas dan lugas, sehingga lebih disukai media. Di samping itu, masih ada elit PKS yang terkesan gamang dalam bersikap ketika harus tampil dalam sebuah *setting* yang berbeda dengan kesehariannya sebagai kader PKS. Kegamangan salah satu Menteri dari PKS ketika bersalaman dengan isteri salah seorang Kepala Negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia menjadi contoh yang disorot oleh beberapa informan.

Namun ternyata ada persoalan lain, yaitu gaya komunikasi publik kader tertentu yang terkesan keras dan emosional, sehingga dinilai tidak sesuai dengan jatidiri sebagai Partai Dakwah. Seorang kader senior menggambarkan:

> "**Ada seorang kader, sampe keriting lah wajahnya itu ya, kalau boleh dibilang keriting wajahnya, berdebat sampai uratnya keluar**. Saya akan katakan, anda, *antum* itu tidak sedang berdebat dengan orang di depan antum ... *Antum* sedang berdebat dengan publik. **Dan publik itu tidak mengerti isi dari yang *antum* bicarakan. Publik hanya mengerti sikap umum dari *antum*. Senyum misalnya**".

Kader senior tersebut membantah keras pandangan yang mengatakan tampilan publik yang terkesan kasar tersebut adalah arahan dari pimpinan partai terkait dengan kepentingan tertentu. Mungkin saja partai memang menugaskan seorang kader untuk meladeni pihak-pihak tertentu. Namun, pimpinan partai tidak memberikan arahan rinci bagaimana tugas tersebut mesti dilakukan, apalagi menyuruh menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Ia mengatakan, "Tidak ada wajah *antum* harus begini, dibengkokin, harus keriting, bikin sakit hati. Nggak ada itu. Siapa yang mendiktekan seperti itu?!" Lebih lanjut kader senior tersebut menegaskan, "**Perlu ada simbol-simbol. Pak Hidayat kan disukai orang karena simbol**. Dia bukan yang politikus ulung, tapi dari simbol itu".

6.1.7. Kecepatan Respon

Kelemahan lain yang membuat kualitas organisasi PKS belum optimal untuk menunjukkan kinerja terbaik adalah masih lambannya eksekusi. Hal ini terlihat antara lain dari realita sudah enam bulan dari Munas 2010, sudah hampir satu setengah tahun dari Pemilu 2009, *staffing* belum tuntas, dan program kerja partai belum selesai. Padahal DPW sudah menyelenggarakan Muswil, dan DPD sudah banyak yang menyelesaikan Musda.[3] Tentu saja mereka sangat memerlukan panduan arah kebijakan dari pusat.

Kurang responsifnya struktur partai terhadap berbagai tantangan yang ada sangat terkait dengan kualitas kader dan budaya yang melekat. Seorang kader menggambarkan hal tersebut dengan ilustrasi sebagai berikut:

> "Waktu saya di FH, training saya itu, saya dibantu salah satu mantan direktur Fortune. Bagaimana saya lihat orang kerja, ya di dia itu. Bicara apa aja, itu *sreett* jadi, *sreett* jadi. Wah ini orang kerja. Memang pantas Direktur di lembaga besar, Fortune kan. Dan kita tidak ditemui di itu".

Ia membandingkannya dengan kondisi para kader, "Ya Allah, *antum* tau kalo mau bikin proker itu? Lama. Bisa molor satu minggu lagi, bikin ini lagi, bikin ini lagi, jadi kerja mereka itu lama mikirnya". Artinya, kecepatan dan ketepatan eksekusi adalah kekuatan orang-orang di luar PKS yang dalam banyak kasus justru menjadi kelemahan para kader PKS.

6.1.8. *Staffing* Berbasis Kriteria Rasional

Proses *staffing*, pengisian jabatan-jabatan strategis, ditengarai masih merupakan kelemahan PKS saat ini. Secara khusus sebagian kalangan menyoroti jabatan Sekjen yang sudah dijabat oleh orang yang sama selama empat kali berturut-turut. Terdapat semacam kecocokan *chemistry* personal antara Ustadz Hilmi Aminuddin yang punya banyak pemikiran dan gagasan yang "melompat" dengan AM yang merupakan eksekutor yang efektif. Namun kemudian pola tersebut juga menurun ke bawah, di mana faktor kedekatan personal dengan para pengambil keputusan, khususnya *Murraqib 'Am* dan Sekjen, menjadi hal yang

[3] Posisi pada bulan Oktober 2010 pada saat informan yang terkait diwawancarai.

dominan dalam menentukan pengisian posisi-posisi dalam struktur partai. Seorang anggota MPP mengatakan:

> "**Siapa yang dikenal Ustadz Hilmi kemudian promosinya mudah. Yang dekat dengan AM juga** ... saya kenal SP[4] itu luar biasa sekali. *Intellectual capacity*, komitmen, dan secara publik juga, sedikit banyak di komunitasnyalah minimal, tapi sama sekali tidak... Beberapa Ketua Departemen, seperti Akh FA[5], ditarik ke MPP. Saya melihat di penyusunan itu kita tidak memiliki *grand design* yang bagus".

Walaupun dalam kultur Jemaah Tarbiyah para kader tidak mengejar jabatan, dan mereka dididik untuk siap ditempatkan di manapun, *staffing* yang dilakukan tanpa *grand design* yang jelas tersebut tentu saja akan berpengaruh pada tidak optimalnya kinerja.

Dominannya peran *Murraqib 'am* dan Sekjen tergambar pada konstelasi yang berperan dalam penyusunan *staffing* DPP PKS. AM, Sekjen, menggunakan *bargaining power*-nya untuk menempatkan kader-kader yang sepaham dengannya di posisi-posisi penting, termasuk memperbesar tim Sekretariat Jenderal. Di sisi lain, rasa hormat yang besar membuat Presiden Partai "mengamini" nama-nama pengurus yang diusulkan oleh *Murraqib 'Am.* Seorang kader senior menuturkan, "Tapi saya memberi catatan, gerombolan orang-orang yang dari Ustadz, bukan gerombolan, *ikhwah-ikhwah* yang dari Ustadz luar biasa bagusnya, tapi dia tidak ikut proyeksi, promosi, nominasi". Para kader memang memegang doktrin bahwa jabatan, apalagi jabatan di struktur jemaah/partai adalah amanah, dan meyakini bahwa seorang muslim yang baik tidak boleh meminta jabatan. Secara pribadi sebagian besar kader PKS pun tidak akan merasa diabaikan atau disingkirkan manakala tidak mendapatkan amanah di struktur partai, karena biasanya mereka memiliki kesibukan akademik, profesional, bisnis, dan lain-lain di luar partai. Namun demikian, dari sudut pandang organisasi, PKS-lah yang dirugikan jika *staffing* dilakukan dengan mengabaikan meritokrasi dan jenjang karir yang wajar, dan sebaliknya, lebih mengedepankan kedekatan hubungan pribadi, karena partai

[4] Laki-laki, alumnus S1 dari Fakultas Ekonomi UI dan *Master of Science* di bidang Akuntansi dari sebuah Universitas di negara jiran. Praktisi Ekonomi Syariah.

[5] Laki-laki, kader PKS di jenjang Kader Ahli. Entrepreneur, penggiat pendidikan dan pendiri JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu). Dalam kepengurusan DPP 2005-2010 menjadi salah satu Ketua Departemen di dalam lingkup Bidang Kesra.

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan SDM terbaik untuk mengisi berbagai pos strategis dalam strukturnya. Menarik untuk dicatat bahwa informan tersebut menggunakan kata-kata "gerombolan orang-orang yang dari Ustadz", walaupun kemudian ia meralat atau memperhalusnya menjadi "*ikhwah-ikhwah* yang dari Ustadz". Terdapat semacam kegusaran terhadap dominannya peran *Murraqib 'Am* dalam *staffing* kepengurusan sehingga jumlah orang-orang yang masuk karena preferensi Ustadz Hilmi ditengarai cukup signifikan.

Namun demikian, tidak semua pihak sependapat jika dikatakan bahwa preferensi dan kedekatan pribadi atau afiliasi kelompok dominan pengaruhnya dalam penentuan *staffing* kepengurusan PKS. Pengisian jabatan-jabatan struktural PKS di semua jenjang pertimbangannya sangat kompleks. Itulah yang menyebabkan mengapa hingga beberapa bulan pasca Munas 2010 *staffing* di DPP belum sepenuhnya tuntas. Yang sudah selesai diisi baru jabatan-jabatan yang berada di atas saja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut misalnya, komitmennya kepada jemaah, yang antara lain dilihat dari partisipasinya dalam *liqa* pekanan (*usrah* atau *halaqah*-nya), kontribusinya kepada partai dalam bentuk finansial maupun pemikiran, kondisi keluarganya, kiprahnya di masyarakat, dan lain-lain. Bahkan untuk kader perempuan diperiksa juga apakah yang bersangkutan "terkontaminasi" oleh pemikiran-pemikiran feminis. Di samping itu, ada pula pertimbangan memperluas proses pembelajaran. Contohnya, seorang anggota Dewan yang sebelumnya ditempatkan di komisi yang mengurus persoalan perempuan sekarang dipindahkan ke Komisi I yang disebut "komisi maskulin" karena mengurusi persoalan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Hal itu dimaksudkan agar para kader PKS belajar lebih banyak. Seorang anggota kader senior mengatakan, "**Kalau ada yang mengatakan dia di situ karena teman-teman si anu, kelompok faksi si anu, saya rasa itu tidak. Terlalu menggampangkan**".

Persoalan yang juga cukup serius adalah kurangnya kesinambungan kepengurusan DPP yang baru dengan periode sebelumnya. Seorang mantan pengurus DPP periode lalu menuturkan, "Banyak sekali pejabat struktural *ikhwah* yang ditunjuk, sementara Ketua Departemen yang lama tidak digunakan. Padahal kalau melihat hirarki, yang jadi Ketua Bidang sekarang sangat baik jika Ketua

Departemen sebelumnya. Sehingga dia benar-benar mengetahui". Di samping itu, terdapat perangkapan jabatan antara DPP dengan Fraksi PKS DPR RI. Hal ini disayangkan karena jabatan-jabatan di DPP dan di parlemen, memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, sehingga harus ditunaikan dengan fokus perhatian dan energi yang penuh. Secara lebih spesifik, DPP semestinya memikul tanggung jawab memikirkan kondisi para kader secara menyeluruh, menyangkut seluruh aspek kehidupan mereka, karena PKS bukan sekedar partai politik, tapi juga jemaah. Karena para kader telah berkomitmen meleburkan diri ke dalam jemaah ini, sebagai timbal baliknya jemaah ini harus memberikan perhatian penuh kepada para kadernya, dan porsi terbesar tanggung jawab tersebut berada di pundak DPP, sehingga mestinya amanah di DPP tidak dirangkap dengan tugas-tugas lain. Perangkapan tersebut juga diyakini berdampak kurang positif terhadap kinerja Fraksi PKS DPR. Hal tersebut di satu sisi menyebabkan DPP tidak dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kinerja Fraksi, dan di sisi lain sebagai pejabat publik para anggota parlemen dari PKS tidak dapat fokus dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perangkapan tersebut tidak perlu terjadi jika berbagai peran dan tugas yang ada didistribusikan secara lebih merata kepada para kader, karena sebenarnya sangat banyak kader yang memiliki kapasitas yang baik, namun tidak dikenal, atau kurang disukai, sehingga tidak dilibatkan.

Secara khusus, seorang perempuan kader senior menggarisbawahi pentingnya aturan yang membatasi masa jabatan kader PKS di suatu posisi untuk memastikan bahwa seluruh kader yang memenuhi syarat memiliki peluang yang sama untuk menempati posisi-posisi struktural tersebut, karena para kader di jenjang yang sama secara umum memiliki potensi dan kapasitas yang setara, termasuk dalam hal modal sosial maupun modal ekonomi, sehingga tidak ada alasan kader yang satu dipandang lebih mumpuni ketimbang yang lain untuk menempati berbagai jabatan strategis, baik di dalam maupun di luar partai.

Diperlukan pula kriteria yang jelas dan tertulis, yang diturunkan ke dalam sejumlah indikator yang rinci, tentang sosok yang dinilai layak untuk menduduki jabatan-jabatan struktural di PKS, maupun jabatan-jabatan publik yang dipercayakan kepada PKS, sehingga di kemudian hari tidak muncul berbagai rumor yang kontraproduktif. Kriteria tersebut, berikut seluruh indikatornya perlu

disosialisasikan secara terbuka, sehingga diketahui oleh segenap kader dan dijadikan rujukan bersama. Dalam konteks jabatan-jabatan struktural di partai, kriteria yang digunakan selama ini, yang menetapkan jenjang keanggotaan minimum untuk masing-masing jabatan tidak memadai, karena setiap jabatan memiliki indikator yang spesifik terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut yang tidak berhubungan langsung dengan jenjang keanggotaan.

Dalam konteks hubungan *patron-client* yang masih relatif kuat di PKS, adanya indikator yang baku, terukur, dan terbuka setidaknya memiliki dua nilai positif. Pertama, ia merupakan bentuk objektifikasi dari salah satu trilogi motto PKS, yaitu "profesional". Adanya standar yang baku dan terukur merupakan salah satu penjabaran yang paling mendasar dari profesionalisme. Kedua, hal ini sejalan dengan gagasan besar Islam substanstif yang gencar diusung oleh PKS belakangan ini. Khusus untuk pencalonan pejabat publik dari PKS, adanya indikator yang jelas akan membuat besar-kecilnya kontribusi finansial tidak lagi menjadi kriteria yang sangat menentukan.

6.1.9. Kemandirian Ekonomi

Secara umum para kader PKS belum memiliki kekuatan ekonomi yang memadai. Di samping itu belum terlihat adanya dukungan penuh dan konkrit dari struktur partai terhadap penumbuhan *entrepreneurship*, profesionalisme dan upaya-upaya memandirikan kader secara ekonomi. Kalaupun ada dukungan, sifatnya baru sebatas semangat dan wacana. Memang keberadaan *maisyah* yang memadai secara formal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam evaluasi kenaikan jenjang kader sebagai perwujudan dari *muwashafat qadirun alal kasbi.* Namun di sisi lain, dalam proses pembinaan kader belum diberikan substansi yang terkait dengan pengembangan *iqtishadi*, sehingga tidak adil jika hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi. Di samping itu, kadang-kadang sistem tidak memberikan ruang yang memadai bagi kader untuk berkiprah optimal sebagai pebisnis atau profesional. Seorang kader senior memberikan ilustrasi bahwa banyak *murabbi* atau *naqib* yang tidak memahami bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh anggota *liqa* mereka yang berbisnis. Para *entrepreneur*

itu kerap tidak dapat menghadiri *liqa* karena harus menangani transaksi yang tidak dapat ditunda, bertemu dengan pelanggan penting, bernegosiasi dengan calon investor, atau menangani pembayaran gaji karyawan mereka. Dalam beberapa kasus, ketidakpahaman *murabbi* atau *naqib* membuat kader yang bersangkutan dinilai tidak disiplin, sehingga terkendala dalam proses *taqwim*. Hal yang serupa terjadi pada *liqa* yang beranggotakan kader dengan profesi-profesi tertentu dengan karakteristik jadwal kerja yang khas, misalnya dokter. Sekali lagi, tidak semua *murabbi* atau *naqib* memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memberikan perlakuan yang tepat bagi kader-kader seperti ini.

Pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan internal PKS adalah pemimpin yang mampu membangun kekuatan ekonomi, namun dengan menjaga integritas. AKP Turki layak dijadikan perbandingan. AKP bisa kokoh dan tetap bersih karena membangun kekuatan bisnis. Seorang kader yang berprofesi sebagai *entrepreneur* mengatakan, "**Bersih, bersih. Duit-duit yang nggak jelas itu nggak ada. Karena mereka membangun kekuatan bisnis**". Ia juga memberikan contoh Menteri Luar Negeri dari AKP adalah pebisnis sukses. Namun sayangnya belum terlihat tanda-tanda yang signifikan bahwa perubahan ke arah itu akan muncul dalam waktu dekat ini di PKS. Belum adanya iklim yang kondusif dan dukungan penuh dari partai menjadi kendala yang serius.

4.1.10. Ketokohan Publik

Beberapa informan sependapat bahwa salah satu kelemahan PKS adalah belum mampu memunculkan tokoh yang bisa *leading* di publik eksternal. Sebenarnya HNW pernah memiliki peluang yang cukup terbuka untuk eksis di pentas nasional, namun partai tidak optimal dalam mendukung penokohan HNW. Hal ini ditengarai terkait erat dengan faksionalisasi dan friksi internal yang ada, mengingat HNW dipandang sebagai *icon* dari faksi idealis-konservatif yang berseberangan dengan faksi pragmatif-progresif, dan tidak memiliki kedekatan pribadi dengan *Murraqib 'Am.*

Di samping itu terdapat semacam perbedaan, tepatnya inkonsistensi, antara kriteria tokoh yang dianggap baik secara internal PKS dengan tokoh yang dianggap baik oleh publik eksternal. Akibatnya, para tokoh yang saat ini menempati posisi-posisi yang "mentereng" di internal PKS secara umum "bukan siapa-siapa" di publik. Sebaliknya, kader PKS yang tidak terlalu ditokohkan, atau tidak lagi memegang jabatan strategis di dalam, justru memiliki tempat tersendiri di publik eksternal.

Hingga saat ini PKS belum memiliki tokoh sekaliber Muhammad Natsir (Masyumi) yang sangat dipercaya oleh masyarakat dan mampu menunjukkan integritasnya sampai akhir hayat, atau Anwar Ibrahim (Partai Keadilan Nasional dan Barisan Alternatif, Malaysia). Padahal hingga sekarang masyarakat Indonesia masih menganut budaya paternalistik yang sangat mementingkan figur, sehingga untuk menang di ranah politik Indonesia diperlukan keberadaan tokoh yang mampu *leading* di publik. Demokrat dengan SBY, dan sebelumnya PDIP dengan Megawati hanya dua dari sekian banyak contoh yang ada.

Tabel 6.1
Ikhtisar Kualitas Organisasi PKS Pasca Pemilu 2004[6]

No	Aspek	Kondisi	Indikasi/Gambaran	Kaitan dengan Dinamika Internal
1	**Konso-lidasi**	Konsolidasi politik belum tuntas.	Platform partai belum diterjemahkan secara rinci untuk tiap bidang/area di mana kader berkiprah.	Dinamika internal yang menghangat ditengarai membuat konsolidasi jalan di tempat. Indikasinya antara lain, Platform Kebijakan Pembangunan PKS yang telah disusun dengan susah payah tidak banyak didayagunakan dan dijadikan rujukan.
		Konsolidasi organisasi belum dilakukan.	Belum ada kriteria yang jelas tentang penempatan kader-kader PKS di jabatan struktural partai dan jabatan publik.	
		Konsolidasi basis massa belum dilakukan.	♦ Belum jelas identitas PKS sebagai Partai Dakwah. ♦ PKS belum cukup dekat dengan ormas-ormas dan komunitas-komunitas Islam.	

[6] Data penelitian yang tersedia tidak cukup memadai untuk membuat perbandingan dengan kondisi kualitas organisasi PKS pada periode sebelum Pemilu 2004. Namun secara umum informan yang berafiliasi dengan kelompok *religious movement oriented* menganggap kualitas organsiasi PKS sebelum Pemilu 2004, di mana HNW menjadi Presiden Partai, relatif lebih baik dibandingkan kondisi sesudahnya. Sementara itu, informan yang berafiliasi dengan kelompok *political party oriented* cenderung bersikap ambigu dalam membandingkan kualitas organisasi PKS sebelum dan sesudah Pemilu 2004.

No	Aspek	Kondisi	Indikasi/Gambaran	Kaitan dengan Dinamika Internal
2	**Kinerja Kader Partai di Ranah Publik**	Kinerja para pejabat publik dari PKS belum memuaskan.	♦ Sulit untuk bersuara berbeda dari Pemerintah, karena berkoalisi. ♦ Sulit bersikap independen karena terkait dengan donatur-donatur. ♦ Belum mampu mengobjektifikasi nilai-nilai ideal-subjektif yang dianut di ranah publik. ♦ Belum mampu membawa perubahan yang khas yang signifikan. ♦ Belum optimal memberikan *deliverables*. ♦ Beberapa orang belum memiliki *skills* yang spesifik sesuai amanah yang diemban. ♦ Kemungkinan *abuse of power* di Kementerian tertentu.	Di satu sisi, menguat-nya pragmatisme, khususnya pragmatisme finansial membuat orientasi sebagian pejabat publik PKS adalah berburu *rente*, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk memberikan kontribusi finansial bagi partai. Di sisi lain, kinerja di ranah publik yang optimal sulit ditampakkan karena sebagian kader menempati posisi sebagai pejabat publik lebih karena faktor kedekatan afiliasi ketimbang kompetensi.
3	**Kualitas Elit Partai**	Kapasitas kepemimpinan dan manajerial belum memadai.	♦ Presiden Partai dan Sekjen tidak sinergis. ♦ Kelemahan Presiden dalam eksekusi kebijakan. ♦ Terserapnya Sekjen oleh peran-peran publik. ♦ Budaya memaklumi dan membenarkan kelemahan, bukan mengakui dan kemudian memperbaiki.	Faksionalisasi dan konflik internal kerap terbawa ke dalam hubungan profesional sebagai eksekutif partai sehingga sedikit-banyak mempengaruhi kinerja organisasi.
4	**Mana-jemen Moderen**	Prinsip-prinsip manajemen moderen belum diterapkan secara optimal.	♦ Belum terdapat keterkaitan yang solid antara Platform Partai dengan struktur organisasi dan program kerja. ♦ Pusat belum membekali para pejabat publik di berbagai lini dengan konsep-konsep untuk dirujuk. ♦ Kurangnya transparansi.	Kuatnya hubungan patron-klien yang oligarkis dan tertutup berseberangan secara diametral dengan prinsip transparansiyang merupakan "jantung" dari manajemen moderen.
5	**Sinergi dengan Wilayah dan Daerah**	Sinergi antara pusat dengan wilayah dan daerah belum optimal,	♦ Pusat belum optimal berperan mengarahkan wilayah dan daerah. ♦ Pusat lambat dalam menyelesaikan konsep-konsep yang bisa menjadi rujukan wilayah dan daerah. ♦ Pusat belum mampu menjadi fasilitator.	Faksionalisasi PKS merupakan fenomena elit di pusat, yang membuat sebagian elit disibukkan dengan berbagai manuver untuk memperkuat posisi objektif mereka di arena.
6	**Komuni-kasi Publik**	Kompetensi para pejabat publik dari PKS dalam berkomunikasi belum baik.	♦ Sebagian (besar) anggota DPR dari PKS belum nyaman berbicara tentang komisi mereka sendiri. ♦ Presiden PKS saat ini belum nyaman dan piawai tampil di publik. ♦ Sebagian elit PKS masih gamang dalam persoalan persoalan-persoalan fikih ketika tampil di publik. ♦ Politisi PKS ada yang tampil dengan gaya komunikasi politik yang tidak sesuai dengan citra Partai Dakwah.	Cara berkomunikasi sebagian elit PKS di publik, disadari atau tidak kerap menunjukkan indikasi adanya faksionalisasi, bahkan konflik internal yang menghangat.

No	Aspek	Kondisi	Indikasi/Gambaran	Kaitan dengan Dinamika Internal
7	**Kecepatan Respon**	Respon dan eksekusi masih berjalan lambat.	♦ Lambatnya penuntasan penyusunan staffing dan program kerja di pusat. ♦ Masih lemahnya kemampuan sebagian kader dalam menyusun dan mengeksekusi program.	Tarik-menarik kepentingan kelompok ditengarai merupakan salah satu penyebab respon yang lamban ini.
8	**Staffing**	Staffing belum sepenuhnya berdasarkan pertimbangan profesional dan rasional	♦ Ada pejabat partai yang sudah terlalu lama berada di satu posisi. ♦ Kedekatan hubungan dan kesesuaian *chemistry* dengan pengambil keputusan masih menjadi pertimbangan penting dalam pengisian jabatan strategis. ♦ Sejumlah SDM yang unggul tidak terserap ke dalam struktur. ♦ Kurangnya kesinambungan dengan kepengurusan sebelumnya. ♦ Perangkapan jabatan antara DPP dengan Fraksi PKS DPR RI.	Kedekatan hubungan pribadi dan kesamaan afiliasi kelompok/faksi ditengarai cukup signifikan mewarnai keputusan penempatan para kader di jabatan-jabatan struktural partai maupun jabatan-jabatan publik.
9	**Kemandirian Ekonomi**	Para kader PKS belum cukup mandiri secara ekonomi sehingga tidak mudah menjaga citra bersih di publik.	♦ Pengembangan *entrepreneurship* dan iklim usaha belum mendapatkan perhatian yang memadai dari struktur partai. ♦ Sistem *tarbiyah* belum "ramah" terhadap kewirausahaan dan profesionalisme.	Dominannya posisi kelompok *political party oriented* membuat pragmatisme finansial yang bertumpu para perburuan rente menjadi fokus yang mengaburkan upaya-upaya membangun kemandirian ekonomi kader.
10	**Ketokohan Publik**	Belum ada tokoh PKS yang mampu *leading* di publik eksternal.	♦ Tokoh PKS yang punya modal yang memadai, HNW, tidak digarap dan didukung secara optimal oleh Partai. ♦ Inkonsistensi antara kriteria internal PKS tentang tokoh yang baik dengan tuntutan "pasar", sehingga tokoh internal adalah *nobody* di mata publik. ♦ Ada elit PKS yang tampil dengan gaya yang bertentangan dengan harapan publik.	HNW tidak mendapatkan dukungan penuh untuk ditampilkan sebagai tokoh publik karena ia bukan merupakan bagian dari faksi/kelompok dominan.

6.2. Kiprah PKS dalam Pemilukada: Kasus Kabupaten X

PKS saat ini menginstruksikan para kadernya untuk ikut serta secara aktif dalam pemilukada di daerah masing-masing, baik mengusung pasangan calon dari PKS sendiri, ataupun mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai lain sebagai upaya untuk merebut sumber daya agar PKS bisa tumbuh lebih cepat. Dari ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS diperoleh gambaran proses penentuan calon yang akan diusung/didukung oleh PKS. Proses pengambilan keputusan untuk terjun dalam sebuah pemilukada di Kabupaten/Kota, baik

mengusung maupun mendukung pasangan calon, dimulai dari usulan yang datang dari DPD yang bersangkutan. DPD biasanya mengajukan lebih dari satu nama dengan menyertakan pertimbangan masing-masing. Selanjutnya DPW akan mempertimbangkan usulan tersebut. Dalam proses itu bisa saja terjadi perbedaan antara DPD dengan DPW, di mana calon yang diunggulkan oleh DPD justru tidak diunggulkan oleh DPW, atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi proses diskusi antara kedua jenjang kepengurusan tersebut hingga mencapai kesepakatan pasangan calon yang diusung/didukung oleh PKS di daerah tersebut.

Tidak tertutup kemungkinan munculnya suara-suara yang berbeda dari keputusan partai di kalangan Anggota Pendukung dan simpatisan, karena mereka tidak berada dalam kendali partai. Suara-suara yang berbeda tersebut biasanya muncul dalam konteks PKS mendukung pasangan calon yang diusung partai lain. Sedangkan ketika PKS mengusung calon dari kalangan kadernya sendiri, perbedaan tersebut biasanya tidak terjadi. Hal inilah yang kerap ditangkap oleh pihak eksternal, atau media, sebagai kurang solidnya PKS dalam pemilukada. Namun diyakini bahwa seluruh kader yang sudah berada di jenjang Anggota Inti selalu solid mendukung keputusan partai dan tidak akan bersuara berbeda.

Namun proses yang berlangsung di lapangan tidak semulus yang digambarkan di atas. Gejolak-gejolak tetap saja muncul. Menurut penuturan seorang pengurus DPP, seorang kader PKS di Kalimantan dipecat dari Partai karena berkeras maju di Pemilukada Gubernur, walaupun partai sudah melarangnya. Sedangkan dari informan lain peneliti memperoleh informasi, seorang kader PKS yang menjadi anggota DPRD di Kabupatennya berkeras maju sebagai Calon Wakil Bupati, berpasangan dengan Calon Bupati yang diusung partai-partai lain, padahal PKS telah memutuskan mengusung kader lain sebagai Calon Bupati. Sebagai konsekuensinya, kader tersebut diberhentikan dari PKS.

Keputusan mengusung calon dari kader PKS sendiri atau mendukung calon yang diusung oleh partai lain diambil dengan mempertimbangkan kekuatan suara PKS di daerah tersebut dan konsekuensi pendanaan yang diperlukan untuk memenangkan pemilukada yang bersangkutan. Ketua MPP PKS mengatakan:

> "Katakanlah ada suatu pilkada di daerah. Kita tahu bahwa pilkada bukan momentum yang murah. Kadang ya sudah, kalau kita nggak sanggup dari segi pendanaan ya kita nggak ikut. **Tapi kita punya cukup potensi, katakanlah dari segi kursi cukup, kemudian akhirnya kalau gitu ya sudah siapa calon yang mungkin bisa melakukan pembiayaan**".

Pungutan biaya dukungan tersebut juga dikenakan pada calon yang merupakan kader PKS. Hal ini dialami misalnya oleh seorang kader yang maju sebagai calon Kepala Daerah di kampung halamannya pada tahun 2005 dan 2010. Dalam Pemilukada 2010 ia diminta menyetorkan dana ratusan juta rupiah untuk dapat diusung oleh PKS. Sementara partai-partai lain yang juga mendukungnya meminta setoran yang lebih kecil dari yang diminta PKS. Dalam pandangan seorang pejabat teras PKS, keharusan membayar biaya dukungan tersebut, termasuk bagi kader internal, adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari logika pemenangan calon dalam pemilukada. Kader yang maju dalam pemilukada tersebut dapat memahami adanya kewajiban penyediaan dana oleh calon. Ia juga setuju bahwa pemimpin publik itu harus kuat secara finansial. Namun ia tidak sependapat jika setoran yang diminta jumlahnya sedemikian besar, karena uang mestinya tidak menjadi satu-satunya faktor yang mengarahkan keputusan politik.

Struktur PKS di daerah-daerah lain pun rata-rata memberlakukan ketentuan yang sama, walaupun tidak seluruhnya. Ada juga calon Kepala Daerah yang tidak punya dana namun tetap diusung karena yang bersangkutan memiliki ketokohan yang sangat kuat, sehingga besar kemungkinan akan menang. Hal ini terkait dengan kebijakan baru yang diambil PKS untuk menyebarkan peran *fundrising* ke struktur partai di daerah-daerah. Ini yang dimaksudkan oleh seorang elit PKS ketika ia mengatakan, "**Daerah sekarang ini rata-rata mempunyai sumber daya yang bagus. Karena ide tentang sumber daya itu sudah tersosialisasi dengan baik**". Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana peran *fundrising* sifatnya terpusat, digarap oleh Sekjen dan timnya. Namun kebijakan baru tersebut tidak mengurangi akses Sekjen terhadap sumber-sumber dana, karena selama ini yang bersangkutan telah berhasil membangun jaringan yang kokoh dan meraih kepercayaan dari para penyumbang karena ia berhasil mengeksekusi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.

Pengalaman kader PKS yang terjun di Pemilukada 2005 dan 2010 tersebut bisa memperluas pemahaman kita tentang dinamika internal PKS. Ketika mengikuti Pemilukada tahun 2005 ia merasa tidak menghadapi banyak persoalan. Pusat tidak ikut campur tangan. Beberapa gesekan kecil terjadi dengan pribadi-pribadi yang punya kepentingan. Ketika itu PKS praktis belum menaruh perhatian pada pemilukada. PKS masih fokus pada parlemen, dan belum menyadari bahwa *resources* sesungguhnya berada di eksekutif, bukan di legislatif.

Ada dua hal yang mendorong kader tersebut maju ke pemilukada. Pertama, ia kurang sependapat dengan salah satu kredo PKS, "dakwah parlemen". Baginya hal tersebut tidak realistis. Parlemen tidak punya kewenangan eksekusi, sehingga bagaimana akan berdakwah ke masyarakat melalui institusi tersebut, terlebih lagi ketika jumlah kursi PKS masih relatif sedikit, sehingga mempengaruhi kebijakan pun tidak mudah untuk dilakukan. Parlemen memang penting, tapi terlalu berfokus pada parlemen dengan melupakan eksekutif dan birokrasi tidak proporsional dan tidak realistis. Kedua, ia mengakui dirinya punya kecenderungan pribadi yang lebih menyukai peran-peran yang bisa mengeksekusi suatu keputusan atau kebijakan, tidak sekedar berwacana atau menyusun kebijakan. Walaupun hanya diusung oleh PKS tanpa dukungan partai-partai lain, capaian kader tersebut dalam Pemilukada 2005 tidak mengecewakan. Ia berhasil menempati peringkat kedua dari lima pasang calon yang berlaga.

Sekitar tahun 2006-2007 PKS mulai menyadari strategisnya eksekutif dan birokrasi karena di sanalah sesungguhnya sumber daya itu berada. Apalagi di di daerah di mana kader tersebut mengikuti pemilukada terdapat perusahaan multinasional yang tentunya punya kepentingan terhadap siapa yang menjadi Kepala Daerah, sehingga bersedia membayar mahal untuk mengamankan kepentingannya. Implikasinya, ia merasa di Pemilukada 2010 terjadi tarik-menarik dan gesekan-gesekan yang signifikan, baik dengan struktur partai di daerah, maupun dengan individu-individu dari pusat yang turut bermain. Pada awalnya PKS tidak mengusungnya karena sudah menyiapkan, bahkan memutuskan, kader lainnya yang ketika itu menjadi anggota DPRD setempat untuk dicalonkan sebagai Wakil Bupati, dengan harapan akan "dilamar" oleh *incumbent.* Sejak awal kader tersebut sudah memprediksi bahwa hal itu tidak

mungkin terjadi, karena kapasitas ketokohan calon Wakil Bupati tersebut belum memadai. Di samping itu, ia tahu bahwa Bupati *incumbent* memiliki ikatan yang sulit diputuskan dengan Wakilnya saat itu. Prediksi tersebut kemudian terbukti. Bupati *incumbent* memang tidak mengambil calon dari PKS tersebut sebagai calon Wakilnya.

Kader tersebut tetap memutuskan untuk mencalonkan diri. Sejumlah partai memberikan dukungan, sehingga persyaratan dukungan minimum sudah terpenuhi. Namun demikian, sebagai kader PKS ia terus berjuang untuk mendapatkan dukungan partainya. Akhirnya, setelah melewati proses yang alot dan berliku, PKS memutuskan mengusungnya sebagai calon Bupati, dan membatalkan keputusannya untuk mencalonkan kader lain sebagai Wakil Bupati. Namun calon Wakil Bupati tersebut tetap bersikukuh untuk maju, berpasangan dengan calon Bupati yang lain, sehingga PKS menjatuhkan sanksi pemecatan.

Dalam Pemilukada 2010 kandidat Bupati dari PKS tersebut akhirnya kalah dari *incumbent*. Namun ada dinamika yang menarik untuk dicatat. Struktur PKS pusat memang tidak turut campur dalam dinamika yang terjadi, namun beberapa individu di pusat ternyata ikut bermain untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Salah satu tokoh muda PKS, putra daerah setempat, yang ketika itu menjadi Pengurus DPP berbicara langsung kepadanya menyampaikan permohonan maaf tidak mendukung dirinya dan memilih mendukung *incumbent* karena ia yakin *incumbent* akan kembali menang. Belakangan hal tersebut dikonfirmasi oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setempat. Kader tersebut sangat menyayangkan hal itu. Apalagi tokoh yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi apapun dari partai, padahal yang dilakukannya jelas-jelas menentang keputusan partai. Dengan geram kader tersebut mengatakan, "**Kalau semua dasarnya pragmatis, terus apa semua partai ini?! Nggak bisa begitu hidup. Tetap harus ada prinsip-prinsip yang harus kita sepakati bersama**".

6.3. Membaca Tiga Pemilu yang Lalu dan Meneropong Pemilu 2014

6.3.1. Membaca Tiga Pemilu yang Lalu

Kapasitas PKS dalam melakukan tindakan kolektif, sebagai resultan dari kualitas kader-kadernya, kualitas organisasinya, kualitas dan gaya kepemimpinan dari para pemimpinnya, serta budaya organisasinya, pada akhirnya akan bermuara pada capaiannya dalam pemilu. Dalam Pemilu 1999, ketika masih bernama PK, partai ini meraih 1.436.565 suara (1,4%), lalu dalam Pemilu 2004, setelah menjadi PKS, memperoleh 8.325.020 suara (7,34%), dan dalam Pemilu 2009 mendapatkan 8.206.955 suara (7,88%).[7] Ketika membaca kinerja partai yang didirikan Jemaah Tarbiyah di Pemilu 1999, 2004 dan 2009, ada empat pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana PK/PKS dan para kadernya melihat kinerja partai pada Pemilu 2004 dibanding Pemilu 1999? Pertanyaan kedua, bagaimana PKS dan para kadernya melihat kinerja partai pada Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004? Pertanyaan ketiga, mengapa kinerja PKS di Pemilu 2009 tidak mengalami lompatan jika dibandingkan dengan Pemilu 2004? Pertanyaan keempat, mengapa dalam Pemilu 2009 terjadi pergeseran basis dukungan pemilih terhadap PKS, di mana jumlah suara PKS di kota-kota besar yang sebelumnya menjadi basis pemilihnya menurun, sementara jumlah suara PKS di daerah dan pelosok meningkat?

Tabel 6.2
Ikhtisar Pandangan tentang Lonjakan Suara PKS di Pemilu 2004 dibandingkan Suara PK di Pemilu 1999

No	Pandangan
A	**Kinerja Internal dan Diferensiasi PKS**
1	*Brand image* PKS sebagai partai yang "bersih dan peduli".
2	Kepemimpinan dan soliditas tim.
3	Ketokohan HNW di pentas politik nasional.
4	Motivasi internal yang tinggi untuk lolos dari *treshold.*
B	**Kondisi Eksternal**
1	Kejenuhan masyarakat terhadap kinerja partai-partai lama, termasuk pemenang Pemilu 1999.
2	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap PKS sebagai partai yang punya integritas dan membawa pembaharuan.

[7] Diolah dari www.kpu.go.id.

Dalam membandingkan kinerja PKS dalam Pemilu 2004 dengan PK dalam Pemilu 1999, "suara resmi partai", sebagaimana terdapat dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS, menisbatkan lompatan prestasi tersebut pada diferensiasi yang ditunjukkan oleh PKS dalam bentuk pembuktian slogannya ketika itu, "bersih dan peduli", yang diklaim bukan saja telah menjadi *brand image* (citra diri), melainkan juga *specific knowledge* (penciptaan nilai dan penyebaran manfaat). Dalam hal ini dikatakan:

> "**Slogan 'Bersih dan Peduli' yang dicanangkan PK Sejahtera menjelang Pemilu 2004 mengantarkan partai ini pada perolehan suara spektakuler**. Dari semula hanya 1,5 persen pada Pemilu 1999 melonjak lima kali lipat menjadi 7,5 persen sehingga menjadikannya partai Islam paling fenomenal. Ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 'Bersih dan Peduli' bukan semata slogan, tapi kristalisasi bukti-bukti di lapangan sejak partai ini berdiri tahun 1998. **'Bersih dan peduli' dengan mudah diatribusikan kepada PK Sejahtera karena memang nilai-nilai itu dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat**". (MPP PKS, 2008: 56)

Pemilu 1999 adalah masa yang sangat sulit sebagai *new comer* karena publik belum mengenal PK, sehingga partai ini dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Dukungan logistik pun sangat minim. Para kader harus menyediakan segala sesuatunya sendiri,sehingga doktrin *sunduquna juyubuna,* sumber dana kami adalah saku-saku kami sendiri, sangat terasa. Seorang informan melihat bahwa tahun 1999 publik masih berada dalam situasi euforia demokrasi, sehingga mereka belum bisa menilai partai-partai yang berlaga di pemilu secara objektif. Ketika itulah PK masuk dan mulai bermain di arena politik Indonesia.

PK tidak berhasil melewati *electoral treshold.* Realita tersebut cukup memukul para kader Jemaah Tarbiyah, namun faktor militansi yang sangat kuat membuat motivasi para kader dapat dibangkitkan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Pada 20 April 2002 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dideklarasikan oleh 54 orang deklarator dengan Almuzammil Yusuf sebagai Ketua. Setelah itu PK melebur ke dalam PKS, di mana Dr. Hidayat Nurwahid yang sebelumnya Presiden PK didaulat menjadi Presiden PKS.

Dalam Pemilu 2004 PKS menjadi "barang baru" yang unik, sehingga mendapatkan perhatian publik, bahkan dukungan yang kian membesar. Hal itu antara lain karena kerinduan publik terhadap sesuatu yang baru dan berbeda dari

para pelaku politik Indonesa masa lalu yang dalam pandangan mereka sudah tidak bisa diharapkan. Masyarakat sudah punya pengalaman dengan partai-partai lama, termasuk PDIP, pemenang 1999 yang tidak jelas prestasinya selama memerintah. PKS, bersama Demokrat yang masuk tahun 2004, menjadi *rising stars* di Pemilu 2004. PKS mencatat kemenangan di kota-kota besar yang "melek politik", seperti Jakarta, Bandung, dan Depok.

Seorang anggota MPP menggambarkan perbedaan situasi 2004 dibandingkan 1999 sebagai berikut:

> "2004 karena rakyat mengharapkan suatu yang baru mereka yang mendorong kita. Jadi dukungan itu besar. kita di-*support* dari banyak hal, anggaran, dana untuk kampanye bahkan boleh dihitung itu ngeluarin duit sedikit banget untuk kampanye ... semua koran itu mendukung kita, pokoknya PKS *everyday*".

Dengan kata lain, dalam Pemilu 2004 PKS berada di tempat dan waktu yang tepat, di mana citra yang ditampilkan PKS, antara lain dengan motto "bersih dan peduli" cocok dengan ekspektasi masyarakat tentang perubahan. Senada dengan itu itu, kader lain mengatakan, "**Kita belum punya *track record* buruk ... Kesederhanaan, komitmen, dan semacamnya.** Itu kan baik. Yang kedua, pada waktu itu juga situasi jengah dengan partai lain juga cukup tinggi, karena masih sebel dengan era reformasi kan". Sejumlah faktor internal, di antaranya kepemimpinan eksekutif puncak partai, peran Ustadz Hilmi, soliditas tim yang berjibaku bersama-sama untuk lolos *treshold*, dan kondisi psikologis kader yang sangat nyaman dengan jemaah/partai, juga sangat mendukung.

Namun seorang informan tidak setuju dengan pendapat beberapa informan lain bahwa HNW yang menjadi Presiden PKS ketika itu besar perannya terhadap lompatan suara PKS dari 1999 ke 2004. Menurutnya, lompatan tersebut juga bukan karena PKS memiliki kinerja publik yang luar biasa dalam kurun waktu 1999-2004, melainkan semata-mata karena publik tidak punya pilihan lain. PKS dilihat sebagai harapan, partai yang masih punya integritas. Sementara integritas adalah sesuatu yang unik di pasar politik Indonesia, sehingga PKS menjadi *different*, dan karenanya "dibeli" orang.

Lalu bagaimana PKS dan para kadernya melihat kinerja mereka di Pemilu 2009 jika dibandingkan dengan Pemilu 2004? Seorang petinggi partai mengatakan, "**kita tetap melangkah tapi tidak melompat**". Selepas Pemilu Legislatif 2009 beredar SMS *bayanat* dari TPPN (Tim Pemenangan Pemilu Nasional) yang diketuai oleh AM, Sekjen PKS. Inti SMS tersebut mengajak pada kader untuk bersyukur menerima hasil yang ditetapkan Allah untuk PKS atas kerja kerasnya di Pemilu 2009 yang lalu, di mana PKS berhasil mencatat kenaikan suara, walaupun tidak besar, dan PKS merupakan satu-satunya partai yang berhasil mengatasi "tsunami Demokrat". Menarik untuk dicatat bahwa penjelasan tersebut hanya menyoroti perolehan suara PKS dalam angka prosentase yang naik sedikit dari 7,34% tahun 2004 ke 7,88% tahun 2009, namun tidak menyinggung jumlah pemilih yang turun dari 8.325.020 suara tahun 2004 menjadi 8.206.955 suara tahun 2009. Penjelasan tersebut dapat dipahami sebagai bahasa publik yang dikeluarkan untuk tetap menjaga semangat para kader. Namun bisa juga dibaca sebagai gambaran kecenderungan menciptakan *excuse*, sulit mengakui kesalahan, dan suka mencari pembenaran atas kekurangan, yang ditengarai oleh seorang kader melekat pada budaya Jemaah Tarbiyah.

Sebaliknya seorang kader senior yang ikut mendeklarasikan PK menolak jika hasil Pemilu 2009 disebut sekedar stagnan. Sebagai Partai Dakwah, ukuran yang valid dari kinerja PKS adalah penambahan jumlah pemilih yang mencerminkan peningkatan jumlah orang yang bersimpati terhadap dakwah yang dilakukan PKS, bukan prosentase *popular votes* maupun jumlah kursi yang berhasil diraih. Ia menegaskan, "**Jadi kalau yang disebut prestasi sebagai Partai Dakwah itu seharusnya tambah suara itu** ... Persoalan kursinya lebih banyak itu bukan prestasi. Itu diuntungkan oleh sistem hitung-hitungan ... Bukan hasil kerja kita. Bukan prestasi kita".

Tabel 6.3
Ikhtisar Pandangan tentang Kinerja PKS
dalam Pemilu 2009

No	Pandangan
A	**Netral dan Positif**
1	PKS tetap melangkah dengan baik, tapi tidak melompat, karena organisasi PKS mekar sedemikian cepat, sehingga PKS disibukkan oleh konsolidasi internal dan penetrasi ke pelosok-pelosok yang belum terjangkau pada periode sebelumnya.

No	Pandangan
2	Kinerja PKS dalam Penilu 2009 patut disyukuri, karena PKS merupakan satu-satunya partai yang tidak menjadi korban "tsunami Demokrat".
B	**Negatif**
1	Kinerja PKS menurun, karena kriteria keberhasilan Partai Dakwah adalah jumlah suara orang yang bersimpati, bukan prosentase suara atau jumlah kursi.
2	Suara PKS menurun, karena hilangnya suara dari generasi awal yang sangat memahami dan menaruh harapan pada PKS.

Terdapat beberapa alternatif penjelasan mengenai tidak adanya lompatan kinerja PKS dalam Pemilu 2009 dibandingkan Pemilu 2004. Seorang elit partai berpendapat, di Pemilu 2009 PKS tidak dapat mencetak kuantum, lompatan, seperti Pemilu 2004 karena organisasinya mekar terlalu cepat, sehingga PKS disibukkan dengan penataan dan perapihan organisasi. Di samping itu, PKS juga sedang melakukan penetrasi secara intensif ke desa-desa. Itulah yang membuat suara PKS di kota-kota besar menurun, sementara di pelosok-pelosok bertambah.

Di sisi lain, diyakini bahwa kader-kader PKS telah bekerja secara maksimal, namun partai pemerintah memanfaatkan berbagai "senjata" berupa iming-iming uang atau ancaman yang membuat pemilih partai-partai lain beralih kepadanya. Seorang kader senior memberikan contoh:

> "Kita sudah pelihara ini ya komunitas ini dari istilahnya empat tahun yang lalu gitu ya, kita bikin bakti sosial, pengajian, tapi pada hari H nya yang memilih kita hanya berapa orang di situ. Setelah kita selidiki kenapa, karena mereka dapet uang besar ... Atau juga ditakut-takuti. Kalau misalnya nggak milih ini nanti BOS dicabut. Sekolah bayar lagi. Itu tidak *money politics*, tapi ditakut-takuti. Nanti Jamkesmas nggak ada lagi, PNPM mandiri nggak ada lagi. Jadi mereka ketakutan sekali kalau nggak memilih ini gitu".

Walaupun tidak+ menafikkan kemungkinan kontribusi persoalan-persoalan internal, seperti adanya kader atau mantan kader yang tidak puas, namun diyakini dampaknya tidak besar, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa yang signifikan.

Seorang pimpinan organ PKS di pusat melihat stagnasi suara PKS di Pemilu 2009 terjadi karena PKS belum cukup mampu mengatasi budaya politik

Indonesia yang sudah *embodied* melalui proses internalisasi dan sosialisasi selama puluhan tahun sebelumnya. Ada dua hal yang merupakan inti dari budaya politik tersebut, yaitu keterpukauan pada sosok atau figur tertentu, dan alasan memilih yang pragmatis, yaitu siapa yang memberi paling banyak pada saat-saat terakhir. Bahkan ditengarai bahwa budaya politik tersebut juga melanda para pemuka agama yang kemudian dirujuk oleh masyarakat umum. Kuatnya peran figur sebenarnya sudah terlihat sejak Pemilu 2004, di mana PKS dan Demokrat meraih jumlah suara yang hampir sama, padahal PKS setidaknya sudah bekerja lima tahun sejak terjun dengan nama PK di Pemilu 1999, sedangkan Demokrat baru didirikan untuk mengikuti Pemilu 2004. Dalam Pemilu 2009, di samping faktor figur SBY, *leverage* Demokrat meningkat lagi dengan pengerahan berbagai sumber daya yang sudah dimobilisasi selama lima tahun pemerintahan SBY periode pertama, seperti pengangkatan PNS, penyaluran BLT, dan lain-lain.

Sementara itu, seorang kader senior yang merupakan deklarator PK dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap teori "tsunami Demokrat". Kalaupun ada pengaruhnya terhadap kinerja PKS dalam Pemilu 2009, faktor tersebut sifatnya tidak mendasar, sehingga pengaruhnya juga tidak signifikan. Penyebab mendasar dari kondisi itu adalah perubahan perilaku politik dan ideologi yang cair, yang muncul dalam perubahan gaya hidup kader.

Sejalan dengan itu, seorang mantan petinggi partai dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa perilaku beberapa kader PKS, khususnya perilaku politik mereka di ranah publik yang dinilai kurang simpatik, punya sumbangan yang signifikan terhadap tidak optimalnya kinerja PKS di Pemilu 2009. Apalagi publik sudah punya ekspektasi sendiri tentang perilaku kader-kader PKS sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah. Ia memberikan ilustrasi dengan membandingkan SBY dengan Amien Rais yang sama-sama orang Jawa, namun SBY lebih bisa diterima publik karena lebih menjaga pakem-pakem Jawa dalam berkomunikasi ketimbang Amien Rais. Di samping itu SBY juga tidak menampakkan kemewahan ketika tampil di publik. Ia menuturkan, "Walaupun juga dari segi kekayaaanya dia sedikit berada ... Tapi dari segi tampilannya kan, tidak menampilkan ... Tidak ada glamor-glamor, dandanan apa. **Cincinnya berjajar tiga, jamnya rolex,** nggak ada. Jadi orang itu suka. Dia memahami

majority karakter". Jika kita cermati, bagian yang ditebalkan pada kutipan di atas adalah gambaran tampilan fisik beberapa kader PKS di publik yang kerap disorot oleh beberapa kalangan. Tokoh PKS ini juga tidak dapat menerima argumentasi beberapa kader yang mengatakan tidak ada yang salah dengan menunjukkan kekayaan atau kemewahan, atau argumentasi yang mengatakan bahwa tampilan fisik yang mewah tersebut sekadar upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam konteks ini ia menggugat,"Publik itu senang dengan pemimpinnya yang sederhana, ... merendahkan diri ... Partai itu meraih simpati publik ... Kalau nggak siap-siap aja ditinggalkan ... **Apakah orang-orang ini mengerti atau tidak kalau dia dilihat publik gagal secara karakter**".

Di samping itu, diyakini pula bahwa manuver beberapa kader PKS di luar ketetapan yang digariskan Majelis Syura juga berdampak pada kinerja partai di Pemilu 2009, karena membuat publik, bahkan para kader di akar rumput, bingung dalam memahami PKS. Dengan kata lain, manuver tersebut telah mendistorsi *brand image* dan *specific knowledge* PKS di mata publik internal dan eksternal. Dengan geram dan nada yang tinggi ia menyoroti perilaku-perilaku yang tidak sinergis tersebut, "Untuk apa kita menyusun Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera, ada *Platform* segala macem. Bacalah itu. **Jangan orang bikin ini, *antum* bikin lagi sesuatu yang aneh.** Mungkin menarik tapi ngaco gitu. Maksudnya dari komunikasi publiknya ngaco gitu". Tanpa menghilangkan rasa syukurnya atas capaian PKS sebesar 7,88% suara di Pemilu 2009, ia menegaskan bahwa jika tidak banyak "angka minus" dari perilaku sebagian kader PKS di publik, ia yakin PKS bisa meraih setidaknya 10%-12% suara.

Seorang mantan pengurus DPP juga menunjuk kelemahan internal sebagai biang keladi tidak cemerlangnya prestasi PKS di Pemilu 2009, walaupun dengan analisis yang berbeda. Ia menegaskan, "**Kita secara internal tidak dapat me-*manage* diri dengan lebih baik. Kita tidak mampu mengoptimalkan peluang-peluang politik yang ada**. Dan itu lagi-lagi akan sangat terkait dengan tadi, kemampuan *ikhwah* yang dapat amanah untuk melaksanakan tugasnya di level pimpinan". Analisis tersebut menghubungkan stagnasi capaian PKS di Pemilu dengan minimnya sosok-sosok kader PKS yang mampu berperan optimal di jabatan-jabatan publik, serta masih rendahnya kualitas organisasi dan kualitas

kepemimpinan para tokoh PKS, khususnya yang berkiprah di pusat sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ditengarai pula bahwa kekalahan PKS dari Demokrat di Pemilu 2009 karena PKS tidak membangun dan mendayagunakan tokohnya dengan optimal, padahal dalam hal ini PKS memiliki modal yang cukup baik. Sebaliknya, kemenangan Demokrat adalah karena kecerdasan strategi penokohan SBY. PKS punya tokoh yang relatif sama, yaitu HNW. Di 2004 *starting point* HNW dan SBY sama-sama *new comers* yang cemerlang. Tapi SBY dapat mengkapitalisasi modal sosialnya, sedangkan PKS dan HNW tidak mampu berbuat serupa. Bahkan ditengarai bahwa HNW dapat menjadi Ketua MPR tahun 2004 lebih banyak karena kapasitas pribadinya, bukan karena dukungan partai. Dengan kata lain, dukungan PKS terhadap tokohnya ini terkesan "setengah-setengah." Kondisi itu sangat disayangkan karena HNW masih merupakan tokoh PKS yang paling *marketable* di publik. Tidak bulatnya dukungan atas penokohan HNW tersebut diduga karena HNW tidak menjadi bagian dari kelompok dominan yang memegang kendali saat ini. Seorang mantan pengurus DPP periode yang lalu menuturkan, "HNW ini punya tipikal tidak mau menerima volvo, tidak ingin sesuatu yang bersifat tidak fungsional, kemewahan ditolak. Agak bertentangan dengan AM dan teman-teman. Dan nampaknya Ustadz Hilmi lebih cenderung ke Akh AM". Sikap HNW yang tidak sejalan dengan preferensi Ustadz Hilmi tersebut berimplikasi pada lemahnya dukungan Ustadz Hilmi terhadap karir politik HNW. Mantan pengurus DPP tersebut melanjutkan penuturannya:

> Saya pernah langsung kok dengan Ustadz Hilmi. Ketika di 2009 semuanya diproyeksikan, menteri ini, menteri itu, saya tanya HNW ke mana Ustadz? Anggota DPR kan. Ya sudah, *just* anggota DPR, *ordinary member of parliament*, dengan kapasitas dan modal yang luar biasa. Padahal bagus sekali kalau beliau diorbitkan".

Hubungan antara habitus dan praksis terlihat jelas dalam segitiga interaksi Ustadz Hilmi, AM dan HNW yang digambarkan di atas. HNW memiliki habitus tertentu yang membuatnya memilih sekumpulan praksis yang menjadikan dirinya dinilai memiliki gaya hidup sederhana dan fungsional. Sebaliknya, AM memiliki habitus yang berbeda, sehingga praksis yang dipilihnya membuat ia dianggap bergaya hidup mewah. Dengan habitusnya, HNW sulit memberikan apresiasi atas praksis

yang dipilih AM, sebagaimana habitus AM juga membuat dirinya sulit mengapresiasi praksis yang dipilih HNW. Sementara itu, habitus Ustadz Hilmi lebih dekat dengan habitus AM daripada habitus HNW, sehingga ia lebih mudah mengapresiasi praksis yang ditunjukkan AM daripada praksis yang dipilih HNW. Tidak sulit dipahami jika selanjutnya kedekatan habitus antara Ustadz Hilmi dan AM membuat hubungan pribadi di antara mereka lebih dekat, dan mereka lebih mudah saling memahmi dan bekerjasama.

Namun terdapat analisis yang berbeda tentang mengapa tokoh publik belum muncul dari dalam PKS. Selama ini para tokoh PKS tersita perhatian dan waktunya untuk melakukan kerja-kerja lapangan yang sifatnya internal, sehingga tidak muncul di publik secara masif. Dalam konteks ini seorang elit PKS tidak sependapat dengan pandangan yang menyesalkan tidak optimalnya penokohan HNW sebagai *icon* PKS, karena tidak mungkin PKS bisa memimpin bangsa dengan penokohan tunggal. Oleh karena itu setiap kader dipersilakan muncul dan melakukan uji publik sendiri-sendiri. Kemudian partai akan melihat arah preferensi publik terhadap para tokohnya.

Tidak optimalnya alokasi sumber daya, khususnya sumber daya finansial, juga berkontribusi pada kinerja PKS yang tidak mengesankan di 2009, Di satu sisi, daerah-daerah yang stagnan perolehan suaranya justru menyedot dana kampanye yang sangat besar, termasuk di dalamnya biaya iklan yang tidak cukup efektif mendongkrak perolehan suara di kota-kota besar. Sementara pos-pos yang merupakan “kebutuhan dasar”, seperti biaya saksi dan advokasi, tidak mendapatkan alokasi yang memadai.

Stagnasi perolehan suara PKS di Pemilu 2009 dibandingkan 2004 bisa juga dikaitkan dengan berkurangnya distingsi PKS dibandingkan dengan partai-partai lain di mata publik pemilih awam, yang jauh lebih besar ketimbang publik pemilih kelas menengah yang terdidik. Distingsi tersebut antara lain kepedulian sosial terhadap masyarakat yang tertimpa bencana serta penerapan tradisi-tradisi islami, mulai dari jilbab yang dikenakan oleh para kader perempuannya, ucapan salam dengan *assalaamu’alaikum* di forum-forum Dewan, hingga spanduk-spanduk ucapan selamat hari-hari besar Islam. Seorang petinggi PKS mengatakan,

"**PKS nggak berubah, ya begitu aja, cuma ya yang lain mendekat mirip-mirip dengan PKS**".

Selanjutnya, kinerja PKS di Pemilu 2009 juga mesti dibaca sebagai kelemahan PKS dalam mengantisipasi perubahan irama permainan sekaligus tuntutan pemilih. Kegemilangan PKS di Pemilu 2004 diperoleh karena "gendang" sedang ditabuh dengan irama "pembaharuan", dan apa yang ditampilkan PKS, antara lain dengan mottonya "bersih dan peduli" cocok dengan irama tersebut, sehingga para pemilih yang mendambakan pembaharuan, setelah sekian lama muak dengan stagnasi, berbondong-bondong memilih PKS. Sementara itu, di 2009 "pembaharuan" sudah tidak lagi menjadi irama utama. Irama dan syair lagu yang didendangkan oleh banyak pemilih, khususnya di kota-kota besar yang di 2004 menjadi basis PKS, sudah bergeser menjadi, *"Can I dialogue with you? Can you understand my aspiration? Can you do what I want?"* Seorang anggota Dewan dari PKS menggambarkan cara berpikir para pemilih di 2009 tersebut sebagai berikut:

> "*You* bersih, *you care, but you can't do what I want!* Buat apa?! *Because democracy* ini, begitu dia masuk ke *substance* ... dia tanya dong, gue ini bisa lebih sejahtera kagak? Gue ini bisa lebih pintar kagak? Gue ini bisa lebih maju kagak? Lu bisa nggak kasih itu? Bukan soal *you* bersih atau *you* peduli. Lu bisa nggak ngerjain itu? Nggak bisa? Ya udah, *out!*

Motto "bersih, peduli, profesional" tetap penting sebagai ekspresi ideologi dan integritas kader-kader PKS, namun *"brand"* tersebut tidak lagi memadai ketika digunakan untuk bertarung di Pemilu 2009. Oleh karena itu, semestinya *new brand* PKS adalah *"deliverables, deliverables, deliverables"*. Kader tersebut memberikan contoh, ketika seorang kader PKS menjadi anggota Komisi I, *deliverables*-nya adalah menaikkan anggaran pertahanan, termasuk gaji prajurit, sekian persen.

Senada dengan itu, seorang pengurus DPP memandang turunnya jumlah pemilih PKS, disebabkan oleh pertumbuhan partai lain, dan adanya perubahan perilaku pemilih yang semakin pragmatis, di mana kepentingan utamanya adalah kesejahteraan, bukan afiliasi agama. Dinamika tersebut bukan hanya berdampak pada PKS, tapi juga pada partai-partai lain. Ia mencontohkan bertambahnya

jumlah kursi PKS di Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2009 adalah karena pemilih yang beralih dari PDS. Namun di sisi lain, Demokrat, dengan figur SBY, memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap perpindahan dari partai-partai lain. Di samping itu terdapat pula peran *swing voters* yang sangat mudah beralih ke partai lain karena merasa kecewa dengan pilihan yang mereka buat sebelumnya, di samping realita bahwa sebagian besar pemilih memutuskan pilihannya pada saat terakhir. Kader tersebut membantah bahwa persoalan-persoalan internal, seperti menurunnya soliditas, sebagai penyebab turunnya jumlah suara PKS di Pemilu 2009. Menurutnya, kekuatan struktur partai semakin tidak relevan untuk menghasilkan suara dalam pemilu, karena peran struktur lebih banyak sekedar menciptkan kesan tentang kehadiran partai secara masif di masyarakat, namun tidak berdampak langsung pada peroleh suara. Dengan demikian pendapat ini bertentangan dengan salah satu pendapat sebelumnya bahwa perluasan basis pemilih PKS di pelosok-pelosok merupakan implikasi dari meluasnya struktur partai di luar kota-kota besar.

Sementara itu, seorang kader memilih melihat fenomena kinerja PKS dalam Pemilu 2009 dari sisi yang lebih *"soft"*, yaitu kondisi psikologis para kader. Ia menggambarkannya sebagai "adanya situasi yang mengusik" yang menyebabkan sebagian kader menjadi tidak nyaman. Menurutnya, implikasi dari kondisi tersebut adalah, **"Pada nggak mau kerja. Jadi mereka sekedar mau memilih, tapi tidak mau bergerak untuk menambah orang**". Situasi psikologis kader yang merasa tidak nyaman tersebut mungkin berhubungan dengan perilaku-perilaku ssebagian kader yang dipersepsikan berubah, walaupun mungkin secara hukum tidak ada yang salah dengan perubahan tersebut. Persoalan rasa tidak nyaman tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena berimplikasi serius terhadap pilihan-pilihan tindakan yang diambil oleh para kader di lapangan. Namun demikian, ia tidak menafikkan bahwa faktor eksternal, berupa perubahan sikap masyarakat, juga punya pengaruh yang tidak kecil, walaupun hal tersebut tetap berakar pada persoalan-persoalan internal. Perubahan perilaku sebagian kader yang terlihat oleh publik membuat masyarakat merevisi penilaiannya terhadap PKS. Tingginya harapan masyaakat membuat perubahan perilaku yang sebenarnya hanya terjadi pada segelintir kader tersebut dianggap sebagai sesuatu

yang bersifat umum, menyangkut PKS secara keseluruhan, sehingga berimplikasi pada kinerja politik yang tidak secemerlang sebelumnya.

Di samping itu, terdapat pula persoalan lemahnya kepemimpinan dalam pengertian kolektif, bukan orang per orang yang menyangkut tiga butir persoalan.[8] Pertama, minimnya keteladanan, di mana tidak ada contoh nyata yang cukup memadai tentang hal-hal ideal yang diperjuangkan. Sebagai partai yang bermula dari gerakan dakwah dan hingga kini tetap mengidentifikasi dirinya sebagai Partai Dakwah, persoalan keteladaan menjadi sangat krusial. Dalam proses pembinaan yang dijalani bertahun-tahun para kader memperoleh materi-materi yang sarat dengan idealita yang menjadi gagasan perjuangan, atau dengan kata lain menjadi bagian dari habitus mereka. Ketika di lapangan idealita tersebut sulit dijumpai, apalagi dalam perilaku para elit partai, sangat mungkin para kader akan mengalami rasa frustrasi. Dalam bahasa Bourdieu, perilaku sebagian elit tersebut tidak cocok dengan skema apresiasi praksis yang tersedia dalam habitus sebagian besar kader PKS.

Kedua, kurangnya empati dan kasih sayang. Hal menyebabkan kader tidak bersimpati kepada para elit partai, sehingga tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk berbuat lebih, *extra miles*. Kader tersebut memberikan gambaran, "**Dengan uang Anda adalah tidak salah jika Anda membeli sesuatu yang mewah. Tapi mengingat saudara-saudara Anda dalam situasi yang sangat berbeda dengan Anda, mestinya keinginan tersebut ditunda**". Di kesempatan lain, ia mempertegas hal ini dengan menggambarkan bahwa masih cukup banyak *ikhwan* yang penghasilannya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas itu mereka masih harus mengkontribusikan hasil cucuran keringat mereka untuk partai. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka ketika menyaksikan sebagian dari elit partai tampil dengan gaya hidup yang dipersepsikan mewah setelah menempati jabatan-jabatan publik mewakili partai.[9]

[8] Disampaikan oleh seorang kader dalam diskusi melalui telepon, hari Jumat 29 Oktober 2010 pukul 23:30.

[9] Dituturkan kepada peneliti dalam pembicaraan informal pada hari Kamis 3 Maret 2011 di Mushalla FISIP UI Depok.

Ketiga, situasi di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, baik yang menyangkut individu-individu elit partai (misalnya sumber-sumber finansial), maupun sistem/kebijakan (misalnya iklan politik PKS di seputar masa pemilu yang lalu). Hal ini terkait dengan "budaya komunikasi yang hening", atau minimnya komunikasi. Untuk kader-kader PKS yang sebagian besar terdidik, kondisi ini terasa menganggu. Sebagai kesimpulan sementara, informan tersebut merangkum beberapa kondisi internal yang menyebabkan belum optimalnya kinerja PKS, yaitu **pemikiran yang tidak mendalam, budaya yang tidak baik, aturan yang tidak tepat,** dan **dominasi orang tertentu**".

Seorang informan mempersoalkan cara PKS membaca dan memaknai hasil Pemilu 2009 yang menurutnya tidak tepat, sehingga para kadernya tidak memperoleh pembelajaran yang optimal dari hasil tersebut. Ia menegarai bahwa dalam penurunan jumlah suara absolut, dari sekitar 8,3 juta di 2004 menjadi sekitar 8,2 juta di 2009, yang hilang itu adalah suara-suara dari generasi awal yang sangat memahami PKS dan karena itu memiliki harapan-harapan tertentu namun kemudian merasa dikecewakan.

Kemudian, mengapa dalam Pemilu 2009 terjadi pergeseran basis dukungan pemilih terhadap PKS, di mana jumlah suara PKS di kota-kota besar yang sebelumnya menjadi basis pemilihnya – antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi – menurun, sementara jumlah suara PKS di daerah dan pelosok meningkat? Di satu sisi, pemilih di kota-kota besar tersebut dengan sangat mudah terpapar berbagai informasi, termasuk tentang dinamika elit partai yang sebagiannya mungkin dimaknai negatif. Di samping itu, pemilih di kota-kota tersebut tidak seluruhnya merupakan pemilih rasional. Masih terdapat banyak pemukiman kumuh, di mana penduduknya sangat rentan terhadap berbagai iming-iming materi untuk memilih partai tertentu. Di sisi lain, *performance* para kader di daerah-daerah membuat PKS masih memiliki diferensiasi. Mereka mampu memberikan manfaat bagi warga masyarakat dalam interaksi sehari-hari, sehingga menarik simpati mereka kepada partai. Di samping itu, para kader PKS di daerah juga masih relatif mampu menjaga citra partai yang bersih, peduli, profesional. Seorang kader senior menuturkan, "**Kita masih oke karena kebetulan juga banyak pemimpin daerah itu memang yang masih mewakili situasi lama**".

Adapula pandangan yang mencoba menjelaskan secara lebih spesifik fenomena pergeseran sumber suara PKS dari kota-kota besar di Jawa ke daerah-daerah di luar Jawa. Menurut pandangan ini, fenomena tersebut merupakan dampak dari penokohan SBY yang mempunyai efek yang relatif lebih kuat di kota-kota ketimbang di daerah. Dengan kata lain, "tsunami Demokrat" atau "tsunami SBY" lebih berdampak di kota-kota besar.

Selain itu, sejumlah tokoh PKS yang di pemilu sebelumnya bertarung di DKI dipindahkan ke daerah, sehingga suara di DKI menurun, sementara suara di beberapa daerah meningkat. Misalnya HNW ke Jawa Tengah, TS ke Sumatera Utara, dan AM ke Sulawesi. Dengan kata lain, PKS di DKI Jakarta sepenuhnya mengandalkan kekuatan struktur dan minim tokoh. Keempat, memang telah menjadi kebijakan dari PKS untuk berupaya mendulang suara sebanyak-banyaknya di daerah-daerah dengan "harga kursi" yang lebih "murah" untuk meningkatkan peroleh jumlah kursi di Dewan. Namun seorang kader tidak setuju dengan penjelasan tersebut. Menurutnya, meningkatnya suara PKS di luar kota-kota besar lebih disebabkan sudah meratanya struktur PKS hingga ke desa-desa. Ia mengatakan, "Karena struktur mungkin menyebar, DPRa-DPRa menyebar ke desa-desa. Kita ada, dan kalau ada di mana-mana struktur partai PKS kan jalan". Dengan kata lain, tambahan suara berasal dari daerah-daerah yang di Pemilu 2004 belum terdapat struktur PKS.

Selanjutnya, bergesernya basis pemilih PKS dari kota-kota besar ke daerah-daerah dapat pula dilihat sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa PKS lebih *compatible* dengan kalangan *grass root* ketimbang *middle class*. Dalam konteks ini PKS perlu bertanya, *"are we effective to the middle class urban?"* Dan dari hasil Pemilu 2009 mau tidak mau harus diakui bahwa jawabannya "tidak" atau "belum"

Berbagai langkah pragmatis yang kemudian diambil oleh PKS mungkin dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang berat sebagai pemain yang relatif baru di arena politik Indonesia. Langkah "bermitra" dengan para pebisnis ditengarai diambil karena sebagian elit PKS yakin bahwa partai membutuhkan sumberdaya finansial yang besar untuk menarik simpati

publik pemilih. Keyakinan inilah yang dengan lantang digugat oleh seorang kader senior:

> "**Kedigdayaan yang ngakunya iklan itu hebat-hebatan di mana? Buktinya turun itu.** Tapi waktu PK itu dia *concern* terhadap masalah banjir, dan lain sebagainya. Begitu ikhlasnya keliatannya itu, dan dia sederhana, orang sangat simpati. Jadi, tesis mereka itu sebenarnya gugur dengan sendirinya. Seharusnya sudah sadar aktifis PKS itu".

Demikian pula sanggahan seorang kader lain, "**Buktinya banyak duit tahun 2009 nggak meningkat suara kita**. **Kalau dibandingkan sebelumnya jauh jumlah uangnya**". Baginya, peningkatan jumlah kursi PKS di Dewan bukanlah sebuah prestasi, karena itu diperoleh antara lain dari limpahan suara partai-partai kecil yang tidak lulus *parliamentary treshold*. Kondisi PKS di Pemilu 2009 mirip dengan PDIP yang dalam Pemilu 2004 mengalami penurunan suara yang signifikan, padahal ketika itu memiliki sumber daya yang melimpah karena Ketua Umumnya sedang menjadi Presiden.

Pemilu 2009 seharusnya menjadi momentum bagi PKS untuk menjadi partai besar. Namun dengan stagnasi di Pemilu 2009, momentum itu sudah lewat. Kalau saja PKS bertahan dengan gaya yang ditampilkannya pada Pemilu 2004, diyakini di Pemilu 2009 PKS bisa meraih 15%-20% suara. Seorang informan mengatakan, "**Kue yang besar itu lahir karena idealisme PKS ... Seandainya sabar satu periode lagi, itu 15-20 masuk kita**". Untuk memperkuat pernyataannya, informan tersebut memberikan contoh tentang salah satu partai oposisi di Malaysia, PAS, yang mampu menguasai Kelantan dan Trengganu selama 30 tahun lebih sejak 1978 tanpa menguasai sumber daya finansial yang memadai. Walaupun UMNO dan Barisan Nasional yang berkuasa "memboikot" wilayah-wilayah yang dikuasai PAS sehingga secara ekonomi masyarakatnya relatif miskin, tetap saja mereka memberikan suaranya untuk PAS. Penuturan tersebut menegaskan keyakinan bahwa integritas merupakan sesuatu yang unik dan mahal di arena politik negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, diyakini bahwa kecenderungan "pragmatisme finansial" merupakan salah satu faktor penting yang membuat perolehan suaran PKS di 2009 tidak bergerak maju. Informan tersebut menegaskan, "**Saya tidak setuju dengan politik-politik uang itu, seolah-olah dengan banyak uang akan menyebabkan partai ini besar**". Ia

menunjuk ketidakjelasan sikap PKS dalam kasus BLBI merupakan salah satu *blunder* yang yang signifikan. Implikasinya, "**Mereka bilang kita *beti*, beda-beda tipis. PKS ini gak ada bedanya dengan yang lain**". Kekecewaan masyarakat semakin bertambah karena di ranah publik PKS belum punya prestasi yang menonjol.

Tabel 6.4
Ikhtisar Pandangan tentang Latar Belakang
Tidak Optimalnya Kinerja PKS dalam Pemilu 2009

No	Pandangan
A	**Kondisi Internal**
1	Organisasi PKS mekar terlalu cepat, sehingga disibukkan dengan konsolidasi internal.
2	PKS sedang melakukan penetrasi ke daerah-daerah.
3	Para tokoh PKS sedang disibukkan dengan kerja-kerja internal sehingga tidak sempat muncul di publik secara masif.
4	Beberapa tokoh PKS yang di Pemilu 2004 ditempatkan di kota-kota besar, di Pemilu 2009 disebarkan ke daerah-daerah.
5	Perubahan gaya hidup, perilaku politik, dan deideologisasi yang ditunjukkan (sebagian) kader PKS di publik, sehingga diferensiasi PKS tergerus.
6	PKS belum dapat mengelola berbagai potensinya dengan baik.
7	Kapasitas eksekutif partai belum memadai.
8	Penurunan motivasi para kader di kota-kota besar karena melihat dinamika internal yang terjadi di kalangan elit partai.
9	Para kader PKS di daerah-daerah masih mampu menunjukkan diferensiasi dalam interaksi langsung dengan masyarakat.
10	PKS tidak mengoptimalkan penokohan HNW di publik.
11	Alokasi sumber daya finansial tidak proporsional: belanja terbesar justru di daerah-daerah yang suaranya stagnan atau menurun, dan kebutuhan dasar seperti biaya saksi dan advokasi kurang mendapat perhatian.
12	Pejabat-pejabat publik dari PKS belum mampu menjawab tuntutan masyarakat mengenai perubahan dan manfaat yang konkrit untuk mereka.
13	*"The curse of money"*, terlalu mementingkan sumber daya finansial yang ternyata tidak mampu meningkatkan suara.
14	Lemahnya kepemimpinan: kurangnya keteladanan, kurangnya empati terhadap kondisi kader di akar rumput, dan situasi-situasi yang membingungkan.
15	Beberapa manuver elit PKS di luar keputusan Majelis Syura, sehingga membingungkan publik PKS dan publik eksternal.
16	PKS belum cukup *compatible* dengan harapan dan tuntutan masyarakat *middle class urban*.
B	**Kondisi Eksternal**
1	"Tsunami Demokrat" atau "tsunami SBY, khususnya di kota-kota besar.
2	Intimidasi dan *money politics* yang dilakukan oleh parpol tertentu, sehingga masyarakat takut memilih PKS.
3	Persaingan yang sengit di kota-kota besar.
5	Masyarakat di kota-kota besar lebih mudah terpapar oleh informasi, termasuk tentang dinamika internal yang terjadi di kalangan elit PKS yang tidak semuanya dinilai positif.

No	Pandangan
6	Publik pemilih sudah lebih rasional.
7	Budaya politik Indonesia yang tidak kondusif: ketergantungan pada tokoh dan pragmatisme.
8	Distingsi PKS, seperti simbol-simbol keislaman dan kepedulian sosial, sudah ditiru oleh partai-partai lain.

6.3.2. Proyeksi Wajah PKS di Pemilu 2014

Lalu bagaimana para kader PKS melihat peluang partai ini dalam Pemilu 2014 yang akan datang? Seorang mantan pengurus DPP periode lalu tidak begitu optimis, walaupun juga tidak pesimis, karena ia merasa diferensiasi PKS dari partai-partai lain yang sebelumnya digambarkan oleh motto "bersih, peduli, profesional" sudah tidak begitu tajam. Tergerusnya diferensiasi tersebut antara lain karena kurang responsifnya PKS terhadap berbagai isu yang mengemuka di masyarakat. Ia menuturkan, "Saya melihat **enam bulan terakhir kita selalu *missleading* dalam isu dan tidak masuk dalam percaturan utama** ... Anda itu pejabat publik, anda harus punya pertanggungjawaban publik atas isu-isu itu. *You have to speak!*" Di samping itu, penetrasi kader masih sangat terbatas. Kelemahan-kelemahan tersebut mengharuskan PKS melakukan manuver khusus untuk menyelematkan posisinya di Pemilu 2014 yang akan datang, di mana daerah-daerah perlu berperan lebih besar. Jika tidak melakukan konsolidasi secara sungguh-sungguh PKS sulit melakukan lompatan kinerja di Pemilu 2014, walaupun mungkin tidak akan mengalami penurunan prestasi yang signifikan, karena citra partai-partai lain di publik juga tidak begitu bagus.

Seorang kader senior juga berpendapat bahwa capaian PKS di Pemilu 2014 akan cenderung stagnan di angka 7%-8%, karena tokoh-tokoh senior PKS sedang sibuk "turun gunung", membuka lahan-lahan dakwah baru di berbagai daerah, sehingga yang berkiprah di DPP sebagian besar adalah kader-kader "lapis kedua". Namun PKS akan diuntungkan dengan *playing field* yang lebih berimbang di Pemilu 2014 karena SBY sudah tidak dapat terjun langsung. Dengan kata lain, kemampuan PKS bertahan di Pemilu 2014 bukan karena kinerjanya yang sudah baik, tapi lebih karena kondisi eksternal yang relatif lebih kondusif dibandingkan 2009.

Seorang informan lain punya pendapat yang tidak jauh berbeda. Di satu sisi terdapat beberapa faktor yang bisa membangkitkan optimisme. Misalnya, gejolak internal sudah mereda. Hal itu terjadi antara lain karena kepemimpinan yang baru memilih bersikap tegas dan tidak mau berlama-lama menghadapi kader-kader yang tidak puas. Di samping itu, sebagian kader yang sebelumnya bertanya-tanya karena merasa tidak nyaman, sudah mulai menyesuaikan diri. Informan ini juga menangkap adanya harapan dari pada kader terhadap kepemimpinan baru yang dcukup *concern* pada pembenahan internal, khususnya *tarbiyah*, bahkan menggalakkan kembali *daurah*, *mutaba'ah*, dan perangkat-perangkat *tarbiyah* lainnya. Hal tersebut kembali menyemangati para kader, karena mereka seperti menemukan apa yang dirasakan hilang pada periode sebelumnya. Secara eksternal, situasi politik Indonesia tahun 2014 tidaklah serumit 2009. Namun di sisi lain, tetap terbuka kemungkinan hal-hal yang menyebabkan stagnasi PKS di tahun 2009 masih akan terulang di tahun 2014. Sehingga secara keseluruhan suara PKS di 2014 tidak akan bergerak jauh dari 7%.

Senada dengan itu, seorang anggota Majelis Syura juga berpendapat bahwa perolehan suara PKS di Pemilu 2014 akan cenderung stabil di angka sekitar 7%-8%. Di satu sisi, publik di kota besar terpapar oleh sejumlah informasi media yang tidak selalu memberitakan hal-hal yang positif tentang PKS. Namun di sisi lain PKS memiliki SDM dan sistem yang baik. Selain itu, masyarakat di daerah-daerah, yang proporsinya lebih banyak daripada pemilih di kota-kota besar, punya pandangan yang tetap positif, karena mereka melihat secara langsung kiprah para kader PKS yang secara nyata memberikan manfaat kepada mereka. Ditambah lagi adanya kader-kader PKS di empat Kementerian akan meningkatkan *leverage* PKS dalam mendekati publik pemilih. Di samping itu, di Pemilu 2014 partai pemerintah sudah tidak bisa lagi menggunakan SBY sebagai icon andalannya.

Pendapat yang tidak terlalu optimis, bahkan cenderung pesimis, dikemukakan pula oleh seorang kader lain. Menurutnya momentum PKS untuk tumbuh menjadi partai besar sudah lewat di Pemilu 2009 yang lalu. Pesimisme tersebut ditambah lagi dengan gaya PKS yang pragmatis dan tidak adanya perubahan mendasar di partai ini, sehingga mungkin suara PKS di Pemilu 2014

akan menurun. Suara PKS hanya akan naik jika dalam waktu yang tersisa ini muncul sejumlah tokoh dengan *leadership* yang kuat dan prestasi publik yang luar biasa. Namun dengan kondisi PKS yang paternalistik kecil kemungkinannya hal tersebut akan terjadi. PKS hanya memiliki kemungkinan *rebound* jika mampu kembali membuktikan integritasnya di publik. Kader tersebut mengatakan, "**Integritas itu mahal. Ya, PKS gitu lah. Sabar aja. Sekarang sudahlah kita tahan diri semua, hati-hati. Barangkali bisa aja kita ada *rebound*-nya lagi**".

Pandangan yang lebih optimis datang dari seorang anggota Dewan dari PKS. "*Still has a good chance to go*". Ia menyebutkan angka 10%-12% sebagai ekspektasi yang realistis. Namun kisaran tersebut akan dicapai jika para Menteri dari PKS mampu men-*deliver* hal-hal yang signifikan di sisa masa jabatan mereka, dan terdapat perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Fraksi PKS di DPR. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan penerapan kebijakan *reward and punishment* dengan tegas, di mana pejabat-pejabat publik dari PKS yang kinerjanya kurang optimal langsung ditarik dan diganti dengan yang lain, atau mereka yang sudah tidak berminat diminta mengundurkan diri. Kebijakan itu sudah dibuat, namun implementasinya masih perlu dibuktikan.

Seorang perempuan kader senior menganalisis proyeksi kinerja PKS di Pemilu 2014 dari sudut pandang yang agak berbeda. PKS sebenarnya memiliki modal yang baik untuk melejit, karena pembagian Bidang dan Badan di struktur DPP yang baru, yang disusun atas masukan *Murraqib 'Am*, sudah menunjukkan arah yang progresif. Misalnya saja, ada bidang yang secara khusus menangani para pengusaha, sehingga mengarah seperti Kamar Dagang, Bidang Pembinaan Umat yang bertugas menjalin sinergi dengan berbagai ormas dan organisasi Islam lainnya, serta Bidang Jaringan Sosial yang mengoptimalkan badan-badan *charity* yang sudah ada. Di samping arahan *top leader* yang progresif dan struktur organisasi yang sangat mendukung, PKS juga memiliki SDM kader yang baik. Dengan tiga modal itu, perolehan suara 15% di Pemilu 2014 adalah target yang realistis. Namun semuanya sangat tergantung pada kemampuan *top manager*, dalam hal ini adalah Presiden Partai, untuk menerjemahkan arahan-arahan dari *Murraqib 'Am* secara baik. Dalam konteks itu ia mengatakan, "Kalau Pak LHI masih konservatif kita bertahan di 8%". Oleh karena itu ia berharap AM bisa lebih

banyak berperan menjembatani dan mengakselerasi agar konservatifisme tersebut tidak menghambat gerak laju PKS untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi di pemilu yang akan datang.

Seorang elit PKS yang sering dianggap sebagai *icon* dari kelompok pragmatis-progresif tidak memberikan prediksi prosentase peroleh suara PKS di Pemilu 2014, namun ia yakin bahwa PKS dapat menembus peringkat tiga besar bersama Partai Demokrat dan salah satu di antara PDIP atau Partai Golkar. Secara internal kegagapan dan kegamangan yang terkait dengan proses *shifting* dari partai *medium* menjadi partai *large*, sudah relatif selesai. Dengan kata lain, proses internalisasi dan sosialisasi gagasan-gagasan baru untuk mengubah *mindset* lama sudah tuntas. Dua hal disebutnya dalam konteks ini. Pertama, gagasan keterbukaan. Dinamika di Majelis Syura menunjukkan bahwa proses tarik ulur antara terbuka-tidak terbuka yang sebelumnya berlangsung cukup lama dan alot, relatif sudah selesai. Ia mengatakan, "Hal-hal yang *basic-basic* tadi, yang tadinya banyak tarik ulurnya di dalam, tentang terbuka dan tidak terbuka ... Tapi ini saya rasa sudah selesai itu".[10] Kedua, gagasan tentang pentingnya penguasaan dan akumulasi sumber daya sudah tersosialisasikan ke struktur PKS di daerah-daerah dengan merata. Ia mengatakan, "Daerah sekarang ini rata-rata mempunyai sumber daya yang bagus. Karena ide tentang sumber daya itu sudah tersosialisasi dengan baik". Sementara itu, secara eksternal, pada saat PKS menawarkan narasi baru yang lebih komprehensif, integrasi Islam, demokrasi dan pembangunan, atau negara, pasar, dan masyarakat, partai-partai lain tidak menawarkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu diperkirakan bahwa tren penurunan suara PDIP dari 33% ke 19%, dan terakhir 14%, juga Partai Golkar dari 25% ke 20%, lalu 14%, masih akan terus berlanjut di Pemilu 2014, sehingga PKS bisa merebut posisi di tiga besar. Informan lain dari kelompok yang sama juga berpendapat bahwa kinerja politik partai lain di 2014 cenderung akan menurun karena mereka sudah tidak memiliki tokoh yang dapat dikedepankan. Ketika partai-partai lain menurun,

[10] Seorang informan meragukan bahwa apa yang disebut "hal-hal yang *basic*" seperti tarik-ulur tentang "terbuka-tidak terbuka" sudah benar-benar selesai. Menurutnya yang terjadi adalah para kader yang tidak setuju memilih diam dan tidak membicarakannya lagi. Bukan benar-benar selesai dalam arti persoalan tersebut dibahas dengan terbuka hingga tercapai kesepahaman dan kesepakatan. Kembali ini terkait dengan kultur PKS yang telah dibahas di Bab 4, terutama kuatnya *confirmity* dan *compliance* yang mendorong para kader untuk berupaya menjaga harmoni.

publik tidak punya pilihan selain menengok pada PKS sebagai partai yang konsisten memperbaiki diri. Namun kembali diakui bahwa kelemahan PKS adalah belum punya tokoh. Ia mengatakan, “Itu problem PKS, belum punya figur. Sekarang nggak ada figur ... Belum ada figur. Siapa yang mau difigurkan? Yang mau ditata gitu? Itu problem”. Pernyataan tersebut menjadi menarik, karena HNW yang bagi sebagian kader adalah sosok yang layak ditokohkan, bukanlah orang yang pantas dijadikan figur dalam pandangan kader ini.

Seorang mantan petinggi PKS juga berpendapat bahwa PKS punya peluang untuk menempati posisi tiga besar dalam Pemilu 2014. Dengan kata lain, PKS akan menggantikan posisi salah satu dari Partai Demokrat, Partai Golkar, atau PDIP, yang menempati posisi tiga besar dalam Pemilu 2009 yang lalu. Dari ketiga partai tersebut, hanya Golkar yang memiliki organisasi dan sistem yang kuat, *rule of the game* yang telah mapan, sebagai buah dari pengalamannya puluhan tahun berkiprah di ranah politik Indonesia. Namun demikian, Ketua Umum Golkar saat ini, Aburizal Bakrie, sering melakukan *blunder* di publik, yang berpotensi mengurangi suara Golkar. Apalagi dari Pemilu 2004 ke 2009 Golkar mengalami penurunan suara sekitar 4,5%, dari 18,5% menjadi 14%, atau kehilangan sekitar 9 juta pemilih. Sementara itu, PDIP masih sangat tergantung pada figur Megawati. Belum terlihat adanya sesuatu yang berubah secara signifikan di partai ini, baik dari sisi struktur, manajemen organisasi, maupun kaderisasi. Kata-kata “tunggu kata Ibu” masih kerap terdengar dari para petinggi partai ini. Di samping itu, PDIP juga punya sejarah penurunan suara yang spektakuler sepanjang tiga pemilu terakhir, di mana di Pemilu 2009 PDIP kehilangan hampir separuh suaranya jika dibandingkan dengan Pemilu 2004. Partai Demokrat punya persoalan yang mirip dengan PDIP, yaitu ketergantungan pada tokoh, pada sosok SBY, yang karena batasan konstitusi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Presiden di tahun 2014. Kondisi itu akan membuat peran sentral SBY di Demokrat sebagai *solidarity maker* akan menjadi problematik. Sampai saat ini Demokrat belum memiliki calon Presiden yang definitif untuk pemilu yang akan datang. Terdapat catatan menarik tentang kekalahan Andi Malarangeng dari Anas Urbaningrum dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang lalu. Mengingat Andi Malarangeng didukung penuh

oleh para Menteri dan putra Presiden SBY, hanya ada dua kemungkinan penjelasan dari fenomena tersebut. Kemungkinan pertama, hal itu adalah cermin dari betapa demokratisnya kondisi internal Partai Demokrat, atau yang kedua, hal itu merupakan sinyal perlawanan dari bawah terhadap pimpinan partai. Mengingat budaya politik dan perkembangan demokrasi Indonesia yang belum matang, penjelasan kedua lebih masuk akal. Dengan kondisi-kondisi yang tidak begitu *favorable* untuk Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP tersebut, PKS cukup berpeluang untuk menempati posisi tiga besar.

Namun demikian, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi secara internal. Pertama, konsolidasi organisasi harus dituntaskan. Sepanjang kurun waktu 2004-2010 publik eksternal, dan bahkan kader PKS sendiri, sering dibingungkan oleh manuver para elit PKS yang dipersepsikan tidak mengarah ke satu titik yang sama. Kedua, kader-kader PKS harus semakin menunjukkan kiprah nyata yang hasil-hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketiga, komunikasi politik PKS harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga mampu menjangkau kelompok-kelompok masyarakat pemilih yang punya kecenderungan nasionalis-sekular, yang proporsinya diyakini lebih dari 60% pemilih, Dengan kata lain, PKS tidak bisa hanya mengandalkan ceruk pemilih Islam yang hanya sekitar 30%-35%.

Sementara itu ada pula keyakinan bahwa persepsi publik, khususnya kelas menengah yang terdidik mengenai PKS tetap baik. Menurut seorang pengurus DPP, beberapa survei tetap menempatkan PKS sebagai partai yang anti korupsi, pengurus/kadernya terdidik, dan menjadi pilihan dari *middle class* yang terdidik. Namun ia memberikan dua catatan. Pertama, para kader PKS, khususnya para elitnya, harus tampil “sepenuh hati” di publik, dan tidak mengesankan adanya ambiguitas di tengah publiknya sendiri. Ia mengatakan, “Kalau derajat daripada keadaban kita lebih tinggi daripada yang lain ya persepsi itu akan muncul. Tapi kalau kita nampak tidak beradab, ya kita kan tergerus sendiri. Tidak bergaul”.[11] Kedua, kemungkinan adanya perubahan-perubahan politik yang sangat cepat dan

[11] Peneliti mempunyai catatan kecil. Informan ini menekankan pentingnya para elit PKS menampilkan citra yang baik, tampil sepenuh hati, dan tidak ambigu di depan publik. Namun di mata beberapa informan lain, ia justru dipandang sebagai sosok yang sering menimbulkan kontroversi dan penilaian publik yang kurang positif terhadap PKS.

bersifat tiba-tiba juga harus diperhitungkan. Ia menegaskan, "Politik itu mesti dipersepsikan dalam demokrasi sebagai pertempuran yang dinamis. Jadi lupakanlah pertempuran lama, tentang apa namanya, *comfort zone. There's no more comfort zone, everything moves"*. Ke depan PKS akan menjadi partai yang semakin sesuai dengan *demand* publik, yaitu partai yang dinamis, mampu mengelola negara, menjalankan amanah-amanah yang diberikan kepadanya, *concern* terhadap penanganan masalah-masalah ekonomi, dan mampu memberi makan rakyat. Bagi kader tersebut pertarungan ideologi sudah selesai, karena seluruh partai yang ada di Indonesia saat ini bisa mengklaim bahwa mereka adalah "rumah" bagi umat Islam. Ia mengatakan, "Soal Islam itu semua orang bisa klaim Islam. PDIP punya Baitul Muslimin, Golkar punya Majelis Dakwah, Hanura punya Muslim Hanura, Demokrat punya Majelis Dzikir. Ya memang kita semua Islam".

Tabel 6.5
Ihtisar Pandangan tentang Prediksi Kinerja PKS dalam Pemilu 2014

No	Kinerja	Alasan/Prasyarat
A	**Optimis**	
1	***Rebound***	♦ Munculnya sejumlah tokoh yang berprestasi di publik. ♦ Kembali mampu membuktikan integritas di publik.
2	**10%-12%**	♦ Para Menteri dari PKS mampu men-*deliver* hal-hal yang menjadi tugasnya. ♦ *Reward and punishment* diterapkan dengan tegas
3	**15%**	♦ Arahan dari *top leader* yang progresif. ♦ Sruktur organisasi baru yang mendukung. ♦ Kualitas SDM kader yang baik. ♦ Eksekutif Partai harus mampu menerjemahkan arahan dari *Murraqib 'Am* dengan baik. ♦ Presiden Partai harus lebih progresif.
4	**Tiga besar**	♦ Proses *shifting* paradigma sudah relatif selesai. ♦ Gagasan tentang sumber daya sudah tersosialisasi-kan dengan baik. ♦ PKS menawarkan wacana yang komprehensif: Islam, Demokrasi, dan Pembangunan. ♦ Partai-partai lain tidak menawarkan hal baru ♦ Kecenderungan penurunan suara partai-partai lama akan terus berlanjut. ♦ Persepsi publik terhadap PKS tetap baik dalam hal anti-korupsi, kualitas kader, dan kemampuan mendekati *middle-class*. ♦ Segera punya tokoh yang dapat diangkat ke publik. ♦ Para kader PKS harus tampil beradab dan tidak ambigu di depan publik. ♦ Penuntasan konsolidasi organisasi. ♦ Kiprah nyata dari para kader PKS harus dirasakan oleh masyarakat. ♦ Perluasan basis pemilih ke segmen nasionalis-sekular.

No	Kinerja	Alasan/Prasyarat
B	**Netral atau Pesimis**	
1	**Stabil pada 7%-8%**	♦ Diferensiasi sudah tidak begitu kuat. ♦ *Misleading* dalam isu-isu penting. ♦ Kinerja dan citra partai-partai lain juga tidak baik. ♦ Tokoh-tokoh senior PKS sedang sibuk membuka wilayah-wilayah baru, sehingga DPP diisi lapis kedua. ♦ *Playing field* lebih seimbang karena SBY tidak bisa jadi Capres lagi. ♦ Gejolak internal sudah mereda. ♦ Para kader sudah mencapai *xomfort level* baru. ♦ Adanya harapan pada kepemimpinan baru PKS yang dinilai cukup menginspirasi. ♦ Penurunan di kota-kota besar akan tetap diimbangi oleh kenaikan di daerah-daerah. ♦ PKS memiliki SDM dan sistem yang baik. ♦ Modal 4 Kementerian merupakan *leverage* yang cukup kuat. ♦ Dampak isu Partai Terbuka yang disalahpahami, walaupun mungkin tidak besar. ♦ Presiden Partai bersikap konservatif. ♦ Daerah harus lebih mandiri. ♦ Strategi pen-caleg-an tokoh-tokoh lokal
2	**Stagnan atau Turun**	♦ PKS sudah kehilangan momentum ♦ Merebaknya pragmatisme. ♦ Tidak ada perubahan yang mendasar di PKS. ♦ Kondisi paternalistik yang menghambat munculnya sejumlah tokoh PKS yang berprestasi di publik.

Jika dicermati, terdapat pola yang cukup konsisten, walaupun tidak mutlak, dari kelompok *religious movement oriented* dan kelompok *political party oriented* dalam melihat kinerja PKS di Pemilu 2009 dan proyeksi kinerja Partai ini di Pemilu 2014 yang akan datang. Kelompok *religious movement oriented* cenderung melihat kinerja PKS di Pemilu 2009 sebagai stagnasi, bahkan penurunan, jika dibandingkan Pemilu 2004. Stagnasi atau penurunan tersebut lebih banyak dinisbatkan kepada sejumlah kelemahan internal, seperti kurangnya soliditas elit Partai, manuver sebagian elit yang membingungkan publik, kinerja para pejabat publik dari PKS yang belum memuaskan, kecenderungan pragmatisme yang mendistorsi citra sebagai Partai Dakwah dan motto bersih, peduli, profesional, serta tidak optimalnya dukungan internal terhadap penokohan HNW. Sementara itu, kelompok *political party oriented* cenderung melihat kinerja di Pemilu 2009 sebagai prestasi, walaupun memang bukan lompatan seperti dari Pemilu 1999 ke 2004. Kalaupun dianggap kurang optimal, mereka cenderung menisbatkan perolehan suara PKS di 2009 kepada faktor-faktor

eksternal, seperti "tsunami Demokrat/SBY", persaingan yang sengit di kota-kota, maupun perubahan preferensi dan perilaku pemilih. Kalaupun dikaitkan dengan beberapa faktor internal, faktor-faktor tersebut merupakan keniscayaan, seperti pertumbuhan organisasi PKS yang cepat dan konsolidasi internal yang menyita perhatian, serta strategi pen-caleg-an tokoh-tokoh PKS di daerah-daerah.

Tabel 6.6
Ikhtisar Perbandingan Sikap terhadap Kinerja PKS di Pemilu 2009 dan Prediksi Kinerja PKS di Pemilu 2014

	Kelompok *Religious Movement Oriented*	**Kelompok *Political Party Oriented***
Hasil Pemilu 2009	Stagnan, bahkan menurun dibandingkan Pemilu 2004.	Peningkatan prestasi, walaupun tidak melompat seperti dari 1999 ke 2004.
Faktor-faktor Penyebab Kinerja Pemilu 2009	**Internal**: ♦ Elit Partai kurang solid ♦ Manuver elit yang membingungkan publik ♦ Kinerja pejabat publik yang belum optimal. ♦ Pragmatisme yang mendistorsi identitas sebagai Partai Dakwah yang bersih, peduli, profesional. ♦ Dukungan internal yang tidak optimal terhadap penokohan HNW.	**Eksternal:** ♦ "Tsunami Demokrat/SBY". ♦ Persaingan yang sengit di kota-kota besar. ♦ Pemilih yang semakin pragmatis. **Internal:** ♦ Pertumbuhan organisasi yang terlalu cepat, sehingga menyita perhatian untuk konsolidasi internal. ♦ Strategi pen-caleg-an dengan menempatkan tokoh-tokoh PKS yang sebelumnya di Jakarta ke daerah-daerah.
Proyeksi Kinerja Pemilu 2014	Stabil di kisaran 7%-8%, atau bahkan turun.	Naik ke kisaran 10%-15%. Berada di tiga besar.

Terkait dengan proyeksi kinerja PKS dalam Pemilu 2014, kelompok *religious movement oriented* cenderung netral atau bahkan pesimis. Di satu sisi memang *playing field* akan lebih seimbang karena Partai Demokrat dan partai-partai lain belum memiliki tokoh yang bisa "dijual", kinerja dan citra para pesaing juga tidak begitu baik, terdapat empat Kementerian yang bisa menjadi modal bagi PKS, dan gejolak internal sudah mulai mereda. Namun di sisi lain, dirasakan PKS sudah tidak memiliki diferensiasi yang sekuat dulu, sering *misleading* dalam menyikapi isu-isu penting, belum menunjukkan perubahan yang mendasar, dan masih memiliki budaya paternalistik yang menghambat munculnya tokoh-tokoh

baru. Sebaliknya, kelompok *political party oriented* cenderung optimis dalam melihat Pemilu 2014, karena PKS memiliki SDM kader yang baik, dan kualitas sumber daya (finansial) yang sudah lebih baik, di samping citranya yang tetap baik di mata publik, dan proses *paradigm shift* praktis sudah selesai.

6.4. Diskusi

6.4.1. Analisis Kapasitas Tindakan Kolektif PKS 2004 dan 2009

Posisi objektif PKS di ranah politik Indonesia, yang diukur dari kinerjanya dalam pemilu, ditentukan oleh kemampuan partai ini dalam melakukan tindakan kolektif. Jika dianalisis dengan teori tindakan kolektif dari Tilly (1978), kemampuan melakukan tindakan kolektif merupakan resultan dari kapasitas internal dan respon yang diperoleh organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan eksternal, baik berupa manfaat (peluang, dukungan, peningkatan kekuasaan), maupun biaya (ancaman, represi, penurunan kekuasaan). Sementara itu, kapasitas internal untuk melakukan tindakan kolektif ditentukan oleh kemampuan organisasi memobilisasi sumber daya, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat keorganisasian. Menurut Moody dan White (2003), tingkat keorganisasian ditentukan oleh *group inclusiveness* atau tingkat kohesi sosial, yang memiliki komponen relasional (kohesi struktural) dan komponen ideasional (identitas kolektif).

Lonjakan suara PKS dalam Pemilu 2004 dibandingkan 1999 disebabkan oleh respon eksternal yang positif dan kapasitas internal yang berlimpah. Respon eksternal yang positif disebabkan antara lain oleh kejenuhan masyarakat terhadap keberadaan partai-partai lama, termasuk partai pemenang Pemilu 1999 yang kemudian ternyata tidak membawa perubahan yang berarti. Di samping itu, masyarakat memiliki harapan positif terhadap PKS sebagai pembaharu. Motto "bersih dan peduli" berhasil mengirimkan sinyal yang tepat kepada publik pemilih, karena seolah merupakan ekspresi, bahkan kristalisasi, dari suara hati mereka. Dengan tujuh kursi hasil Pemilu 1999 (saat masih bernama PK) partai ini praktis belum dilirik oleh para pemilik sumber daya, sehingga para kader PKS relatif leluasa memainkan peran-peran yang populis dan heroik, relatif terbebas

dari hingar-bingar politik yang pragmatis, sehingga mampu tampil dengan penuh integritas. Keunikan, atau mungkin lebih tepat keluguan tersebut membuat cukup banyak pemilih berpaling ke PKS di Pemilu 2004.

Dari sisi kapasitas internal, ketika menghadapi Pemilu 2004 PKS berada dalam kondisi keberlimpahan *(abundance),* karena tingkat keorganisasian yang relatif tinggi saat itu membuat PKS mampu memobilisasi sumber daya secara efektif. Etzioni (1968) menekankan bahwa kemampuan memobilisasi adalah kapasitas untuk memanfaatkan, bukan kepemilikan terhadap sumber daya. Dengan demikian dapat dipahami mengapa kepemilikan sumber daya yang jauh lebih banyak – keberlimpahan finansial dan lonjakan jumlah kader – di tahun 2009 tidak membawa hasil sebaik 2004. Selain itu, Etzioni juga menggarisbawahi komitmen sebagai sumber daya non-material yang sangat penting dalam konteks mobilisasi. Komitmen para kader PKS di Pemilu 2004 berada dalam posisi yang sangat optimal, karena terdapat kondisi internal yang nyaman, di samping motivasi yang sangat kuat untuk mengatasi ancaman terhadap eksistensi, berupa *electoral treshold*.

Sebagaimana dikatakan Moody dan White (2003), tingkat keorganisasian yang tinggi merupakan implikasi dari *group insclusiveness* atau kohesi sosial. Di Pemilu 2004, PKS memiliki kohesi sosial yang relatif kuat. Di akar rumput, *tarbiyah* sebagai dapur kaderisasi, bahkan "bisnis inti" PKS, berjalan dengan baik. Sehatnya *tarbiyah*, yang dimanifestasikan dengan aktifnya *halaqah* dan *usrah*, serta berjalannya *mutaba'ah* dan *ta'limat*, berimplikasi pada kuatnya kohesi struktural, di mana informasi dari pusat turun ke akar rumput melalui jalur-jalur yang banyak dan relatif independen satu sama lain. Hal tersebut berkontribusi bagi kokohnya aspek relasional sebagai salah satu pilar kohesi sosial. Sementara itu, aspek ideasional atau identitas kolektif juga memberikan sumbangan positif terhadap kohesi sosial PKS. Relatif kuatnya *brand image* sebagai partai yang "bersih dan peduli" membawa kebanggaan tersendiri bagi para kader PKS di akar rumput. Identitas kolektif tersebut bukan saja menunjukkan kuatnya *categorical distinction* PKS, namun juga terhubung secara multiplikatif dengan komponen relasional dalam memperkuat kohesi sosial (Brewer, 2000).

Jika dibaca dengan logika berpikir Bolino et.al. (2002), di tahun 2004 PKS memiliki tingkat keorganisasian yang kuat karena ia memiliki modal sosial yang juga kuat, baik dalam aspek struktural, relasional, maupun kognitif (ideasional). Kuatnya modal sosial tersebut disebabkan oleh hubungan timbal-balik yang positif dengan *citizenship behavior* (perilaku kewargaan), berupa, ketaatan, loyalitas, dan partisipasi para kader yang melebihi tuntutan formal organisasi, sebagaimana penuturan seorang informan, "Kader pada waktu itu dalam situasi yang sangat baik. Motivasinya tinggi, nyaman dengan partai atau dengan jamaah, lebih karena belum ada situasi yang mengusik. Belum terjadi". Hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan HNW sebagai Presiden Partai yang dipersepsikan rendah hati, sederhana, dan cerdas, sebagaimana dituturkan oleh informan yang sama, "Kerendahan hati membuat orang itu bisa mendengar, bersahabat dengan siapa pun, dan yang lain gitu ya. Terus kesederhanaan membuat orang loyal, *respect*, tidak merasa dikerjain, tidak merasa dimanfaatin ... Cerdas beliau, cepet belajar". Dalam konteks ini sebagai pemimpin HNW bagi para kader PKS berperan sebagai ***solidarity maker***, dan bagi publik eksternal berperan sebagai ***cultural ambassador***, yang memberikan nilai tambah di dua sisi. Di satu sisi ia berperan menguatkan komponen relasional. Di sisi yang lain ia mengokohkan komponen ideasional. Dengan demikian, faktor pemimpin sebagai *solidarity maker* dan *cultural ambassador* perlu ditambahkan sebagai faktor penentu *group cohesiveness* atau kohesi sosial, di samping komponen relasional dan komponen ideasional yang sudah dikemukakan oleh Moody dan White. Selanjutnya, menurut Mukherji et.al. (2007), kuatnya kohesi sosial tersebut mampu meminimalkan problem keagenan antara *the party on the ground* dengan elit partai di pusat. Dengan bahasa yang sederhana: mereka merasa berada dalam satu perahu yang berlayar menuju pelabuhan yang sama.

Lalu bagaimana PKS memaknai kinerjanya di Pemilu 2009? Peneliti menemukan adanya pola yang menarik, di mana kelompok *political party oriented* cenderung memandang kondisi 2009 sebagai hal yang netral, bahkan positif. Seorang elit PKS misalnya memandang bahwa PKS tetap melangkah dengan baik walaupun tidak melompat seperti tahun 2004. Sebaliknya, kelompok *religious movement oriented* memaknai kondisi 2009 sebagai penurunan yang

patut disesalkan. Inti argumentasi mereka, PKS adalah Partai Dakwah, sehingga ukuran keberhasilannya adalah peningkatan jumlah suara yang merefleksikan peningkatan jumlah orang yang bersimpati terhadap dakwah PKS. Dengan kata lain, peningkatan jumlah kursi di Dewan tidak terlalu bermakna, karena hanya merupakan akibat dari cara perhitungan kursi yang diterapkan.

Jika dibedah dengan teori tindakan kolektif dari Tilly, respon eksternal di 2009 berubah sangat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Di satu sisi, pemilih sudah jauh lebih rasional dan pragmatis. Mereka menuntut manfaat yang konkrit, bersifat materi, dan dapat langsung dirasakan. Seorang informan misalnya menggambarkan bagaimana masyarakat mengharapkan para kader PKS membawakan sembako atau "buah tangan" lainnya pada saat berkampanye. Bahkan menurutnya, media massa yang di Pemilu 2004 turut mendukung dengan memberikan banyak kemudahan, di 2009 memberlakukan tarif komersial. Sementara itu, Partai Demokrat yang di Pemilu 2004 merupakan pesaing yang seimbang bagi PKS, di 2009 tampil sangat digdaya dengan menggempur basis-basis PKS di kota-kota besar, dan mengkapitalisasi ketokohan SBY secara optimal. Seorang informan menyayangkan popularitas SBY yang bisa jauh di atas HNW, padahal titik berangkat mereka di tahun 2004 tidak banyak berbeda. Dengan bahasa informan lain, PKS berhadapan dengan budaya politik Indonesia yang pragmatis dan sangat berorientasi tokoh. Dalam kerangka berpikir Tilly, di 2009 arena politik tidak lagi menyediakan peluang dan dukungan sebaik di 2004.

Kondisi eksternal yang tidak kondusif tersebut berjumpa dengan kapasitas internal yang juga tidak lagi seberlimpah di pemilu sebelumnya. Tingkat keorganisasian menurun, sehingga kemampuan PKS memobilisasi sumber daya juga berkurang, walaupun jumlah sumber daya, khususnya uang dan SDM kader, meningkat. Dalam kaitan dengan uang misalnya, seorang informan berujar, "Buktinya banyak duit tahun 2009 nggak meningkat suara kita. Kalau dibandingkan sebelumnya jauh jumlah uangnya". Sementara itu, data menunjukkan ketika jumlah kader meningkat drastis dari 263 ribu (2004) menjadi 800 ribu (2009), jumlah suara tidak meningkat. Sebagaimana tahun 2004, kapasitas internal untuk melakukan tindakan kolektif di tahun 2009 juga dapat dihubungkan dengan *group inclusiveness* atau kohesi sosial dengan kedua

komponennya, yaitu komponen relasional dan komponen ideasional. Komponen relasional, atau kohesi struktural, melemah di tahun 2009. Penyebab utamanya adalah menurunnya kualitas *tarbiyah*, sebagaimana dikatakan seorang informan, "Kondisi *tarbiyah* kita memang menjadi catatan. Teman-teman protes bahwa kenapa kita tak semilitan dulu dalam hal komitmen-komitmen *tarbawi*?" Di samping itu, *halaqah* dan *usrah* yang didominasi oleh pembicaraan tentang politik menimbulkan kejenuhan pada sebagian kader, sehingga mengurangi komitmen mereka kepada *liqa*-nya.

Di sisi lain, komponen ideasional juga tidak sekuat sebelumnya. Motto "bersih, peduli, profesional" tidak lagi menjadi diferensiasi yang siginifikan. Seorang informan misalnya mengatakan, "Karena posisi kita gak jelas. Karena posisi kita sama saja dengan yang lain. Mereka bilang kita *beti*, beda-beda tipis. PKS ini nggak ada bedanya dengan yang lain katanya". Dengan terminologi yang digunakan Brewer, *categorical distinction* PKS melemah. Dalam konteks ini menarik untuk membahas pendapat beberapa informan tentang distingsi PKS. Seorang perempuan kader menuturkan bahwa para kader PKS masih menunjukkan distingsi dalam hal ketekunan melaksanakan ibadah ritual dan etika pergaulan. Ia memberikan contoh tentang shalat berjamaah pada waktunya dan kesantunan dalam hubungan dengan lawan jenis. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan moral pribadi tersebut tidak memiliki gaung yang cukup kuat di arena politik. Di tengah apatisme masyarakat tentang integritas para politisi Senayan, komitmen terhadap gerakan anti korupsi misalnya, atau komunikasi yang bernas dan santun di arena publik, tentu saja punya efek diferensiasi yang lebih bermakna. Terkait dengan hal ini, informan lain, seorang tokoh muda PKS, menuturkan keyakinannya, "kalau dibilang partai mana yang anti korupsi, ya tetep PKS". Namun hal tersebut bertentangan dengan pendapat sejumlah informan lain. Seorang kader misalnya menyoroti hubungan PKS dengan KPK yang terkesan merenggang belakangan ini dengan mengatakan, "Kita dengan KPK justru sekarang seperti agak alergi". Sedangkan kader lain menyoroti PKS yang tidak mengambil sikap tegas dalam kasus BLBI. Sementara itu, dari sisi gaya berkomunikasi politik, beberapa informan menyoroti sepak-terjang kader PKS yang dinilai tidak merepresentasikan kesantuan Partai Dakwah. Bahkan seorang

informan mengatakan dengan keras, “Apakah orang-orang ini mengerti atau tidak kalau dia dilihat publik gagal secara karakter”. Dinamika ini sebelumnya telah dipotret dengan tepat oleh Hwang dan Mecham (2010) dengan mengatakan, “Such shifting positions put the PKS in position of being at once too Islamist to appeal to moderate voters, and too moderate for many Islamists”.

Seorang elit PKS memiliki pendapat yang lain tentang distingsi PKS. Menurutnya, kekhasan PKS adalah menawarkan narasi yang lebih komprehensif dibandingkan partai-partai lain. Ia mengatakan, “Kita bisa menyederhanakan ideologi PKS itu dalam tiga kata: Islam, demokrasi, dan pembangunan”. Namun narasi tersebut bukanlah *categorical distinction* yang dapat ditangkap dan dicerna dengan mudah oleh mayoritas publik pemilih Indonesia yang berada di strata sosial kelas bawah dan tersebar di pelosok-pelosok, karena terlampau makro dan abstrak. Dalam konteks ini, seorang informan menegaskan bahwa integritas, yang diartikulasikan dalam motto “bersih, peduli”, merupakan pilihan identitas yang terbaik. Ia mengatakan, “**Integritas itu mahal**. Ya, PKS gitu lah. Sabar aja. Sekarang sudahlah kita tahan diri semua, hati-hati. Barangkali bisa aja kita ada *rebound*-nya lagi. Kan bisa, mungkin”.

Menurut Jenkins (2004) identitas tidak hanya berbicara tentang bagaimana orang lain melihat kita, namun juga, dan bahkan lebih mendasar, adalah **pemahaman kita mengenai siapakah kita**. Dalam konteks inilah wacana PKS sebagai “Partai Terbuka” berdampak serius dan kontra-produktif dalam kaitannya dengan kesatuan identitas PKS, karena menimbulkan kebingungan yang cukup serius secara internal, khususnya bagi para kader yang menjadi bagian dari *the party on the ground*, tentang identitas bersama yang selama ini dibangun dan diperjuangkan. Seorang kader senior menyebut wacana tersebut sebagai sesuatu yang “mendistorsi identitas PKS sebagai Partai Islam”, sehingga serupa dengan partai-partai lain yang “jenis kelaminnya tidak jelas”. Kader lain menyebutnya bagian dari hal-hal yang tidak terjelaskan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan kader. Sementara seorang anggota Majelis Syura berpendapat bahwa wacana tersebut adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Lebih lanjut, seorang informan melihatnya sebagai “problem personal anak muda yang sedang mencari jati diri, namun lupa bahwa

dirinya membawa identitas kolektif". Sedangkan seorang mantan eksekutif puncak PKS memandang wacana "Partai Terbuka" sebagai sesuatu yang tidak sah karena bukan keputusan Majelis Syura, dan berimplikasi membingungkan para kader. Ia mengatakan, "Mestinya kan semua mengarah ke titik yang sama. Jangan ada yang merubah-rubah ya, visi itu. Begitu dirubah, jangankan publik, kader aja bingung". Bahkan seorang informan menyebutnya sebagai "kejahatan ideologi". Implikasi dari semua itu, jika dibaca dengan kerangka berpikir Moody dan White (2003), adalah berkurangnya kekokohan komponen ideasional dalam *group inclusiveness* PKS. Dengan demikian, data mendukung kesimpulan Hwang dan Mecham (2010) bahwa terdapat ambiguitas dalam menyikapi wacana PKS sebagai "Partai Terbuka", yang mereka lukiskan sebagai berikut, "*In the aftermath, pragmatists within the PKS lauded the open party strategy for enabling the party to more or less maintain its 2004 vote percentage, while purists blamed it for the party's failure to net more votes"*. Dengan kata lain mereka menegaskan bahwa upaya PKS untuk bergerak ke tengah dan menjadi "partai kita semua" menimbulkan "biaya" yang signifikan, karena implikasi strategi tersebut terhadap segmen puritan tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Lebih lanjut, dinamika internal yang ada juga melemahkan kualitas *citizenship behavior*, motivasi para kader untuk berbuat *extra miles*, melebihi tuntutan minimum kewajiban organisasi. Dalam konteks ini misalnya seorang informan mengatakan, "Kepantasan itu berarti kan ujungnya suka gak suka. Bener, tapi aku gak suka. Akhirnya nanti berpengaruh pada dukungan. Ia nggak mau bergerak. Lha gak nyaman". Ketidaknyamanan tersebut terkait dengan *leadership* kolektif dari elit partai yang mengesankan kurangnya empati dan keteladanan, serta adanya sejumlah persoalan dalam dinamika internal di tingkat elit yang tidak terjelaskan dengan baik di tingkat akar rumput. Demikian pula gugatan informan lain, "Apa bisa dimotivasi kita ini dengan politik terus? Kita harus begini, harus begini, yang semua duniawi. Apa bisa? Coba deh. Bubar!" Menurut Bolino et.al., turunnya kualitas *citizenship behavior* tersebut punya andil dalam melemahkan modal sosial, yang pada gilirannya berdampak pada melemahnya tingkat keorganisasian di internal PKS. Sedangkan menurut Mukherji et.al., kohesi sosial yang melemah berkaitan dengan mencuatnya

problem keagenan. Fenomena manuver beberapa elit PKS di luar kesepakatan *syura* adalah contoh dari problem keagenan tersebut, seperti yang dituturkan seorang informan, "ternyata ada pihak-pihak tertentu yang sudah diingatkan beberapa kali tetapi tetap menampilkan, padahal tidak ada kesepakatan dari Majelis Syura. Dan istilah-istilah dia sedang mengembangkan pemikirannya". Atau khusus dalam konteks *fundrising* informan lain menuturkan, "Yang jadi masalah itu kan, kita nggak tau kesepakatannya, kita kan nggak tau kesepakatannya ... Apa konsekuensi dari uang yang kita terima? Dukungan dana, apa lanjutannya?"

Sementara itu, data penelitian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas internal sebuah partai politik untuk melakukan tindakan kolektif yang efektif sebagai upaya mencapai kinerja yang optimal tidak cukup dijelaskan hanya dengan *group inclusiveness* yang terdiri dari komponen relasional (kohesi struktural) dan komponen ideasional (identitas kolektif). Terdapat komponen lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kualitas organisasi, yang dalam kasus PKS dapat dijelaskan oleh sepuluh aspek, yaitu: (1) konsolidasi, (2) kinerja kader partai di ranah publik; (3) kualitas elit partai; (4) manajemen moderen; (5) sinergi dengan wilayah dan daerah; (6) komunikasi publik; (7) kecepatan respon; (8) staffing; (9) kemandirian ekonomi; dan (10) ketokohan publik. Kinerja PKS yang belum optimal di Pemilu 2009 dapat dilihat pula sebagai implikasi dari belum optimalnya kesepuluh aspek kualitas organisasi tersebut.

Tidak kondusifnya respon eksternal dan menyusutnya kapasitas internal pasca Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009, termasuk di dalamnya kualitas organisasi yang tidak maksimal, pada gilirannya membuat posisi PKS sebagai salah satu *contender* dalam arena politik Indonesia juga melemah, walaupun peneliti berpendapat bahwa PKS masih menjadi *member* dari *the polity* yang berpusat pada SBY sebagai tokoh sentral. Setidaknya terdapat dua indikator dari kondisi tersebut. Pertama, nyaris hilangnya HNW, tokoh PKS yang di 2004 sangat menonjol, dari percaturan para elit di tingkat nasional. PKS bukan hanya tidak mampu mengkapitalisasi ketokohan, modal sosial dan modal kultural HNW yang di 2004 menjadi Ketua MPR dan mampu menarik simpati publik yang luas, sehingga bisa melontarkannya ke posisi yang lebih strategis pasca Pemilu 2009,

melainkan juga gagal mempertahankan HNW di kursi Ketua MPR, atau salah satu posisi strategis di kabinet SBY. Kedua, PKS yang menempati posisi keempat dalam perolehan suara pemilu legislatif dan berjibaku mendukung SBY dalam pilpres 2009, ternyata mendapatkan portofolio yang tidak sebaik PAN (yang perolehan suaranya di bawah PKS dalam pemilu legislatif) dan Partai Golkar (yang tidak berkoalisi dengan SBY dalam pilpres). Setidaknya PAN dan PG masing-masing memperoleh kursi Menteri Koordinator, di samping beberapa pos Menteri lainnya. Sementara PKS hanya memperoleh empat pos jabatan Menteri. Bahkan, beberapa elit Partai Demokrat ditengarai berupaya keras mendorong SBY untuk mendepak PKS keluar dari koalisi partai-partai pemerintah.

Tabel 6.7
Ikhitisar Aspek-Aspek Tindakan Kolektif PKS
Sampai Dengan Pemilu 2004 dan Pasca Pemilu 2004

No	Aspek	Kondisi		Simpulan
		S.d. Pemilu 2004	Pasca Pemilu 2004	
A	**Respon Eksternal**	**Kondusif**	**Tidak kondusif**	**Menurun**
1	Publik	♦ Jenuh dengan partai-partai lama. ♦ Berharap pada PKS sebagai pembaharu.	♦ Pragmatis, berorientasi tokoh. ♦ Sebagian menganggap PKS sama dengan parpol lain.	Dukungan publik menurun.
2	Kompetitor	♦ Partai-partai lama cenderung menurun. ♦ Partai Demokrat belum kuat; ketokohan SBY baru dimulai.	♦ Pesaing menggempur basis PKS di kota-kota. ♦ SBY berhasil mengkapitalisasi ketokohannya secara masif.	Kompetisi meningkat.
3	Media Massa	Mendukung dengan banyak memberi kemudahan.	Memberlakukan standar-standar komersial.	Dukungan media menurun.
B	**Kapasitas Internal**	**Berlimpah**	**Menyusut**	**Berkurang**
1	Kohesi Struktural	♦ Kondisi *tarbiyah* sehat. ♦ *Mutaba'ah* dan *ta'limat* berjalan dengan baik.	♦ Perhatian terhadap *tarbiyah* melemah. ♦ Kejenuhan mengikuti *liqa* karena *politcal content* yang terlalu kental.	Melemah.
2	Identitas	♦ "Bersih, peduli" menjadi distingsi yang signifikan. ♦ Kebanggaan sebagai kader PKS kuat.	♦ Wacana Partai Terbuka memicu kebingungan. ♦ "Bersih, peduli, profesional" bukan lagi distingsi yang kuat	Melemah.
3	Kohesi Sosial/ *Group Inclusiveness*	Kuat, sebagai implikasi dari kohesi struktural yang kuat dan identitas yang solid.	Relatif lemah, akibat dari kohesi struktural dan identitas yang melemah.	Melemah.

No	Aspek	Kondisi		Simpulan
		S.d. Pemilu 2004	Pasca Pemilu 2004	
4	Tingkat Keorganisasian	Tinggi, sebagai implikasi dari kohesi sosial yang kuat.	Relatif rendah, akibat dari kohesi sosial yang melemah.	Menurun.
5	Perilaku Kewargaan	Kepemimpinan yang mengayomi dan situasi internal yang nyaman, di samping ancaman *treshold*, menimbulkan motivasi internal yang tinggi untuk *extra miles*.	Ketidaknyamanan sebagai akibat dinamika internal yang terjadi, ditambah perilaku elit yang dipersepsikan tidak empati, dan minim keteladanan menurunkan motivasi.	Motivasi untuk *extra miles* berkurang.
6	Problem Keagenan	Rendah, sebagai implikasi dari kohesi sosial yang tinggi.	Relatif tinggi sebagai implikasi dari kohesi sosial yang menurun.	Meningkat
7	Kepemilikan Sumber Daya	♦ Jumlah: 263.000 kader. ♦ Sumber finansial terbatas. ♦ Komitmen tinggi.	♦ Jumlah: 800.000 kader. ♦ Dana dan fasilitas relatif melimpah. ♦ Komitmen relatif menurun	Fisik naik, non-fisik turun.
8	Kemampuan Memobilisasi Sumber Daya	Tinggi, sebagai implikasi dari tingkat keorgnisasian yang tinggi.	Menurun, sebagai implikasi dari tingkat keorganisasi yang menurun.	Menurun
C	**Kapasitas Tindakan Kolektif**	**Kuat, sebagai implikasi dari respon eksternal yang kondusif dan kapasitas internal yang berlimpah.**	**Relatif lemah, akibat dari respon eksternal yang tidak kondusif dan kapasitas internal yang menyusut.**	**Menurun**
D	**Kinerja**	**♦ 8.325.020 suara** **♦ 7,34% dari *total votes*** **♦ 45 kursi DPR RI**	**♦ 8.206.955 suara** **♦ 7,88% dari *total votes*** **♦ 57 kursi DPR RI**	**Tergantung cara pandang.**

6.4.2. Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014

Berbagai skenario yang mungkin akan dilalui oleh PKS dalam menyongsong Pemilu 2014 yang akan datang merupakan resultan dari perkembangan kondisi eksternal dan kapasitas internal partai ini hingga beberapa saat menjelang pelaksanaan pemilu. Kompetitor tentunya merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Sejumlah informan cukup optimis bahwa *playing field* di Pemilu 2014 akan relatif lebih berimbang dibandingkan sebelumnya, karena konstitusi tidak memungkinkan SBY di-capres-kan kembali. Namun sesungguhnya optimisme tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Demokrat dan dua partai besar lainnya, Golkar dan PDIP, memiliki *advantage* dibandingkan PKS, yaitu sumber-sumber dana yang siap dimobilisasi secara masif untuk memunculkan dan mengkapitalisasi tokoh-tokoh baru dalam

waktu yang relatif singkat. Manuver PKS melontarkan isu “Partai Terbuka” tentu akan dibaca sebagai upaya untuk memperluas basis pemilih dengan memasuki segmen nasionalis-sekular yang selama ini diperebutkan oleh partai-partai yang di Pemilu 2004 menempati posisi tiga besar perolehan suara. Hal itu akan mengundang perlawanan sengit dari partai-partai tersebut. Dengan demikian, masih diragukan bahwa situasi kompetisi akan menjadi peluang bagi PKS dalam pemilu yang akan datang. Dengan kata lain, besar kemungkinan faktor ini masih akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi PKS. Dalam konteks menggambarkan skenario untuk menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang, PKS perlu memperhitungkan pula kemungkinan dikeluarkan dari koalisi pemerintahan SBY. Sebenarnya, jika dikelola dengan cerdas, posisi sebagai partai oposisi bisa menjadi peluang untuk meningkatkan posisi objektif PKS dalam menghadapi Pemilu 2014. Dengan demikian, dalam *the polity model*, keluar atau dikeluarkannya satu *contender* dari *the polity*, sehingga posisinya berubah dari *member* menjadi *challenger*, tidak mesti bermakna negatif, atau dipandang sebagai pelemahan posisi objektif *contender* yang bersangkutan, jika dilihat dalam dimensi ruang yang lebih luas dan dimensi waktu yang lebih panjang. Untuk kasus PKS, keluar dari koalisi, lalu secara konsisten mengartikulasikan suara-suara publik yang kerap diabaikan oleh Pemerintah, hadir dengan tangkas dam bernas pada kondisi-kondisi di mana masyarakat tak berdaya dan Pemerintah alpa, dengan kembali menekuni rekrutmen dan pembinaan, serta mengukuhkan integritas sebagai Partai Dakwah, akan membuat PKS menjadi *contender* yang lebih “berotot” dalam pertarungan berikutnya, sehingga bukan saja berpeluang untuk kembali masuk ke dalam *the polity* dan menjadi *member*, namun juga dapat mengambil peran yang lebih signifikan.

Perlu pula digarisbawahi bahwa PKS akan berhadapan dengan publik pemilih yang semakin kritis, karena Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat pasca Reformasi 1998. Masyarakat sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam berinteraksi dengan partai-partai yang berlaga di pemilu. Secara umum memori kolektif publik tentang parpol bernada negatif. Sepak terjang kader-kader parpol di jabatan-jabatan publik, baik legislatif maupun eksekutif, di pusat dan di daerah, sejauh ini lebih banyak mengundang sinisme ketimbang pujian. Kesan

umum yang terbentuk, partai dan kader-kadernya semata-mata mengejar kekuasaan, dan tidak secara sungguh-sungguh mengartikulasikan kepentingan publik yang telah memilih mereka, maupun berupaya memenuhi janji-janji kampanye mereka. Implikasinya, publik seperti terasing, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap politik dan partai-partai. Katz dan Mair (2002) mengaitkan fenomena ini dengan kecenderungan menguatnya peran *the party in the public office* dan kartelisasi partai. Mereka berdua mengatakan:

> "As party leaderships become more autonomous from their own following, and as they become increasingly busy with themselves and their own world, it is almost inevitable that they will be seen as being more remote. This in itself is problematic enough. But when this remoteness is also accompanied by a perceived failure to perform (even though such failure may well derive from costraints, both national and international, that are beyond the specific control of party), **it can then develop a sense of alieantion and mistrust, in which the political leaderships are not only seen to be distant from the voter, but also to be self-serving** (hal. 134).

Katz dan Mair menggarisbawahi dua persoalan yang menjadi pangkal kekecewaan publik terhadap partai, yaitu problem keagenan, di mana partai tidak lagi menjadi agregator dari suara publik yang diwakilinya, melainkan bekerja untuk kepentingannya sendiri, dan inkompetensi kader-kader partai yang menduduki jabatan-jabatan publik. Data penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua persoalan tersebut juga menjangkiti PKS. Pendapat seorang tokoh muda PKS yang menggambarkan persepsi publik, "kalau dibilang partai mana yang anti korupsi, ya tetep PKS", kurang berdasar. PKS memang bersuara keras dalam kasus Century dan mafia pajak, namun bersikap mengambang dalam menyikapi BLBI, dan terkesan tidak lagi begitu bersahabat dengan KPK. Dalam konteks kinerja, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras, bahkan peringkat keempat di dunia, pada saat Menteri Pertanian dijabat oleh kader PKS. Cuaca ekstrem mungkin memang merupakan penyebabnya. Namun seperti kata Katz dan Mair publik cenderung menutup mata terhadap berbagai kendala yang sesungguhnya berada di luar kendali partai atau kadernya yang menjadi pejabat publik. Dengan demikian, cukup besar kemungkinan respon publik terhadap PKS berupa represi, bukan dukungan.

Kuat dugaan bahwa faktor-faktor eksternal secara agregat akan tidak kondusif bagi PKS untuk mencapai kinerja yang baik di Pemilu 2014. Kemampuan suatu organisasi untuk melakukan tindakan kolektif ditentukan oleh seberapa besar peluang dan dukungan yang disediakan oleh kondisi eksternal, dan seberapa berlimpah kapasitas internal yang dimiliki organisasi tersebut. Dengan demikian, kondisi eksternal yang kurang menguntungkan, sebagaimana dibahas di atas, harus dikompensasi oleh keberlimpahan kapasitas internal PKS, yang ditentukan oleh seberapa kuat kohesi sosial atau *group inclusiveness*, dan seberapa baik kualitas organisasi partai ini. Sedangkan kohesi sosial memiliki komponen relasional dan komponen ideasional.

Peningkatan kualitas komponen relasional dari kohesi sosial – disebut juga kohesi struktural – menuntut peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan yang terjalin di antara para anggota organisasi. Dalam konteks PKS, mekanisme utama yang memastikan keterhubungan para kader adalah sistem *tarbiyah* dengan *halaqah* atau *usrah* sebagai tulang punggungnya. Dengan demikian, revitalisasi *tarbiyah* merupakan kemestian yang tak dapat ditunda. PKS harus kembali menekuni bisnis intinya ini dengan sungguh-sungguh, dan mengerahkan sumber daya terbaik yang dimilikinya ke sana. Sambil berjalan, kualitas faktor-faktor pendukung, setidaknya operator dan referensi, perlu segera ditingkatkan, karena dalam bahasa Bourdieu, *tarbiyah* harus diarahkan bukan hanya untuk membentuk habitus dakwah dan *tarbiyah* seperti yang selama ini berjalan, namun juga habitus politik dan habitus ekonomi, sesuai dengan tuntutan arena di mana para kader PKS berkiprah. Namun perlu dipastikan bahwa yang terjadi bukanlah langkah pragmatis mereduksi *liqa* menjadi diskusi politik praktis seperti yang ditengarai telah terjadi pada masa yang lampau. Yang mesti dilakukan, sebagaimana dikatakan seorang kader senior, adalah memahamkan kondisi dan tantangan yang ada di arena politik, atau seperti kata kader yang lain, “mengajari bagaimana bermain” sehingga para kader “tidak bermain dengan cara orang lain”. Dengan demikian, *political content* tersebut harus masuk, *embodied*, di dalam Manhaj Tarbiyah, termasuk dalam *muwashafat* dan indikator-indikator yang digunakan. Revitaliasi *tarbiyah* ini juga akan menimbulkan akibat sampingan yang positif, yaitu memberikan sinyal kepada para kader bahwa PKS sedang mengokohkan

identitasnya sebagai Partai Dakwah, karena sebagaimana penuturan seorang informan, “Kita misalnya di tengah kondisi tidak enak apa semua itu, kita masih bertahan karena dakwah”.

Selain komponen relasional, penguatan kohesi sosial juga menghendaki pengokohan identitas kolektif sebagai komponen ideasional. Jenkins (2004) merinci tiga komponen identitas kolektif, yaitu “sebagai apa kita mengenal diri kita sendiri”, “sebagai apa kita mengenai orang lain”, dan “sebagai apa orang lain mengenal kita”. Ketika terjun ke arena politik, Jemaah Tarbiyah memilih “Partai Dakwah” sebagai ekspresi identitasnya, yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai entitas politik nasional yang “secara subjektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat” (MPP PKS: 2008: 32). Peek (2005) menegaskan bahwa identitas keagamaan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi penguatan identitas kolektif, jika ia lahir dari proses refleksi yang matang, sebagai respon terhadap kondisi internal dan tantangan eksternal. Dalam konteks ini, seorang kader bertanya, tepatnya menggugat, PKS ingin menjadi Partai Dakwah yang seperti apa? Motto “bersih, peduli, profesional” merupakan jawaban awal yang cukup baik. Jika bersih, peduli, dan profesional dianalogikan sebagai variabel independen dari sebuah variabel dependen bernama “Partai Dakwah” maka kemudian setiap variabel independen tersebut harus dirinci menjadi sejumlah indikator yang spesifik dan menyeluruh, tanpa kehilangan kesederhanaan dan kepraktisan. Indikator-indikator itulah yang kemudian disosialisasikan terus-menerus dengan menjadikannya sebagai bagian integral dari Manhaj Tarbiyah. Dengan kata lain, ia harus diproses agar *embodied* dalam habitus politik para kader PKS, yang dengan itu mereka akan membentuk praksis politik, atau mengapresiasi berbagai praksis yang mereka temui di arena politik. Dalam kaitan dengan salah satu komponen identitas kolektif, yaitu “sebagai apa orang lain mengenal kita”, para kader PKS yang menjadi pejabat publik punya peran penting untuk memastikan bahwa kiprahnya, setidaknya dalam bentuk komunikasi politik dan kinerja, memberikan pesan yang konsisten dengan identitas PKS sebagai Partai Dakwah dan motto “bersih, peduli, profesional”.

Di samping itu, para elit PKS yang menjadi bagian dari *the party in central office* dan *the party in public office* harus mendisiplinkan diri untuk tidak mengeluarkan simbol-simbol yang berpotensi mendistorsi konstruksi makna Partai Dakwah, baik bagi publik PKS maupun publik eksternal. Dalam bahasa Hallett (2003), harus dipastikan bahwa *impression management* di arena politik sebagai *front stage* dilakukan dalam batasan habitus politik kolektif PKS, sehingga tidak terdapat inkonsistensi antara bentuk ekspresi yang disadari dengan yang tidak disadari. Dalam konteks ini, Majelis Syura perlu mengeluarkan sikap atau penjelasan resmi tentang isu "Partai Terbuka" yang sempat menghangat di publik PKS dan publik eksternal beberapa waktu yang lalu. Menurut hemat peneliti, ragam pandangan para informan tentang isu ini, sebagaimana diikhtisarkan pada tabel 5.10 di Bab 5, menunjukkan seriusnya persoalan ini, mengingat sebagian besar dari mereka adalah kader senior yang mestinya mewakili pandangan resmi partai. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan indikasi dari belum terbangunnya *shared-meaning* yang kuat di kalangan elit PKS. Dengan demikian PKS perlu bercermin pada keberhasilan AKP mendulang simpati berlimpah dari pemilih Turki. Sebagaimana analisis Özbudun (2006), salah satu sebab utama kegemilangan AKP adalah konsistensi pesan yang disampaikan kepada pemilih melalui program, sistem nilai, organisasi partai, strategi bersaing, kampanye politik, dan citra pribadi tokoh-tokoh partai. Data menunjukkan pasca Pemilu 2004, terlebih lagi di sekitar Pemilu 2009, inkonsistensi pesan yang diterima oleh publik merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi PKS. Berbagai hiruk-pikuk bernuansa politis dan hukum yang mengemuka di sejumlah media, membuat motto "bersih, peduli, profesional" sebagai simboliasi jatidiri PKS kehilangan daya konstitutifnya.

Khusus terkait dengan aspek "bersih", PKS perlu mengeluarkan panduan yang lebih rinci dan rigid tentang *who, what,* dan *how to* dari sumber-sumber keuangan yang dapat diakses oleh partai, karena hingga saat ini isu-isu yang tidak jelas seputar hal ini berkontribusi cukup besar terhadap munculnya friksi internal di PKS. PKS tidak bisa lagi hanya mengandalkan prinsip "Tiga Aman" yang sangat elastis dan multitafsir, karena sesuatu yang terlalu fleksibel dan dapat dimaknai beragam tentu saja menyimpan potensi konflik yang laten. Di samping

panduan, secara struktural harus ada institusi khusus yang memastikan panduan tersebut dipatuhi oleh seluruh kader. Mengingat sangat spesifik dan pentingnya hal ini, peran tersebut tidak bisa diserahkan kepada Dewan Syariah Pusat. Semacam lembaga Audit Internal yang independen adalah alternatif yang lebih baik.

Komponen ketiga yang telah ditambahkan sebagai penentu kohesi sosial, di samping komponen relasional dan komponen ideasional, yaitu pemimpin sebagai *solidarity maker* sekaligus *cultural ambassador*, akan menjadi pekerjaan rumah terbesar PKS dalam menghadapi Pemilu 2014. Hingga saat ini, sekitar tiga tahun menjelang pemilu, PKS belum punya sosok yang siap untuk menjalankan peran itu. Ustadz Hilmi Aminuddin selama ini memang menjalankan peran internal sebagai *solidarity maker*. Namun cakupan dari peran tersebut semakin lama semakin terbatas, karena beliau mulai menarik diri. Faktor usia dan kesehatan secara alamiah juga akan semakin membatasi peran tersebut. Di samping itu, ukuran organsisasi PKS yang semakin besar membuat semakin banyak kader yang berkiprah bukan lagi murid langsung Ustadz Hilmi, sehingga ikatan historis dan emosional yang ada tidak lagi sekuat di masa-masa sebelumnya, dan akan semakin digantikan oleh hubungan-hubungan yang bersifat rasional dan fungsional. Sementara itu, Ustadz Hilmi tidak mungkin menjalankan peran sebagai *cultural ambassador* di publik eksternal, karena dalam tradisi PKS seorang *Murraqib 'Am* tidak boleh memegang jabatan publik di luar partai.

Tokoh lain yang sebenarnya cukup prospektif untuk menjalankan kedua peran tersebut adalah Hidayat Nur Wahid (HNW). Dengan kesantunan, kesederhanaan, dan kecerdasannya, ketika menjabat Presiden Partai HNW cukup efektif menjalankan peran sebagai *solidarity maker*, dan berlanjut sebagai *cultural ambassador* pada saat menjadi Ketua MPR. Namun demikian, pasca Pemilu 2009 yang bersangkutan sudah tidak memiliki "panggung" yang memadai, baik di internal PKS, maupun di publik eksternal. Padahal, kedua peran tersebut hanya dapat ditampilkan secara efektif di "panggung yang besar". Di internal PKS, HNW hanya menjadi anggota Majelis Syura. Ia tidak lagi memiliki jabatan struktural yang memafasilitasinya untuk menjalin interaksi yang masif dan intensif dengan para kader, yang merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk

berperan sebagai *solidarity maker* secara formal. Secara informal, HNW juga bukan *murabbi* dari para kader PKS yang saat ini menempati posisi-posisi struktural yang strategis. Di samping itu, yang bersangkutan juga sosok yang independen dan "berjalan lurus-lurus saja", bukan tokoh yang pandai dan gemar bermanuver untuk menggalang dukungan, termasuk dari *Murraqib 'Am*. Secara eksternal, di Parlemen, HNW adalah Ketua Badan Kerjasama Artar Parlemen (BKSAP). Posisi tersebut mungkin cukup berarti untuk memperkuat posisi yang bersangkutan di percaturan internasional, namun hampir tidak ada gaungnya di arena politik nasional. Selebihnya, HNW tampil di beberapa forum dan media sebagai ustadz atau intelektual. Peran-peran tersebut lebih menguatkan *positioning* personal HNW sebagai tokoh kultural, bukan pemimpin politik, apalagi *cultural ambassador* dari suatu entitas politik bernama PKS.

Tokoh lain yang dapat dimunculkan saat ini praktis tidak ada. Presiden Partai saat ini, Ustadz LHI, punya modal yang baik untuk menjadi *solidarity maker*. Sebagaimana penuturan beberapa informan, yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat baik hati, menghormati semua orang, serta senang sekali bertemu dan menjalin komunikasi personal dengan para kader. Namun seperti dikatakan seorang informan, LHI mempunyai kekurangan dalam hal manajemen organisasi. Di samping itu, yang bersangkutan juga adalah murid yang sangat menghormati Ustadz Hilmi. Dia sangat memahami bahwa secara personal Ustadz Hilmi dekat dengan Sekjen PKS, AM, sehingga besar kemungkinan dia akan menahan diri ketika terdapat ketidaksepahaman dalam pengelolaan organisasi. Dengan berjalannya waktu, hal-hal ini berpotensi membuat sebagian kader meragukan kemampuan LHI untuk menjadi nahkoda yang kuat.[12] Citra sebagai nahkoda yang kuat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan peran sebagai *solidarity maker*. Sedangkan di publik eksternal LHI belum menunjukkan ekistensinya. Media sangat jarang menampilkan sosok dan pemikirannya. Situasi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi ketika

[12] Seorang informan mengemukakan satu contoh kasus di mana LHI membentuk Tim Manhaj yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden Partai untuk merevitalisasi Manhaj Tarbiyah, yang sebenarnya merupakan domain Bidang Kaderisasi di DPP PKS. Langkah tersebut bisa ditafsirkan bahwa sebagai Presiden Partai LHI tidak bisa leluasa mengakses Bidang Kaderisasi. Pada akhirnya Tim Manhaj tidak bisa berperan efektif karena tidak mendapat dukungan dari Bidang Kaderiasi.

HNW menjadi Presiden PKS. Beliau sangat kerap tampil di berbagai media, diminta menyampaikan komentar dan gagasannya tentang berbagai isu yang sedang berkembang saat itu.

Sementara itu, sekjen PKS, AM, memiliki citra sebagai tokoh muda yang cerdas, "orang syariat yang mampu berpikir empirik", serta mampu mengartikulasikan gagasan-gagasannya dengan baik, secara lisan maupun tulisan. Namun di internal PKS, AM tetap menyimpan kontroversi. Beberapa kader senior dan banyak kader muda memang mengagumi sosok AM, bahkan percaya bahwa AM adalah figur yang cocok menjadi pemimpin PKS masa depan. Namun sebagian kader yang lain, termasuk sejumlah besar kader senior, resisten terhadap AM. Beberapa informan bahkan dengan tegas mengatakan bahwa AM terkesan *powerful* semata-mata karena memiliki hubungan yang bersifat *patronage* dengan Ustadz Hilmi. Di publik eksternal, AM juga tidak mudah untuk ditokohkan. Menurut beberapa informan, sosoknya yang *high profile* tidak cocok dengan citra "pemimpin Indonesia" yang ada di memori kolektif sebagian besar masyarakat, yang sesungguhnya adalah "pemimpin Jawa", sesuatu yang membuat HNW sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, PKS perlu melakukan langkah-langkah sistematis, suatu rekayasa sosial, untuk memunculkan sosok pemimpin yang mampu berperan sebagai *solidarity maker* dan *cultural ambassador*. Peneliti tidak sependapat dengan seorang elit PKS yang mengatakan bahwa kebijakan PKS saat ini adalah mempersilakan setiap kader menokohkan diri masing-masing, dan kemudian partai akan melihat preferensi publik terhadap para kader tersebut. Dalam konteks budaya PKS yang sangat paternalistik dan cenderung oligarkis seperti diulas dengan rinci di bab sebelumnya, praktis tidak mungkin mengharapkan tokoh-tokoh alternatif tersebut akan muncul secara alami. Untuk muncul dan kemudian ditokohkan, seseorang memerlukan momentum, panggung, dan sumber daya. Untuk kebaikan PKS ke depan, partai ini perlu merekayasa kemunculan tokoh-tokoh alternatif dengan memfasilitasi ketiga faktor tersebut.[13]

[13] Terkait dengan hal ini, seorang informan sangat menyayangkan terlewatinya sebuah momen yang sangat tepat untuk memunculkan alternatif pemimpin baru PKS, yaitu Musyawarah Majelis Syura tahun 2009 yang lalu. Dalam pemilihan Ketua Majelis Syura yang baru, HNW mendapatkan

Kemampuan PKS memunculkan sosok pemimpin yang dapat berperan sebagai *solidarity maker* akan meningkatkan kembali kualitas *citizenship behavior*, perilaku kewargaan, dari para kader PKS, yang diekspresikan dalam bentuk ketaatan, loyalitas, partisipasi fungsional, partisipasi sosial, dan partisipasi advokatif, yang melebihi tuntutan minimal kewajiban organisasi. Partisipasi fungsional adalah keterlibatan para kader dalam berbagai aktifitas yang merupakan aktifitas formal partai, seperti *halaqah* atau *usrah*, rekrutmen, pertemuan-pertemuan politik, dan lain-lain. Partisipasi sosial adalah keaktifan para kader untuk menjalin bentuk-bentuk interaksi informal di antara mereka, yang berperan sebagai "pelumas" bagi mesin organisasi. Sedangkan partisipasi advokatif adalah kiprah para kader menyampaikan saran, menuangkan pemikiran, dan menelurkan konsep-konsep untuk meningkatkan kualitas organisasi. Khusus terkait dengan partisipasi fungsional, salah satu yang harus sangat didorong dan difasilitasi adalah aktifitas para kader untuk merekrut kader-kader baru. Sebagai Partai Dakwah, yang juga Partai Kader, tentu saja jumlah kader harus bertumbuh secara masif dan berkesinambungan.[14]

Pada akhirnya, sejauh mana PKS mampu memperkuat kohesi strukturalnya, memperkokoh identitasnya, dan memunculkan pemimpin yang mampu menjadi *solidarity maker* dan *cultural ambassador* akan menentukan tingkat kohesi sosialnya. Faktor ini kemudian akan menentukan kemampuan PKS untuk membenahi aspek-aspek kualitas organisasinya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, para informan memandang bahwa PKS masih memiliki sejumlah kelemahan yang terkait dengan kesepuluh aspek kualitas organisasi. Hasil pembenahan aspek-aspek kualitas oganisasi tersebut yang akan menentukan tingkat keorganisasian, yang bermuara pada kemampuan PKS memobilisasi sumber daya yang dimiliki – materi, SDM kader, komitmen – untuk mengoptimalkan kapasitas tindakan kolektif PKS ketika bertarung di Pemilu

---

suara yang signifikan setelah Ustadz Hilmi Aminuddin. Menurutnya hal tersebut mestinya dimaknai sebagai sinyal bahwa secara *de facto* HNW layak menjadi Wakil Ketua Majelis Syura. Sayangnya Majelis Syura tidak menangkap dan mengartikulasikan sinyal itu secara kreatif dengan membuat institusi baru, yaitu Wakil Ketua Majelis Syura.

[14] Terkait dengan hal ini peneliti mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa untuk tahun 2011 DPP PKS mencanangkan untuk merekrut 1 juta kader baru di seluruh Indonesia.

2014. Artinya, kegagalan PKS dalam meningkatkan kualitas tindakan kolektifnya secara signifikan akan membuat tesis yang dikemukakan Baswedan (2004) yang mengatakan, *"Yet, the above comparative analysis indicates that the PKS has the potential to emerge as a major player as well, provided that it is able to connect with pious but pluralistic electorates"* tidak terwujud dalam realita Pemilu 2014. Ikhtisar selengkapnya dari langkah-langkah yang terdapat skenario PKS dalam menghadapi Pemilu 2014 terdapat pada gambar 6.2.

Gambar 6.2
Ikhtisar Skenario PKS Menghadapi Pemilu 2014

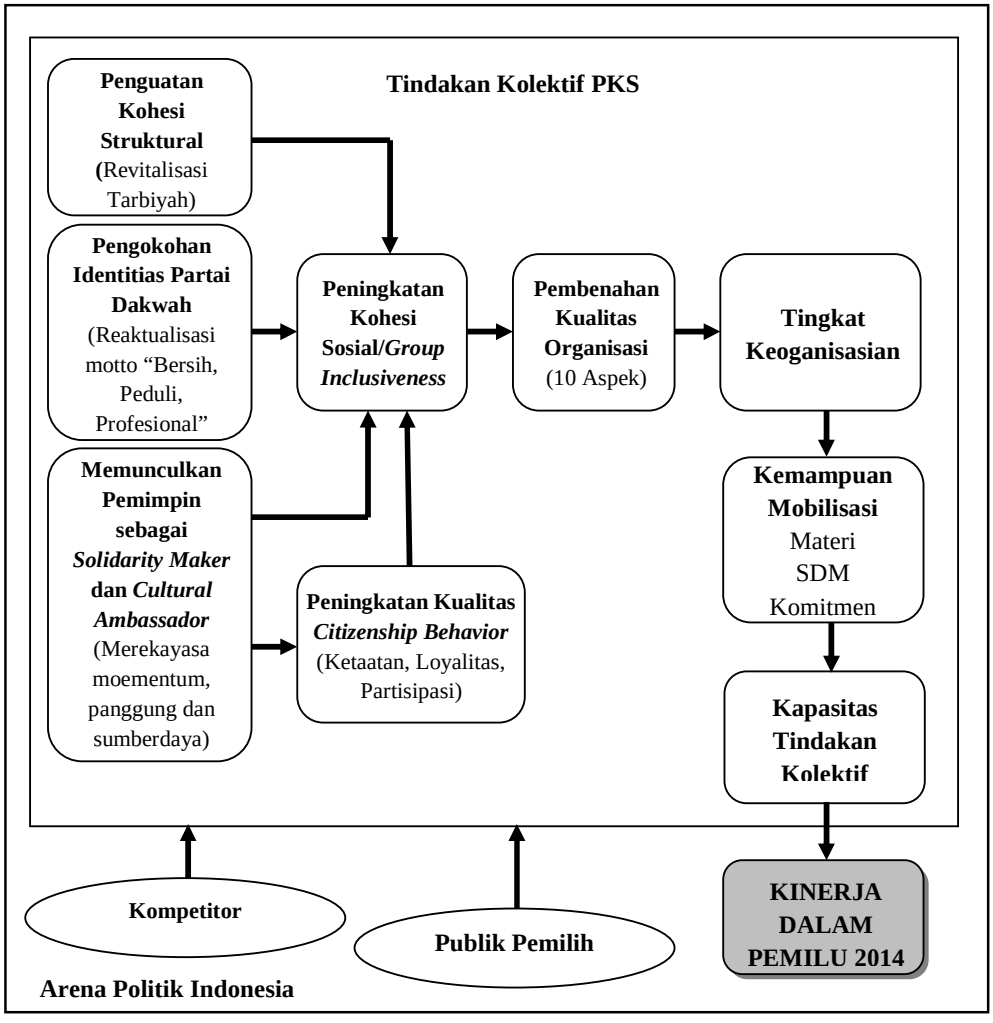

BAB 7
REFLEKSI, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

7.1. Refleksi dan Implikasi Teoretik

7.1.1. Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi

Sebagaimana diulas di Bab 4, tidak begitu mudah memasukkan PKS ke dalam berbagai tipologi partai politik maupun tipologi faksionalisasi yang lazim digunakan. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh "rute perjalanan" PKS yang khas dalam proses transformasinya menjadi partai politik. Titik berangkat sebagai Jemaah Tarbiyah, sebuah gerakan keagamaan "bawah tanah", membuat PKS titik cocok dengan tipologisasi klasik dari Katz dan Mair (2002) – *the elite party*, *the mass party*, *the catch-all party*, *the cartel party* – yang dibangun berdasarkan logika evolusi sebagai implikasi dari dinamika antar kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, PKS tidak lahir sebagai representasi dari sebuah kelas sosial tertentu, melainkan sebuah ideologi, atau pemikiran keagaman tertentu. Kecocokan PKS dengan sebagian ciri *the catch-all party* dan *the cartel party* juga terjadi pada partai-partai lain, karena hal tersebut semata-mata merupakan implikasi dari realita demokrasi liberal yang berlangsung saat ini, di mana untuk terus bertahan setiap partai harus memperluas basis pemilihnya, sekaligus mendayagunakan dukungan dari negara. Sementara itu, PKS juga sulit ditempatkan pada tipologi *the mass-bureaucratic party* dan *the professional-electoral party* yang dikemukakan Panebianco (1988), karena PKS menampakkan sebagian karakteristik dari kedua tipe partai tersebut.

Oleh karena itu, tipologi yang bersifat *"hybrid"* seperti *the modern cadre party* dari Koole (1994, dalam Wolinetz 2002), relatif lebih mampu menggambarkan karakteristik PKS. Karakteristik tipologi tersebut sesungguhnya merupakan gabungan dari sebagian karakteristik *the classic cadre party* dan *the mass party*. Namun, kelima karakteristik *the modern cadre party* – peran politisi profesional yang semakin menonjol, rasio anggota-pemilih yang relatif kecil, upaya perluasan basis pemilih, struktur vertikal yang relatif ketat, dan kombinasi

sumber-sumber dana dari anggota dan publik – belum menggambarkan karakteristik PKS secara utuh.

Tabel 7.1
Ikhtisar Karakteristik PKS sebagai Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan *(The Religious Movement-Based Cadre Party)*

No	Karakteristik	Dukungan Temuan
A	**Karakteristik Umum Partai Kader Moderen**	
1	Peran politisi profesional yang semakin menonjol.	Tenaga ahli anggota Dewan dan birokrat partai di Kantor Pusat yang *full timer*.
2	Rasio anggota-pemilih yang relatif kecil	Tahun 1999 1:45, 2004 1: 32, 2009: 1: 10.
3	Upaya perluasan basis pemilih.	Wacana PKS sebagai "Partai Terbuka", iklan yang "ngepop" dan kontroversial, Munas di Bali (2009) dan di Hotel Ritz Carlton the Pacific Place (2010).
4	Struktur vertikal yang relatif kuat.	Struktur lengkap DPP (Pusat), DPW (Propinsi), DPD (Kabupaten/Kota), DPC (Kecamatan), dan DPRa (Kelurahan/Desa).
5	Kombinasi sumber-sumber dana dari anggota dan publik.	Iuran anggota, potongan gaji para pejabat publik dari PKS, subsidi negara, donasi dari pihak ketiga.
B	**Karakteristik Khusus Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan**	
1	Eksistensi dualitas struktur partai dan gerakan.	Struktur partai dari pusat hingga ke desa/kelurahan, dan struktur tarbiyah dari Bidang Kadersisasi Pusat hingga ke *usrah/halaqah*.
2	Struktur organisasi yang cenderung oligarkis.	Ketua Majelis Syura atau *Murraqib 'Am* dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau *Majlis Riqabah 'Ammah* (MRA) yang memiliki kewenangan yang sangat besar.
3	Mekanisme "demokrasi terbatas" untuk mewadahi partisipasi akar rumput.	Pemilihan raya untuk memilih sebagian dari anggota Majelis Syura yang mewakili para kader di seluruh Indonesia.
4	Sistem kaderisasi yang berjenjang dan ketat.	Sistem *tarbiyah* dengan enam jenjang keanggotaan dan mekanisme *taqwim* (evaluasi) kenaikan jenjang.
5	Dominannya peran ideologi sebagai perekat *group inclusiveness.*	Pemilihan format "Partai Dakwah" dengan doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* ("jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah"), serta asas Islam yang tercantum di AD.

Data penelitian ini menunjukkan, setidaknya terdapat lima karakteristik khas PKS yang bersumber dari akar historisnya sebagai gerakan keagamaan. Pertama, eksistensi dualitas struktur partai dan gerakan. Kedua, struktur organisasi yang cenderung oligarkis. Ketiga, adanya mekanisme "demokrasi terbatas" untuk mewadahi peran serta kader di akar rumput. Keempat, sistem kaderisasi yang berjenjang dan sangat ketat. Kelima, relatif dominannya peran ideologi sebagai perekat *group inclusiveness* di antara para anggota. Dengan demikian, peneliti

memandang perlunya dibuat sebuah kategori baru yang merupakan varian dari *the modern cadre party*, yaitu **partai kader berbasis gerakan keagamaan *(the religous movement-based cadre party)*** yang diikhtisarkan dalam Tabel 7.1.

Selanjutnya, dalam kasus PKS, faksionalisasi juga harus dilihat dalam konteks akar historisnya sebagai gerakan keagamaan. Secara umum, para kader Jemaah Tarbiyah memasuki arena politik dengan dua habitus yang berbeda. Sebagian masih menggunakan habitus dakwah dan *tarbiyah*, sehingga memaknai politik semata-mata sebagai alat atau kendaraan bagi dakwah. Sebagian lagi menggunakan habitus politik kekuasaan, sehingga dakwah dan *tarbiyah* ditempatkan sebagai sub-ordinat, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian, faksionaliasi harus dilihat sebagai kolektifitas dari sejumlah aktor yang memiliki habitus yang mirip (Ritzer & Goodman, 2003, Dobbin, 2008). Mengingat habitus bersifat dinamis, sesuatu yang diproduksi sekaligus memproduksi dunia sosial para aktor, *structured structure* sekaligus *structuring structure*, faksionalisasi di PKS tidak dapat dijelaskan dengan teori faksionaliasi yang rigid dan *mutually exclusive* seperti pembagian faksi reformis, faksi oportunis, faksi militan (Roemer, 2006), maupun kelompok progresif dan kelompok konservatif (Kauppi, 2003).

Temuan penelitian memperlihatkan adanya sejumlah faksi dengan *grouping factors* yang berbeda-beda. Beberapa faksi memiliki anggota yang saling beririsan satu sama lain. Bahkan ada faksi-faksi yang memiliki irisan yang sangat besar sehingga membentuk suatu kelompok yang dapat dibedakan dari kelompok yang lain. Melihat karakteristik dari faksionalisasi yang ada, peneliti menyebutnya sebagai **faksionalisasi dinamis**. Karakteristik tersebut adalah, pertama, terdapat beberapa *grouping factors* yang menghasilkan sejumlah faksi. Kedua, faksi-faksi tersebut tidak *mutually exclusive*, sehingga terdapat sejumlah irisan satu sama lain. Ketiga, sejumlah faksi yang memiliki irisan yang relatif besar terkelompokkan menjadi satu dan menunjukkan suatu kemiripan tertentu. Keempat, dimungkinkan pergerakan sebagian anggota dari satu faksi ke faksi yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, namun batasan masing-masing faksi dan kelompok tetap terlihat.

Untuk kasus PKS, pengelompokkan yang ada adalah kelompok *religious movement oriented* dan kelompok *political party oriented,* di mana *grouping factors* yang mengelompokkan para anggota organisasi adalah faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan habitus kolektif mereka Doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah", "*jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah" yang dianut PKS membuat tidak sulit bagi kita memahami mengapa terdapat pola pengelompokkan seperti itu. Secara sederhana, ini adalah tarik-menarik antara "kelompok agamawan" yang lebih didominasi oleh habitus dakwah dan *tarbiyah*, dan "kelompok politisi" yang lebih didominasi oleh habitus politik, tentang siapa yang lebih tepat mewakili partai, siapa yang lebih tepat memimpin partai, dan bagaimana sumber daya partai dialokasikan (Rosenblum, 2003). Menurut hemat peneliti, pola pengelompokkan yang demikian berlaku umum untuk partai yang menjadi wadah ekspresi politik para aktifis gerakan keagamaan. Namun demikian, justru pola pengelompokkan tersebut kecil kemungkinannya akan terlihat pada partai politik yang dibentuk sebagai sayap dari organisasi keagamaan, karena biasanya sudah terdapat pembagian peran yang relatif jelas, di mana para "agamawan" akan tetap berada di organisasi keagamaan yang merupakan organisasi induk, dan para "politisi" ditugaskan mengurus partai.

Dalam hal keterkaitan antara tipologi partai politik dan faksionalisasi, data mendukung tesis Wolinetz (2002) yang mengatakan bahwa kecenderungan partai untuk bergerak/berubah di antara *the policy seeking party, the vote seeking party,* dan *the office seeking party*, mencerminkan tarik-menarik atau kompetisi yang terjadi di antara faksi-faksi yang ada. Tipe partai yang paling menonjol pada suatu saat tertentu mencerminkan faksi yang terkuat pada saat tersebut. Menguatnya posisi objektif kelompok *political party oriented* di arena PKS dicerminkan oleh pergerakan dari *policy seeker* menjadi *office seeker*.

7.1.2. Dinamika Internal dan Kapasitas Tindakan Kolektif

Data penelitian ini secara umum menunjukkan keberlakuan teori tindakan kolektif yang dikemukakan oleh Tilly (1978) untuk sebuah partai politik berdasarkan agama pada dua tataran. Di tataran pertama, model lingkungan politik yang menggambarkan perilaku para *contenders* yang selalu bersaing, bahkan

bertarung, untuk menjadi *members* dari lingkungan politik *(the polity)* agar dapat menikmati relasi yang berkesinambungan dan efisien dengan *government,* merupakan abstraksi yang cukup akurat untuk menggambarkan dinamika di antara kelompok-kelompok, atau faksi-faksi yang ada dalam partai politik. Sedangkan di tataran kedua, model mobilisasi yang menjelaskan bagaimana respon faktor-faktor eksternal dan kapasitas internal berpengaruh terhadap kemampuan suatu organisasi memobilisasi sumber daya, merupakan gambaran yang cukup tepat dari unsur-unsur yang berperan dalam upaya partai dalam membangun kapasitas tindakan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

7.1.2.1. Dinamika Internal

Di tataran pertama, ketiga asumsi yang dijadikan dasar teori tindakan kolektif Tilly didukung oleh data penelitian ini. Pertama, setiap kelompok memperhitungkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh tindakan kolektif yang mereka lakukan. Dengan kata lain, berbagai manuver yang dilakukan adalah tindakan rasional berdasarkan pertimbangan biaya-manfaat dalam konteks posisi objektif mereka dalam lingkungan politik. Contohnya, beberapa informan sangat *concern* pada kerahasiaan identitas diri mereka, bahkan beberapa tokoh kunci tidak bersedia untuk diwawancarai, karena khawatir akan mengganggu posisi objektif mereka di arena pertarungan yang sedang berlangsung.[1] Kedua, tindakan kolektif menghasilkan sumber daya kolektif. Atau dalam kerangka berpikit Bourdieu, kemenangan dalam suatu pertarungan simbolik akan menambah akumulasi modal simbolik yang dapat dimanfaatkan untuk memilih dan mengeksekusi strategi yang lebih hebat dalam pertarungan berikutnya.

[1] Seorang informan yakin bahwa jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh penelitian ilmiah akan berkontribusi positif bagi proses pendewasaan organisasi. Namun jika identitasnya sebagai informan dibuka, ia akan "bermain aman" dalam menyampaikan informasi. Informan lain meminta identitasnya dirahasiakan karena ia masih punya harapan bahwa dirinya berpeluang untuk memperbaiki kondisi partai. Seorang tokoh senior menolak diwawancarai karena sudah lama tidak lagi berada di struktur DPP. Seorang mantan pejabat publik dari PKS juga menolak dijadikan informan. Menurut seorang informan yang berperan sebagai *gate keeper*, tokoh yang bersangkutan khawatir jawaban-jawaban yang diberikannya akan membuat posisinya terpojok. Sebelumnya tokoh tersebut pernah merasa dipojokkan setelah ia melayani sebuah permintaan wawancara. Sementara menurut informan lain, tokoh ini sangat menjaga keutuhan jemaah, dan dia tahu pasti bahwa jika dia bersikap maka faksionalisasi akan semakin tajam karena cukup banyak kader yang menjadikan dirinya sebagai rujukan.

Penguasaaan pos-pos strategis dalam struktur partai dan dukungan pemegang ototritas tertinggi adalah contoh-contoh sumber daya tersebut. Ketiga, ketidaklengkapan informasi tentang konstelasi lingungan politik, dan dinamisnya strategi yang diterapkan kelompok-kelompok pesaing, membuat setiap kelompok menyesuaikan pertimbangan biaya-manfaat secara terus-menerus. Implikasinya, strategi yang diterapkan oleh suatu kelompok – berkoalisi, keluar dari koalisi, membangun koalisi baru, menahan diri, menyerang secara aktif – berubah-ubah dengan sangat dinamis. Pengelompokkan dan faksionalisasi di PKS yang relatif cair menyiratkan hal ini. Namun demikian, teori tindakan kolektif Tilly abai terhadap faktor budaya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan asumsi keempat, **budaya organisasi berpengaruh terhadap pilihan-pilihan strategi yang diambil oleh kelompok-kelompok yang berkompetisi**.

Di tataran kedua, di mana PKS merupakan satu *contender* dalam arena politik Indonesia, asumsi-asumsi rasionalitas dalam teori tindakan kolektif Tilly juga didukung oleh data. Pilihan PKS untuk ber-*musyarakah*, baik dengan SBY dan Partai Demokrat di tingkat nasional, maupun dengan berbagai partai lain di sejumlah pemilukada, adalah contoh yang paling jelas. Pilihan bergabung dengan koalisi pemerintah diambil dengan pertimbangan utama untuk memberikan "payung" yang kokoh bagi kiprah dakwah Jemaah Tarbiyah/PKS. Menurut seorang informan, koalisi liberal yang mendominasi pemerintahan saat ini berupaya keras untuk mendepak PKS keluar dari koalisi. Jika itu terjadi, selanjutnya Jemaah Tarbiyah/PKS akan dicitrakan sebagai bagian dari kelompok Islam radikal, sehingga tereksklusi dari arena politik Indonesia, dan akhirnya dibubarkan. Sesungguhnya upaya ke arah itu sudah dilakukan sejak lama. Penerbitan bukan "Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia" pada tahun 2009 yang memasukkan PKS ke dalam kategori Islam radikal bersama-sama dengan sejumlah entitas lain, ditengarai merupakan bagian dari upaya tersebut. Sementara itu, dalam pemilukada, asumsi rasionalitas tindakan itu terlihat pada pilihan-pilihan PKS untuk mengusung atau mendukung kandidat yang paling mungkin menyediakan sumberdaya finansial dan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan.

Tabel 7.2
Ikhtisar Aspek-Aspek Konflik Politik Tertutup dalam Kasus PKS

No	Aspek	Variasi		Dukungan Temuan
1	**Bentuk**	Material	Sabotase langsung	Tidak ada.
			Sabotase tidak langsung	Pembentukan TPPN dan penunjukan anggota Pansus Century.
		Simbolik	Manipulasi komunikasi	Penghalusan ekspresi verbal untuk menyamarkan faksionalisasi dan konflik internal
			Symbolic escape	Kembali menekuni aktifitas-aktifitas "tradisional".
			Ritualized conflict	Majelis Syura dan *taujih* Ustadz Hilmi
2	**Visibilitas Sosial**	Kepentingan		Diketahui oleh pihak pemegang otoritas, sehingga yang bersangkutan melakukan langkah-langkah untuk memoderasi/meredam konflik.
		Tindakan		
		Identitas pelaku		
3	**Kolektifitas**	Tindakan bersama yang tidak terorganisir		Berbagai respon mengkritik gejala pragmatisme.
		Tindakan bersama yang dipandu kesamaan *implicit/tacit*		
		Koordinasi informal		Dukungan terhadap pencapresan Amien Rais, mengalahkan Wiranto.
		Koordinasi formal		Penerbitan Platform PKS.
4	**Hasil**	Keterbebasan psikologis-individual		Keyakinan bahwa kewajiban sudah gugur setelah menyampaikan pemikiran/nasihat.
		Gugatan terhadap praktik dan rutinitas organisasi		Dialektika di dalam dan di luar Majelis Syura.
		Prakondisi untuk transformasi yang lebih mendasar		Belum terlihat, karena kuatnya *confirmity* dan *compliance*, dan dorongan untuk menjaga harmoni.

Dalam konteks PKS, kuatnya budaya sebagai sebuah jemaah yang mengedepankan soliditas dan harmoni, membuat bentuk kompetisi atau pertarungan di antara *contenders* lebih mengarah kepada konflik politik tertutup *(covert political conflict)* dengan berbagai manifestasinya. Di partai-partai lain dengan konteks budaya yang lebih terbuka, kompetisi atau pertarungan tersebut bisa mengambil bentuk perebutan posisi-posisi strategis dalam struktur partai secara terbuka.[2] Data menunjukkan keberlakukan aspek-aspek dalam teori konflik

[2] Di partai-partai lain momen pergantian Ketua Umum hampir selalu menjadi "pertarungan hidup dan mati" di antara sejumlah kandidat yang berlaga. Sebaliknya, di PKS pergantian Presiden atau jabatan-jabatan strategis tidak pernah diramaikan oleh kompetisi, apalagi konflik terbuka. Namun data penelitian ini menunjukkan bukan berarti pertarungan itu tidak ada. Tetap saja terdapat manuver-manuver untuk menguasai posisi-posisi strategis yang dapat menentukan warna partai, namun diekspresikan dalam koridor Majelis Syura, keutuhan jemaah, dan harmoni.

politik tertutup *(covert political conflict)* yang dikemukakan oleh Morill, Zald, dan Rao (2003) sebagaimana didiskusikan di Bab 4 dan diikhtisarkan pada Tabel 7.2. Namun demikian, perkembangan kontemporer yang terjadi sejak akhir tahun 2010 menunjukkan bahwa ekspresi konflik di PKS relatif lebih terbuka. Hal ini dipicu oleh tindakan mantan kader yang tersingkir atau keluar dari partai, yang mengungkapkan sejumlah persoalan yang terkait dengan elit PKS di media massa. Dengan kata lain, sebagian konflik berubah ekspresinya dari *covert political conflict* menjadi *overt political conflict*, walaupun hingga saat ini konflik yang *covert* masih tetap dominan.

Aktor utama dalam model lingkungan politik adalah *contenders*, kelompok-kelompok yang berkompetisi untuk masuk ke dalam lingkungan politik, suatu bentuk hubungan yang berkesinambungan dan efisien dengan pemegang otoritas tertinggi dalam populasi. Dengan demikian, **keberlakukan model lingkungan politik *(polity model)* Tilly berimplikasi pada eksistensi faksionalisasi** yang sudah dibahas di atas. Di samping itu, **keberlakuan model lingkungan politik Tilly juga berimplikasi pada kecenderungan terbentuknya oligarki**. Sesuai dengan salah satu asumsi tindakan kolektif Tilly tentang rasionalitas tindakan *contenders*, kelompok-kelompok dalam sebuah populasi tidak akan berhenti bermanuver pada saat mereka berhasil masuk ke dalam lingkungan politik dan menjalin hubungan dengan pemegang otoritas tertinggi. Masing-masing kelompok akan terus berstrategi untuk mengintensifkan hubungan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai posisi objektif yang lebih kuat daripada kelompok-kelompok yang lain. Kecenderungan tersebut semakin besar manakala para *contenders* menyadari bahwa pemegang otoritas tertinggi memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam populasi.

Dalam konteks oligarki, peneliti tidak sependapat dengan Leach (2005) yang mensyaratkan adanya kekuasaan formal maupun informal yang tidak sah *(illegitimate authority/influence)* di tangan kelompok elit secara terus-menerus sebagai indikator utama eksistensi oligarki. Jika definisi tersebut digunakan, kekuasaan yang dipegang oleh elit di PKS bukanlah oligarki, karena diperoleh melalui proses yang sah, sesuai dengan konstitusi partai dan melibatkan mayoritas. Namun demikian, definisi yang dikemukakan Leach menjadi

problematik ketika digunakan dalam studi empirik, karena misalnya, tidak mudah untuk menilai apakah para kader menaati elit dengan sukarela karena memandang kekuasaan yang ada di tangan elit sah mewakili suara mereka, atau mereka menaati dengan enggan, semata-mata karena dikondisikan oleh sistem *reward and punishment* yang berlaku. Dengan demikian, peneliti memilih menggunakan *ideal type* oligarki dari Michels (1911) untuk menganalisis kekuasaan elit PKS.

Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi faktor-faktor teknis-administratif, intelektual, psikologis, finansial, dan utilisasi media, sebagaimana yang diidentifikasi Michels sebagai penyebab bertahannya pemimpin lama di posisinya, terhadap terpilihnya kembali Ustadz Hilmi Aminuddin, dalam kurun waktu yang relatif panjang, menjadi pimpinan tertinggi partai. Namun demikian, terlihat adanya dua faktor lain yang perlu ditambahkan. Pertama, **faktor historis-kultural**. PKS memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai gerakan dakwah sebelum menjadi partai. Dalam konteks sejarah tersebut, Ustadz Hilmi bukan hanya pendiri, namun juga *murabbi* atau guru dari sebagai besar elit PKS hari ini. Di sisi lain, sebagai gerakan keagamaan yang banyak terinspirasi oleh budaya tasawuf, guru (biasa disebut *mursyid* dalam tradisi sufi) selalu menjadi sosok yang sangat dihormati. Gabungan faktor historis dan faktor kultural tersebut menyebabkan tidak mudah mencari pengganti pemimpin tertinggi di PKS, karena disadari ataupun tidak disadari, para elit akan selalu menjadikan Ustadz Hilmi sebagai tolok ukur kepantasan calon pengganti tersebut.[3] Tentu saja secara empirik sulit mencari sosok baru yang bisa mengimbangi pemimpin yang sudah sekitar tiga puluh tahun berada di posisinya. Dalam logika berpikir Bourdieu, masa jabatan yang sangat panjang tersebut telah mengakumulasikan berbagai modal, khususnya modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik, secara masif, sehingga pemimpin tersebut memiliki kekuasaan simbolik yang besar, dan posisi objektifnya semakin kuat dalam arena. Atau meminjam pendapat Smith (2000) dan Kauppi (2003), lamanya kurun waktu tersebut membuat proses simbolisasi

[3] Misalnya saja seorang informan menilai HNW, tokoh yang menurutnya paling layak menjadi Ketua Majelis Syura yang akan datang, kapasitasnya baru seperempat dari Ustadz Hilmi. Sementara itu informan lain mempertanyakan apakah saat ini ada tokoh lain di PKS yang kapasitasnya setara, ataupun sedikit di bawah Ustadz Hilmi. Demikian pula seorang kader yang mengatakan bahwa para tokoh yang pernah menjadi Presiden PKS kapasitasnya masih jauh di bawah Ustadz Hilmi.

dan mitologisasi berlangsung sangat intensif, sehingga karisma, yang merupakan modal politik personal, terakumlasi dengan berlimpah.

Kedua, **faktor faksionalisasi/pengelompokkan**. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, data penelitian ini menunjukkan adanya faksionalisasi dan konflik antarkelompok di PKS, walaupun bentuknya lebih cenderung berupa konflik politik tertutup *(covert political conflict)* dengan berbagai manifestasinya. Data juga menunjukkan bahwa hal tersebut sangat disadari oleh Ustadz Hilmi maupun para elit yang lain. Disadari pula bahwa saat ini Ustadz Hilmi masih merupakan satu-satunya tokoh yang dihormati oleh kelompok-kelompok yang ada, sehingga bisa menjadi penyeimbang dan perekat yang mencegah terjadinya konflik yang lebih serius dan terbuka.[4]

Menurut hemat peneliti, kedua faktor tersebut, historis-kultural dan faksionalisasi/pengelompokkan, adalah faktor-faktor yang khas untuk partai agama. Di satu sisi, organisasi keagamaan, apalagi yang berbentuk gerakan, memang punya kecenderungan dipimpin oleh pemimpin karismatis. Namun peneliti sependapat dengan Smith (2000) bahwa kharisma pemimpin tersebut lebih tepat dipahami sebagai produk kultural, hasil dari struktur-struktur simbolik berupa sentimen kolektif yang dibentuk oleh tindakan, kekuasan, dan moralitas pemimpin, ketimbang sekedar implikasi dari kepribadian dan interaksi pemimpin tersebut dalam kelompoknya. Sebagaimana dikatakan oleh Smith, simbolisasi dan mitologisasi berlangsung dalam bentuk penyisipan narasi-narasi tentang hal yang sakral ke dalam kehidupan politik yang profan, sehingga memperkuat legitimasi pemimpin dalam komunitasnya. Penggunaan ayat-ayat Al Qur-an serta hadits dan *sirah* Nabi Muhammad saw, baik oleh pemimpin, maupun oleh para kader, merupakan contoh dari proses tersebut. Di sisi lain, Rosenblum (2003),

[4] Ada beberapa spekulasi yang berkembang tentang kaitan antara Ustadz Hilmi dan faksionaliasi. Pertama, Ustadz Hilmi sengaja memilih para Presiden Partai yang dipandang idealis-konservatif untuk menjaga keseimbangan dengan Sekjen yang dianggap pragmatis-progresif, karena di satu sisi beliau tahu pasti bahwa kader-kader PKS di akar rumput praktis masuk dalam kategori idealis-konservatif, namun di sisi lain kemampuan AM dalam mengeksekusi gagasan dan aksesnya terhadap sumber daya sangat dibutuhkan. Menjadikan AM sebagai Presiden Partai akan memicu gejolak yang terlalu besar. Sebaliknya, melepaskan AM dari posisi Sekjen akan menyebabkan "paceklik sumber daya". Kedua, faksionaliasi sengaja dipelihara untuk memberikan legitimasi bagi Ustadz Hilmi untuk terus berada di pucuk kepemimpinan PKS. Ketiga, kelompok atau faksi tertentu berupaya mempertahankan Ustadz Hilmi karena masih membutuhkannya sebagai patron untuk mengurangi resistensi dari kader-kader yang berbeda pandangan.

sebagaimana telah diulas di atas, menegarai adanya potensi konflik yang laten dalam sebuah entitas politik berasarkan agama antara ”agamawan” dengan ”politisi”, sehingga kehadiran sosok pemimpin yang mampu menjadi *solidarity maker* menjadi sangat penting bagi keutuhan organisasi.

Tabel 7.3
Faktor-Faktor Penyebab Pemimpin Tertinggi Terpilih Kembali dalam Kasus PKS

No	Faktor	Dukungan Temuan
A	**Faktor-Faktor “Klasik” dari Teori Oligarki Michels**	
1	Teknis-Administratif	Pemimpin saat ini dianggap memiliki kapasitas sebagai *expert-leaders* yang menguasai medan perjuangan, di samping masih dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat.
2	Intelektual	Pemimpin saat ini dipandang memiliki kemampuan konseptual yang luar biasa.
3	Psikologis	Para kader merasa masih membutuhkan pemimpin saat ini untuk menjaga ideologi, memberikan visi gerakan, memotivasi, dan menjaga para kader.
4	Finansial	Pemimpin saat ini memiliki akses terhadap sumber daya finansial yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan Partai.
5	Utilisasi Media	Sensasi karisma pemimpin saat ini terus-menerus diperkuat oleh forum-forum di mana yang bersangkutan berinteraksi langsung dengan kader, serta penyebarluasan pemikirannya, baik secara lisan melalui murid-muridnya, maupun secara tertulis melalui buku kumpulan *taujih*-nya.
B	**Faktor-Faktor Spesifik untuk PKS dan Partai Berdasarkan Agama**	
1	Historis-Kultural	Pemimpin saat ini adalah pendiri sekaligus guru dari sebagian besar kader senior partai. Dalam kultur jemaah yang masih melekat pada partai, guru adalah sosok yang sangat dihormati.
2	Faksionalisasi/ Pengelompokkan	Pemimpin saat ini dipandang sebagai sosok yang mampu meredam konflik di antara para “agamawan” dan “politisi”.

Data penelitian ini mendukung sebagian teori oligarki Michels. Pemimpin lama cenderung selalu terpilih kembali, terdapat kesenjangan antar-generasi, elit yang membentuk kartel mendominasi proses pengambilan keputusan strategis dan mengendalikan mayoritas. Di sisi lain, data juga mendukung tesis Tilly tentang upaya-upaya kelompok dominan untuk mempertahankan *categorical inequality* sebagai konsekuensi oligarki, melalui monopoli kesempatan, pemanfaatan organisasi untuk kepentingan kelompok dominan, dan perubahan rutinitas sosial untuk melanggengkan ketaksetaraan. Namun tidak terindikasi adanya konflik antar-generasi. Yang ada adalah konflik antar-kelompok dalam bentuk *covert*

political conflict, sebagai konsekuensi dari faksionalisasi yang terjadi. Data juga tidak cukup kuat mengindikasikan adanya bonapartisme, di mana pemimpin mengindentikkan diri dengan organisasi dan propertinya.[5] Dalam hal ini Majelis Syura berperan cukup efektif memoderasi oligarki di PKS. Dalam berbagai kesempatan, perdebatan di lembaga ini berlangsung sangat tajam sebelum keputusan diambil. Pengambilan keputusan juga tidak selalu melalui aklamasi. Berbagai keputusan penting diambil melalui *voting*. Dengan demikian dimungkinkan muncul keputusan yang tidak sesuai dengan preferensi kelompok dominan, dan lebih mencerminkan kehendak mayoritas.[6]

Bertitik tolak dari kondisi yang diulas di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang terjadi di PKS adalah **oligarki terbatas *(limted oligarchy)***. Sebagaimana dalam oligarki pada umumnya, dalam oligarki terbatas pergantian kepemimpinan puncak sangat jarang terjadi, dan terdapat kendali kelompok dominan yang minoritas (dengan dukungan pemimpin puncak) terhadap sumber daya strategis organisasi. Namun demikian, ciri oligarki yang ketiga, minimnya partisipasi kelompok mayoritas, tidak sepenuhnya berlaku dalam oligarki terbatas, karena terdapat suatu mekanisme tertentu – di PKS adalah Majelis Syura yang mewakili para kader di seluruh wilayah Indonesia – yang merepresentasikan preferensi, peran, dan partisipasi mayoritas dalam kehidupan organiasasi sehari-hari.[7] Di samping itu, pemimpin tertinggi menjalankan perannya berdasarkan

[5] Terdapat berbagai rumor dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan tentang manipulasi sumber daya partai oleh beberapa elit partai untuk kepentingan pribadi mereka. Yang terakhir misalnya pengaduan seorang mantan tokoh senior PKS, yang juga deklarator PK namun telah dipecat dari PKS, kepada Dewan Kehormatan DPR RI tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh dua orang elit PKS (Detikcom Kamis dan Jumat, 17 dan 18 Maret 2011).

[6] Salah satu contoh adalah keputusan Majelis Syura PKS untuk mendukung pencapresan Amien Rais di Pilpres 2004. Ustadz Hilmi Aminuddin, AM, dan beberapa elit PKS yang lain cenderung mendukung Wiranto. Namun kemudian *voting* yang berlangsung di Majelis Syura dimenangkan oleh kelompok yang menghendaki PKS men-capres-kan Amien Rais yang oleh sebagian kader dipandang lebih cocok dengan identitas PKS sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah yang lahir di era reformasi. Contoh lainnya adalah wacana "Partai Terbuka", yang walaupun cukup intens dilontarkan oleh elit PKS tertentu di publik, ternyata sampai saat ini tidak pernah menjadi keputusan Majelis Syura.

[7] Majelis Syura di PKS tidak hanya berperan di awal periode kepengurusan untuk memilih *Murraqib 'Am* dan pemegang jabatan-jabatan strategis lainnya seperti lembaga sejenis yang terdapat di berbagai organisasi, termasuk partai Islam lainnya. Majelis Syura PKS bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun untuk membahas dan memutuskan berbagai persoalan strategis yang dihadapi PKS.

konstitusi yang proses pembuatannya melibatkan mayoritas, walaupun secara tidak langsung melalui Majelis Syura.

7.1.2.2. Kapasitas Tindakan Kolektif

Data mendukung keberlakuan model mobilisasi yang dikemukakan Tilly (1978) dalam menjelaskan kapasitas yang dimiliki PKS untuk melakukan tindakan kolektif. Perubahan kinerja PKS dari pemilu ke pemilu merupakan implikasi dari perubahan kapasitas tindakan kolektifnya, yang juga dipengaruhi oleh seberapa kondusifnya respon eksternal terhadap partai ini. Oleh karena itu, ketika respon eksternal – publik pemilih dan kompetitor – tidak menyediakan *playing field* yang kondusif dan bersahabat, keberlimpahan kapasitas internal menjadi syarat mutlak kemenangan.

Sementara itu, kapasitas tindakan kolektif dipengaruhi oleh kemampuan memobilisasi sumber daya. Peningkatan kepemilikan sumber daya yang masif dari tahun 2004 ke 2009, berupa jumlah SDM kader dan dana, yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah suara, menunjukkan keberlakuan pendapat Etzioni (1968), bahwa mobilisasi adalah kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya, bukan kepemilikan atas sumber daya tersebut. Data juga mendukung pendapat Etzioni bahwa komitmen adalah sumber daya *intangible* yang sangat penting, karena menurunnya komitmen kader, sebagai implikasi dari dinamika internal yang terjadi, ditengarai oleh sejumlah informan merupakan salah satu penyebab stagnasi suara PKS di Pemilu 2009.

Selanjutnya, tingkat mobilisasi sumber daya ditentukan oleh tingkat keorganisasian, yang menurut Tilly (1978) ditentukan oleh tingkat kohesi sosial, atau *group inclusiveness*. Dalam pandangan peneliti, kohesi sosial/*group inclusiveness* tersebut menentukan tingkat keorganisasian melalui **kualitas organisasi**. Atau kualitas organisasi dapat pula dilihat sebagai indikator dari tingkat keorganisasian. Data penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat sepuluh aspek yang menentukan kualitas organisasi, yaitu konsolidasi, kinerja kader partai di ranah publik, kualitas elit partai, penerapan manajemen moderen, sinergi dengan wilayah dan daerah, kemampuan melakukan komunikasi

publik, kecepatan respon, *staffing* berdasarkan pertimbangan profesionalitas, kemandirian ekonomi, dan ketokohan publik.

Data juga mendukung Moody dan White (2003) yang berpendapat bahwa kohesi sosial memiliki komponen relasional (kohesi struktural) dan komponen ideasional (identitas kolektif). Dalam konteks ini, di satu sisi perbedaan kinerja PKS dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 terkait dengan kondisi *tarbiyah*, yang menggambarkan kualitas kohesi struktural. Di sisi yang lain, ia dipengaruhi oleh kekokohan identitas PKS sebagai "Partai Dakwah" dengan motto "bersih, peduli, profesional", bukan hanya dalam pandangan publik eksternal, namun juga dalam pandangan kader, sebagaimana pendapat Jenkins (2004) bahwa identitas antara lain adalah pemahaman diri kita dan orang lain tentang siapakah kita, atau pendapat Brewer (2000) bahwa identitas terkait dengan kesamaan atribut, pengalaman, dan label. Oleh karena itu, setiap atribut atau label yang tidak selaras dengan pengalaman kolektif akan mendistorsi identitas kolektif.

Teori *trust networks* dari Tilly (2004) juga dapat menjelaskan dinamika kohesi sosial PKS yang berimplikasi pada kinerjanya. Dalam hal ini Tilly memandang kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi sebagai *trust networks* yang terhubung dengan pusat kekuasaan melalui moda penghubung tertentu (komitmen, modal, paksaan) dan bentuk hubungan tertentu (segregasi, hubungan yang dinegosiasikan, integrasi). Menurut hemat peneliti, bentuk hubungan antara kelompok-kelompok yang ada di PKS dengan pusat kekuasaan adalah integrasi, sesuai dengan doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"* (jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah) yang diberlakukan setelah Jemaah Tarbiyah menjadi PKS tahun 1998. Namun peneliti memandang dua moda penghubung, yaitu komitmen dan paksaan, berada dalam sebuah kontinum, karena Etzioni (1968) berpendapat bahwa mobilisasi komitmen sering bersifat manipulatif, sehingga sangat mungkin sesuatu yang dianggap sebagai komitmen, sesungguhnya adalah bentuk paksaan yang lebih halus. Kemungkinan tersebut semakin besar jika dikaitkan dengan struktur organisasi PKS yang cenderung oligarkis. Tilly berpendapat bahwa kombinasi bentuk hubungan berupa integrasi dengan komitmen memunculkan teokrasi, sedangkan integrasi dengan paksaan menghadirkan otoritarianisme. Implikasinya, terdapat

gabungan kombinasi integrasi-komitmen dengan kombinasi integrasi-paksaan, berupa **teokrasi-otoritarian**, di mana pemegang otoritas "memaksa" kelompok-kelompok yang ada untuk berintegrasi dengan memobilisasi komitmen mereka secara manipulatif, antara lain dengan mendayagunakan *symbolic violence*.

Bertitik tolak dari data penelitian ini peneliti berpendapat bahwa selain kohesi struktural dan identitas kolektif, *group inclusiveness* juga ditentukan oleh faktor **pemimpin yang secara internal mampu menjadi *solidarity maker* dan secara eksternal mampu berperan sebagai *cultural ambassador***. Soliditas PKS dalam Pemilu 2004 tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Partai yang mampu menjalankan peran kepemimpinan tersebut. Menurut peneliti, peran pemimpin ini juga berkaitan dengan konsep *citizenship behavior* yang dikemukakan oleh Bolino (2002), karena sebagai bagian dari perannya sebagai *solidarity maker*, pemimpin menginspirasi para kader sehingga kualitas *citizenship behavior* mereka meningkat, yang diekspresikan dalam bentuk ketaatan, loyalitas, dan partisipasi, sehingga berimplikasi positif pada tingkat keorganisasian.

7.1.3. Dinamika Internal sebagai Pertarungan Simbolik

Dalam pandangan peneliti, **model lingkungan politik *(the polity model)* dari Tilly dan konsep pertarungan simbolik dari Bourdieu, bersifat komplementer satu sama lain.** Asumsi rasionalitas *contenders* yang *embodied* dalam teori Tilly membuatnya tidak peka menangkap sisi-sisi non-rasional dan immaterial dari pertarungan antar-*contenders* untuk masuk dan bertahan dalam *the polity*. Konsep pertaruangan simbolik dari Bourdieu, dengan teori habitus-arena sebagai *setting*, mampu menutup kelemahan tersebut secara efektif, sekligus membangun keterkaitan yang erat antara tataran mikro individual, meso organisasi, dan makro dunia sosial. Sebaliknya, konsep pertarungan simbolik Bourdieu tidak menggambarkan secara eksplisit *setting* fisik dan material dari kontestasi *heterodoxy* dan *orthodoxy*. Di sini *the polity model* dari Tilly memberikan gambaran yang lebih *tangible* tentang implikasi dari perbedaan praksis dan strategi yang dipilih oleh para aktor sebagai cerminan habitus mereka masing-masing terhadap dinamika kontestasi yang terjadi dalam arena.

Proses *tarbiyah* yang berjenjang dan ketat merupakan proses primer yang membentuk habitus para kader PKS, berupa habitus dakwah. Habitus itulah yang kemudian menjadi skema yang membentuk praksis dan strategi yang ditunjukkan oleh para kader ketika berkiprah di arena dakwah, di samping menjadi referensi dalam mengapresiasi praksis yang dilakukan aktor lain. Perubahan menjadi partai yang berkiprah di arena politik Indonesia merupakan perubahan arena yang sejatinya juga menuntut perubahan habitus kolektif dari para kader Jemaah Tarbiyah. Dalam kondisi tersebut, sebagian kader mengadopsi gagasan berpolitik dengan berbagai derivasinya dari komunitas lain, yang dalam konteks pertarungan simbolik merupakan *heterodoxy* yang menggugat *doxa* yang selama ini berlaku. *Doxa* yang dimaksud antara lain direpresentasikan oleh identitas PKS sebagai "Partai Dakwah" dengan motto "bersih, peduli, profesional". Sementara *heterodoxy* yang menggugatnya misalnya wacana "Partai Terbuka" dan gagasan tentang supremasi sumber daya finansial sebagai faktor penentu kemenangan. Dalam logika Bourdieu, setiap *heterodoxy* yang diusung oleh sekelompok aktor yang menggugat *doxa* akan mengundang respon berupa *orthodoxy* dari sekelompok aktor lain untuk mempertahankan *doxa*. Dialektika *heterdoxy* versus *orthodoxy* itulah sesungguhnya yang merupakan substansi dinamika internal di antara kelompok *religious movement oriented* dan *political party oriented.*

Sebagaimana dikatakan oleh Hallett (2003), publik PKS – *the party on the ground* – yang berperan sebagai audiens dari pertarungan simbolik yang tersaji di *front stage*, baik *the party in central office*, maupun *the party in public office*, bukanlah pihak yang pasif dan tak berdaya. Mereka secara aktif mempengaruhi "lakon" yang terjadi dengan memutuskan memberikan atau tidak memberikan apresiasi, atau *difference* dalam terminologi Goffman (1959) terhadap *impression management* yang dipentaskan oleh para aktor dari kedua kelompok. Peningkatan atau penurunan *citizenship behavior*, berupa loyalitas, ketaatan, dan partisipasi, merupakan bentuk ekspresi dari ada-tidaknya *difference* tersebut. Dalam hal ini, praksis yang ditunjukkan oleh audiens – dukungan atau kecaman – juga merupakan ekspresi dari habitus mereka.

Hasil dari dialektika antara *heterodoxy* dan *orthodoxy*, berupa *doxa* yang baru, sangat ditentukan oleh besar-kecilnya kekuasaan simbolik *(symbolic power)* yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Dengan kata lain, wacana yang diusung kelompok yang memiliki kekuasaan simbolik yang lebih besar akan lebih dominan mewarnai *doxa* yang baru. Besar-kecilnya kekuasaan simbolik yang dimiliki sebuah kelompok ditentukan oleh banyak-sedikitnya modal simbolik *(symbic capital)* yang berhasil diakumulasikan dari pertarungan sebelumnya. Dalam konteks PKS sebagai organisasi politik, modal politik merupakan bagian terpenting dari modal simbolik tersebut, baik modal politik personal, maupun modal politik institusional (Kauppi, 2003). Dalam logika Bourdieu, berbagai jenis modal bersifat *transferrable*, sehingga akumulasi modal simbolik juga dapat terjadi melalui konversi berbagai bentuk modal yang lain – modal kultural, modal sosial, dan modal ekonomi – menjadi modal simbolik. Data penelitian ini secara jelas menunjukkan proses-proses konversi tersebut. Sebagai partai agama, di mana JemaahTarbiyah tetap eksis sebagai tulang punggungnya, modal spiritual dalam segala manifestasinya – bentuk yang *embodied*, bentuk yang terobjektifikasi, dan bentuk yang terlembagakan – yang merupakan bagian dari modal kultural (Verter, 2003), merupakan modal yang sangat penting dan bernilai di PKS, apalagi jika dikaitkan dengan perannya untuk memobilisasi komitmen yang merupakan sumber daya yang turut menentukan kapasitas internal untuk melakukan tindakan kolektif. Data menunjukkan, para aktor yang mampu mengakumulasikan modal spiritual secara masif memiliki posisi objektif yang lebih kokoh dalam kontestasi yang terjadi dalam arena. Posisi objektif yang lebih kuat tersebut selanjutnya berimplikasi pada ketersediaan pilihan strategi yang dapat dimanfaatkan dalam pertarungan simbolik berikutnya. Hasil sementara dari kontestasi yang ada, gagasan yang sebelumnya merupakan *heterodoxy* berhasil mengokohkan dirinya menjadi sebuah *doxa* baru karena para agen yang mendukungnya berhasil mengakumulasikan lebih banyak modal simbolik yang ditransformasikan secara masif menjadi *symbolic power*, sehingga akhirnya mereka memenangkan pertarungan simbolik.

Sebagaimana telah dibahas di atas, *the polity model* menggambarkan kompetisi di antara para *contenders* dalam sebuah populasi untuk menjadi anggota dari *the polity* agar dapat menjalin dan mendayagunakan hubungan yang berkesinambungan dan efisien dengan pemegang otoritas tertinggi. Sementara itu pertarungan simbolik menjelaskan kontestasi antara para aktor yang mengusung *heterodoxy* untuk menggugat *doxa*, dengan mereka yang berupaya mempertahankan *doxa* dengan melontarkan *orthodoxy*. ***The polity model*** **merupakan gambaran "sisi keras"** ***(hard side)*** **dari kontestasi yang terjadi di antara faksi-faksi di PKS, sementara pertarungan simbolik menunjukkan sisi lunak** ***(soft side)*** **dari dinamika tersebut**, di mana faksi dilihat sebagai kolektifitas dari aktor-aktor yang memiliki habitus yang mirip satu sama lain (Ritzer dan Goodman, 2003 dan Dobbin, 2008). Pengelompokkan para kader PKS ke dalam kelompok *religious movement oriented* dan *political party oriented* adalah pengelompokkan yang berdasarkan perbedaan habitus kolektif mereka. Pengelompokkan tersebut lebih mampu menggambarkan dinamika internal yang ada karena sifat pengelompokkannya yang dinamis, mengingat habitus itu sendiri bersifat dinamis, di mana ia memproduksi sekaligus diproduksi oleh dunia sosial, *structuring structure* sekaligus *structured structure*. Dalam hal ini terdapat dialektika antara *hard side* dan *soft side* dari kontestasi dan dinamika yang berlangsung. Melemahnya posisi kelompok *religious movement oriented* dalam *the polity* berimplikasi pada menurunnya kemampuan para aktor di kelompok ini mengakumulasi modal simbolik yang kemudian dapat dieksekusi menjadi kekuasaan simbolik untuk memenangkan pertarungan simbolik yang berlangsung di arena PKS. Sementara itu, kemenangan kelompok *political party oriented* dalam pertarungan simbolik, di mana *heterdoxy* yang semula diusungnya berhasl menjadi *doxa* baru, berimplikasi pada pengokohan posisi kelompok ini sebagai member dalam *the polity*. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, hubungan yang terjalin antara kelompok *political party oriented* dengan pemegang otoritas tertinggi semakin kokoh dan efisien, sehingga kelompok ini mampu mengeksklusi kelompok-kelompok lain yang berseberangan keluar dari *the polity*. Dengan demikian, ketika *heterodoxy* berhasil menjadi *doxa* baru, posisi kelompok aktor

yang mengusungnya juga semakin kokoh sebagai *member* dalam *the polity*, bahkan menjalin hubungan yang oligarkis dengan pemegang otoritas tertinggi.

Perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai, diikuti dengan dialektika antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*, tentunya menimbulkan *tensions* dalam organisasi. Adanya *tensions* tersebut dapat dipahami melalui beberapa kerangka pemikiran. Pertama, *tensions* itu muncul karena Jemaah Tarbiyah/PKS merupakan "organisasi yang penuh perasaan" *(the soulful organization)* dalam tipologi spiritualitas organisasi yang dibuat oleh Pina e Cunha et.al. (2006), karena ia menunjukkan kombinasi antara sifat organisasi yang berkesadaran spiritual *(spiritually informed organization)* dengan karakteristik anggota organisasi yang sebagian besar masih dependen. Pina e Cunha menengarai, dalam *the soulful organization,* perbedaan antara "apa yang dikatakan" dengan "apa yang dilaksanakan", atau dalam bahasa Bourdieu, perbedaan antara simbol dengan praksis, akan menimbulkan sinisme para anggota organisasi.

Kedua, *tensions* itu muncul karena di satu sisi Jemaah Tarbiyah memiliki tipe aktifisme yang multidimensi – aktifisme individual, gerakan lokal, gerakan global – dan di sisi lain memilih tipe pendekatan fikih Islam yang eklektik, dengan fokus pada kontekstualisasi (Hashem, 2006). Proses kontekstualisasi, apalagi yang dilakukan pada berbagai jenjang, yang bukan hanya melibatkan berbagai institusi formal dalam organisasi, melainkan juga para aktor secara individual, tentu saja akan menarik banyak hal yang sebelumnya merupakan bagian dari *doxa* yang merupakan *universe of undiscussed/undisputed*, menjadi *opinion*, atau *universe of discourse/argument*. Apalagi, dengan memasuki arena politik, area fikih yang dimasuki oleh Jemaah Tarbiyah adalah politik Islam, atau *siyasah syar'iyyah,* yang memang sejatinya merupakan wilayah perdebatan yang sangat terbuka, atau wilayah *ijtihadat,* di mana sangat sedikit dalil *nash* (Al Qur-an dan Hadits Nabi Muhammad saw) yang mengatur wilayah ini dengan pasti.[8]

Ketiga, jika dianalisis dengan kerangka pemikiran Todd (2005) tentang tipologi perubahan identitas kolektif, perubahan identitas kolektif yang dialami oleh para kader Jemaah Tarbiyah, dari sebuah gerakan keagamaan menjadi partai

[8] Sebagaimana penjelasan seorang informan yang diulas di Bab 4.

politik, bukanlah sesuatu yang mudah dicerna oleh para kader di bawah sadar mereka, walaupun secara formal mereka menerima doktrin *"al–jama'ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama'ah"*. Sampai saat ini masih terdapat kebingungan dalam mencerna berbagai praksis politik, khususnya yang ditunjukkan oleh sebagian elit partai di publik. Dalam kondisi itu, kemungkinan bentuk respon para kader akan terentang di antara adaptasi *(adaptation)*, penyesuaian ritual *(ritual appropriation)*, dan privatisasi *(privatisation)*, tergantung pada persepsi mereka mengenai tingkat perubahan identitas yang terjadi manakala partai didirikan, apakah dianggap bukan perubahan, perubahan parsial, atau perubahan total. Dalam konteks ini, menurut hemat peneliti, para anggota dari suatu organisasi bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang tingkat perubahan yang dihadapi, sehingga bentuk respon merekapun bisa bervariasi. Dengan kata lain, dalam realita **hampir tidak mungkin mengkategorikan suatu organisasi ke dalam hanya satu tipe perubahan indentitas kolektif**.

Keempat, dengan kerangka berpikir Dolfsma dan Verburg (2008), *tensions* yang terjadi setelah Jemaah Tarbiyah mendirikan partai dipahami sebagai *tensions* antara *socio-cultural values* dengan institusi yang eksis dalam organisasi, di mana *socio-cultural values* didefinisikan sebagai "keyakinan yang dipegang teguh, secara sadar maupun tak sadar, oleh sebagian besar anggota kelompok, yang bersifat etis, kultural, maupun filosofis, terkait dengan hal-hal mendasar", atau *doxa* dalam konsep yang digunakan Bourdieu. Data penelitian ini mendukung adanya ketiga varian *tension* tersebut, yaitu *value tensions, institution tensions,* dan *value-institution tensions*.

Dalam teorinya tentang pertarungan simbolik, kontestasi atau dialektika antara *heterdoxy* dengan *orthodoxy*, **Bourdieu tidak melihat kemungkinan adanya aktor individual maupun aktor institusional yang bisa berperan memoderasi *tensions* yang diakibatkan oleh pertarungan simbolik yang terjadi**. Dalam konteks Jemaah Tarbiyah/PKS, Ketua Majelis Syura atau *Muraqib 'Am* merupakan aktor individual, sedangkan DPTP dan Majelis Syura merupakan aktor institusional, yang berperan cukup efektif sebagai pemoderasi pertarungan simbolik antara kelompok *religious movement oriented* dengan kelompok *political party oriented.*

Dalam pandangan Hallett (2003), kontestasi atau dialektika yang terjadi di internal PKS antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy* untuk menciptakan sebuah *doxa* yang baru, merupakan proses membentuk budaya organisasi partai ini sebagai suatu *negotiated order*. Data penelitian ini mendukung sebagian besar dari sepuluh proposisi yang dikemukakan oleh Hallett, sebagaimana diikhtisarkan pada Tabel 7.4. Namun demikian, terdapat dua proposisi, yaitu proposisi kelima dan proposisi kedelapan yang tidak didukung oleh temuan penelitian. Proposisi kelima berbunyi "seorang aktor sulit memonopoli *symbolic power* karena praksis yang dinilai valid dan audiens dalam organisasi sangat bervariasi". Data menunjukkan sebaliknya, di mana ada aktor-aktor yang relatif mudah memonopoli *symbolic power* karena praksis yang dianggap valid di kalangan kader Jemaah Tarbiyah relatif terbatas. Hal ini dapat dipahami karena secara umum para kader tersebut merupakan output dari sistem kaderisasi yang berjenjang dan sangat ketat, sehingga menghasilkan sebuah komunitas yang relatif homogen. Sedangkan proposisi kedelapan mengatakan, "audiens memiliki kekuatan untuk "mengendalikan" aktor dengan cara memberikan atau tidak memberikan *difference*. Para kader PKS yang menjadi bagian dari *the party on the ground*, yang merupakan audiens dari pertarungan simbolik yang terjadi di antara elit partai, memang dapat memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan *difference* atau praksis yang ditunjukkan oleh para elit berdasarkan kesesuaian praksis tersebut dengan habitus mereka. Namun demikian, struktur PKS yang cenderung oligarkis menyebabkan sikap audiens tersebut tidak cukup kuat untuk mengendalikan para elit. Dengan demikian, menurut hemat peneliti, terhadap teori Hallett tentang budaya organisasi sebagai *negotiated order* perlu dilakukan dua penyempurnaan. Pertama, **seberapa besar kemungkinan aktor memonopoli *symbolic power* ditentukan oleh seberapa homogen audiens yang dihadapinya.** Kedua, **seberapa besar kemungkinan audiens mampu mengendalikan para aktor dalam proses dialektika yang terjadi ditentukan pula oleh konteks struktur organisasi yang ada.** Semakin egaliter struktur yang berlaku, semakin mampu pula audiens mengendalikan para aktor. Sebaliknya, semakin oligarkis struktur yang ada, semakin sulit bagi audiens untuk mengendalikan mereka.

Tabel 7.4
Ikhtisar Proposisi-Proposisi Hallett tentang Budaya PKS sebagai *Negotiated Order*

No	Proposisi	Dukungan Temuan
1	Ruang sosial mempengaruhi budaya organisasi melalui: (1) konteks di mana budaya organisasi tersebut berada, dan (2) habitus para aktor yang bermain.	Praksis politik sebagian kader PKS dihasilkan dari habitus yang diwarnai oleh budaya politik komunitas lain.
2	Dalam melakukan *impression management* para aktor memilah *front stage* dan *back stage*. Apa yang tampil di *front stage* tidak selalu mencerminkan hakikat *back stage.*	Dalam dialektika tentang wacana "Partai Terbuka", pihak yang pro mengarahkan perdebatan ke makna denotatif, sementara pihak yang kontra mempersoalkan makna konotatif.
3	Para aktor melakukan *impression management* dalam batasan habitusnya untuk memperoleh *difference* dari audiens guna memperkuat *symbolic power* mereka.	Penggunaan berbagai wacana dari khasanah Islam (Al Qur-an, Hadits, sejarah Nabi) , ditunjang dengan bebagai ungkapan berbahasa Arab, sudah *embodied*, menjadi bagian dari habitus kolektif Jemaah Tarbiyah.
4	Pemberian *difference* oleh audiens kepada para aktor didasarkan pada praksis dan interaksi yang sudah dianggap valid dalam konteks budaya organisasi.	Komitmen dan motivasi yang tinggi, yang berimplikasi pada kualitas *citizenship behavior* para kader PKS di masa kepemimpinan HNW yang dipersepsikan sebagai pemimpin yang sederhana, rendah hati, dan cerdas.
5	**Seorang aktor sulit memonopoli *symbolic power* karena praksis yang dinilai valid dan audiens dalam organisasi sangat bervariasi.**	**Tidak didukung oleh data. Sebaliknya, terdapat aktor-aktor yang relatif mudah memonopoli *symbolic power*, karena praksis yang dianggap valid relatif terbatas karena habitus para kader juga relatif homogen.**
6	Para aktor mendayagunakan modal yang dimiliki untuk membangun dan memperkuat *symbolic power* yang akan meningkatkan posisi tawar mereka dalam bernegosiasi.	Para aktor di masing-masing kelompok yang berkontestasi mengakumulasikan berbagai jenis modal, dan kemudian berupaya mengkonversinya menjadi modal simbolik agar *symbolic power* mereka meningkat.
7	Para aktor mengeksekusi *symbolic power* yang mereka miliki dalam bernegosiasi untuk membentuk *negotiated order* yang baru.	*Symbolic power* dieksekusi dalam bentuk penguasaan posisi-posisi strategis, sehingga *heterdoxy* yang mereka lontarkan dalam proses kontestasi berhasil menjadi *doxa* baru.
8	**Audiens memiliki kekuatan untuk "mengendalikan" aktor dengan cara memberikan atau tidak memberikan *difference*.**	**Tidak didukung oleh data. Audiens memang dapat memberikan/tidak memberikan *difference*, namun struktur PKS yang cenderung oligarkis membuat sikap audiens tersebut tidak cukup kuat untuk mengendalikan para aktor.**
9	Banyak/sedikitnya kelompok audiens internal mempengaruhi peluang terjadinya konflik/integrasi dalam organisasi.	*The party on the ground* yang merupakan audiens internal relatif homogen, sehingga upaya meredam konflik dan memunculkan integrasi relatif mudah dilakukan.
10	Semakin stabil konteks struktural dari negosiasi yang ada, semakin besar kemungkinan budaya organisasi sebagai *negotiated order* diproduksi dan direproduksi.	Jemaah Tarbiyah/PKS memiliki struktur vertikal yang (sangat) kuat, sehingga proses produksi/reproduksi budaya organisasi PKS sebagai *negotiated order* relatif lebih mudah dilaksanakan.

Selanjutnya ikhtisar berbagai implikasi teoretik penelitian ini sebagaimana telah dibahas di atas, disajikan dalam Tabel 7.5.

Tabel 7.5
Ikhtisar Implikasi Teoretik

No	Temuan	Implikasi Teoretik
A	**Teori-teori tentang Tipologi Partai Politik dan Faksionalisasi**	
1	♦ PKS tidak dapat dapat ditempatkan dalam tipologi partai klasik dari Katz & Mair *(the elite party, the mass party, the catch-all party, the cartel party)*. ♦ PKS juga tidak dapat ditempatkan dalam tipologi partai dari Panebianco *(the mass-bureaucratic party* dan *the professional electoral party)*. ♦ PKS sesuai dengan karakteristik *the modern cadre party*, namun PKS memiliki sejumlah karakteristik khusus yang bersumber dari akar historisnya sebagai gerakan keagamaan.	Menyempurnakan konsep *the modern cadre party* dari Koole (1994) dengan varian baru, "**partai kader berbasis gerakan keagamaan" *(the religious movement-based cadre party)***.
2	♦ Di dalam PKS terdapat sejumlah faksi dengan *grouping factors* yang beragam. ♦ Beberapa faksi memiliki irisan yang relatif luas, sehingga membentuk kelompok yang bisa dibedakan dari yang lain, walaupun tidak rigid dan *mutually exclusive*. ♦ Kesamaan yang menyatukan masing-masing kelompok terkait dengan habitus kolektif para kader, yaitu kelompok *religious movement oriented*, dan kelompok *political party oriented*.	♦ Mengritik dan mengoreksi kerangka faksionalisasi yang dikemukakan oleh Roemer (2006) dan Kauppi (2003), karena terlampau rigid dan sederhana, dengan memunculkan konsep "**faksionalisasi dinamis".** ♦ Mendukung pendapat Wolinetz (2002) tentang tipologi partai berdasarkan orientasi utamanya *(the policy- seekers, the vote-seekers, the office-seekers)*, di mana partai-partai bergerak dinamis menampakkan sisi yang paling menonjol, tergantung faksi yang sedang berkuasa pada suatu saat tertentu.
B	**Teori Tindakan Kolektif Tilly dan Teori-teori Lainnya yang Terkait**	
1	♦ Para aktor dalam dinamika internal PKS memenuhi tiga asumsi tindakan kolektif yang dikemukakan Tilly, yaitu rasionalitas aktor, sumber daya kolektif sebagai output, dan ketidaklengkapan informasi. ♦ Teori tindakan kolektif Tilly abai terhadap faktor budaya organisasi.	Menyempurnakan asumsi-asumsi teori tindakan kolektif Tilly (1978) dengan menambahkan asumsi keempat, yaitu: **"budaya organisasi berpengaruh terhadap pilihan-pilihan strategi yang diambil oleh *contenders*, atau kelompok-kelompok yang berkompetisi".**
2	Kuatnya budaya sebagai jemaah yang mengedepan soliditas dan harmoni, serta dominannya nilai-nilai *conformity* dan *compliance*, membuat kompetisi dan pertarungan di antara kelompok-kelompok yang ada tidak diekspresikan secara terbuka.	Mendukung teori konflik politik tertutup *(covert political conflict)* dari Morill, Zald, dan Rao (2003).

No	Temuan	Implikasi Teoretik
3	Sesuai dengan model lingkungan politik dari Tilly, faksi-faksi yang ada di PKS berkompetisi untuk menjadi bagian dari *the polity*, sehingga mereka dapat menjalin hubungan yang berkesinambungan dan efisien dengan pemegang otoritas tertinggi.	Mendukung model lingkungan politik *(the polity model)* dari Tilly (1978) dengan menekankan bahwa **keberlakuan model tersebut otomatis berimplikasi pada:** ♦ **Eksistensi faksionalisasi.** ♦ **Kecenderungan oligarki.**
4	♦ Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Michels sebagai penyebab pemimpin lama selalu terpilih kembali, yaitu faktor teknis-adaministratif, intelektual, psikologis, finansial, dan utilisasi media, ditemukan merupakan penyebab tokoh yang sama selama lebih dari 30 tahun menjadi pimpinan tertinggi PKS. ♦ Terpilihnya Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura/*Murraqib 'Am* terus-menerus juga disebabkan oleh faktor historis-kultural dan faktor faksionalisasi/pengelompokkan.	Menyempurnakan teori oligarki dari Michels (1911) dengan menambahkan dua faktor sebagai penyebab selalu terpilih kembalinya pemimpin lama yang kemudian memicu kecenderunga oligarki, yaitu: ♦ **Faktor historis-kultural.** ♦ **Faktor faksionalisasi/pengelompokkan.**
5	Di PKS terdapat sebagian dari elemen-elemen teori oligarki Michels, yaitu: ♦ Pemimpin tertinggi berulang-ulang terpilih kembali. ♦ Terdapat kesenjangan antar-generasi. ♦ Elit yang berkuasa membentuk kartel. Namun tidak terdapat konflik antar-generasi, dan tidak terdapat bukti yang memadai mengenai adanya bonapartisme. Yang ada adalah konlfik antar-kelompok dalam bentuk *covert political conflict*, baik berupa sabotase tidak langsung sebagai ekspresi material, maupun manipulasi komunikasi, *symbolic escape*, dan *ritualized conflict* sebagai ekspresi simbolik.	Menyempurnakan teori oligarki dari Michels (1911) dengan menambahkan varian **"oligarki terbatas" *(limited oligarchy)*** di mana salah satu ciri oligarki, yaitu minimnya partisipasi mayoritas, tidak berlaku. Dengan kata lain terdapat institusi yang memoderasi kecenderungan oligarki tersebut.
6	Tingkat keorganisasian PKS, yang akhirnya berimplikasi pada kapasitas tindakan kolektifnya, dipengaruhi oleh sepuluh aspek kualitas organisasi, yaitu: konsolidasi, kinerja kader partai di ranah publik, kualitas elit partai, penerapan manajemen moderen, sinergi dengan wilayah dan daerah, kemampuan melakukan komunikasi publik, kecepatan respon, *staffing* berdasarkan pertimbangan profesionalitas, kemandirian ekonomi, dan ketokohan publik.	Menyempurnakan model mobilisasi dari Tilly (1978), dengan **menambahkan aspek kualitas organisasi sebagai "penghubung" antara aspek kohesi sosial/*group inclusiveness* dengan tingkat keorganisasian**.

No	Temuan	Implikasi Teoretik
7	♦ Kondisi *tarbiyah* dan kekokohan identitas kolektif sebagai "Partai Dakwah" turut menentukan kinerja PKS dari pemilu ke pemilu. ♦ Eksistensi pemimpin yang mampu berperan sebagai *solidarity maker* (internal) dan *cultural ambassador* (eksternal) juga sangat menentukan kohesi sosial. ♦ Peran sebagai *solidarity maker* memperkuat kohesi struktural/aspek relasional, sedangkan peran sebagai *cultural ambassador* memperkuat identitas kolektif/aspek ideasional dalam kohesi struktural/*group inclusiveness.*	♦ Menyempurnakan pendapat Moody & White (2003) tentang faktor-faktor yang menentukan kohesi sosial/*group inclusiveness*, dengan menambahkan faktor **kualitas kepemimpinan**, di samping dua faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu kohesi struktural dan identitas kolektif. ♦ Mendukung pendapat Jenkins (2004) dan Brewer (2000) tentang definisi identitas kolektif.
8	Dalam struktur PKS yang cenderung oligarkis, terdapat kemungkinan pemegang otoritas memobilisasi komitmen dari kelompok-kelompok yang ada secara manipulatif, dalam konteks bentuk hubungan yang integratif.	Menyempurnakan teori Tilly tentang *trust networks* (2004) dengan menambahkan varian **teokrasi-otoritarian**, sebagai gabungan antara kombinasi integrasi-komitmen (teokrasi) dengan integrasi-paksaan (otoritarianisme)
C	**Teori Habitus, Arena dan Pertarungan Simbolik Bourdieu dan Teori-teori Lain yang Terkait**	
1	Dinamika internal dan konflik antar-kelompok yang ada di PKS pada dasarnya adalah pertarungan simbolik antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*, di mana masing-masing aktor berupaya mendaya-gunakan *symbolic power* mereka, yang ditentukan oleh hasil akumulasi modal simbolik yang diperoleh dari pertarungan sebelumnya, serta konversi dari berbagai bentuk modal lainnya.	♦ Mendukung keberlakuan teori habitus-arena dari Bourdieu, dengan elemen-elemen terkait, seperti pertarungan simbolik, *symbolic power*, berbagai modal yang bersifat *transferable*, *symbolic violence*, dan lain-lain. ♦ Mendukung konsep modal politik dari Kauppi (2003), sebagai bagian dari modal simbolik. ♦ Mendukung konsep modal spiritual dari Verter (2003), sebagai bagian dari modal kultural. ♦ **Menggarisbawahi sifat komplementer antara *the polity model* dari Tilly dengan konsep pertarungan simbolik Bourdieu, di mana yang pertama adalah "sisi keras" *(hard side)*, sedangkan yang kedua merupakan "sisi lunak" *(soft-side)* dari proses kontestasi tersebut.**
2	Kontestasi atau dialektika antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy* menimbulkan atau meningkatkan *tensions* di internal PKS.	♦ Mendukung keberlakuan tipologi spiritualitas organisasi dari Pina e Cunha et.al. (2006), khususnya tipe *the soulful organization.* ♦ Mendukung keberlakuan tipologi identitas akfitisme Islam berdasarkan warna praksisnya dari Hashem (2006). ♦ **Menyempurnakan pendapat Tood (2005) tentang tipologi perubahan identitas kolektif, dengan menekankan bahwa bentuk-bentuk respon dari**

No	Temuan	Implikasi Teoretik
		masing-masing anggota organisasi tergantung pada persepsi mereka mengenai tingkat perubahan yang terjadi. ♦ Mendukung kerangka berpikir dari Dolfsma dan Verburg (2008) tentang *tensions* antara *socio-cultural values* dengan institusi.
3	Ketua Majelis Syura/*Murraqib 'Am* serta Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dan Mejelis Syura, berperan sebagai aktor individual dan aktor institusional yang memoderasi *tensions* yang terjadi sebagai akibat dari pertarungan simbolik antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*.	Menyempurnakan konsep Bourdieu tentang pertarungan simbolik dengan menambahkan kemungkinan adanya **faktor pemoderasi dalam kontestasi atau dialektika yang berlangsung dalam arena**.
4	♦ Ada aktor-aktor yang mampu memonopoli *symbolic power*, karena praksis yang dianggap valid relatif terbatas, dan audiens di PKS cenderung homogen. ♦ Struktur organisasi yang cenderung oligarkis membuat audiens tidak cukup mampu mengendalikan para aktor dengan memberikan/tidak memberikan *difference* atas *impression management* yang mereka lakukan.	Menyempurnakan sepuluh proposisi tentang budaya sebagai *negotiated order* dari Hallett (2003) sebagai berikut: ♦ **Kemampuan aktor memonopoli *symbolic power* ditentukan oleh seberapa homogen audiens yang dihadapinya.** ♦ **Kemampuan audiens mengendalikan aktor ditentukan oleh konteks struktur yang melatari dialektika yang berlangsung. Semakin oligarkis struktur tersebut, semakin sulit audiens mengendalikan aktor.**

7.2. Kesimpulan

Dengan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disajikan pada Bab 1, penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama menyangkut **faksi-faksi yang ada di PKS, dan bagaimana mereka bekerja dalam dinamika internal PKS**. Di PKS terdapat sejumlah faksi yang dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa *grouping factors*. Berdasarkan "kekentalan ideologis" dapat dibedakan "faksi idealis", yang sering disebut "faksi keadilan", dan "faksi pragmatis", yang sering disebut "faksi kesejahteraan". Berdasarkan "pandangan terhadap isu-isu operasional", seperti hal yang permanen dan dinamis dalam dakwah, peran perempuan, dan pluralitas masyarakat, dapat dibedakan "faksi konservatif" dan "faksi progresif". Berdasarkan "generasi dalam kontestasi kekuasaan" dapat dibedakan "faksi Sekjen" (muengkin lebih tepat "klik Sekjen) dan "faksi penantang".

Selanjutnya, faksi-faksi yang memiliki irisan yang relatif besar tergabung ke dalam kelompok yang sama, di mana dapat diidentifikasi dua kelompok, yaitu kelompok yang berorientasi pada jemaah, *"religious movement oriented"* yang cenderung idealis-konservatif, dan kelompok yang berorietnasi pada partai, *"political party oriented"* yang cenderung pragmatis-progresif. Pengelompokkan tersebut sesungguhnya merupakan implikasi dari sejarah PKS yang bermula dari gerakan keagamaan atau jemaah dakwah, dan setelah menjadi partai pun tetap mempertahankan sisi gerakan/jemaah tersebut dengan doktrin "jemaah adalah partai, dan partai adalah jemaah". Dalam konteks pengelompokkan ini, setelah Munas 2010, *the party in central office* didominasi oleh kelompok *political party oriented, the party in public office* diisi oleh kader-kader yang merepresentasikan kedua kelompok tersebut, sedangkan *the party on the ground* praktis merupakan kelompok *religious movement oriented*. Dengan kata lain, pengelompokkan dan faksionalisasi di PKS merupakan fenomena elit.

Kompleksitas faksionalisasi dan pengelompokkan tersebut ditambah lagi dengan sejumlah *grouping factors* lain, antara lain, sikap terhadap sumber daya strategis (uang, kekuasaan, konstituen), latar belakang pendidikan dan profesi, latar belakang suku bangsa, dan generasi bergabung dengan Jemaah Tarbiyah (murid langsung Ustadz Hilmi Aminuddin dan bukan murid langsung beliau). Dalam hal ini, faktor yang terakhir, generasi *tarbiyah* ternyata memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan sikap yang berbeda dari para kader terhadap berbagai persoalan. Sejumlah *grouping factors* tambahan tersebut berperan sebagai faktor pemoderasi maupun faktor penguat dinamika antar-kelompok yang ada.

Jika PKS dilihat sebagai populasi, pada *"hard-side"*, kontestasi di antara kelompok *religious movement oriented* dan kelompok *political party oriented* dapat dilihat sebagai kompetisi di antara para *contenders* untuk memperebutkan posisi di dalam lingkungan politik internal guna memperoleh keuntungan dari hubungan yang berkesinambungan dan efisien dengan pemegang otoritas tertinggi. Sementara pada *"soft-side"*, yang terjadi sesungguhnya adalah dialektika antara *heterodoxy* dan *orthodoxy* untuk membangun *doxa* yang baru dalam habitus kolektif para kader Jemaah Tarbiyah/PKS. Dalam konteks ini, faksi

dan kelompok dipandang sebagai kolektifitas dari aktor-aktor dengan habitus yang mirip satu sama lain. Sejauh mana masing-masing kelompok aktor dapat mewarnai *doxa* yang baru ditentukan oleh sejauh mana kelompok tersebut dapat mengeksekusi kekuasaan simbolik atau *symbolic power*. Kekuasaan simbolik tersebut bersumber dari akumulasi modal simbolik (termasuk modal politik), baik yang berasal dari pertarungan simbolik sebelumnya, maupun hasil konversi berbagai bentuk modal yang lain, yaitu modal sosial, modal kultural (termasuk modal spiritual), dan modal ekonomi.

Konflik antar faksi/kelompok, atau dialektika antara *heterodoxy* dan *orthodoxy* tersebut, berimplikasi pada meningkatnya *tensions* di internal PKS. *Tensions* tersebut berkaitan dengan tipologi PKS sebagai *the soulful organization*, pilihan pendekatan fikih yang eklektik dan tipe aktifisme yang multidimensi, tipologi perubahan identitas kolektif yang diwarnai oleh kebingungan dan ketegangan, serta *tensions* antara *socio-cultural values* dengan institusi. Namun demikian, *tensions* yang relatif kuat tersebut sejauh ini tidak mengarah pada perpecahan yang serius karena adanya faktor pemoderasi, baik yang berupa aktor individual (Ketua Majelis Syura atau *Murraqib 'Am*), maupun aktor institusional (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat/*Majlis Riqabah 'Ammah* dan Majelis Syura).

Kesimpulan kedua menjawab pertanyaan tentang **hubungan antara dinamika internal yang ada dengan budaya organisasi dan struktur organisasi PKS**. Budaya Jemaah Tarbiyah sebagai *setting* dari dinamika internal dan kontestasi yang ada, di mana harmoni dan soliditas, serta *conformity* dan *compliance* merupakan hal-hal yang dianggap penting, membuat kontestasi tersebut cenderung mengambil bentuk konflik politik tertutup dengan berbagai manifestasinya. Manifestasi material yang terlihat berupa sabotase tidak langsung. Sementara manifestasi simbolik yang teridentifikasi berupa manipulasi komunikasi, *symbolic escape,* dan *ritualized conflict*.

Implikasi dari konflik tertutup yang ada di PKS sementara ini baru berupa keterbebasan individual dan gugatan terhadap berbagai praksis yang berlaku dalam oganisasi. Sedangkan prakondisi bagi keberlangsungan transformasi yang lebih mendasar belum terlihat, karena belum terdapat upaya-upaya menciptakan

moment of intentionality yang terlembagakan untuk mendorong perubahan identitas kolektif. Di sisi lain, budaya organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS juga dapat dilihat sebagai *negotiated order*, hasil dari pertarungan simbolik antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*. Karena pertarungan simbolik tersebut berlangsung terus-menerus maka *negotiated order* yang terbentuk pun selalu berubah-ubah secara dinamis. Dalam hal ini, struktur vertikal yang (sangat) kuat menyediakan konteks struktural yang realtif stabil bagi keberlangsungan proses produksi dan reproduksi budaya organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS.[9]

Masih terkait dengan budaya organisasi, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat *mismatch* antara persepsi kolektif sebagian besar kader PKS, dengan sifat arena politik yang dimasuki oleh Jemaah Tarbiyah setelah menjadi partai. Di satu sisi salah satu konsekuensi yang melekat pada *the soulful organization*, sebagai hasil "perkawinan" antara organisasi yang *spiritually informed* dengan kader-kader yang masih dependen, adalah kentalnya sakralisasi organisasi. Hal tersebut diperkuat lagi dengan peran pemimpin yang karismatik, yang kian kuat karismanya karena adanya simbolisasi dan mitologisasi yang masif. Di sisi lain, arena politik praktis yang dimasuki Jemaah Tarbiyah dengan menjadi partai adalah arena yang sangat profan, di mana kalkulasi biaya-manfaat yang sangat utilitarian dan berdimensi materi, seperti sumber daya finansial dan kekuasaan, menjadi pertimbangan pokok dalam memilih berbagai alternatif praksis dan strategi yang tersedia. Dengan demikian, terbukalah "ruang bermain" yang relatif luas bagi sebagian elit yang memang punya kecenderungan kuat untuk mengejar berbagai target politik mereka dengan meminjam "gaya bermain" dari komunitas lain. "Ruang bermain" tersebut juga relatif aman dari interupsi mayoritas, karena

[9] Dari diskusi dengan seorang informan, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu yang direproduksi adalah budaya sebagai organisasi bawah tanah yang militeristik, yang terlihat antara lain dari kencenderungan kuat untuk mempertahankan diri manakala berhadapan dengan sikap, ucapan, atau tindakan pihak lain yang dipersepsikan melawan, merongrong, atau menyerang jemaah, sebagaimana diperkuat oleh pernyataan informan lain, "Artinya jamaah ini baik banget menurut saya. Sepanjang ia tidak merongrong jamaah, kewibawaan jamaah". Atau penuturannya yang lain, "Ustadz Hilmi mengatakan kalau ada banyak katakanlah orang jelekin dia atau orang jelekin PKS, atau apapun, beliau selalu mengatakan 'Allah sedang membersihkan jamaah ini, Allah sedang menyapu'. Artinya biarkan saja terjadi kristalisasi. Allah sedang memisah-misahkan, memilah mana yang buruk dari yang baik. Jadi akan selalu ada proses *sunatullah* penyaringan". Menurut hemat peneliti, kuatnya kecenderungan *self-defence* ini yang membuat berbagai friksi dan konflik belum memicu terjadinya *moment of intentionality* yang terlembagakan untuk memfasilitasi sebuah perubahan yang lebih mendasar di PKS.

mereka berasumsi bahwa apa yang dilakukannya para elit tersebut masih berada di area yang sakral, sehingga nilai-nilai seperti *tsiqah, khunuzh zhan,* dan *tha'at,* tetap dikedepankan. Tentu saja akses informasi yang asimetrik antara elit dengan kader di akar rumput memperkuat dan melanggengkan *mismatch* antara persepsi sakral dan profan tersebut. Implikasinya, meminjam kerangka berpikir Michels (2011), walaupun PKS memiliki ideologi, tidak ada jaminan bahwa ia menjadi organ dari ideologi tersebut, karena mungkin saja orang-orang dengan ideologi yang berbeda, bahkan berseberangan, memimpin partai, sehngga partai menjadi kendaraan bagi pencapaian kepentingan mereka, bukan kendaraan bagi perwujudan ideologi partai. Dengan kata lain, idealita partai sebagai wadah dari ideologinya tersandera oleh problem keagenan yang serius.

Di sisi lain, kontestasi antar-kelompok yang dimoderasi oleh keberadaan institusi Majelis Syura, berimplikasi pada eksistensi oligarki terbatas *(limited oligarchy)* di PKS, di mana terlihat ciri-ciri struktur yang oligarkis, berupa frekuensi pergantian pemimpin puncak yang relatif jarang, dan dominasi elit terhadap sumber daya organisasi. Namun demikian, ciri lain yang biasanya terdapat dalam struktur yang oligarkis, yaitu minimnya partisipasi mayoritas, tidak sepenuhnya berlaku, karena terdapat mekanisme "demokrasi terbatas" berupa pemilihan raya untuk memilih sebagian anggota Majelis Syura yang menjadi representasi dari para kader di seluruh Indonesia. Di samping itu, faktor historis dan kultural, dan faktor faksionalisasi, juga menjadi penyebab mengapa pemimpin puncak berulang-kali terpilih kembali, di samping faktor-faktor "klasik" yang dijumpai dalam oligarki, yaitu faktor teknis-administratif, intelektual, psikologis, finansial, dan utilisasi media.

Kesimpulan ketiga mengenai **pengaruh dinamika internal yang ada terhadap kemampuan PKS bekerja di arena politik Indonesia.** Kemampuan PKS untuk berkiprah di arena politik Indonesia ditentukan oleh kapasitas tindakan kolektifnya. Dengan kata lain, lompatan perolehan suara di Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999 mencerminkan lompatan pada kualitas tindakan kolektif PKS. Sebaliknya, stagnasi prestasi PKS di Pemilu 2009 juga menunjukkan bahwa dari 2004 ke 2009 tidak terdapat peningkatan yang berarti pada kapasitas tindakan kolektif PKS. Stagnasi perolehan suara tersebut terjadi

karena respon eksternal yang tidak lagi sekondusif di pemilu sebelumnya tidak diimbangi dengan peningkatan keberlimpahan kapasitas internal. Terdapat penurunan dalam kemampuan memobiliasi sumber daya (dana, SDM kader, komitmen), walaupun jumlah dana dan kader yang dimiliki meningkat drastis. Hal tersebut merupakan implikasi dari menurunnya tingkat keorganisasian, sebagai akibat dari belum optimalnya aspek-aspek kualitas organisasi.

Menurunnya tingkat keorganisasian diindikasikan oleh belum optimalnya sepuluh aspek kualitas organisasi, yaitu (1) konsolidasi; (2) kinerja kader partai di ranah publik; (3) kualitas elit partai; (4) penerapan manajemen moderen; (5) sinergi dengan wilayah dan daerah; (6) komunikasi publik; (7) kecepatan respon; (8) *staffing* berbasis kriteria rasional; (9) kemandirian ekonomi; dan (10) ketokohan publik. Kondisi kesepuluh aspek tingkat keorganisasian tersebut terkait sangat erat dengan dinamika internal, dengan *tensions*, yang terjadi di PKS. Menghangatnya dinamika internal antar-kelompok di tingkat elit di pusat menghambat penuntasan konsolidasi politik, organisasi dan basis massa, serta memperlambat respon pusat terhadap persoalan-persoalan di berbagai lini. Kuatnya hubungan patron-klien yang oligarkis menimbulkan persoalan para *staffing* yang tidak sepenuhnya berdasarkan meritokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja para pejabat publik dari PKS, di samping menghambat munculnya tokoh-tokoh pemimpin alternatif yang lebih "*market friendly*". Sedangkan menguatnya pragmatisme, khususnya pragmatisme finansial, melemahkan upaya-upaya untuk membangun kemandirian ekonomi.

Jika ditelisik lebih dalam, dari 2004 ke 2009 terjadi pelemahan kohesi sosial atau *group inclusiveness.* Hal tersebut terjadi karena di satu sisi kohesi struktural, dengan *tarbiyah* sebagai tulang punggungnya, mengalami pelemahan. Di sisi lain, identitas kolektif sebagai "Partai Dakwah" terdistorsi, khususnya di publik PKS, oleh wacana "Partai Terbuka". Di samping itu, pasca 2004 PKS tidak lagi dipimpin oleh eksekutif puncak yang mampu menjalankan dua peran pokok pemimpin dalam konteks kapasitas tindakan kolektif, yaitu sebagai *solidarity maker* (internal), dan *cultural ambassador* (eksternal). Selain berimplikasi langsung pada pelemahan *group inclusiveness*, hal tersebut juga menurunkan kualitas *citizenship behavior* dari para kader PKS di akar rumput.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti merekomendasikan **demokratisasi, deoligarkisasi,** dan **desakralisasi organisasi** untuk kembali meningkatkan posisi objektif PKS di arena politik Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa "desakralisasi organisasi" sama sekali tidak identik dengan sekularisasi, di mana PKS meninggalkan *socio-cultural values* yang berbasis kepada ajaran Islam, apalagi melepaskan identitas sebagai Partai Dakwah yang sejatinya merupakan partai politik berbasis gerakan keagamaan. "Desakralisasi organisasi" bermakna meletakkan segenap praksis dan strategi yang dipilih dan dieksekusi oleh para aktor dalam berkontestasi di arena PKS sebagai hal yang profan, sehingga terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi oleh para kader di berbagai jenjang berdasarkan *socio-cultural values* yang telah disepakati bersama secara organisatoris. Selanjutnya, demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi diturunkan menjadi tujuh langkah strategis yang msing-masing memiliki dasar empirik pada temuan penelitian ini.

Pertama, pendirian PK yang kemudian menjadi PKS menyiratkan perpindahan/perubahan arena di mana Jemaah Tarbiyah berkiprah, yaitu dari arena dakwah ke arena politik. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan belum ada upaya yang cukup serius untuk menciptakan *moment of intentionality* yang *embodied* di dalam sistem *tarbiyah*, sebagai tulang punggung kaderisasi di PKS, sekaligus mekanisme primer pembentukan habitus kader. Dengan demikian, sebagian besar kader masih bekerja dengan habitus dakwah/*tarbiyah*. Sebagian kecil lainnya bekerja dengan habitus politik yang mereka peroleh secara "acak", antara lain dengan mengadopsi dari komunitas-komunitas di luar Jemaah Tarbiyah. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar PKS melakukan peubahan mendasar dalam Manhaj Tarbiyah, dengan memasukkan wawasan, nilai-nilai, dan keterampilan berpolitik dan berekonomi, sehingga terjadi pembentukan habitus baru, yaitu habitus politik dan habitus ekonomi, yang terencana dan terstruktur, sesuai dengan identitas kolektif PKS sebagai "Partai Dakwah". Dengan bahasa yang lebih sederhana, Manhaj Tarbiyah PKS yang baru harus mampu menjawab "bagaimana berpolitik dan mendanai politik yang benar ala PKS?"

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang terjadinya "pragmatisme finansial" dalam pandangan sebagian kader merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pengelompokkan, faksionalisasi, dan bahkan konflik internal. Sehubungan dengan itu, peneliti merekomendasikan aktualisasi satu komponen dari motto PKS, yaitu "bersih" secara internal dengan dua cara. Pertama, penerapan mekanisme pembuktian terbalik mengenai kebersihan dan keabsahan sumber-sumber keuangan bagi kader-kader PKS yang karena jabatannya memiliki akses terhadap sumber daya finansial, baik pejabat publik, maupun pejabat partai, baik dana yang diperoleh itu digunakan untuk kepentingan partai maupun diterima oleh pribadi-pribadi. Terkait dengan tersebut, akan sangat baik jika setiap kader partai yang mendapatkan amanah jabatan tersebut melaporkan harta kekayaannya pada saat awal dan akhir menjabat. Kedua, pemfungsian sebuah lembaga audit internal yang independen dengan kewenangan yang luas. Bukan hanya mengaudit keuangan partai, namun juga keuangan pribadi-pribadi kader partai yang yang menempati jabatan publik dan jabatan struktural di internal partai.

Ketiga, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa salah satu kelemahan dalam hal kualitas organisasi PKS adalah kemandirian ekonomi. Dari kader-kader yang sebagian besarnya belum mandiri dan berdaya secara ekonomi, mustahil bisa dibangun PKS yang mandiri secara ekonomi, yang secara konsisten menerapkan doktrin "*sunduquna juyubuna*", "sumber dana kami adalah saku-saku para kader kami sendiri", mustahil melepaskan diri dari jeratan "pragmatisme finansial", sehingga bagian dari motto PKS yaitu "bersih" hanya akan mengundang sinisme dari berbagai kalangan. Oleh karenanya, peneliti merekomendasikan agar pemberdayaan ekonomi kader menjadi prioritas pengurus PKS di semua jenjang. Perlu dibuat kebijakan yang terpadu untuk mendukung lahirnya para wirausahawan secara masif di kalangan kader. Contoh keterpaduan itu adalah, memberikan bobot yang signifikan untuk *qadirun alal kasbi* (berpenghasilan) dalam penilaian *muwashafat* (kriteria) kader, memberikan sejumlah kemudahan dan keringanan dari beban-beban jemaah yang lain kepada kader yang giat

berwirausaha, dan mendorong para pejabat publik dari PKS untuk membuka berbagai akses bisnis secara transparan dan bermatabat.[10]

Keempat, data juga menunjukkan bahwa pengisian jabatan-jabatan di PKS, baik jabatan publik, maupun jabatan struktural partai, belum dilakukan berdasarkan kriteria yang profesional dan rasional. Setidaknya, kalaupun kriteria dimaksud sebagiannya sudah ada, ia belum disajikan secara terbuka kepada publik PKS. Untuk itu, sebagai upaya mengaktualisasikan komponen lainnya dari motto PKS, yaitu "profesional", peneliti merekomendasikan agar PKS secara sungguh-sungguh menyusun kriteria untuk setiap jabatan, baik jabatan publik, maupun jabatan struktural partai, berikut indikatornya masing-masing, dan kemudian mensosialisasikannya secara terbuka kepada publik PKS, bahkan publik eksternal. Lebih jauh lagi, akan sangat baik jika sistem *tarbiyah* kemudian juga direvitalisasi dengan menjadikan kriteria-kriteria tersebut sebagai rujukan dari output yang ingin dihasilkan. Dengan kata lain, *muwashafat tarbiyah* harus memiliki irisan yang luas dengan kriteria jabatan-jabatan formal, sehingga para kader yang dinilai memenuhi *muwashafat tarbiyah* dengan baik mestilah memiliki probabilitas yang sangat besar untuk memenuhi kriteria jabatan-jabatan formal yang ada di dalam dan di luar partai.

Kelima, temuan penelitian inipun memberikan informasi bahwa kelemahan PKS yang lain adalah ketiadaan tokoh pemimpin yang bisa berperan sebagai *solidarity maker* bagi para kader secara internal, dan *cultural ambassador* bagi publik eksternal, sehingga mampu memperkokoh *group inclusiveness*, sekaligus meningkatkan kualitas *citizenship behavior*. Terkait dengan itu peneliti merekomendasikan agar PKS secara sungguh-sungguh merekayasa momentum, panggung, dan sumber daya, yang bisa mendukung kemunculan tokoh pemimpin tersebut. Rekayasa tersebut diperlukan karena dalam budaya PKS yang paternalistik hampir tidak mungkin sosok pemimpin baru tersebut dapat muncul

[10] Dalam beberapa kesempatan diskusi informal, seorang informan menegaskan bahwa budaya organisasi Jemaah Tarbiyah/PKS saat ini tidak mendukung kewirausahaan. Salah satu contoh yang dikemukakannya adalah begitu banyaknya kewajiban kader untuk mengikuti rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang menyita waktu. Padahal, seorang wirausaha, apalagi yang sedang dalam tahap merintis bisnis, perlu fokus dan mengalokasikan banyak waktu untuk menyemai dan membesarkan bisnisnya.

secara alamiah dan *bottom-up*. Dalam konteks ini, menurut hemat peneliti, pembentukan institusi "Wakil Ketua Majelis Syura" atau "Pelaksana Harian Ketua Majelis Syura" akan mengakselarasi proses pemunculan pemimpin baru, dengan tingkat guncangan dan risiko yang moderat.

Keenam, struktur organisasi PKS yang cenderung oligarkis berpotensi memunculkan *becalming*, yaitu situasi di mana para kader mengalami penurunan komitmen dan motivasi secara signifikan, dan terjadi pergeseran tujuan *(goal displacement)* pada sebagian dari mereka. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat Osterman (2006), peneliti merekomendasikan agar perbaikan/penyempurnaan proses *tarbiyah* juga diarahkan agar *tarbiyah* dapat menjadi media yang efektif untuk membangun dan menguatkan *sense of capacity and agency*, yaitu keyakinan diri para kader tentang kapasitas pribadi dan peran strategis mereka terhadap dalam organisasi. Di samping itu, dilakukan pula langkah-langkah untuk menghidupkan, dan kemudian menguatkan, budaya diskusi dan kontestasi gagasan secara internal, sehingga para kader menjadi lebih berdaya ketika berhadapan dengan dominasi elit. Merujuk pada tipologi spiritualitas organisasi (Pina e Cunha et.al., 2006), *tarbiyah* harus difungsikan untuk mentransformasi kader dari kondisi dependen menjadi independen. Dengan konteks sifat organisasi yang *spiritually informed*, PKS akan berubah dari *the soulful organization* menjadi organisasi holistik *(the holistic organization)*, di mana organisasi memiliki perhatian yang integral terhadap kebutuhan manusia, dan para kader memiliki pemaknaan yang mendalam tentang peran dan tugas mereka sebagai bagian dari organisasi. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa membangun budaya yang lebih terbuka secara internal jauh lebih bermakna dan kontributif terhadap pengokohan organisasi PKS ketimbang mewacanakan "Partai Terbuka". Meminjam pendapat Tilly (2000), demokratisasi internal tersebut dapat secara efektif mengurangi peluang kelompok dominan memanipulasi mayoritas untuk kepentingan mereka yang terselubung. Atau dengan kata lain, menekan problem keagenan *(agency problem)*. Dalam konteks kader-kader PKS yang sebagian besar berasal dari kalangan terdidik, komitmen yang berlandaskan kesepahaman, kesetujuan, dan *sense of ownership*, tentulah jauh lebih kokoh dan bermakna, ketimbang komitmen yang dimanipulasi. Secara konkrit direkomendasikan agar

tiga ilmu alat dimasukkan sebagai substansi utama dari kurikulum *tarbiyah*, yaitu Bahasa Arab, *'ushul fiqh* (ilmu tentang kaidah pengambilan dalil-dalil syariat), dan *'ulumul at-tafsir* (ilmu-ilmu yang terkait dengan kaidah penafsiran ayat-ayat Al Qur-an). Pemahaman dan penguasaan ketiga ilmu alat tersebut akan membuat para kader mampu bersikap kritis terhadap arahan yang dikeluarkan jemaah, maupun pemikiran yang dilontarkan para elitnya. Dengan demikian, komitmen dan ketaatan yang kemudian terbangun memiliki dasar keilmuan dan pemahaman yang memadai, sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah goyah. Di sisi lain, ketiga ilmu alat tersebut akan membuat para kader mampu berkontribusi dengan memastikan bahwa jemaah tidak menyimpang dari *socio-cultural values* yang telah disepakati untuk menjadi rujukan.

Ketujuh, dalam konstitusi PKS, dua jabatan eksekutif partai yang semestinya berada di bawah Presiden Partai, yaitu Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, calon-calonnya diajukan satu paket bersama-sama dengan Presiden Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Ketua Dewan Syariah Pusat (MPP) oleh Ketua Majelis Syura untuk kemudian ditetapkan oleh Majelis Syura. Dalam pandangan peneliti, hal ini memiliki implikasi yang serius terhadap lemahnya soliditas di tim eksekutif Partai, karena secara teoretis Sekjen dan Bendahara Umum akan loyal kepada Ketua Majelis Syura, bukan kepada Presiden Partai yang seharusnya menjadi atasan mereka. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar ke depan calon pengisi jabatan Sekjen dan Bendahara Umum diajukan oleh Presiden Partai terpilih untuk diputuskan oleh Majelis Syura. Di samping itu, ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf b.4 Anggaran Rumah Tangga PKS, yang memberikan kewenangan kepada Ketua Majelis Syura untuk mengusulkan beberapa orang tertentu sebagai anggota Majelis Pertiambangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, perlu dihapus, sehingga seluruh anggota dari ketiga institusi tersebut loyal kepada pimpinan institusi masing-masing, bukan kepada Ketua Majelis Syura yang mengusulkan mereka.

7.4. Rekomendasi bagi Penelitian Lebih Lanjut

Peneliti merekomendasikan tiga hal bagi penelitian lebih lanjut. Pertama, dilakukan penelitian kualitatif mengenai hubungan di antara berbagai variabel yang menentukan kapasitas tindakan kolektif. Misalnya, diteliti bagaimana hubungan antara kohesi struktural, identitas kolektif, dan kualitas kepemimpinan dengan tingkat kohesi sosial/*group inclusiveness*. Khusus untuk pengaruh kualitas kepemimpinan terhadap kohesi sosial, pengujian dilakukan dengan memasukkan kualitas *citizenship behavior* sebagai variabel antara. Selain itu, dapat pula dilakukan analisis faktor untuk menguji sejauh mana kesepuluh aspek yang telah diidentifikasi oleh penelitian ini benar-benar layak menjadi indikator dari kualitas organisasi.

Kedua, dilakukan perluasan penelitian untuk menggali bagaimana dinamika habitus para kader setelah Jemaah Tarbiyah berkiprah di arena politik Indonesia dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan jumlah kader yang memadai sebagai *sample*, dan mewakili berbagai segmen yang ada, seperti jenis kelamin, generasi bergabung dengan Jemaah Tarbiyah, jenjang keanggotaan, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, dan lain-lain. Sangat bermakna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari segmen kader yang berbeda dalam memaknai perubahan identitas kolektif dari gerakan dakwah menjadi partai politik. Apakah mereka memaknainya sebagai “tidak ada perubahan”, “perubahan sebagian”, atau “perubahan total”, dan kemudian dikaitkan dengan pilihan respon terhadap perubahan identitas kolektif tersebut.

Ketiga, dilakukan *policy study* berupa penelitian kualitatif yang lebih mendalam dan spesifik terhadap sistem dan substansi materi *tarbiyah*, serta realita pelaksanaannya di lapangan. Dari penelitian tentang sistem dan substansi materi *tarbiyah* akan diperoleh profil kader yang secara teoretis akan dihasilkan oleh proses *tarbiyah*. Dari penelitian tentang pelaksanaan proses *tarbiyah* di lapangan akan dihasilkan profil kader yang secara nyata dihasilkan oleh proses *tarbiyah.* Di sisi lain, juga dilakukan kajian mendalam tentang profil kader yang dibutuhkan oleh PKS untuk menjawab tantangan yang dihadapinya di arena politik Indonesia. Selanjutnya, diakukan analisis kesenjangan *(gap analysis)* di antara ketiga profil

kader tersebut. Hasil *gap analysis* tersebut dapat menjadi dasar yang lebih komprehensif dan akurat untuk memperbaiki dan menyempurnakan *manhaj tarbiyah* yang dirujuk oleh kaderisasi PKS, sehingga mampu menghasilkan kader yang cocok dengan tantangan nyata di arena politik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

Al–Banna, Hasan, 2007a. *Kumpulan Risalah Dakwah Hasal al-Banna.* Jilid 1. Penerjemah Khozin Abu Faqih. Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat.

Al–Banna, Hasan, 2007b. *Kumpulan Risalah Dakwah Hasal al-Banna.* Jilid 3. Penerjemah Khozin Abu Faqih. Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat.

Al–Banna, Hasan, 2006. *Memoar Hasan al-Banna untuk Dakwah dan Para Dainya.* Penerjemah Salafudin & Hawin Murtadho. Solo: Era Intermedia.

Al-Math'ani, Dr. 'Abdul 'Adhim Ibrahim, 1991. *10 Wasiat Hasal al-Banna.* Penerjemah A. Mudjab Mahali. Solo: CV Pustaka Mantiq.

Al–Qardhawy, Yusuf, 1997. *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al Qur'an dan Sunnah*. Penerjemah Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Al-Qardhawy, Yusuf, 2008. *Umat Islam Menyongsong Abad 21*. Jakarta: Era Intermedia.

Aminuddin, KH. Hilmi, 2008. *Menghilangkan Trauma Persepsi*. Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jenderal DPP PKS & Arah Press.

Aminuddin, KH. Hilmi, 2007. *Dari Qiyadah untuk Para Kader*. Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jenderat DPP PKS & Arah Press.

Baswedan, Anies Rasyid (2004). *"Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory"*. Asian Survey, Vol. 44, No. 5, 669-690.

Bolino, Mark C., William H. Turnley, and James M. Boodgood, 2002. *"Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations"*. The Academy of Management Review, Vol 27, No. 4, 505–522.

Bourdie, Pierre and Loic J. D. Wacquant, 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chichago Press.

Bourdieu, Pierre, 1989. *"Social Space and Symbolic Power"*. Sociological Theory, Vol. 7, No. 1 (Spring), 14-25.

Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice.* London: Cambridge University Press.

Brewer, Marilynn B., 2000. *"Superordinate Goals versus Superordinate Identity as Bases of Intergroup Cooperation",* dalam Dora Capozza & Rupert Brown (eds), *Social Identity Processes*. London: Sage Publications.

Buroway, Michael, 2009. *The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformation, and One Theoretical Tradition.* Barkeley: University of California Press.

Creswell, John W., 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, 2nd ed*. California: Sage Publications.

Creswell, John W., 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Fice Approaches, 2nd ed*. California: Sage Publications.

Delibas, Kayhan, 2009. *"Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey"*. International Political Science Review, Vol. 30, No. 1, 89-103.

Dobbin, Frank, 2008. *"The Poverty of Organizational Theory: Comment on: 'Bourdieu and Organizational Analysis' "*. Sociological Theory, Vol. 37, 53–63.

Dolfsma, Wilfred and Rudi Verburg, 2008. *"Structure, Agency, and the Role of Values in Processes of Institutional Change"*. Journal of Economic Issues, Vol. XLII, No. 4, 1031-1054.

Etzioni, Amitai, 1968. *"Mobilization as a Macrosociological Conception"*. The British Journal of Sociology, Vol 19. No. 3, 243–253.

Fealy, Greg and Anthony Bubalo, 2005. *Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia.* Longueville Media.

Finsveen, Ellen and Wim van Oorschot, 2008. *"Access to Resources in Networks, A Theoretical and Empirical Critique of Networks as a Proxy for Social Capital"*. Acta Sociologica, Vol. 51, No. 4, 293-307.

Goffman, Erving, 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life.* New York: Doubleday.

Gutmann, Amy, 2003. *Identity in Democracy.* New Jersey: Princeton University Press.

Hallett, Tim, 2003. *"Symbolic Power and Organizational Culture"*. Sociological Theory, Vol. 21, No. 2, 128–149.

Hashem, Mazem, 2006. *"Contemporary Islamic Activism: The Shade of Praxis"*. Sociology of Religion, Vol. 67, No. 1, 23-41.

Hefner, Robert, 2001. *"Public Islam and The Problem of Democratization"*. Sociology of Religion, Vol. 62, No. 4, 491-514.

Hwang, Julie Chernov and Quinn Mecham, 2010 *"Institutional Incentives and The Electoral Success of Islamist Parties: Explaining the Divergent Trajectories of the PKS in Indonesia and the AKP in Tukey"*. Makalah, belum diterbitkan.

Jabir, Hussain bin Muhammad bin Ali. *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam, 7th Ed.* Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press.

Jenkins, Richard, 2004. *Social Identity, 2nd Ed.* London: Routledge.

Katz, Robert S. and Richard Mair, 2002. *"The Ascedancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth-Century Democracies"*, dalam Richard Gunter, José Ramon Montero and Juan J. Linz, *Political Party: Old Concepts and New Challenges.* New York: Oxford University Press.

Kauppi, Niilo, 2003. *"Bourdieu's Political Sociology and the Politics of European Integration"*. Theory and Society, Vol. 32, No. 5/6, 775–789

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008. *Undang–undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.*

Leach, Darcy K., 2005. *"The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy across Organizational Forms"*. Sociological Theory, Vol. 23, No. 3, 312–337.

Leiken, Robert S. and Steven Brooke, 2007. *"The Moderate Muslim Brotherhood"*. Foreign Affairs, March/April 2007, 107-121.

Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, 2007. *Manhaj Tarbiyah 1427 H.*

Lipset, Seymour Martin, 1963. *Political Man: The Social Bases of Politics.* New York: Doubleday & Company Inc.

Machmudi, Yon, 2008. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS).* Canberra: ANU E Press.

Machos, C. (1999). *Main Features of the Organizational Structures of Hungarian Parties* (Budapest Papers on Democratic Transition 63). Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies.

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2007. *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera.*

Mandan, Arief Mudatsir (2008). *Ideologi Politik bagi Kaum Santri: Makna Asas Islam bagi Kiprah Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).* Disertasi pada Departemen Sosiologi FISIP UI.

Matta, Anis (2007). *Integrasi Politik dan Dakwah.* Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jenderal DPP PKS & Arah Press.

Michels, Robert, 2001. *Political Parties: A Sociological Studies of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy.* Kitchener, Ontario: Batoche Books.

Moody, James and Douglas R. White (2003). *"Structural Cohesion and Embeddedness: a Hierarchical Concept of Social Groups"*. American Sociological Revew, Vol. 68 No. 1, 103-127.

Morrill, Calvin, Mayer N. Zald and Hayagreeva Rao, 2003. *"Covert Political Conflict in Organizations: Challenges from Below"*. Annual Review of Sociology, Vol. 29, 391–415.

Mukherji, Ananda, Peter Wright and Jyotsna Mukherji, 2007. *"Cohesiveness and Goals in Agency Networks: Explaining Conflict and Cooperation"*. The Journal of Socio–Economics, Vol. 36, 949–964.

Munson, Ziad, 2001. *"Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood"*. The Sociological Quarterly, Vol. 42, No. 4, 487–510.

Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal, 1998. *"Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage"*. The Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2, 242-266.

Nash, Kate, ed., 2000. *Readings in Contemporary Political Sociology*. Meiden, Massachusetts: Blackwell Publishing.

Nasrullah, Rulli, 2007. *Hidayat Nur Wahid.* Bandung: Madania Prima.

Noor, Firman, 2007. *"Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS)"*. Studia Islamica, Vol. 14, No. 3, 449–481.

Organ, D. W., 1988. *Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome.* Lexington, MA: Lexington Books.

Osterman, Paul, 2006. *"Overcoming Oligarchy: Culture and Agency in Social Movement Organizations"*. Administrative Science Quarterly, Vol. 51, No. 4, 622-649.

Özbudun, Ergun, 2006. *"From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development Party in Turkey"*. South European Society & Politics, Vol. 11, No. 3–4, 543–557.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2005. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*

Peek, Lori, 2005. *"Becoming Muslim: The Development of Religious Identitiy"*. Sociology of Religion, Vol. 66, No. 3, 215-242.

Permata, Ahmad-Norma, 2008a. *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006.* Disertasi pada Graduate School of Politics, Westfälische Wilhems-Universität Münster.

Permata, Ahmad-Norma, 2008b. *"Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party in Indonesia"*. ASIEN, Vol. 109, 22-36.

Pina e Cunha, Miguel Arménio Rego, and Teresa D'Oliveira (2006). *"Organizational Spiritualities: An Ideology-Based Typology"*. Business and Society, Vol. 45, No. 2, 211–234.

Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2003. *Sociological Theory, 6th Ed.* Boston: McGraw Hill.

Roemer, John E. (2006). *Political Competition: Theory and Application, 5th Ed.* Harvard University Press.

Rokkan, S., 1970. *Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Sstudy of the Processes of Development.* Oslo: Universitetsforlaget.

Rosenblum, Nancy L., 2003. *"Religious Parties, Religious Political Identity, and the Cold Shoulder of Liberal Democratic Thought"*. Ethical Theory and Moral Practice, Vol. 6, No. 1, 23-53.

Salman, 2006. *"The Tarbiyah Movement,"* Studia Islamika, Vol. 13 No. 2, 171-241.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. *Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah.*

Smith, Philip, 2000. *"Culture and Charisma: Outline of a Theory"*. Acta Sociologica, Vol. 43, No. 2, 101-111.

Tilly, Charles, 1978. *From Mobilization to Revolution.* New York: Random House.

Tilly, Charles, 2000. *"Processes and Mechanism of Democratization"*. Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, 1-16.

Tilly, Charles, 2004. *"Trust and Rule"*. Theory and Society, Vol. 33, No. 1, 1-30.

Todd, Jennifer, 2005. *"Social Transformation, Collective Categories, and Identity Change"*. Theory and Society, Vol. 34, No. 4, 429–463.

Turner, Jonathan H., 1986. *The Structure of Sociological Theory, 4th Ed.* Chicago, Illinois: The Dorses Press.

Van Biezen, Ingrid, 2005. *"On the Theory and Practice of Party Formation and Adaptation in New Democracies"*. European Journal of Political Research, Vol. 44, 147-174.

Van Dyne, Linn, Jill W. Graham, and Richard M. Dienesch, 1994. *"Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation"*. The Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 4, 765-802

Verter, Bradford, 2003. *"Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu Against Bourdieu"*. Sociological Theory, Vol. 21, No. 2, 150-174.

Wahid, Abdurrahman (ed), 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.* Jakarta: LibForAll Foundation.

Waluyo, Sapto, 2009. *"Komunikasi Politik PKS."* Republika, 1 Mei.

Wolinetz, Steven B. (2002). *"Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies"*, dalam Richard Gunter, José Ramon Montero and Juan J. Linz, *Political Party: Old Concepts and New Challenges.* New York: Oxford University Press.

Media Cetak dan Media On-Line

Harian Republika, 1 Mei 2009

Harian The Jakarta Post, 28 dan 29 Maret 2011

www.Kompas.com, 10 Juni 2008

www.berpolitik.com, 13 Juni 2008

www.detik.com, 17 dan 18 Maret 2011

Majalah Tempo, 28 Maret-3 April 2011

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mohon kesediaan Anda untuk menceritakan sejarah keterkaitan/interaksi Anda dengan Jemaah Tarbiyah/PKS.
2. Apa pengalaman Anda yang paling berkesan selama berinteraksi dengan Jemaah Tarbiyah/PKS? Mengapa hal tersebut sangat berkesan bagi Anda?
3. Menurut Anda, mengapa Jemaah Tarbiyah memilih mengubah organisasinya menjadi parpol?
4. Dalam pandangan Anda perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi parpol adalah hal yang positif atau kurang positif? Mengapa?
5. Perubahan apa saja yang paling Anda rasakan antara sebelum Jemaah Tarbiyah berpartai, saat menjadi PK, dan PKS?
6. Mengapa perubahan–perubahan tersebut terjadi?
7. Apakah terdapat perbedaan–perbedaan antara elit partai dan "akar rumput" dalam memandang konsep berpartai di PKS?
8. Mengapa perbedaan–perbedaan tersebut terjadi?
9. PKS memproklamirkan diri sebagai Partai Dakwah. Apa yang Anda pahami dari sebutan "Partai Dakwah"?
10. Menurut Anda, apa perbedaan yang paling hakiki, ciri khas yang paling terasa, antara PKS dengan parpol–parpol lain ?
11. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan–keputusan strategis di PKS?
12. Terdapat kesan bahwa Ketua Majelis Syuro dan beberapa elit partai sangat dominan dalam mekanisme tersebut. Apakah demikian?
13. Hampir seluruh pejabat struktural partai berganti–ganti, namun Ketua Majelis Syuro' dan Sekjen dijabat orang yang sama sejak awal. Mengapa hal ini terjadi?
14. Apakah orientasi Jemaah Tarbiyah berubah setelah menjadi parpol?
15. Sebagian publik melihat PKS semakin tidak berbeda dengan parpol pada umumnya. Menurut pendapat Anda?
16. Apakah perhatian PKS terhadap pembinaan dan pengembangan kader berubah sesudah menjadi parpol? Jika ya, seperti apa perubahan tersebut?
17. Suara PKS di Pemilu 2004 mengalami lonjakan dibandingkan suara PK di Pemilu 1999. Menurut Anda mengapa hal tersebut terjadi?
18. Sebaliknya, suara PKS di Pemilu 2009 mengalami stagnasi, bahkan cenderung menurun dibandingkan suara PKS di Pemilu 2004. Mengapa hal tersebut terjadi?
19. Menurut Anda apa saja tantangan eksternal yang paling utama yang dihadapi oleh PKS saat ini?

20. Apa saja permasalahan/kelemahan internal yang harus segera diatasi oleh PKS?
21. Publik mengidentifikasi adanya “faksi keadilan” dan “faksi kesejahteraan” di dalam PKS. Menurut Anda apakah faksionalisasi tersebut memang ada?
22. Mengapa faksionalisasi tersebut terjadi?
23. Apakah faksi–faksi yang ada bersifat “permanen” atau situasional?
24. Apakah faksionalisasi tersebut hanya merupakan fenomena elit partai di pusat? Atau juga berimplikasi terhadap para kader PKS di daerah?
25. Apakah faksionalisasi tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan serius di tubuh PKS?
26. Pasca Munas 2010, terdapat kesan adanya “dominasi” yang sangat kuat dari faksi Sekjen, baik di struktur DPP, maupun penempatan personalia PKS di alat–alat kelengkapan DPR. Apa pendapat Anda tentang hal ini?
27. Gagasan PKS sebagai “partai terbuka” mengemuka pasca Munas 2010. Apa yang Anda pahami dari gagasan tersebut? Apa implikasinya terhadap posisi objektif PKS di ranah politik Indonesia?
28. Sejumlah kader senior PKS yang tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil partai memilih keluar dari barisan. Sebagian lagi tetap berada di dalam, namun memilih bersikap “pasif” dan kembali mengurus aktifitas “tradisional”–nya. Apa pendapat Anda tentang kondisi ini?
29. Bagaimana kinerja para anggota Dewan dari PKS (baik di pusat maupun di daerah) menurut Anda?
30. Cukup banyak kritik atas sikap anggota DPR dari PKS, menyangkut disiplin, *public statement* yang tidak santun, dll. Bagaimana Anda melihat hal ini?
31. Bagaimana kinerja para pejabat publik dari PKS?
32. Bagaimana prospek PKS dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2014?